



UNIVERSITAS INDONESIA

**DEMOKRASI DELIBERATIF DI ERA OTONOMI DAERAH:
Studi Kasus 'Forum Konstituen' di Kabupaten Bandung**

TESIS

**CANDRA KUSUMA
NPM: 1006745713**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
DEPOK
JULI, 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**DEMOKRASI DELIBERATIF DI ERA OTONOMI DAERAH:
Studi Kasus 'Forum Konstituen' di Kabupaten Bandung**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (MSi) dalam Sosiologi**

**CANDRA KUSUMA
NPM: 1006745713**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
MAGISTER MANAJEMEN PEMBANGUNAN SOSIAL
DEPOK
JULI, 2012**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 07 Juli 2012



(Candra Kusuma)

PERNYATAAN ORISONALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Candra Kusuma
NPM : 1006745713
Tanda Tangan : 
Tanggal : 10 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Candra Kusuma
NPM : 1006745713
Program Studi : Magister Manajemen Pembangunan Sosial,
Departemen Sosiologi, FISIP-UI
Judul Tesis : Demokrasi Deliberatif di Era Otonomi Daerah: Studi
Kasus 'Forum Konstituen' di Kabupaten Bandung

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tesis dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (MSi) pada Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Sosial, Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Lugina Setyawati, Ph.D (.....)

Sekretaris Sidang : Diana T. Pakasi, M.Si (.....)

Pembimbing : Ganda Upaya, M.A (.....)

Penguji Ahli : Iwan Gardono, Ph.D (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 10 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Saya bersyukur mendapatkan kesempatan melanjutkan kuliah pascasarjana, dan dapat menyelesaikannya tepat waktu. Dapat kembali belajar di ruang kelas bagi saya adalah sebuah ‘kemewahan’. Selain untuk tujuan-tujuan pragmatis, ruang tersebut telah memberi saya kesempatan untuk ‘mengisi baterai’ dan merefleksikan sedikit pengetahuan dan pengalaman dari aktivitas dan pekerjaan sebelumnya. Hanya karena pertimbangan pragmatis pula tesis ini ‘harus’ diakhiri, meskipun bagi saya sendiri --meminjam istilah Habermas-- tesis ini sesungguhnya adalah ‘proyek yang belum selesai’.

Saya menyadari bahwa ada banyak pihak yang telah mempengaruhi dan membantu saya sejak dari ‘menetapkan niat’, menjalani perkuliahan, melakukan penelitian dan penulisan tesis, sampai dengan sidang akhir tesis. Sungguh saya tidak sanggup merinci satu persatu kontribusi dan membalas kebaikan maupun dukungan banyak pihak terhadap saya dalam menjalani proses tersebut. Saya hanya mampu mengucapkan terima kasih setulusnya atas semua proses pembelajaran, gagasan, kritik, masukan, bantuan referensi dan informasi, dukungan administrasi, perkawanan, motivasi, nasehat dan doa, terutama kepada:

1. Dosen Pembimbing *Reading Course* dan Tesis: Ganda Upaya, M.A;
2. Panitia Penguji Tesis: Lugina Setyawati, Ph.D; Lidya Triana, M.Si; Diana T. Pakasi, M.Si; dan Iwan Gardono Sudjarmiko, Ph.D;
3. Dosen Pembimbing Akademik: Dr. Erna Karim;
4. Ibu dan Bapak Dosen/Staff Pengajar di MMPS 2010-2012;
5. Pimpinan Program Pascasarjana Departemen Sosiologi FISIP-UI: Lugina Setyawati, Ph.D;
6. Pimpinan Departemen Sosiologi FISIP-UI: Dr. Linda Damayanti;
7. Staff Sekretariat Departemen Sosiologi: Mbak Iled; Mbak Heni; Mbak Rini; Mas Santoso; Mas Agus; dkk.;

8. Kawan-kawan di Forum Aktivist Bandung (FAB): Mas Radhar; Oky; Asdam; Budiayana; Eko, dkk.;
9. Kawan-kawan di Forum Konstituen Kabupaten Bandung: Kang Umar; Heri; Gunawan; Abah Edi; Aji; Panji; Elga; dkk.;
10. Informan penelitian tesis: Pegiat dan peserta Forum Konstituen; Bapak Deden Rumaji (Wakil Bupati Kabupaten Bandung); Bapak Ferry Kurnia Rizkiyansyah (mantan Ketua KPUD Provinsi Jawa Barat, dan Anggota KPU Pusat); Bapak Osin Permana (Ketua KPUD Kabupaten Bandung); Calon Bupati/Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Bandung 2010; Staff Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung; serta Sri Aryani, Heryadi dan Mickael (TIFA);
11. Kawan-kawan MMPS tahun masuk 2010: Hendri Hidayatullah; Julia Kalmirah; Larasati Sekar Rianom; Mohammad Jumhur Hidayat; Nasirin Aziz; Rizki Setiawan; Sri Hayati; Subi Sudarto; Whisnu Yonar Anggono; dan, Yan P. Mandenas. Serta kawan-kawan Pascasarjana Sosiologi S2 Reguler dan S3 tahun masuk 2010;
12. Pak Daan Pattinasarany, dan kawan-kawan ‘Kopkar Mania’ WB Office Jakarta;
13. Juandi dan keluarga di Baleendah, Kabupaten Bandung;
14. Ibu dan Bapak di Jagakarsa, Jakarta Selatan;
15. Istri dan anak-anak: Nina, Danish dan Alvan.

Saya juga meminta maaf atas segala keterbatasan, dan jika ada kesalahan dari diri saya selama menjalani seluruh proses tersebut. Akhir kata, saya berdoa semoga Sang Pemilik Hidup dan Pengetahuan menjadikan upaya ini, dan sekecil apapun hasilnya, sebagai kebaikan dan dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Depok, 10 Juli 2012

(Candra Kusuma)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Candra Kusuma
NPM : 1006745713
Program Studi : Magister Manajemen Pembangunan Sosial
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Demokrasi Deliberatif di Era Otonomi Daerah:
Studi Kasus 'Forum Konstitusi' di Kabupaten Bandung

serta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/canangkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 10 Juli 2012

Yang menyatakan



(Candra Kusuma)

ABSTRAK

Nama : Candra Kusuma
Program Studi : Magister Manajemen Pembangunan Sosial, Departemen Sosiologi, Universitas Indonesia
Judul : Demokrasi Deliberatif di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus 'Forum Konstituen' di Kabupaten Bandung

Tesis ini membahas mengenai Forum Konstituen di Kabupaten Bandung (FKKB), dengan menggunakan metode kualitatif dan strategi penelitian studi kasus. FKKB adalah forum warga sebagai ruang dialog antara konstituen dengan politisi pada Pemilu tahun 2010, yang selanjutnya diinstitutionalisasi menjadi wadah bagi konstituen untuk 'mengawal' (mengontrol dan mempengaruhi) pemerintah yang baru pasca Pemilu. FKKB dapat dipandang sebagai *political public sphere* di mana opini publik dibentuk untuk didialogkan dengan pemerintah. Namun model diskursus Habermas sulit diterapkan secara penuh karena adanya keragaman kompetensi komunikasi, tuntutan untuk mengakomodasi dan mengharmonisasi demi menjaga kohesifitas kelompok, serta pertimbangan waktu untuk dapat segera mengambil keputusan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dilakukan uji coba model-model demokrasi deliberatif lainnya, seperti *deliberative polling*, pemetaan opini publik menggunakan teknologi informasi, referendum, dan lainnya.

Kata kunci:

Demokrasi deliberatif, forum warga, otonomi daerah, partisipasi politik.

ABSTRACT

Nama : Candra Kusuma
Program Studi : Magister Program of Social Development Management,
Department of Sociology, University of Indonesia
Judul : Deliberative Democracy in Regional Autonomy Era: A Case
Study of 'Forum Konstituen' in Bandung District.

This study focuses on Forum Konstituen in Bandung District (FKKB) as a citizens forum that has function as a dialogue space between constituent with politicians in Regional General election phase in 2010. FKKB was institutionalized as a media to 'monitor' (controlling and influencing) newly established government after the local election. FKKB can be regarded as a political public sphere which public public was formed to further to dialogues with local government. The study confirms that ideal discourse conceptualized by Habermas is difficult to be fully implemented because of communication skill diversity, demands of accommodation and harmonization to maintain group cohesiveness and urgency to take decision. This study recommends the need to test the democracy deliberative models such as deliberative polling, opinion public mapping using the information technology, referendum, etc.

Keywords:

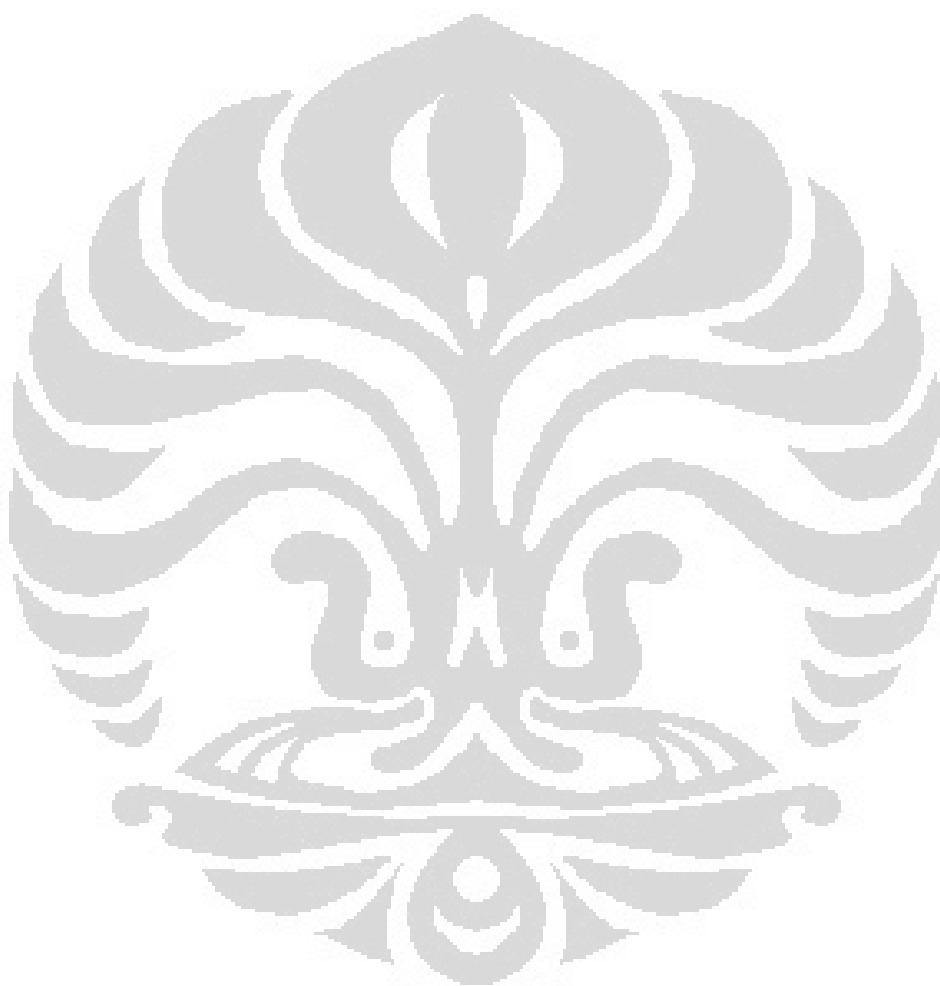
Deliberative democracy, citizen forum, regional autonomy, political participation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR BOKS	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Konteks: ‘Reformasi’ dan Tantangan Demokratisasi di Indonesia	2
1.1.2 Respon Lokal: Tumbuhnya Forum Warga	14
1.1.3 Forum Konstituen di Kabupaten Bandung, Jawa Barat	17
1.2 Alasan Pemilihan Topik	21
1.3 Masalah Penelitian	24
1.4 Pertanyaan Penelitian	24
1.5 Tujuan Penelitian	24
1.6 Signifikansi Penelitian	25
1.7 Delimitasi dan Limitasi	26
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	27
2.1 Hasil-hasil Kajian Sebelumnya	27
2.1.1 Pengertian Forum Warga	27
2.1.2 Efek Forum Warga	28
2.1.3 Kendala Forum Warga	29
2.1.4 Kelebihan dan Keterbatasan Kajian Sebelumnya	33
2.2 Teori yang Akan Digunakan dalam Analisis	34
2.2.1 Teori Partisipasi Politik	34
2.2.2 Teori Demokrasi Deliberatif	36
2.2.3 Teori Demokrasi Asosiatif	48
2.3 Operasionalisasi Konsep	58
2.4 Kerangka Pemikiran dalam Penelitian	60
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	64
3.1 Pendekatan Penelitian	64
3.2 Metode Pengumpulan Data	65
3.3 Peran Peneliti	68
3.4 Waktu Penelitian	69
3.5 Lokasi Penelitian	71
3.6 Sumber Data atau Informan	71
3.7 Metode Analisa dan Interpretasi Data	72
3.8 Validasi Temuan Penelitian	73

3.9	Sistematika Penulisan	74
BAB 4	PERAN FKKB DALAM MENDORONG PARTISIPASI POLITIK DAN UPAYA DEMOKRATISASI DI KABUPATEN BANDUNG	75
4.1	FKKB Sebagai Aktor Demokrasi dan Media Demokratisasi di Daerah	75
4.1.1	Konteks Sosial dan Politik Dibentuknya FKKB	75
4.1.2	Gagasan, Tujuan dan Strategi FKKB	84
4.1.3	Proses dan Penilaian Terhadap Dialog FKKB	98
4.1.4	Peran FKKB	116
4.1.5	Pengaruh FKKB	118
4.1.6	Manfaat FKKB	121
4.1.7	Dampak di Pemerintahan Daerah dan Bagi Masyarakat	126
4.1.8	Masalah dan Kendala FKKB	129
4.1.9	Keberlanjutan, Pendalaman dan Replikasi FKKB	134
4.1.10	Ikhtisar Analisa Mengenai Alasan Pembentukan dan Strategi FKKB	137
4.2	Relasi FKKB dengan Aktor-aktor Demokrasi Lainnya	140
4.2.1	Persepsi dan Relasi FKKB dengan FAB	140
4.2.2	Persepsi dan Relasi FKKB dengan Konstituen	144
4.2.3	Persepsi dan Relasi FKKB dengan Jaringan <i>Civil Society</i>	146
4.2.4	Persepsi dan Relasi FKKB dengan Media	147
4.2.5	Persepsi dan Relasi FKKB dengan Kontestan Pemilu	149
4.2.6	Persepsi dan Relasi FKKB dengan Partai Politik	151
4.2.7	Persepsi dan Relasi FKKB dengan DPRD	154
4.2.8	Persepsi dan Relasi FKKB dengan Pemerintah Daerah	157
4.2.9	Persepsi dan Relasi FKKB dengan KPUD	159
4.2.10	Persepsi dan Relasi FKKB dengan Akademisi dan Perguruan Tinggi	161
4.2.11	Persepsi dan Relasi FKKB dengan Lembaga Donor	164
4.2.12	Ikhtisar Analisa Mengenai Relasi FKKB dengan Aktor Demokrasi Lainnya	168
4.3	Model Kelembagaan Partisipasi Politik yang Dikonstruksikan dan Dipromosikan oleh FKKB	172
4.3.1	Kepesertaan di FKKB	172
4.3.2	Sifat dan Bentuk Kelembagaan FKKB	178
4.3.3	Model Kelembagaan Partisipasi Politik	181
4.3.4	Ikhtisar Analisa Mengenai Model Kelembagaan FKKB	
4.4	FKKB Ditinjau dari Teori tentang Forum Warga, Partisipasi Politik, Demokrasi Deliberatif dan Demokrasi Asosiatif	189
4.4.1	FKKB ditinjau dari Teori tentang Forum Warga	189
4.4.2	FKKB ditinjau dari Teori Partisipasi Politik	196
4.4.3	FKKB ditinjau dari Teori Demokrasi Deliberatif	198
4.4.4	FKKB ditinjau dari Teori Demokrasi Asosiatif	205

4.4.5	Ikhtisar Tinjauan Teoritik Terhadap FKKB	215
BAB 5	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	219
5.1	Kesimpulan	230
5.2	Rekomendasi	235
	DAFTAR REFERENSI	243

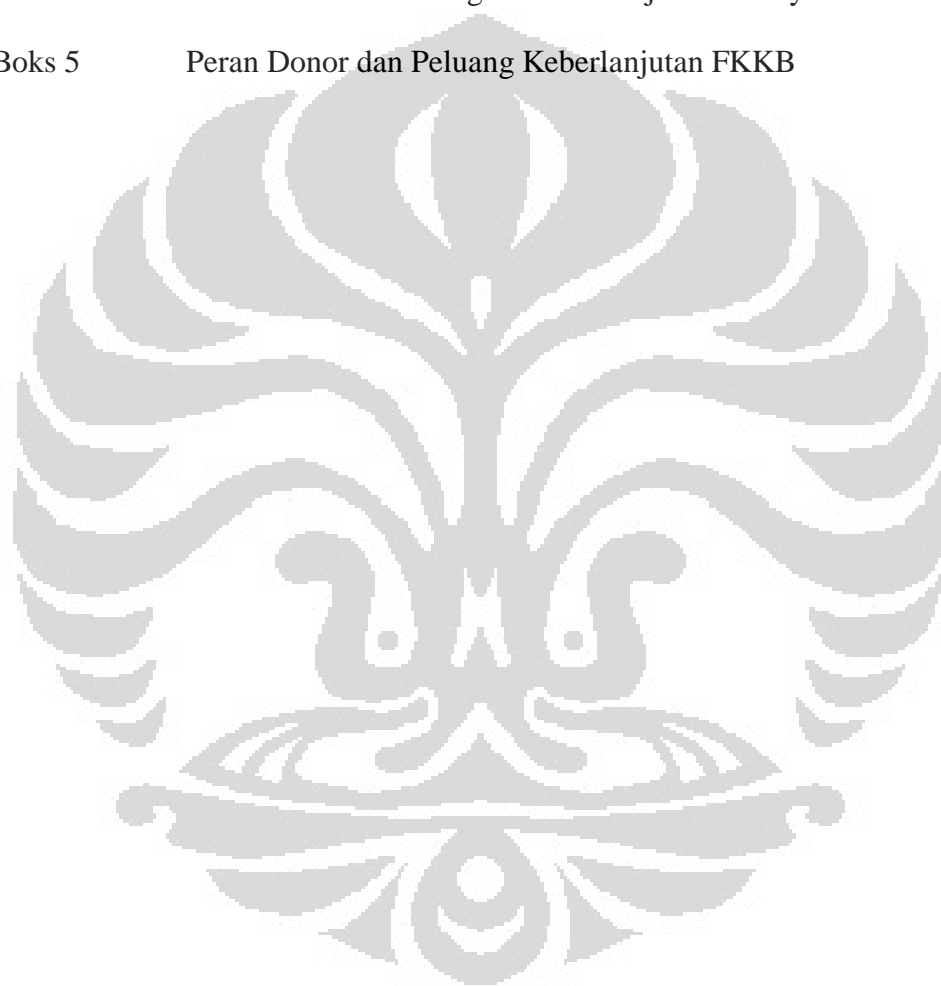


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Hubungan <i>Public Sphere</i> dan Sistem Politik	40
Gambar 2.2	Perkembangan Teori Demokrasi Deliberatif	47
Gambar 2.3	Kerangka Pikir Mengenai Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan, Karakteristik Deliberasi, Arena Partisipasi dan Tujuan Forum Warga di Indonesia	63
Gambar 3.1	Kerangka Penelitian	66
Gambar 3.2	Waktu Penelitian	70
Gambar 4.1	Institusionalisasi FKKB	176
Gambar 4.2	FKKB sebagai <i>Public Sphere</i>	183
Gambar 4.3	Hubungan FKKB sebagai <i>Public Sphere</i> dengan Pemerintah Daerah	199

DAFTAR BOKS

Boks 1	Penggunaan Bahasa dalam Diskusi dan Dialog FKKB	99
Boks 2	Hasil Observasi - Dialog FKKB dan Wakil Bupati	106
Boks 3	Dialog FKKB Sebagai Model Partisipasi Politik yang 'Baru'	114
Boks 4	Perbedaan FKKB dengan Forum Sejenis Lainnya	125
Boks 5	Peran Donor dan Peluang Keberlanjutan FKKB	165

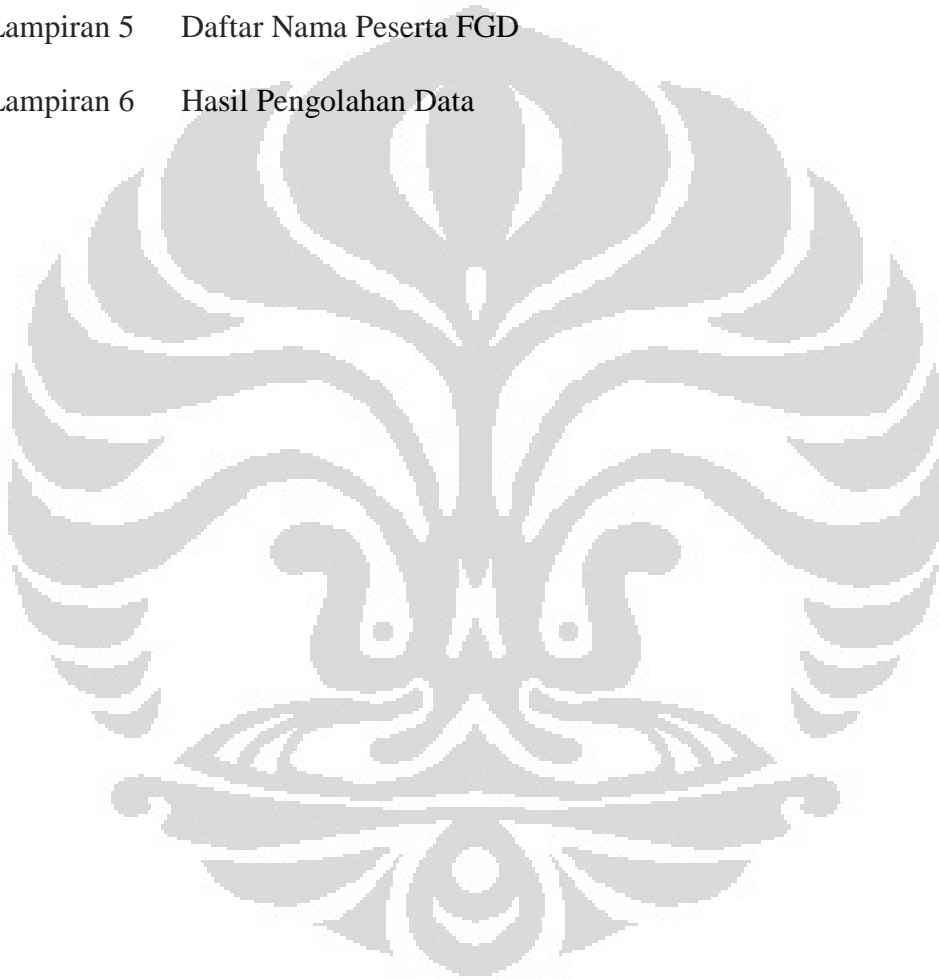


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Ikhtisar Analisa Alasan Pembentukan FKKB Sebagai Aktor Demokratisasi di Kabupaten Bandung	137
Tabel 4.2	Ikhtisar Analisa Strategi dan Upaya FKKB dalam Meningkatkan Demokratisasi di Kabupaten Bandung	139
Tabel 4.3	Ikhtisar Analisa Mengenai Posisi dan Relasi FKKB dengan Aktor-aktor Demokrasi Lain	168
Tabel 4.4	Ikhtisar Analisa Mengenai Model Kelembagaan FKKB	184
Tabel 4.5	Ikhtisar Gagasan Pendalaman dan Replikasi FKKB	188
Tabel 4.6	Ikhtisar Tinjauan Teoritik Terhadap FKKB	215
Tabel 5.1	Proposisi Habermas Tentang FKKB Sebagai <i>Civil Society</i> dan <i>Public Sphere</i>	221
Tabel 5.2	Implikasi Teoritik	223
Tabel 5.3	Proposisi Kebijakan	228

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara	1
Lampiran 2	Pedoman Observasi	10
Lampiran 3	Pedoman FGD	12
Lampiran 4	Daftar Nama Informan Penelitian	14
Lampiran 5	Daftar Nama Peserta FGD	15
Lampiran 6	Hasil Pengolahan Data	16



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena tumbuhnya forum-forum warga di berbagai daerah Indonesia dalam dekade terakhir ini memunculkan pertanyaan, apa sesungguhnya makna dan fungsi dari adanya forum-forum tersebut. Kajian dan penelitian mengenai topik tersebut memang sudah cukup banyak dilakukan, diantaranya yang dilakukan oleh Chandra et.al. (2003), Dwiyanto et.al. (2003), Chotim (2006), dan Sumarto (2009). Namun sejauh pemahaman peneliti, belum banyak yang menganalisis fenomena tersebut dari perspektif teori demokrasi deliberatif dari Jürgen Habermas (dan para 'penerusnya'), dan teori demokrasi asosiatif dari Archon Fung dan Erik Olin Wright. Untuk itu, peneliti mencoba meneliti lebih mendalam pengalaman dari 'Forum Konstituen', yaitu sebuah forum warga di Kabupaten Bandung (yang selanjutnya disebut FKKB),¹ dan menganalisisnya terutama dengan menggunakan perspektif kedua teori tersebut. Meskipun dalam penelitian ini peneliti tidak akan sepenuhnya menggunakan versi teori awal dari Habermas, namun juga akan merujuk pada praktik demokrasi deliberatif di banyak negara yang memodifikasi teori Habermas tersebut.

Kehadiran FKKB sendiri dapat dilihat sebagai bagian dari respon masyarakat lokal atas peluang yang tersedia sebagai hasil dari demokratisasi dan desentralisasi setelah momentum 'Reformasi' 1998. Berbeda dengan forum warga lain yang pada umumnya mencoba terlibat dalam arena pembahasan isu publik maupun perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah, Forum Konstituen justru mencoba memulai proses deliberasi tersebut pada tahap pra Pemilihan Umum Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disingkat Pemilukada), yang kemudian dilanjutkan dengan keterlibatan mereka pada

¹ FKKB adalah nama forum warga yang menjadi wadah dari individu-individu warga yang berasal dari beragam organisasi masyarakat, organisasi profesi dan tokoh masyarakat lainnya di Kabupaten Bandung untuk terlibat aktif mencermati, mendiskusikan, mendialogkan dengan pihak terkait, dan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan di daerah.

perumusan perencanaan pembangunan daerah di tingkat kabupaten. Sebagai gambaran mengenai Forum Konstituen dan forum warga pada umumnya, pada bagian berikut akan diuraikan mengenai konteks, permasalahan dan respon² warga dalam menyikapi peluang dan tantangan bagi partisipasi politik warga yang lebih luas sebagai akibat dari 'Reformasi', demokratisasi dan kebijakan desentralisasi melalui pembentukan beragam forum warga.

1.1.1 Konteks: 'Reformasi' dan Tantangan Demokratisasi di Indonesia

Perubahan kepemimpinan politik nasional akibat memburuknya perekonomian dalam negeri karena pengaruh krisis ekonomi global, adanya konflik di lingkaran elit nasional, maupun aksi kolektif dari rakyat yang mendesakkan 'Reformasi' di tahun 1998 telah mendorong proses demokratisasi yang sangat cepat dan luas di Indonesia. Tuntutan 'Reformasi' dapat dipandang sebagai reaksi atas sistem politik masa Orde Baru yang dinilai banyak pihak sebagai bentuk pemerintah yang 'birokratik otoriter' dimana patronase politik begitu kental sampai ke lapisan masyarakat terbawah.³

Kondisi tersebut mirip dengan apa yang pernah dikemukakan oleh O'Donnell dan Schmitter (1993:77-78), bahwa dalam sebuah rezim 'birokratik otoriter' rakyat dikondisikan untuk mengesampingkan, mengabaikan dan melupakan identitas kemasyarakatan dan politik. Akibatnya masalah kewarganegaraan menjadi sekedar persoalan memiliki kartu identitas penduduk atau paspor, mentaati hukum nasional, dan secara berkala memberikan suara dalam pemilihan umum

² Unsur penulisan kualitatif menurut Booth, et.al. (1995:236), yang dikutip Santana K. (2010:145).

³ Adanya dominasi birokrasi dalam menentukan kebijakan publik dan hasrat kuat akan stabilitas melalui kontrol aparaturnegara/militer di semua bidang dan lapisan kehidupan masyarakat. Diantaranya lihat Budiman, dalam Budiman dan Tornquist, 2001:xxvi; Sumarto, 2005:1; Simpson, 2010; Schuck, dalam Hadiwinata dan Schuck, 2010:77. Lebih jauh, pengamat lain menyebut situasi di Indonesia masa Orde Baru sebagai negara militer rentenir (*rentier militarist state*) karena begitu besarnya peran militer dalam menduduki jabatan publik dan mempengaruhi budaya masyarakat (lihat Tanter dan Young, 1996:9. Hubungan patronase tersebut juga dinyatakan Rasyid, dalam Haris, ed., 2007:7. Anderson (2008) menyebut penguasa Orde Baru sebagai *mediocre tyrant*. Lindsey bahkan menyebut Orde baru sebagai 'negara Mafia' dan 'negara Preman' atau *state premanism* (lihat Coppel, 2006:29). Pada ekstrem yang lain, banyak pula yang justru berpendapat sebaliknya, bahwa masa Orde Baru dan figur Suharto sebagai era yang lebih baik, terutama akibat kekecewaan pada 'Reformasi' yang dianggap tidak cukup berhasil memperbaiki perekonomian rakyat bawah, korupsi di semua level, dan berkurangnya stabilitas ke dalam dan keluar akibat melemahnya peran negara.

(selanjutnya disebut Pemilu). Hal tersebut berdampak pada hancurnya ruang-ruang politik yang terbentuk secara otonom, dan digantikan dengan arena publik yang dikontrol negara. Di arena baru tersebut, perdebatan mengenai berbagai isu publik harus dilakukan berdasar aturan dan syarat yang ditetapkan pemerintah.

'Reformasi' kemudian memunculkan tuntutan yang kuat untuk dapat diciptakannya pemerintahan baru yang lebih demokratis dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (yang lazim disingkat KKN), adanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, adanya kebebasan berorganisasi dan menyatakan pendapat, kewenangan lebih besar bagi daerah, dan adanya partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.⁴

Secara mendasar ada tuntutan untuk membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan politik, sosial dan ekonomi. Tuntutan akan perubahan kebijakan otonomi daerah, dimana daerah dianggap perlu diberi kewenangan yang lebih luas dalam mengurus dirinya sendiri (otonom), melahirkan kebijakan otonomi daerah yang baru, dimana asas desentralisasi menjadi lebih dominan.⁵ Salah satu akibat dari kebijakan tersebut adalah terjadinya pemekaran daerah yang sangat masif sejak tahun 1999.⁶ Terjadilah apa yang disebut para ahli sebagai '*big bang*' *decentralization*, dimana Indonesia berubah dengan cepat dari salah satu negara yang paling sentralistik menjadi negara yang paling terdesentralisasi. Sejak lahirnya kebijakan otonomi daerah yang baru pada tahun 1999 --dan berlaku efektif pada tahun 2001--, proses desentralisasi politik, administratif, dan fiskal telah dilaksanakan pada saat

⁴ Diantaranya lihat Pratikno, dalam Haris, ed., 2007:25; Antlöv, dalam Sumarto, 2009:xxi-xxiii; Dwiyanto, et.al., 2003a:1; Antlöv dan Wetterberg, 2010:24-25.

⁵ Tiga pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, yaitu: (a) Desentralisasi, yakni penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka negara kesatuan. Ada dua jenis, yaitu desentralisasi teritorial (kewenangan mengurus wilayah) dan desentralisasi fungsional (kewenangan mengurus fungsi tertentu); (b) Dekonsentrasi, yakni pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dalam rangka negara kesatuan; (c) Tugas Perbantuan atau *Medebewind*, yakni keikutsertaan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Lihat Fauzi dan Zakaria, 2000:11-12.

⁶ Dalam kurun waktu satu dekade antara tahun 1999-2009 telah terjadi penambahan daerah otonom baru hampir dua kali lipat dari sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2010 tentang Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran, sebelum tahun 1999 jumlah daerah otonom sebanyak 319 daerah (26 provinsi, 234 kabupaten dan 59 kota). Pada tahun 2009 jumlah daerah otonom menjadi 524 daerah (33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota).

bersamaan (World Bank, 2003a:1). Perspektif tersebut tak lepas dari tesis yang kerap dimunculkan dalam literatur internasional, bahwa desentralisasi yang mempromosikan partisipasi dan akuntabilitas pada gilirannya akan mendukung keberhasilan demokratisasi (lihat Manor, 1999; Heller, 2001).

Namun, seperti dikutip Antlöv dan Wetterberg (2011:2) dari Fox (1996), Putnam (2002) dan Cleary (2007), terdapat perbedaan *outcome* dan kualitas ketatapemerintahan pasca desentralisasi, yang (salah satunya) dipengaruhi oleh kemampuan *civil society* untuk terlibat atau berhubungan (*engage*) dengan negara atau pemerintah.

Di Indonesia, desakan demokratisasi tersebut diantaranya berkenaan dengan kebutuhan membangun institusi yang dapat menyediakan insentif untuk pengembangan partisipasi dan *good governance*.⁷ *Governance*, dapat dimaknai sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga negara mengatur sumberdaya serta memecahkan masalah-masalah publik. Terkait dengan hal tersebut, redefinisi peran pemerintah 'pusat' dan pemerintah daerah (selanjutnya disingkat Pemda), serta peran negara dan warga negara menjadi hal yang tidak terelakkan (Sumarto, 2009:3-4). Selain itu jika merujuk pada definisi *good governance* dari UNDP (1997)⁸, ada dorongan untuk memberi porsi yang lebih besar bagi warga negara untuk terlibat aktif dalam berbagai aspek yang berkenaan dengan masalah dan kepentingan publik.

Setelah tahun 1998, negara merespon tuntutan akan demokratisasi dan *good governance* tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan penting, diantaranya: kebijakan yang memperluas desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintahan daerah, berikut kewenangan pengelolaan keuangan daerah; kebebasan pers; keleluasaan membentuk partai politik dan organisasi masyarakat; pemilihan kepala negara dan kepala daerah

⁷ Schiller (dalam Sumarto, 2009:xviii-xix), memandang perlunya ada *state formation*, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan negara-masyarakat sebagai hasil dari perubahan kapasitas negara dan aktor-aktor sosial, ekonomi dan politik lainnya.

⁸ UNDP (1997) mendefinisikan *governance* sebagai "*the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country's affairs at all levels. It comprises the mechanisms, processes and institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differences*".

secara langsung; hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan kebijakan publik; kebijakan mengenai akses informasi publik; kebijakan pemberantasan korupsi;⁹ dan sebagainya. Di sejumlah daerah, baik atas inisiatif sendiri ataupun didorong oleh skema program yang didukung oleh NGO maupun lembaga donor, juga cukup banyak yang telah membuat kebijakan daerah yang mengatur tentang partisipasi atau keterbukaan informasi di daerah.¹⁰

Tidak hanya berupa kebijakan daerah, cukup banyak Pemda yang mencoba inovasi lokal untuk mengembangkan akses informasi pemerintahan kepada masyarakat, diantaranya program yang membuat masyarakat bisa berkomunikasi langsung dengan pemerintah dan *stakeholder* lainnya. Sebagai contoh, hasil studi yang dilakukan JPIP tahun 2005-2006 melaporkan bahwa di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah banyak Pemda menggunakan media radio dan televisi pemerintah maupun swasta lokal sebagai sarana berkomunikasi dengan masyarakat, seperti: program ‘Bupati Menjawab’ (di Kabupaten Banyumas, Pemasang); program ‘Selamat Pagi Bupati’ (Kebumen); program ‘Tamu Kita’ (Kudus); program ‘Dialog Interaktif Pemda’ (Tegal, Pekalongan dan Kota Pekalongan); program radio ‘Otak Atik Solusi’ (Bantul); program ‘Walikota

⁹ Kebijakan tersebut, diantaranya: TAP MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional; TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers; UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perubahannya yaitu UU No. 32 Tahun 2004, dan perubahannya lagi dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu dan perubahannya di UU No. 12 tahun 2003; Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (khususnya mengenai ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan); UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Amendemen UUD 1945 (terutama Amendemen 2, pada bagian mengenai hak asasi manusia).

¹⁰ Peraturan daerah (Perda) atau kebijakan daerah setingkat keputusan Bupati/Walikota mengenai partisipasi masyarakat menggunakan nama yang beragam, seperti peraturan daerah tentang partisipasi publik, konsultasi publik, transparansi dan partisipasi. Kebijakan semacam itu diantaranya ada di Kabupaten Solok, Tanah Datar, Bantul, Ngawi, Kebumen, Lamongan, Bulukumba, Bolaang Mongondow, Gowa, Boalemo, Magelang, Lebak, Bandung, dan lainnya (lihat BAPPENAS, 2009:48; atau lihat juga <http://www.kebebasaninformasi.org/index2.php?pilih=perun&pilih2=daerah>, diakses 10 Oktober 2011). Khusus di Kabupaten Bandung, payung hukum di tingkat daerah yang mengatur soal partisipasi publik ini adalah Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi, dan Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Menyapa' (Kota Yogyakarta); program 'Obrolan Walikota' (TVRI Yogya dan Yogya TV); dan lainnya.¹¹

Menurut Dwiyanto, et.al. (2003a:190), partisipasi dalam proses kebijakan publik memang merupakan hal penting yang mendasari pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk membuat proses kebijakan publik menjadi lebih dekat dengan dengan warga sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses tersebut. Dwiyanto juga mengutip pendapat *de Asis* (2002) mengenai cara yang harus ditempuh untuk menciptakan proses kebijakan menjadi lebih partisipatif, yaitu: (a) Menjamin kemampuan aktor dan *stakeholders* untuk memperoleh informasi dari pemerintah; (b) Adanya transparansi dalam pemerintahan melalui pertemuan secara terbuka dengan masyarakat dan *stakeholders* lainnya; (c) Melaksanakan dengar pendapat dan membuat keputusan bersama pada rancangan, keputusan, peraturan, dan hukum; (d) Melibatkan warga negara untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan.¹²

Dengan adanya payung hukum terkait jaminan hak politik warga negara yang telah diulas sebelumnya, secara normatif peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan dan kontrol atas kebijakan publik memang menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya.¹³ Pelimpahan kewenangan yang lebih besar dari pusat kepada pemerintah daerah berikut kewenangan dalam pengelolaan anggarannya juga memberi peluang lebih besar kepada pemerintah dan masyarakat di daerah untuk menentukan sendiri pembangunan di daerahnya.¹⁴ Menurut Ryaas Rasyid -- salah seorang arsitek kebijakan otonomi daerah tahun 1999--, visi otonomi daerah

¹¹ Lihat Jawa Post Institute of Pro Otonomi (JPIP) (2006:123). Perlu ditambahkan, hasil studi Dwiyanto, et.al. (2003b:46) melaporkan bahwa forum pertemuan antara birokrat dan warga memang lebih banyak ditemukan di Jawa dibandingkan di luar Jawa.

¹² Negara-negara OECD dan lembaga keuangan/pembangunan internasional umumnya menggunakan terminologi '*voice*' bagi aktivitas penyampaian aspirasi warga (baik melalui dialog, lobby, perencanaan bersama, protes/demonstrasi, dll.) kepada pemerintah khususnya berkenaan dengan isu pelayanan publik dan anggaran publik. Ulasan mengenai hal ini diantaranya dapat dilihat pada Schiampo-Campo dan Sundaram (Asian Development Bank, 2001), dan World Bank (2003b).

¹³ Diantaranya lihat Antlöv, dalam Sumarto, 2009:xxii.

¹⁴ Menurut UU No. 32 Tahun 2004, tujuan otonomi daerah ada tiga, yaitu meningkatkan pelayanan publik, daya saing daerah dan kesejahteraan rakyat.

dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama, yaitu politik, ekonomi dan sosial budaya. Di bidang politik, otonomi daerah dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Dalam hal ini, demokratisasi pemerintah juga berarti transparansi kebijakan (Rasyid, dalam Haris, ed., 2007:9-10).

Menurut Hasanuddin (dalam Djojosekarto dan Hauter, 2003:14), keuntungan dari model pemilihan langsung seperti yang berlangsung saat ini di Indonesia, antara lain: (a) Rakyat dapat memilih pemimpinnya sesuai hati nuraninya sekaligus memberikan legitimasi kepada pemimpin terpilih; (b) Menghindari peluang distorsi oleh anggota DPRD untuk mempraktekkan politik uang; (c) Terbuka peluang munculnya calon-calon kepala daerah dari individu-individu yang memiliki integritas dan kapabilitas dalam memperhatikan kepentingan rakyat; (d) Mendorong calon kepala daerah mendekati rakyat agar bisa terpilih; (e) Mendorong terjadinya peningkatan akuntabilitas pertanggungjawaban kepala daerah kepada rakyat.

Dikaitkan dengan konteks otonomi daerah di Indonesia, gagasan demokratisasi tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Hasanuddin menambahkan bahwa pemerintahan lokal yang demokratis tidak hanya menempatkan otonomi daerah dalam konteks sebatas hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, tetapi lebih mendasar lagi yaitu hubungan negara dan masyarakat (*state-society relation*). Dalam hal ini, pemerintah lokal yang demokratis dapat dimaknai sebuah tata pemerintahan di tingkat lokal yang tidak hanya melibatkan perangkat birokrasi tetapi juga masyarakat secara luas melalui interaksi yang berlangsung secara demokratis.

Ada dua keuntungan dari proses tersebut, yaitu: (a) Pemerintahan lokal yang demokratis dapat meningkatkan kinerja sistem demokrasi pada tingkat lokal,

karena masyarakat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam penyusunan kebijakan di daerah bersangkutan (*policy formulation*) maupun pelaksanaannya (*policy implementation*) termasuk dalam hal ini melakukan pemilihan kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan (b) Aparat pemerintah memiliki kesempatan untuk dapat berperan lebih efektif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat sehingga dapat mendorong akuntabilitas mereka.¹⁵ Pandangan tadi sejalan dengan pendapat Lasswell mengenai 'ilmu kebijakan', dimana tujuan utama dari proses penyusunan kebijakan adalah bukan hanya sekedar memberikan sumbangan pada pembuatan keputusan yang efisien, namun juga memberikan pengetahuan dalam rangka pengembangan pelaksanaan demokrasi.¹⁶

Di Indonesia, demokratisasi dalam proses pemilihan kepala daerah juga telah mendorong lahirnya kebijakan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2004, dan pemilihan kepala daerah secara langsung (Gubernur, Bupati dan Walikota beserta wakil-wakilnya) yang dimulai tahun 2005.¹⁷ Secara teoritik, dikaitkan dengan teori mengenai elit dan kekuasaan (*power*) yang

¹⁵ *ibid*:12-13.

¹⁶ Lihat Dunn (2003:70), yang mengutip Lasswell dan Kaplan (*Power and Society: A Framework for Political Inquiry*, 1950). Dunn berpendapat bahwa secara umum, penyusunan kebijakan setidaknya akan melalui tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Persoalannya adalah baik metode dan teknis penyusunan kebijakan pada umumnya tidak menjelaskan dimana peran masyarakat/warga dalam proses tersebut. Pada umumnya proses tersebut hanya atau lebih banyak melibatkan para birokrat, teknokrat dan konsultan kebijakan saja (hal. 24). Sumber data dan informasi yang digunakan lebih banyak bersifat data sekunder/statistik. Masalahnya, dari hasil pengamatan peneliti sendiri terhadap wacana mengenai data pembangunan di Indonesia, sumber data tersebut seringkali kurang mampu menangkap dinamika perkembangan masalah dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Terlebih di negara-negara 'berkembang' seperti Indonesia, dimana data statistik kerap kali 'diragukan' kelengkapan dan validitasnya, sehingga pada dasarnya juga menyulitkan untuk digunakan sebagai bahan analisa penyusunan dan evaluasi kebijakan.

¹⁷ Berdasarkan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh legislatif di daerah, namun kontrol dan intervensi pusat sangat kuat. Dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah masih dipilih oleh DPRD secara mandiri. Selanjutnya, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, rakyat dapat memilih langsung kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah wakil kepala daerah. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005, yaitu di Kabupaten Kutai Kertanegara. Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dianggap sebagai bagian dari rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama 'pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah' atau 'Pemilukada'. Pemilukada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pemilukada DKI Jakarta 2007. Selanjutnya berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008, dimungkinkan bagi calon kepala daerah yang berasal dari pasangan calon perseorangan (bukan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik), dengan syarat memiliki bukti dukungan masyarakat dalam jumlah tertentu.

dikembangkan oleh Mosca, Pareto, Michels, Weber dan C.W. Mills,¹⁸ konsep dan kebijakan Pemilu dan Pilkada pada dasarnya terkait dengan mekanisme sirkulasi (pergantian) elit di pemerintahan pusat dan daerah melalui proses pemilihan oleh rakyat yang dilakukan secara reguler, formal, dan damai. Disinilah partisipasi politik warga paling minimal terjadi.

Pada faktanya Pemilu dan Pilkada baik sebelum dan sesudah 'Reformasi' ternyata masih memiliki sejumlah kelemahan mendasar. Djojosoekarto dan Hauter (2003:8) mengidentifikasi beberapa kelemahan tersebut, antara lain: (a) Praktek *money politics* yang sulit dibendung, sehingga kerap kali memicu konflik;¹⁹ (b) Lemahnya akses dan kontrol warga terhadap calon dalam pemilihan kepala daerah; (c) Lemahnya akuntabilitas proses pemilihan kepala daerah.²⁰ Masalah-masalah inilah yang membuat sebagian pengamat memandang Pemilu dan Pilkada belum mencerminkan praktek demokrasi yang sesungguhnya, atau bahkan hanya dipandang sebagai ajang pertarungan kepentingan 'kaum bermodal' saja.²¹

¹⁸ Menurut Best dan Higley (2010:1) yang mengutip Linz (2006), sebagian pemikir teori elit seperti Mosca (1923, 1939) dan Michels (1915, 1962) menilai praktek demokrasi pada akhirnya menjadi sekedar kompetisi diantara para elit sendiri. Pilihan dan kepentingan para pemilih (*voter*) telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga merasa memiliki pilihan yang berbeda dan dapat diperbandingkan.

¹⁹ Harian KOMPAS tanggal 21 Desember 2010 melaporkan bahwa pada seluruh pelaksanaan Pilkada tahun 2010 saja tercatat ada 1.517 kasus politik uang di seluruh daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada pada tahun itu. Sekitar 60% diantaranya dalam modus pemberian uang secara langsung, sedang sisanya berupa pemberian dalam bentuk barang, dll. Lihat Harahap, 2011:4-5.

²⁰ Salah satu indikatornya adalah maraknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan pimpinan daerah dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil studi Rinaldi, et.al. yang mengutip 'Laporan Pelaksanaan Tugas Panja Penegakan Hukum dan Pemerintahan Daerah' yang disusun oleh DPR-RI tahun 2006 melaporkan bahwa sejak tahun 2002 lalu telah terjadi gelombang pengungkapan kasus dugaan korupsi DPRD di berbagai daerah. Berdasarkan data Kejati seluruh Indonesia sampai dengan bulan September 2006 terdapat 265 kasus korupsi DPRD dengan jumlah tersangka/terdakwa/terpidana sebanyak 967 orang anggota DPRD yang ditangani oleh 29 Kejati. Pada periode yang sama, telah dikeluarkan ijin pemeriksaan untuk anggota legislatif: 327 orang anggota DPRD provinsi dan 735 DPRD kabupaten/kota. Lihat Rinaldi et.al., 2007:2.

²¹ Satu contoh dapat dilihat pada kajian Koswara (2006) mengenai kasus Pilkada Langsung di Kota Cilegon tahun 2005. Menurutnya, Pilkada Langsung hanya menjadi arena kontestasi dua varian kapitalisme di Indonesia, yaitu kapitalisme neo-liberal dan kapitalisme rente. Hal tersebut disebabkan oleh diterapkan liberalisasi politik melalui kebijakan otonomi daerah. Sayangnya Koswara hanya berhenti pada analisis ini saja namun tidak memberikan alternatif apa yang perlu dilakukan untuk menyikapi atau bahkan mengatasi hal tersebut.

Selain kendala pada praktik pemilihan langsung kepala daerah tersebut, akuntabilitas pemerintahan dan partisipasi publik dalam proses penyusunan dan kontrol kebijakan berikut penganggarannya tampaknya belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hasil studi Dwiyanto, et.al. di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia melaporkan bahwa akses masyarakat terhadap sejumlah informasi publik di daerahnya umumnya masih rendah. Pemerintah daerah juga cenderung tertutup ketika membuat prosedur pelayanan publik dan perencanaan program dan proyek pembangunan. Sementara partisipasi warga dan pemangku kepentingan dalam berbagai proses kebijakan di daerah juga dinilai masih rendah. Rendahnya pemanfaatan usulan dan masukan tersebut menjadi disinsentif bagi para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses kebijakan. Akibatnya kualitas kebijakan publik di daerah menjadi dipertanyakan, karena banyak kebijakan di daerah yang kemudian dianggap gagal menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. Meskipun ketersediaan sarana dan mekanisme penyampaian keluhan dan aspirasi menunjukkan kecenderungan meningkat, namun umumnya kurang efektif (Dwiyanto, et.al., 2007:14-17).

Pada akhirnya kondisi di atas memunculkan pertanyaan mengenai apa sesungguhnya motif dan dampak dari gencarnya tuntutan pemekaran daerah di Indonesia. BAPPENAS dan UNDP (2008) mengutip hasil penelitian Fitriani et.al. (2005) yang menyatakan bahwa pemekaran telah membuka peluang terjadinya *bureaucratic and political rent-seeking*, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Karena adanya tuntutan untuk menunjukkan kemampuan menggali potensi wilayah, maka banyak daerah menetapkan berbagai pungutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menyebabkan terjadinya perekonomian daerah berbiaya tinggi. Disisi lain, muncul dugaan bahwa pemekaran wilayah merupakan bisnis kelompok elit di daerah yang sekedar menginginkan jabatan dan posisi. Euforia demokrasi dan partai-partai politik yang memang terus tumbuh, dimanfaatkan kelompok elit ini untuk menyuarakan 'aspirasinya' mendorong terjadinya pemekaran (BAPPENAS dan UNDP, 2008:1). Banyak pihak yang kemudian menenggarai bahwa kebijakan otonomi dan pemekaran daerah saat ini hanya memunculkan 'raja-raja kecil' saja, yaitu ketika

para eksekutif, legislatif dan kelompok-kelompok dominan di daerah dapat bertindak untuk kepentingan diri dan kelompoknya tanpa terlalu mempertimbangkan kepentingan nasional ataupun masyarakat yang ada di daerahnya sendiri.²²

Kontestasi kepentingan diantara para aktor di daerah khususnya dari sisi eksekutif dan legislatif turut mewarnai proses penyusunan kebijakan dan anggaran di daerah. Banyak ahli yang menilai masih kuatnya *elite capture* dalam proses penganggaran di daerah dibanding untuk kepentingan warganya.²³ Pada sejumlah kasus, inisiatif untuk mengembangkan model perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah memang menimbulkan harapan akan perubahan. Studi Takeshi (2006) mengenai mekanisme perencanaan kegiatan pembangunan yang melibatkan organisasi dan kelompok masyarakat di Kabupaten Bandung (Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang) sampai tingkat tertentu dapat menekan adanya pengaruh politik dari para elit di daerah yang dapat merugikan kepentingan publik dalam penentuan kegiatan dan anggaran tersebut. Namun kondisi tersebut sangat dinamis, sehingga masih juga amat rentan dari intervensi kepentingan elit tersebut. Antlöv, Brinkerhoff, dan Rapp (2010:436) mencatat bahwa pada banyak kasus, aktor-aktor pemerintah masih mengontrol akses masyarakat dan mendominasi berbagai arena analisis dan debat dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Musrenbang dan konsultasi publik seringkali hanya bersifat diseminasi informasi atas keputusan yang sudah dibuat sebelumnya.

Selain itu, ada juga pengamat yang menilai bahwa struktur organisasi pemerintah daerah pada umumnya juga masih belum memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi publik, sekalipun struktur organisasi tersebut merupakan hasil reorganisasi yang telah dilakukan pada awal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Hasil penelitian LIPI (2001) di Kabupaten Bandung contohnya,

²² Analisis awal sekali mengenai kecenderungan tersebut lihat *Gejolak Tuntutan Otonomi Daerah: Perspektif Ekonomi Politik dan Implikasinya*, INDEF's Policy Assessment, September 1998:1.

²³ *Elite capture* dalam konteks desentralisasi merujuk pada adanya kemungkinan sumberdaya publik (keputusan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksana pelaksana program/proyek, dll.) 'ditawan' atau dikendalikan oleh para elit lokal atau kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan di daerah (*local power groups*). Lihat Chowdhury dan Yamauchi, 2010:2.

melaporkan bahwa meskipun telah dilakukan dua kali restrukturisasi organisasi perangkat daerah, namun struktur organisasi yang ada masih diwarnai resistensi nilai-nilai birokrasi lama dengan ciri-ciri birokrasi tradisional (*traditional bureaucratic authority*). Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan partisipasi publik masih dipandang sebagai persoalan yang berada diluar wilayah manajemen pemerintahan seperti yang terjadi di masa sebelumnya. Dalam hal ini program pemberdayaan masyarakat dan partisipasi publik masih bersifat *ad-hoc* dan parsial serta belum menjadi bagian integral dari keseluruhan manajemen pemerintahan dan pembangunan di kabupaten tersebut.²⁴

Hasil studi USAID tahun 2006 juga mengkonfirmasi lemahnya pengaruh *civil society* dalam mendorong demokratisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya berkenaan dengan upaya peningkatan pelayanan publik di daerah. Laporan studi tersebut menyatakan bahwa karakteristik dari berbagai inovasi pelayanan publik di daerah bukan terutama disebabkan oleh adanya tekanan dari kelompok-kelompok masyarakat, dan bukan pula karena adanya desain atau rencana kerja yang baik yang disusun oleh internal birokrasi di daerah ataupun dengan dukungan tenaga konsultan profesional. Inovasi-inovasi tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: (a) Kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah; (b) Kepala daerah memiliki koneksi yang baik ke pemerintah pusat, baik melalui jalur birokrasi dan/atau partai politik; dan (c) Adanya dukungan dari lembaga donor. Faktor kepemimpinan kepala daerah maupun sokongan lembaga donor tersebut membuat berbagai inovasi tersebut rentan untuk mampu bertahan lama dan dikembangkan lebih lanjut, karena bergantung pada figur dan dukungan dana yang tentunya harus diasumsikan hanya bersifat sementara saja (USAID, 2006:68).

Dari seluruh paparan tersebut, terlihat bahwa meskipun 'Reformasi' telah memberi keterbukaan politik, namun demokratisasi di Indonesia masih memiliki sejumlah masalah mendasar. Salah satunya, proses pemilihan pimpinan pemerintahan dan legislatif, penyusunan kebijakan publik dan penganggarannya,

²⁴ Wardiat, et.al., "Implementasi Otonomi Daerah antara Restrukturisasi dan Pengembangan Potensi Lokal: Kasus Kabupaten Bandung dan Kabupaten Lebak" (2001), yang dikutip dalam Wardiat, et.al., 2006:18.

serta kontrol terhadap pelaksanaan dan hasil pembangunan tidak hanya masih bersifat elitis, bahkan cenderung menjadi ajang meraih keuntungan pribadi dan kelompok tertentu saja. Meski secara legal telah ada payung hukum bagi partisipasi masyarakat, namun dalam praktiknya hal tersebut belum masih belum efektif dapat dilaksanakan. Akibatnya keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan dari upaya demokratisasi dan desentralisasi tampaknya belum menunjukkan perkembangan yang positif.²⁵ Kalaupun ada inisiatif *reform* di daerah, hal tersebut masih bergantung pada figur kepala daerahnya karena belum terinstitusionalisasi sehingga sulit diharapkan keberlanjutan dan pengembangannya.

Mengacu pada hasil studi Governance and Decentralization Survey 2 (GDS2) yang dilakukan oleh World Bank (2006), berdasarkan analisis biaya ekonomi yang dikeluarkan selama periode pemekaran daerah 2001-2005, pemekaran daerah yang massif tersebut justru telah mengurangi kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam mengalokasikan belanja pembangunan. Pemekaran telah menyita sebagian sumber daya dan anggaran untuk berbagai pengeluaran penyiapan infrastruktur pemerintahan di daerah otonom baru (seperti untuk Pemilukada, pegawai, penyiapan gedung pemerintahan, dll.). Selain itu, masyarakat di daerah otonom baru ternyata memiliki kepuasan yang lebih rendah terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi publik dan kepolisian. Selain itu, daerah otonom baru lebih rendah dalam hal program penanggulangan kemiskinan di daerah dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat lokal (DSF, 2007:61-62).

Dari uraian di atas, tergambar sebagian dari masalah societal berkenaan dengan demokratisasi di Indonesia saat ini. Semua struktur dan prosedur yang sebagian besar diantaranya sudah tersedia untuk menjadikan Indonesia sebagai --apa yang jika dilihat dari perspektif Habermas dapat disebut-- ‘negara hukum demokratis’,

²⁵ Sebagai gambaran, hasil analisa YAPPIKA (2006) mengenai pemberitaan media massa di Indonesia tahun 2005-2006 menyimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak menjadi semakin akuntabel, responsif, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Lambannya pemerintah suatu kabupaten/kota merespon kebutuhan pembangunan yang dikeluhkan masyarakat memperlihatkan jurang pembangunan masih menganga lebar.

tampaknya belum menjamin bahwa dalam prosesnya dapat berjalan mulus seperti yang diinginkan. Di tingkat makro, terbangunnya kultur demokrasi maupun kultur birokrasi yang melayani dan peduli pada kepentingan publik, tampaknya masih menjadi persoalan yang harus dihadapi di semua lapisan masyarakat dan birokrasi. Karenanya, di tingkat nasional, penyempurnaan kebijakan, kelembagaan dan mekanisme desentralisasi di Indonesia, yang sekaligus diharapkan mampu membangun kultur demokrasi dan birokrasi yang lebih baik, menjadi kebutuhan yang harus segera direspon agar masalah-masalah di atas tidak menjadi berlarut-larut.

1.1.2 Respon Lokal: Tumbuhnya Forum Warga

Beriringan dengan perkembangan berbagai kemajuan dan kendala dalam proses demokratisasi di tingkat nasional yang telah dipaparkan di atas, ada perkembangan penting dan menarik untuk dicermati di tingkat lokal. Warga di berbagai daerah menyambut peluang dari berkembangnya gagasan mengenai deliberasi politik tersebut dengan membentuk berbagai kelompok, organisasi, atau asosiasi-asosiasi warga dalam rangka memperjuangkan aspirasi mereka. Nama dan bentuk asosiasi tersebut beragam, namun secara umum dapat disebut sebagai 'Forum Warga' (*citizen forum*), 'Forum Kota' (*city forum*) dan lainnya.²⁶ Secara sosiologis, tumbuhnya forum-forum warga tersebut dapat dikaitkan dengan konsep *civil society*.

Dari perspektif teori demokrasi deliberatif, keberadaan asosiasi semacam forum warga tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan *civil society*. Namun, seperti diungkapkan Habermas (1998a:364), warga hanya dapat mengkapitalisasi *social power* (kekuatan sosial) dan mengubahnya menjadi *political power* (kekuatan politik) jika mereka mampu menyampaikan kepentingan-kepentingannya dalam bahasa yang dapat menghadirkan alasan-alasan yang meyakinkan dan menyebarkan orientasi nilai yang mereka miliki. Kemauan warga

²⁶ Lihat Chandra, et.al., 2003:8; Sumarto, 2009:36; dan Dwiyanto, et.al., 2003:191. Menurut Sumarto, ada pula istilah 'Deliberative People Forum' yang digunakan oleh Antlöv dalam "Filling the Democratic Deficit: Deliberative Forums and Political Organizing in Indonesia", dalam Loh dan Ojendal, 2005:233-258.

negara untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam pengaturan hidupnya tersebut menurut Faulks (2010:226) merupakan inti dari tumbuhnya *civil society* dan menghasilkan budaya politik bersama. Warga yang memiliki kemauan berpartisipasi tersebut yang dapat disebut *active citizen*. Dalam hal ini, kehadiran asosiasi-asosiasi yang muncul dari warga (untuk membedakan dengan asosiasi publik yang diinisiasi oleh negara atau pemerintah) pada umumnya akan memberikan kontribusi pada perkembangan demokrasi secara keseluruhan (diantaranya lihat Hirst, 1994; Cohen dan Rogers, 1995; Fung dan Wright, 2003).

Tumbuhnya forum-forum warga tersebut memunculkan harapan akan menguatnya *civil society* di Indonesia. Secara teoritik, *civil society* dimaknai sebagai organisasi bentukan warga yang mandiri dan relatif bebas dari pengaruh penguasa. Sebagian pemikir memaknai *civil society* sebagai institusi 'ketiga' selain *state* (negara) dan *market* (pasar). *Civil society* merupakan asosiasi sosial yang menjunjung nilai otonomi, kesukarelaan (*voluntarism*), persamaan hak, dan *civility* (kepatuhan terhadap hukum dan aturan main) serta menjembatani pemerintah dan rakyat sehingga memberikan kontribusi positif terhadap demokrasi. Keberadaan *civil society* ini dapat memperkuat kualitas *governance*. Sumarto (2009:6) mengutip Putnam (1995) yang menyatakan bahwa keberadaan *civil society* akan memperkuat *civic engagement* (keterlibatan warga) dan *civic trust* (rasa saling percaya), yang berkaitan dengan *social capital* (modal sosial) di komunitas tersebut.

Perkembangan forum warga tadi juga akan mendukung dinamika dari proses deliberatif berupa keterlibatan masyarakat secara sistematis dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan evaluasi program. Dalam skema tersebut model partisipasi masyarakat bergeser dari yang sebelumnya terfokus pada penerima manfaat atau kelompok marginal, ke bentuk pelibatan warga yang lebih luas di bidang-bidang yang mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Upaya tersebut dapat mengatasi hilangnya kepercayaan pada pemerintah maupun krisis legitimasi negara. Menurut Antlöv, ada empat sasaran terkait dalam proses deliberatif ini: (a) membuat kontrak baru antara masyarakat dan negara; (b) merekonstruksi kelembagaan negara dengan membuatnya lebih

efektif dan akuntabel; (c) mendorong adanya budaya politik yang baik dengan penyelenggaraan forum kewargaan dari bawah; dan (d) menata ulang hubungan kekuasaan dalam masyarakat dengan memberi saluran bagi kaum miskin dan mereka yang kurang diuntungkan.²⁷ Secara konseptual, kehadiran forum warga dan proses deliberatif tadi telah memperluas *public sphere* (ruang publik) di daerah. Melalui perluasan *public sphere* tersebut tentunya diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas partisipasi dan kebijakan publik yang dihasilkan.

Paparan Antlöv tersebut juga tidak terlepas dari pengalaman empirik di sejumlah negara lain. Studi World Bank menunjukkan bagaimana konsep *participatory democracy* atau *citizen participation* muncul dan berkembang di negara-negara Amerika Latin (Mexico, Brasil, Colombia, Bolivia dan Ekuador) di era 1980-an sebagai tindak lanjut dari kebijakan desentralisasi di negara-negara tersebut.²⁸ Belakangan, literatur internasional kerap menyandingkan pengalaman di Negara Bagian Kerala (India, dimulai pertengahan 1990-an), Kota Porto Alegre (ibukota Negara Bagian Rio Grande do Sul di Brasil, sejak akhir 1990-an) dan Negara Bagian Rio Grande do Sul (sejak sekitar tahun 2006) sebagai contoh daerah yang dinilai cukup berhasil melakukan perubahan institusional yang memungkinkan keterlibatan aktif warga dalam perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran pembangunan daerah, sehingga dapat menjalankan pemerintahan dan pembangunan dengan lebih efisien dan responsif (Grindle, 2009:2). Di kedua daerah tersebut, asosiasi-asosiasi muncul dan memperkuat *civil society* dan dapat berperan dengan baik ketika *participatory reform* diberlakukan oleh para pemimpin dan partai politik lokal yang berhaluan kiri atau populis.²⁹ Pengalaman Porto Alegre, Rio Grande do Sul, dan Kerala tersebut tak pelak turut mempengaruhi tumbuhnya motivasi para aktivis sosial di berbagai negara yang tengah menata demokrasi--termasuk di Indonesia-- untuk juga mengembangkan mekanisme serupa terkait dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan.

²⁷ Antlöv dalam Sumarto, 2009:xxiv-xxv. Lihat juga Sumarto, 2005:5.

²⁸ Lihat Recondo, "Local Participatory Democracy in Latin America: Lessons from Mexico and Colombia", dalam Dani dan de Haan, 2008:175.

²⁹ Diantaranya lihat Isaac dan Heller, "Democracy and Development: Decentralized Planning in Kerala", dan Baiocchi, "Participation, Activism, and Politics: The Porto Alegre Experiment", dalam Fung dan Wright, 2003:45-110; Heller, 2001; Waiselfisz, et.al., 2003; Evans, 2004.

1.1.3 Forum Konstituen di Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Kabupaten Bandung dapat dikatakan merupakan salah satu daerah yang perkembangan *civil society*-nya cukup dinamis. Kondisi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh faktor geografis wilayah ini bertetangga dengan Kota Bandung dan tidak terlalu jauh dari Jakarta, dimana informasi dan interaksi yang tinggi dengan organisasi dan pelaku politik, akademisi dan aktivis sosial sangat dimungkinkan. Faktor kondisi sosial, ekonomi dan politik yang heterogen kemungkinan turut mempengaruhi. Percampuran dari karakteristik masyarakat agraris (banyak yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan) dan urban (banyak kawasan industri, sarana pendidikan, sektor jasa dan perdagangan, fasilitas militer, dll.) menyebabkan beragamnya organisasi atau asosiasi-asosiasi warga baik yang berbasis isu, sektoral, ataupun kewilayahan yang tumbuh di daerah tersebut.

Banyaknya program pembangunan baik yang diinisiasi oleh pemerintah, NGO maupun lembaga donor dengan pendekatan berbasis komunitas (*community based*) atau menggunakan pendekatan partisipatif --yang umumnya juga mensyaratkan adanya keterlibatan dan/atau membentuk kelompok atau forum warga--, kemungkinan turut mempengaruhi dinamika tersebut. Beberapa asosiasi atau forum warga yang pernah atau masih ada dan bergerak di level kabupaten di Kabupaten Bandung diantaranya Forum Masyarakat Sipil atau Forum Prakarsa 17 (pada Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah atau P2TPD di awal tahun 2000-an), Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera (FM2S) yang diinisiasi oleh Indonesian Popular Governance Institute (IPGI), Forum Diskusi Anggaran (FDA) yang diinisiasi oleh Yayasan Inisiatif, dan lainnya.

Salah satu diantara forum warga yang ada di daerah saat ini adalah 'Forum Konstituen' di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disingkat FKKB). Sekilas dari namanya, terkesan bahwa FKKB adalah forum para anggota dan/atau simpatisan dari suatu partai politik (parpol) atau organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu, namun tidak demikian. FKKB adalah wadah dari individu-individu warga yang berasal dari beragam organisasi masyarakat,

organisasi profesi dan tokoh masyarakat lainnya untuk terlibat aktif mencermati, mendiskusikan, mendialogkan dengan pihak terkait, dan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan di daerah. Eksistensi FKKB terutama ketika mereka memfasilitasi adanya dialog kritis warga dengan para calon Bupati/Wakil Bupati pada Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2010. Selanjutnya, pasca Pemilu, FKKB juga terlibat dalam memberikan masukan dan memantau proses perumusan RPJMD (Harahap, 2011).

FKKB pada awalnya adalah sebuah kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Bandung pada tahun 2010. Kegiatan ini bukan diinisiasi atau dilakukan oleh pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), partai politik dan kandidat atau tim sukses calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu dalam Pemilu, meskipun pada pelaksanaannya melibatkan semua pihak tersebut. Kegiatan ini diinisiasi oleh Forum Aktivistik Bandung (selanjutnya disebut FAB).³⁰ Tujuan awalnya adalah sebagai upaya pendidikan warga dalam menghadapi Pemilu tersebut, dimana FKKB diharapkan dapat *“memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai sosok kandidat, program-programnya, termasuk kecakapannya dalam berdialog dan membahas isu bersama tokoh masyarakat”* (Harahap, 2011:22). Peserta FKKB berjumlah sekitar 200 orang yang merupakan individu-individu aktivis atau tokoh komunitas dari berbagai organisasi masyarakat yang setelah melalui proses *assessment*

³⁰ Forum Aktivistik Bandung (FAB) adalah sebuah forum dari para aktivis politik, aktivis sosial kemasyarakatan, akademisi, mahasiswa dan pegiat media di Jawa Barat. Sebagian besar dari mereka merupakan para ‘mantan’ aktivis mahasiswa tahun 1980-an, 1990-an dan 2000-an awal dari beragam kampus se-‘Bandung Raya’. FAB mengidentifikasi diri mereka sebagai forum masyarakat sipil dalam upaya membangun demokrasi di Indonesia. Forum ini berdiri sekitar tahun 2008 di Kota Bandung. Meskipun demikian embrio dan jaringan forum tersebut sesungguhnya sudah terbentuk sejak lama sebagai simpul jaringan aktivis mahasiswa dan NGO dari Bandung dan sekitarnya. Bentuk organisasinya relatif cair, dan lebih banyak bersifat melontarkan atau merespon isu politik khususnya di Jawa Barat. Pada tahun 2008, FAB pernah melakukan kegiatan yang mereka sebut sebagai ‘Konvensi untuk calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi dan DPR-RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Barat’. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaring calon legislatif yang berkualitas (memiliki integritas dan kecakapan) untuk menjadi wakil rakyat di legislatif. Isu kepemimpinan kaum muda juga menjadi bagian dari kegiatan konvensi tersebut. Ketika FAB harus menjalin kerjasama dengan pihak lain dan dituntut ‘kejelasan’ status kelembagaannya, akhirnya pada tahun 2010 FAB membentuk Yayasan Forum Aktivistik Bandung. Ketua FAB saat ini adalah Radhar Tri Baskoro, yang pernah menjabat sebagai Anggota KPUD Provinsi Jawa Barat 2003-2008. (Sumber: Disarikan dari dokumentasi organisasi dan klipng koran kegiatan FAB, dan wawancara awal dengan Oky S.R. Harahap, Sekretaris Jenderal FAB, tanggal 30 Mei 2011 di Bandung).

dinilai cukup mewakili isu dan wilayah tertentu. Secara intensif dan partisipatif dilakukan penggalan dan perumusan isu dan masalah publik di Kabupaten Bandung dengan juga melibatkan para akademisi, pengamat, aktivis dan pegiat media.

Gagasan pembentukan FKKB sendiri sesungguhnya berawal dari kegelisahan masyarakat khususnya para aktivis yang tergabung dalam FAB dengan jalannya demokrasi representatif yang mereka nilai masih bersifat prosedural dan semu. FAB mengangankan dapat terwujudnya demokrasi substantif dimana hak-hak rakyat dijamin dan dipenuhi. FAB, sebagai penggagas FKKB, melihat bahwa warga tengah berhadapan dengan polemik instrumen dan kelembagaan demokrasi. Kelembagaan dan proses politik yang ada mereka pandang tidak mampu menjamin terpenuhinya hak-hak politik dan ekonomi warga. Dalam konteks politik di daerah, FAB menilai proses politik pada saat Pemilu pada tahun 2010 maupun setelah terpilihnya pimpinan daerah yang baru tidak akan bisa memenuhi tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat tanpa adanya partisipasi aktif warga didalamnya (Harahap, 2011:8).

Inisiatif FAB dan FKKB sangat kontekstual dengan proses demokratisasi yang terjadi dekade belakangan ini, yang salah satunya adalah adanya *electoral reform* sejak tahun 1999,³¹ yaitu proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota beserta wakil-wakilnya) secara langsung. Dalam konteks demokratisasi di daerah, wacana mengenai pemilihan langsung kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota (selanjutnya disebut Pemilu) haruslah dimasukkan dalam konteks mendorong terwujudnya pemerintahan lokal yang demokratis. Tanpa itu Pemilu hanya menjadi aktivitas rutin/berkala tanpa memberi pengaruh bagi peningkatan kehidupan demokrasi dan kesejahteraan rakyat di daerah.³²

Dari hasil penelitian awal yang telah peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa inisiatif tersebut merupakan respon atas ketidakpuasan FAB dan FKKB terhadap

³¹ Pemilihan Presiden secara langsung pertama kali pada tahun 1999, sementara Pemilihan Kepala Daerah secara langsung baru dimulai pada tahun 2005.

³² Hasanuddin, dalam Djojosekarto dan Hauter, 2003:12.

proses munculnya pasangan calon kepala daerah baik yang diajukan oleh partai politik maupun calon independen, yang tanpa melalui mekanisme 'uji publik' terlebih dahulu. Mereka juga mengkritisi mekanisme kampanye para calon tersebut karena dinilai belum memadai untuk menghasilkan kandidat yang kompeten, dikenal dan mengenal kondisi wilayah dan masyarakatnya. FAB dan FKKB tampaknya juga memiliki perspektif yang berbeda dengan KPU, KPUD, lembaga pemantau Pemilu/Pilkada, NGO, lembaga donor maupun pihak-pihak lain yang umumnya berkonsentrasi pada upaya pemberdayaan warga melalui pendidikan pemilih (*voters education*), khususnya bagi pemilih pemula.

Selain itu, dari hasil penelitian awal peneliti juga melihat bahwa apa yang dilakukan oleh FAB dan FKKB tampaknya memiliki tujuan ganda, yaitu: (a) Terhadap warga, adalah untuk melakukan sosialisasi politik³³ kepada warga agar lebih memahami dan kritis terhadap persoalan sosial-politik yang ada di wilayahnya, serta mampu mendialogkan hal tersebut kepada calon kepala daerah yang akan bertanding dalam Pilkada, yang selanjutnya juga kepada kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada dan pemerintahan daerah pada umumnya. Hasil dialog ini juga dapat menjadi bahan sosialisasi dari peserta kepada warga masyarakat lainnya yang tidak hadir dalam acara tersebut; sebaliknya, (b) Terhadap pasangan calon-calon kepala daerah, merupakan upaya sosialisasi politik agar para calon Bupati/Wakil Bupati mengetahui aspirasi warga mengenai masalah yang ada di wilayahnya, juga terbiasa untuk berdialog dan bahkan berkolaborasi dengan warga untuk memutuskan berbagai hal yang terkait dengan kebutuhan dan aspirasi warga.

Jika dilihat dari pandangan-dunia konstruktivisme sosial, pembentukan FKKB maupun forum-forum warga lainnya dapat dilihat sebagai hasil konstruksi secara sosial dari respon warga dan aktor lainnya atas ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan, mekanisme dan pola-pola interaksi dalam proses pengambilan keputusan maupun pemilihan elit politik di daerah. Situasi tersebut mendorong mereka terlibat lebih aktif dalam partisipasi politik untuk membangun proses

³³ Sosialisasi politik dapat dimaknai sebagai suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma, dan perilaku esensial dalam kaitannya dengan politik, agar mampu berpartisipasi efektif dalam kehidupan politik (Damsar, 2010:153).

deliberasi di daerah. Dari cara pandang konstruktivisme sosial, secara lebih luas konsep *public sphere* yang diajukan Habermas juga dapat dipandang sebagai hasil dari proses konstruksi sosial tersebut.

1.2 Alasan Pemilihan Topik

Ada sejumlah pertimbangan mengapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai topik ini, yaitu:

- (a) Secara sosiologis, pengalaman FKKB layak dan dapat diteliti, karena berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan warga, dan peran asosiasi warga dalam mempengaruhi proses rekrutmen pimpinan daerah dan kebijakan pembangunan di daerah. Upaya FAB dan FKKB melakukan deliberasi pada proses pemilihan kepala daerah melalui dialog langsung dengan warga di Kabupaten Bandung, sekaligus pada tahap selanjutnya mencoba terlibat dalam dialog penyusunan kebijakan daerah, menjadi sangat menarik baik dilihat dari sisi praktik maupun teori, khususnya dalam kajian sosiologi politik.
- (b) Isu yang diangkat oleh FAB dan FKKB menarik untuk dicermati karena tampaknya berupaya menyoroti peran aktor penting namun kerap diabaikan dalam analisis mengenai demokratisasi di daerah, yaitu para politisi yang maju sebagai calon kepala dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada. Dalam hal ini, kesediaan kesediaan calon tersebut untuk berdialog akan menentukan sejauhmana proses deliberasi dapat dilakukan. Hal yang disebut belakangan tadi juga berlaku bagi calon yang maju melalui jalur independen (non partai). Pengalaman FKKB menunjukkan bahwa respon para calon (dan tim suksesnya) terhadap upaya mendeliberasi proses pra Pemilukada juga beragam, yang diindikasikan dengan ada sebagian pasangan calon yang menolak untuk terlibat (hadir) dalam kegiatan yang dilakukan FKKB tersebut.³⁴

³⁴ Pemilukada di Kabupaten Bandung tahun 2010 diikuti oleh delapan pasangan calon, dimana tiga diantaranya melalui jalur independen. Kedelapan pasangan tersebut, yaitu: (1) Marwan Efendi dan

Dari perspektif tersebut, proses rekrutmen kepala daerah melalui Pemilukada menjadi sangat penting untuk dicermati oleh warga agar dapat menghasilkan kepala daerah yang memahami dan mendukung gagasan partisipasi publik dan ketatapemerintahan yang baik pada umumnya. Sikap kepala daerah ini diasumsikan sedikit banyak akan dapat mempengaruhi respon birokrasi di daerah secara umum, dan akan berpengaruh terhadap upaya demokratisasi yang lebih luas di daerah. Dalam hal ini peran birokrasi memang penting karena merupakan pihak yang mengendalikan sumberdaya dan proses pengambilan keputusan publik. Tekanan dari *civil society* kepada birokrasi menjadi hal yang logis terkait keinginan untuk memperluas partisipasi warga dalam kontrol terhadap penggunaan sumberdaya dan pengambilan keputusan publik tersebut.³⁵

- (c) Kajian mengenai FKKB penting untuk dilakukan di tengah situasi adanya kecenderungan menurunnya partisipasi politik warga negara dalam pemilu, yang tidak hanya terjadi dalam pemilu lokal dan nasional di Indonesia³⁶ namun juga di banyak negara demokrasi lainnya.³⁷

Asep Nurjaman (jalur independen); (2) Atori Herdianajaya dan Dadi Gyardanijawapraja (Partai Demokrat); (3) Tatang R. Wiraatmadja dan Ujang Sutisna (independen); (4) Deding Ishak dan Siswanda (PPP dan PKB); (5) Yadi Srimulyadi dan Rusna Kosasih (PDIP dan Gerindra); (6) Asep Soleh dan Dayat Somantri (independen); (7) Dadang M. Nasser dan Deden Rumaji (Golkar dan PAN); (8) Ridho Budiman Utama dan Dadang Rusdiana (PKS dan PBB). Pemilukada dilakukan dua putaran. Konflik muncul akibat adanya tuduhan kecurangan. Namun gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Putaran I oleh pasangan Deding dan Siswanda, dan pada Putaran II oleh pasangan Ridho dan Dadang, keduanya ditolak oleh MK karena dianggap kurang bukti. Pemilukada pada akhirnya dimenangkan pasangan Dadang dan Deden.

³⁵ Dalam hal ini Etzioni-Halevy (2011:225) juga memberi catatan khusus bahwa birokrat dan birokrasi bebas memilih sendiri kelompok kepentingan yang akan mereka dengarkan, bahkan terkadang birokrasi justru membentuk kelompok kepentingan yang akan memberikan tekanan kepada mereka, dengan tujuan agar bisa mendapatkan dukungan atas kebijakan-kebijakan yang sudah mereka buat sebelumnya. Bahkan, birokrasi bisa mendirikan kelompok-kelompok kepentingan yang tujuannya untuk memberi tekanan pada pihak-pihak lain dalam pemerintahan agar bisa menguntungkan kepentingan dari birokrasi itu sendiri. Besar kemungkinan pada akhirnya birokrasi akan menjalin hubungan simbiosis dengan kelompok kepentingan yang tidak hanya akan menguntungkan bagi kelompok kepentingan itu juga dapat menguntungkan birokrasi itu sendiri.

³⁶ KOMPAS (edisi Jawa Barat) mengangkat isu ini pada Oktober 2010. Partisipasi paling tinggi adalah pada Pilpres 2009 (lebih dari 80%), disusul pada Pileg 2009 (di bawah 80%), Pilgub 2008 (di atas 70%) dan Pilkada Kabupaten Bandung 2005 (di bawah 70%). Partisipasi pada Pemilukada 2010 hanya sebesar 65%, yang lebih rendah dari Pilkada 2005 (lihat Harahap, 2011:19).

³⁷ Zittel dan Fuchs. (2007:1) mencermati fenomena menyusutnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di negara-negara demokrasi (USA dan Eropa). Senada dengan itu, Warren dan Pearse (2008:1) menyatakan bahwa meskipun demokrasi elektoral telah menyebar di seluruh

- (d) Belum ada yang mengkaji secara akademik mengenai pengalaman dan model forum warga yang dikembangkan oleh FKKB dan FAB. Dewansyah (2011:81) memang telah mencoba menganalisa pengalaman FKKB dan mengkaitkannya dengan gagasan *Deliberation Poll* dan *Deliberation Day* dari Ackerman dan Fishkin (2004). Namun menurut peneliti, analisa Dewansyah baru bersifat permukaan dan tidak menggambarkan dengan jelas model dan proses deliberasi yang dilakukan FKKB, berikut analisis mengenai pemahaman para aktor yang terlibat dalam model dan proses tersebut. Meskipun demikian, menurut peneliti kajian Dewansyah memberi landasan yang cukup kuat bagi penelitian lebih lanjut mengenai topik tersebut. Apalagi, model yang mengembangkan deliberasi demokrasi elektoral yang sekaligus dilanjutkan dengan deliberasi proses penyusunan kebijakan publik baik di tingkat nasional maupun internasional sesungguhnya juga belum banyak dilakukan (Dewansyah, 2011: 82).
- (e) Meskipun analisa mengenai forum warga banyak menggunakan konsep-konsep yang ada dalam teori demokrasi deliberatif, sejauh ini belum banyak yang melakukan dalam sebuah kajian akademik. Harahap (2011:24) memang menyinggung mengenai posisi FKKB yang menurutnya termasuk dalam model partisipasi politik yang sesuai dengan prinsip demokrasi deliberatif dengan merujuk pada level partisipasi yang disusun oleh Ife dan Tesoriero (2008:299). Namun pernyataan tersebut tidak diuraikan dan dianalisis lebih jauh dalam hal apa dan bagaimana bentuk kesamaan tersebut. Selain itu, Harahap juga tidak menggambarkan bagaimana persepsi para aktor/agen baik individu, kelompok ataupun institusi yang terlibat dengan kegiatan FKKB mengenai latar belakang,

dunia, perkembangan demokrasi di negara-negara di mana lembaga-lembaga pemilu telah lama didirikan tampaknya telah stagnan, warga negara mereka dilanda oleh *malaise* demokratis dalam berhubungan dengan lembaga-lembaga politik formal demokrasi perwakilan. Sinyalemen tersebut diindikasikan oleh menurunnya tingkat partisipasi atau jumlah pemilih, ketidakpuasan terhadap lembaga-lembaga politik, dan adanya anggapan umum bahwa politisi tidak dapat dipercaya dan sering korup. Selama beberapa dekade terakhir, warga telah semakin cenderung melihat pemerintah sebagai terlalu memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tidak efektif, boros, dan lalai terhadap kepentingan masyarakat (Nye, 1997; Norris, 1999; Putnam dan Pharr, 2000).

pengalaman, dan mungkin juga penilaian mereka atas keberadaan dan fungsi FKKB.

1.3 Masalah Penelitian

Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: *"Bagaimana FKKB sebagai asosiasi atau forum warga mendorong partisipasi politik dan upaya demokratisasi di Kabupaten Bandung?"*.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Dari pertanyaan pokok tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

- (a) Mengapa FKKB dibentuk dan mengambil peran sebagai aktor demokrasi, dan bagaimana strategi serta upaya FKKB dapat menjadi media bagi warga untuk meningkatkan demokratisasi di daerah?;
- (b) Bagaimana FKKB memposisikan aktor-aktor demokrasi yang terlibat?;
- (c) Model kelembagaan partisipasi politik seperti apa yang dikonstruksikan dan dipromosikan oleh FKKB?.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini tidak ditujukan untuk menguji atau secara langsung memberikan kontribusi bagi pengembangan teori demokrasi deliberatif dan teori demokrasi asosiatif. Pertimbangan utamanya adalah karena area penelitian pada Program Magister Manajemen Pembangunan Sosial (MMPS) pada Departemen Sosiologi FISIP - Universitas Indonesia memang lebih ditujukan bagi kajian praktis terkait kebijakan pembangunan sosial, untuk menghasilkan model dan pembelajaran bagi pengembangan kebijakan dan upaya sejenis selanjutnya.

Penelitian ini terutama didasarkan pada kebutuhan untuk lebih memahami makna dari alasan dibentuknya FKKB, peran FKKB sebagai agen demokratisasi, sekaligus menggambarkan model kelembagaan partisipasi politik yang ada pada FKKB, yang didalamnya diharapkan dapat tergambarkan mengenai struktur kelembagaan, sumberdaya, strategi, cara/alat yang digunakan, aktor-aktor yang berperan, maupun sasaran yang ingin dicapainya. Pengalaman --baik keberhasilan ataupun kegagalan-- FKKB dalam 'mempengaruhi' proses Pemilukada di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 maupun kebijakan daerah lainnya diharapkan juga dapat menjadi referensi dan pembanding kelompok dan organisasi warga lainnya. Dengan demikian, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu untuk *mengetahui alasan dibentuknya FKKB, mendeskripsikan dan meneliti makna dari keberadaan FKKB dan relasinya dengan aktor-aktor demokrasi lainnya, serta menggambarkan model kelembagaan FKKB sebagai asosiasi atau forum warga dalam mendorong demokratisasi di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.*

1.6 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini tidak ditujukan untuk menguji teori, namun diharapkan dapat memberi gambaran dan sumbangan mengenai aplikasi praktis dari teori demokrasi deliberatif, teori demokrasi asosiatif dan teori partisipasi politik di daerah. Sementara ditinjau dari sisi praktis, inisiatif membangun Forum Warga semacam yang dilakukan FKKB dan FAB menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut bagi keberlanjutan dan perkembangan demokratisasi di Indonesia. Selain itu, secara sosiologis, keberadaan forum warga khususnya FKKB tersebut juga sangat menarik untuk dicermati. Banyak hal yang dapat dipelajari berkenaan dengan latar belakang atau alasan keberadaan FKKB, dinamika kelembagaan, jaringan dan relasi dengan *stakeholder* yang terlibat, baik di dalam tubuh FKKB itu sendiri, dengan NGO (FAB), pemerintah daerah Kabupaten Bandung, lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilukada di daerah, lembaga donor, dan lainnya.

Penelitian yang lebih mendalam mengenai hal tersebut diharapkan dapat membantu para aktivis warga di FKKB dan FAB untuk melakukan refleksi dan

menyempurnakan model dan kebijakan internal berkenaan dengan manajemen kelembagaan dan aktivitas yang mereka lakukan. Selain itu, model dan pengalaman FKKB ini juga dapat menjadi referensi atau alternatif bagi NGO, forum warga, KPUD dan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan partisipasi politik warga, sehingga proses dan output kebijakan dapat lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warga pada umumnya.

1.7 Delimitisasi dan Limitasi

Dengan mempertimbangkan keterbatasan sumberdaya yang ada (waktu, tenaga, biaya, dan akses data), dan agar penelitian ini dapat fokus, cakupan penelitian ini dibatasi hanya pada satu forum warga saja (FKKB), dan tidak dilakukan perbandingan dengan forum warga yang bergerak di area isu atau memiliki karakteristik yang relatif sama, misalnya forum warga yang berbasis isu *participatory budgeting* atau berbasis wilayah tertentu. Sementara limitasi dari penelitian ini berkaitan dengan adanya kesulitan informan sulit mengingat detail rentetan peristiwa atau kegiatan yang sudah berlangsung sejak sekitar pertengahan tahun 2010 lalu. Peneliti mencoba mengatasi keterbatasan tersebut dengan mengecek informasi dari informan yang berbeda, maupun dari sumber-sumber sekunder yang masih dapat diakses, seperti catatan atau notulensi rapat, rekaman foto, kliping koran, dan lainnya.³⁸

³⁸ Penelitian ini sama sekali tidak menyinggung peran aktor pasar (*market*), yang dalam kajian mengenai *civil society* juga dipandang sebagai aktor utama selain negara (*state*). FKKB sebagai subyek penelitian memang masih fokus pada aktor negara atau pemerintah. Hal tersebut dapat dipandang sebagai limitasi, yang baru ditetapkan pada akhir penelitian ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Kajian Sebelumnya

2.1.1 Pengertian Forum Warga

Dalam penelitiannya mengenai inisiatif masyarakat dalam mengembangkan forum warga di berbagai daerah di Indonesia, Sumarto (2009:36) mendefinisikan 'Forum Warga' sebagai suatu forum konsultasi dan penyaluran aspirasi warga untuk urusan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Dalam hal ini ada sejumlah ciri dari forum warga, diantaranya: (a) Merupakan wadah yang digunakan untuk merumuskan dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi komunitas (seringkali berupa rekomendasi bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan atau melakukan kebijakan tertentu), sekaligus menjadi media resolusi konflik di tingkat lokal; (b) Biasanya merupakan aliansi berbagai organisasi non pemerintah (NGO/LSM), organisasi berbasis komunitas, asosiasi/kelompok sektoral (seperti kelompok petani, buruh, pemuda, transportasi, pedagang kaki lima, perempuan, dll.) serta tokoh-tokoh lokal; (c) Biasanya bersifat sektoral, tetapi kebanyakan koalisi dibangun dengan basis teritorial, walaupun tidak selalu identik dengan wilayah administratif.³⁹

Kehadiran forum-forum tersebut menambah alternatif arena partisipasi warga, setelah sebelumnya lebih banyak dimunculkan melalui berbagai NGO.⁴⁰ Dari uraian pada BAB 1, tumbuhnya asosiasi atau forum warga ini dapat dipandang sebagai kritik atas kelemahan dari demokrasi representatif yang cenderung

³⁹ Sumarto (2009:37) mencatat bahwa sesungguhnya kehadiran forum warga belum diakui dalam kerangka legal formal. Pengakuan atas keberadaan forum-forum tersebut belum merata, khususnya pengakuan dari pihak pemerintah. Akibatnya tidak jarang upaya mereka membangun dialog dengan pihak-pihak tersebut kerap kurang ditanggapi serius atau bahkan diabaikan dan ditolak.

⁴⁰ Menurut Sumarto (2005:5), tidak ada data mengenai jumlah forum warga di Indonesia, tapi diperkirakan ada ratusan jumlahnya. Beberapa diantaranya yang dapat disebutkan, seperti: Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera di Bandung; Sarasehan Warga Bandung di Kota Bandung; Perekat Ombara di Lombok Utara; Forum Jatinangor di Sumedang; Forum Masyarakat Peduli Sanur di Bali; Solidaritas Masyarakat Pinggiran Surakarta; Forum Masyarakat Jepara; dll. (diantaranya lihat Sumarto, 2005, 2008 dan 2009; USAID, 2006).

eksklusif dan tidak responsif terhadap kepentingan dan aspirasi warga. Kehadiran forum warga dalam juga dapat dipandang sebagai tumbuhnya kebutuhan akan adanya kelompok-kelompok penekan, yang menjadi bagian dari dinamika perkembangan *civil society* di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitiannya Sumarto telah mengidentifikasi forum warga berdasar proses kelahirannya, yang dapat dikategorikan menjadi: (a) Forum yang lahir dari kebutuhan akan wadah komunikasi, pengorganisasian masyarakat, dan aksi bersama; (b) Forum yang lahir sebagai kelanjutan dari suatu program/proyek dari pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga donor, atau lainnya; (c) Forum yang dibentuk sebagai 'prasyarat' atau kewajiban yang harus dipenuhi untuk dapat terlibat dalam suatu program/proyek tertentu (Sumarto, 2009:38).

Dari hasil studi Sumarto (2005, 2008 dan 2009) dan USAID (2006), dapat dipetakan empat isu yang menjadi perhatian dan arena partisipasi Forum Warga, yaitu dialog, diskusi dan upaya terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai atau dalam hal: (a) Masalah sosial atau isu publik di komunitas dan/atau daerah; (b) Perencanaan pembangunan/komunitas dan/atau daerah; (c) Penganggaran pembangunan di komunitas dan/atau daerah; dan (d) Monitoring dan evaluasi pembangunan di komunitas dan/atau daerah. Diantara keempat isu tersebut, dalam pengamatan peneliti sebagian besar forum warga terlibat dalam dialog dan diskusi mengenai masalah sosial atau isu publik dan penganggaran pembangunan atau *participatory budgeting* (lihat Gambar 2.3).

2.1.2 Efek Forum Warga

Hasil studi Sumarto (2005:372-373) mengenai keberadaan dan kiprah forum warga di Kabupaten Bandung dan Kota Solo diantaranya menjelaskan mengenai efek forum warga terhadap demokrasi lokal. Dengan mengacu pada pendapat Warren (2001:60-93) mengenai tiga dimensi perubahan dari adanya asosiasi semacam itu, studi Sumarto menemukan bahwa forum warga memiliki:

- (a) Efek pengembangan individu-individu. Forum warga berpotensi membentuk, meningkatkan dan mendukung kepercayaan diri dan kapasitas

warga untuk secara kolektif mengubah politik lokal. Perkembangan individu dimaksud yaitu pada aspek: merasa mampu/berhasil (*a sense of efficacy*), informasi, keterampilan politik, kebajikan (*civic virtues*) dan kemampuan berfikir/bersikap kritis (*critical skills*). Hasil studi Sumarto tersebut menunjukkan bahwa forum warga menjadi semacam '*school of democracy*', melalui berbagai proses pembelajaran informal mengenai '*civic culture*';

- (b) Efek terhadap *public sphere*, dimana organisasi dapat memegang peran kunci dalam komunikasi publik dan deliberasi, serta merepresentasikan kesamaan dan perbedaan yang ada. Meskipun tantangannya adalah umumnya sulit bagi forum warga untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan karena ruang/kesempatan untuk itu masih belum ada;
- (c) Efek institusional, dimana asosiasi memiliki potensi untuk menyeimbangkan representasi para pihak dalam sistem politik lokal, meningkatkan kemampuan warga untuk memperjuangkan aspirasinya, dan mengimplementasikan prinsip *subsidiarity*⁴¹ pada pemerintahan lokal, meningkatkan koordinasi dan kerjasama diantara kepentingan yang berpotensi saling bersaing, dan meningkatkan legitimasi demokrasi.

2.1.3 Kendala Forum Warga

Dari berbagai penelitian yang telah diuraikan di atas, ada sejumlah catatan yang penting untuk dicermati berkenaan dengan keberadaan forum warga tersebut. Meskipun dibangun dengan semangat partisipatif dan bertujuan menciptakan kebijakan publik yang lebih berpihak pada kepentingan warga,⁴² namun forum warga juga memiliki sejumlah kendala, antara lain:

⁴¹ The Oxford English Dictionary mengartikan *subsidiarity* sebagai prinsip bahwa otoritas yang lebih tinggi hanya melakukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan oleh otoritas yang lebih rendah. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah pusat hanya menjalankan urusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

⁴² Tidak semua pihak memiliki pandangan positif atau moderat terhadap konsep demokrasi deliberatif dan keberadaan forum warga. Perspektif dan teori yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula terhadap masalah yang sama. Chotim (2006) misalnya, melihat

- (a) Kemungkinan terabaikannya masalah atau isu lain diluar isu utama yang menjadi fokus forum warga. Masalah ini sangat mungkin terjadi pada forum warga yang bersifat sektoral atau hanya mewakili wilayah tertentu;
- (b) Keanggotaan forum warga yang umumnya berbasis tokoh masyarakat, kerap hanya memiliki legitimasi yang lemah dan tidak menjamin mewakili kepentingan masyarakat miskin/marginal. Forum tersebut menjadi elitis dan tidak terakses oleh warga kebanyakan;
- (c) Hambatan sosio-kultural terhadap kehidupan asosiasional, seperti kurangnya *trust*, adanya sebagian anggota/peserta yang oportunistis (*opportunism*), krisis kepemimpinan dan hubungan patronase;
- (d) Semangat kolektif anggota atau aktivis forum warga tidak stabil. Konflik kepentingan, rivalitas, orientasi/tujuan yang berubah tidak saja dapat mengganggu proses pengambilan keputusan dan membuat keberadaan forum tersebut menjadi rentan untuk mampu bertahan lama;
- (e) Forum warga yang betul-betul muncul dan dikelola oleh masyarakat sendiri, kerap menghadapi masalah keterbatasan sumberdaya untuk menggerakkan organisasi dan kegiatan forum;
- (f) Pembentukan forum warga tidak jarang lebih condong dikembangkan dalam skema proyek, sehingga kerap bergantung pada pihak sponsor yang mendanainya;

forum warga sebagai gagasan yang ditanamkan dari luar melalui program/proyek dari berbagai donor atau lembaga kerjasama pemerintah lainnya, yang dianggap sebagai model yang paling baik dalam menyelesaikan masalah di komunitas secara damai, melalui konsensus yang dapat diterima semua pihak. Sementara masalah pokok di komunitas mungkin lebih mendasar dari apa yang diperbincangkan, khususnya soal kontestasi kepentingan ekonomi diantara para aktor mengenai sumberdaya yang ada di suatu daerah. Konsep demokrasi dan partisipasi menjadi hegemonik, dianggap benar dan berlaku universal. Disini terlihat adanya perbedaan perspektif antara Chotim dengan Chandra (2003) dan Sumarto (2005, 2008, 2009) mengenai topik yang sama yaitu tentang Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera (FM2S) di Kabupaten Bandung. Dalam konteks yang lebih luas, perspektif serupa misalnya dari Hadiz (2005:272-273) yang melihat demokrasi dan desentralisasi secara lebih luas di Indonesia, Menurutnya, konsep-konsep tersebut tidak lain hanyalah bagian dari pencangkakan gagasan neo-institusionalis yang dianggap varian dari aliran neo-liberalisme.

(g) Hambatan pada struktur pemerintahan lokal dan terbatasnya ruang politik.⁴³

Secara khusus, peluang dan hambatan yang berasal dari birokrasi memang perlu dicermati, karena dapat turut mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses deliberasi di daerah. Dalam hal ini, perlu dipetakan tingkat keterbukaan birokrasi terhadap gagasan partisipasi warga dalam proses perumusan dan kontrol atas pelaksanaan kebijakan publik di daerah.⁴⁴ Pandangan tersebut sejalan dengan hasil studi empirik Yang dan Callahan (2007:259) yang menginformasikan bahwa faktor terpenting terkait upaya pelibatan warga dalam pengambilan keputusan adalah perilaku para manajer publik (birokrat) dalam menyikapi prinsip-prinsip partisipasi.⁴⁵ Namun, pemahaman aparatus birokrasi di Indonesia mengenai prinsip partisipasi publik dan secara umum mengenai *good governance* masih menjadi pertanyaan besar. Hasil studi empirik BAPPENAS (2003:33) menunjukkan bahwa dari empat belas prinsip tata pemerintahan yang baik yang dikembangkan oleh BAPPENAS,⁴⁶ prinsip transparansi dan prinsip demokratis serta berorientasi pada konsensus merupakan prinsip-prinsip yang paling kurang dipahami oleh aparatur pemerintahan daerah.

Jika birokrasi di daerah khususnya kepala daerah --oleh berbagai sebab-- bersifat tertutup terhadap gagasan tersebut, maka upaya deliberasi dapat dikatakan hanya akan menjadi aksi sepihak saja. Karenanya menjadi penting untuk mencermati

⁴³ Lihat Chandra, 2003 dan Sumarto, 2005.

⁴⁴ Menurut Dwiyanto et.al., (2007:328), proses konsolidasi menuju suatu kualitas tata pemerintahan yang baik dan mapan tergantung pada banyak faktor, diantaranya adalah kualitas kepemimpinan dan lingkungan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di tiap daerah. Provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kualitas kepemimpinan yang baik dan pimpinan daerah yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap reformasi tata pemerintahan serta secara serius mengembangkan berbagai program untuk mendorong perubahan menuju pada kualitas tata pemerintahan yang baik cenderung memiliki kinerja yang lebih baik.

⁴⁵ Sebagai catatan, studi Yang dan Callahan (2007) juga menyatakan bahwa respon birokrasi terhadap partisipasi warga lebih rendah jika dibandingkan respon terhadap komunitas bisnis dan NGO.

⁴⁶ BAPPENAS merumuskan empat belas Prinsip *Good Governance*, yaitu: (a) Wawasan ke depan; (b) Keterbukaan dan transparansi; (c) Partisipasi Masyarakat; (d) Tanggung gugat/akuntabilitas; (e) Supremasi hukum; (e) Demokrasi; (f) Profesionalisme dan kompetensi; (g) Daya tanggap; (h) Efisiensi dna efektifitas; (i) Desentralisasi; (j) Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat; (k) Komitmen pada pengurangan kesenjangan; (l) Komitmen pada perlindungan lingkungan hidup; (m) Komitmen pada pasar yang *fair*.

karakter dan kecenderungan dari birokrasi yang menjadi bagian dalam proses deliberasi ini. Yang dan Callahan (2007:250) mengutip Meier dan O'Toole (2006) yang menyatakan bahwa *bureaucratic value* adalah lebih penting daripada faktor-faktor politik lainnya dalam menjelaskan keputusan-keputusan birokrasi. Masalahnya, banyak pimpinan atau pejabat publik takut untuk merespon partisipasi karena dianggap dapat menurunkan efektifitas lembaganya (King dan Stivers, 1998; Vigoda, 2002). Karenanya, seperti yang dikutip Yang dan Callahan dari More (1995), idealnya birokrasi jangan bersikap pasif terhadap gagasan partisipasi, karena partisipasi dapat digunakan untuk membangun dinamika politik dan meningkatkan legitimasi institusi.

Untuk itu, pemahaman para *stakeholder* atau aktor yang terlibat dalam proses deliberasi mengenai efek dari partisipasi publik juga perlu ditelaah lebih jauh. Dalam hal ini hasil studi empirik oleh Halverson (2003) dapat dijadikan salah satu pijakan, bahwa partisipasi publik yang berkualitas dapat mempengaruhi persepsi atau kepercayaan publik terhadap birokrasi/pemerintah. Partisipan atau warga cenderung meningkat kepercayaannya bahwa pemerintah atau institusi publik sudah dan akan bersikap responsif terhadap kepentingan publik. Selain itu, studi empirik dari Wang dan Wart (2007:276) menyimpulkan bahwa *public trust* (tingkat kepercayaan publik) meningkat ketika para pejabat publik menunjukkan integritas, kejujuran, dan kepemimpinan moral serta etis, yang terinstitusionalisasi dalam pemerintahan melalui proses partisipasi. Namun Wang dan Wart juga mengingatkan, bahwa meskipun partisipasi dapat mencapai konsensus publik, namun tidak dengan sendirinya dapat menciptakan *public trust*, karena realisasi atas kesepakatan itu harus dapat ditunjukkan oleh para pejabat publik kepada warga, bahwa proses partisipasi tersebut memang mewujudkan dalam hal yang konkret, misalnya peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik dari pemerintah (daerah) kepada warga.

Sementara berkenaan dengan kecenderungan di forum warga sendiri, hasil kajian Sumarto (2008:i) justru menyimpulkan adanya indikasi bahwa gairah berpartisipasi di beberapa daerah sedang mengalami proses erosi. Berkurangnya kemauan politik dari kepala daerah dan kejenuhan warga menjadi sebagian

penyebab dari kondisi tersebut. Bahkan pada sejumlah kasus ada pendukung partisipasi yang beralih menjadi penentanginya karena merasa tidak lagi percaya akan keuntungan dari proses partisipatif. Akibatnya banyak forum-forum deliberatif yang pernah berkembang dan populer di era 2000-an kemudian menjadi vakum, atau mulai mengalami stagnasi atau pembelokan tujuan.

2.1.4 Kelebihan dan Keterbatasan Kajian Sebelumnya

Hasil-hasil studi tersebut memiliki kelebihan karena cukup komprehensif memberi gambaran umum dinamika, masalah dan tantangan yang dihadapi dalam demokratisasi khususnya mengenai partisipasi politik warga dalam proses perunusan kebijakan publik di daerah pada era otonomi daerah saat ini. Ulasan Dwiyanto dkk. (2003a, 2007) sebagai hasil dari studi kuantitatif mengenai persepsi para pihak di sejumlah daerah mengenai pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, membantu memberi pemahaman tentang kendala umum dalam partisipasi warga serta kesiapan *civil society* dan institusi maupun pimpinan di daerah dalam meningkatkan kualitas kebijakan daerah yang partisipatoris. Sementara dari studi kualitatif dari USAID (2006) diperoleh gambaran bahwa peran *civil society* masih terbatas mendorong demokratisasi di daerah. Kalaupun ada inisiatif positif di daerah-daerah tertentu, hal itu lebih dipengaruhi oleh faktor motivasi dan kepemimpinan kepala daerah saja, atau pada kasus tertentu lebih karena pengaruh dari luar, seperti adanya insentif dari program lembaga donor. Studi JPIP (2006) mengenai inisiatif sejumlah daerah membuka ruang dialog mengkonfirmasi mengenai dominannya peran kepala daerah dalam demokratisasi di daerah.

Studi Sumarto (2005, 2008, 2009) sangat bermanfaat karena memberi gambaran lebih lengkap mengenai fenomena perkembangan forum warga di level makro atau nasional (termasuk yang ada di Kabupaten Bandung) sebagai wadah dan arena baru partisipasi warga dalam proses kebijakan publik dan pembangunan di daerah. Sementara hasil studi Chandra (2003) memberi gambaran situasi mikro mengenai dinamika dan tantangan internal dan eksternal yang dihadapi sebuah forum warga di Kabupaten Bandung. Studi lain di Kabupaten Bandung yang

dilakukan Takeshi (2006) memberi gambaran bagaimana mekanisme perencanaan kegiatan pembangunan yang melibatkan organisasi dan kelompok masyarakat di Kabupaten Bandung, yang nyatanya masih rentan dari pengaruh dominasi kepentingan elit lokal. Sementara hasil studi LIPI (2001) di Kabupaten Bandung memberi pemahaman mengenai hambatan struktural, institusional dan kultural di dalam tubuh birokrasi di daerah ketika dituntut untuk lebih transparan, partisipatoris dan akuntabel.

Temuan dari studi-studi tersebut sangat bermanfaat karena memberi gambaran perkembangan demokratisasi, inisiatif pemerintah daerah, NGO dan warga dalam meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintahan termasuk dinamika forum warga sebagai bagian dari *civil society* di daerah. Namun studi-studi tersebut tidak membahas bagaimana dinamika dan inisiatif warga dalam meningkatkan partisipasi publik pada proses pemilihan wakil atau pimpinan daerah dalam Pemilukada dan/atau Pemilu. Sementara, berdasarkan hasil-hasil studi di atas, faktor kepala daerah dan legislatif di daerah sangat penting bahkan menentukan bagaimana respon daerah tersebut terhadap gagasan demokratisasi, tata pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik di daerah. Karena itu, studi mengenai inisiatif warga melalui forum warga dalam upaya deliberasi proses pemilihan kepala daerah berikut tindak lanjutnya dalam perencanaan dan kontrol atas kebijakan publik di daerah menjadi penting untuk melengkapi gambaran besar tadi.

2.2 Teori yang Akan Digunakan dalam Analisis

2.2.1 Teori Partisipasi Politik

Menurut Faulks (2010:226, 230), partisipasi politik dimaknai sebagai keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi. Teori partisipasi demokrasi memandang keterlibatan politik bersifat *developmental* (perkembangan) dimana partisipasi bukan sekedar mode pemerintahan namun mempunyai tujuan yang lebih luas yakni menyatukan

masyarakat sipil dan mengedukasi warga negara tentang seni pemerintahan. Gagasan ini didasari oleh dua prinsip, bahwa sistem pemerintahan demokrasi harus memaksimalkan jumlah dan intensitas partisipasi semua anggota masyarakat sipil, dan memperluas bidang kehidupan sosial yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi.

Jika Faulks lebih berorientasi pada proses, ahli lainnya, Verba et al. (1995:38) cenderung berorientasi pada hasil dari partisipasi tersebut. Menurutnya, partisipasi politik mengacu pada kegiatan yang memiliki maksud mempengaruhi tindakan pemerintah, baik secara langsung dengan mempengaruhi pembuatan atau pelaksanaan kebijakan publik, atau tidak langsung dengan mempengaruhi pemilihan orang yang membuat kebijakan-kebijakan tersebut.

Sementara, definisi partisipasi politik dari Huntington dan Nelson (1994:4) tampaknya lebih mengedepankan karakteristik dari partisipasi tersebut. Kedua ahli berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi biasa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Terkait dengan proses pemilihan yang diungkap Verba et.al. sebelumnya, Whitehead (2002:10) mengutip Dahl (1971) yang memandang pemilihan umum untuk memilih pemimpin atau perwakilan rakyat yang dilakukan secara reguler, kompetitif dan jujur tersebut sebagai salah satu pilar dari prinsip-prinsip demokrasi. Secara teoritik, dikaitkan dengan teori mengenai elit dan kekuasaan (*power*) yang dikembangkan oleh Mosca, Pareto, Michels and Weber dan C.W. Mills,⁴⁷ konsep dan kebijakan Pemilu dan Pemilukada pada dasarnya terkait dengan mekanisme sirkulasi (pergantian) elit di pemerintahan pusat dan daerah

⁴⁷ Menurut Best dan Higley (2010:1) yang mengutip Linz (2006), sebagian pemikir teori elit seperti Mosca (1923, 1939) dan Michels (1915, 1962) menilai praktek demokrasi pada akhirnya menjadi sekedar kompetisi diantara para elit sendiri. Pilihan dan kepentingan para pemilih (*voter*) telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga merasa memiliki pilihan yang berbeda dan dapat diperbandingkan.

melalui proses pemilihan oleh rakyat yang dilakukan secara reguler, formal, dan damai. Disinilah partisipasi politik warga paling minimal terjadi.

Karena partisipasi politik yang minimal tersebut dipandang tidak memadai, maka berkembanglah gagasan untuk meningkatkan partisipasi tersebut. Peningkatan partisipasi jika mengacu pada Zittel dan dan Fuchs (2007:9-12) harus dilakukan dengan pendekatan *integrative democratization* yang menggabungkan dua pendekatan yang umum digunakan sebelumnya, yaitu melalui:

- (a) Meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi rakyat. Dalam hal ini Zittel dan Fuchs merujuk pada hasil penelitian Verba dan Nie (1972) dan banyak penelitian lain berikutnya, yang menyatakan bahwa mereka yang berpendidikan lebih tinggi dan memiliki pendapatan di atas rata-rata cenderung memiliki minat yang lebih tinggi untuk terlibat dalam kegiatan politik; dan
- (b) Melaksanakan reformasi institusional (*institutional reform*), yang terkait dengan gagasan *participatory engineering*. Zittel dan dan Fuchs mengacu pada penelitian Walker (1966), Pateman (1970), Cook dan Morgan (1971), Macpherson (1977), maupun Bachrach dan Botwinick (1992), yang menyatakan bahwa reformasi institusi dan mekanisme politik dapat memberi pilihan-pilihan politik pada warga negara, yang dapat menarik minat mereka untuk berpartisipasi karena melihat adanya peluang untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasinya.

2.2.2 Teori Demokrasi Deliberatif

Hansen (2004:80) menyatakan bahwa diskusi politik dan deliberasi sejak lama telah menjadi elemen penting dalam teori demokrasi. Meskipun memiliki banyak variasi, namun deliberasi selalu menjadi fitur inti dari demokrasi. Menurutnya, akar gagasan deliberasi dapat ditarik dari pemikiran beberapa filsuf dan pemikir

politik sejak abad 18, seperti: Rousseau⁴⁸; de Tocqueville⁴⁹; J.S. Mill⁵⁰; Dewey⁵¹; dan Koch⁵².

Namun para ahli umumnya bersepakat bahwa istilah demokrasi deliberatif (*deliberative democracy*) pertama kali diperkenalkan oleh J.M. Bessette pada tahun 1980.⁵³ Meskipun demikian, pemikir yang dianggap berjasa mengembangkan dan mempopulerkan konsep demokrasi deliberatif adalah Jürgen Habermas.⁵⁴ Teori Habermas mengenai demokrasi deliberatif didasarkan pada

⁴⁸ Rousseau dipandang sebagai pemikir politik pertama sejak era Yunani Kuno yang secara eksplisit menekankan pentingnya deliberasi dalam proses politik. Dia meyakini akan adanya kedaulatan rakyat dan hak mereka untuk mengelola pemerintahan sendiri (*self-government*), dalam bentuk demokrasi langsung atau *city-state*, dimana warganya dapat secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

⁴⁹ de Tocqueville, dari hasil pengamatannya atas demokrasi di Amerika saat itu, menekankan pentingnya partisipasi lembaga/institusi lokal, asosiasi-asosiasi sukarela, dan *civil society*. Dia sangat tertarik dengan budaya debat di Amerika, dan menekankan pentingnya diskusi dalam pengambilan keputusan, namun dapat kembali bersatu ketika telah dihasilkan keputusan.

⁵⁰ Mill menekankan pada pentingnya efek pendidikan politik warga dari pelaksanaan partisipasi dan deliberasi, yang dapat menghilangkan kecenderungan mementingkan diri sendiri dan keluarga, dan mendorong keterlibatan mereka dalam berbagai urusan publik.

⁵¹ Dewey dipandang sebagai pemikir politik Abad 20 yang memperjuangkan pentingnya menempatkan deliberasi dalam posisi yang lebih sentral dalam teori demokrasi. Menurutnya, prosedur voting dan keputusan ahli di pemerintahan harus dilengkapi dengan partisipasi publik. Konsultasi publik dianggap sebagai hal penting yang memungkinkan kepentingan dapat diformulasikan, diartikulasikan dan dikomunikasikan ke dalam sistem politik. Dalam hal ini Dewey menyatakan perlunya dikembangkan metode dan kondisi yang memungkinkan dapat dilakukannya debat, diskusi dan persuasi.

⁵² Koch berpendapat bahwa deliberasi sebagai inti demokrasi. Demokrasi bukan semata model atau sistem, tapi merupakan cara hidup dan kerangka berpikir. Menurutnya demokrasi adalah sebuah proses deliberasi atau musyawarah antar aktor-aktor yang bertentangan dan dengan hati-hati memeriksa isu-isu yang diperdebatkan untuk mencapai pemahaman dan kepentingan bersama.

⁵³ J.M. Bessette, "Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government" dalam R.A. Golwin dan W.A. Achambre (eds.), *How Democratic is the Constitution?* (1980). Diantaranya lihat Bohman dan Rehg, 1997:xii.

⁵⁴ Jürgen Habermas adalah seorang pemikir Jerman dari Mazhab Frankfurt yang mengembangkan teori kritik masyarakat. Habermas banyak mengadopsi sekaligus memformulasikan kembali gagasan dari para pemikir sebelumnya seperti Kant, Hegel, Marx, Durkheim, Parsons, Weber, Mead dan lainnya. Menurut Ritzer dan Goodman (2010), Habermas merupakan pemikir sosial terpenting dunia saat ini. Habermas mencoba menawarkan jalan keluar dari kebuntuan Teori Kritik, yang banyak dikritik karena 'tidak mampu' menawarkan jalan keluar atas kritik mereka terhadap Marxisme, Positivisme, Modernisme, Kapitalisme dan lainnya. Gagasan Habermas diantaranya mengenai negara hukum demokratis, *political public sphere*, legitimasi, opini publik, konsep rasio komunikatif dan rasio prosedural, etika diskursus dan teori diskursus. Selain Habermas, ada juga penulis yang menganggap John Rawls sebagai tokoh dari teori demokrasi deliberatif. Rawls adalah seorang pemikir dari Amerika. Gagasan utama yang dilontarkannya diantaranya mengenai teori keadilan, *political liberalism* dan *public reason*. Namun tidak semua ahli memandang Rawls dapat dikategorikan sebagai pemikir demokrasi deliberatif. Chambers (2003) menyatakan bahwa meskipun Rawls menggunakan istilah demokrasi deliberatif dan konsepnya mengenai *public reason* adalah kunci dalam memahami demokrasi, Rawls bukan termasuk teoritis demokrasi deliberatif, namun lebih sebagai penganjur teori liberalis.

pemetaannya mengenai konsep demokrasi. Menurutnya ada tiga model demokrasi, yaitu:

- (a) Model Liberal, yang mengacu pada konsep ‘liberal’ dari Locke yang berpendapat bahwa pemerintah direpresentasikan oleh aparatus dari administrasi publik dan masyarakat sebagai jaringan pasar terstruktur dari interaksi privat antar individu. Politik kemudian dimaknai sebagai memiliki fungsi mengumpulkan dan mendorong kepentingan privat terhadap aparatur pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Ada batasan jelas antara wilayah negara dan individu. Tugas negara adalah menjamin kepentingan dan hak-hak individu dapat terpenuhi dan terjaga;
- (b) Model Republik, yang memaknai politik sebagai bentuk reflektif dari kehidupan etis substansial, sebagai medium dimana anggota komunitas yang menyadari saling ketergantungan satu sama lain, bertindak sebagai warga negara. Keberhasilan diukur melalui persetujuan warga dan penghitungan hasil *voting*;
- (c) Model Proseduralis, yang mengedepankan diskursus melalui institusionalisasi prosedur korespondensi dan kondisi komunikasi.⁵⁵

Habermas memandang demokrasi berdasarkan model proseduralis tersebut. Deliberasi dalam konsep Habermas adalah prosedur sebuah keputusan dapat dihasilkan. Menurutnya, sebuah konsensus atau keputusan memiliki legitimasi jika sudah melalui proses pengujian atau diskursus, dimana semua isu dibahas bersama khususnya oleh pihak-pihak yang terkait langsung dengan isu tersebut, dalam posisi yang setara dan tanpa tekanan pihak lain. Arena dimana diskursus tersebut dapat berlangsung disebutnya sebagai *public sphere* (ruang publik). Menurut Habermas (1974), *public sphere* (ruang publik) merupakan suatu kehidupan sosial dimana opini publik dapat terbentuk. Dalam hal ini, model demokrasi deliberatif tidak lain merupakan konsep *political public sphere* (ruang publik politik). Habermas (1990:38), sebagaimana dikutip oleh Hardiman

⁵⁵ Habermas, “Three Normative Models of Democracy”, dalam Benhabib, 1996:21-30. Ulasan lain mengenai model-model tersebut lihat Habermas, 1998c:239-252.

(2009:134), memaknai *political public sphere* sebagai hakekat kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri dari warga negara dapat berlangsung.

Dalam masyarakat demokratis, akses untuk menyampaikan *public opinion* (opini publik) ini dijamin oleh negara, dimana opini publik tumbuh dari setiap pembicaraan para individu yang kemudian membentuk *public body* (institusi/badan publik). *Public opinion* ini terbentuk melalui diskusi publik, setelah publik --baik melalui informasi ataupun pendidikan-- dapat mengambil posisi atau suatu pendapat (Habermas, 1998b:66). Menurutnya, istilah *public opinion* mengacu pada tugas kritik dan kontrol dimana *public body* dari warga secara informal dan dalam pemilihan umum berkala secara formal serta praktek *vis-à-vis* struktur penguasa dalam bentuk negara.

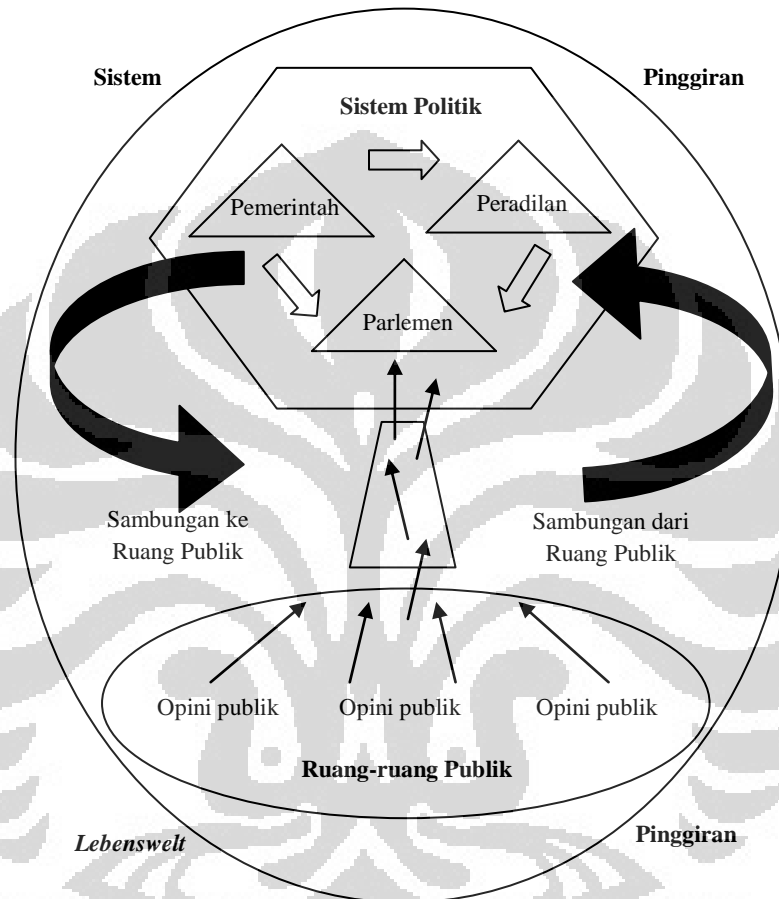
Habermas menambahkan, bahwa warga berperilaku sebagai *public body* ketika mereka berbicara dalam cara yang tidak dilarang yaitu dengan jaminan kebebasan berkumpul dan berserikat dan kebebasan untuk mengekspresikan dan mempublikasikan pendapat mereka tentang hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan umum. Dalam suatu *public body* yang besar semacam itu komunikasi memerlukan sarana khusus untuk transmisi informasi dan mempengaruhi orang-orang yang menerimanya. Gagasan tersebut terkait dengan konsep *civil society*. Dalam hal ini Habermas (1998a:367), yang dikutip Hardiman (2009:136), mendeskripsikan *civil society* sebagai:

"masyarakat sipil terdiri atas perhimpunan-perhimpunan, organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang kurang lebih bersifat spontan yang menyimak, memadatkan dan secara nyaring meneruskan resonansi keadaan persoalan kemasyarakatan di dalam wilayah-wilayah privat ke dalam ruang publik politis".

Inti dari konsep Habermas tersebut disarikan dalam model yang dibuat oleh Hardiman (2009) pada Gambar 2.1. Dalam model tersebut, semua produk hukum dan kebijakan yang dibuat oleh negara baik yang terkait dengan eksekutif, legislatif maupun institusi peradilan, harus melalui proses proses pengujian atau diskursus bersama *civil society*. Mengacu pada model di atas, dalam konteks

Indonesia, kebijakan pemerintah daerah seperti Rencana Strategis Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Perda, APBD, dan kebijakan daerah lainnya tentunya diharapkan juga dapat melalui proses diskursus tersebut.

Gambar 2.1: Hubungan *Public Sphere* dan Sistem Politik



Sumber: Hardiman, 2009:149

Meskipun demikian, teori yang ditawarkan Habermas mengenai demokrasi deliberatif berikut konsep-konsep yang terkait dengan hal tersebut juga tak luput dari kritik. Nash (2002) mengkritik orientasi pada konsensus dalam proses demokrasi deliberatif, yang (menurut Lyotard) akan memaksakan penyeragaman serta memarginalkan bahkan mematikan pengetahuan/pemahaman budaya lokal atau spesifik. Model yang ditawarkan Habermas juga dinilai *over-rasionalist*, yang berpotensi mengeksklusi entitas yang berada diluar norma-norma yang ada atau diakui oleh politik demokrasi liberal.

Kritik lain seperti yang diajukan Sanders (1997) yang menyatakan bahwa pada kenyataannya tidak semua orang mempunyai kemampuan yang memadai untuk menyampaikan argumen secara rasional. Mereka mungkin juga tidak terepresentasi dalam sistem dan lembaga politik formal, dan mungkin secara sistematis tidak diuntungkan, seperti kaum perempuan, kelompok minoritas, dan masyarakat miskin. Kalangan feminis dan teori multikultural bersikap skeptis terhadap visi Habermas dan apa yang ditawarkan teori demokrasi deliberatif (Benhabib, 1996, 2002; Fraser, 1997; Sanders, 1997; Young, 1996), yang menganggap *public sphere* yang ideal tidak realistis. Sementara Benhabib (1996, 2002) dan Young (1996) menilai konsep deliberatif tidak *fair* dan bias pada nilai dan norma dari kelompok dominan laki-laki.

Dari Indonesia sendiri, kritik terhadap teori demokrasi deliberatif juga disampaikan oleh Hardiman (2009:215 dan 217). Hardiman, yang sepengetahuan peneliti merupakan orang yang paling berjasa mempopulerkan pemikiran Habermas di Indonesia, memandang gagasan Habermas cenderung tidak menghendaki adanya perubahan radikal dalam modernitas kapitalistis. Niat Habermas untuk memperbaiki masyarakat secara komunikatif melalui diskursus-diskursus politik yang *fair*, mengabaikan kecenderungan logika pasar kapitalis yang menolak atau mengendalikan diskursus-diskursus rasional dalam ruang publik itu. Teori Diskursus bukan saja dapat dianggap tidak sejalan dengan semangat Teori Kritis yang mengkritik kapitalisme, juga dapat dianggap justru telah terjinakkan oleh sistem kapitalisme itu sendiri. Karenanya, meskipun Hardiman memandang teori demokrasi deliberatif menjanjikan dan membantu dalam membuka wawasan-wawasan baru terhadap pemahaman tentang demokrasi dalam masyarakat yang kompleks seperti di Indonesia, menurutnya teori tersebut tetap harus dipandang sebagai teori yang belum selesai.

Menariknya, kritik-kritik tersebut tampaknya justru membuat teori demokrasi deliberatif menjadi semakin populer dan banyak digunakan dalam analisis relasi masyarakat dan negara dan aktor-aktor lainnya yang semakin dinamis.⁵⁶ Namun

⁵⁶ Banyak turunan model partisipasi warga dalam pembahasan isu public dan pengambilan keputusan yang coba diterapkan di banyak negara, seperti: *citizen juries*, *citizen panels*, *concensus*

dalam perkembangannya, peneliti melihat bahwa pemikiran yang berkembang seputar konsep demokrasi deliberatif tampaknya juga tidak semuanya mengikuti konsep dan model 'ideal' yang dikembangkan Habermas di atas. Meskipun masih mengacu pada teori dasar dari Habermas, para ahli dan praktisi telah mengembangkan definisi mereka sendiri dan mencoba mengaplikasikannya di banyak negara. Menurut Hickerson dan Gastil (2008:281-282), sebagian ahli (Barber, 2004; Pateman, 1970) berpendapat bahwa demokrasi deliberatif sesungguhnya didasarkan pada keyakinan bahwa partisipasi yang luas dari warga biasa dalam pemerintahan akan membuat demokrasi menjadi lebih sehat. Melo dan Baiocchi (2006), berpendapat bahwa konsep demokrasi deliberatif mengacu pada induk teori politik yang bertujuan untuk mengembangkan versi demokrasi substantif berdasarkan justifikasi publik melalui proses deliberasi (musyawarah). Konsep tersebut dianggap lebih dari sekedar demokrasi sebagai sebuah sistem politik ataupun demokrasi 'berbasis diskusi'. Mengacu pada pandangan sejumlah ahli, demokrasi deliberatif dimaknai sebagai musyawarah warga sebagai cara yang rasional dan setara (*equal*) dalam membahas permasalahan untuk mentransformasikan preferensi dan keinginan warga negara (Cohen dan Rogers, 1992; Cohen, 1996; 1998).

Definisi demokrasi deliberatif yang diajukan para ahli memang kemudian menjadi sangat beragam (Chambers, 2003), namun pada intinya dapat dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan yang egaliter dimana warga dapat mendengar, belajar dari, dan terlibat dengan beragam alternatif cara pandang (Burkhalter et.al., 2002; Dryzek, 2000). Diskusi warga dan pengambilan keputusan secara langsung adalah inti dari teori deliberatif, karena berangkat dari asumsi bahwa pimpinan atau perwakilan yang terpilih dapat saja lebih mengutamakan kepentingan pribadi mereka dibandingkan kepentingan warga yang mereka wakili (Chambers, 2003). Meskipun dapat diperdebatkan apakah kelompok-kelompok deliberatif dapat sungguh-sungguh dapat diberdayakan untuk menciptakan putusan kebijakan ataukah tidak, Hickerson dan Gastil (2008:283) juga mencatat adanya pendapat sejumlah ahli yang menyatakan bahwa demokrasi deliberatif tetap dapat membuat

conference, deliberative polling, citizen advisory committee, public hearing, town hall, dan lainnya. Lihat Abelson et.al. 2003.

para pemimpin warga menjadi lebih akuntabel melalui penginformasian dan pendidikan para pemimpin tersebut mengenai keinginan kolektif orang-orang yang diwakilinya (Cohen, 1989; Dryzek, 1990; Fishkin, 1991; Gastil, 2000; Leib, 2004).

Demokrasi deliberatif bukan bermakna intervensi langsung ruang publik ke dalam sistem politik (bukan demokrasi langsung) dan juga bukan depolitisasi ruang publik. Demokrasi deliberatif dapat dimaknai sebagai peran politis aktif warganegara yang membangun opini mereka secara publik dalam mengontrol dan mengendalikan arah pemerintahan secara tidak langsung melalui media hukum (dengan bahasa hukum). Dalam hal ini demokrasi deliberatif menghormati garis batas antara negara dan masyarakat, namun ingin agar negara hukum demokratis mencairkan komunikasi-komunikasi politis di dalamnya (Hardiman, 2009:150).

Tampaknya, demokrasi deliberatif menjadi alternatif yang lebih rasional untuk mengatasi kelemahan demokrasi perwakilan (*representative democracy*), dan besarnya hambatan untuk menjalankan demokrasi langsung (*direct democracy*) seperti di Yunani Kuno, dan Swiss saat ini.⁵⁷ Demokrasi deliberatif kemudian menjadi subyek dalam teori politik yang paling banyak didiskusikan dalam dua dekade terakhir (Gutmann dan Thompson, 2004:vii). Fung (2005:397) bahkan menyebut teori demokrasi deliberatif sebagai gagasan politik ideal yang revolusioner (*revolutionary political ideal*), karena menawarkan konsep mengenai perubahan mendasar pada basis-basis pengambilan keputusan politis, yang mencakup pengambilan keputusan, institusionalisasi proses-proses tersebut dan karakter politik itu sendiri.

Selain itu, Hicks, Janoski dan Schwartz (2005:2) menyatakan bahwa sub teori dalam sosiologi politik yang berkenaan dengan topik mengenai opini publik, deliberasi politik, dan partisipasi politik akan cukup berperan dalam analisis ilmu-ilmu sosial. Kajian tentang opini publik akan banyak digunakan dalam analisis mengenai jaringan sosial dan media massa (Gamson, 1992; Huckfeldt dan

⁵⁷ Lihat Simone Baglioni, "The effects of direct democracy and city size on political participation: The Swiss case", dalam Zittel (2007:91-106).

Sprague, 1995; Burstein, 2003). Teori-teori mengenai deliberasi politik akan semakin berperan dalam analisis mengenai demokrasi di kelompok-kelompok kecil, *deliberative polling*, dan pertemuan kota (*town hall*) berbasis teknologi (Bohman, 1996; Fishkin, 1991; Fishkin dan Laslett, 2003; Habermas, 1984, 1987, 1996). Sementara teori-teori mengenai proses demokrasi menjadi semakin penting dengan adanya perkembangan dan transformasi di tubuh partai politik dan serikat buruh, perubahan identitas politik, dan partisipasi dalam kelompok-kelompok sukarela (*voluntary groups*) yang menyebabkan perpecahan lintas sektoral (Manza, Brooks, and Sauder, 2005, dan Schwartz dan Lawson, 2005).

Populernya teori demokrasi deliberatif tentunya juga memunculkan pertanyaan mengenai apa sesungguhnya kelebihan teori tersebut. Hickerson dan Gastil (2008:281-282) mencoba memetakan pendapat dari para ahli mengenai kelebihan teori demokrasi deliberatif. Sebagian menyatakan bahwa konsep 'situasi bicara ideal' dan konsep-konsep terkait telah memicu pengembangan *deliberative polls* dan banyak model praktek deliberatif lainnya (Crosby dan Nethercutt, 2005; Fishkin, 1991; Hendriks, 2005; Lukensmeyer, Goldman dan Brigman, 2005; Mathews, 1994; Ryfe, 2002). Selain itu, para ahli lain menyatakan bahwa melalui proses deliberasi, warga dapat tercerahkan dan memahami kelebihan dari sudut pandang/pendapat pihak lain dan nilai dari partisipasi warga secara umum (Burkhalter, Gastil dan Kelshaw, 2002; Carpini, Cook dan Jacobs, 2004; Melville, Willingham dan Dedrick, 2005; Warren, 1992). Sementara para pemikir teori deliberatif yang lain mengklaim bahwa keputusan yang dihasilkan dari proses deliberatif memiliki potensi untuk berkontribusi pada demokrasi representatif yang lebih luas dan lebih kuat legitimasinya, dengan cara menekan pejabat publik terpilih untuk merespon rekomendasi-rekomendasi dari proses deliberatif tadi (Ackerman dan Fishkin, 2004; Dryzek, 2000; Gastil, 2000; Leib, 2004; Yankelovich, 1991). Pada akhirnya, metode ini dianggap dapat mengatasi masalah yang dihadapi model demokrasi pada masyarakat yang kompleks, ketika pruralitas nilai-nilai membuat upaya membangun 'kebaikan bersama' menjadi sulit diwujudkan (Dahl, 1989; Mansbridge, 1990; Cohen, 1996; 1998; Elster, 1998; Hirst, 1998).

Menurut Chambers (2003:307), konsep demokrasi deliberatif kemudian berkembang dari tataran '*theoretical statement*' menjadi '*working theory*'. Dalam upaya 'membangunkan' konsep tersebut, Morrel (2005:55) menyebutkan beberapa bentuk --yang menurut peneliti juga merupakan tingkatan-- dari proses deliberasi, yang kemudian peneliti gunakan sebagai karakteristik deliberasi pada Gambar 2.3, yaitu:

- (a) Dialog warga (*civic dialogue*), yang menurut Walsh (2003:3-18) bertujuan mengajak para *stakeholder* yang beragam untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai orang-orang dari beragam latar belakang yang hidup di komunitas yang sama, sebagai langkah untuk mencapai *civic engagement*;
- (b) Diskusi deliberatif (*deliberative discussion*), yang bertujuan untuk membangun diskusi yang seksama dan dengan informasi yang memadai diantara warga mengenai isu-isu yang dianggap penting baik di tingkat lokal maupun nasional; dan
- (a) Pengambilan keputusan deliberatif (*deliberative decision making*), yaitu tahap dimana peserta dialog harus membuat keputusan, meskipun itu tidak selalu berupa konsensus.

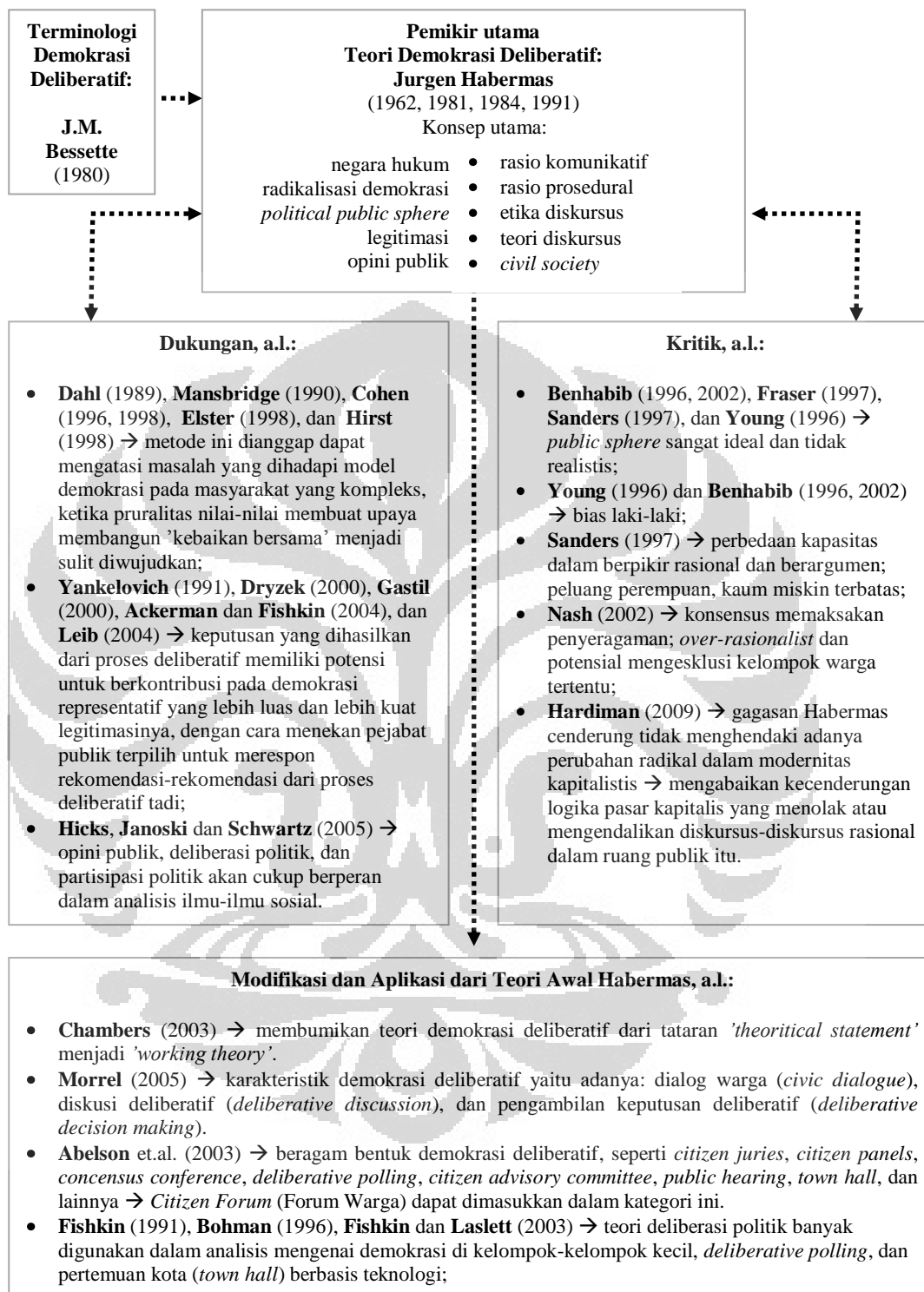
Dalam proses deliberasi tersebut diperlukan apa yang disebut Fung (2005:414) sebagai fasilitator yang netral dan terlatih baik sehingga proses diskusi/dialog/pengambilan keputusan menjadi lebih lancar (*smoothly*) dan memastikan tidak ada dominasi pembicaraan didalamnya. Selain itu, sebagian ahli lain juga menyatakan perlu tersedianya warga yang aktif (*active citizenship*) yang bersedia terlibat dalam proses deliberasi tersebut.⁵⁸

⁵⁸ Konsep *active citizenship* memiliki makna yang beragam. Di negara-negara *welfare state* yang umumnya kental dengan tradisi liberal, konsep tersebut terkait dengan tiga hal, yaitu: (a) tanggung jawab (*responsibility*), untuk turut terlibat mengatasi masalah publik, termasuk dalam hal pembiayaan dan keterlibatan langsung (fisik dan emosional); (b) partisipasi, terkait dengan upaya membangun kondisi yang inklusif sehingga dapat terjadi transformasi *publik sphere*; (c) pilihan (*choice*), yang banyak dimaknai sebagai konsep 'pilihan konsumen' (*active citizenship is consumerist choice*) (lihat Janet Newman and Evelien Tonkens, "Active Citizenship: Responsibility, Choice and Participation" dalam Newman dan Tonkens, 2011:179-200). Dalam

Peneliti mencoba merangkum perkembangan teori demokrasi deliberatif seperti terlihat pada Gambar 2.2. Menurut peneliti, populernya gagasan Habermas tersebut sangat mungkin karena sampai tingkat tertentu dianggap dapat menjembatani kepentingan dan kecenderungan dari dua pihak, yaitu: (a) kecenderungan dari *civil society* untuk memperbesar daya tawar dan partisipasi mereka dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan; dan (b) kecenderungan dari negara untuk tetap mempertahankan legitimasi dan stabilitas, dimana peran *civil society* dimungkinkan sejauh tidak merusak sistem yang ada. Seperti dinyatakan (Hardiman, 2009:122), teori diskursus dari Habermas memang tidak ditujukan untuk mencari praksis perubahan struktural secara revolusioner, melainkan sebuah teori untuk mendorong reformasi demokratis dalam negara hukum yang ada.

pandangan peneliti, konsep *active citizenship* yang umum dipahami di Indonesia tampaknya lebih banyak dimaknai sebagai kesediaan dalam partisipasi saja.

Gambar 2.2: Perkembangan Teori Demokrasi Deliberatif



2.2.3 Teori Demokrasi Asosiatif

Seperti halnya Habermas dan para pemikir teori demokrasi deliberatif, banyak teoritis politik lainnya yang berupaya mengembangkan model-model demokrasi yang dipandang lebih mampu menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi warga negara, yang kerap tidak dapat terpenuhi dengan baik pada model demokrasi perwakilan pada umumnya.⁵⁹ Namun berbeda dengan para pendukung teori demokrasi deliberatif yang cenderung membatasi diri untuk tidak mengintervensi secara langsung kekuasaan dan merubah secara radikal sistem politik yang ada, beberapa pemikir menginginkan agar warga --melalui berbagai asosiasi-asosiasi-- dapat terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan publik. Diantaranya para pemikir tersebut adalah Hirst (1994), Cohen dan Rogers (1995), serta Fung dan Wright (2003). Oleh Fung (2007), gagasan-gagasan mereka dimasukkan dalam kelompok pendekatan demokrasi partisipatori (*participatory democracy*) yang ingin agar warga -- melalui beragam asosiasi-asosiasi -- lebih banyak terlibat dalam urusan-urusan publik (*direct governance*).

Fung (2007:448-450), memetakan empat konsep demokrasi, yaitu demokrasi minimalis (*minimal democracy*)⁶⁰, demokrasi agregatif (*aggregative democracy*)⁶¹, demokrasi deliberatif,⁶² dan demokrasi partisipatori (*participatory*

⁵⁹ Dalam hal ini, Fung berpendapat bahwa ada kemungkinan sulit untuk menerapkan demokrasi deliberatif yang mengedepankan argumentasi, diskusi dan persuasi di dalam iklim politik yang kurang kondusif, seperti adanya ketidakadilan yang ekstrem atau adanya dominasi yang sistematis oleh aktor-aktor tertentu. Dalam situasi tersebut, kadang dibutuhkan kombinasi antara penerapan argumentasi, diskusi dan persuasi dengan cara-cara lain yang tergolong non-persuasif, atau bahkan koersif (paksaan). Fung menyebut pendekatan tersebut sebagai *deliberative activism* atau secara bebas dapat diartikan sebagai 'aktivisme deliberatif' (lihat Fung, 2005:397-398).

⁶⁰ Menurut Fung, *minimal democracy* menempatkan pemilihan umum sebagai institusi politik utama, sebagai sarana menjamin kebebasan individu dalam menentukan pilihan politik. Partisipasi dalam pemilihan umum dipandang sudah cukup untuk menampung aspirasi rakyat atau warga, untuk selanjutnya para pemimpin politik terpilihlah yang akan menjalankan pemerintahan berdasarkan mandat tersebut. Dalam perspektif ini, warga dipandang kurang memiliki kapasitas individual (waktu, energi, komitmen, informasi, dan keterampilan politik) untuk terlibat dalam pembahasan kebijakan publik.

⁶¹ Dalam *aggregative democracy*, Fung memandang warga dapat dan memiliki preferensi dan cara pandang politik yang rasional. Fung mengutip Dahl (1991), yang berpendapat bahwa opini dan penilaian warga dipandang dapat menentukan isi dari hukum, kebijakan dan tindakan publik. Opini publik tersebut diperoleh melalui *polling*, survei dan bentuk-bentuk jajak pendapat lainnya. Dalam konsep ini, sebuah pemerintahan dipandang lebih demokratis ketika hukum dan kebijakan yang mereka buat lebih dekat pada posisi tengah-tengah dari pandangan para pemberi suara atau *median voter* (seperti dinyatakan Black 1948; Downs 1957; Hacker dan Pierson, 2005).

democracy). Fung sendiri berada pada barisan pengusung konsep partisipatori demokrasi, yang mengkritisi tiga konsep demokrasi lainnya karena dipandangnya belum sungguh-sungguh mampu memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi warga. Fung dan Wright (2001) menawarkan konsep *deepening democracy* sebagai bentuk perluasan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Demokrasi partisipatori ini, lahir dari cara pandang yang membedakan atau memisahkan nilai partisipasi dari prinsip deliberasi (Cohen dan Fung, 2004). Fung mengutip Barber (1984, 1988, 1989) yang memandang demokrasi memiliki nilai-nilai pemerintahan sendiri (*self-government*), kesetaraan politik, dan aturan main yang rasional. Warga harus mengambil bagian secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun partisipasi tersebut bukan berarti harus dilakukan pada setiap level dan tiap kegiatan, namun harus dilakukan dalam frekuensi yang cukup tinggi. Demokrasi dipandang sebagai sebuah 'komunitas', dimana warga dapat menyelesaikan sendiri sengketa dan masalah-masalah umum yang mereka hadapi, yang didalamnya individu-individu bertransformasi menjadi warga, dan berperan menentukan kebijakan publik yang terkait dengan kepentingan mereka. Disini Fung mengutip Barber (1984) yang menyatakan bahwa diperlukan adanya perubahan-perubahan institusional pada struktur pemerintahan perwakilan, sehingga memungkinkan warga secara langsung dapat mendiskusikan dan memutuskan isu-isu terkait kepentingan publik.

Banyak ahli yang mengidentifikasi asosiasi warga sebagai asosiasi sekunder (*secondary associations*), yang dibedakan dengan asosiasi publik (*public associations*) yang merupakan institusi bentukan negara/pemerintah. Menurut Elstub (2008:107), banyak ahli yang berpendapat bahwa keberadaan asosiasi-asosiasi sekunder dapat menjadi alternatif yang menarik bagi partisipasi politik secara langsung, yang didalamnya melibatkan upaya perencanaan oleh aktor non negara, pengambilan keputusan, pemenuhan tugas/kewajiban dan interaksi, serta

⁶² Fung berpendapat, bahwa dalam demokrasi deliberatif ini kebijakan dan hukum bukan semata berasal dari agregat opini warga melalui jajak pendapat, tetapi harus sesuai dengan harapan dari tiap warga secara individu. Para pejabat publik yang terpilih dalam Pemilu harus terlebih dahulu melibatkan warga dalam mengelaborasi berbagai posisi politik, argumentasi dan perspektif dan menghasilkan kompromi-kompromi yang rasional sebelum membuat sebuah keputusan atau kebijakan.

menyediakan saluran bagi warga untuk terlibat dalam diskursus publik (Hadley dan Hatch, 1981; Martell, 1992:166; Hirst, 1994; Cohen dan Rogers, 1995; Perczynski, 2000; Warren, 2001; Fung 2003; Bader, 2005; Einfeld, 2006:15). Karenanya asosiasi-asosiasi sekunder dapat berkembang menjadi pengelolaan mandiri oleh warga (*self-governance*) yang sekaligus dapat mengurangi beban negara.

Dalam kaitan antara asosiasi dengan demokrasi, Fung (2003:518-529) mengidentifikasi enam kontribusi dari keberadaan asosiasi-asosiasi warga terhadap demokrasi, yang uraiannya secara ringkas, sebagai berikut:

(a) Kebaikan intrinsik dari demokrasi dan kebebasan berasosiasi

Fung mengutip Dahl (1989) yang menyatakan bahwa dalam salah satu isu penting dalam konsep demokrasi liberal kesempatan untuk menciptakan ruang bagi kewarganegaraan yang plural dan tumbuhnya asosiasi-asosiasi politik. Institusi liberal menciptakan perlindungan legal yang memungkinkan asosiasi-asosiasi dapat berkembang luas. Hal tersebut terkait erat dengan nilai-nilai kebebasan individu termasuk kebebasan dalam memilih asosiasi dan membentuk asosiasi. Kaum liberal klasik memandang hal tersebut sepenuhnya adalah pilihan individual. Sementara kaum demokrasi liberal memandang pentingnya peran negara atau pemerintah dalam mendukung perkembangan asosiasi-asosiasi tersebut. Fung juga mengutip Paxton (2002) yang menyatakan bahwa lebih banyak asosiasi yang berpeluang untuk eksis ketika pemerintah mengizinkan mereka untuk eksis. Para ahli menyimpulkan bahwa ada korelasi yang signifikan dan positif antara demokrasi liberal dengan jumlah dan keanekaragaman asosiasi;

(b) Sosialisasi kewarganegaraan (*civic socialization*) dan pendidikan politik

Fung mengutip Warren (2001) yang menyatakan bahwa asosiasi menanamkan nilai-nilai kewargaan pada anggota-anggotanya, seperti perhatian pada masalah publik, kebiasaan bekerjasama, toleransi, menghargai pihak lain, menghargai penegakan hukum, kemauan untuk

berpartisipasi dalam kehidupan publik, kepercayaan diri, keyakinan akan keberhasilan (*efficacy*). Selain itu, Fung juga merujuk pada Putnam (2000) yang berpendapat bahwa nilai dan keyakinan untuk bertindak bagi kepentingan orang banyak tanpa berharap mendapatkan timbal balik seketika (*generalized reciprocity*). Asosiasi juga dipandang sebagai 'sekolah demokrasi' (*school of democracy*) karena mengajarkan keterampilan politik, seperti cara pengorganisasian, mengadakan pertemuan, menulis gagasan, berargumentasi, berpidato, dll. (*civic skill*). Sementara mengacu pada pendapat Verba et.al (1995) mengenai sumberdaya yang dibutuhkan dalam partisipasi (material, waktu dan keterampilan), menurut Fung keberadaan asosiasi juga mengajarkan *civic skill* yang akan dapat meningkatkan demokrasi melalui peningkatan partisipasi politik. Dalam hal ini, asosiasi yang memungkinkan anggotanya untuk bertatap muka secara langsung dan bersifat horisontal, lebih memiliki peluang untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik dibandingkan asosiasi yang bersifat hirarkis, vertikal, dan 'jarak jauh' (misalnya asosiasi dimana partisipasi anggota dalam bentuk iuran atau sumbangan uang saja);

(c) Perlawanan dan kekuatan kontrol (*checking power*)

Asosiasi warga juga dapat berperan dalam melakukan perlawanan (*resistance*) terhadap dominasi dan kekuatan anti demokrasi. Dalam konteks dimana institusi demokrasi masih 'muda' dan rapuh, kontribusi utama dari asosiasi terhadap demokrasi kerap kali berupa perlawanan terhadap otoritas yang tidak memiliki legitimasi. Fung mengutip Jenkins dan Goetz (1999) yang menyatakan bahwa dalam konteks pemerintahan yang korup namun tidak otoriter, asosiasi dapat berperan melakukan kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan dengan jalan monitoring terhadap aparatur negara, dan mendorong mereka untuk lebih transparan, misalnya. Kritik terhadap asosiasi tipe ini adalah tak jarang justru mengembangkan mekanisme yang kurang demokratis di dalam asosiasi sendiri, atau sulit beradaptasi ketika sistem politik yang dilawan relatif sudah menjadi lebih demokratis;

(d) Representasi kepentingan

Kontribusi asosiasi dalam hal ini adalah meningkatkan cara bagaimana kepentingan warga dapat terwakili (diperjuangkan oleh para pembuat kebijakan) dan dituangkan dalam hukum dan kebijakan yang dibuat oleh negara. Asosiasi menyediakan saluran tambahan bagi individu-individu untuk mendesakkan isu-isu publik yang menjadi perhatian mereka, misalnya melalui *voting*, lobby, dan kontak langsung dengan pejabat pemerintah. Selain meningkatkan kualitas keterwakilan, asosiasi juga meningkatkan kesetaraan keterwakilan politik (*equality of political representation*), terutama bagi masyarakat yang terpinggirkan;

(e) Deliberasi publik dan *public sphere*

Fung mengidentifikasi kontribusi lainnya dari asosiasi adalah memfasilitasi deliberasi publik, seperti yang diungkapkan Habermas (1996) maupun Cohen dan Arato (1994). Pengambilan keputusan publik dipandang lebih deliberatif jika dapat dilakukan secara setara (*equal*) dan melalui proses komunikasi terbuka dimana partisipan dapat saling berargumentasi, dibandingkan jika keputusan diambil lebih karena kekuatan/paksaan, uang, ataupun jumlah suara semata. Seperti diuraikan pada pembahasan mengenai teori demokrasi deliberatif di bagian sebelumnya, perbedaan sumberdaya dan status diantara para warga atau anggota asosiasi kemungkinan akan menghalangi kemampuan untuk melaksanakan proses deliberasi ini. Dalam hal ini Fung mengutip Warren (2001) yang berpendapat bahwa asosiasi yang mungkin untuk menjaga ruang publik tetap hidup adalah mereka yang dapat meraih dukungan luas dari publik, dan memiliki kapasitas untuk memproyeksikan suara mereka dari waktu ke waktu dan di semua ruang publik.

(f) Pemerintahan langsung (*direct government*)

Kelima gagasan sebelumnya dipandang lebih berorientasi pada upaya peningkatan kualitas input terhadap proses pengambilan keputusan dan kebijakan, tanpa merubah instrumen atau 'mesin' pengambilan keputusan itu sendiri. Beberapa ahli memandang warga seharusnya dapat mengambil

peran yang langsung dalam fungsi-fungsi regulasi tersebut. Mereka mengajukan pendekatan rekonfigurasi pemerintahan yang lebih radikal, untuk mengatasi defisit demokrasi akibat terbatasnya input dari sisi pemerintah dalam proses demokrasi. Dalam hal ini, asosiasi-asosiasi warga dibayangkan dapat berperan lebih besar dengan terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik. Melalui hal tersebut, asosiasi-asosiasi warga dapat turut berperan meningkatkan kualitas output dari pemerintah, yaitu peningkatan kemampuan pemerintah dalam hal menyelesaikan masalah-masalah publik.

Di atas disebutkan mengenai asosiasi sebagai wadah untuk mencapai tujuan bersama. Elstub (2008:101) mengutip definisi klasik dari Cole (1920)⁶³ yang memaknai asosiasi sebagai setiap kelompok dari orang-orang yang memiliki tujuan atau agregasi tujuan yang sama, dan terlibat dalam suatu program aksi bersama. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut mereka bersepakat untuk bersama-sama melakukan suatu metode dan prosedur tertentu yang meskipun bukan merupakan suatu bentuk yang sempurna namun dapat menjadi panduan umum bagi tindakan bersama. Setidaknya ada dua hal yang mendasar dan perlu untuk setiap asosiasi, yaitu adanya tujuan yang sama dan, sampai batas tertentu, adanya aturan tindakan bersama.

Teori demokrasi asosiatif (*associative democracy*) terkait erat dengan konsep *direct government* yang telah diulas sebelumnya. Dalam hal ini Fung dan Wright (2003) mengajukan pendekatan yang lebih moderat dari gagasan Hirst⁶⁴ maupun

⁶³ Cole mendefinisikan asosiasi sebagai: “any group of persons pursuing a common purpose or aggregation of purposes by a course of cooperative action extending beyond a single act, and, for this purpose, agreeing together upon certain methods and procedures and laying down, in however rudimentary a form, rules for common action. At least two things are fundamental and necessary to any association: a common purpose and, to a certain extent, rules of common action. (Cole, *Social Theory*, 1920:37).

⁶⁴ Menurut Fung (2003:526), versi maksimal dan ‘ambisius’ dari konsep ini adalah yang diajukan Hirst (1994) yang berpendapat bahwa negara dan ‘ekonomi’ harus direstrukturisasi agar dapat memberikan jalan bagi asosiasi-asosiasi untuk secara gradual dan progresif dapat menjadi alat utama dalam hubungan antara politik dan ekonomi pada pemerintahan demokratis. Caranya adalah dengan menyerahkan fungsi-fungsi tertentu dari pemerintahan dan pembangunan kepada asosiasi-asosiasi, dan menciptakan mekanisme yang memungkinkan adanya anggaran publik yang dapat dikelola asosiasi-asosiasi tersebut. Konsep Hirst termasuk dalam ‘aliran’ *associationalism* yang memandang bahwa baik kebebasan individu maupun kesejahteraan manusia akan dapat terwujud dengan lebih baik ketika banyak urusan masyarakat sedapat mungkin dikelola secara sukareka

Cohen dan Rogers.⁶⁵ Fung dan Wright menyebut pendekatan mereka sebagai Empowered Participatory Governance (selanjutnya disingkat EPG), yang secara bebas dapat diartikan sebagai 'penguatan tata pemerintahan yang partisipatif'. EPG bersifat '*participatory*' karena pendekatan ini bergantung pada komitmen dan kapasitas orang biasa untuk membuat keputusan yang masuk akal atau rasional melalui proses deliberasi atau musyawarah. EPG juga bersifat '*empowered*' karena pendekatan ini mencoba untuk menghubungkan tindakan dengan diskusi. Dalam tataran konsep, EPG menekankan pentingnya nilai-nilai partisipasi, musyawarah, dan pemberdayaan, dengan batasan yang hati-hati dan memperhatikan tingkat kemungkinan pelaksanaannya. Gagasan ini mungkin melampaui bentuk konvensional kelembagaan demokratis, yang memiliki tujuan cukup praktis untuk meningkatkan respon dan efektivitas negara sementara pada saat yang sama sehingga lebih adil, partisipatif, deliberatif, dan akuntabel (Wright dan Fung, ed., 2003:5-6).

Konsep ini dibangun dari empat eksperimen EPG, yaitu pada organisasi warga terkait isu pendidikan dan keamanan lingkungan (*community policing*) di Chicago (USA), program perencanaan konservasi lingkungan hidup di USA, perencanaan anggaran kota yang partisipatif di Porto Alegre (Brazil), dan kebijakan desentralisasi di West Bengal dan Kerala (India). Menurut Wright dan Fung, ed. (2003:15), EPG berusaha untuk memajukan tiga arus dalam ilmu sosial dan teori demokrasi, yaitu: (a) Dibutuhkan banyak komitmen normatif dari analisa praktek dan nilai-nilai komunikasi, justifikasi publik, dan deliberasi/musyawarah; (b) Hal ini juga menempatkan deliberasi secara empiris dalam organisasi tertentu dan praktek, untuk menyusun pengalaman sosial untuk memperdalam pemahaman tentang musyawarah praktis dan mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan

(*voluntary*) dan secara demokratis oleh asosiasi-asosiasi yang mengurus dirinya sendiri (*self-governing associations*) (lihat Hirst, 1994:19).

⁶⁵ Cohen dan Rogers (1995:55) merekomendasikan adanya hubungan yang lebih dekat antara asosiasi-asosiasi dan pemerintah untuk mengatasi keterbatasan pada kebijakan sosial dan ekonomi pada negara kesejahteraan (*welfare state*). Asosiasi diharapkan dapat memainkan peran lebih luas, yang aktivitasnya terhubung dengan otoritas formal dari lembaga-lembaga publik, dalam hal: (a) menyusun kebijakan; (b) koordinasi kegiatan ekonomi; (c) pelaksanaan dan administrasi kebijakan. Meningkatnya peran asosiasi-asosiasi dalam fungsi-fungsi negara dipandang akan meningkatkan kualitas informasi dalam formulasi kebijakan dan meningkatkan tingkat kerjasama antara perwakilan asosiasi-asosiasi dalam kompleksitas hubungan para aktor yang saling terhubung (lihat Fung, 2003:527).

kualitasnya; (c) EPG merupakan bagian dari sebuah kolaborasi yang lebih luas untuk menemukan dan membayangkan lembaga-lembaga demokrasi yang sekaligus lebih partisipatif dan efektif dari konfigurasi yang intens antara perwakilan politik dan administrasi birokrasi.

Menurut Fung (2003:528), seperti halnya pada pendekatan *associative-governance* dari Hirst maupun Cohen dan Rogers, EPG menempatkan rekonfigurasi substansial terhadap pemerintah sebagai sarana mengajak aktor-aktor sosial untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan administrasi. Dalam perannya sebagai perantara (*intermediary*) antara warga dengan struktur formal negara, model EPG menjadi bentuk-bentuk institusional yang menciptakan arena dimana warga dapat terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Dari uraian tadi jelaslah bahwa asosiasi-asosiasi memainkan peran penting dalam model EPG. Menurut Fung, EPG tak jarang muncul akibat adanya desakan dari organisasi-organisasi gerakan sosial, yang bertujuan untuk mendukung upaya kontrol di tingkat lokal, akuntabilitas pemerintahan, atau keadilan sosial. Dapat dikatakan, asosiasi dapat menjalankan peran sebagai pembentuk (*generative role*) dari model EPG tersebut. Asosiasi juga dapat berperan merekrut dan memobilisasi warga, serta melengkapi individu-individu dengan kapasitas yang diperlukan dalam partisipasi politik, seperti memotivasi, mendukung informasi, dan meningkatkan keterampilan politik, melalui berbagai bentuk pelatihan dan peningkatan kapasitas.

Wright dan Fung, ed. (2003:16-18) mengemukakan tiga prinsip umum yang menjadi dasar EPG, yaitu:

(a) Berorientasi praktis

Mengembangkan struktur pemerintahan yang diarahkan untuk memberi perhatian yang cukup pada masalah-masalah konkret. Meskipun sering dikaitkan dengan gerakan sosial dan partai politik, EPG berbeda karena fokus pada masalah praktis, seperti menyediakan keamanan publik, pekerja pelatihan, merawat habitat, atau menyusun anggaran kota yang masuk akal. Fokus pada masalah praktis juga menciptakan situasi di mana

para aktor yang umumnya terbiasa bersaing satu sama lain untuk memperoleh kekuasaan atau sumber daya dapat mulai bekerja sama dan membangun hubungan yang lebih menyenangkan. Namun ada kecenderungan pula dapat mengalihkan perhatian agen dari hal yang sesungguhnya lebih penting, seperti konflik yang lebih luas (misalnya pajak redistributif atau hak atas kekayaan), karena lebih terfokus pada masalah-masalah yang terbatas.

(b) Partisipasi dari bawah

Perubahan yang diinginkan adalah membentuk saluran baru bagi mereka yang paling terkena dampak langsung dari masalah yang ada --biasanya adalah warga biasa dan birokrasi di lapangan (*street level bureaucrats*)-- untuk menerapkan pengetahuan, kecerdasan, dan minat dalam merumuskan solusi. Justifikasinya adalah bahwa solusi yang efektif untuk beberapa jenis masalah publik mungkin memerlukan pertimbangan dari beragam pengalaman dan pengetahuan, pikiran yang relatif lebih terbuka dari para warga negara dan operator lapangan. Hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh para ahli dengan keilmuan dan keterampilan tertentu saja. Selain itu, partisipasi langsung dari operator akar rumput akan meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi rentang birokrasi yang ada pada partai politik dan aparat birokrasi pemerintah. Salah satu prestasi utama dari partisipasi warga di Porto Alegre dan Kerala adalah dalam mengurangi kebocoran fiskal akibat patronase, serta dapat melepaskan dari cengkeraman elit politik tradisional. Dalam hal ini, tugas para ahli adalah untuk memfasilitasi proses deliberasi dalam pengambilan keputusan, dan untuk membangun sinergi antara kaum profesional dan warga negara.

(c) Solusi deliberatif

Dalam pengambilan keputusan musyawarah, peserta mendengarkan posisi masing-masing pihak, dan dapat menetapkan pilihan setelah mempertimbangkan berbagai informasi dan pendapat yang ada. Peserta harus menyampaikan argumentasi dan mempersuasi satu sama lain dengan menawarkan alasan yang dapat diterima oleh orang lain. Proses deliberasi

kerap ditandai dengan adanya konflik sengit, pemenang, dan pecundang. Fitur penting dari deliberasi yang sejati adalah bahwa peserta menemukan alasan yang dapat mereka terima dalam tindakan kolektif, meskipun hal tersebut belum tentu merupakan hal yang benar-benar mereka dukung atau dapat memberikan keuntungan maksimal.

Empat tipe pengambilan keputusan, yaitu deliberatif, komando, agregatif dan negosiasi strategis, masing-masing merupakan tipe ideal. Namun Fung dan Wright (2003:18-19) menyatakan bahwa dalam praktek EPG, proses pengambilan keputusan kerap melibatkan keempatnya. Karenanya, desain kelembagaan EPG juga mengembangkan kombinasi dari tipe pengambilan keputusan tersebut, sebagai berikut:

- (a) Devolusi, yaitu penyerahan kewenangan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kepada unit-unit lokal (seperti unit pelayanan kesehatan, pendidikan, kepolisian, dll.);
- (b) Supervisi terpusat dan desentralisasi terkoordinasi (*coordinated decentralization*), dimana unit-unit lokal tersebut tidak bersifat otonom melainkan tergabung dan terhubung satu sama lain, dibawah supervisi pemerintah terkait dengan kebutuhan alokasi sumberdaya, saling mendukung penyelesaian masalah umum yang dihadapi, dan mengembangkan mekanisme inovasi dan saling belajar;
- (c) Peran negara yang besar (*state-centered*) dan tidak didasarkan kesukarelaan (*voluntarisme*) belaka. Dalam hal ini, institusi-institusi negara coba ditransformasi menjadi unit-unit deliberatif. Reformasi EPG pada jalur formal tersebut berpotensi dapat memanfaatkan kekuasaan dan sumberdaya negara menjadi lebih sesuai dengan nilai-nilai deliberasi dan partisipasi warga (*popular participation*) sehingga memungkinkan praktik tersebut menjadi lebih mampu bertahan lama dan dapat berlaku luas.

Fung dan Wright (2003:251) juga menyatakan bahwa deliberasi dan partisipasi yang adil, efektif dan berkelanjutan dalam institusi atau asosiasi-asosiasi tersebut

bagaimanapun tidak hanya ditentukan oleh kejelasan dan kelengkapan dalam desain yang dibuat, namun juga dipengaruhi oleh konteks latar belakang, dan dalam tingkat tertentu juga oleh konstelasi dari kekuatan-kekuatan sosial yang bermanuver atau berperan di sekitar institusi-institusi EPG. Salah satunya, adalah bagaimana mengembangkan berbagai mekanisme yang dapat mengurangi atau mungkin menetralkan kekuatan atau pengaruh dari aktor-aktor dominan yang sebelumnya banyak berperan (*countervailing power*) (lihat Fung dan Wright, 2003:260).

2.3 Kerangka Konseptual

Peneliti berpendapat, ada benang merah antara teori partisipasi politik, teori demokrasi deliberatif dan teori demokrasi asosiatif yang telah diuraikan di atas. Pada dasarnya ketiga teori tersebut berbicara mengenai peran warga negara dalam perumusan dan pengambilan keputusan dalam urusan-urusan publik. Teori partisipasi politik lebih banyak mengangkat persoalan prinsip dan bentuk-bentuk partisipasi, yang pada dasarnya pada banyak bagian juga mewarnai pengembangan teori demokrasi deliberatif maupun teori demokrasi asosiatif. Meskipun ada perbedaan mendasar antara teori demokrasi deliberatif --yang mengutamakan adanya diskursus antara warga dan pemerintah dalam penyusunan kebijakan-- dengan teori demokrasi asosiatif --yang mengedepankan adanya devolusi peran negara/pemerintah dalam mengelola urusan warga--, keduanya memiliki kesamaan dalam memandang pentingnya organisasi, asosiasi atau forum warga dalam urusan publik. Ketiga teori akan digunakan untuk menganalisis kondisi dan kecenderungan FKKB, dan untuk menyusun model forum warga yang dikonstruksikan dalam FKKB.

Mengacu pada hasil-hasil kajian sebelumnya maupun teori dari para ahli yang telah diulas di atas, peneliti mencoba menyusun definisi operasional dari konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- (a) Konstituen, mengacu pada pengertian dari FKKB, dimaknai sebagai individu atau warga yang memiliki hak pilih di suatu daerah.

- (b) *Credible source*, mengacu pada pengertian dari FAB, dimaknai sebagai individu dari warga yang merupakan tokoh atau simpul komunitas/kelompok/organisasi (tidak selalu merupakan pimpinan formal) yang dianggap sebelumnya relatif memiliki pengaruh dalam arti dianggap sebagai sumber informasi yang kredibel atau terpercaya dan dapat mempengaruhi dinamika komunitas/kelompok/organisasi tersebut. *Credible source* ini dipilih melalui sebuah *assessment* di awal persiapan kegiatan dialog konstituen dan calon Bupati/Wakil Bupati pada saat pra Pemilukada Kabupaten Bandung 2010.
- (c) Dari pengertian dan karakteristik forum warga yang disampaikan oleh Chandra (2003), USAID (2006) dan Sumarto (2009), peneliti memaknai forum warga sebagai suatu forum yang menjadi wadah dan alat berkumpulnya warga dalam membahas, mendiskusikan dan merumuskan masalah publik di komunitas dan/atau daerah menjadi opini publik, serta menyampaikan, dan mendialogkan masalah dan opini tersebut kepada pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terkait, dan jika memungkinkan dapat turut terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai masalah tersebut. Forum warga dapat dianalogkan dengan *public body* dalam teori demokrasi deliberatif, dan asosiasi dalam teori demokrasi asosiatif;
- (d) Berdasarkan pendapat dari Huntington dan Nelson (1994), Verba et.al. (1995), Zittel dan Fuch (2007), serta Faulks (2010), peneliti memaknai partisipasi politik sebagai kegiatan dan keterlibatan secara sukarela dari warga negara baik sebagai individu maupun kelompok dalam berbagai bentuk aktivitas politik, yang salah satu tujuannya adalah mempengaruhi keputusan politik dan pemerintahan.
- (e) Merujuk pada pengertian dan karakteristik demokrasi deliberatif yang disampaikan oleh Habermas (1974, 1998), Chambers (2003), Melo dan Baiocchi (2006), serta Hickerson dan Gastil (2008), peneliti memaknai demokrasi deliberatif sebagai sebuah model relasi warga dan negara, dimana terdapat peran politis aktif warganegara yang membangun opini

mereka secara publik dalam mengontrol dan mengendalikan arah pemerintahan secara tidak langsung, dengan menggunakan bahasa, media dan cara yang dapat diterima bersama, sehingga dapat terbangun komunikasi politis yang cair antara warga dan negara hukum demokratis;

- (f) Mengacu pada pandangan Hirst (1994), Cohen dan Rogers (1995), serta Fung dan Wright (2003) mengenai *associative democracy*, peneliti memaknai demokrasi asosiatif sebagai model demokrasi yang memandang perlunya negara memberikan peluang lebih besar pada asosiasi-asosiasi warga untuk dapat turut terlibat merencanakan, mendukung kebutuhan akan sumberdaya (*resources*) pada asosiasi-asosiasi warga, dan melaksanakan pemenuhan urusan warga serta menyelesaikan masalah-masalah umum yang muncul diantara mereka, sehingga dibutuhkan adanya perubahan institusional dalam pemerintahan yang memungkinkan institusi-institusi negara dapat ditransformasikan menjadi unit-unit deliberatif.

2.4 Kerangka Pemikiran dalam Penelitian

Sebagai alat bantu untuk memudahkan pemetaan hasil kajian awal di atas, peneliti mencoba membuat model kerangka pikir sementara mengenai pembentukan forum warga, yang dapat dilihat pada Gambar 2.3. Dari hasil kajian awal, pembentukan forum warga diantaranya dipengaruhi oleh faktor adanya sejumlah kebijakan nasional maupun daerah yang relatif mendukung lebih terbukanya partisipasi politik warga di daerah sebagai buah dari 'Reformasi'. Menguatnya 'keyakinan' bahwa demokrasi dan *good governance* diperlukan untuk mengatasi masalah bangsa dan negara akibat lemahnya peran dan kontrol warga terhadap elit politik dan jalannya pemerintahan, serta dukungan dari berbagai NGO dan lembaga donor tampaknya juga turut mempengaruhi tumbuhnya forum warga.

Merujuk pada empat belas Prinsip *Good Governance* yang disusun BAPPENAS,⁶⁶ penelitian ini terutama terkait dengan dua prinsip diantaranya, yaitu 'prinsip Partisipasi',⁶⁷ dan 'prinsip Daya Tanggap (*Responsiveness*)'.⁶⁸

Pentingnya pemerintahan yang responsif ini telah dinyatakan oleh Rasyid (dalam Haris, 2007:9-10), Grindle (2009:2) dan Halverson (2003), yang telah diulas pada bagian-bagian sebelumnya. Menurut pandangan peneliti, *responsiveness* ini merupakan peran inti dari institusi pemerintahan sebagai pemegang amanat rakyat dalam menjalankan pembangunan, yang akan saling mempengaruhi dengan pelaksanaan prinsip *good governance* lainnya.

Sementara itu, mengacu pada karakteristik demokrasi deliberatif dari Moller (2005), menurut peneliti kegiatan forum warga juga dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: *civic dialogue*, *deliberative discussion* dan *deliberative decision making* (lihat Gambar 2.3). Ketiga hal tersebut dilakukan di dua arena yang peneliti sebut sebagai:

- (a) 'Arena Diskursus Kebijakan Publik', yang mencakup upaya deliberasi dalam membahas masalah sosial dan isu publik, perencanaan, penganggaran ataupun monitoring dan evaluasi pembangunan di komunitas dan/atau daerah; dan
- (b) 'Arena Diskursus Kepemimpinan Publik', diantaranya upaya mendeliberasi proses pemilihan kepala daerah di ajang Pemilu. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi dapat dihasilkannya kepala daerah

⁶⁶ 14 prinsip *good governance* dari BAPPENAS lihat *footnote* 46 halaman 31 laporan ini.

⁶⁷ Dalam hal ini BAPPENAS memaknai prinsip partisipasi masyarakat sebagai: "...keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih mengenal warganya berikut cara pikir dan kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapinya, cara atau jalan keluar yang disarankannya, apa yang dapat disumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan sebagainya. Dengan demikian kepentingan masyarakat dapat tersalurkan di dalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta mendapat dukungan masyarakat luas..." (BAPPENAS, 2007: 8).

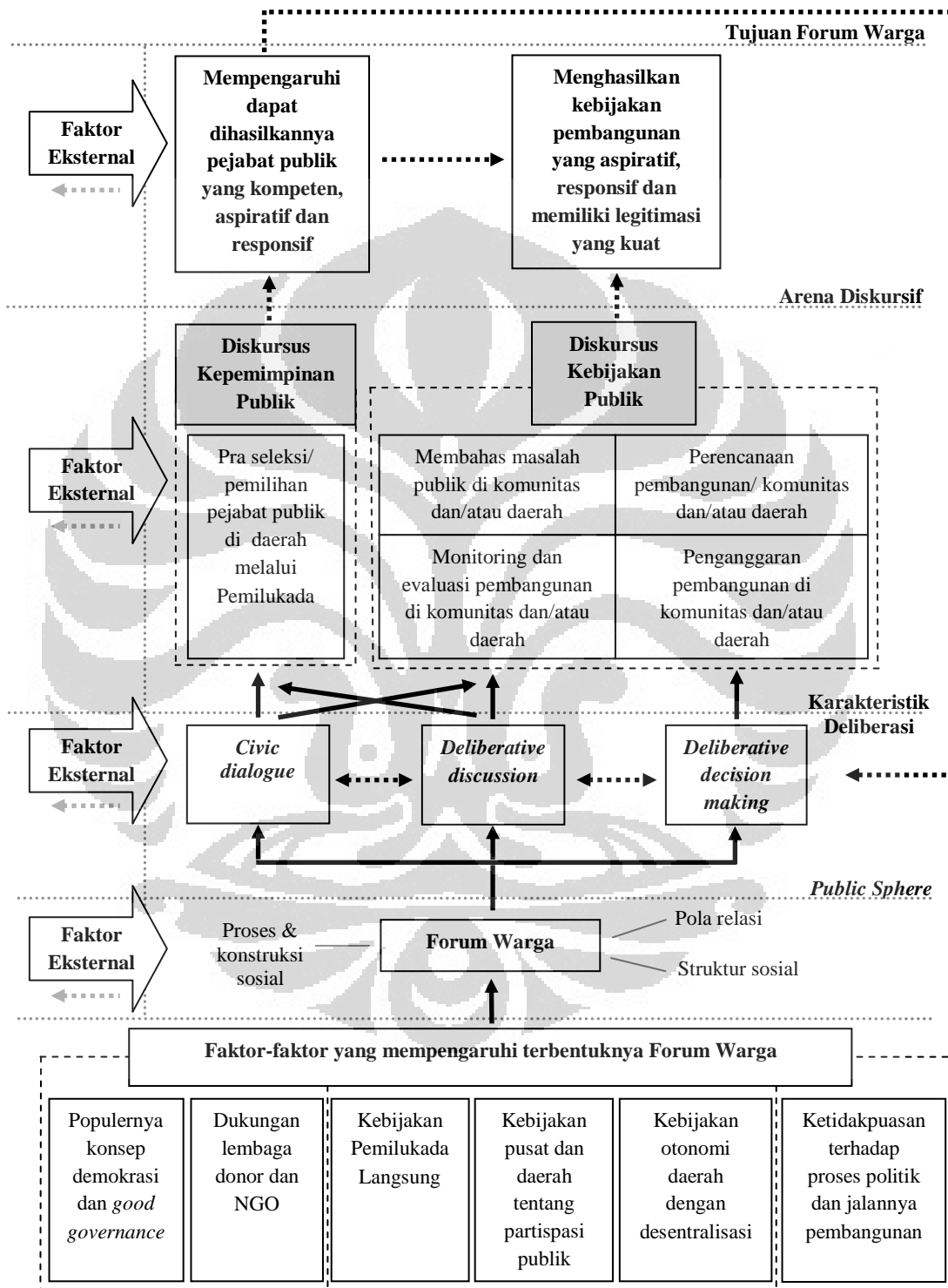
⁶⁸ Prinsip daya tanggap (*responsiveness*) dimaknai sebagai sikap "...cepat tanggap dengan mengambil prakarsa untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Aparat juga harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus menindaklanjutinya dalam berbagai bentuk peraturan/kebijakan, kegiatan, proyek atau program..." (BAPPENAS, 2007:10).

yang kompeten, aspiratif dan responsif, yang pada digilirannya diasumsikan akan memberi peluang lebih besar dapat dilakukannya upaya deliberasi dalam menghasilkan kebijakan daerah yang aspiratif dan responsif pada arena yang pertama tadi. Arena diskursus kepemimpinan publik ini masih belum banyak dimasuki oleh forum warga dibandingkan dengan arena diskursus kebijakan publik. Dalam penelitian ini, terutama akan difokuskan pada peran FKKB dalam mendeliberasi proses Pemilukada ('Arena Diskursus Kepemimpinan Publik'), dan dalam proses penyusunan RPJMD ('Arena Diskursus Kebijakan Publik').

Menurut Hefner (2000:5), demokrasi bukanlah sekedar adanya pemilihan umum dan konstitusi, namun tergantung pada tradisi dan organisasi yang mengajarkan rakyat menjadi terbiasa dalam mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan dasar demokrasi. Pandangan tersebut menyiratkan bahwa nilai-nilai dan budaya demokratis yang berkembang di warga negara akan membantu upaya membangun institusi negara yang demokratis pula. Atau jika memungkinkan, para elit dapat secara sengaja mengawali proses perubahan institusional tersebut, meskipun yang terakhir ini mensyaratkan adanya terlebih dahulu pemimpin politik yang memiliki visi, dukungan politik yang besar dan keberanian untuk menginisiasinya.

Untuk itu, kerangka berpikir pada Gambar 2.3 tersebut mencoba menghubungkan keberadaan forum warga dengan perspektif sosiologis, yaitu dilihat dari beberapa dimensi yang mencakup: (a) Proses dan konstruksi sosial, untuk melihat bagaimana proses pembentukan FKKB; (b) Pola relasi, untuk melihat pola dalam hubungan antar aktor di dalam FKKB, dan antara FKKB dengan aktor-aktor lainnya; (c) Struktur sosial, seperti untuk mengetahui basis sosial seperti agama, etnik, dan kondisi sosial ekonomi dari aktor-aktor yang terlibat dalam FKKB.

Gambar 2.3: Kerangka Pikir Mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan, Karakteristik Deliberasi, Arena Partisipasi dan Tujuan Forum Warga di Indonesia



BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian yang diuraikan pada bagian sebelumnya, penelitian ini dikategorikan menggunakan pendekatan kualitatif. Merujuk pada definisi dari Creswell (2010:4), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang --oleh sejumlah individu atau sekelompok orang-- dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan ini dilakukan dengan pengumpulan informasi spesifik dari partisipan atau informan, dimana analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum.

Pilihan pada pendekatan kualitatif tersebut berhubungan dengan asumsi-asumsi pandangan-dunia (*worldviews*) yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pandangan dunia konstruktivisme sosial, seperti yang diungkapkan oleh Berger dan Luckmann (1991:13) bahwa “*reality is socially constructed and that the sociology of knowledge must analyse the process in which this occurs*”. Menurut Creswell (2010:11), konstruktivisme sosial menggunakan asumsi bahwa individu selalu berusaha memahami dunia dimana mereka hidup dan bekerja, atau dengan kata lain makna subyektif atas pengalaman mereka. Dalam hal ini peneliti dituntut mencari kompleksitas pandangan dari sebanyak mungkin pandangan partisipan atau informan tentang situasi yang tengah diteliti. Creswell mengutip Crotty (1998) yang menyatakan bahwa makna tersebut pada dasarnya diciptakan oleh lingkungan, yang muncul di dalam dan di luar interaksi dengan komunitas manusia. Secara induktif, peneliti menciptakan makna dari data-data lapangan yang dikumpulkan. Mengacu pada Neuman (2003:75), penelitian dimana peneliti melakukan interpretasi atas pemaknaan responden atau subyek penelitian mengenai tindakan sosial yang mereka lakukan, digolongkan dalam penelitian dengan pendekatan interpretif (*interpretive social science*).

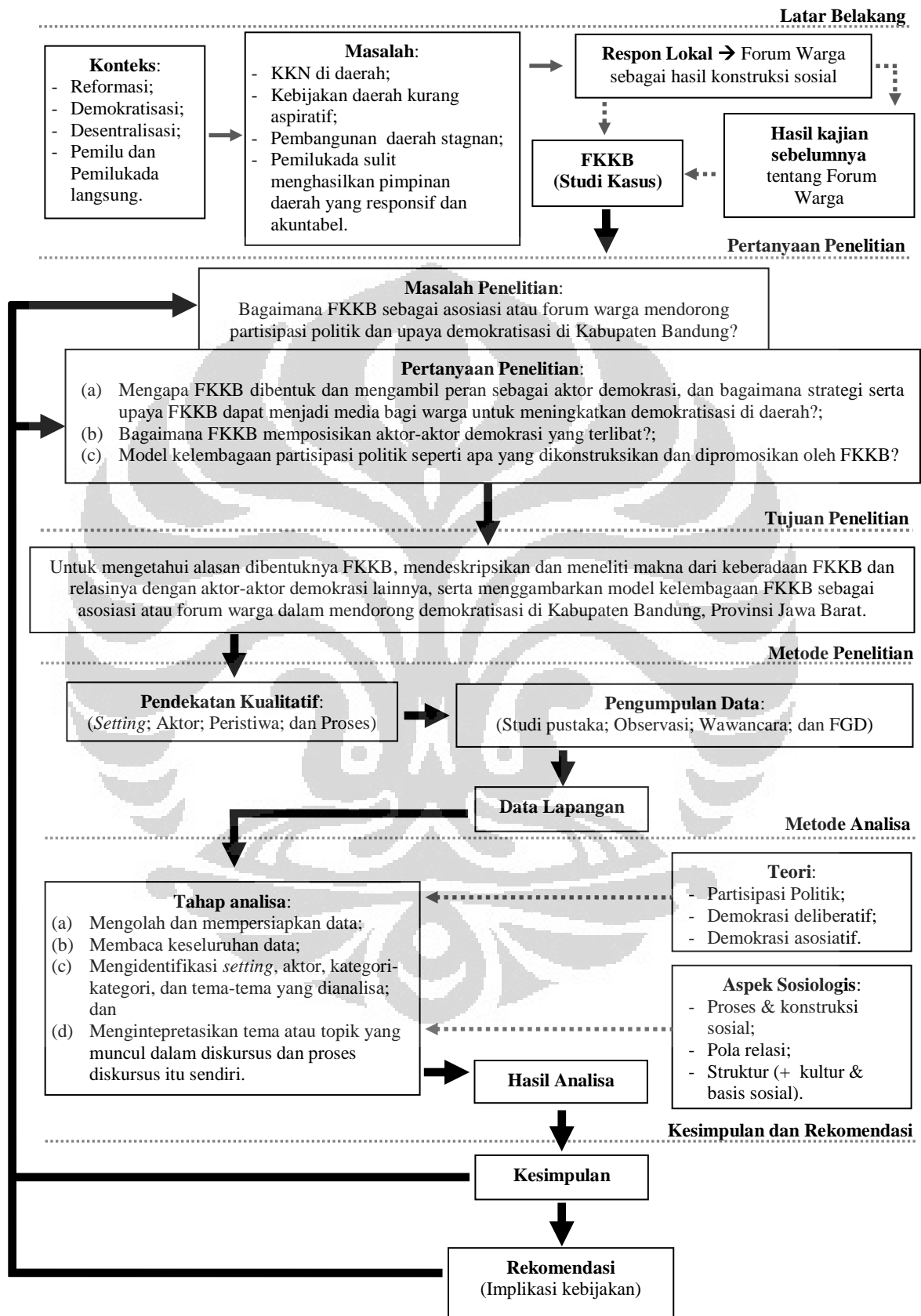
Merujuk pada ragam strategi dalam penelitian kualitatif yang diulas oleh Creswell (2010:20), penelitian ini menggunakan strategi studi kasus. Creswell mengutip Stake (1995) yang menyatakan bahwa dalam penelitian dengan strategi studi kasus, peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, strategi studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman yang cukup komprehensif mengenai model atau contoh dari asosiasi atau forum warga, melalui pengumpulan informasi dan deskripsi yang detail dan cukup lengkap dari para informan yang terkait dengan FKKB.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian eksplanatori karena mengajukan pertanyaan ‘mengapa’, dan penelitian deskriptif karena mengajukan pertanyaan ‘apa’ dan ‘bagaimana’. Menurut Neuman (2003:30-31), penelitian eksplanatori adalah penelitian yang mencoba mencari penjelasan mengenai sebab dan alasan dari suatu peristiwa. Sementara penelitian deskriptif menyajikan suatu gambaran rinci/detail yang spesifik dari suatu situasi, kondisi/lingkungan sosial, atau hubungan. Deskripsi merupakan ciri pendekatan kualitatif dimana peneliti menaruh perhatian pada proses, arti dan memahami, yang diperoleh melalui kata-kata dan gambar. Secara umum, kerangka penelitian ini seperti terlihat pada Gambar 3.1.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Menurut Miles dan Huberman (1994) yang dikutip Creswell (2010:267), ada empat aspek yang perlu dicermati dalam penelitian kualitatif, yaitu: (a) *Setting*, yaitu mengenai situasi lokasi penelitian; (b) Aktor, yaitu orang, kelompok atau organisasi yang diobservasi dan/atau menjadi informan penelitian; (c) Peristiwa, yaitu kejadian yang dialami atau dirasakan oleh para aktor; (d) Proses, yaitu sifat peristiwa yang dirasakan oleh para aktor dalam *setting* penelitian.

Gambar 3.1: Kerangka Penelitian



Dalam memperoleh informasi mengenai keempat aspek tersebut, peneliti mengembangkan strategi pengumpulan informasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Fox (2007:13-14) dan Creswell (2010:268-270), yaitu:

- (a) Studi Pustaka. Kegiatan ini dilakukan sejak tahap awal penyusunan proposal penelitian sampai dengan tahap penulisan hasil penelitian. Pada tahap awal studi pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai jurnal, buku, laporan penelitian, artikel di media masa, dokumen kebijakan pemerintah, notulensi rapat atau pertemuan, gambar, foto, rekaman audio dan audio visual, dan dokumen atau bentuk informasi lain yang relevan dengan topik dan tujuan penelitian ini. Berbagai teori dan data-data sekunder tersebut menjadi pijakan dalam menyusun kerangka penelitian, melakukan analisa dan interpretasi atas temuan penelitian.
- (b) Observasi. Pada kegiatan ini peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung perilaku dan aktivitas individu, kelompok atau organisasi yang terkait dengan subyek penelitian di lokasi penelitian. Peneliti berpartisipasi sebagai pengamat dalam aktivitas tersebut. Dalam kegiatan ini peneliti merekam atau mencatat aktivitas, peristiwa dan situasi yang berkaitan dengan subyek dan topik penelitian. Teknis observasi yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur, dengan mengamati beberapa situasi yang memiliki relevansi penting dengan tujuan penulisan tanpa adanya kategorisasi pengamatan terlebih dahulu. Peneliti berperan sebagai peneliti utuh, dalam arti mengobservasi tanpa melibatkan partisipan. Dalam penelitian ini, peneliti tinggal di lokasi penelitian selama tiga minggu untuk dapat mengamati interaksi keseharian peserta FKKB, interaksi FKKB dengan pemerintahan daerah, *ngobrol* dan berdiskusi mengenai isu yang terkait topik penelitian, dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan FKKB.
- (c) Wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilakukan secara perorangan dan kelompok secara tatap muka atau langsung pada 24 orang informan dari FKKB, FAB, calon Bupati/Wakil Bupati pada Pemilukada

Kabupaten Bandung 2010, staff pemerintah daerah, KPUD, dan lembaga donor (lihat Lampiran 4). Wawancara dilakukan dengan mengacu pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, dan dengan pengembangan pertanyaan lain sejauh masih relevan dengan tujuan penelitian. Pertanyaan yang diajukan adalah informasi yang diketahui informan maupun konfirmasi yang didapatkan dari pihak lain. Peneliti membuat catatan secara manual dan menggunakan alat perekam dalam melakukan wawancara tersebut.

- (d) Diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion* atau FGD). Peneliti melakukan pengumpulan informasi melalui diskusi kelompok dengan partisipan yang telah teridentifikasi. Peserta FGD seluruhnya dari FKKB. FGD hanya dapat dilakukan satu kali karena kesulitan membuat kesepakatan waktu dengan peserta dan terbatasnya waktu peneliti. FGD dilakukan di Baleendah pada tanggal 19 April 2012 dengan peserta sebanyak 12 orang (lihat Lampiran 5).

3.3 Peran Peneliti

Sesuai dengan prosedur dalam penelitian kualitatif, peneliti menempatkan diri untuk terlibat dan menjadi bagian dari penelitian. Peneliti berperan sebagai instrumen penelitian atau alat penelitian utama yang mengadakan pengamatan dan wawancara, serta mengeksplorasi interpretasi para aktor dalam penelitian. Peneliti mengoperasionalkan daftar pertanyaan dan panduan observasi yang telah disiapkan untuk penelitian ini.

Untuk menghindari bias, peneliti memandang perlu memperjelas posisi individu dalam kaitannya dengan topik, lokasi, subyek dan informan dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti merasa mengenal cukup baik komunitas FAB, karena pernah berkuliah (S1) dan beraktivitas di Bandung, serta pernah bekerja di sejumlah NGO/CSO di kota tersebut (1991-2004). Secara pribadi peneliti dekat dengan sebagian besar aktivis di FAB, dan masih sering berkomunikasi dengan mereka. Namun, peneliti tidak pernah terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan

dan evaluasi kegiatan FAB yang berkaitan dengan FKKB, karena sejak tahun 2004 peneliti lebih banyak bekerja di Jakarta.

Hubungan baik peneliti dengan para aktivis FAB telah sangat membantu dalam mengakses data/informasi dari informan dan sumber lainnya. Meskipun demikian, peneliti telah berusaha agar kedekatan tersebut tidak mempengaruhi independensi dan interpretasi peneliti dalam penelitian ini. Hal tersebut menjadi perhatian peneliti, karena salah satu tujuan dalam penelitian ini adalah justru untuk dapat memberikan gambaran yang realistis dan analisa secara akademik terhadap kegiatan yang telah mereka lakukan bersama FKKB. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi gagasan bagi upaya pengembangan FAB dan FKKB selanjutnya.

Selain itu, berkenaan dengan izin penelitian, peneliti tetap mengurus perizinan sesuai dengan prosedur yang berlaku umum di lokasi penelitian. Sementara untuk menghindari munculnya masalah etis akibat isu-isu sensitif dalam penelitian, peneliti menyamarkan identitas sebagian besar informan dalam laporan penelitian tesis ini.

3.4 Waktu Penelitian

Seluruh tahap penelitian dilaksanakan dalam waktu lima bulan. Pengumpulan data dimulai pada bulan Maret – Juli 2012. Tahapan waktu pelaksanaan penelitian selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2: Waktu Penelitian

No.	Tahapan	Maret				April					Mei					Juni					Juli	
		M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2
		4-10	11-17	18-24	25-31	1-7	8-14	15-21	22-28	29-30	1-5	6-12	13-19	20-26	27-31	1-2	3-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14
1	Sidang proposal																					
2	Revisi Proposal																					
3	Persiapan perizinan																					
4	Pengumpulan data lapangan																					
5	Pengolahan data																					
6	Analisis data																					
7	Penulisan draft hasil																					
8	Pengajuan draft hasil																					
9	Sidang draft hasil																					
11	Pengumpulan tesis																					
12	Sidang tesis																					
13	Revisi tesis																					

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Bandung - Provinsi Jawa Barat, karena FKKB --yang menjadi subyek penelitian ini-- memang dibentuk dan beraktivitas di wilayah tersebut. Sementara pengumpulan data pendukung lainnya dilaksanakan di Bandung (pengumpulan informasi dari FAB) dan Jakarta (pengumpulan informasi dari Yayasan TIFA selaku lembaga donor).⁶⁹ Pemilihan lokasi ini didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu: (a) Karena relatif mudah diakses; (b) Inisiatif FAB dan FKKB di Kabupaten Bandung dalam membangun forum warga yang berkaitan dengan Pemilukada (yang dilanjutkan dengan partisipasi pada perencanaan pembangunan daerah) belum banyak di Indonesia, sehingga cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam.

3.6 Sumber Data atau Informan

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka sumber data utama adalah hasil wawancara dan observasi, yang didukung oleh data-data sekunder lainnya. Sumber utama data primer diperoleh dari observasi dan informan. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai latar penelitian. Pada dasarnya informan ini yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau tindakan, serta mengetahui latar dan mengerti masalah dari suatu topik penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah mereka yang dapat dianggap sebagai *stakeholders* FKKB (jumlah dan nama informan, lihat Lampiran 4), yaitu:

- (a) ‘Pengurus’ dan ‘Anggota’ FKKB, dengan mempertimbangkan gender informan;
- (b) Pengurus FAB;
- (c) Ketua KPUD Kabupaten dan Provinsi;

⁶⁹ Mengenai Yayasan TIFA lihat <http://www.tifafoundation.org/index.php?comp=home.detail.30&lang=id>, diakses 25 Juni 2012.

- (d) Pemerintah Daerah, yaitu Kepala Daerah/Wakil (yang sekaligus peserta dalam dialog FKKB pra Pemilukada), dan pejabat/staff yang dianggap banyak berhubungan dengan NGO/CSO di Kabupaten Bandung;
- (e) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010; dan
- (f) Manajer/Staff Program Yayasan TIFA (lembaga donor) yang terkait dengan program yang mendukung kegiatan FKKB.

Dalam memperoleh informasi yang dapat menggambarkan keragaman perspektif dari internal FKKB, peneliti memperhatikan keterwakilan informan berdasarkan gender (anggota FKKB perempuan dan laki-laki), dan posisi informan di FKKB ('anggota biasa' dan 'pengurus'). Dalam menentukan secara spesifik siapa saja yang cocok dijadikan informan, peneliti meminta bantuan dari informan kunci yang telah diwawancarai. Sementara data sekunder dalam penelitian diperoleh dengan memanfaatkan dokumen, catatan, laporan, dokumentasi foto dan audio visual yang relevan, baik yang ada di FKKB, FAB, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (seperti data demografi, keuangan daerah, kebijakan daerah) dan sumber-sumber lainnya. Panduan wawancara mendalam, FGD dan observasi dalam pengumpulan informasi disajikan pada Lampiran 1, 2 dan 3.

3.7 Metode Analisa dan Interpretasi Data

Data dianalisa menggunakan teori-teori yang relevan dengan topik dan temuan penelitian melalui cara yang sistematis, dan memberikan deskripsi detil analisa dari suatu kualitas atau substansi pengalaman manusia. Metode analisa data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini merujuk pada tahapan analisa yang ditawarkan Creswell (2010:276-284), namun dengan beberapa penyesuaian, sebagai berikut:

- (a) Mengolah dan mempersiapkan data, diantaranya mencakup kegiatan transkripsi wawancara, memilah dan mengelompokkan data;

- (b) Membaca keseluruhan data, yang diantaranya mencakup upaya menangkap kesan dari kedalaman, kredibilitas dan penuturan informasi, serta memberi catatan-catatan khusus atas data tersebut;
- (c) Mengidentifikasi *setting*, aktor, kategori-kategori, dan tema-tema yang dianalisa; dan
- (d) Mengintepretasikan tema atau topik yang muncul dalam diskursus dan proses diskursus itu sendiri.

Selain itu, peneliti melakukan apa yang disebut Huberman dan Miles (1994, dalam Marvasti, 2004: 88-90) sebagai reduksi data, yang dimaknai sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan pentransformasian data kasar yang didapat dari proses pengumpulan data di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat dihasilkan dan diverifikasi. Keseluruhan tahap tadi juga peneliti gunakan untuk mengecek kelengkapan dan kejelasan data dan menentukan tindakan yang perlu diambil untuk mengatasinya, misalnya dengan mengumpulkan data tambahan atau memverifikasi ulang data pada informannya.

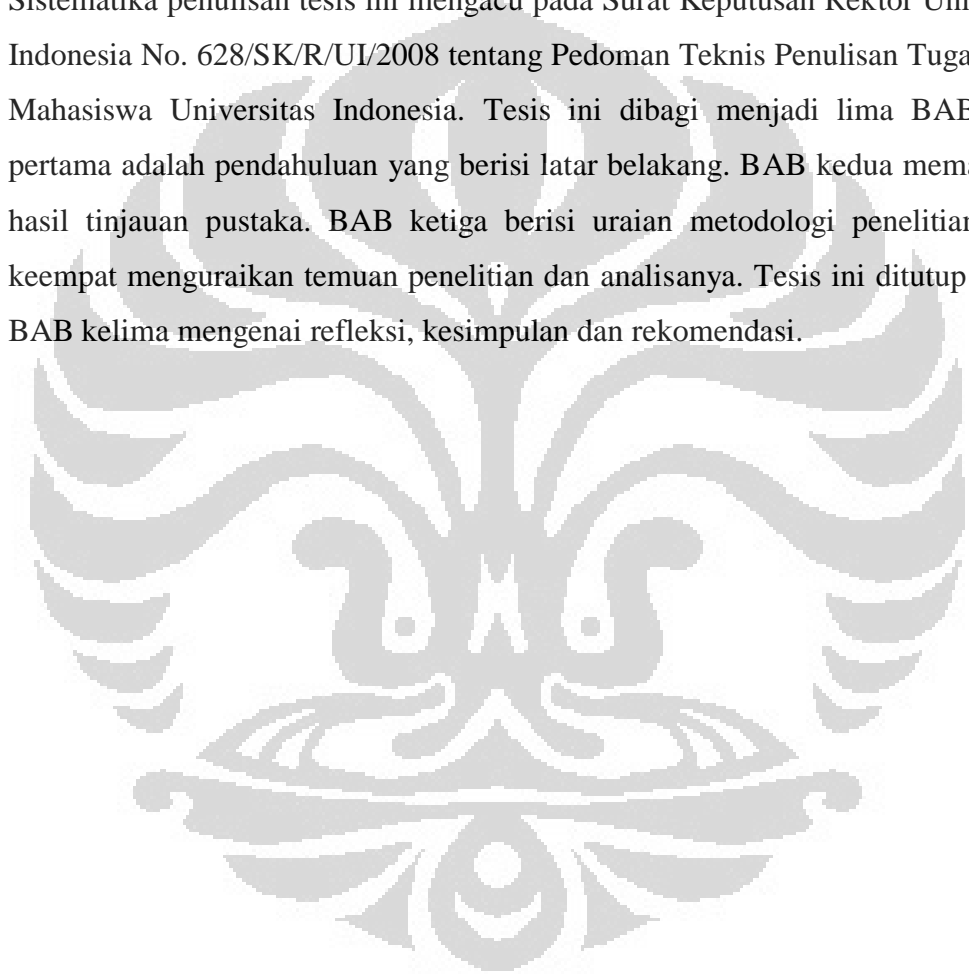
3.8 Validasi Temuan Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid atau akurat secara kualitatif, peneliti melakukan triangulasi sumber-sumber data yang berbeda (hasil wawancara, FGD, observasi, dan data sekunder) dengan memeriksa bukti yang berasal dari sumber tersebut untuk membangun justifikasi tema-tema yang koheren. Mengacu pada Creswell (2010:286), triangulasi adalah sebuah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sumber informasi lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Sementara menurut Ely (1991:96-97), triangulasi dilakukan terhadap data yang diperoleh dari dua teknik pengumpulan data yang berbeda, misalnya data hasil wawancara dan hasil observasi, ataupun terhadap data mengenai topik yang sama namun diperoleh dalam waktu yang berbeda. Dalam hal ini peneliti mencoba menghubungkan dan membandingkan antara informasi hasil wawancara (sebagai

sumber informasi utama) dari informan 'pengurus' dengan informasi dari 'anggota' atau 'peserta' FKKB, ataupun antara informasi dari FKKB dengan FAB, atau dari sumber lainnya. Hasil FGD dan data-data sekunder juga digunakan untuk melengkapi dan membandingkan temuan hasil wawancara tersebut.

3.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini mengacu pada Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 628/SK/R/UI/2008 tentang Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia. Tesis ini dibagi menjadi lima BAB. BAB pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang. BAB kedua memaparkan hasil tinjauan pustaka. BAB ketiga berisi uraian metodologi penelitian. BAB keempat menguraikan temuan penelitian dan analisisnya. Tesis ini ditutup dengan BAB kelima mengenai refleksi, kesimpulan dan rekomendasi.



BAB 4

PERAN FKKB DALAM MENDORONG PARTISIPASI POLITIK DAN UPAYA DEMOKRATISASI DI KABUPATEN BANDUNG

4.1 FKKB Sebagai Aktor Demokrasi dan Media Demokratisasi di Kabupaten Bandung

4.1.1 Konteks Sosial dan Politik Dibentuknya FKKB

Bagi para informan penelitian, Kabupaten Bandung dipandang memiliki nilai strategis dilihat dari sudut pandang geopolitik. Faktor sejarah, wilayahnya yang dekat dengan pusat kekuasaan negara dan provinsi, serta jumlah penduduknya yang besar⁷⁰ --yang berarti memiliki jumlah pemilih dalam Pemilu yang besar pula--, menjadikan Kabupaten Bandung kerap dipilih sebagai lokasi pendulangan suara tokoh dan partai politik dalam Pemilu/Pemilukada. Kabupaten Bandung kemudian dipandang sebagai salahsatu barometer peta politik Jawa Barat dan nasional, karena secara umum memberikan gambaran preferensi politik dari kelompok politik nasionalis dan yang berbasis agama, yang di Kabupaten Bandung kekuatannya dapat dikatakan cukup berimbang.

Sejak dibentuk pada abad 19 sampai dengan Pemilukada 2010, pemimpin daerah dan politik di Kabupaten Bandung berasal dari dua sumber, yaitu dari kalangan bangsawan atau *menak* Sunda (1841-1960), dan kalangan militer (1960-2010).⁷¹ Baru pada Pemilukada 2010 lalu pemimpin daerah berasal dari kalangan sipil.⁷² Terbangunnya kepemimpinan daerah dari kalangan militer secara khusus tidak dapat dilepaskan dari terkaitnya wilayah Kabupaten Bandung dengan sejarah ‘pemberontakan’ DI/TII (1949-1962). Sebagai wilayah yang ‘sensitif’, pengawasan dan pengendalian terhadap masyarakat dipandang sebagai hal penting untuk menjaga stabilitas wilayah.

⁷⁰ Jumlah penduduk Kabupaten Bandung tahun 2010 adalah nomor dua terbanyak di Jawa Barat (setelah Kabupaten Bogor). Lihat <http://djkd.depdagri.go.id/?jenis=dbstatis&kodedoc=6>, diakses 15 Mei 2012.

⁷¹ Lihat <http://www.bandungkab.go.id/arsip/2413/sejarah-berdirinya-kabupaten-bandung>, diakses 20 April 2012.

⁷² Sebagai catatan, Bupati saat ini adalah menantu dari Bupati sebelumnya yang berasal dari militer.

Dalam hal ini, kultur kepemimpinan militeristik yang memang cenderung pada kontrol dan pengendalian pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, selama puluhan tahun dipandang cocok untuk kebutuhan tersebut. Di masa Orde Baru, Bupati Kabupaten Bandung umumnya berasal dari eks komandan KODIM di sana. Mengingat secara historis ada kedekatan antara militer dan Partai Pohon Besar, tidak mengherankan jika partai itu menjadi kekuatan politik paling berpengaruh selama puluhan tahun di Kabupaten Bandung. Pada Pemilu 2010-pun pemenangnya adalah calon yang diusung oleh partai tersebut. Kondisi ini dapat dilihat sebagai miniatur dari peran militer dalam politik nasional yang diulas pada BAB 1 halaman 2.

Selain itu, kultur masyarakat Priangan pegunungan yang dominan berkarakter rural di wilayah ini juga dipandang relatif mudah dikelola dibandingkan dengan masyarakat Jawa Barat di bagian Utara dan Selatan yang karakternya cenderung lebih keras. Di Kabupaten Bandung, mobilisasi politik dipandang lebih mudah dilakukan oleh para elit daerah, baik melalui pemanfaatan pengaruh para tokoh masyarakat, birokrasi, dan kekuatan uang. Kultur masyarakat dan birokrasi yang paternalistik mempermudah berlangsungnya proses pengendalian politik masyarakat. Dalam waktu lama, hubungan antara pemerintah dan masyarakat dikelola dalam relasi dimana salah satu pihak menganggap dirinya sebagai pemimpin yang harus mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan, dan pihak lain sebagai yang harus diarahkan, diawasi dan dikendalikan. Relasi *patron-client* diciptakan dengan sengaja dalam hubungan antara masyarakat dan elit, dan warga dengan pemerintah.

Paternalisme itu masih kuat... termasuk di birokrasi... Jadi (kepemimpinan di) Kabupaten Bandung selalu harus (dari) tentara itu menjadi budaya politik yang harus dipertahankan... Jadi hubungan atas bawah itu adalah hubungan yang terkendalikan... Nah, jadi semua itu sangat serba terkontrol... Akhirnya ini menjadi sebuah kekuatan yang sukar dipatahkan... (Kusnadi-Calon Bupati/Wakil Bupati; Wawancara; 2 April 2012)

Pengendalian terutama dilakukan terhadap institusi dan aparat birokrasi, sampai ke level pemerintahan desa. Hal ini karena kepala desa dan para tokoh masyarakat di tingkat lokal dipandang memiliki peran strategis dalam mempengaruhi dan

mengendalikan masyarakat di wilayahnya.⁷³ Kedua aktor tersebut kemudian memang menjadi kekuatan inti dari mesin politik Partai Pohon Besar, dan terbukti mampu berfungsi efektif selama puluhan tahun.

Terjadi politisasi birokrasi (*politicization bureaucracy*), khususnya dalam momentum Pemilu, Pemilukada dan Pilkadaes. Politisasi kekuatan birokrasi dan politisasi anggaran menjadi instrumen utama dalam memobilisasi dukungan rakyat untuk merebut posisi-posisi strategis tersebut. Pada Pemilukada 2010 lalu, proses politisasi birokrasi dan anggaran disinyalir juga masih berlangsung secara massif. Banyak pihak yang menuding telah terjadi mobilisasi aparat birokrasi daerah untuk mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah yang didukung Bupati waktu itu menjelang pelaksanaan Pemilukada.⁷⁴ Sementara, politisasi anggaran untuk meraup dukungan suara pada Pemilukada 2010 lalu, disinyalir terutama dalam bentuk bantuan sosial untuk pemerintahan desa, kelompok atau organisasi masyarakat. Bank daerah dan asosiasi pemerintahan desa menjadi aktor yang dituding turut berperan dalam mobilisasi dukungan politik tersebut.⁷⁵

Selain itu, dalam rangka memperkuat pengendalian politik di masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan juga tak luput menjadi sasaran. Kooptasi terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan berlangsung secara sistematis. Akibatnya, selain menjadi tidak kritis dan mengabaikan perannya untuk

⁷³ Laporan hasil analisa Proyek Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) atau *Initiatives for Local Governance Reforms (ILGR)* yang berlokasi di Kabupaten Bandung, Lebak, Solok, Tanah Datar, Kebumen, Magelang, Ngawi, Lamongan, Bolaang Mongondow, Bulukumba, Takalar, Gowa, dan Boalemo, menunjukkan bahwa sumber informasi utama masyarakat di adalah kepala desa/dusun dan tokoh masyarakat (Pattinasarany dan Kusuma, 2007:23). Laporan tersebut diolah dari hasil temuan *Governance and Decentralization Survey 2 (GDS 2)* pada tahun 2006 yang dilaksanakan di 29 provinsi pada 111 kabupaten dan 23 kota. Besarnya pengaruh elit komunitas tersebut juga terjadi di semua daerah. Lebih jauh, analisa statistik temuan di lokasi P2TPD tadi menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara tingkat pendidikan kepala keluarga dengan pengetahuan akan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun program pembangunan di desa. Selain itu, keberadaan anggota rumah tangga yang berstatus PNS ataupun yang merupakan tokoh lokal juga memperbesar peluang untuk mengetahui kegiatan serta alokasi dana pembangunan di desa. Dengan kata lain, masyarakat yang berpendidikan rendah, berpenghasilan rendah, tidak memiliki hubungan ke elit lokal, ataupun yang tinggal di daerah perdesaan merupakan kelompok inferior dalam hal pengetahuan mengenai program desa maupun alokasi anggarannya (Laporan P2TPD, hal. 20-21).

⁷⁴ Sinyalemen adanya politisasi birokrasi pada Pemilukada 2010 di Kabupaten Bandung, diantaranya lihat: "PNS Kok Kampanye?", Radar Bandung 28 Juli 2010, hal. 3.

⁷⁵ Sinyalemen terjadinya politisasi anggaran publik diantaranya lihat: "Diduga Politis, Insentif RT/RW Cair: Biasanya Insentif Cair Desember", Radar Bandung, 28 Agustus 2010, hal. 3.

melakukan pemberdayaan masyarakat, para aktivisnya lebih berorientasi untuk dapat dekat dengan kekuasaan atau bahkan juga untuk turut dapat masuk dalam lingkaran kekuasaan (orientasi vertikal ke atas).

Begitupun dengan perilaku partai politik yang pada dasarnya hanya mengejar kepentingan untuk memperoleh dukungan suara sebesar-besarnya dalam Pemilu/Pemilukada secara instan, tanpa memiliki orientasi untuk memenuhi kewajibannya dalam melakukan pendidikan politik ke masyarakat. Masyarakat yang lemah secara politik justru dipandang sebagai sumber kekuatan partai-partai tersebut. Institusi DPRD yang semestinya berperan sebagai kekuatan kontrol terhadap pemerintah daerah, dan menyalurkan aspirasi rakyat, pada umumnya justru memandang rakyat dan kekuatan *civil society* sebagai gangguan.

Dalam konteks sosial dan politik seperti itulah FKKB kemudian dibentuk. Jika dipetakan lebih dalam, ada sejumlah faktor yang dalam pandangan para aktivisi di Kabupaten Bandung telah turut mempengaruhi munculnya gagasan untuk membangun FKKB, baik faktor yang muncul dari dalam ataupun dari luar, yaitu:

(a) Ketidapuasan terhadap Partai Politik

Dari wawancara dengan informan yang terlibat di FKKB, seluruhnya menyatakan bahwa munculnya FKKB adalah sebagai respon terhadap ketidakberfungsian partai politik dalam melakukan pendidikan politik di daerah. Partai politik hanya aktif berinteraksi dengan warga menjelang Pemilu atau Pemilukada saja.

... kegelisahan kita menjelang Pilkada waktu itu kan, karena partai politik yang seharusnya memberikan pencerdasan politik kepada masyarakat itu tidak berperan efektif. Mereka hanya memanfaatkan suara masyarakat untuk kepentingan mereka saja...
(Iman-Peserta FKKB; FGD; 19 April 2012)

Calon-calon yang maju dalam Pemilihan Legislatif (selanjutnya disingkat Pileg) dan Pemilukada banyak yang tidak mengakar bahkan tidak dikenal oleh masyarakat.⁷⁶ Dalam hal ini, mereka memandang bahwa dalam menentukan calon

⁷⁶ Lihat: "Tak Kenal Calon", Bandung Express, 20 Juli 2010.

yang akan maju dalam Pileg dan Pemilu pada tersebut, partai politik tidak berangkat dari aspirasi warga, namun lebih pada pertimbangan-pertimbangan politis lainnya.

Banyak calon-calon Bupati yang tidak dikenal di masyarakat, itu kenapa suara mereka di Pilkada jadi sedikit... Masyarakat tuh sebetulnya banyak bertanya, itu calon siapa yah, bagaimana itu...? Kadang-kadang juga banyak yang bertanya kepada saya... Saya ceritakan calon ini tu begini, yang itu begitu... "Ini tu siapa Teh?" (Titi-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 30 Maret 2012)

Di lain pihak kita kesulitan mengakses informasi. Selama ini kita hanya melihat dari brosur, pamphlet, spanduk, tanpa ada profil dan informasi track politic yang jelas mengenai para calon. (Setiawan-Koordinator Konsolidasi FKKB; FGD; 19 April 2012)

Akibat tidak adanya interaksi yang memadai antara partai politik dan warga sebagai konstituen, dalam Pemilihan Presiden (selanjutnya disebut Pilpres), Pileg dan Pemilu, umumnya perolehan suara diperoleh hanya berdasarkan popularitas calon (yang tidak jelas kualitas dan *track record* politiknya),⁷⁷ dan pembelian suara pemilih (*vote buying*).⁷⁸

[Ibarat] beli kucing dalam karung... Sebetulnya masyarakat itu sudah enggan dengan perpolitikan. Pencerdasan politik itu setidaknya membuat masyarakat paham bahwa suara mereka itu jangan ditukar sekedar Rp 25.000 saja, atau ganteng dan tidak ganteng... Karena partai politik itu hanya memanfaatkan

⁷⁷ Dalam politik modern, media massa --sebagai salah satu ruang publik-- menjadi instrumen paling efektif membangun popularitas politisi dan partai politik. Kampanye politik di media massa dikemas sedemikian rupa dan diperlakukan seperti iklan politik. Dalam hal ini Habermas (2011:301) mengutip Floter (1958:272) yang menyatakan, "*Periklanan adalah fungsi lain yang diambil alih oleh media massa. Akibatnya, partai dengan organisasi-organisasi pembantunya merasakan harus mempengaruhi putusan pemilihan secara publisistis dengan suatu cara yang analog dengan cara iklan mempengaruhi putusan pembeli*".

⁷⁸ Fenomena *vote buying* terjadi dimana-mana di seluruh belahan dunia, meskipun secara normatif hal tersebut dipandang sebagai ilegal. Uang dan politik memang saling terkait satu sama lain khususnya pada momentum pemilihan umum. Studi di Taiwan, Thailand, dan Meksiko menunjukkan adanya jaringan *broker* politik yang berperan mempengaruhi jaringan sosial di masyarakat secara transaksional (Bryan dan Baer, eds., 2005). Sementara hasil studi di 22 negara Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Latin oleh The National Democratic Institute (NDI), menggambarkan adanya keterkaitan antara politik uang saat Pemilu dengan korupsi yang terinstitusionalisasi dalam partai politik (Schaffer, ed., 2007). Dalam konteks Indonesia, temuan penelitian ini mengkonfirmasi kelemahan Pemilu/Pemilukada yang diulas Djojosoekarto dan Hauter (2003), yang dapat dilihat di halaman 9 pada laporan penelitian ini. Adanya jaringan *broker* politik dalam Pemilu/Pemilukada bahkan Pilkadaes juga dikemukakan oleh Kusnadi, salah seorang informan dalam penelitian ini (wawancara 2 April 2012).

konstituennya sebagai suara saja. Dengan kata lain, partai politik gagal dalam melakukan pendidikan politik ke masyarakat. (Iman-Peserta FKKB; FGD; 19 April 2012)

Partai politik dan para politisi dinilai hanya mengembangkan pola interaksi politik transaksional menjelang Pemilu atau Pemilukada.⁷⁹ Biaya politik menjadi sangat tinggi, di mana pada akhirnya kekuatan uanglah yang menjadi faktor utama penentu kemenangan dalam Pemilukada.⁸⁰ Sementara upaya pendidikan politik umumnya dilakukan NGO atau CSO, yang tentunya menjadi terbatas jangkauannya.

Jadi pencerdasan-pencerdasan politik di Kabupaten Bandung belum ada itu... Apalagi partai-partai politik yang melakukan pencerdasan politik itu cuma NGO-NGO kecil gitu kan... Ya dengan swadaya semampunya melakukan pencerdasan-pencerdasan politik... Kalau partai politik ya gitu, yang diterapkan politik transaksionalnya, bukan pencerdasan masyarakat... Yang membawa visi misi untuk lima tahun ke depan gimana... jarang itu partai politik... (Nanang-Peserta FKKB; Wawancara; 29 Maret 2012)

Meskipun demikian, ada kesan ambiguitas diantara para pegiat FKKB dalam menilai partai politik. Ambiguitas ini tampak pada cara pandang mereka yang

⁷⁹ Informasi dari tiga orang informan calon Bupati/Wakil Bupati mengenai perilaku politik transaksional pragmatis sangat menarik untuk dicermati. Menurut mereka, perilaku tersebut cenderung merata di semua lapisan dan pelosok masyarakat, baik di perkotaan maupun perdesaan, baik mereka yang berpendidikan rendah maupun lebih tinggi. Dalam pengalaman mereka, perilaku tersebut bukan monopoli atau sepenuhnya inisiatif para politisi atau partai politik. Inisiatif untuk membuka ruang transaksional tersebut saat ini justru lebih banyak muncul dari masyarakat. (Lihat juga “Pilkada: Politik ‘Kahartos ku Abdi, Karaos ku Abdi’...”, [Bahasa Sunda: Dapat saya mengerti, dapat saya rasakan], KOMPAS, 27 Juli 2010, hal. 33A). Pengalaman dari calon independen yang mencoba membangun relasi politik non transaksional (tidak dengan ‘membeli suara’) menunjukkan sulitnya mengajak masyarakat untuk membangun relasi politik yang sehat. Selain itu, dalam pandangan mereka, banyak tokoh agama dan lembaga keagamaan (khususnya Islam, yang merupakan agama mayoritas penduduk Kabupaten Bandung) yang justru seakan memberi contoh perilaku tersebut. Satu ungkapan menarik dari salah seorang calon mengenai hubungan antara fiqih (salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya) dan perilaku politik transaksional pragmatis: “Perilaku fiqih itu berpengaruh sekali terhadap perilaku politik orang... Perilaku fiqih yang akomodatif, cenderung perilaku politiknyapun akomodatif... Jadi ada PERSIS, Muhammadiyah, Syarekat Islam, NU,... Jadi semakin akomodatif perilaku fiqih, itu semakin mudah sekali untuk kesana kemari...”.

⁸⁰ Lihat KOMPAS, 27 Juli 2010, hal. 33A, “Pilkada Habiskan Ratusan Miliar: Di Kabupaten Bandung, Biaya Politik Tak Terhindarkan”. Diperkirakan setiap calon harus mengeluarkan uang pribadi Rp 5 miliar - Rp 10 miliar.

membedakan posisi partai politik di tingkat daerah dan tingkat nasional. Persepsi terhadap partai politik kemudian dipersempit pada persepsi terhadap figur-figur tertentu di partai politik tersebut. Fenomena ini menarik karena mirip dengan kecenderungan adanya sikap pemilih yang berbeda dalam menyikapi Pilpres dan Pileg, dimana suara yang diperoleh calon Presiden tidak selalu berbanding lurus dengan suara calon legislatif meskipun diusung oleh partai (atau partai-partai) yang sama. Dalam hal ini, figur politisi tampaknya juga menjadi pertimbangan penting dalam memilih di Pemilu/Pemilukada.

Ketidakpercayaan terhadap partai itu dalam tanda kutip... itu dalam konteks Kabupaten Bandung ya... Kalau perspektifnya kita persempit, itu jadi pembenaran... Contohnya begini, dengan banyaknya partai lalu mereka transaksional... itu sangat terasa dan terbuka... Dan beberapa figur dalam partai-partai itu memang tidak pantas menjadi seorang leader dalam konteks Pilkada Kabupaten Bandung... di mana mereka sekedar jual kecap untuk popularitas, itu mengakibatkan kekecewaan... (Nadri-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 2 April 2012)

Akibat minimnya *trust* terhadap partai politik, membuat sebagian pegiat FKKB secara pribadi lebih condong untuk mendukung calon Bupati/wakil Bupati dari jalur independen. Mereka menilai calon independen cenderung lebih memiliki kompetensi, kedekatan dan kepedulian terhadap warga dan persoalan yang ada di daerah.

Saya lebih condong calon yang muncul dari teman-teman non partai, mungkin dari pegiat... Mungkin dari jajaran bawah, RT, RW, karena merekakan lebih banyak hidup di lingkungan bawah ya, lebih tahu kondisi masyarakat... Kalau menurut saya mah tidak selalu harus dari partai... Banyak yang punya kompetensikan... Misalkan dari independen bisa terpilih jadi kepala daerah, mereka bisa lebih care dengan masyarakat bawah... Kalau dari partai politik mereka kan... ya... bisa dilihat sendirilah ya... Sebentar lagi kan Pilgub... Saya juga ada teman-teman lain yang punya calon untuk wakil tuh... (Titi-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 30 Maret 2012)

Namun dukungan terhadap calon dalam Pemilukada tersebut bukanlah ‘sikap resmi’ FKKB, karena pada dasarnya FKKB di desain untuk bersikap netral secara kelembagaan. Seperti disinggung sebelumnya, dukungan tersebut lebih sebagai

pelampiasan dari kekecewaan sebagian warga akibat merasa tidak terwadahi aspirasinya oleh partai politik.

...dalam Forum Konstituen itu juga tidak pure ya, ada yang kesana, ada yang kesini... Tapi lebih kepada mereka tidak tersalurkan, tidak punya ruang bagi akses mereka beraktivitas dengan partainya... lebih pada individu kandidatnya... Kepentingannya fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat ini yang tidak punya afiliasi secara formal dengan partai politik... (Nadri-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 2 April 2012)

Adanya disfungsi partai politik ini juga dinyatakan oleh salah seorang calon Bupati/Wakil Bupati yang maju dalam Pemilukada 2010. Hal itu pula yang melatarbelakangi upayanya untuk maju dalam Pemilukada melalui jalur independen (non partai). Pada faktanya, banyak diantara pegiat FKKB yang jauh sebelum Pemilukada memang memiliki kedekatan secara pribadi dan politik dengan pasangan calon independen tersebut.

Awalnya kan kalau per teoritis, itu harapannya justru di alam demokrasi ini partai politik harusnya menyalurkan dan mengartikulasikan kepentingan-kepentingan masyarakat. Tapi kan prakteknya atau faktanya jauh dari itu. Akhirnya ada saluran-saluran alternatif lain untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat. (Toto-Calon Bupati/Wakil Bupati; Wawancara; 25 April 2012)

Meskipun sikap ketidakpercayaan terhadap partai politik tersebut bukanlah merupakan 'sikap politik resmi' FKKB, namun dalam pemetaan politik di daerah dalam momentum Pemilukada 2010 lalu, banyak pihak yang memandang FKKB sebagai kendaraan politik dari salah satu pasangan calon dari jalur independen tersebut. Hal ini diantaranya dinyatakan oleh salah seorang calon Bupati/Wakil Bupati lain yang pada Pemilukada 2010 diusung oleh sejumlah partai politik.

Kalau saya lihat memang, yang hadir di Forum Konstituen itu rata-rata yang selama ini tidak berkecimpung di dunia politik. Mangkanya banyak orang melihat... benar atau tidak... mohon maaf... ini forumnya Pak Toto ... karena Pak Toto independen kan... Jadi ini mewakili kelas orang-orang yang selama ini tidak terlalu tertarik dengan partai politik... kesannya begitu... Tapi ini kan bagus... karena memang, masyarakat itu pada dasarnya sedang tidak terlalu percaya pada partai politik... Saya itu

melihat, Forum Konstituen sudah mewakili kelas tertentu di masyarakat... (Kusnadi-Calon Bupati/Wakil Bupati; Wawancara; 2 April 2012)

Disisi lain, ketidakpercayaan terhadap politisi dan partai politik membuat sebagian masyarakat yang sesungguhnya memiliki hak pilih kemudian justru memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya tersebut, atau yang umum dikenal sebagai ‘Golongan Putih’ atau Golput (*non-voters*).⁸¹ Dalam konteks Pemilu di Kabupaten Bandung tahun 2010, angka Golput sekitar 35% dari mereka yang memiliki hak pilih.⁸²

Tapi sekarang sih sama aja sih... kalau intinya ke Partai ya sama aja gitu... Kadang-kadang orang tuh pada mikir, “Ah daripada begini mendingan mah saya ngga milih aja...”, ya itu karena mereka sudah tidak percaya lagi ke partai politik... ada juga yang seperti itu... (Titi-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 30 Maret 2012)

(b) Keprihatinan atas Masalah Pembangunan di Kabupaten Bandung

Kehadiran FKKB juga dipicu oleh kesadaran bahwa ada banyak masalah atau persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung. ‘Keprihatinan’ adalah kata kunci yang kerap muncul dalam wawancara dengan informan dari pegiat FKKB mengenai masalah-masalah tersebut. Masalah-masalah tersebut selama ini dipandang belum mendapatkan respon semestinya dari pemerintahan daerah.

Keprihatinan disini sebetulnya dari banyak aspek.... Dari masalah kebijakan pembangunan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, lingkungan, termasuk infrastruktur... Apalagi Abah sendiri dari komunitas korban banjir, yang selalu setiap tahun rutin terkena banjir... Nah disana ketika menyuarakan persoalan seringkali dianggap angin lalu... Apalagi mengenai ekonomi, itu belum berpihaklah program apapun kepada kami secara utuh... (Tedi-Peserta FKKB, 28 Maret 2012)

⁸¹ Habermas (2007:299) mengutip Janowitz (1956) yang menyatakan bahwa ciri golput sebagai kelompok yang paling minim kepemilikan informasinya dan paling lambam sikap demokratisnya.

⁸² Lihat: “Hampir 35% Warga Kabupaten Bandung pilih Golput”, <http://www.tempo.co/read/news/2010/09/06/178276953/35-Persen-Warga-Kabupaten-Bandung-Pilih-Golput>, diakses 28 Mei 2012.

... mengenai persoalan yang ada di Kabupaten Bandung, yang selama ini kami mempunyai pandangan bahwa respon pemerintah terhadap kasus-kasus itu sangat terbatas... Bagaimana pemerintah menyikapi persoalan-persoalan itu, karena selama ini persoalan itu sangat berdampak bagi masyarakat baik secara ekonomi dan sosial. (Wahyu, FGD, 19 April 2012)

Jaringan FKKB kemudian dipandang sebagai wadah yang dapat menyuarakan aspirasi warga, baik dalam konteks sebagai korban yang mengalami langsung ataupun sebagai pelaku yang melakukan advokasi terhadap masalah tersebut.

Itu wujud dari perjuangan yang berangkat dari keprihatinan... Satu-satunya yang bisa memperjuangkan hak-hak rakyat disini... Dulu kan Abah sendiri, single fighter... tapi dengan kenal dekat, akhirnya ada wadah, akhirnya bisa mendorong penyelesaian masalah yang ada... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

(c) Adanya tawaran gagasan dari FAB

Dibentuknya FKKB di Kabupaten Bandung tidak dapat dilepaskan dari peran FAB, yang menyusun gagasan dasar mengenai dialog konstituen dan calon Bupati/Wakil Bupati pada Pemilu 2010. Hal ini dapat dipandang sebagai faktor eksternal dalam latar belakang dibentuknya FKKB kemudian. Mengenai hal ini dibahas lebih lanjut pada bagian berikut.

4.1.2 Gagasan, Tujuan dan Strategi FKKB

FAB memaknai Forum Konstituen (FK) sebagai nama kegiatan yang rangkaianannya berpuncak pada dialog kritis antara 200 orang tokoh masyarakat (*credible source*) dengan para kandidat kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Bandung pada tanggal 8 Agustus 2010 di Kampus IT Telkom, Kabupaten Bandung. Pada perjalanannya kemudian, nama Forum Konstituen kemudian digunakan untuk menyebutkan nama wadah/lembaga para tokoh yang berkumpul dan beraktivitas dalam rangka membangun daerahnya.⁸³ Dengan demikian FKKB dapat dilihat dalam dua bentuknya, yaitu: (a) FKKB sebagai kegiatan dialog

⁸³ Harahap, 2011:11.

warga/konstituen dengan calon Bupati/Wakil Bupati (pada momentum Pemilu 2010); dan (b) FKKB sebagai wadah warga/konstituen dalam mengawal pemerintahan daerah (pasca Pemilu 2010).

Gagasan mengenai FKKB ini adalah merupakan kolaborasi dari setidaknya tiga aktor utama, yaitu: (a) Forum Aktivist Bandung (FAB); (b) Kelompok *civil society* di Kabupaten Bandung yang dimotori oleh Forum Diskusi Anggaran (FDA), dengan kelompok intinya yaitu Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK); dan (c) TIFA sebagai lembaga donor, yang turut merumuskan konsep awal FKKB. Selanjutnya, dalam persiapan dan pelaksanaan FKKB, aktor-aktor lain yang terlibat adalah: (d) *Credibile source* dari berbagai organisasi dan wilayah di Kabupaten Bandung; (e) Akademisi/perguruan tinggi; (f) Calon Bupati/Wakil Bupati dan tim suksesnya; (g) KPUD; (h) Media massa. Mengenai relasi FKKB dengan para aktor demokrasi tersebut akan dibahas secara khusus pada Sub BAB 4.2.

(a) Gagasan Dasar FKKB

Merujuk pada informasi dari FAB dan TIFA, gagasan FKKB awal sesungguhnya merupakan kelanjutan dari program kerjasama kedua lembaga tersebut sebelumnya, yaitu Konvensi Kaum Muda di Jawa Barat untuk Pemilu Legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2008. Berkenaan dengan momentum Pemilu 2010, FAB bersama TIFA kemudian merumuskan satu program yang pada intinya adalah bagaimana mempertemukan antara konstituen (pemilih) dengan calon Bupati/Wakil Bupati dalam forum-forum dialog yang informatif dan kritis. Dari situ diharapkan warga atau konstituen memiliki informasi dan pemahaman yang memadai mengenai gagasan (visi dan misi) yang ditawarkan oleh calon Bupati/Wakil Bupati, sekaligus dapat mengkritisi gagasan tersebut, serta dapat menilai performa dari tiap-tiap calon. Disisi lain, para calon diharapkan juga lebih dapat memahami aspirasi warga atau konstituen, yang untuk selanjutnya diasumsikan dapat mempengaruhi substansi kampanye mereka, dan

lebih jauh terhadap pola kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil ketika menjadi Bupati/Wakil Bupati terpilih.⁸⁴

FAB memandang Pemilu sebagai pesta demokrasi yang semestinya menjadi upaya untuk mendidik rakyat agar bisa kokoh dalam barisan politik yang terorganisir, kritis, cerdas, bebas, dan mampu mendesakkan aspirasi serta tuntutan, serta momentum konstituen dalam menilai kandidat/calon yang berkualitas dan layak untuk memimpin mereka.⁸⁵ Visi yang dikembangkan adalah membangun pemahaman serta kecerdasan pemilih terhadap isu dan permasalahan lokal, dihadapkan dengan visi dan misi para kandidat kepala daerah.⁸⁶ Menurut Radhar Tri Baskoro (Ketua FAB dan mantan anggota KPUD Provinsi Jawa Barat 2003-2008), gagasan yang coba dikembangkan dalam FKKB ini adalah mengenai pentingnya melakukan pendidikan politik khususnya terhadap warga atau konstituen sehingga dapat menjadi *responsible voters* dalam Pemilu 2010.

Gagasan ini kan sebenarnya sederhana ya... Saya kira konsep dasarnya kita tidak mau pakai istilah rational voter ya, tapi responsible voters... Kalau pemilih rasional itu, kurang begitu jelas, karena orang kemudian suka mengkotraskan itu dengan emotional voter... Jadi emotional voter itu istilahnya loyal constituent... voter yang memilih karena kedekatan kultural pada suatu partai... Jadi seakan-akan yang rasional ini tidak punya emosional, dan yang emosional ini tidak rasional... Padahal sebetulnya semuanya rasional... Itu kenapa aku lebih suka pakai istilah responsible voters... (Radhar-Ketua FAB; Wawancara; 4 April 2012)

⁸⁴ Dari hasil wawancara dengan TIFA (pada tanggal 2 Mei 2012), diperoleh informasi yang menarik mengenai beragam eksperimen pengembangan model partisipasi warga. Sebagai contoh, sebelumnya TIFA pernah bekerjasama dengan sejumlah NGO/CSO yang mencoba membangun kontrak politik antara warga dengan politisi terkait Pileg dan Pemilu (di antaranya di Pemilu DKI Jakarta tahun 2007, dan program konvensi politisi muda yang pernah dikerjasamakan dengan FAB di Jawa Barat tahun 2008). Program lain yang 'senada' dengan FKKB adalah yang coba dikembangkan di Kupang-NTT, dimana forum warga mencoba membangun dialog dengan partai-partai politik sebelum mereka menerapkan calon dalam Pemilu. Sementara, dalam Pemilu 2012 di Provinsi DKI Jakarta, CSO berdialog dengan partai-partai politik untuk meminta penjelasan mengenai alasan atau dasar pertimbangan partai-partai tersebut mendukung calon tertentu. Menurut TIFA, model FKKB memang model yang baru di Indonesia, dan dinilai cukup berhasil karena mampu menghadirkan banyak calon Bupati/Wakil Bupati dalam dialog dengan konstituen dalam jumlah besar yang berasal dari beragam organisasi di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

⁸⁵ "Laporan Pelaksanaan Program Forum Konstituen", FAB, 2010:3-4.

⁸⁶ Harahap, 2011:11.

Gagasan tersebut dipandang sebagai satu strategi antara ketika sistem politik dan sistem Pemilu/Pemilukada secara umum masih memiliki sejumlah kelemahan yang dapat mempengaruhi kualitas proses, dan pada akhirnya mempengaruhi hasil Pemilu dan Pemilukada itu sendiri.

Nah dari macam-macam faktor itu sudah banyak dibahas. Banyak kelemahannya itu, kita sudah tahu... KPU sebagai penyelenggara banyak kelemahannya, kita juga sudah tahu. Partai politik banyak kelemahannya... Cara milih bakal calonnya kacau, asal milih aja dia... Pokoknya bayar gitu kan... jadi kandikat... Nah semua masalah itu sudah diketahui publik. Tapi semua itu bisa tak berarti apabila pemilihnya itu bener. Boleh partai itu memilih calon sembarangan, tapi calon itu tidak akan terpilih kalau pemilihnya bertanggungjawab. Boleh misalnya sistemnya itu amburadul, iya kan... tapi sepanjang Pemilu itu rahasia, pemilih tetap bisa memilih secara bertanggung jawab... Jadi sepanjang bilik suara itu bisa melindungi kerahasiaan, dia akan bisa memilih sesuai dengan keinginannya. Faktor-faktor itu tetap tidak artinya, dalam arti tetep kita bisa mendapatkan kandidat terpilih yang baik itu asal pemilihnya harus responsible. (Radhar-Ketua FAB; Wawancara; 4 April 2012)

FAB memaknai konsep *responsible voters* sebagai pemilih yang terlibat aktif mencari informasi, berdiskusi, melakukan penilaian dan mengkampanyekan atau mensosialisasikan calon yang dipandanginya tepat kepada warga atau pemilih lain. Konstituen yang bertanggung jawab dan menjadi sumber informasi bagi konstituen lain di komunitasnya inilah yang kemudian disebut sebagai *credible source* atau sumber informasi yang kredibel (dapat/layak dipercaya).

Nah pemilih yang responsible itu yang bagaimana? Pertama, dia terlibat. Terlibat itu ada gradasi... bisa dia itu cuma nonton, mencerna, memutuskan, kemudian memilih. Bisa gradasinya itu, bisa dia terlibat semi aktif, misalnya dia sengaja mencari informasi, tidak cukup mendapatkan informasi dari TV atau koran. Tapi dia ikut aktif berdiskusi untuk menemukan siapa kandidat terbaik. Lalu gradasi terakhir, itu pemilih yang aktif. Dia ikut mengkampanyekan pilihannya. Setelah memilih, dia juga campaign pada orang-orang lain mengenai pilihannya... Mereka kemudian berperan sebagai credible source bagi komunitasnya... (Radhar-Ketua FAB; Wawancara; 4 April 2012)

Adanya *responsible voters* ini dipandang sebagai faktor utama dari keberhasilan sebuah Pemilu atau Pemilukada, karena secara sadar dan aktif menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pemilih dan warga negara.

Jadi suatu Pemilu yang baik itu kan, pertama, dia punya sistem yang baik, yaitu sistem yang obyektif... Siapa yang dipilih oleh rakyat, itulah yang diangkat... Yang kedua, punya panitia yang baik, yang jujur, adil... Yang ketiga, pesertanya itu baik, yaitu partai yang baik... partai yang mempunyai prosedur-prosedur yang baik untuk memilih bakal calon. Dan yang terakhir adalah pemilih yang baik, yaitu pemilih yang bertanggungjawab... pemilih yang tidak asal memilih. Nah kontrasnya itu adalah antara pemilih yang bertanggungjawab dengan pemilih yang tidak bertanggungjawab, atau pemilih yang asal-asalan. (Radhar-Ketua FAB; Wawancara; 4 April 2012)

Dilaksanakannya FKKB adalah sebagai sebuah upaya dari warga atau bagian dari konstituen yang telah sadar politik untuk melakukan pendidikan politik baik bagi konstituen. Media pendidikan politik yang digunakan adalah melalui forum-forum diskusi dan dialog baik diantara konstituen sendiri maupun antara konstituen dengan calon Bupati/Wakil Bupati. Dalam dialog tersebut konstituen juga dapat memberikan penilaian terhadap para calon tersebut. Hasil dari diskusi dan dialog tersebut, kemudian disosialisasikan kembali kepada warga atau konstituen lain yang lebih luas.

Nah Forum Konstituen itu berada disitu, mencoba menaikkan gradasi tanggung jawab dan kesadaran pemilih itu... jadi tidak hanya sekedar menonton... apalagi tidak menonton sama sekali, tidak peduli sama sekali... tapi dia lebih aktif. Nah itulah yang kita sebut sebagai Forum Konstituen, yaitu suatu forum, suatu organisasi, yang didalamnya itu ada anggota-anggota yang secara aktif menyeleksi kandidat-kandidat dalam pemilu. Ya mereka menentukan kriteria, mereka menyelenggarakan pertemuan dengan para kandidat... (Radhar-Ketua FAB; Wawancara; 4 April 2012)

Dari gagasan dasar mengenai FKKB tadi memang terlihat bahwa desain awal FKKB memang secara khusus diperuntukkan hanya terkait dengan momentum Pemilukada. Konsep *responsible voters* secara eksplisit memang terkait dengan pemilih (*voter*) dalam konteks Pemilu atau Pemilukada, dan bukan dalam konteks

tanggung jawab warga (*citizen*) di sepanjang jalannya pemerintahan diantara dua Pemilu atau Pemilukada tadi.

Ketika gagasan tersebut ditawarkan dan didiskusikan oleh FAB kepada kelompok *civil society* di Kabupaten Bandung, ada kesepahaman dan konsensus bersama bahwa FKKB memang penting dan dapat dilaksanakan dalam momentum Pemilukada 2010.

Sebetulnya wacana menjelang Pilkada ini sudah jadi wacana disini... Jadi nyambung sebetulnya kan... Ketika kita punya gagasan yang hampir sama dengan FK, ngobrol-ngobrol disini untuk merespon Pilkada, tiba-tiba FAB datang membawa konsep ini, jadi memang klop... Gagasan dasarnya relatif sama ya... Perbedaannyapun relatif tidak jauh berbeda gitu... Jadi nggak begitu banyak persoalan ya, karena dari sisi gagasan sudah sama... Cuma memang dari sisi gimana implementasinya ini kita diberi keleluasaan penuh oleh FAB. Jadi kita bisa melakukan improvisasi-improvisasi dari konsepnya FAB. Karena juga misalnya FAB punya gagasan tertentu, diskusi dengan kita, relatif memang gagasan dari teman-teman disini yang digunakan... (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Dalam hal ini, gagasan mengenai FKKB juga dipandang sebagai pengembangan dari wilayah advokasi kebijakan yang selama ini digeluti oleh aktivis *civil society* Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya juga masuk ke wilayah advokasi politik dalam konteks Pemilukada 2010. FKKB dipandang dapat menjadi isu dan wadah yang mempertemukan berbagai kelompok *civil society* di Kabupaten Bandung yang sebelumnya lebih banyak bergerak di wilayah adokasi yang sektoral dan kewilayahan.

Itu 'istilah' yang ditawarkan dari luar ke Kabupaten Bandung... Bahwa selama ini bukan tidak ada alat bagi masyarakat sipil di Kabupaten Bandung yang memiliki orientasi untuk menjalankan upaya-upayanya. Peralatan-peralatannya sudah ada, hanya mungkin konteksnya sektoral atau bersifat lokal. Kemudian yang lain juga proses advokasinya belum masuk di wilayah politik... (tapi) lebih pada advokasi kebijakan... Mungkin disitu mengapa kemudian para pegiat yang sebelumnya sudah bergerak di Kabupaten Bandung kemudian merasa bahwa Forum Konstituen itu bisa menjadi alat pemersatu bagi gerakan perubahan yang sebelumnya masih bersifat sektoral dan lokal tadi. (Tarum-

Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; FGD; 19 April 2012)⁸⁷

(b) Tujuan dan Institusionalisasi FKKB

Dalam konsep yang dirancang FAB dan disekapati bersama TIFA dan kelompok *civil society* di Kabupaten Bandung, gagasan utama mengenai FKKB pada awalnya memang ‘hanya’ berupa dialog konstituen dengan calon Bupati/Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Bandung 2010. FAB merumuskan tiga hal sebagai *outcome* dari kegiatan FKKB, yaitu: (a) Mengembangkan konsep model Forum Konstituen untuk peningkatan kualitas partisipasi politik pemilih dalam Pemilukada yang mengantarkan pada transformasi ke *active citizen*; (b) Mengembangkan kapasitas organisasi kaum muda dalam pengorganisasian Forum Konstituen dalam Pemilukada; dan (c) Mengembangkan praktek Forum Konstituen untuk peningkatan kualitas partisipasi politik pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Bandung.⁸⁸

Diskusi dan workshop awal FKKB juga melibatkan para akademisi untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi para konstituen dalam menganalisa masalah dan isu yang nantinya akan diangkat dalam dialog dengan calon Bupati/Wakil Bupati. Diantara mereka ada yang menyampaikan harapan agar FKKB dapat menjadi sarana menyelesaikan problematika riil yang ada di daerah dan memecahkan kebekuan demokrasi.⁸⁹

...terkait dengan isu-isu yang terdapat di Kabupaten Bandung, terdapat harapan agar forum ini bisa menggerakkan publik pemilih kandidat yang secara bertahap menyelesaikan problematika yang

⁸⁷ Peran Tarum cukup strategis dalam menjembatani dialog awal mengenai gagasan FKKB antara FAB dan kelompok *civil society* di Kabupaten Bandung, khususnya FDA dan PSDK. Secara sosiologis Tarum adalah bagian dari komunitas FAB, karena sebelumnya memang banyak beraktivitas di lingkungan kampus dan NGO/CSO di Kota Bandung. Tarum kemudian bekerja sebagai *community organizer* di Yayasan Inisiatif - Bandung, dan turut membidani terbentuknya PSDK (2005) dan FDA (2007). Tarum kemudian tinggal di Kabupaten Bandung, dan berinteraksi secara intensif dengan PSDK, FDA, dan NGO/CSO lainnya. Di FKKB, Tarum juga merupakan salah seorang anggota Tim 9, yaitu tim yang diberi mandat untuk merumuskan format kelembagaan FKKB.

⁸⁸ “Laporan Pelaksanaan Program”, FAB, 2010:4.

⁸⁹ “Catatan Proses Kegiatan *Expert Meeting*”, yaitu kegiatan diskusi antara kandidat dan tim sukses, pakar/akademisi, KPUD, wartawan, dan tokoh masyarakat Kabupaten Bandung, tanggal 27 Juli 2010 di Hotel Grand Pacific, Bandung.

riil di daerahnya. Forum semacam ini harus dirintis sehingga ada sesuatu yang dapat memecahkan kebekuan-kebekuan demokrasi kita dengan terobosan seperti ini. (Dede Maryana; Notulensi Pertemuan; 27 Juli 2010)

Sementara akademisi lain lebih menekankan pada tujuan membangun solidaritas agar dapat memiliki kekuatan pengetahuan kolektif sehingga mampu membangun komunikasi yang setara dengan para calon Bupati/Wakil Bupati, membangun database mengenai janji-janji kampanye (*campaign promises*) dari para kandidat, dan menagih janji pada siapapun calon yang terpilih dalam Pilkada.

Bagaimana peran masyarakat sipil dalam rangka meningkatkan kualitas Pilkada ini, agar berbeda dengan wilayah lain?. Supaya kita yakin kita tidak akan ditinggalkan dan tidak tertinggal. Yang pertama adalah membangun solidaritas diantara kita agar pengetahuan kita setara dengan para kandidat, dan agar kita tidak diadu-domba antar sesama pemilih. Yang kedua adalah pendampingan dari ahli bahwa janji-janji yang diucapkan oleh kandidat apakah sudah dipenuhi atau belum. Kemudian kita melakukan penekanan tertentu terhadap janji mereka. Ketiga kita harus memiliki database yang kuat atau informasi terhadap visi misi mereka, kita harus memiliki catatan yang baik agar data kita tuntut. Yang keempat adalah apa yang dilakukan jika tidak terpenuhi. Sehingga kita harus benar-benar mencatat, agar nantinya kita dapat menagihnya dengan yakin. (Asep Warlan; Notulensi Pertemuan; 27 Juli 2010)

Bagi para pegiat FKKB sendiri, tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk membuka ruang dialog dimana calon Bupati/Wakil Bupati dapat menyampaikan gagasan dan komitmennya terhadap kepentingan publik. Disisi lain masyarakat dapat melihat, mendengar, menguji, menilai dan untuk selanjutnya membantu mereka dalam menentukan pilihan. Sebelumnya, ruang uji publik semacam ini dipandang tidak ada di Kabupaten Bandung.

Kalau dari dari sisi tujuannya bagaimana si kandidat dapat mengekspresikan gagasan-gagasan pembangunannya, dan masyarakat juga dapat menilai dan menentukan pilihan. Tetapi terlepas daripada itu, bahwa gagasan kita dalam hal demokrasi politik ini kita promosikan, bahwa masyarakat bersama-sama berkonsolidasi dalam menentukan pilihannya... (Derry-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 1 April 2012)

Kegiatan FKKB juga ditujukan sebagai sarana uji publik secara langsung melalui diskusi atau dialog antara konstituen dengan para calon Bupati/Wakil Bupati, mengenai keberpihakan mereka pada kepentingan publik.

... untuk melihat para calon pemimpin di Pilkada, sejauhmana keberpihakan mereka kepada publik. Kemudian masyarakat bisa menyeleksi bagaimana komitmen mereka, karena selama ini tidak ada jajak publik antara calon dengan masyarakat secara langsung berdiskusi, karena yang biasanya hanya kampanye biasa. Jadi masyarakat bisa menilai dan menyeleksi sendiri, tidak hanya dalam konteks kampanye yang penuh slogan. (Erman-Peserta FKKB; FGD; 19 April 2012)

Selain itu, forum dialog tersebut juga dipandang dapat menjadi sarana bagi konstituen untuk mengenal dan menyampaikan aspirasi kepada calon Bupati/Wakil Bupati.

FK ya itu kegiatan dari masyarakat, untuk mencari tahu calon pemimpin itu seperti apa, bagaimana gitu... Otomatiskan merekakan bisa banyak mendapat masukan... Oooo mereka maunya begini, seperti ini... Ya untuk mencari sosok pemimpin yang bijak, yang baguslah... (Titi-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 30 Maret 2012)

Dialog antara konstituen dengan calon Bupati/Wakil Bupati juga menjadi sarana mendesakkan agenda warga/konstituen agar dapat diadopsi menjadi agenda atau gagasan para calon tersebut, dan menjadi kebijakan ketika mereka terpilih.

Ya lebih pada gimana mendesakkan agenda ini bisa menjadi bagian dari agenda calon, siapapun yang nanti terpilih. Disadari bahwa inikan akan menjadi alat tagih... bahwa ketika kita terlibat dalam advokasi RPJMD atau lainnya itu akan menjadi lebih nyambunglah... (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Diluar tujuan yang berkaitan langsung dengan PemiluKada, adalah harapan bahwa agar kegiatan FKKB sekaligus dapat menjadi ajang pembelajaran atau peningkatan kapasitas politik para aktivis di Kabupaten Bandung.

Kalau dari sisi teman-teman sendiri, ya tentunya teman-teman bisa dapat pengalaman dari event politik ini. Ini juga bisa jadi entry buat teman-teman di lapangan untuk melakukan advokasi berbasis

politik juga kan... (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Dalam konsep awal (yang menjadi kesepakatan proyek antara FAB dan TIFA), dialog antara konstituen dengan calon Bupati/Wakil Bupati direncanakan dapat dilakukan dua kali, yaitu presentasi individual, dan debat antar calon. Namun setelah kegiatan dialog antara konstituen dan calon calon Bupati/Wakil Bupati di IT Telkom, berkembang gagasan baru untuk mengkondisikan FKKB dapat berperan sebagai wadah bagi warga untuk mengawal pemerintah daerah yang baru pasca Pemilukada.

Pertemuan yang besar memang cuma sekali di Telkom... Tapi mereka sudah bertemu di seminar-seminar kecil sebelumnya ya... Idealnya sih mungkin dua kali ya... satu presentasi individual, dan satu lagi debat antar calon... ada forum debat gitu... (Radhar-Ketua FAB, 4 April 2012)

Agenda dialog kedua kemudian diubah jadi ruang konsolidasi kelompok *civil society* Kabupaten Bandung yang sebelumnya terlibat dalam kegiatan FKKB di IT Telkom. Untuk membangun keterkaitan antar kedua kegiatan tadi sekaligus membangun identitas bagi wadah yang 'baru' tersebut, kegiatan di IT Telkom kemudian disebut FK I, dan kegiatan pertemuan konstituenberikutnya disebut sebagai Forum Konsolidasi Konstituen (FK II), yang pada intinya adalah pertemuan konsolidasi *civil society* Kabupaten Bandung.

...sebenarnya bahkan sampai ke proposal yang kita ajukan ke TIFA, Forum Konstituen itu kita lakukan dua kali... Itu gua ubah di tengah jalan... Setelah acara di dialog di IT Telkom, itu secara psikologis sudah puncaknya, karena setelah itu Pilkada... kan waktunya mepet... Menjelang Pilkada Putaran Kedua, kupikir mending energi kita arahkan untuk membuat bridging agar kelembagaan ini bisa terus gitu... Kita harus fasilitasi itu... Karena, pertama, kawan di Kabupaten Bandung itu di tengah jalan juga ngomong... "Iya ini bagus untuk ngontrol pemerintahan ke depan...". Jadi ini memang orientasinya sudah ke depan, bukan sekedar proyek degan TIFA ini kita sukseskan... Indikatornya misalnya lewat RPJMD-lah secara umumnya... "Oh iya setuju" kubilang... Bagi aku ini juga bukan program untuk program, tapi harus substantif... Nah itu yang kemudian aku buat istilah kalau di teman-teman itu FK II... di sinilah kita bikin bridging itu. (Oky-Sekjen FAB; Wawancara; 24 Desember 2011)

Dalam konteks proyek kerjasama FAB dan TIFA, tujuan dari pertemuan Forum Konstituen II ini adalah: (a) Mewujudkan forum kawah candradimuka dari *active voters* menjadi *active citizen* di Kabupaten Bandung; (b) Menjembatani diskursus/bahan awal antara forum konstituen dengan kandidat bupati terpilih ; (c) Mengkonsolidasikan tokoh-tokoh peserta forum konstituen dari Forum Konstituen I (pra Pemilukada) menuju pasca Pemilukada.⁹⁰

Setelah pertemuan FK II tersebut, FKKB lebih diarahkan untuk mengawal pemerintah yang baru hasil Pemilukada, khususnya berkenaan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang diharapkan lebih aspiratif dan berpihak pada kepentingan rakyat. FKKB juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi warga untuk menagih janji-janji yang pernah disampaikan pada saat kampanye Pemilukada, khususnya pada saat dialog FK I di IT Telkom.

Sebetulnya tujuan dari FK ini kan mengawal pemerintahan yang terbentuk, siapapun yang terpilih. Nah itu, sebenarnya bagaimana kita melakukan pengawalan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti dalam perumusan dan pelaksanaan RPJMD. (Erman-Peserta FKKB; FGD; 19 April 2012)

Selain itu impiannya adalah bagaimana jika ada kepala daerah terpilih apakah itu Bupati atau Gubernur dia sadar bahwa dia jadi itu karena kita gitu lho... Sehingga jika mereka mengambil kebijakan yang merugikan konstituen mereka tahu bahwa akan ada gerakan dari konstituen untuk mempertanyakan kebijakan tersebut... Harapan jauhnya seperti itu...Sederhananya, bagaimana kita dapat terlibat dalam forum-forum pengambilan kebijakan strategis, seperti Musrenbang... Minimalnya kita diundang...(Setiawan-Koordinator Konsolidasi FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Selain dalam kaitannya dengan peran mengawal pemerintah tadi, FKKB juga diharapkan dapat menjadi ‘panggung politik’ bagi para aktivis untuk dapat muncul, dikenal dan membangun *track* politik tertentu, misalnya untuk maju sebagai kepala desa, calon legilatif ataupun posisi politik lainnya.⁹¹

⁹⁰ “Laporan Program Tahap II FK”, FAB, 2011:6.

⁹¹ Hasil konfirmasi ulang dari informan Ali (23 Juni 2012), diperoleh informasi bahwa salah seorang peserta FKKB memang ada yang berhasil maju dan menang dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2011, yaitu di Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari.

Tapi ya ada juga, seperti dari Tarum dan aku mendukung ya, misalnya pemikiran bahwa ini penting, dan ini juga dapat mendukung teman-teman yang mau jadi kepala desa misalnya... Bahkan kalau nanti ada dari pegiat FK yang mau jadi caleg atau apa gitu... Nah kalau untuk kepala desa, mereka sudah punya proyeksi si Derry itu, tahun 2012... Mereka mau dorong jadi kepala desa... (Oky-Sekjend FAB; Wawancara; 24 Desember 2011)

(c) Strategi FKKB

Seperti sudah dipaparkan sebelumnya, puncak kegiatan FKKB (yang kemudian disebut sebagai FK I) adalah pada saat dialog antara konstituen dengan calon Bupati/Wakil Bupati di IT Telkom. Untuk mempersiapkan kegiatan utama tersebut, FAB bersama kelompok *civil society* di Kabupaten Bandung merancang serangkaian kegiatan persiapan, yang pada intinya adalah memetakan, meyakinkan dan mempersiapkan konstituen dari berbagai kelompok/organisasi *civil society* di seluruh wilayah di Kabupaten Bandung (*credible source*) dalam melakukan dialog dengan para calon Bupati/Wakil Bupati.

Karena ada beberapa tahapan, pertama konsolidasi internal dalam rangka menentukan assessor di masing-masing wilayah... Kan ada 31 kecamatan, jadi tiap kecamatan ada satu assessor untuk mencari credible source, atau tokoh setempat yang berpengaruh, yang dapat mempengaruhi dinamika di lokalnya, agar sama-sama menilai kandidat, dan pada akhirnya mensosialisasikan kemudian siapa yang layak menjadi pimpinan di Kabupaten Bandung. (Derry-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 1 April 2012)

Untuk mempersiapkan bahan-bahan dialog dengan calon Bupati/Wakil Bupati, dilakukan pemetaan masalah dan isu-isu publik yang ada di Kabupaten Bandung, baik yang berbasis isu sektoral ataupun kewilayahan.

Sempat ada kuesioner di awal itu, meski sebarannya kurang luas sih... Tapi itu jadi salah satu sumber merumuskan isu-isu pokok tadi... (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Kalau di awal kan ada FGD...di tujuh titik... konsolidasi awal, lalu kemudian konsolidasi kedua... baru pertemuan dengan kandidat itu... Karena ini berbasis wilayah, jadi diskusinya bisa

beberapa isu atau sektoral di wilayah itu... Kalaupun pada akhirnya ketika di Forum Konstituen, mereka jadi terintegrasi pada isu-isu tertentu... Yang pendidikan ya di Komisi Pendidikan... yang kesehatan di kesehatan... (Derry-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 1 April 2012)

Selanjutnya dilakukan ‘kristalisasi isu-isu’ yang akan diangkat dalam dialog dengan calon Bupati/Wakil Bupati. Upaya ini dipandang penting agar dialog dapat relatif lebih fokus, sistematis dan terukur.

Isu yang belum mengkristal sebenarnya akan merugikan masyarakat... sebab akan terbuka ruang normatif bagi kandidat untuk berkampanye secara meluas (tidak fokus), tidak terarah, tidak sistematis, dan tidak terukur. Ini akan membingungkan dan menyulitkan masyarakat untuk menagih janji kandidat terpilih dengan indikator-indikator konkrit. (Harahap, 2011:15)

Pada saat dialog dengan calon Bupati/Wakil Bupati, peserta dialog tidak diarahkan untuk secara kolektif dan terbuka memberikan penilaian tertentu pada tiap kandidat. Peserta FK diberi ruang untuk melakukan penilaian dan menentukan sikap sendiri atas calon yang akan didukung dan dipihnya. Secara kelembagaan, FKKB menghambil posisi netral dalam seluruh tahapan Pemilukada.⁹²

Kita memang di Forum Konstituen tidak mengarahkan bahwa calon ini jelek, atau calon itu baik... nggak gitu... Ya pada akhirnya kita membuka ruang itu, silakan nilai masing-masing, silakan kritisi masing-masing, lalu kemudian mau memilih ya silakan pilih masing-masing... karena ini ruang kita bersama... (Derry-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 1 April 2012)

Pasca Pilkada, FKKB berupaya dapat terlibat dalam perumusan kebijakan strategis di daerah, seperti perumusan RPJMD 2010-2015, Musrenbang, dan lainnya. Selain itu, FKKB juga melakukan diskusi dan dialog di tingkat komunitas dan dengan pemerintah daerah (Catatan: dialog FKKB akan dibahas di bagian berikutnya).

⁹² Posisi yang diambil FKKB sebagai ‘panitia’ atau fasilitator yang netral dalam dialog sangat sesuai dengan pandangan Fung (2005:414) yang berpendapat bahwa perlu adanya fasilitator yang netral dalam suatu proses deliberasi (lihat halaman 45).

...mempengaruhi substansi RPJMD itu merupakan tindak lanjut dari Forum Konstituen secara keseluruhan... Jadi substansi yang ingin dipengaruhi adalah visi misi atau konsep pembangunan Pemda... Walaupun setiap calon inikan visi misinya adalah agenda pembangunan lima tahun mereka. Kita tahu bahwa, visi misi calon inilah yang akan mewarnai RPJMD. Tapi harapan kita memang adalah kita bisa terus terlibat... karena proses selama ini proses perencanaan dan penganggaran ini tidak pernah dibuka... (Derry-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 1 April 2012)

Karena adanya sejumlah kendala dan hambatan dalam melakukan konsolidasi FKKB, agenda-agenda yang sebelumnya disepakati di kemudian lebih banyak dilanjutkan oleh para aktivis di komunitas, kelompok atau organisasi asalnya masing-masing.

Nah kalau dalam konteks pengawasan pembangunan, kita juga menyadari bahwa organisasi lain juga sibuk dengan urusannya... Tapi agenda Forum Konstituen ini pada dasarnya dijalankan oleh masing-masing organ yang selama ini berinteraksi... oleh FDA, PSDK, dan lainnya... Karena mau tidak mau gagasannya berawal dari situ, maka kita berkomitmen menjalankan apa yang sudah menjadi agenda Forum Konstituen... Tapi kalau ada undangan dari Pemda misalnya ke Forum Konstituen, tetap ada kawan dari kita yang mewakili... Ya prinsipnya agenda Forum Konstituen meskipun konsolidasinya kurang tidak serta merta agenda itu tidak dilakukan, karena gagasan dalam Forum Konstituen itu kan gagasan advokasi kita-kita juga, mau tidak tidak mau, ada atau tidak ada Forum Konstituen, agenda-agenda itu tetap dijalankan... (Derry-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 1 April 2012)

Gagasan mengenai langkah strategis yang sempat muncul di FKKB pada saat penelitian ini dilakukan diantaranya adalah mencoba berperan pada momentum pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah. Dalam hal ini FKKB dibayangkan dapat turut memberikan penilaian atas kinerja pemerintah daerah setelah satu tahun bekerja, yaitu pada saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2011.

Mungkin konsolidasi lagi bisa untuk mengangkat isu LKPJ tahun 2011, mungkin akan ditempatkan disitu. Mungkin FDA yang akan mengeluarkan hasil analisisnya, dan Forum Konstituen ini yang akan ngepres ke Pemda... Kita memang perlu mempertimbangkan hal-hal takstis-strategis dari agenda advokasi kita... Kapan ini dimunculkan, kapan itu disimpan... Tetaplah... Karena

bagaimanapun Bupati juga punya historis dengan Forum Konstituen... Nah kalau nanti FDA membuat analisis tentang kinerja dia, apakah nanti biru merah atau hitam, itu nanti Forum Konstituen yang bisa menyuarakan... Nah, ini jugakan dalam rangka bagaimana me-regrouping kembali kawan-kawan yang tergabung dalam Forum Konstituen... Untuk tetap merawat jaringan yang telah terbangun di Forum Konstituen... (Derry-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 1 April 2012)

4.1.3 Proses dan Penilaian Terhadap Dialog FKKB

(a) Diskusi dan Dialog Awal

Untuk menyiapkan materi dialog dengan para calon Bupati/Wakil Bupati. diselenggarakan serangkaian serial diskusi warga/konstituen yang berangkat dari hasil pemetaan isu atau masalah konkret yang ada di masyarakat, baik itu isu sektoral ataupun kewilayahan. Ada dua diskusi, yaitu yang dilakukan diantara para konstituen sendiri, dan diskusi yang melibatkan para calon Bupati/Wakil Bupati, tim sukses, akademisi dan media massa. Jenis diskusi yang kedua tadi sekaligus sebagai upaya untuk memastikan seluruh calon Bupati/Wakil Bupati bersedia hadir dalam forum dialog yang lebih besar dengan konstituen.

...ada sebuah proses diskusi yang panjang, yang diawali dengan assessment untuk menentukan isu-isu pokok yang ada di masyarakat termasuk kontak-kontak person yang potensial untuk diajak merumuskan isu-isu tersebut... Isu pokok tadi dibawa ke FGD, workshop pra pertemuan dengan calon-calon... Dalam FGD-FGD itu kan juga dibahas persoalan di komunitas dan daerah yang ujungnya nggak bisa lepas juga dari persoalan politik... (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Menurut para informan, proses diskusi di FKKB berlangsung dinamis, karena para aktivis komunitas tersebut pada umumnya sudah terbiasa *ngobrol* dan berdiskusi sebelumnya (Bahasa Sunda: *Ngawangkong*).

Kalau beberapa kali diskusi yang sebelum dialog kandidat di Telkom itu, ada diskusi dengan tokoh dari tiap kecamatan... lalu ada diskusi tokoh dari desa-desa... Kita di komisikan, ada komisi lingkungan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur... Nanti di presentasikan, di plenokan... Orang yang diskusi di tiap komisi

campur juga sih ya, bukan pendidikan semua orang pendidikan gitu... Silakan ajah, konstituen ini yang memilih... Yang mandu diskusi ya panitia... ya yang dari PSDK lah kebanyakan... Waktu diskusi itu rame ya perdebatannya... Lumayan alot yang saya lihat mah... (Nanang-Peserta FKKB; Wawancara; 29 Maret 2012)

Namun, banyaknya pihak yang terlibat dalam diskusi serta ragamnya isu yang dibahas serta keterbatasan waktu membuat tidak semua hal bisa dibahas mendalam. Tidak terhindarkan dilakukannya upaya sinkronisasi dan harmonisasi gagasan menjadi satu gagasan yang dapat disepakati bersama. Termasuk mengenai pembagian peran dalam hal siapa saja yang akan menyampaikan hasil diskusi tersebut dalam diskusi atau dialog berikutnya.

Kita tidak menyoroti soal kekurangan atau kelebihan, tapi sinkronisasinya... Misalnya, dari kalangan perempuan apa gagasannya?... Suka atau tidak suka kami kemas dulu... Ini apa? Bagaimana?... Tidak kita diskusikan mendalam dulu... Setelah dikemas baru dipersempit... Akhirnya deal... Tapi kalau belum apa-apa sudah didiskusikan panjang lebar, itu akan bermasalah... Maka disanalah saling menghargai... yang akademisnya, yang perempuan, yang petani.... Silakan berbicara saja dulu, kita semua tampung... Catat dulu semua... Tidak dimentahkan, misalnya "Wah ini nggak bisa...!"... Tidak begitu, tapi kemas saja dulu... "Ini lho ada sekian item gagasan atau pendapat dari yang hadir.... Waktu kita sempit, tapi perlu hasil dan kesimpulan... Bagaimana masukan yang ini? Bisa digabung atau disambungkan nggak dengan gagasan yang itu?... " Nah itu enakya disini... Karena itu pimpinan FK ini memang harus bisa memfasilitasi dengan bijaksana... Karena beragam latar belakang tadi... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Boks 1: Penggunaan Bahasa dalam Diskusi dan Dialog FKKB

Dalam diskusi dan dialog, kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan pikiran sering dipandang sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan komunikasi, yaitu gagasan dapat dipahami, diterima, atau setidaknya mampu mempengaruhi pihak lain. Tidak jarang ditemui adanya anggota masyarakat yang enggan atau takut terlibat dalam pertemuan karena merasa kurang berpendidikan, tidak menguasai bahasa tertentu (misalnya Bahasa Indonesia atau bahasa asing tertentu), atau merasa tidak bisa berbicara dalam gaya bicara tertentu.

FKKB memang belum menjadi *public sphere* yang ideal seperti dibayangkan Habermas, karena warga yang terlibat sifatnya masih terbatas (belum inklusif). Idealnya, siapapun warga di daerah yang berminat untuk turut dalam dialog atau diskursus dapat terlibat dalam FKKB. Sementara itu, dari mayoritas warga yang terlibat dalam FKKB berasal dari suku Sunda yang umumnya terbiasa menggunakan bahasa Sunda atau campuran bahasa

Sunda dan bahasa Indonesia.⁹³ Disisi lain, usia, tingkat pendidikan, dan pengalaman para peserta FKKB juga sangat beragam. Tidak aneh jika isu mengenai penggunaan bahasa dan gaya berbicara juga menjadi salah satu isu yang muncul pada saat persiapan dialog antara konstituen dengan calon Bupati/Wakil Bupati. Pada akhirnya disepakati bahwa dalam dialog tersebut peserta memiliki keleluasaan untuk menggunakan bahasa dan gaya berbicara ‘bebas asal sopan’.

Sempat juga muncul hal lain waktu konsolidasi 200 orang itu, “Kita ngomongnya mesti gimana nih... kita nggak mau diatur-aturlah cara ngomongnya...”. Kubilang, “Oh nggak... Bapak, Ibu, Akang, Teteh semua itu bebas mengekspresikan gaya bahasanya seperti apa... Mau gaya aktivis atau lainnya silakan... bebas, asal sopan, tidak menyinggung SARA...”. Tepuk tangan mereka semua... seneng... (Oky-Sekjen FAB; Wawancara; 24 Desember 2011)

Sebagian peserta FKKB berpandangan bahwa kebenaran dan ketulusan justru muncul dari ‘bahasa rakyat’ yang polos dan lahir dari perasaan yang muncul dari pengalaman berhadapan dengan persoalan riil di masyarakat.

Kadang-kadang kita juga butuh suara yang polos... yang mungkin menurut orang lain tidak bernilai, mungkin tidak akademis... kadang-kadang ada mutiara pemikiran di sana... Kenapa? Karena kalau masyarakat itu kan polos.... Bicara tanpa rekayasa... kan muncul kalimatnya mungkin kasar... tapi sesungguhnya ada banyak kebenaran di sana... Itulah yang kami butuhkan... Bahasa rakyat lah... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Karenanya penyampaian gagasan oleh warga dengan ‘bahasa rakyat’ tadi justru dibutuhkan karena bahasa yang akademik, logis atau terkemas baik sangat mungkin penuh rekayasa dan juga belum tentu selalu bernilai benar dan baik.

Dialog, itu juga terjadi... walaupun suara kami suara lantang... suara rakyatkan kadangkala tanpa tedeng aling-aling, apa yang dirasakan, dipikirkan, itu yang disampaikan... Walaupun mungkin menurut kaum elit itu tidak sesuai logika atau tidak, itu tidak kami hiraukan... Pada

⁹³ Habermas banyak menganalisa mengenai peran bahasa dalam teori tindakan komunikatif. Dalam “*The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and The Rationalization of Society*” (1984:101), Habermas menyatakan bahwa bahasa adalah media untuk dapat mencapai saling pemahaman, yang selanjutnya dapat membantu mereka mengkoordinasikan tindakan bersama, yang berkenaan dengan upaya mencapai tujuan-tujuan khusus mereka. Tindakan komunikasi untuk mencapai saling pemahaman tersebut dilakukan secara intersubjektif, dalam pengertian masing-masing pihak yang berkomunikasi mencoba mengambil perspektif orang lain untuk dapat mencapai saling pemahaman. Pada halaman 56-57 buku yang sama, Habermas mengutip Wittgenstein (1921), yang berpendapat bahwa ‘bahasa’ mengartikulasikan pemahaman mengenai pandangan dunia (*worldview*) dan berkorespondensi dengan bentuk-bentuk kehidupan yang terstruktur. Pandangan dunia menyimpan pengetahuan budaya yang membantu komunitas suatu bahasa menafsirkan dunia. Setiap kebudayaan menetapkan pada bahasanya hubungan dengan realitas, mengenai apa yang dipandang ‘nyata’ atau ‘tidak nyata’, ‘benar’ atau ‘tidak benar’ yang melekat di semua bahasa. Dalam konteks bahasa yang digunakan di FKKB, tidak menjadi persoalan bahasa atau cara bicara apapun yang digunakan --di mana bahasa yang umum digunakan adalah campuran bahasa Sunda dan Indonesia, dengan cara bicara yang lepas, atau dalam istilah seorang informan sebagai ‘bahasa rakyat’ tadi--, sejauh dapat membantu masing-masing pihak mengartikulasikan pandangannya dan memahami apa pandangan subyek lainnya.

dasarnya kami menyampaikan apa yang dirasakan, dan menurut kami itu logika... Kalau kami menyuarakan karena kami merasakan, maka kami teriakkan... Karena itu yang mungkin buat orang lain lemah justru kami butuh... yang bahasanya bledag-bledug justru kami butuh... Karena mereka bicara dari hati... Berbeda dengan orang lain yang berbicara seolah sudah punya ilmu, wawasan, apalagi pengalaman... itu pasti sedikit banyak ada rekayasa, karena ingin terpuji dan dipuji... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Meskipun demikian, ada pula peserta FKKB yang justru memandang gaya berbicara yang keras justru kurang cocok digunakan dalam forum semacam dialog konstituen dan calon Bupati/Wakil Bupati tersebut.

Sebetulnya saya juga kurang senang ya, kemarin itu banyak yang omong keras... Kalau perempuan yang menyampaikan bisa lain... kalau laki-laki kan menyampaikannya biasanya keras... kalau pemikiran perempuan kan lain, kita bisa sampaikan dengan halus tapi bisa membuat dia berpikir gitu... Kadang kan ada yang menyampaikannya itu kedengarannya kan kurang enak ya.. kurang sopan, atau bagaimana... (Yana-Peserta FKKB; Wawancara; 30 Maret 2012).

(b) Dialog Konstituen dengan Calon Bupati/Wakil Bupati Sebelum Pemilukada

Dalam dialog antara konstituen dengan calon Bupati/Wakil Bupati, warga telah cukup siap dengan bahan-bahan yang akan didialogkan karena sudah menyiapkannya dalam diskusi-diskusi sebelumnya.

Di event dapat mengundang calon dan sebagian besar hadir. Masyarakat yang hadir juga sudah relatif siap dengan pemahaman, pertanyaan, dan sebagainya... Dan secara politik ini sebetulnya akan bagus untuk advokasi selanjutnya. (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Paparan dari calon Bupati/Wakil Bupati dapat ditanggapi, dipertanyakan bahkan disanggah oleh peserta dialog dari konstituen, bahkan dapat memberikan saran atau masukan mengenai bagaimana gagasan si calon perlu dikemas selanjutnya.

Memang jadi prinsipil diskusinya... karena memang kan yang terlibat disitu istilahnya orang-orang yang credible di wilayahnya... Jadi baik sektoral maupun territorial, cara pandang para kandidat jadi ada yang terbantahkan, ada yang diiyakan oleh konstituen. Tapi memang jadi positif ya, misalkan ketika ada salah satu dari kawan di Forum Konstituen menilai bahwa pandangan salah satu kandidat itu rancu... Itu jadi pertimbangan juga bagi si kandidat... (Derry-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 1 April 2012)

Waktu itu ada salah seorang calon Bupati yang bilang, bahwa jika dia terpilih akan memberi setiap desa Rp 1 milyar... Nah itu satu hal yang positif... Tapi kami tidak menerima begitu saja... Kami mempertanyakan, apakah itu bisa terjadi? Sementara anggaran Kabupaten Bandung segini lho... Banyak kebutuhan belanja tidak langsung-nya, dibanding belanja publiknya... Ini mimpi... Wah ini mah mustahal-lah... Darimana uangnya? Tidak masuk logika... Ini yang tidak rasional... Kami sampaikan, tolonglah dikemas gagasannya... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Dari proses dialog tersebut, konstituen dapat melihat, mendengar dan menilai realistis atau tidaknya paparan visi/misi atau janji kampanye dari tiap calon Bupati/Wakil Bupati, dibandingkan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah.⁹⁴

Kami tidak ingin muluk-muluk, meningkatkan belanja publik dari 4% dari APBD Kabupaten Bandung menjadi 7% saja itu sudah luar biasa... Tapi bisakah? Belum bisa saya bilang... Mangkanya jangan asal ngomong... Memang, kalau sedang kampanye, kecap tidak ada yang nomor 2, semua pasti ngaku nomor 1... Tapi nomor 1 yang macam apa?... Akhirnya dari sekian kandidat terlihat beberapa kandidat yang menonjol... Oh kandidat yang ini hanya janji... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Selain itu, konstituen juga dapat menilai tingkat pemahaman para calon Bupati/Wakil Bupati mengenai situasi dan permasalahan yang ada di daerah. Gagasan dan janji para calon Bupati/Wakil Bupati coba dikontekskan dengan situasi nyata di daerah.

Ada calon yang bilang, "Saya akan membenahi lingkungan wilayah sungai...". Abah waktu itu langsung berteriak karena konsen di sumberdaya wilayah sungai... Abah bilang, "Terima kasih... Ada kandidat Bupati dan Wakil Bupati yang ingin mengelola sumberdaya air... Karena air sangat penting bagi kehidupan... Tapi sebelum mengelola itu, Abah ingin bertanya, ada berapa wilayah anak sungai di Kabupaten Bandung?". Dia tidak bisa menjawab... Katanya, "Aduh, saya belum tahu itu...". (Abah bilang) "Bagaimana anda bisa mengelola wilayah sungai secara baik dan konkret kalau jumlahnya saja belum tahu... Itukan dongeng...". (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

⁹⁴ Lihat "Forum Konstituen Pelototi Calon Bupati", Radar Bandung, 4 Agustus 2010, hal. 3.

Konstituen juga dapat membandingkan dan menilai substansi paparan visi/misi atau janji para calon Bupati/Wakil Bupati apakah sekedar “Omdo” (*omong doang*) atau memang berbasis fakta dan data yang memadai sehingga dapat terukur realistis atau tidaknya gagasan tersebut.

Nah akhirnya kan terpetakan oleh kita... Tidak jelek semua, tapi adalah yang masuk akal... Karena kalau buat kami ya yang masuk akal... Tidak ceunah... tidak angan-angan... Tapi fakta dan data, yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada... Jadi kita berdialog, berinteraktif, sambil merenung apa yang dia bicarakan... Omdo atau memang bisa terealisasi... Ternyata memang banyak omdo-nya... Karena kami tidak buta anggaran, karena sudah dididik oleh FK... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Peserta dialog juga dapat melihat dan menilai performa tiap calon Bupati/Wakil Bupati dalam memberikan paparan atau penjelasan serta menanggapi respon atau sanggahan baik dari konstituen ataupun dari calon lainnya.

Saya lebih melihat bagaimana si calon Bupati dan Wakil Bupati menjawab... Karena juga gini, waktu itu juga banyak pertanyaan bagus... dialognya juga bagus tuh... Cuma kalau respon dari yang si calon Bupati dan wakilnya itu nggak jelas, ya jadinya nggak jelas juga tuh... Tadi saya bilang, keseriusan para calon itupun jadi kelihatan kan... Tapi kalau diskusi di masyarakatnya sendiri bagus menurut saya... pertanyaan-pertanyaannya juga bukan yang itu-itu aja, isu-isunya juga baguslah... (Wati-Peserta FKKB; Wawancara; 17 April 2012)

Dialog tersebut dipandang menjadi penting karena hampir semua pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dapat hadir, menyampaikan secara langsung dan terbuka paparan visi/misinya di hadapan calon lain dan konstituen dari beragam latar belakang organisasi di seluruh wilayah di Kabupaten Bandung.

Mangkanya disitu sebetulnya lebih bermartabat, terutama buat para kandidat... Jadi tidak berbicara silih goreng [Bahasa Sunda: saling menjelekkan] di belakang, tapi secara langsung... karena hampir semua kandidat datang... Pasea', sok wae... da' moal di coblos engke'[Bahasa Sunda: Berantem, silahkan saja... kan nanti tidak akan dipilih]... Kalau dia terjadi perang argumen diantara mereka, kan kita yang menilai... Jangankan nanti, sekarang saja kandidat sudah egois... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Meskipun demikian, ada pula yang menyayangkan tidak dibuatnya kesepakatan atau kontrak politik antara FKKB dengan para calon Bupati/Wakil Bupati yang hadir dalam dialog tersebut. Hal tersebut tampaknya memang secara sadar dilakukan oleh FAB dan panitia pelaksana dialog dengan alasan bahwa kontrak politik tidak memberi jaminan janji kampanye (*campaign promises*) akan dipenuhi oleh pemenang Pemilu. Aspek yang ditekankan kemudian adalah bagaimana kekuatan *civil society* itu sendiri dapat menekan dan menagih janji tersebut ke pemerintah daerah.

Menurut saya yang kelewat kemarin itu adalah tidak adanya kesepakatan tertulis dari calon-calon yang jadi, mandat-mandat ke si calon dari Forum Konstituen itu dijalankan... Jadi ada kekuatan ketika sudah berjalan Bupati itu untuk kita menagih janji-janjinya... Janji-janji itu kan cuma dalam pidato... itu nggak ada semacam MoU kan... (Nanang-Peserta FKKB; Wawancara; 23 April 2012)

Oh itu memang agak kencang waktu H-1 itu, waktu konsolidasi 200 orang itu... Dari kawan kita juga... (teriak) "Kontrak politik...!". Kan Eko yang fasilitasi gitu kan. Eko bilang, "Oh nggak, kita nggak ada kontrak politik... dimana-mana kontrak politik juga sama aja nggak jalan". Jadi memang kemudian kita nggak bikin kontrak politik... (Oky-Sekjen FAB; Wawancara; 24 Desember 2011)

(c) Diskusi dan Dialog Pasca Pemilu

Pasca Pemilu, FKKB melakukan serangkaian diskusi di komunitas (yang mereka sebut '*roadshow*'), yang dilakukan terutama untuk menyusun bahan dialog dalam perumusan RPJMD pemerintah daerah yang baru.

Jadi setahun ini FK memang kita lakukan secara swadaya, jadi ada beberapa pertemuan, roadshow gitu ya, yang muter dari Pangalengan, terus ke Pasir Jambu, disitu swadaya muncul... Karena ada beberapa agenda, misalnya ada undangan... Pemda mengundang FK misalnya, kita ngumpul, kita bahas apa yang harus disiapkan, berbagi tugas, berbagi peran gitu... (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

FKKB kemudian mengundang Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk berdialog terkait dengan perumusan RPJMD. Undangan ini dapat dikatakan juga sebagai

test case dari komitmen mereka untuk membuka ruang dialog dengan warga, yang pernah disampaikan pada saat dialog dengan konstituen di kampus IT Telkom.

... statement itu waktu itu muncul [Cat.: saat dialog kandidat dan konstituen di IT Telkom]... ya mungkin karena situasi dimana mereka tidak bisa mengelak dan sebagainya... Tapi itu kita pegang, kita tes, kita undang resmi dengan kop FK, ternyata Wakil Bupati mau dateng... Di Baleendah sini... Waktu itu kita nggak nyangka juga bahwa mereka mau dateng... Karena baru dilantik mungkin masih euphoria gitu kan... Tapi kok mau dateng... Ini suatu hal yang penting bagi kita, bahwa ya oke, mereka masih menghitung FK... (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Ada, kitakan pernah ketemu dengan Wakil Bupati... Itu setelah FK II... Jadi FK mengundang Bupati, tapi dia nggak bisa, jadi yang datang Wakil Bupati... Pertemuannya itu di luar kantor pemerintah... Waktu itu konteksnya ingin memberi masukan soal RPJMD. (Oky-Sekjen FAB; Wawancara; 24 Desember 2012)

FKKB juga pernah diundang oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk berdialog mengenai isu atau masalah sensitif yang ada di daerah bersama dengan NGO/CSO lain yang terkait dengan isu tersebut. Pertemuan semacam ini umumnya lebih bersifat informal.

Nggak lama pasca Pilkada FK juga diundang oleh Wabup terpilih dalam pertemuan... Tapi itu difasilitasi sama Yayasan Inisiatif ya... Ada juga pertemuan informal dengan Bupati waktu itu di rumah makan... FK juga ikut... Dateng Bupati waktu itu... Tapi sebetulnya itu lebih terkait dengan isu Chevron ya, dan Bupati merasa perlu ketemu WALHI yang diidentifikasi menentang Chevron... Jadi Bupati mengundang WALHI dan jaringan teman-teman di Kabupaten... Sekitar 3-4 kali pertemuanlah dengan Pemda itu... Pernah ketemu di rumah dinas Bupati itu dua kali waktu itu, pertemuan informal... (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Selain itu yang terpenting dari interaksi FKKB dan pemerintah daerah dan pihak-pihak lainnya adalah terlibatnya FKKB dalam proses perumusan RPJMD dan dalam Musrenbang tahun 2011 dan 2012.

...pas Musrenbang 2011... mereka diundang secara formal oleh Pemda, tertulis... Gua dateng... Kita sama pandangan bahwa Musrenbang ini tidak bisa diandalkan... Apalagi kalau lihat

acaranya ya... Cuma satu hari dengan seabreg-abreg agenda... ya Ormas, ya Pemerintah, segala macem... Cuma targetnya ya memang harus muncul dan ngomonglah... (Oky-Sekjen FAB; Wawancara; 24 Desember 2011)

Salah satu dialog FKKB dengan pemerintah daerah dimana saya dapat turut hadir sebagai pengamat adalah pada dialog tanggal 23 April 2012 di Kantor Wakil Bupati. Dialog tersebut merupakan permintaan dari FKKB kepada Wakil Bupati khususnya berkaitan dengan isu LKPJ Bupati 2011 dan masalah-masalah lain di daerah. Hasil observasi terhadap pertemuan tersebut menurut saya sedikit banyak dapat menggambarkan bagaimana interaksi dan interelasi antara FKKB dengan pemerintah daerah, khususnya dengan Bupati dan Wakil Bupati (lihat Boks 2: Dialog FKKB dan Wakil Bupati).

Boks 2: Hasil Observasi Dialog FKKB dan Wakil Bupati

Kantor Wakil Bupati, Soreang, 23 April 2012

Hal pertama yang menarik dari kegiatan dialog antara FKKB dan Wakil Bupati tersebut adalah karena kesepakatan untuk dapat bertemu dan berdialog dalam suasana informal tersebut dilakukan hanya melalui komunikasi telpon dan SMS. Interaksi yang telah terbangun sejak pra Pemilu, dan adanya kedekatan beberapa orang pegiat FKKB dengan Bupati dan Wakil Bupati tampaknya merupakan faktor utama yang mempengaruhi kemudahan akses komunikasi dan berdialog tersebut.

Hal lain yang cukup menarik adalah adanya suasana informal dalam pembawaan diri pegiat FKKB, meskipun yang dihadapi adalah pejabat tinggi di daerah. Dialog tersebut berlangsung pada pukul 11 siang di hari Senin (hari kerja) dan di lingkungan kantor pemerintah daerah. Tetapi 10 orang pegiat FKKB cukup leluasa masuk dan keluar Kantor Wakil Bupati dengan pakaian kasual, memakai *iket* (ikat kepala khas Sunda), bahkan beberapa diantaranya mengenakan sandal jepit saja. Disisi lain, baik Wakil Bupati maupun aparat pemerintah daerah yang lainnyapun tampaknya sudah terbiasa dengan nuansa informal tersebut.

Setelah pembukaan, FKKB langsung menyampaikan tujuan mereka meminta waktu berdialog dengan Wakil Bupati. Menurut peneliti, apa yang disampaikan oleh perwakilan FKKB tersebut menggambarkan posisi dan relasi yang coba dibangun FKKB dalam hubungannya dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini FKKB memosisikan diri sebagai bagian dari *civil society* yang “ikut berpartisipasi, ikut mengawal, sekaligus ikut mengontrol, (dan) mengkritisi pemerintahan”, serta “mengklarifikasi, mempertanyakan, dan juga *sharring*”, sekaligus “ingin menagih janji Pak Wakil Bupati ketika itu kepada kami, (dan) kepada masyarakat Kabupaten Bandung”, seperti tergambar pada pernyataan berikut:

Mungkin secara formal ataupun informal, sudah 3 atau 4 kali kami bertemu dengan Pak Wakil Bupati... Ini merupakan sebuah berkah bagi kami dalam rangka mewujudkan komitmen, yang seingat saya terbangun ketika pertemuan di STT Telkom... Waktu itu kami bersama masyarakat

yang tergabung dalam Forum Konstituen berkomitmen dengan calon Bupati dan Wakil Bupati ketika itu, siapapun yang memimpin kami, kami akan ikut berpartisipasi, ikut mengawal, sekaligus ikut mengontrol, mengkritisi pemerintahan yang akan berjalan ketika itu... Setelah pertemuan kami dengan Tim Perumus RPJMD waktu itu di ruangan ini juga...

Yang kedua, kami juga ingin mengklarifikasi, mempertanyakan, dan juga sharring, mengenai rencana pertanggungjawaban Pak Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk LKPJ kepada DPRD. Nah sejauhmana LKPJ tersebut dapat juga menjadi pertanggungjawaban, tidak hanya kepada DPRD tetapi juga kepada rakyat Kabupaten Bandung, rakyat Tatar Ukur... anu tos memberi kepercayaan penuh kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk memimpin kami.

Nah untuk pertemuan kali ini, dalam kesempatan yang baik ini, kami dari Forum Konstituen ingin menagih janji Pak Wakil Bupati ketika itu kepada kami, kepada masyarakat Kabupaten Bandung, terkait dengan visi misi yang disemangati filosofi orang Sunda yaitu Sabilulungan... Sejahterama komitmen Pak Wakil Bupati terhadap implementasi dari janji dan kampanyenya ketika itu, dan bagaimana kemajuan dari program-program yang sudah dijalankan. (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012).

Wakil Bupati mengaku agak terkejut dan kurang siap dengan isu yang disampaikan oleh FKKB, karena sebelumnya menyangka pertemuan ini hanyalah merupakan pertemuan silaturahmi, *ngobrol* dan *sharring* mengenai isu-sisu aktual di kabupaten. Selanjutnya Wakil Bupati menjelaskan berbagai masalah-masalah dalam pembangunan di kabupaten yang menjadi prioritas untuk dijawab oleh pemerintah daerah. Dialog kemudian berlangsung mengenai beberapa isu mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, seni budaya, ancaman tidak tercapainya visi dan misi pembangunan daerah, termasuk mengenai *Sabilulungan* (filosofi atau nilai-nilai masyarakat Sunda). FKKB kemudian juga banyak melontarkan kritik dan sanggahan mengenai sejumlah hal yang disampaikan oleh Wakil Bupati.

Akan tetapi Wakil Bupati mengaku senang memperoleh informasi dan dikritisi oleh FKKB. Lebih jauh, Wakil Bupati meminta FKKB untuk melakukan kajian dan menyiapkan bahan tertulis untuk didialogkan dengan pemerintah daerah khususnya dengan SKPD terkait. Menurut Wakil Bupati, informasi, kritik dan rekomendasi dari hasil kajian tersebut akan membantunya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah yang menjadi Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)-nya.

Jadi itulah temen-temen... Ini mah kita ngobrol sepintas ajah... Nya' abdi mohon bantuan oge ti temen-temen Forum Konstituen... [Bahasa Sunda: Ya saya mohon bantuan dari teman-teman Forum Konstituen]. Ketika menemukan dimana saya salah, katakan salah!... Dan saya tidak malu untuk dikritik... Kenapa? Karena kita niatnya bener... Kalau orang lain, wah jadi pingpinan aya' nu ngritik terus ngambek... Wah!... Tong jadi politisi... Tong jadi pimpinan... [Bahasa Sunda: ... wah jadi pimpinan ada yang mengkritik terus ngambek... Wah! Jangan jadi politisi... jangan jadi pimpinan...]. Karena kita memang dalam posisi yang untuk dikritisi... Yah?!...

Nah ini, disinilah saya minta peran Forum Konstituen mesti kritis... Ukur aja... Ukur teh gini [Bahasa Sunda: Ukur itu begini...], kita mesti bikin parameter sebuah ukuran. Satu tahun nih, apa yang sudah dilakukan?... Bikin matriks... Udah nggak jamannya lagi sekarang, bikin LKPJ tadi ya, hanya ngomong-ngomong dihias kata... Ukur... Setahun ini apa saja yang kita kerjakan?... Banjir apa yang sudah kita perbuat?... Infrastruktur apa yang sudah kita buat?... Kemudian tadi, penanganan lingkungan hidup dan kemiskinan seperti apa?... Nah ini hal-hal utama yang harus mendapat perhatian besar dari pemerintah...

Tapi ini belum selesai... Awas!... [...forum tertawa]. Jadi abdi mohon FK bikin kajian khusus soal ini... buat tertulis dengan acara formal... Nanti urang nyien [Bahasa Sunda: Nanti kita bikin] acara khusus... tapi undang juga temen-temen yang lain, nya'!... Urang bikin semacam simposium, termasuk ngaos Sabilulungan lah... [Bahasa Sunda: Kita bikin semacam simposium, termasuk mengkaji Sabilulungan]. Jadi nanti larinya ke pengawasan dan pengendalian yang termasuk Tupoksi abdi... (Wakil Bupati; Dialog FKKB dan Wakil Bupati; 23 April 2012)

Dari gambaran tersebut, terlihat adanya relasi yang cukup setara antara FKKB dan pemerintah daerah, khususnya dengan Wakil Bupati. Sejauh yang dapat diamati, FKKB telah memiliki posisi tawar yang cukup baik terhadap pemerintah daerah, yang diindikasikan dengan adanya akses komunikasi, kesempatan berdialog secara langsung dalam suasana dialog yang cukup dinamis, serta terbukanya kesempatan untuk berpartisipasi dan mengambil peran lebih besar dalam melakukan kontrol dan mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah.

Namun menjadi catatan bahwa model seperti ini bukanlah bentuk ideal dari *public sphere* versi Habermas. Idealnya dialog antara warga dan pemerintah daerah ini dapat dilakukan secara terbuka (inklusif), di mana siapapun warga yang berminat terlibat dapat turut hadir dan berdialog mengenai berbagai hal terkait dengan persoalan dan kebijakan di daerah. Akses atau kontak langsung (dengan berbagai bentuknya, apakah melalui pengajuan langsung ataupun kontak melalui teknologi dan media) dengan pemerintah daerah atau institusi dan pejabat yang terkait dengan pengambilan keputusan publik, idealnya dapat dimiliki dan dikendalikan oleh warga pada secara luas. Karenanya, dalam pandangan peneliti kegiatan dialog semacam ini memang mendukung upaya *extending democracy* (perluasan arena politik dan pengambilan keputusan), namun masih belum sungguh-sungguh mampu mendukung upaya *deepening democracy* (perluasan keterlibatan aktor sosial) dalam diskursus publik.⁹⁵

(d) Penilaian terhadap Proses Dialog

Menurut Ferry Kurnia (Ketua KPUD Provinsi Jawa Barat),⁹⁶ diskusi dan dialog yang dilakukan FKKB khususnya yang berkaitan dengan dialog antara konstituen dan calon Bupati/Wakil Bupati merupakan sebuah upaya yang sangat baik, karena

⁹⁵ Mengenai konsep *deepening democracy* dan *extending democracy*, lihat World Bank (2005:70).

⁹⁶ Pada saat wawancara ini dilakukan (14 April 2012), Ferry baru dua hari sebelumnya dilantik menjadi anggota KPU Pusat.

menjembatani antara konstituen dengan politisi yang maju dalam Pemilu, sehingga dapat melakukan dialog secara terbuka.

Saya kira ini satu langkah awal yang sangat baik dilakukan oleh temen-teman... Tampaknya itu satu hal yang perlu kita apresiasi... Ya inikan suatu upaya dari satu elemen masyarakat untuk menjembatani pasangan calon yang ada atau mau mencalonkan dengan masyarakat... Itu dipahami seperti itu... sehingga masyarakat atau publik secara luas itu betul-betul mengetahui apasih yang diinginkan, apa yang mau direncanakan, diprogramkan, termasuk visi dan misi mereka.... (Ferry-Ketua KPUD Provinsi; Wawancara; 14 April 2012)

Salah seorang calon Bupati/Wakil Bupati yang ikut dalam dialog tersebut juga menilai bahwa dialog FKKB lebih konstruktif, membangun kesadaran konstituen dan menguji kapasitas calon.

.... yang dilakukan itu memang berbeda dari yang lain karena lebih konstruktif, lebih menggali pada kesadaran konstituen, dan akan membongkar kemampuan individu calon... (Kusnadi-Calon Bupati/Wakil Bupati; Wawancara; 2 April 2012)

Meskipun demikian, dialog tersebut juga tidak luput dari kritik. KPUD Kabupaten meskipun menilai dialog tersebut sebagai kegiatan yang bagus, namun menganggapnya masih sebatas seremonial, dan perlu dikembangkan dalam bentuk dialog langsung dengan komunitas atau kelompok masyarakat yang terkait sektor-sektor tertentu.

Saya sempat hadir, kasih sambutan... Ya bagus-bagus ajah... Hanya itu mungkin hanya sekali karena keterbatasan dana, dan dalam konteks seremonial sajah... Jadi kalau ke depan kita berharap FK tidak hanya sebatas seremonial... (Perlu) Ke lapangan langsung dengan calon... (Dialog) Soal pertanian, kita langsung bertemu dengan kelompok-kelompok tani dialog soal isu pertanian. Misalnya soal subsidi pertanian, soal bagaimana revitalisasi pertanian... Bagaimanalah itu, dialog... (Osin-Ketua KPUD Kabupaten Bandung; Wawancara; 31 Maret 2012)

Kritik juga disampaikan oleh peserta dialog itu sendiri. Diantaranya, ada yang menilai bahwa proses dialog tersebut cenderung kurang obyektif karena adanya sebagian peserta yang telah memiliki preferensi politik pada calon-calon tertentu.

Cuman disana kental ini juga ya... yang ini pro ini, yang ini pro itu... Jadi si masyarakat juga nggak objektif juga peserta forumnya... karena yang dilihat itu, yang datang itu sudah pendukung-pendukung si calon... Ah nggak peduli calon lain, yang penting saya mendengarkan dan memberi tepuk tangan calon yang dijagokan... (Nanang-Peserta FKKB; Wawancara; 29 Maret 2012)

Peserta dialog yang lain mengkritisi tidak lengkapnya calon Bupati/Wakil Bupati yang hadir, dan terbatasnya waktu sehingga dialog menjadi kurang mendalam.

Kalau untuk ke depan, acara dialog seperti di Telkom perlu diupayakan semua calon bisa hadir... Waktunya juga perlu ditambah, karena kemarin itu terasa singkat ya... Jadi kita mau mengeluarkan apa yang ingin disampaikan tidak tercapai ya kalau cuma 1 hari. (Yana-Peserta FKKB; Wawancara; 30 Maret 2012)

Dialog antara konstituen dengan calon Bupati/Wakil Bupati yang frekuensinya terbatas (dua kali workshop dan satu kali pertemuan besar di IT Telkom) juga dipandang belum dapat memberikan pendidikan politik yang massif kepada warga atau konstituen. Salah satu alasannya adalah karena sulit bagi para pegiat FKKB untuk mengetahui apakah para *credible source* yang terlibat dalam dialog tersebut memang sungguh-sungguh menginformasikannya kembali ke komunitas atau organisasinya.

Cuma tentunya, dari sisi massifikasinya itu masih perlu manajemen lagi... karena Kabupaten Bandung dengan jumlah pemilih 2 juta lebih itukan perlu di manage.... Misalnya tidak hanya dilakukan di satu titik, tapi bisa dilakukan di beberapa titik di kawasan Kabupaten Bandung, sehingga lebih dapat menyentuh masyarakat... dan tidak dilakukan di dalam ruang yang cenderung terlalu kaku... tapi lebih nyaman di lapangan gitu... (Ferry-Ketua KPUD Provinsi; Wawancara; 24 April 2012)

Ya cuma yang memang jadi problem, ruangnya menjadi terbatas karena persoalan waktu... jadi ya karena terbatasnya waktu, dan balapan dengan agendanya KPU, jadi ya cuma beberapa kali yang bisa dilakukan... Dan dibandingkan dengan jumlah pemilih Kabupaten Bandung yang lebih dari 2 juta itu, ya memang ini masih memerlukan pekerjaan panjang ya... (Kusnadi-Calon Bupati/Wakil Bupati; Wawancara; 2 April 2012)

Ya itu yang kurang... Jadi kedekatan emosionalnya itu yang kurang... Bahkan di sini kan ada 7 daerah pemilihan, ya Forum

Konstituen itu baiknya di ke 7 daerah tersebut... (Derry-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 1 April 2012)

Kritik paling keras terhadap proses dialog tersebut justru disampaikan oleh salah seorang informan dari calon Bupati/Wakil Bupati. Menurutnya, meskipun peserta dialog tersebut adalah kalangan terdidik, aktivis, dan tokoh, namun belum mampu membangun proses diskusi dan dialog yang substantif dan argumentatif.

Pertanyaan-pertanyaannya masih yang normatif... Pertanyaannya, bagaimana cara anda menyelesaikan banjir?... Kemudian, bagaimana anda menyelesaikan pendidikan gratis bagi warganya?... Itu sama saja dengan pertanyaan yang tadi masyarakat kecil yang bilang "Pak itu tolong bantu jembatan..."... Apa bedanya coba? Hanya lebih besar saja dimensinya... (Jaka-Calon Bupati/Wakil Bupati; Wawancara; 1 April 2012)

Informan yang sama juga menilai bahwa pertanyaan dan komentar yang diajukan oleh peserta dari konstituen umumnya hanya pertanyaan normatif. Dalam hal substansi, pertanyaan dan komentar tersebut dinilai tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat kebanyakan dan dalam dialog yang diselenggarakan KPUD. Ruang dialog tersebut tidak dijadikan sebagai ajang pendidikan politik, dan lebih diperlakukan sebagai arena kampanye semata.

Di FK yang kemaren itu, karena pondasi pemahaman politik ini belum paham pada pembelajaran politiknya, maka cenderung kita waktu di FK ini diskusi politik ini hanya sebagai forum kampanye saja... Jadi ruang politiknya ini tidak tajam, dan menggiring sebuah pengetahuan dan pembelajaran, siapa diantara para kandidat waktu itu yang dikatakan layak pada aspek politik... itu tidak ada... Karena pertanyaannya pertanyaan normatif... Padahal yang diundang kan waktu itu ideal, ada tokoh-tokoh masyarakat, LSM, perguruan tinggi... Jadi dari sisi konstituen itu kita lebih kaya... (Jaka-Calon Bupati/Wakil Bupati; Wawancara; 1 April 2012)

Selain itu, calon-calon Bupati/Wakil Bupati yang hadir dalam dialog tersebut umumnya juga kurang siap untuk melakukan debat yang bersifat substantif dan mungkin pada topik-topik yang sensitif.

Ada beberapa calon kan yang hadir di forum tersebut... Saya waktu itu di awal sesungguhnya memancing, kebijakan-kebijakan yang berorientasi publik begitu... Saya sampaikan pada mereka,

bahwa kalau kami menang, maka kami mulai akan memilah mana yang menjadi hak publik dan yang menjadi hak personal, yang selama ini tidak ada pembeda... karena di kebijakan Bappeda Kabupaten Bandung mencabut bantuan-bantuan pada masyarakat miskin, seperti bantuan kambing dan sejenisnya itu, menjadi skema kredit itu karena kita memandang bantuan seperti itu privat sifatnya... bukan publik... Hak publik itu infrastruktur... Tadinya saya berharap ada yang komentar seperti “Nggak bisa, anda sudah mengambil hak orang miskin...!”... Tapi tidak ada yang mengomentari tajam seperti itu... (Jaka-Calon Bupati/Wakil Bupati; Wawancara; 1 April 2012)

Dialog yang terjadi masih berkisar pada lontaran dan tanggapan atas isu-isu, dan belum menjadi dialog politik dan kebijakan yang mendalam, dimana isu-isu tersebut seharusnya dapat dikoneksikan dengan kebijakan dan situasi sosial yang ada di daerah. Dalam pandangan informan tersebut, baik konstituen maupun calon Bupati/Wakil Bupati umumnya belum siap melakukan dialog secara substantif. Hal tersebut kemungkinan yang membuat jawaban para calon dalam menanggapi pertanyaan ataupun sanggahan dari peserta dialog lainnya menjadi ngambang.⁹⁷

Jadi di semua lini sepertinya belum siap diskusi politik dan kebijakan secara mendalam. Diskusinya di ruang isu saja. Mengkoneksikan antara isu dengan data dan kebijakan itu yang tidak ada. (Jaka-Calon Bupati/Wakil Bupati; Wawancara; 1 April 2012)

Meskipun demikian, dialog FKKB cukup diapresiasi karena dipandang relatif lebih baik dibandingkan dengan dialog calon Bupati/Wakil Bupati yang dilakukan KPUD. Menurutny dialog FKKB dinilai lebih terbuka dibandingkan dengan dialog di KPUD lebih sekedar formalitas saja.

Memang FK ini lebih terbuka dibandingkan yang dilakukan KPU... Sebab yang dengan KPU di TV itu selain waktunya yang dibatasi sekali, memang para penanyanya sendiri pada waktu itu penguasaan politiknya rendah... Cenderung yang bicara itu adalah para praktisi... jadi bukan politisi gitu ya, yang mungkin bisa menysar ruang kebijakannya gitu ya... (Dialog di) KPUD, yang asal gugur kewajiban saja... Sudah membuka ruang kampanye, debat, calon menyampaikan pemikirannya, lalu ya sudah... Sudah sesuai dengan UU, ya selesai tugas saya, masalah

⁹⁷ Lihat KOMPAS, 9 Agustus 2010 pada halaman 3, “Jawaban Para Cabup Ngambang: Dalam Dialog Bersama Forum Konstituen”.

sampai ke masyarakat atau tidak itu tidak penting ... (Jaka-Calon Bupati/Wakil Bupati; Wawancara; 1 April 2012)

Sinyalemen tadi juga dikonfirmasi oleh KPUD, yang menyatakan bahwa dialog kandidat Pemilukada yang dilaksanakan oleh KPUD memang baru sebatas formalitas dan memenuhi aspek normatif yang ada dalam UU Pemilu. Dialog FKKB bahkan dinilai sebagai model yang baru dan perlu dikembangkan (lihat Boks 3: Dialog FKKB Sebagai Model Partisipasi Politik yang ‘Baru’). Dengan kata lain, model dialog FKKB adalah alternatif dari ‘kegagalan’ model kampanye Pemilu/Pemilukada yang dilakukan pemerintah dan KPUD.⁹⁸

Karena apa yang ada di KPU selama inikan lebih pada aspek formalitas... kita KPU ada proses pencalonan, iya... kita ada proses sosialisasi, iya... namun ketika ada elemen masyarakat yang mencoba menggunakan berbagai metodologinya untuk melakukan pendidikan politik itu sangat baik... KPU kan lebih pada aspek normatif, sesuai dengan undang-undang... tapi di masyarakat itu berbagai hal bisa digali... dari soal integritas, kompetensi, rekam jejak, dan lainnya... dan ini yang tampaknya dilakukan oleh teman-teman... (Ferry-Ketua KPUD Provinsi; Wawancara; 14 April 2012)

⁹⁸ UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, mendefinisikan kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu. Pada Pasal 77 disebutkan bahwa Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sementara metode kampanye yang diatur pada Pasal 82, menyebutkan bahwa kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dilakukan melalui: (a) pertemuan terbatas; (b) pertemuan tatap muka; (c) penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum; (d) pemasangan alat peraga di tempat umum; (e) iklan media massa cetak dan media massa elektronik; (f) rapat umum; dan (g) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara mengenai ketentuan tentang pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilu secara nasional diatur dengan peraturan KPU (Pasal 85). KPUD Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya berwenang mengatur aaktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye. Dari seluruh ketentuan tersebut, terlihat tidak adanya aturan yang jelas mengenai pengembangan model kampanye dialogis yang sesungguhnya lebih berpotensi dapat menjadi sarana pendidikan politik.

Boks 3: Dialog FKKB Sebagai Model Partisipasi Politik yang ‘Baru’

Desain FKKB sebagai forum pertemuan dan dialog konstituen dengan calon Bupati/Wakil Bupati menjelang Pemilu Kabupaten Bandung tahun 2010, menurut FAB memang didasarkan atas kritik terhadap model kampanye politik, kampanye Pemilu/Pemilukada, dan model pendidikan politik yang ada sebelumnya. Dialog FKKB dirancang sebagai sebuah dialog yang lebih terstruktur mengenai berbagai persoalan utama yang ada di daerah dan dipandang perlu menjadi perhatian bagi para calon, dan diharapkan dapat menjadi agenda politik dan pembangunan daerah bagi siapapun calon yang terpilih dalam Pemilu.

Forum Konstituen berbeda dengan debat publik ataupun forum kampanye yang biasa berlangsung. Forum Konstituen di desain sedemikian rupa untuk menohok pada jantung persoalan daerah yang bersangkutan. Ini bisa dilakukan sebab sebelumnya pengidentifikasian isu, analisa daerah dan ekspektasi masyarakat setempat dikunyah dan dicerna dengan seksama oleh tim pelaksana program dibantu para pakar. Hasil pengolahan isu inilah yang kemudian diutarakan, didiskusikan dan ‘didesakkan’ kepada para kandidat. (Harahap, 2011:13)

Sebagai sebuah forum dialog, FKKB berupaya menyiapkan dan melibatkan secara aktif semua peserta yang terlibat baik dari konstituen, para calon Bupati/Wakil Bupati dan tim suksesnya, akademisi, NGO maupun media massa dalam proses dialog tersebut. Tujuannya adalah agar forum dialog tidak justru terjebak menjadi forum monolog salah satu atau sebagian pihak saja, namun dapat berlangsung dinamis, substantif dan memberikan gambaran mengenai alternatif-alternatif pemecahan masalah dari perspektif berbagai pihak. Dalam konteks Pemilu, ini juga memberikan kesempatan pada para calon untuk menampilkan kapasitas politik dan pemahaman mereka akan masalah yang ada, dan disisi lain memberi kesempatan pada konstituen untuk mengeksplorasi pemahaman dan gagasan para calon tersebut.

Perbedaan kegiatan dialog dengan calon di Telkom dibandingkan dengan kampanye yang lain itu, kegiatan kita lebih utuh dan dinamis, antara calon pemimpin dengan yang dipimpin... jadi tidak omdo, tidak sepihak... Ketika dia menyampaikan keinginannya, visi-misinya, itu kami cermati, kami pelajari... Ini sesuai tidak dengan adat istiadat, karakter, budaya di Kabupaten? Sinkron tidak dengan situasi yang ada?... Jadi sebetulnya yang kita lakukan di FK dengan FAB di Telkom itu lebih elegan... Tersampaikan, dan lebih dipahami semua kandidat... Sok we [Bahasa Sunda: Silahkan saja...] semua kandidat bicara... Kami mendengar, mengamati, meneliti, mempelajari mana yang lebih baik diantara yang paling baik... Dan setelah ada yang jadi, kami bertanggungjawab untuk mengawalinya... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Model dialog FKKB ini tentu menjadi berbeda dengan model kampanye partai politik, tim sukses dari calon Bupati/Wakil Bupati, ataupun yang dilakukan oleh KPU. Dalam dialog FKKB yang dilaksanakan di lingkungan akademik (kampus IT Telkom), terbangun nuansa kesungguhan untuk dapat sama-sama berdialog dan saling menilai kapasitas, keberanian, dan ‘ketulusan’ dari para calon yang maju dalam Pemilu. Para calon tersebut juga diposisikan secara terhormat karena diberi kesempatan untuk bertemu dan

berdialog dengan konstituen yang juga memiliki kapasitas dan pengaruh tertentu di komunitas atau lembaganya masing-masing, dengan tanpa harus mengeluarkan ongkos atau biaya seperti pada kampanye lainnya. Dalam hal ini para calon tersebut sesungguhnya juga memperoleh keuntungan lain karena mendapatkan kesempatan ‘berkampanye dialogis secara gratis’, dan tidak dalam relasi transaksional pragmatis seperti banyak terjadi pada kampanye di tempat lain.

Mereka merasa elegan, karena tempat dan wilayahnya di daerah akademis. Kedua, para pengundangnya yaitu komunitas yang tergabung dalam FK ini adalah dinamis dan terdiri dari banyak elemen masyarakat. Ketiga, tantangannya berani nggak tidak di belakang layar. Kan sekarang mah, kampanye si A di sana, si B di tempat lain. Sekarang disatukan di satu tempat berhadapan dengan Forum Konstituen. Adu jago, adu janji. Yang menilai jadi jurinya kita-kita ini masyarakat, bukan moderator. Dia yang berbicara, kita yang menanggapi, dialog... Lebih elegan, makanya lebih terhormat dia... Dan ditantang keberaniannya berhadapan dengan warga... Biasanyakan kampanye, si A ngomong, nanti si B nanggapi ngomong di kampanyenya sendiri di tempat lain... Kalau di FK kan berhadapan... Kalau waktu itu dari semua kandidat yang hadir ada ketersinggungan, sok aja mereka berdebat, kami yang akan menilai... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Sementara, model kampanye lainnya lebih menekankan pada model mobilisasi massa dalam bentuk konvoi dan panggung hiburan,⁹⁹ ataupun bentuk-bentuk kampanye terselubung seperti di forum-forum pengajian atau pemberian bantuan sosial.

Kadang-kadang sih masyarakat kalau dibawa ke model kampanye konvoi atau dangdutan masyarakat tuh gampang tertarik... Kebanyakan kampanye itu di pengajian juga, sambil ceramah-ceramah, kebanyakan ada kampanye terselubung gitu... Pola-polanya seperti itu... (Titi-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 30 Maret 2012)

Kalau kampanye model yang umum sekarangkan di lapangan, itukan hura-hura namanya. Apa bedanya itu dengan acara DANGDUT RIA,. DAHSYAT, INBOX. [Cat.: Acara TV yang populer di Indonesia tahun 2012]. Dia hanya ikut jojing... Ikut hore-hore... Teriak “Hidup...Hidup!” Tanpa berpikir, apa pengaruhnya kampanye ini terhadap kehidupan kami nanti? (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Karenanya, bagi para pegiat FKKB sendiri, model dialog FKKB tersebut adalah model partisipasi politik yang baru, yang belum pernah mereka lihat atau ikuti sebelumnya di Kabupaten Bandung.

⁹⁹ Fenomena tersebut, jika dilihat dari perspektif Habermas menunjukkan kecenderungan warga untuk enggan terlibat dalam diskursus dan memproduksi opini publik sendiri terkait dengan isu-isu seputar Pemilu/Pemilukada. Dalam hal ini Habermas (2007:298) menyatakan bahwa “mereka yang paling cenderung menghindari opini publik yang dibentuk lewat diskursus inilah yang paling mudah dipengaruhi pandangannya lewat ruang publik kampanye pemilihan yang dipentaskan atas direkayasa secara manipulatif”.

Sebelumnya belum ada forum semacam ini, ada diskusi-diskusi beragam isu dari banyak kalangan masyarakat... Waktu Pemilu 2005 lalu belum ada seperti ini... Forum Konstituen, ada debat kandidat... (Nanang-Peserta FKKB; Wawancara; 29 Maret 2012)

Sepengalaman saya belum pernah ada kegiatan dialog warga dengan calon seperti di FK ini... Itu merupakan satu kebanggaan tersendiri Pak, bagi saya... Sehingga bisa tatap muka, menyampaikan uneg-uneg... (Ihsan-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 19 April 2012)

Begitupun menurut Ferry Kurnia dari KPUD Provinsi Jawa Barat (Catatan: pada saat wawancara sudah menjabat sebagai anggota KPU Pusat), yang berpendapat bahwa model dialog FKKB tersebut merupakan model dialog politik yang baru dalam konteks Pemilu, tidak hanya di Jawa Barat namun di seluruh Indonesia. Dimana warga dapat terlibat dalam proses rekrutmen politik yang selama ini dimonopoli oleh partai politik. Menurut Ferry, model FKKB ini penting dan perlu dikembangkan di tempat-tempat lain.

Setahu saya, model seperti Forum Konstituen itu baik di Jawa Barat maupun Indonesia itu belum ada... Tampaknya ini perlu dibudayakan ya... Jadi selain parpol yang memang punya fungsi soal rekrutmen, tapi ada elemen masyarakat lain yang juga melakukan pola-pola rekrutmen, tapi lebih luas.... Karena kalau parpol-kalau ada fatsoen partai... dan juga hal-hal lainnya.... Tapi model yang dilakukan teman-teman ini-kan lebih luas, lebih menyentuh masyarakat... jadi memang belum ada... belum ada yang seperti dilakukan Forum Konstituen... Kalau seperti yang di Jakarta itu sifatnya tidak langsung dari publik, karena lebih dikelola oleh kelompok elit masyarakat... karena kalau teman-teman itu kan seperti survey-lah, publik ingin seperti apa sih... tapi ini dijangkau lewat sebuah forum... (Ferry-Ketua KPUD Provinsi; Wawancara; 24 April 2012)

Dalam pandangan peneliti, meskipun model dialog FKKB ini sejalan dengan konsep *extending democracy* (perluasan arena politik dan diskursus publik), namun belum sepenuhnya dapat menjalankan peran melakukan *deepening democracy* (perluasan keterlibatan aktor sosial). Karena pada dasarnya warga yang terlibat masih sangat terbatas dibandingkan jumlah warga yang ada di Kabupaten Bandung.

4.1.4 Peran FKKB

Dalam persepsi para pegiatnya, FKKB diposisikan sebagai institusi yang mengambil peran mengawal pemerintahan daerah, yang dimaknai dalam bentuk tidak saja memantau dan mengkritisi, namun juga juga dapat memberikan masukan-masukan yang positif untuk dapat menghasilkan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

... pesannya yang ingin kita sampaikan baik ke publik maupun pemerintah daerah, bahwa nih ada kelompok masyarakat yang mengawal, mengawasi dan ingin terlibat dalam semua proses

penyusunan kebijakan... (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB Wawancara; 28 Maret 2012)

... tujuan kami mendirikan FK ini peran aktifnya bukan sekedar mengkritisi, tapi memberi masukan yang positif untuk... yah kalau disebut untuk orang lain rasanya gimana gitu yah... ya untuk diri kita sendiri saja sebagai masyarakat yang ada di FK... karena kami elemen masyarakat yang merasakan langsung masalah-masalah itu... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)¹⁰⁰

FKKB diposisikan sebagai ‘*watchdog*’ yang akan mengingatkan pemerintahan daerah agar mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kepentingan warga dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam hal ini ada kesadaran mengenai batasan ruang atau arena politik yang dapat dimasuki dan diintervensi oleh warga (FKKB), dimana sistem yang ada masih menempatkan eksekutif dan legislatif sebagai pemutus akhir dari lahirnya kebijakan daerah tersebut.

Karena kami selalu mengingatkan mereka, awas jangan membohongi publik mengenai kebijakan atau anggaran dengan berbagai alibi-alibi... Tapi kamipun tidak akan ikut campur pada tatanan rumah tangga atau sistem yang berlaku... Yang penting sejauhmana keberpihakannya, setiap kebijakan itu dirasakan dan dapat dinikmati masyarakat... walaupun belum memenuhi keadilan masyarakat secara utuh... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Dalam hubungannya dengan pemerintahan daerah tersebut, para pegiat FKKB mencoba memainkan strategi yang dianggap paling tepat dalam relasi tersebut. Pilihan apakah menggunakan cara yang kolaboratif atau konfrontatif menjadi salah satu bagian dari *positioning* dan strategi yang coba dikembangkan dalam FKKB, termasuk menggunakan institusi lain yang masih dalam jaringan FKKB.

Sebetulnya posisi kita masih ngambang. Apakah kita akan mengambil posisi seperti (pada) rezim sebelumnya, “Ya sudahlah kita teriakkan”... Atau memang kita terlibat jauh ke dalam, menjadi partner pemerintah gitu ya... Setahun pertama pola yang kita gunakan yaitu yang kedua tadi, kita coba dekati dia. Kita

¹⁰⁰ Perspektif bahwa FKKB ‘menyampaikan apa yang mereka rasakan’ sangat dekat dekat pandangan Habermas mengenai hubungan antara aspirasi dan pengalaman hidup sehari-hari: “*Problems voiced in the public sphere first become visible when they are mirrored in personal life experiences*” (Habermas, 1998a:365).

terlibat, dan kebetulan selalu diundang, selalu aktif hadir disitu... Sekarang agak kita geser lagi... Bupati juga mungkin kaget ya... Kita ini sering komunikasi dan ngobrol dengan dia, tapi kemarin kita aksi. Pertama kita demo soal asset daerah yang amburadul. Kedua tentang pengadaan mobil dinas, yang pemborosan... Tapi itu pakai nama FDA... (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Positioning FKKB, dalam pandangan FAB, pada akhirnya memang akan masuk di wilayah yang mereka sebut sebagai 'grey area', dimana FKKB harus mampu memainkan politik yang 'elegant'. Disatu sisi FKKB harus dapat banyak terlibat dengan pemerintahan daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengontrol pelaksanaan kebijakan tersebut, namun disisi lain tetap memiliki 'wibawa' untuk mengingatkan dan mengkritisi pemerintahan daerah dalam bentuk yang tidak melulu berupa demonstrasi massa.

... secara ideal yang aku bayangkan, sebenarnya inikan nggak bisa nggak, ini pasti grey area sebenarnya... Bayangannya begini... karena kita bukan demonstran... yang kalau Bupati salah, demonstrasi... Atau bukan pegawai pemerintah yang apa kata Bupati ikut saja... Nah lalu apa? Itulah istilahnya harus elegant... Untuk menjadi elegant itu sulit untuk dikuantifikasi... Hanya mereka sendiri yang bisa membuktikannya seiring waktu... (Oky-Sekjen FAB; Wawancara; 24 Desember 2011)

4.1.5 Pengaruh FKKB

Pengaruh ini setidaknya coba dilihat dari ada atau tidaknya pengakuan atas keberadaan FKKB oleh pihak lain, khususnya oleh pemerintah daerah, pelibatan FKKB dalam perumusan kebijakan daerah dan dialog lainnya, dan adopsi gagasan, kritik dan/atau rekomendasi FKKB dalam kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini, bagi para pegiat FKKB, keberadaan FKKB dianggap telah diakui oleh pemerintahan daerah, baik Bupati dan Wakil Bupati maupun DPRD.

Pertama dari sisi pengakuan, minimal keberadaan kita diakui... Eksislah... minimal begitu... Yang kedua, tiap kali pertemuan kita selalu menjadi wilayah yang diperhitungkan, ketika kita muncul... Meskipun dari organ yang beda tapi mereka [Cat.: Pemda] sudah memetakan kita sebagai satu komunitas atau kelompok... Bahwa

kelompok kita nih beda dengan yang lain... (Setiawan-Koordinator Konsolidasi FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Menurut saya sih mereka cukup menghitung FK ya... Ketika kita ingin diskusi mengundang mereka, Alhamdulillah itu bisa terjadi... mereka tampaknya cukup terbuka... (Wati-Peserta FKKB; Wawancara; 17 April 2012)

Sehingga saya juga merasa aneh ya, kok saya lebih dikenal di FK-nya daripada di komunitas saya sendiri, he...he... Baik di legislatif ataupun di pemerintahan... Ini sebuah proses yang alami, ketika saya menyuarkan sesuatu... Contohnya, pada saat saya ketemu Komisi B di DPRD kemarin itu untuk menyuarkan soal Perda CSR di Kabupaten Bandung... ketika saya datang ke Dewan, kata mereka "Wah sudah, ini sudah ada FK nih...", he...he... Jadi identifikasinya begitu... (Didi-Peserta FKKB; FGD; 19 April 2012)

Selain itu, seperti sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, FKKB selalu diundang dan dilibatkan dalam forum-forum pembahasan kebijakan daerah yang strategis. Bahkan FKKB juga kerap diminta oleh Bupati/Wakil Bupati untuk melakukan kajian-kajian mengenai mengenai masalah di daerah atau yang terkait dengan kinerja pemerintah daerah (lihat Boks 2). Meskipun akibat keterbatasan sumberdaya membuat FKKB belum dapat secara serius merespon permintaan tersebut.

Yah, perasaan bahwa kami diakui, diterima... Kalau diundang oleh mereka seolah kita ini merasa diakui sebagai warga, sebagai masyarakat, diterima dengan baik... Itu kebanggaan.... Tapi tidak untuk menjadi sombong, tapi mendorong kami lebih kritis lagi... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Namun sejauhmana gagasan, kritik dan rekomendasi dari FKKB dapat diadopsi dalam kebijakan di daerah, tampaknya masih belum dapat diketahui, karena FKKB belum melakukan penelaahan mengenai hal tersebut.

.... dengan munculnya FK, aspirasi kami di dengar dan di adopsi... Meskipun tidak secara utuh, tapi minimal satu atau tiga butir dari gagasan kami di adopsi itu sudah sebuah keberhasilan... Dan tidak mungkin kami menguasai seluruh kebijakan tersebut... Tapi minimal kami sudah terlibat dalam perumusan kebijakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, dan gagasannya kami bisa diterima, itu sebuah kebanggaan... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Belum kita cek juga ya di RPJMD itu, apakah ada usulan-usulan kita yang masuk atau tidak... Tapi ada beberapa yang sama juga sebetulnya, soal program Jaminan Kesehatan, konsep pertanian terpadu juga klop dengan konsepnya Bupati... (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Kalau capaian dari setiap proses itu kita memang belum mengukur mengenai hal itu. Kalau sejauhmana apa yang kita tawarkan bisa diadopsi pemerintah daerah itu juga kita belum telaah. Karena bisa jadi ada kesamaan sudut pandang, bahasa atau lainnya. Dari sisi gagasan, mereka bilang iya akan di tindak lanjuti. Tapi implementasinya kita juga belum cek lebih detail lagi... (Setiawan-Koordinator Konsolidasi FKKB; FGD; 19 April 2012)

Kondisi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik dari dalam FKKB sendiri ataupun dari pihak pemeritahan daerah. Relatif dapat lebih mudah terbangunnya komunikasi FKKB dengan Bupati/Wakil Bupati dapat dipahami mengingat kedua belah pihak pernah berinteraksi sebelumnya pada dialog FKKB sebelum Pemilukada.

Kalau efeknya, diakui atau tidak, mungkin terpilihnya Bupati sekarang, Forum Konstituen itu sama-sama mempengaruhi ya... Karena kita tadi mengkonsolidasikan banyak pihak disitu, walaupun mereka sudah berjejaring dengan partai atau kandidat tertentu, setelah menyaksikan proses penyampaian kandidat dan bagaimana dia menjawab apa yang menjadi keinginan masyarakat, ada juga yang banyak tertarik... Dan ketika peserta Forum Konstituen ini tertarik, kan bukan dia juga ternyata, karena dia di wilayahnya juga berpengaruh juga... (Derry-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 1 April 2012)

Selain itu, dapat dikatakan bahwa kelompok *civil society* yang tergabung di FKKB cukup menonjol dalam hal kapasitas analisis dan penyampaian gagasan dibandingkan dengan NGO/CSO lain di Kabupaten Bandung.

Forum Konstituen diperhitungkan... dilibatkan... bukan dalam arti kata diperhitungkan karena arogansinya atau karena banyaknya elemen-elemen komunitas, tapi karena daya nalar... Sedikit berkualitaslah, kalau dikatakan 100% isin gitu ya... Tapi kalau menurut saya, FK ini tidak kalah dengan kalangan akademis, bahkan lebih santun, karena tidak pernah berbuat anarkhis... selama masuk logika dan rasional... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Integritas dan kredibilitas FKKB yang tidak berorientasi mencari proyek atau keuntungan ekonomi lainnya dari relasi dengan pemerintahan daerah tampaknya juga membantu membentuk citra dan pengaruh FKKB.

Kita berusaha untuk tetap konsisten, mencoba untuk lurus, bahwa apa yang kita sampaikan memang kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak gertak sambal-lah istilahnya... Mereka juga lihat bahwa kalau kita ngomong juga konkret... Jadi itu yang salah satu yang mereka perhitungkan... (Setiawan-Koordinator Konsolidasi FKKB; Wawancara; Wawancara; 28 Maret 2012)

4.1.6 Manfaat FKKB

Dalam konteks Pemilukada, dialog yang dilakukan antara konstituen dan calon Bupati/Wakil Bupati dapat memberi informasi yang menjadi dasar pertimbangan dalam memilih, yang mungkin dapat membentuk atau merubah preferensi politik sebelumnya.

Ada hal yang menarik pasca pertemuan dengan kandidat itu... Ada peserta yang hadir itu awalnya mengidolakan si A, tapi ketika dia sudah lihat langsung... Beda kan kalau cuma lihat di TV dengan lihat langsung... Pasca itu pilihannya jadi berubah, pasca itu dia pilih si C... Kejadian seperti itu yang jadi pelajaran menarik... Bahwa memilih itu bukan cuma persoalan asal pilih aja, tapi juga penilaian bahwa "Ah si ini nih yang pantas memimpin"... dari dialektika dia ketika berbicara, substansi yang dia paparkan... Nah itu, ada perubahan-perubahan itu di kepala para peserta FK ini... Ketika dia pulang dari pertemuan itu, dia juga mempengaruhi teman-temannya yang lain kan... Menyampaikan pesan bahwa anda jangan lihat si A punya uang, jangan lihat ini saudara, tapi anda lihat bahwa ini punya kapasitas untuk memimpin ataukah tidak... Lebih kesitu... (Setiawan-Koordinator Konsolidasi FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

FKKB membantu meningkatkan kesadaran politik warga mengenai pentingnya partisipasi politik sebagai sarana memperjuangkan aspirasi warga secara langsung. FKKB dipandang sebagai saluran politik alternatif selain DPRD, dalam situasi dimana kepercayaan terhadap partai politik --yang kemudian juga berimbas terhadap DPRD-- dapat dikatakan rendah.

Kesadaran kawan-kawan juga terus meningkat ya ke arah yang lebih baik... Harapannya sih ke depan konsolidasi kita semakin kuat, jadi semakin banyak teman-teman yang juga tidak hanya selesai ketika Pemilihan ini, tapi juga bagaimana setelah itu kita tetap bisa menjadikan satu jalan dapat menyuarakan langsung persoalan masyarakat kepada Kepala Daerah... (Setiawan-Koordinator Konsolidasi FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

... minimal dengan adanya FK ini terbangun partisipasi warganya ya, yang aspirasinya bisa disampaikan langsung ke calon, tidak hanya melalui DPRD... (Sari-Peserta FKKB; Wawancara; 19 April 2012)

Keterlibatan konstituen dalam diskusi dan dialog FKKB juga sekaligus dipandang sebagai ruang pendidikan politik, dalam arti meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan politik (*civic skill*). Dalam hal ini, FKKB telah berperan sebagai *school of democracy* seperti yang dimaksudkan Putnam (2000). Keterlibatan di FKKB juga dirasa dapat meningkatkan status sosial di komunitas atau kelompok, karena dianggap memiliki jaringan dan informasi yang luas.

Saya lihat ada pendidikan politik gitu disitu... Ada ruang besar untuk pendidikan politik rakyat... (Latri-Peserta FKKB; Wawancara; 1 April 2012)

Jadi dimanapun saya berbicara, FK itu selalu saya bawa... Bahkan pada Pak Camat sudah mengetahui bahwa FK selalu dilibatkan dalam rangka menentukan kebijakan daerah kabupaten, melalui RPJMD itu... (Ihsan-Anggota Tim 9 FKKB; FGD; 19 April 2012)

Kalau secara pribadi, buat saya FK ini memberi peningkatan kapasitas ya... karena saya kan pendidikan cuma SMP... Menarik disini, jangan dulu perubahan untuk Kabupaten Bandung, tapi perubahan untuk diri sendiri dulu ya... Dari dulunya saya buruh tani tukang cangkul, sekarang bisa diskusi dengan Bung misalnya... Berani bicara gitu aja udah sebuah peningkatan menurut saya... Bisa menjadi pemateri di Kurpola (Catatan: Kursus Politik Anggaran) dengan mahasiswa... bisa seperti itu aja udah jadi kebanggaan buat saya... Ikut seperti ini, walaupun tidak menjamin di ekonomi, tapi kalau saya soal itu mah nuturkeun kitu' yah... Ketika ke Dewan, karena sudah berpengalaman biasa berdiskusi, kita nggak takut atau malu mengungkapkan aspirasi, kitulah... Ini memang sebuah pencerdasan, terutama pencerdasan politik... Secara status sosial juga Bung, ketika kita berorganisasi, secara tidak langsung lingkungan sosial kita juga melihat,

bagaimana kita... ya dibanding dulu gitu ya... Sekarang mereka sering nanya juga ke saya... Apalagi yang bikin proposal ke Pemda, "Cair nggak?". Kitakan lihat di APBD aja cair apa nggak... (Nanang-Peserta FKKB; Wawancara; 29 Maret 2012)

Bagi para pegiat FKKB, keterlibatan dalam FKKB juga menjadi ajang refleksi mengenai arena politik, peran politik, partisipasi politik dan kapasitas politik warga. Terbangun kesadaran bahwa hanya warga yang mampu dan cerdas dalam berpolitik yang akan dapat menghasilkan pemimpin dan kebijakan daerah yang 'cerdas' juga.

Dengan FK kita jadi tahu soal calon tadi ya... Buat saya sendiri, sebetulnya saya jadi instropeksi setelah acara di Telkom itu... Ketika kita belum cerdas, kita tidak akan punya pemimpin yang cerdas, gitu... Tapi kalau kitanya cerdas, pasti kita punya pemimpin yang cerdas... Jadi kembali, segimana gede acaranya, tapi masyarakatnya belum sadar, belum cerdas, ya udah... Saya sih kemarin terperangah aja, ternyata kandidat yang akan dipilih seperti ini... sementara masih banyak orang di Kabupaten Bandung ini yang lebih cerdas... Tapi kembali lagi ke masalah modal ya, bisa atau nggak... seperti itu sih... (Wati-Peserta FKKB; Wawancara; 17 April 2012)

Secara lebih luas, dalam pandangan beberapa calon Bupati/Wakil Bupati, FKKB dinilai cukup berhasil dapat mengkonsolidasikan dan memperkuat kekuatan *civil society* di Kabupaten Bandung, karena dapat membangun ruang politik baru yang lebih terbuka.

Nah mangkanya kelahiran FK itu kan bagus. Kalau saya lihat itukan sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi politik, atau untuk memperkuat civil society, yang kita lihat dewasa ini masih lemah, dibandingkan pilar-pilar yang lainnya... pilar negaranya, private sector-nya... nah civil society disini saya lihat masih lemah... Ya ini yang kemudian tersentuh oleh Forum Konstituen... Saya lihat di semua daerah yang memiliki karakteristik pedesaan, partisipasi politik ini saya lihat masih harus diperjuangkan... Karena memang mobilisasi politik itu lebih kuat dibandingkan partisipasi politik... (Kusnadi-Calon Bupati/Wakil Bupati; Wawancara; 2 April 2012)

Itu cukup memberi manfaat ya... Hal-hal seperti Forum Konstituen ini kan memberi hal yang menarik ya... yang jarang... Karena ruangnya cukup terbuka, penyelenggaranya adalah masyarakat, sehingga disana, apalagi kalau rakyat sudah dibekali, rakyat akan

lebih mampu mengelaborasi gagasan pemikiran dari kandidat ketika mereka akan tampil di ruang politik... (Jaka-Calon Bupati/Wakil Bupati; Wawancara; 1 April 2012)

Dalam hal ini menjadi menarik untuk membandingkan kondisi ruang dialog pada saat sebelum dan setelah dibentuknya FKKB. Bagi para pegiat FKKB, keberadaan FKKB memberi ruang dialog yang lebih terbuka dengan pemerintahan daerah saat ini, dibandingkan pada pemerintahan sebelumnya. Proses dan dinamika politik yang pernah dilalui bersama pasangan Bupati/Wakil dalam proses Pemilukada sebelumnya telah memberi modal politik untuk membangun basis komunikasi politik pasca Pemilukada. Dalam hal ini, keberadaan FKKB sebagai *civil society organization* telah telah berpengaruh memperkuat *civic engagement* (keterlibatan warga)¹⁰¹ dan *civic trust* (rasa saling percaya), yang berkaitan dengan *social capital* (modal sosial) di kelompok tersebut.¹⁰²

Jarang, selama Abah bergelut menjadi aktivis pengkritisi kebijakan jarang kita bisa ketemu dan diskusi dengan pemerintah... Dulu bahkan dengan gebrak meja... Tapi sekarang dengan tanpa gebrak meja, kita bisa berargumen dengan rasio, dan logika menurut akal sehat, gagasan kami malah bisa diterima... Sebelum ada FK dan sesudah itu sangat signifikan sekali... terus terang itu Abah akui... Dengan diakuinya keberadaan FK oleh pemerintahan, itu berarti nilai plus, dibandingkan sebelum ada FK... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

¹⁰¹ Menurut Malik dan Waglé, (dalam Fukuda-Parr, Lopes & Malik (eds.), 2002:86-87), “*civic engagement is understood as a process that organizes citizens or their entrusted representatives to influence, share and control public affairs, then we see this contributing to social capital through interactions between people and processes they engage in for a positive public outcome. More generally, civic engagement contributes to social capital and to development efforts through the channels of voice, representation and accountability. This link between civic engagement and development can be organized in a variety of ways, both formal and informal*”.

¹⁰² Dalam karya monumentalnya “Bowling alone: America’s declining social capital” (1995:66), Putnam menulis mengenai *civic engagement* yang muncul dari menguatnya *civil society*: “*The quality of public life and the performance of social institutions are indeed powerfully influenced by norms and networks of civic engagement... The norms and networks of civic engagement also powerfully affect the performance of representative government... The quality of governance was determined by longstanding traditions of civic engagement (or its absence). Voter turnout, newspaper readership, membership in choral societies and football clubs--these were the hallmarks of a successful region. In fact, historical analysis suggested that these networks of organized reciprocity and civic solidarity, far from being an epiphenomenon of socioeconomic modernization, were a precondition for it.*”

Boks 4: Perbedaan FKKB dengan Forum Sejenis Lainnya

Dalam konteks *civil society* di Kabupaten Bandung, keberadaan FKKB menjadi unik dan menonjol, karena merupakan wadah dari beragam peserta yang berasal dari latar belakang status sosial, organisasi, isu dan wilayah. FKKB dinilai cukup berhasil mempertahankan eksistensinya, karena di Kabupaten Bandung telah banyak dibentuk forum-forum yang kemudian ‘Tukcing’ atau ‘Tukdog’ [Bahasa Sunda: ‘dibentuk lalu *cicing* atau *ngajedog*’, atau dibentuk lalu diam/mandeg].

Kalau lintas organisasi ya FDA, Forum Konstituen. Saya nggak tahu lagi kalau yang lain. Itu yang kita garap gitu ya. Paling kalau ada isu. Waktu gempa misalnya Forum Solidaritas Korban Gempa, ya kita bergerak disitu. (Derry-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 1 April 2012)

Sepengetahuan Pak Ihsan, mungkin juga saya kurang wawasan ya, tidak ada forum semacam FK ini di Kabupaten Bandung... Jadi belum ada yang seperti FK ini... walaupun ada itu sifatnya isu atau sektoral... dan itupun tidak jalan, he...he... (Ihsan-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 29 April 2012)

Kelebihan FK itu ya karena multi sektoral dan dalam proses kita merumuskan apa yang menjadi tuntutan itu juga relatif sistematis, mulai dari assessment, FGD, kemudian juga merumuskan alternatif tindakan. Kemudian juga ada upaya menguji gagasan dengan mengundang pihak lain, seperti dari akademisi, KADIN, lembaga lain juga... (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; FGD; 19 April 2012)

FKKB juga dipandang sebagai ‘organisasi rakyat’, karena proses pembentukan lahir dari kesepakatan warga sendiri, dan bukan dibentuk atas inisiatif dari elit politik tertentu. Warga yang terlibat adalah juga pihak yang merasakan sendiri secara langsung masalah pembangunan yang ada di daerah. Warga juga secara aktif merumuskan sendiri bentuk dan agenda FKKB, dan bukan sekedar menjadi lembaga pelaksana dari agenda yang dirumuskan atau dipesankan pihak lain. Dalam hal ini kemandirian politik FKKB dapat dikatakan cukup terjaga.

Kelebihan FK itu, karena kita yang terlibat adalah masyarakat yang merasakan masalah yang ada di Kabupaten. Kalau dari sisi isu, kita juga beragam ya, karena dari berbagai lembaga dan wilayah... Sebelumnya paling saya ikut kegiatan mahasiswa ya, dan itu beda sekali ya, bahasanya, gayanya. Terus juga kalau di FDA kan hanya fokus di masalah anggaran. Nah di FK ini kok lebih kesentuh emosi ya... mungkin karena isunya lebih luas ya, dan mereka memang merasakan langsung masalah itu... Ini lho yang saya rasakan, karena saya menjadi korban kebijakan pemerintah. Nggak harus pakai bahasa Dewa seperti di mahasiswa ya... isu dan masalahnya beragam juga. Bahasanya juga macem-macem ya, ada yang pake Bahasa Sunda. Itu justru lebih rame juga Mas. Sampe yang dari wilayah banjir di Cieunteung itu bilang, “Banjir di tempat sayah ngan sameter, sameter tina hulu...” [Bahasa Sunda: Banjir di tempat saya cuma semester, semester dari kepala]. Baguslah menurut saya forum seperti itu. Menurut saya belum pernah ada forum seperti itu di sini (Wati-Peserta FKKB; Wawancara; 17 April 2012)

Selain itu, hal terpenting dari FKKB adalah adanya upaya mereka untuk tidak terjebak dalam relasi politik transaksional pragmatis dengan pihak lain khususnya dengan pemerintahan daerah, sebagaimana yang umum terjadi di banyak organisasi lain, khususnya di Kabupaten Bandung. Hal ini beralasan karena terbentuknya FKKB sendiri juga dilatarbelakangi oleh upaya melawan praktik dan perilaku politik transaksional dalam momentum Pemilu.

Sepengalaman Abah ada juga yang seperti FK... tapi menurut Abah mereka tidak menyuarakan aspirasi secara utuh... kadangkala adalah indikasi-indikasi lembaganya itu sendiri maupun individu-individunya memiliki kepentingan lain baik politik maupun ekonomi... Tidak sedikit organisasi-organisasi yang diluar seperti menyuarakan kepentingan masyarakat tapi mindset di belakang itu ada sesuatu yang diharapkan... Itu bedanya... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Bedanya juga ya kita tidak tergerus dalam money politics... Jadi komunikasi dan relasi dengan beberapa kandidat itu bukan dalam konteks itu, tapi dalam konteks berbagi atau sharing... Yang kedua, FK punya gagasan... Kita punya konsep advokasi... Karena kelompok-kelompok lain itu, yang mungkin juga sudah jadi budaya politik di kita, ya sangat minimalis, sangat kecil upaya-upaya seperti itu... Relasi-relasi yang dibangun adalah transaksional gitu kan... Dan yang pasti, persoalan-persoalan lemahnya advokasi di masyarakat pasca Pilkada itu kan ya karena sebelumnya selalu transaksional itu... Kita ingin memperkuat posisi tawar disana itu tanpa proses transaksional tersebut... (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012).

4.1.7 Dampak di Pemerintahan Daerah dan Bagi Masyarakat

Dari proses yang sedemikian kompleks dan panjang, serta telah menyita sumberdaya yang sangat besar dari banyak pihak baik di warga, NGO/CSO, donor maupun dari pemerintahan daerah, tentunya menjadi penting untuk mengetahui kecenderungan dampaknya terhadap pemerintahan daerah, masyarakat, maupun iklim demokrasi di daerah. Untuk dapat mengukur dampak yang komprehensif tentu diperlukan satu studi khusus dan mendalam. Ulasan berikut lebih sebagai gambaran sangat kasar mengenai dampak partisipasi politik FKKB terhadap perubahan perilaku birokrasi dan produk kebijakannya.

Menurut salah seorang informan pegiat FKKB yang memiliki hubungan cukup dekat dengan Bupati/Wakil Bupati, sedikit banyak ada perubahan yang dirasakan berkenaan dengan orientasi kebijakan pemerintahan daerah, yang dipandang sudah lebih menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Meskipun hal ini

lebih mungkin dipengaruhi oleh karakter individu Bupati/Wakil Bupati, namun konstelasi politik pada saat Pemilu¹⁰³ dan pasca Pemilu (dimana FKKB juga mengambil bagian di dalamnya) kemungkinan juga mempengaruhi relatif lebih terbukanya ruang dialog antara *civil society* dan pemerintah daerah.

Kalau selama ini saya nilai, dan karena kebetulan Abah juga dekat dengan mereka, selalu share, itu ada perubahan-perubahan... Contoh, sekarang dari kebijakan-kebijakan yang walaupun secara prosentase belum secara utuh tapi mendekati keberpihakan kepada masyarakat... Walaupun kami memahami, anggaranlah... Kembali ke alasan klasik, soal anggaran... Tapi sedikit demi sedikit kami melihat sudah ada perubahan... Keberpihakan saja... Bahkan sekarang, Pak Bupati itu akan mengurangi kebutuhan-kebutuhan belanja pegawai... Bahwa belanja yang tidak perlu itu tidak usah... Walaupun kemarin itu ada masalah mobil dinas... Tapi untuk 2013 akan ada pengurangan belanja pegawai itu nanti... Jadi itu sudah ada sedikitlah... walaupun itu adalah proses sebetulnya... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Meskipun demikian, lebih banyak informan dari pegiat FKKB yang memandang belum adanya perubahan yang signifikan dalam praktik pemerintahan yang baik di daerah. Meskipun ruang partisipasi relatif lebih terbuka dibandingkan dengan pemerintahan daerah sebelumnya, namun dalam hal transparansi situasinya masih belum banyak berubah.¹⁰⁴

Kalau soal transparansi dan partisipasi ya kita melihat itu belum ada komitmen dari Pemda... Ada Perdana... Tapi soal akses dokumen publik... relatif belum ada perubahan... (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Sampai sekarang transparansi belum jelas, padahal sudah ada aturannya, tapi tetap aja mereka tidak mau transparan itu... Jadi mungkin ada ketakutan, atau ada apa, mereka nggak mau

¹⁰³ Perolehan suara antara pemenang dan peringkat kedua dalam Pemilu 2010 dapat dikatakan tidak terlalu jauh, dimana pemenang memperoleh 674.370 suara atau 53,24 persen, dan peringkat kedua sebanyak 592.292 suara atau 46,76 persen. Bahkan hasil perhitungan suara dalam kedua putaran Pemilu tersebut juga sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap banyak kecurangan di dalamnya. Berkaitan dengan kedua hal tersebut, sejumlah informan berpendapat bahwa secara politik, legitimasi dan kekuatan politik Bupati/Wakil Bupati saat ini juga menjadi lemah. Dalam situasi tersebut, pilihan paling rasional memang adalah bersikap lebih moderat, terutama dalam berhubungan dengan pihak-pihak yang cenderung bersikap kritis atau menjadi oposisi pemerintah daerah saat ini.

¹⁰⁴ Kondisi ini mengkonfirmasi pendapat Wang dan Wart (2007:276) bahwa meskipun partisipasi warga meningkat namun tidak dengan sendirinya menciptakan *public trust* jika tidak ada realisasi dari apa yang dijanjikan atau disepakati sebelumnya (lihat halaman 32 laporan ini).

diekspos... Mungkin kalau mereka mau jujur ya, mau transparan ke masyarakat, itu kan lebih baik... (Titi-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 30 Maret 2012)

FKKB mengkritik agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah daerah, karena tidak diwujudkan dalam praktik nyata. Contohnya adalah dalam pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang disinyalir lebih didasarkan pada pertimbangan politik dibandingkan pertimbangan kapasitas atau kompetensi. Disini, politisasi birokrasi dalam pengisian formasi pejabat publik kembali terjadi.

Penataan birokrasi di kabupaten sekarang yang seenak udelya saja... Orang yang jelas-jelas tidak punya kompetensi, yang record-nya tidak laik sebagai kepala dinas, karena akses atau karena apa... entah karena imbalan dari masa election dulu... jadi kepala dinas... (Nadri-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 2 April 2012)

Selain itu, dipandang belum ada terobosan kebijakan yang signifikan dan berdampak luas terhadap peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Slogan atau janji pada saat kampanye maupun yang tertuang dalam perencanaan strategis daerah tidak diturunkan dalam bentuk program atau kegiatan yang relevan dan didukung oleh penganggaran yang memadai.

Sudah setahun lebih sejak Pilkada belum ada kebijakan yang signifikanlah... Belum ada terobosan... Memang di visi-misi nya pun tidak ada yang menarik juga sih... he...he... Yang normatif saja. Jadi tidak salah juga sebetulnya ya Bupati itu, karena memang visi misi nya yang umum saja... Reformasi birokrasi, disitu kan salah satunya ingin meningkatkan disiplin aparatur. Tapi kita cek di APBD 2011 itu ya, programnya misalnya soal penyediaan seragam PNS, pelatihan... Jadi nggak ada gagasan dia yang progresif... (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Setelah Pilkada ini belum ada perubahan yang signifikan... ini yang saya lihat ya... Harapannya kan ada perubahanlah... dari segi anggaran saja untuk belanja langsungnya saat ini cuma sekitar 40%-an dari total APBD gitu kan... (Nanang-Peserta FKKB; Wawancara; 29 Maret 2012)

Ternyata juga kan, sampai hari ini setelah Pilkada nggak sesuaiilah dengan yang kita harapkan... Tapi ternyata sesudah Pilkada kan tetap aja... Ganti Bupati, nggak berubah... Malah kata kawan-kawan, APBD sekarang itukan lebih banyak untuk biaya rutin... masyarakat tetap susah aja... (Wati-Peserta FKKB; Wawancara; 17 April 2012)

4.1.8 Masalah dan Kendala FKKB

Pasca kegiatan FK II terlebih setelah momentum keterlibatan FKKB dalam perumusan RPJMD, konsolidasi internal FKKB memang melemah. Pertemuan semakin sedikit frekuensinya, dan kegiatan yang dilakukan sebagian besar hanya sebagai respon atas undangan berpartisipasi dari pemerintah daerah.¹⁰⁵

Ini berkaitan dengan situasi politik Pilkada, dimana memang keinginan orang-orang sangat tinggi untuk berpartisipasi dalam FK. Setelah itu dari sisi partisipasi memang berkurang... ya sampai hari ini lah. (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FA; FGD; 19 April 2012)

Komitmen dari para peserta FKKB ini memang sulit untuk ditagih, mengingat historis pembentukan FKKB (yang hanya berupa kegiatan diskusi dan dialog) dan sifat kelembagaannya hanya berbasis voluntarisme semata.

Cuma yang disayangkannya itu, FK inikan mestinya melakukan monitoring ke pemerintahan, sekarang lemah juga... Mungkin dari orang FK nya sendiri karena punya lembaga lain, atau kepentingannya yang berbeda... Contoh kepentingan diri pribadi atau kepentingan golongannya... Di FK sendiri orang-orangnya itu belum terbangun komitmen untuk mengawal jalannya pembangunan di Kabupaten Bandung... mungkin itu salah satu kelemahannya... (Nanang-Peserta FKKB; Wawancara; 29 Maret 2012)

Peserta FKKB tersebar di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, yang wilayahnya cukup luas dengan banyak bagian dari kondisi geografisnya terbilang cukup berat,

¹⁰⁵ Lihat analisa Sumarto (2008) mengenai kecenderungan menurunnya partisipasi akibat kurangnya respon pemerintah daerah maupun faktor kejenuhan warga (lihat halaman 30 laporan ini). Hal ini mengisyaratkan perlunya pengembangan model partisipasi yang tidak selalu menuntut kehadiran fisik, pengorbanan tenaga dan waktu dari warga, sehingga preferensi warga dapat tetap menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan publik. Kombinasi antara partisipasi fisik dan non fisik ini menurut peneliti penting dikembangkan untuk lebih menjamin suara warga selalu dapat menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik.

sehingga kerap menyulitkan mobilitas penduduk. Sedikit banyak ini juga menyulitkan upaya konsolidasi FKKB.

Hambatan... dari segi jarak kali ya... Karena kawan-kawan itu tinggalnya banyak yang jauh ya... Karena kita juga nanya juga ya... kalau saya sih, “Kapan sih ada kegiatan FK lagi?”. Saya sih nunggu... mungkin kawan-kawan yang lain juga nunggu seperti saya ya... (Wati-Peserta FKKB; Wawancara; 17 April 2012)

FKKB adalah organisasi dari individu-individu yang memiliki minat dan latar belakang komunitas, kelompok dan organisasi dengan beragam isu. Upaya merumuskan isu bersama pasca momentum Pemilukada dirasa agak sulit dilakukan sementara hal tersebut membutuhkan diskusi yang cukup panjang.

Kita di Forum Konstituen juga membuka diri, bahwa di Forum ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat... Dari FDA, PSDK, NU, organisasi-organisasi lain... Nah yang sulit justru konsolidasi di situnya. Kalau Pilkada kan jadi trend isu bersama ya. Nah kalau sudah masuk ke wilayah pembangunan, ada organisasi yang kurang ngeh, apalagi pada isu anggaran misalnya... (Derry-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 1 April 2012)

Sampai saat ini FKKB belum atau tidak memiliki tempat atau alamat tetap. Kegiatan pertemuan biasanya ‘menumpang’ di sekretariat FDA di wilayah Baleendah. Ketiadaan tempat tersebut dianggap juga berpengaruh terhadap melemahnya konsolidasi FKKB.

Tapi memang, kalau mau cari alasan sih ya, ketiadaan sekretariat mungkin juga berpengaruh ya... Nggak ada tempat kumpul... Selama ini kumpul paling di FDA, atau waktu itu pernah keliling ke tempat atau rumah kawan-kawan lain... Tapi yang jangan bikin alasan... Kawan-kawan lain juga pasti nanyain, seperti saya juga... (Wati-Peserta FKKB; Wawancara; 17 April 2012)

Kesibukan di organisasi asal juga dipandang sebagai salah satu penyebab melemahnya konsolidasi, khususnya di PSDK dan FDA yang menjadi tulang punggung FKKB.

...berkaitan dengan konsistensi masyarakat untuk terlibat dan mengawal proses tadi... Dinamikanya ya ada disitu... Ada kawan yang masih bertahan terlibat aktif di FK, tapi ada juga kawan yang mungkin karena kesibukannya yang lain di organisasinya masing-

masing menjadi kurang terlibat lagi... (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Saya melihat, melemahnya bukan karena memang spirit akan Forum Konstituen yang melemah... Persoalannya memang lebih pada persoalan energi atau tenaga untuk terus menjaga konsolidasi itu. Bukan kita tidak punya mungkin, tapi karena energi-energi yang ada harus kita alokasikan untuk kegiatan yang lain. Sehingga kadang sepertinya untuk soal Forum Konstituen, semangat untuk berkonsolidasi kemudian bergantung pada event yang ada. (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; FGD; 19 April 2012)

Salah satu kendala utama yang dianggap mempengaruhi sulitnya melakukan konsolidasi dan implementasi dari agenda-agenda yang telah disepakati sebelumnya di FKKB adalah kendala terbatasnya sumberdaya khususnya dana. Kegiatan-kegiatan kecil masih dapat dilakukan secara swadaya, namun untuk kegiatan yang cukup besar terbentur dari tidak adanya dukungan pendanaan tersebut. FKKB dan FAB sempat menyusun proposal lanjutan ke TIFA, namun dukungan pendanaan tersebut tidak terealisasi.

Kita modalnya cuma dengkul kok... Jadi memang belum ada konsolidasi besar lagi, tapi itu mati juga tidak... Komunitas-komunitas inilah yang terus bergerak... (Nadri-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 2 April 2012)

Nah menyangkut logistik, waktu itu memang diharapkan proposal ke TIFA itu bisa disetujui ya... Jadi ya jadi mau nggak mau, sementara semangat kita begini, nggak ada logistik, sementara kita tinggal jauh-jauh, dan nggak ada sekretariat, ya bingung, terus gimana?... Kita kan nggak punya tempat, paling disini [Cat.: FDA], atau PSDK... tapi kan rasanya gimana ya... he..he.. Nggak punya sekretariat, padahal kita organisasi yang seharusnya gede ya... Sama pemerintah juga masih dianggap... Tapi nggak punya sekretariat... Pi karunya nya... Pi khawatireun... Lamun punya sekre mah mereunan... [Bahasa Sunda: Kasihan ya... Mengkhawatirkan... Kalau punya sekretariat mungkin...] bisa kumpul barang sebulan sekali... (Wati-Peserta FKKB; Wawancara; 17 April 2012)

Kendala lain dari melemahnya konsolidasi adalah belum jelasnya mekanisme dan kepemimpinan di FKKB. FKKB kemudian dinilai hanya menjadi lembaga taktis ketika harus merespon isu atau undangan dari pihak lain.

Kalau di pemerintah, FK itu masih diperhitungkan, bahwa itu forum dari berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten Bandung... Tapi kalau di masyarakat sendiri, itu sekarang sudah mulai lemah... Ya koordinatonya siapa? Yang harus mengkonsolidasikan siapa? Itu belum jelas... Cuma yang terjadi sekarang, itu lembaga taktis aja untuk lima tahunan atau gimana gitu... Padahal mandat sebelumnya yaitu, mengawal jalannya roda pemerintahan dari hasil debat kandidat atau janji-janji calon Bupati waktu sebelum Pilkada... (Nanang-Peserta FKKB; Wawancara; 29 Maret 2012)

Selain itu, adanya kendala masih kuatnya personifikasi FKKB pada beberapa figur yang sulit diubah atau digantikan oleh pegiat FKKB lainnya, khususnya terkait dengan masalah kepemimpinan dan representasi ketika berhubungan dengan pihak lain.

Ada krisis identitas sebetulnya Bung... bagaimana mengidentifikasi diri masing-masing pasca Pilkada kemarin itu... Agak sulit gitu... Terutama yang memang sudah teridentifikasi sebagai FK, seperti saya, Didi... Saya nggak mengaku dari FK pun tetep aja pihak lain memandang begitu... Itu kenapa kita sulit menemukan kawan yang bisa menggantikan representasi FK itu... Dari sisi pandangan publik, yang disini bisa berarti pemerintahan ataupun pihak lain, stempel sebagai FK itu dibawa terus... Ada kawan yang mungkin bisa, tapi ada masalah kelemahan dalam jaringan, atau kapasitas, mobilitas... Sehingga kita sering kehilangan momentum juga sebenarnya... (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; FGD; 19 April 2012)

Kendala yang paling tampak dan sedikit banyak mempengaruhi konsolidasi FKKB adalah belum tuntasnya kerja Tim 9 yang telah diberi mandat untuk menyusun rekomendasi mengenai sifat dan bentuk kelembagaan FKKB. Hal tersebut dapat dipahami karena adanya perbedaan cara pandang diantara anggota Tim 9 sendiri, yang juga sulit untuk dapat di bahas dalam pertemuan yang lebih besar akibat dari kendala-kendala lain yang sudah diulas sebelumnya.

Terkait FK ini, setelah sekian lama memang ada persoalan konsolidasi... dan persoalannya mungkin yang pada pertemuan di Majalaya sudah dibentuk Tim 9 yang bertugas untuk merumuskan berbagai rekomendasi, seperti pilihan-pilihan apakah akan dilembagakan atau hanya jadi event, forum atau lainnya. Yang juga sudah ditindaklanjuti dengan beberapa putaran diskusi di

tingkat lokal... (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; FGD; 19 April 2012)

Dibalik semua kendala tadi, ada pula analisa lain mengenai melemahnya konsolidasi tersebut, yaitu adanya masalah komunikasi dan *trust* yang belum terbangun kuat diantara peserta FKKB sendiri, mengingat beragamnya latar belakang peserta FKKB. Komunikasi di internal FKKB umumnya dilakukan secara informal, baik melalui telepon ataupun tatap muka ketika mereka bertemu di sekretariat FDA, ataupun pada kegiatan-kegiatan lain. Lingkup wilayah kabupaten dan adanya saling irisan kelembagaan dan kegiatan diantara sesama peserta FKKB membuat mereka berpeluang untuk bertemu dengan sengaja ataupun tidak dan dapat saling bertukar informasi atau membicarakan isu/masalah tertentu. Komunikasi dan pertemuan secara khusus dilakukan ketika ada agenda atau perkembangan situasi yang harus disikapi, seperti adanya undangan pertemuan dari pemerintah, adanya agenda yang akan mereka dialogkan dengan pihak lain, atau ketika ada tamu dari luar (seperti penelitian ini misalnya).

... masalahnya bukan dari sisi finansial, tapi jika komunikasi dan kepercayaan itu dapat terbangun maka kerja-kerja bersama itu tetap bisa dilakukan... Kendalanya itu tadi, komunikasi yang berkurang... Apa yang sudah dilakukan? Apa hasilnya?... Bahwa ada harapan di awal bahwa dengan adanya FK itu akan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah dihasilkan gitu... (Wahyu-Peserta FKKB; FGD; 19 April 2012)

Lebih jauh, jika dilihat mendasar lagi, sebagian besar masalah tersebut muncul akibat ketiadaan desain mengenai strategi membangun wilayah dan kekuatan *civil society* di Kabupaten Bandung dengan mengoptimalkan dan mensinergiskan berbagai upaya dan institusi yang ada.

Nah jadi persoalan kemudian alat apa yang akan dikembangkan selanjutnya... Tidak dirancang dari awal... Telat juga menyiapkannya... Sebetulnya bisa sinergislah... Misalnya FK main disini, PSDK main disitu, FDA main disana... Problem di pengorganisasian, bagaimana mempositioning masing-masing peralatan ini... (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Melemahnya konsolidasi tersebut dapat dilihat sebagai hal yang sangat wajar dalam kegiatan yang bersifat *volunterisme* (kesukarelaan) semacam FKKB. Bagaimanapun, keterlibatan dalam kegiatan organisasi membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, dan perhatian (Verba dan Nie, 1972; Verba et al., 1995) di mana kemampuan untuk melakukan hal tersebut sangat berbeda-beda pada setiap orang pada waktu dan kondisi tertentu (Brady et. al., 1995:283).

4.1.9 Keberlanjutan, Pendalaman dan Replikasi FKKB

(a) Keberlanjutan FKKB

Seluruh informan yang ditemui dalam penelitian ini memiliki kesamaan pandangan bahwa FKKB masih dibutuhkan dan tetap perlu dilanjutkan keberadaannya.

FK itu nggak selalu harus saat Pilkada saja kalau menurut saya... Jangan sampai hanya berhenti sampai disitu, perlu keberlanjutan... Terkesan jadi sebatas untuk Pilkada aja gitu... Padahal itu masih ada kerja-kerja juga yang diperlukan... Bisa pengawasan dan evaluasi ke Bupati juga... apakah dapat menjalankan janji-janjinya? Terealisasi nggak?... Monitoringlah gitu... Penting juga sih... (Titi-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 30 maret 2012)

Tapi Forum Konstituen itu memang masih dibutuhkan... Karena belum tentu juga kan kalau mengadakan forum seperti itu FDA yang ngadain... Nah itu sebetulnya taktis saja ya... bagaimana mengkonsolidasikan banyak pihak dengan nama kelembagaan yang baru walaupun tidak dilembagakan secara formal... Karena agenda-agenda advokasinya yang ada dalam Forum Konstituen ini merupakan agenda masing-masing gitu lho... Jadi kita juga mengkompilasikan agenda kita disitu... Jadi Forum Konstituen lebih sebagai wadah, sebuah wahana, untuk lebih mengakomodir semua pihak... (Derry-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 1 April 2012)

Ya apapun istilahnya, tapi yang memang berkaitan dengan proses pendidikan politik, itu harus dilakukan... apakah namanya Forum Konstituen, ataukah Sawala... apalah... Tapi intinya ada suatu proses dialogis antara pelaku politik dengan masyarakat... (Osin-Ketua KPUD Kabupaten Bandung; Wawancara; 31 Maret 2012)

Harapan dan keinginan tersebut memang pada akhirnya harus berhadapan dengan realitas sosial politik yang dihadapi individu-individu dalam FKKB, maupun kendala yang dihadapi FKKB sendiri sebagai sebuah kelompok seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. Tantangannya kemudian adalah bagaimana FKKB dapat mengurangi kendala tersebut khususnya yang berkenaan dengan keterbatasan logistik (pendanaan), maupun dalam memperkuat dan memperluas konsolidasi peserta lama dan baru di FKKB (lihat Sub BAB 4.1.8 mengenai Masalah dan Kendala FKKB).

(b) Pendalaman FKKB di Kabupaten Bandung

Ada gagasan untuk memperluas jaringan FKKB sampai ke tingkat kecamatan atau daerah pemilihan (Dapil) dalam Pemilu/Pemilukada. Gagasan lain adalah FKKB dapat mulai masuk ke isu pengawasan terhadap lembaga legislatif.

...usulan-usulan itu sudah ada ya dari kawan-kawan di luar jaringan kita, coba kita bentuk FK per kecamatan, atau setidaknya per Dapil... Jadi setidaknya tidak sekedar dalam konteks mengawal Bupati atau Eksekutif, tapi juga mengawasi legislatif atau Dewan dari Dapilnya masing-masing... Ada perbaikan misalnya di forum-forum reses... Reses ini tidak efisien kan... Nah ada harapan agar FK dapat mengawal forum reses ini agar ada penguatan di sisi substansi misalnya... Tapi itu belum kita garap ya... (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Ada pula gagasan untuk membuka arena diskursif baru, dimana FKKB dapat mulai membangun dialog dengan seluruh partai politik khususnya berkenaan dengan kriteria calon yang akan diusung oleh partai politik dalam Pileg dan Pemilukada. Menurut KPUD gagasan tersebut sangat menarik asalkan FKKB tetap dapat menjaga netralitasnya terhadap seluruh partai politik tersebut.

Mungkin belum pernah juga gitukan, kita konsolidasi terhadap partai-partai terkait pendalaman calon untuk ke depan... jadi kalau mereka nanti punya calon sudah memenuhi kriteria yang kita inginkan... Itu memang lebih baik kalau menurut saya... Contoh mulai dari sekarang si Forum Konstituen mengadakan konsolidasi ke partai-partai, gitu kan... Jadi biar ke depannya itu si Forum ini tidak harus terpengaruh oleh politik transaksional tadi itu kan...

karena sudah tahu... (Nanang-Peserta FKKB; Wawancara; 29 Maret 2012)

Atau, justru bisa jadi dimulai sebelum perekrutan calon di partai politik... jadi rekrutmen oleh parpol itu sudah punya aspirasi dari masyarakat... jadi parpol juga punya gambaran apa keinginan masyarakat... Menurut saya, jangan terjebak pada 1 partai atau satu calon saja... jadi dibuka selebar-lebarnya. Dan diberikan tawaran pada seluruh partai untuk terlibat... (Ferry-Ketua KPUD Provinsi, 14 April 2012)

(c) Replikasi Model FKKB

Untuk Kabupaten Bandung sendiri, replikasi tersebut dapat dilakukan pada Pemilukada berikutnya, atau pada level yang lebih kecil yaitu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Tapi misalkan tahun 2015 ada Pilkada lagi, Forum Konstituen pasti bangkit kembali... Wilayahnya disitu... Kalau menurut saya begitu... Sebetulnya di Pilgub dan Pileg semestinya begitu... Artinyakan kita memfasilitasi setiap kandidat pada akhirnya... Mengapa memfasilitasi? Ya intinya bagaimana menjaga komitmen... (Derry-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 1 April 2012)

...bagaimana mengimplementasikan Forum Konstituen ini di tingkat desa. Apakah misalnya di tingkat Pilkades, akan bagus kalau praktek FK ini diterapkan... mungkin dalam format yang lebih sederhanalah... Itu gagasan-gagasan yang muncul di luar konteks pengawalan pemerintahan... (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; FGD; 19 April 2012)

Gagasan lain adalah mengembangkan replikasi model FKKB di kabupaten lain, atau di level provinsi, pada momentum Pilgub Provinsi Jawa Barat.

Bagaimana 'memasarkan' gagasan Forum Konstituen di luar konteks pengawalan kebijakan. Waktu itu sempat didiskusikan mengenai kemungkinan mengembangkan Forum Konstituen di kabupaten lain. (Sedangkan) Kalau untuk Jawa Barat, kalau mau mempengaruhi satu Jawa Barat mungkin akan sulit juga ya... Tapi kalau mau efektif ya bisa di organ-organ yang ada di Bandung... misalnya LBH, WALHI, FDA, Inisiatif, serikat buruh, serikat tani... Ada banyak perwakilan dengan spesifikasi tertentu kan... Tapi kalau tulang-tulanginya kan gampang nih... relatif jaringan kita kan... Nanti tinggal yang lainnya kan tinggal tambah aja

kan... (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; Wawancara; 28 Maret 2012)

4.1.10 Ikhtisar Analisa Mengenai Alasan Pembentukan dan Strategi FKKB

Dari hasil analisa atas temuan mengenai alasan pembentukan FKKB sebagai aktor demokrasi dan sebagai media demokratisasi di Kabupaten Bandung, beberapa temuan utamanya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1: Ikhtisar Analisa Alasan Pembentukan FKKB Sebagai Aktor Demokratisasi di Kabupaten Bandung

FKKB	Pra Pemilukada 2010	Pasca Pemilukada 2010	Catatan Peneliti
Alasan Dibentuknya FKKB	<p>Bagi kelompok <i>civil society</i> di Kabupaten Bandung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak puas dengan pelaksanaan demokrasi representatif; • Tidak puas dengan politisi dan partai politik yang tidak mengakar dan tidak aspiratif; • Tidak puas dengan kebijakan pemerintahan yang tidak aspiratif; • Tidak puas dengan perilaku politik transaksional pragmatis, baik di kalangan politisi, partai politik, masyarakat, maupun sebagian NGO/CSO; • Belum ada forum warga lain sejenis yang berperan di 	<ul style="list-style-type: none"> • FKKB tidak cukup hanya berperan saat Pemilukada; • Perlu wadah bersama untuk ‘mengawal’ (menagih janji kampanye, mempengaruhi kebijakan publik) pemerintah daerah yang baru terbentuk; • FKKB dapat menjadi ‘<i>school of democracy</i>’ atau ruang pembelajaran politik; • FKKB dapat menjadi ‘panggung politik’ atau <i>political arena</i> bagi para aktivis untuk muncul dan membangun <i>track</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya persepsi mengenai ketidakpuasan terhadap model demokrasi representatif (<i>the failures of representative democracy</i>): partai politik yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap konstituen; politisi yang tidak mengakar; perilaku politik transaksional pragmatis (<i>money politics</i> atau <i>vote buying</i>); biaya politik (<i>political costs</i>) yang tinggi; pemerintah dan DPRD yang tidak responsif; perencanaan pembangunan yang formalitas semata (Tokenisme).¹⁰⁶ • Ada orientasi politik

¹⁰⁶ Tokenisme menurut Arnstein (1969) adalah kondisi di mana rakyat diminta konsultasinya atau diberi informasi mengenai suatu keputusan, tetapi sebenarnya mereka hanya memiliki sedikit atau sama sekali tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan (lihat Ife dan Tesoiero, 2008:306).

FKKB	Pra Pemilukada 2010	Pasca Pemilukada 2010	Catatan Peneliti
	<p>arena politik sebelumnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • FKKB dapat menjadi arena (kegiatan) bagi warga/konstituen untuk menilai calon Bupati/Wakil Bupati, dan alat menagih janji kampanye mereka jika terpilih. 	politik.	<p>yang cukup kental di kalangan aktivis/pegiat FKKB, baik yang terkait dengan interaksi terhadap pemerintah daerah, ataupun sebagai bagian dari kaderisasi politik untuk memunculkan tokoh-tokoh baru atau muda yang kemungkinan dapat diproyeksikan untuk tampil dan menjadi tokoh baik di posisi formal maupun informal, baik di level komunitas ataupun daerah/lebih luas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FKKB sebagai <i>school of democracy</i> dan menjadi arena politik untuk membangun kapasitas politik dan <i>track</i> politik.
Konsep	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi FAB → Forum Konstituen sebagai upaya pendidikan politik dan peningkatan kualitas partisipasi politik dari konstituen sehingga dapat menjadi <i>responsible voters</i> (pemilih yang bertanggungjawab). • Bagi FAB → Forum Konstituen hanya pada momentum Pemilukada. • Peserta FKKB bukan anggota partai politik → FKKB netral. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi jaringan aktivis Kabupaten Bandung → Forum Konstituen sebagai wadah dari <i>active citizen</i> dalam mengawal kebijakan publik di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep FKKB berkembang dalam proses, sehingga banyak hal belum terumuskan sejak awal, seperti mengenai fungsi, kepesertaan/keanggotaan, sifat/bentuk kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen, sumberdaya, dan lain-lain. • Ada kesan FKKB hanya ditempatkan sebagai alat taktis yang pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan dan

FKKB	Pra Pemilukada 2010	Pasca Pemilukada 2010	Catatan Peneliti
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang dialog sekaligus menguji dan mempengaruhi substansi kampanye calon Bupati/wakil Bupati. • Bagi FAB dan TIFA → ‘Eksperimentasi’ model partisipasi politik yang baru. • Bagi jaringan aktivis di Kabupaten Bandung → Perluasan arena partisipasi politik dan pendidikan politik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wadah bagi warga dalam berdialog dan upaya mempengaruhi kebijakan publik di pemerintah daerah. 	<p>momentum politik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu pematangan strategi dan taktik advokasi kebijakan dan advokasi politik FKKB. • FKKB berfungsi untuk membangun <i>civic engagement</i> warga atau konstituen dengan politisi, birokrasi dan sistem politik yang ada.

Sementara dari uraian di BAB sebelumnya mengenai strategi dan upaya FKKB dalam meningkatkan demokratisasi di daerah dapat dikelompokkan, sebagai berikut:

Tabel 4.2: Ikhtisar Analisa Strategi dan Upaya FKKB dalam Meningkatkan Demokratisasi di Kabupaten Bandung

FKKB	Pra Pemilukada 2010	Pasca Pemilukada 2010	Catatan Peneliti
Strategi	<ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi jaringan <i>civil society</i>. • <i>Capacity building</i> dan perumusan isu bersama. • Membangun kontak dan dialog dengan politisi.¹⁰⁷ • Institusionalisasi FKKB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kontak dengan politisi/birokrasi. • Mendesakkan dan/atau mempengaruhi kebijakan publik di daerah. • Membangun ‘blok politik baru’. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bukan strategi yang secara utuh dirumuskan sejak awal. • Institusionalisasi FKKB dapat dilihat sebagai proses evolusi dari kegiatan sebelumnya. • Model dialog FKKB

¹⁰⁷ Dialog FKKB sangat cocok dengan pandangan Habermas mengenai pentingnya publik menyuarakan atau ‘mempublikasikan’ gagasan dan kepentingannya sehingga kekuatan sosial yang mereka miliki dapat dikonversi menjadi kekuatan politik: “*They can capitalize on their social power and convert it into political power only insofar as they can advertise their interest in a language that can mobilize convincing reasons and shared value orientation*” (Habermas, 1998a:364).

			sebagai alternatif dari 'kegagalan' atau kelemahan model kampanye Pemilu/ Pemilukada dari pemerintah dan KPUD.
Langkah	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Assessment</i> aktor dan isu komunitas. • Diskusi dan dialog baik di internal FKKB maupun dengan aktor demokrasi lain. • Dialog publik dengan para calon Bupati/wakil Bupati sebelum Pemilukada. • Membangun konsensus baru: FKKB sebagai wadah bersama dalam mengawasi pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi internal FKKB. • Diskusi dan dialog baik formal maupun informal dengan Bupati/Wakil Bupati terpilih. • Berpartisipasi aktif dalam kegiatan perumusan kebijakan strategis di daerah. • Konsolidasi jaringan <i>civil society</i> yang lebih luas. 	<ul style="list-style-type: none"> • -

4.2 Relasi FKKB dengan Aktor-aktor Demokrasi Lainnya

Pada Sub BAB ini akan dibahas mengenai pandangan para peserta FKKB mengenai relasi FKKB dengan aktor-aktor demokrasi lainnya di Kabupaten Bandung. Dalam tulisan ini, para aktor tersebut adalah FAB, konstituen di Kabupaten Bandung, jaringan *civil society*, media, kontestan Pemilukada,¹⁰⁸ partai politik, DPRD, pemerintah daerah, KPUD, akademisi dan perguruan tinggi, serta lembaga donor.

4.2.1 Persepsi dan Relasi FKKB dengan FAB

Menurut pegiat FKKB, gagasan awal FKKB memang berasal dari FAB dalam skema program kerjasama FAB dengan TIFA yang lokasinya di Kabupaten Bandung. Pada saat itu para aktivis di Kabupaten Bandung --khususnya di FDA

¹⁰⁸ Aktor 'kontestan Pemilukada' dibedakan dengan 'partai politik' mengingat saat ini ada kontestan Pemilukada dari jalur independen (non partai).

dan PSDK-- memandang ada kesamaan gagasan tentang bagaimana meningkatkan partisipasi politik warga dalam konteks Pemilukada 2010. Komunikasi diantara kedua belah pihak relatif tidak menemukan kendala yang berarti karena secara jarak lokasi kedua wilayah sangat dekat, dan banyak diantara aktivis Kota Bandung dan Kabupaten Bandung yang sudah saling mengenal sebelumnya. Jadi dapat dikatakan bahwa FKKB dibentuk dari kerja kolaboratif antara FAB (yang diidentifikasi dari Kota Bandung) dan aktivis dari Kabupaten Bandung.

Kawan-kawan FAB itu kan wilayah proyeknya Kabupaten Bandung... ya kita sebagai orang Kabupaten Bandung bukan melihat karena ada proyek FAB kan, tapi karena ada kesamaan gagasan... Itu yang mempertemukan kita, karena ada kesamaan gagasan... Bahkan kita juga tidak ingin tahulah bagaimana soal proyek itu, yang penting agenda dan tujuan bersama ini terlaksana... Disitu nggak ada masalah... (Derry-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 1 April 2012)

Berkaitan dengan gagasan mengenai forum dialog FKKB, FAB berperan sebagai inisiator sekaligus fasilitator awal. Proses pematangan gagasan dan strategi selanjutnya dibahas bersama antara FAB dan para aktivis di Kabupaten Bandung. Selanjutnya dalam implementasi gagasan dan strategi tadi lebih banyak dieksekusi oleh para aktivis dari Kabupaten Bandung. Dalam hal ini peran para aktivis di Kabupaten Bandung memang cukup signifikan, mengingat wilayah yang digarap adalah memang wilayah dimana mereka tinggal dan beraktivitas selama ini.

Saya kira peran FAB itu sebagai inisiator, iya kan... Penggagas mula... dan yang kedua itu sebagai fasilitator. Ini dua peran pokoknya... Peranan sebagai inisiator pada Forum Konstituen Kedua, Ketiga, dan seterusnya sudah nggak ada sebetulnya kan... Yang tinggal itu peran fasilitator... Tapi peran fasilitator ini juga sebetulnya tinggal minimum, karena proses itu sendiri sudah embedded di dalam tim yang kemarin... (Radhar-Ketua FAB; Wawancara; 4 April 2012)

Soal merumuskan content, assessment, dan fasilitasi itu teman-teman di kabupaten juga terlibat, jadi bukan cuma FAB... Tapi dalam hal desain teknis kegiatan sepenuhnya itu FAB... seperti soal administrasi, logistik... Cukup jadi isu dan perbincangan juga di teman-teman Kabupaten, tapi secara umum bisa memahamilah mereka... (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Ketika program FK ini berjalan di Kabupaten Bandung, semua kegiatan-kegiatan itu relatif kami yang sebagai pelaksananya begitu... Termasuk dari mulai pemetaan, mungkin karena kami orang lokal jadi paham gitu ya, bagaimana berelasi dengan kelompok lain, termasuk dengan kandidat, apa yang harus dilakukan, bagaimana teknisnya konsolidasi itu bisa jalan, itu kami yang melakukan... Jadi kalau FAB ya “Ini kami punya konsep begini, bagaimana caranya supaya ini bisa jalan...”, jadi kami memang yang mengeksekusinya... (FAB memang) memfasilitasi dari sisi program memang ya, karena mereka yang punya program kan... Tapi bagaimana implementasi, improvisasi dan inovasinya justru kami disini... FAB memfasilitasi dalam arti memberikan ruang... Tapi kami yang menyusun TOR, agenda, alur diskusi, siapa yang diundang... (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan masih ada sebagian aktivis Kabupaten Bandung yang merasa ragu dengan ‘status kepemilikan’ FKKB. Keraguan tersebut muncul khususnya berkenaan dengan gagasan untuk melakukan replikasi model FKKB pada momentum politik berikutnya.

Pengennya sih harapannya bisa lepas dari FAB, harusnya... Cuma kesannya FAB yang bikin di awal, jadi kesannya FK lahir dari FAB ya... Masalah kepemilikan, gimana ya... (Setiawan-Koordinator Konsolidasi FKKB; Wawancara; 17 April 2012)

Dan kadang masih muncul juga pemikiran bahwa FK ini masih bukan milik teman-teman...Karena masih dianggap sebagai gagasan FAB atau Bandung... Sehingga internalisasi bahwa ini milik bersama dan perlu dikembangkan yang belum semua punya kesadaran itu... Sempet diobrolin di FAB. Bahkan kalau usulan program (ke donor) selanjutnya ini bisa berjalan pengelolaan selanjutnya kan akan lebih banyak diperankan teman-teman kabupaten... (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Sementara dari sisi FAB tampaknya tidak mempersoalkan mengenai hal tersebut. Mengingat konsep awal FKKB hanyalah sebagai sebuah kegiatan dalam skema program kerjasama FAB dan TIFA, maka program itu sudah dianggap selesai setelah Pemilu usai. Transformasi FKKB dari kegiatan menjadi sebuah kelompok atau institusi, dipandang sebagai pengembangan gagasan yang selanjutnya merupakan ‘milik’ dari para aktivis di Kabupaten Bandung sendiri.

Inisiasi FK sebagai forum sebetulnya justru baru setelah event pertemuan dengan calon itu... Itu kan juga masih jadi perdebatan apakah perlu AD/ART, apakah bersifat permanen ataukah hanya untuk event-event saja... Itu belum tuntas juga tuh... Kecenderungan yang agak kuat memang gagasan untuk membuat forum yang terlembagakan.... Kalau FAB sih menyerahkan saja sepertinya pada keputusan teman-teman di Kabupaten.... (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Kalau pada dasarnya sih Forum Konstituen itu selesai ketika Pemilu berakhir. Jadi mission dari Forum Konstituen yang mengajak pemilih itu responsible dengan pilihannya itu, kita nyatakan selesai ketika Pemilu berakhir... Artinya mereka sudah melakukan pemilihan secara bertanggungjawab. Nah, cuma dalam perkembangannya kemudian ada perkembangan baru, karena si Bupati kemudian menghubungi mereka lagi mengajak untuk membantu menjalankan pemerintahan mengawal program-program yang sudah dicanangkan sebelumnya. Nah ini kemudian teman-teman disana itu berinisiatif ya... saya waktu itu tidak mempermasalahkan apakah mau pakai nama Forum Konstituen atau bikin institusi baru gitu ya, buat saya sama sajalah... Karena satu kegiatan yang berhasil itu sudah pasti memiliki efek extention ya... Jadi saya kira itu hal yang baik pula, para simpul ini menjadi harus semacam mempertanggungjawabkan campaign mereka juga... Mereka konstituen gitu ya, ketika sudah menang bagaimana ini? Semangat penagihan dari bawah itu. Maka lumrah kalau para simpul ini terlibat juga dalam kebijakan pemerintah daerah. (Radhar-Ketua FAB; Wawancara; 4 April 2012)

Bagi FAB sendiri, ketika FKKB dapat terus bertahan dan mungkin melakukan replikasi dialog politik seperti yang pernah dilakukan sebelumnya, peran FAB dibayangkan dapat mitra dalam melakukan diskusi dan refleksi terhadap konsep, desain, strategi, implementasi kegiatan tersebut.

Nah kita lebih senang, aku lebih senang, kalau kita jadi kawan diskusi... itu untuk ke depan gitu... Karena untuk lebih dari itu agak repot buat kita... karena sudah masuk wilayah eksekusi gitu... (Oky-Sekjen FAB; Wawancara; 24 Desember 2011)

Saya itu berpikir, FAB akan berperan sebagai dalam melakukan reflection gitu lho... Yang bangun benang merahnya itu gitu kan... Mengkaitkan setiap action ini dengan tujuan awal... Jadi semua aspek teknisnya sebetulnya itu sudah bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat ya... (Radhar-Ketua FAB; Wawancara; 4 April 2012)

Berkaitan dengan peran FAB sebelumnya yang menjadi fasilitator dalam skema kerjasama program dengan lembaga donor, tampaknya hal tersebut tidak menjadi persoalan baik bagi FAB maupun FKKB. Keinginan para aktivis Kabupaten Bandung untuk dapat menjalin kerjasama dengan lembaga donor atau pihak lain akan disesuaikan dengan peluang dan kesiapan lembaga pendukung yang ada.

Indikasinya, ada keinginan di teman-teman kabupaten untuk melanjutkan FK, tapi belum mungkin juga tanpa dukungan FAB... Tapi teman-teman sudah punya pengalaman kok. Contohnya dulu kursus anggaran dikelola Yayasan Inisiatif, tapi sekarang sudah bisa dilakukan oleh FDA sendiri... Kuncinya memang di teman-teman kabupaten. Menurut Ali, kalau FAB nggak ngajuin ya bisa kita ajukan pakai PSDK... (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; Wawancara; 28 Maret 2012)

4.2.2 Persepsi dan Relasi FKKB dengan Konstituen

Peserta FKKB berasal dari beragam latarbelakang dan organisasi. Mereka berkumpul dan beraktivitas bersama di FKKB utamanya dilandasi oleh keinginan untuk dapat memperkuat partisipasi politik dari *civil society* di kabupaten. Dalam pluralitas tersebut tentunya diperlukan adanya faktor-faktor pendukung yang dapat membangun identitas kolektif sekaligus mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu atau bahkan memecah kelompok.

Dari hasil pengamatan, pada umumnya para pegiat FKKB memiliki kesamaan latarbelakang budaya, yaitu budaya Sunda. Pada umumnya mereka juga aktif di organisasi, kelompok atau komunitas sehingga telah terbiasa berinteraksi dengan banyak pihak dan terbuka dengan beragam karakteristik dan karakter yang beragam. Dan seperti sudah diuraikan di bagian sebelumnya, 'kekuatan inti' FKKB ada pada intitusi dan jaringan FDA dan PSDK. Artinya banyak diantaranya mereka yang sudah saling berinteraksi secara mendalam sebelum atau diluar konteks FKKB. Sekretariat FDA di Baleendah merupakan salah satu tempat pertemuan dari berbagai kelompok dan organisasi, baik sekedar untuk ngobrol ataupun rapat mengenai beragam hal. Para aktivis tersebut juga telah terbiasa terlibat atau berafiliasi dengan kelompok atau organisasi lain dalam isu-isu

tertentu, khususnya mengenai anggaran dan lingkungan hidup. Semangat egaliter dan solidaritas terlihat cukup kuat dalam relasi diantara sesama pegiat FKKB.¹⁰⁹

Jadi Alhamdulillah kawan-kawan generasi sekarang ini banyak ya... Abah yang paling tua, tapi kawan-kawan tidak menganggap Abah paling pintar, dan Abah tidak berbicara bahwa Abah paling berpengalaman... Abah sekolah juga tidak, rekan-rekan jelek-jelek akademisi... Bicara disini apa adanya... akhirnya nyambung... Mangkanya ego disini dikesampingkan... Karena satu orang saja muncul ego, semua akan muncul juga... Mangkanya kalau pertemuan atau ngobrol biasa, kita tidak saling menyinggung wadah masing-masing... Seperti kemarin Abah bicara dengan Bung Ali minta masukan soal Citarum, "Gimana ya mengenai perkembangan Citarum ini...?". Kata Bung Ali, "Ya udah Bah, kita bikin surat aja untuk minta pertemuan...". Jadi sudah tidak membawa-bawa nama lembaga sendiri, tapi sebagai konstituen saja... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Kondisi tersebut tampaknya berpengaruh terhadap pola diantara sesama peserta atau pegiat FKKB. Diantara sesama peserta atau pegiat FKKB, ada kesadaran untuk lebih mengedepankan identitas FKKB dan tidak menonjol-nonjolkan kontribusi pribadi atau identitas kelompok atau organisasi asal, ketika tengah berbicara atau beraktifitas dalam konteks FKKB. Selain itu, juga ada kesadaran untuk saling menghargai gagasan-gagasan yang beragam untuk dapat dikemas menjadi gagasan yang dapat mewakili kelompok.

Nah disini akan terjadi, kalau mindset Forum Konstituen tidak diperhitungkan dengan baik, masalah itu akan terjadi... Jadi FK ini kan dibangun dari berbagai elemen, menjadi satu wadah, asalnya satu tujuan, satu motivasi, satu keinginan... akhirnya tidak membawa bendera masing-masing... jangan sampai muncul, "Ini kalau tidak ada Abah tidak akan jalan...", atau yang lain juga bilang begitu... Ini yang Alhamdulillah tidak terdengar sampai detik sekarang ini... Jadi kalau kita berkumpul dalam konteks FK, sudah tidak bicara PSDK lagi, FDA lagi... tapi berbicara Forum Konstituen... Kalau konteksnya lain yang tidak menyangkut FK, baru kita pakai lembaga masing-masing... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

¹⁰⁹ Satu contoh menarik adalah istilah yang umum mereka gunakan ketika saling menyapa diantara sesama pegiat FKKB. Panggilan atau penyebutan yang umum digunakan adalah kata 'Bung' atau 'Lur' (semacam versi singkat dari kata 'Dulur' dalam bahasa Sunda, yang artinya 'saudara'). Atau panggilan 'Bah' (dari kata 'Abah') untuk menyebut mereka yang dituakan. Penggunaan kata atau panggilan tersebut menyiratkan adanya keakraban dan kedekatan emosional diantara mereka.

4.2.3 Persepsi dan Relasi FKKB dengan Jaringan *Civil Society*

Di bagian sebelumnya juga telah disinggung mengenai jaringan PSDK dan FDA sebagai inti dari kekuatan FKKB, selain adanya orang-orang yang terlibat dalam FKKB diluar kedua jaringan tersebut. PSDK dan FDA diinisiasi oleh Yayasan Inisiatif-Bandung.

Banyak teman-teman yang aktif di FK sekarang itu berangkat dari inisiasi awal pembentukan Pusat Sumber Daya Komunitas atau PSDK yang difasilitasi oleh Yayasan Inisiatif pada sekitar tahun 2004-2005... yang konsern pada penguatan komunitas peduli Citarum, dengan mencermati anggaran daerah yang terkait dengan persoalan lingkungan hidup... selanjutnya ketika Yayasan Inisiatif punya program pendampingan desa, teman-teman itu juga dilibatkan, dengan dukungan TIFA dan Ford, masuk ke isu perencanaan dan penganggaran, masuk ke persoalan kesehatan, pendidikan, dsb, yang selanjutnya menjadi Forum Demokrasi Anggaran atau FDA. (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Sejak ‘Reformasi 1998’ perkembangan NGO/CSO di Kabupaten Bandung dinilai cukup dinamis khususnya yang berkaitan dengan dengan isu-isu lokal, seperti isu lingkungan hidup, anggaran publik, dan lain-lain. Sebelumnya NGO/CSO yang menonjol hanya yang bergerak di isu perburuhan.

CSO Kab Bandung saat ini relatif dinamislah... Kalau dulu Kabupaten dinamis hanya di isu perburuhan... Kalau sekarang mungkin bisa lebih dinamis di sektor kontrol pemerintahan misalnya... Kalau dari posisi politik sebenarnya sudah mulai dihitung atau dilihat... Mulai diajak terlibat aliansi-aliansi yang lebih besar... Tapi di Kabupaten itu lebih banyak isu-isu lokal. Isu nasional malah kurang... Teman-teman juga sering terlibat dalam kegiatan dengan Pemda, terutama dulu masa Pak Toto di Bappeda... (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Posisi yang coba diambil oleh jaringan PSDK, FDA dan kemudian FKKB dalam konteks peta NGO/CSO di Kabupaten Bandung tidak dapat dilepaskan dari konstelasi yang ada sebelumnya. Pada masa Bupati sebelumnya, NGO/CSO di Kabupaten Bandung terpetakan menjadi dua kelompok besar, yang secara berseloroh kerap disebut ‘LSM Kesbang’ dan ‘LSM Toto’. Kelompok yang

pertama adalah NGO atau LSM yang terdaftar di Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesbang), dan kerap terlibat atau mendapatkan proyek atau bantuan dari pemerintah daerah. Kelompok kedua adalah NGO atau LSM yang dekat dengan Toto (saat itu Ketua Bappeda) dan relatif lebih kritis serta tidak memiliki orientasi ‘mendapat proyek Pemda’. Salah satunya adalah Yayasan Inisiatif dimana Toto menjadi salah satu pendirinya.¹¹⁰

Ketika Toto maju pada Pemilu 2010 (yang menyebabkannya dimutasi dari jabatan Ketua Bappeda) dan berhadapan dengan salah satu calon yang juga merupakan menantu Bupati, konstelasi NGO juga turut terpengaruh. Sejak itu jaringan NGO yang dikategorikan kritis hanya memiliki akses yang terbatas terhadap pemerintah daerah. Menyikapi kecenderungan tersebut, jaringan PSDK dan FDA kemudian memandang penting untuk dapat membangun apa yang mereka sebut sebagai ‘blok politik baru’ dari jaringan NGO/CSO di Baleendah, sebagai pengimbang dari blok LSM/NGO yang dekat dengan pemerintahan daerah di Soreang.¹¹¹

Ada keinginan membangun semacam ‘Blok Politik Baru’... Baleendah sebagai penyeimbangan kekuatan pemerintah dan LSM-LSM yang dekat dengan Pemda di Soreang. (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; Wawancara; 23 April 2012)

4.2.4 Persepsi dan Relasi FKKB dengan Media

Dalam teori Habermas mengenai *political public sphere*, media merupakan salah satu arena membangun opini publik yang disebutnya sebagai ‘publisitas’ (selain media massa, didalamnya termasuk institusi kultural). Media massa berperan besar menjadi *public sphere* di mana opini publik dapat didialogkan secara inklusif, setara dan argumentatif oleh semua pihak.

¹¹⁰ Wawancara Toto (Calon Bupati/Wakil Bupati, 25 April 2012), dan Tarum (Anggota Tim 9 FKKB, 28 Maret 2012). Adanya birokrat yang kemudian membuat NGO atau kelompok kepentingan untuk memberi tekanan pada pihak-pihak lain di pemerintahan seperti ini tampaknya sejalan dengan analisa Etzioni-Halevy yang diulas pada *footnote* 35 di halaman 22 laporan ini.

¹¹¹ Pada tahun 1970-an dan awal 1980-an, Baleendah sempat direncanakan akan menjadi ibukota Kabupaten Bandung. Namun rencana tersebut dibatalkan karena Baleendah sering terendam banjir. Pada akhirnya ibukota kabupaten dipindahkan dari wilayah Kota Bandung ke Soreang pada pertengahan dekade 1980an.

Dalam teori politik, media massa juga kerap disebut sebagai kekuatan atau pilar keempat demokrasi.¹¹² Belakangan berkembang kritik terhadap media massa, yang dinilai sudah tidak memainkan lagi perannya sebagai pengelola opini publik, dan lebih banyak menyuarakan kepentingan kelompok tertentu yang banyak diantaranya juga merupakan pemilik jaringan media itu sendiri. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi merupakan fenomena global sebagaimana juga terjadi di negara-negara lainnya.¹¹³ Krisis media yang berimplikasi terhadap *public sphere* ini menurut McNair (2000:7) disebabkan oleh *marketisation*, *commercialisation* dan *commodification*. Berita dan informasi hanya menjadi barang dagangan yang dikemas sedemikian rupa yang membentuk budaya konsumerisme, hiburan dangkal dan iklan politik, di mana media hanya menjadi alat pemasaran dari produk-produk tersebut. Media kemudian alat yang dikendalikan oleh kekuatan politik media dan pasar semata (*market-driven commercialization*).

Terkait dengan peran media ini, FKKB memandang media sebagai alat yang penting dalam mensosialisasikan gagasan dan aktivitasnya kepada publik. Pada saat persiapan dialog antara konstituen dan calon Bupati/Wakil Bupati sebelum Pemilukada, kebutuhan dan strategi pemanfaatan media ini sudah dirancang, namun memang belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Satu dua ada, tapi memang kita belum pernah secara mendalam mencari tahu apa persepsi orang ke FK. Tapi memang ada yang lemah dari kita. Kita lemah di campaign... Itu yang agak disayangkan... Waktu itu memang ada pembagian peran, yang mengkonsolidasikan media itu teman-teman FAB, jadi kita tidak terlibat. Sebetulnya, dari pertemuan-pertemuan yang tadi saya ceritakan itu kan menarik buat media ya... Jadi ya memang FK ini tidak cukup bagus dalam membangun opini ya... Karena saya melihat kegagalan di kampanye media massa, seperti di TV maupun cetak... (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

¹¹² Mengenai media sebagai pilar keempat demokrasi diantaranya lihat Schultz, 1998.

¹¹³ Analisis mengenai kaitan antara konsentrasi penguasaan jaringan media, pengaruh pemilik media dan demokrasi, diantaranya lihat Baker, 2004 dan 2007.

Media massa memang tidak tergarap benar... Kita garap tapi dengan standar gitu... wartawan kita undang kalau ada acara, dan sebagainya... Sempat kepikiran untuk menggunakan TV dan radio, tapi kalau energinya kurang ya susah juga ya... Sempat juga ada gagasan kawan-kawan di kabupaten untuk pakai radio komunitas, tapi nggak tergarap juga... (Oky-Sekjen FAB; Wawancara; 24 Desember 2011)

Jarang ya. Karena sejak awal kita juga kurang mempopulerkan FK di media ya... Harapan kita dulu waktu melakukan roadshow dulu itu, kita ingin membangun di grassroot, bagaimana kita lebih memperkuat substansilah diskusi melalui forum-forum diskusi dan partisipasi ini... Jadi bagaimana kita juga bukan hanya hadir disitu, duduk, dengerin.... Tapi kita ingin punya kepentingan menyadarkan yang belum sadar bahwa... Yaa.. jargon dulu itu kan bagaimana FK ini mendidik menjadi pemilih yang cerdas... Ini yang coba yang kita bangun... (Setiawan-Koordinator Konsolidasi FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

FKKB pernah membuat tabloid mengenai profil calon Bupati/Wakil Bupati dan hasil dialog konstituen dengan para calon tersebut, namun itupun hanya dapat dilakukan satu kali.

Sempat bikin tabloid sekali, dan itu menjelang pemilihan... Isinya tentang isu-isu pokok dan profil para calon... Hubungan dengan media, paling ngundang wartawan aja ya... (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Kendala utamanya adalah masalah dana, sehingga menyulitkan untuk dapat merancang satu strategi media yang komprehensif.

(Strategi pemanfaatan media) pada dasarnya dirancang... tapi problem pendanaan dari TIFA itu terlambat, sehingga susah membuat komitmen dengan pihak lain. Karena waktu mepet dengan pelaksanaan Pilkada, semua kegiatan jadi di push waktu itu... Lain perkara kalau FK ini bisa dibuat murni dari masyarakat.... Itu mungkin sebetulnya... (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; Wawancara; 28 Maret 2012)

4.2.5 Persepsi dan Relasi FKKB dengan Kontestan Pemilu

Merujuk pada pengalaman melakukan dialog antara konstituen dengan calon Bupati/Wakil Bupati yang telah dipaparkan sebelumnya, FKKB memandang para

kontestan Pemilu tersebut sebagai pihak yang penting untuk diajak berdialog. Khususnya dalam orientasi mempengaruhi gagasan calon-calon tersebut sebelum Pemilu, dan calon yang terpilih setelah Pemilu, agar dapat membangun proses perumusan kebijakan dan menghasilkan kebijakan yang partisipatif, transparan dan responsif dengan kebutuhan rakyat.

Dalam pengalaman dialog antara konstituen dengan calon Bupati/Wakil Bupati tahun 2010 lalu, FKKB tampaknya berada dalam posisi yang lebih diuntungkan secara politis, karena berhasil mengundang sebagian besar calon untuk hadir dan terlibat dalam dialog tersebut.

Terus kan bukan mereka yang mengundang kita, tapi kita yang mengundang mereka, bukan hanya satu calon tapi semua para calon untuk bertemu, berdialog dan berdebat bersama masyarakat... (Setiawan-Koordinator Konsolidasi FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Selain itu, dengan adanya kegiatan dialog tersebut menunjukkan bahwa warga atau konstituen sesungguhnya dapat duduk dan berdiri sejajar dengan para politisi. Karena dalam dialog tersebut konstituen berdialog secara langsung dan lugas dengan, dan dapat mengukur kapasitas atau pemahaman para politisi mengenai berbagai masalah dan kebijakan di daerah.

Ada hal yang berharga memang dari pengalaman itu... Kan kalau dalam komunikasi politik itu menunjukkan kalau ada relasi yang tidak timpanglah gitu ya, mereka mau datang, hampir semua kandidat mau datang... Saya pastikan tidak ada kelompok lain, atau ormas lain yang mampu menghadirkan semua kandidat, dan disitu kita semua diskusi... Itu saya pastikan tidak ada di Pilkada kemarin itu, kecuali KPUD ... (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Banyaknya calon yang bersedia hadir dalam acara dialog konstituen tersebut mengindikasikan bahwa mereka sesungguhnya juga membutuhkan forum semacam itu, sebagai ajang kampanye sekaligus saling menguji kapasitas politik dan kapasitas komunikasi sebagai seorang politisi secara langsung di hadapan konstituen yang beragam.

Saya itu menduga mereka akan gagal mengundang calon, sehingga saya yang harus terlibat langsung. Tapi nggak ada tuh yang secara langsung harus saya temui... Artinya gagasannya sendiri cukup sexy di mata para kandidat... karena kita menghadirkan banyak elemen dari seluruh kabupaten, sehingga buat mereka ini penting... Tapi memang ada calon yang stress ya, kekhawatiran bahwa mereka akan menghadapi banyak elemen masyarakat itu, sehingga tidak hadir... Tapi itu berakibat fatal membuat dia tidak diperhitungkan... Ada yang nggak datang kandidat dari Partai Banteng Besar... Sebetulnya dia mengirim utusan berkali-kali, tim suksesnya itu datang ke saya itu... Ya saya yakinkan bahwa tidak usah khawatir yang penting dia punya kesiapan. Ya cuma itu, ada ketidakpercayaan diri bahwa dia bisa berdialog dengan baik. Karena memang Ketua Partai yang itu kurang pintar berkomunikasi... Dia punya handicap itu, jadi mungkin tim suksesnya juga ragu untuk menghadirkannya di Forum Konstituen yang digalang oleh Forum Aktivistis Bandung ya... Waa... dia denger nama Forum Aktivistis Bandung aja udah serem dia... (Radhar-Ketua FAB; Wawancara; 4 April 2012)

Yang nggak datang waktu itu memang kandidat yang bodoh lah, ha..ha.. Sieun lah sepertinya... [Bahasa Sunda: Takutlah sepertinya]. Pas saya lihat di TV, wah dia mah memang yang paling parah lah... (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

4.2.6 Persepsi dan Relasi FKKB dengan Partai Politik

Kemunculan FKKB pada momentum menjelang Pemilu 2010 tampaknya memang telah memberi nuansa tersendiri dalam dinamika politik dan *civil society* di Kabupaten Bandung. Banyak pihak yang kemudian mencoba memetakan warna dan afiliasi politik dari kelompok *civil society* yang ‘baru’ tersebut. Tidak aneh, karena pada umumnya kelompok atau organisasi yang meskipun mengatasnamakan atau berlabel NGO/CSO sesungguhnya hanyalah bentukan atau perpanjangan tangan dari elit atau partai politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Apalagi dalam situasi menjelang Pemilu dimana banyak kelompok atau organisasi baru yang bermunculan untuk mencari peruntungan politik dan ekonomi dalam situasi politik yang penuh persaingan dan aroma transaksional saat ini. Karenanya, dengan cepat FKKB langsung cukup di kenal, karena selain muncul pada momentum politik yang tepat juga karena mampu membangun citra sebagai kelompok yang relatif ‘bersih’.

... ada beberapa partai juga yang melihat, “Siapa nih di belakang FK ini, apakah ada orang yang penting dari partai yang ada di FK?”. Nah kita buktikan bahwa FK lahir dari harapan dan inisiatif masyarakat sendiri yang juga punya kepentingan. Dimana kepentingan kita adalah bagaimana pola-pola pemerintahan di daerah ini bisa berubah menjadi lebih baik. Sehingga menurut saya, partai politik mungkin akan melihat kita sebagai kawan atau lawan mereka... (Wahyu-Peserta FKKB; FGD; 19 April 2012)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah seorang calon Bupati/Wakil Bupati pada Pemilu 2010 lalu, yang juga merupakan seorang politisi yang banyak malang melintang di organisasi dan partai politik di daerah. Menurutnya, kemunculan FKKB menjadi unik karena bukan muncul dari inisiatif kelompok politik tertentu, dan bahkan tidak ada elit politik lokal atau nasional yang ada di dalamnya.

FK yang digagas oleh kawan-kawan... ya mungkin bagi orang-orang tertentu ini hal yang aneh, karena tiba-tiba ada sekelompok orang yang menurut ukuran mereka yang berkuasa, para penggagasnya itu bukan termasuk elit-elit partai politik, tapi kemudian membawa gagasan baru dengan visi politik yang keluar dari mainstream katakanlah begitu... Karena mereka membuat para konstituen menjadi lebih bertanggungjawab, berani mengkritisi perpolitikan, yang bagi mereka ini sebuah keunikan...berani... (Kusnadi-Calon Bupati/Wakil Bupati; Wawancara; 2 April 2012)

Cara pandang tersebut juga masih muncul jauh diluar suasana Pemilu. Pertanyaan mengenai ‘tokoh atau kelompok di belakang layar’ dari keberadaan FKKB juga masih kerap diterima oleh pegiat FKKB ketika mensosialisasikan keberadaan FKKB kepada pihak lain.

Saya juga ikut Musrenbang kecamatan, dimana saya juga sampaikan usulan-usulan... saya juga menyampaikan soal FK ini... Ada yang bertanya, “Siapa di belakangnya?”, saya jawab, “Masyarakat...”. Bahwa anggotanya adalah masyarakat yang bergabung menjadi satu kesatuan masyarakat sipil... (Ihsan-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; FGD; 19 April 2012)

Berkaitan dengan cara pandang para pegiat FKKB terhadap partai politik, seperti yang diulas pada bagian sebelumnya, pada umumnya memang cenderung apriori dan skeptik. Kesiapan mereka untuk terlibat dalam FKKB sebagian besar dilatarbelakangi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap partai politik.

Dalam konteks Pemilu 2010, sebagian dari mereka kemudian memang memiliki preferensi politik pada calon yang maju lewat jalur independen atau non partai. Dengan demikian, sikap mereka terhadap partai politik sesungguhnya tidak dapat dikategorikan sebagai sikap ‘anti partai’, namun lebih berupa sikap ‘benci tapi rindu’. Disatu sisi merasa kecewa dengan partai politik, namun disisi lain menyadari pentingnya peran partai politik dalam sistem politik demokrasi.¹¹⁴

Sebenarnya kita kita... kumaha nya'... sok rancu lamun bicara partai politik... [Bahasa Sunda: ...bagaimana ya... suka rancu kalau bicara partai politik] Ya rancunya, kalau saya ya.. kalau partai politik itu ya sudah kotor, tidak sehat... walaupun kita ya rindu juga ke partai politik... dan sebetulnya tidak dapat lepas juga... (Nanang-Peserta FKKB; Wawancara; 29 Maret 2012)

Kegelisahan para peserta FKKB terhadap partai politik tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai kelemahan dalam kebijakan mengenai partai politik di Indonesia. Pada UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pada Pasal 11 disebutkan bahwa partai politik berfungsi untuk: melakukan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Butir a.); sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara (Butir c.); dan melakukan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (Butir e.). Namun pada Pasal 13 mengenai kewajiban partai politik, pada Butir e. disebutkan bahwa kewajiban untuk melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik sesungguhnya hanya kepada anggotanya saja, dan bukan kepada masyarakat luas sebagaimana fungsi yang diembannya. Lebih jauh, pada Pasal 47 mengenai sanksi, tidak mengatur mengenai sanksi terhadap tidak

¹¹⁴ Sinyalemen ini secara jelas dapat dilihat dari keterlibatan sebagian pegiat FKKB yang sebelumnya menyatakan kekecewaan terhadap partai politik, namun kemudian ikut masuk dalam Partai Hijau, yaitu sebuah partai baru yang baru dideklarasikan di Bandung pada tanggal 5 Juni 2012. Pembentukan partai tersebut dimotori oleh Syarekat Hijau Indonesia yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk WALHI. Banyak pegiat FKKB khususnya yang berasal dari PSDK yang menjadi anggota WALHI kemudian terlibat di partai tersebut. Lihat <http://regional.kompas.com/read/2012/06/05/12142192/Partai.Hijau.Dideklarasikan>, diakses 5 Juni 2012.

dijalankannya kewajiban terkait pendidikan politik dan peyaluran aspirasi tadi. Hal ini membuat partai politik seolah bebas saja untuk melakukan atau tidak melakukan fungsi dan kewajibannya tersebut.

4.2.7 Persepsi dan Relasi FKKB dengan DPRD

Dalam sistem demokrasi representatif yang berlaku di Indonesia saat ini, eksistensi dan peran DPRD dan partai politik adalah ‘wajib’ adanya, yang suka atau tidak tetap perlu dikritisi, didorong dan didukung untuk dapat berfungsi dengan baik. Secara teoritis maupun ketentuan legal formal di Indonesia,¹¹⁵ DPRD adalah representasi dari pilihan publik dan menjadi saluran aspirasi publik. Anggota DPR/DPRD harus mampu berperan menangkap dan mengartikulasikan aspirasi publik secara umum dan secara khusus konstituen di daerah pemilihannya. Intensitas dan kualitas interaksi antara anggota legislatif daerah dengan warga khususnya konstituen di daerah pemilihannya dapat menjadi salah satu indikator dari berjalan atau tidaknya prinsip keterwakilan dalam demokrasi representatif. Di Kabupaten Bandung hal tersebut tampaknya masih menjadi kelemahan mendasar yang menjadikan kurang berfungsinya DPRD sebagai representasi dan penyalur aspirasi rakyat.¹¹⁶ Ketidakpuasan atas kondisi tersebut yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong dibentuknya FKKB seperti yang sudah diuraikan pada bagian awal BAB ini.

Terkait dengan hal tersebut, relasi FKKB dengan DPRD sampai saat ini memang masih terbatas. Selain secara historis relasi FKKB sejak awal dibangun dengan calon Bupati/Wakil Bupati (pemerintah daerah), juga karena pada awalnya

¹¹⁵ Dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPRD pada Pasal 351 diatur mengenai kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota, yaitu: Butir (i): Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; (j): Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan (k): Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada konstituen di daerah pemilihannya.

¹¹⁶ Masalah inefisiensi reses ini pernah diangkat oleh FDA beberapa waktu sebelumnya. Reses dipandang hanya penghamburan uang karena pada kenyataannya banyak anggota DPRD di Kabupaten Bandung yang hanya memanfaatkan dana reses (biaya pertemuan, ‘uang lelah’, dan biaya bensin) tanpa melakukan pertemuan dengan konstituennya. Acara reses lebih bersifat seremonial, dan hanya menjadi ajang pengajuan usulan-usulan warga untuk pembangunan fisik saja. Lihat *Republika* tanggal 14 Mei 2008, “DPRD ‘Hamburkan’ Uang untuk Reses”.

dipandang akan memberatkan FKKB jika pada saat yang sama juga mengawal fungsi-fungsi lembaga legislatif daerah.

Di tingkat aku pribadi kenapa nggak ambil itu, karena gini... kita fokus ke pemerintah, kita kontrol, yang jika dalam prosesnya kita gandingan tangan dengan DPRD, ya nggak masalah... Tapi jangan diprogramkan, nanti jadi beban... Karena jadi muncul dua variabel tuh... Meskipun variabel yang keduanya adalah untuk bareng-bareng gitu ya... (Oky-Sekjen FAB, 24 Desember 2011)

Meskipun demikian, dalam pandangan FAB, ketika FKKB terus berlanjut pasca Pemilu maka interaksi dengan aktor politik lain di daerah tidak dapat dihindarkan.

Kalau bayangan aku pribadi, FK ini akan berpolitik... itu maksudku soal grey area tadi... jadi soal visi, tujuan, moral segala macam harus clear... Nah berikutnya harus elegan... Berpolitik dalam arti dia harus berhubungan dengan stakeholders di kabupaten, termasuk DPRD, termasuk bahkan kepolisian dan ormas-ormas lain... Dia harus melakukan itu...Jadi kalau FK ini panjang bayangannya dia akan bersentuhan dengan DPRD juga. Tentu saja yang akan kita pake kepentingan FK gitu kan... Apakah itu kolaboratif atau konfrontatif... (Oky-Sekjend FAB; Wawancara; 24 Desember 2011)

Hal tersebut juga sejak awal disadari oleh para aktivis di Kabupaten Bandung, bahwa adalah penting untuk juga mengawal DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya, khususnya yang berkenaan dengan hubungan mereka dengan warga atau konstituennya.

Ada satu lagi, soal pengawalan reses DPRD... Jadi bukan hanya pengawalan kebijakan eksekutif, tapi juga mengawal proses di DPRD khususnya yang berhubungan dengan masyarakat... Malah waktu itu pengen ada Jambore Konstituen segala... Malah pengennya dihadiri sama Bupati dan Menteri...(Setiawan-Koordinator Konsolidasi FKKB; FGD; 19 April 2012)

Dikaitkan dengan gagasan besar FKKB dalam hal memperbaiki kualitas demokrasi dan arena politik di daerah, 'pemberdayaan' DPRD dipandang sebagai hal yang penting. Diantaranya gagasan untuk mengawal proses reses, meningkatkan kualitas forum dialog anggota DPRD dengan konstituen, dan mendorong DPRD dapat memperjuangkan usulan konstituen di daerah

pemilihannya dalam Musrenbang. Dalam hal ini, FKKB diharapkan tetap mampu menjaga independensi dan integritas, dengan membangun intensitas relasi yang sama kepada seluruh anggota DPRD dari seluruh partai politik yang ada.

Sebetulnya banyak gagasan yang belum bisa terlaksana... Benang merah kita dulu itu kan upaya memperbaiki kualitas arena-arena politik sebenarnya... Kalau Pilkada itukan eksekutif ya, artinya bagaimana memilih Bupati... Nah concern kita adalah bagaimana memperbaiki ruang-ruang demokrasi, fase ini kan ada juga satu wilayah yang belum kita mainkan, yaitu legislatif. Legislatif kan itu mereka punya forum-forum berdialog jugakan dengan masyarakat. Yang selama ini kita nilai tidak efisien... Reses itu kan ngobrol, selesai, bagi transport... Nah FK yang di kecamatan-kecamatan ini kan per Dapil, yang basisnya kecamatan, jadi kalau penguatan itu terjadi, FK juga bisa mempengaruhi bagaimana upaya perbaikan di reses-reses itu, melalui pendekatan pada anggota Dewan, bagaimana reses ini kita modifikasi sedemikian rupa sehingga dialognya lebih berkualitas. Ada hal yang sederhana misalnya, bagaimana upaya Dewan mengawal proses usulan dalam Musrenbang, itu bisa ditanyakan oleh konsituen, mengenai usulan-usulan yang mereka sampaikan, dan sudah menjadi kewajiban Dewan untuk mengawal usulan itu...(Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; FGD; 19 April 2012)

Meskipun belum secara serius mengembangkan interaksi dengan DPRD, namun FKKB sesungguhnya sudah memiliki modal politik yang besar, karena jaringan utamanya yaitu FDA selama ini sudah cukup intensif melakukan hal tersebut, khususnya yang berkenaan dengan isu anggaran publik di daerah.¹¹⁷

Karena nggak ada juga gerombolan lain yang relatif solid... terutama dengan kapasitas teman-teman dalam analisis anggaran itu kan lain... Kadang juga diminta bantuan oleh anggota-anggota DPRD untuk membantu analisis APBD misalnya... (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; Wawancara; 28 Maret 2012)

¹¹⁷ Selama masa penelitian tesis ini, peneliti sempat melakukan observasi terhadap dua kali kegiatan dialog FDA dengan DPRD terkait dengan isu analisis kinerja dan pengelolaan APBD dalam konteks LKPJ Bupati tahun 2011. Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 14 April dan 26 April 2012.

4.2.8 Persepsi dan Relasi FKKB dengan Pemerintah Daerah

Seperti sudah disinggung sebelumnya, posisi FKKB tidak dapat dilepaskan dari interaksi dan interelasi antara jaringan PSDK dan FDA dengan pemerintahan daerah, baik pemerintahan saat ini maupun sebelumnya. Dengan pemerintahan sebelumnya, hubungan yang terbangun lebih sering dalam posisi berhadapan, sebagai wujud dari sikap kritis mereka terhadap berbagai kebijakan pemerintahan daerah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Bahkan, pada akhir pemerintahan Bupati sebelumnya, FDA pernah mengeluarkan hasil analisis bertajuk ‘Rapor Merah Bupati’.¹¹⁸

Sebelum dengan Bupati sekarang, teman-teman disini juga sering berinteraksi dengan Pemda, terutama dengan Bappeda, yang sebagai badan perencanaan daerah kita anggap strategis, ya kita intensif disitu... Tapi memang dengan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya kita sering berhadapan, artinya kelompok kamilah yang sering mengkritisi, melakukan aksi terhadap kebijakan-kebijakan Bupati sebelumnya itu... Artinya komunikasi kita dengan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya memang tidak terbangun. Tapi dengan SKPD dan beberapa anggota DPRD itu yang sebelumnya sudah sering berinteraksi... (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Pada saat ini, dalam pandangan FKKB, relasi FKKB dengan kepala daerah yang sekarang juga masih dipengaruhi oleh situasi relasi dengan Bupati sebelumnya, mengingat adanya hubungan keluarga antara kedua Bupati tersebut.

Karena petanya Bupati yang sekarangpun, itu masih menganggap bahwa yang menjadi leader-nya di FK ini adalah yang sebelumnya selalu berhadapan dengan Bupati sebelumnya, yang notabene juga merupakan mertua dari Bupati yang sekarang... Bupati yang sekarang ini sama Partai Pohon Besar, mantu Bupati sebelumnya, dan secara kebijakanpun melanjutkan kebijakan mertuanya itu... Wajar kalau dia punya kehati-hatian

¹¹⁸ ‘Rapor Merah Bupati’ adalah hasil analisis FDA terhadap kinerja pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Dokumen tersebut dibuat pada bulan Oktober 2010, atau hanya 2 bulan menjelang Pemilu 2010. Lihat Ramdan dan Wulandari, “Rapor Merah Bupati: Hasil penilaian rakyat terhadap kinerja penerima mandat”, dalam Nusantara et.al., 2010:57. Lihat juga: Galamedia, 22 Oktober 2010, “Obar Peroleh Rapor Merah”; Pikiran Rakyat, 22 Oktober 2010, “Kinerja Pemkab Mendapat Rapor Merah”; Pikiran Rakyat, 23 Oktober 2010, “Sekda Pertanyakan Tolak Ukur Rapor Merah”.

kan, karena memang ada sejarah sebelumnya... (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Meskipun demikian, dengan adanya interaksi dalam dialog konstituen dengan calon Bupati/Wakil Bupati sebelum Pemilukada, saat ini FKKB kerap berinteraksi dan berdialog dengan Bupati dan Wakil Bupati, yang inisiatifnya dapat muncul dari masing-masing pihak. Dalam hal ini, ada kesan Bupati dan Wakil Bupati memang membuka diri bagi FKKB untuk menjadi mitra dialog pemerintah daerah, baik secara formal maupun informal.

Dengan sudah berinteraksi sebelumnya pada saat menjelang kampanye dalam FK, Bupati yang sekarang sering berkomunikasi dengan kita... Beberapa kali kita diundang ke rumah dinas... Kalau ada kegiatan kita juga diundang... walaupun sebetulnya itu karena ada kawan kita juga di lingkaran dalamnya mereka... (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Kalau denger-denger informasi, sebenarnya dia juga butuh dengan adanya kita ya... entah itu memang betul begitu atau hanya lips service saja ya kita nggak tahu... Tapi dari beberapa kali pertemuan dengan Bupati, kalau dari bahasa tubuhnya sih dia cukup merespon ya... Karena kita dalam posisi yang memilih dia gitu... Kalau dalam bahasa Sunda mah, "Tong sombong lah da dipilih ku rakyat...!" [Bahasa Sunda: Jangan sombonglah kan dipilih sama rakyat]. Kita memposisikan semacam itu, meskipun secara konkret mah memang masih jauh... (Setiawan-Koordinator Konsolidasi FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Namun, ada pula yang menganggap bahwa inisiatif untuk membuka ruang dialog lebih banyak dan masih harus selalu dimulai oleh FKKB sendiri. Hal tersebut karena masih sulit mengharapkan adanya inisiatif dari pemerintah daerah akibat masih adanya kekhawatiran-kekhawatiran dalam menghadapi NGO/CSO.

Menurut Abah pemerintahan sebetulnya mungkin ketar ketir juga... karena tidak semua wadah ini memberikan masukan-masukan yang positif... Mangkanya satu hal yang mustahil jika mereka mengambil inisiatif, menjadi inisiator, untuk membentuk lembaga semacam ini... Tidak mungkin... Tapi dikala kami muncul mereka mungkin terpaksa merespon juga... Karena ketika masyarakat sipil makin tumbuhkan sebetulnya pemerintah semakin rentan juga.. semakin riskan sebetulnya mah... itu harus diakui... Tapi sesuai dengan undang-undang, masyarakat dimungkinkan untuk berserikat... Tapi di kala civil society ini membangun

kekuatan yang besar dan secara politis buat mereka mungkin membahayakan, tapi disisi lain dia mengharapkan satu keuntungan dari dukungan suara... Walaupun kita tidak terkontaminasi dari apa yang mereka inginkan, tapi mereka mengharapkan dukungan kita, itu jelas... Wadah besar kadang jadi dimanfaatkan oleh mereka, untuk kepentingan elit politik saja... Jadi menurut Abah, di pemerintahan sendiri itu antara ya dan tidak... Ya-nya seolah dia mendukung di era demokrasi... Tapi tidak-nya karena ada rasa kekhawatiran... jangan-jangan... jangan-jangan... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Dalam relasi antara NGO/CSO dengan pemerintah daerah, salah satu isu yang kerap muncul adalah apakah NGO/CSO tersebut mau atau dapat mengakses dana di APBD, baik dalam bentuk proyek ataupun hibah dan bantuan sosial. Dalam hal ini FKKB memandang sebaiknya tidak perlu mengakses dana APBD, karena khawatir akan mengganggu independensi, integritas dan justru dapat menjadi pemicu konflik di dalam organisasi, seperti yang umum terjadi di banyak organisasi atau forum warga sejenis. Dalam hal ini, FKKB ingin dapat mengambil peran mitra kritis bagi pemerintah daerah.

Kalau untuk FK kayaknya nggak. Biasanya komunitas-komunitas (yang) akses APBD... Sebagai warga kabupaten mereka kan juga berhak untuk akses itu... Tapi kalau FK kayaknya belum... (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Itu pernah jadi perdebatan ya pak... perdebatan di kita itu, ada kekhawatiran kalau kita dapat akses dari Pemda ini adalah masalah independensi. Itu yang menjadi... Seperti yang disampaikan tadi, meskipun kita sebagai mitra Pemda, tapi kita kan juga dalam posisi yang (bersikap) kritis ya. Karena faktanya, ketika kita di awal sudah berdarah-darah mengkritisi mereka gitu ya, itu banyak juga kawan-kawan yang menjadi lemah. Nah itu yang perdebatan di FK nya sendiri... (Setiawan-Koordinator Konsolidasi FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

4.2.9 Persepsi dan Relasi FKKB dengan KPUD

Di bagian sebelumnya telah diulas mengenai repson KPUD terhadap model FKKB khususnya yang berkenaan dengan dialog antara konstituen dengan calon Bupati/Wakil Bupati sebelum pelaksanaan Pemilukada. Baik KPUD Kabupaten

maupun Provinsi memberi tanggapan yang sangat positif, bahkan mendorong agar kegiatan serupa dapat dilakukan lebih sering, lebih massif, dan bahkan dapat ditiru atau direplikasi di daerah lain.

Forum Konstituen itu salah satu ikhtiar... Ya saya lihat sebagai salah satu proses pencerdasan politik kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa mengarah pada pemilih politik yang rasional... kalau saya sangat mendorong untuk dapat dilakukan itu... (Osin-Ketua KPUD Kabupaten Bandung; Wawancara; 31 Maret 2012)

Di FKKB sendiri, juga berkembang gagasan dan harapan agar model dialog konstituen ini dapat diperluas. Idealnya, model FKKB dapat diadopsi oleh pemerintah daerah dan khususnya KPUD sebagai model dialog dalam upaya pendidikan politik rakyat.

Cuma kalau pemerintah yang mengadakan, itukan bakal lebih luas... Harusnya semacam FK ini pemerintah yang mengadopsi, atau KPU lah... Modelnya diadopsi... Namanya mau FK atau apalah... Karena secara tidak langsung ini pencerdasan politik terhadap masyarakat... dari gencar-gencarnya partai politik yang nyawer gitu kan..., transaksional... Tapi kalau model seperti FK ini diadopsi oleh pemerintah, dalam hal ini KPU lah, mungkin akan bermanfaat, dan akan lebih baik karena ada dukungan resource... ada anggaranyalah kalau di pemerintah... Ya di FK sendiri memang belum jelas soal prinsip-prinsip kerjasama itu... Kalau menurut saya sih, kalau untuk kemajuan, untuk pencerdasan warga Kabupaten Bandung, ya kenapa nggak, gitu kan... Karena kalaupun itu dari KPU, anggarannya itukan uangnya rakyat... (Nanang-Peserta FKKB; Wawancara; 29 Maret 2012)

Kalaupun model dialog tersebut tidak dapat diadopsi dan dilaksanakan sendiri oleh KPUD, ada gagasan untuk menjadikannya sebagai program kerjasama antara FKKB dengan KPUD. Sumberdaya personil dan jaringan FKKB dan dengan pengalaman melaksanakan dialog konstituen dan kandidat dalam Pemilu sebelumnya, dapat dikolaborasikan dengan kekuatan jaringan dan pendanaan yang ada di KPUD.

Kalau ada lagi kegiatan macam FK kemarin itu mungkin lebih tepat kerjasama dengan KPUD ya... Itu akan lebih efektif ya... Legalitasnya juga lebih pas... Meskipun mereka punya jaringan sampai ke desa/kelurahan, tapi relasi mereka dengan masyarakat

kan kadung problem, dan kalau bisa dikolaborasikan dengan FK itu akan lebih efektif... Artinya KPUD berkolaborasi dengan masyarakat sipil dalam konteks penyelenggaraan FK, yang selama ini mereka juga bikin ya macam diskusi publik... Cuma dalam sensasinya kan kurang begitu kuat di masyarakat, pelibatan masyarakatnya juga terbatas... (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Hanya saja gagasan tersebut memang belum pernah didiskusikan secara serius di FKKB dan dibicarakan langsung dengan KPUD mengenai peluang dapat diadosinya model dialog tadi ataupun pola kerjasama antara kedua belah pihak.

Belum, karena kami juga belum masuk ke ranah itu... Karena kami dan rekan-rekan juga belum memperhitungkan apa sih yang bisa dimodifikasi dari ranah-ranah KPU itu... Tapi kalau yang kami lakukan waktu itu sih menurut kami lebih baik... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

4.2.10 Persepsi dan Relasi FKKB dengan Akademisi dan Perguruan Tinggi

Dalam pengkondisian awal FKKB, akademisi dari beberapa perguruan tinggi di Bandung juga dilibatkan untuk memperkaya proses diskusi diantara konstituen dan calon Bupati/Wakil Bupati.

Iya, intens itu... rame... Mangkanya kita bantu mereka dengan pakar kan... Jadi dalam penyusunan itu ada pakar... Asep Warlan, Dede Maryana... (Radhar-Ketua FAB; Wawancara; 4 April 2012)

Pelibatan akademisi tersebut juga merupakan langkah strategis untuk meyakinkan para calon Bupati/Wakil Bupati dan tim suksesnya untuk bersedia hadir dalam puncak acara dialog dengan konstituen di kampus IT Telkom.

Termasuk misalnya waktu pendekatan ke calon Bupati kan... Jadi ada dua perhatian utama kalau dari aku tuh... Pertama, bagaimana meyakinkan para calon Bupati untuk mau hadir... Kedua, bagaimana kita meyakinkan para tokoh mau berpartisipasi... Nah dua titik berat itu sebenarnya yang paling rentan... Kita sebenarnya kalau dalam rangka meyakinkan calon Bupati, kita melakukan berbagai cara, salah satunya kita melakukan pertemuan di Hotel Grand Pacific itu, disitu seluruh calon Bupati dan Wakil Bupati kita undang, termasuk KPU Jabar... termasuk wartawan... Di forum itu juga kita undang

pakar... intinya adalah untuk meyakinkan si calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir, bahwa KPU Jabar hadir, dan para professor hadir gitu ya... Pakarnya itu Budi Radjab, Dede Maryana... (Oky-Sekjend FAB; Wawancara; 24 Desember 2011)

Kampus (IT Telkom) dipilih sebagai lokasi puncak acara dialog konstituen dan calon Bupati/Wakil Bupati. Pertimbangannya adalah karena dipandang netral dan memiliki nuansa akademik sebagaimana spirit dialogis yang ingin dibangun dalam FKKB. Dalam hal ini, FKKB belum mencoba menindaklanjuti dialog dan kerjasama dengan aktor perguruan tinggi ini untuk mendukung kegiatan dan pengembangan FKKB selanjutnya.

Nah itu juga alasan kita memilih tempat... dari awal kita memilih kampus... Unpad tidak dipilih misalnya, karena itukan Kota Bandung, sementara kegiatan ini di Kabupaten Bandung... Kalau di Kota Bandung, meskipun akses kita mungkin lebih mudah, khawatir nanti pertanyaan orang... Nah itu terbukti jadi persoalan dari para tokoh... Tokoh ini tidak menyimak... Pada saat pertemuan para tokoh sebelum acara puncak itu dia protes, "Pilkada inikan di Kabupaten Bandung, kenapa acara dialog dengan calon di Kota Bandung...?". Ya lalu kita bilang, "Coba tolong dilihat lagi Pak di brosur dan undangan... itu acaranya nanti di Telkom, di Baleendah...". Kata dia, "Oh iya ya, maaf, saya kurang perhatikan...". Nah jadi itu imajinasi, kita sudahantisipasi... Kenapa kampus? Karena itu posisinya netral gitu ya... (Oky)

Peran perguruan tinggi memang sangat penting dalam mendukung tumbuhnya demokrasi yang sehat di suatu negara. Sebagai komunitas yang beruntung dapat mengenyam pendidikan tinggi, di mana kebebasan akademik telah memberi privilege yang sangat besar untuk menggali, mendiskusikan dan mengkritisi berbagai gagasan, para akademisi tentunya diharapkan juga dapat berperan membantu menyediakan alternatif-alternatif metode dan cara penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat. Bahkan, mengutip William Rainer Harper (1989), universitas adalah 'Nabi' sekaligus 'Messiah' bagi demokrasi.¹¹⁹

¹¹⁹ Kutipan lengkapnya sebagai berikut: "Democracy has been given a mission to the world, and it is of no uncertain character. I wish to show that the university is the prophet of this democracy, as well as its priest and its philosopher; that in other words, the university is the Messiah of the democracy, its to-be-expected deliverer" (William Rainey Harper, *The University and Democracy*, 1899). Lihat Benson dan Harkavy, "The role of community higher education-school partnership

Tidak mengherankan jika berbagai gerakan sosial, perjuangan kemerdekaan, aksi kolektif peduli lingkungan, gerakan reformasi, oposisi anti perang, dan lainnya banyak dimotori oleh kalangan akademisi dan lulusan/jebolan dari perguruan tinggi.

Jika dikaitkan dengan teori Habermas mengenai *public sphere*, peran kaum terdidik dan perguruan tinggi memang sangat relevan. Secara historis Habermas merujuk pada kultur dialogis kaum borjuis di abad 19 khususnya di Eropa yang banyak melakukan diskusi bermacam masalah publik di *café-café* dan tempat publik lainnya.¹²⁰ Kritik yang dilontarkan banyak kalangan terhadap konsep diskursus dari Habermas khususnya mengenai ‘situasi bicara ideal’ dan ‘kompetensi komunikasi’ yang dinilai sulit diterapkan oleh masyarakat kebanyakan, di sisi lain juga juga dapat dipandang sebagai suatu penegasan bahwa komunitas akademislah yang paling banyak berpeluang dan relatif lebih memiliki kompetensi untuk mengembangkan dialog yang inklusif, setara dan argumentatif sebagaimana diinginkan Habermas. Perguruan tinggi memberi kesempatan untuk pengembangan model pembelajaran orang dewasa (*adult learning*) yang diperlukan dalam pengembangan rasionalitas, *communicative action* dan *discursive democracy*.¹²¹

Dari perspektif tadi, sangat dapat dipahami ketika kritik selanjutnya justru berbalik pada komunitas akademis itu sendiri. Komunitas akademis khususnya di perguruan tinggi belakangan dituding lebih banyak asik dengan intelektualitasnya sendiri dan sedikit sekali terhubung dengan persoalan nyata di masyarakat.¹²² Dalam pandangan peneliti, ‘Sangkar Besi Akademisi’ ini tidak lebih berbahaya dari ‘Sangkar Besi Birokrasi’-nya Weber. Bahkan pada sebagian akademisi, kedua ‘Sangkar’ tersebut saling berhimpitan, mengingat banyak diantaranya mereka yang kemudian juga terjebak pada kerja-kerja administrasi/birokrasi kampus

in educational and societal development and democratization”, on *Universities and Community School*, Volume 7, Number 1-2 Fall-Winter 2002.

¹²⁰ Habermas, 1998b; 2007.

¹²¹ Diantaranya lihat Fleming, “*The university and democracy: Habermas, adult learning and learning society*”. Sumber: <http://eprints.nuim.ie/1055/>, diakses 24 Juni 2012.

¹²² Diantaranya lihat KOMPAS, 2 Februari 2010, “Perguruan Tinggi Harus Keluar dari ‘Menara Gading’ “. Sumber: <http://edukasi.kompas.com/read/2010/02/02/1720527/Perguruan.Tinggi.Harus.Keluar.dari.Menara.Gading>, diakses 24 Juni 2012.

daripada melakukan kegiatan akademis yang menjadi fungsi pokoknya. Lebih jauh, jika perguruan tinggi juga ingin diposisikan sebagai *public sphere*, maka dia harus juga bersikap terbuka, setara dan (dalam pandangan peneliti) ‘menyesuaikan diri’ dengan kapasitas argumentatif yang beragam. Kalaupun tidak memungkinkan di dalam kampus, maka perguruan tinggi dapat berperan memproduksi *public sphere* tersebut di lingkungan atau komunitas sekitarnya. Namun tentu saja diperlukan upaya membangun kontak dan interaksi yang cukup mendalam dengan kekuatan atau kelompok *civil society* yang ada, karena merekalah yang secara langsung dan intensif berhubungan dengan warga/konstituen dan pemerintahan di daerah, sehingga dapat terbangun kolaborasi teori dan praktik (praksis) seperti yang dibayangkan Habermas dan para teoritis perubahan sosial lainnya. Karena, bagaimanapun sebuah *public sphere* jelas membutuhkan adanya publik. *There can be no public sphere without a public* (Habermas, 1998a:364).

Dalam konteks FKKB, perbedaan respon kalangan terdidik terhadap pengembangan gagasan dan kegiatan FKKB juga terlihat. Meskipun sejumlah akademisi telah dilibatkan sejak awal, dan meskipun puncak kegiatan dialog konstituen dan calon Bupati/Wakil Bupati dilakukan di lingkungan kampus, namun peneliti tidak melihat adanya minat atau antusiasme untuk mengetahui atau terlibat lebih jauh dengan FKKB. Di sisi lain, pentingnya peran kalangan terdidik dalam merancang, menyiapkan dan menggerakkan organisasi *civil society* semacam FKKB sangat terlihat jelas. FAB dan FDA sebagai dua aktor utama dari dibentuknya FKKB sebagian besar anggota atau pesertanya adalah mereka yang pernah mengenyam pendidikan tinggi. Dan tidak dapat dipungkiri, kapasitas analisa dan komunikasi mereka secara umum juga lebih baik dibandingkan warga kebanyakan yang menjadi peserta FKKB itu sendiri.

4.2.11 Persepsi dan Relasi FKKB dengan Lembaga Donor

FKKB sebagai sebuah program diinisiasi dari kerjasama FAB dan TIFA (donor), yang selanjutnya FAB dan kelompok aktivis Kabupaten Bandung menggarap bersama persiapan dan pelaksanaan dialog konstituen dan calon Bupati/Wakil

Bupati. Pasca Pemilukada, FKKB (yang telah bertransformasi menjadi sebuah kelompok atau lembaga) bersama FAB pernah menyiapkan proposal ke TIFA untuk mendukung kegiatan FKKB selanjutnya, meskipun kemudian ternyata belum dapat didukung pendanaanya oleh TIFA.

Dari situasi tersebut tergambar bahwa pada dasarnya FKBB cukup terbuka untuk bekerjasama dalam hal dukungan pendanaan kegiatan dengan lembaga lain diluar pemerintahan daerah. Selain itu, ada keinginan agar FKKB dapat langsung bekerjasama dengan donor, meskipun karena alasan administrasi mungkin memerlukan dukungan lembaga lain di kabupaten yang selama ini memiliki hubungan dekat dengan FKKB, seperti FDA atau PSDK.

Daripada dari TIFA, ke NGO, terus kita jadi pihak ketiganya... Nah yang jadi lemahnya itu kita itu jadi pihak ketiga... Tapi kalau TIFA langsung ke orang kabupatennya, mungkin bisa lebih optimal untuk mengembangkan program FK itu... (Nanang-Peserta FKKB; Wawancara; 29 Maret 2012)

Boks 5: Peran Donor dan Peluang Keberlanjutan FKKB

Menurut Nath dan Sobhee (2007:1), yang mengacu pada hasil penelitian McKinlay dan Little (1979), Maizels dan Nissanke (1984), Trumbull dan Wall (1994), dan Gounder (1999), donor memiliki beragam motivasi dalam kaitan dengan kepentingan internal donor dan kebutuhan penerima bantuan. Kecuali pada bantuan yang berbasis altruisme, kebutuhan penerima bantuan tetap harus sesuai dengan kriteria yang memuaskan kepentingan negara atau lembaga donor. Apa yang menjadi kepentingan donor? Meskipun dikemas dalam beragam isu atau agenda, seperti isu demokratisasi dan *good governance* (seperti transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, anti korupsi, *representativeness*, dll.), lingkungan hidup (seperti *global warming*), pengurangan kemiskinan dan sosial lainnya (seperti peningkatan pendapatan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, dll.), menurut para ahli di atas, pertimbangan (*considerations*) utama dari donor sesungguhnya akan selalu berkaitan dengan kepentingan ekonomi politik, yaitu upaya meningkatkan perdagangan (*trade*), investasi (*investment*), dan keamanan (*security*) dari lembaga atau negara pemberi donor.

Berkaitan dengan hal tersebut, de Valk (2010:5-6), mendefinisikan bantuan (*aid*) sebagai sebuah multi-level relasi sosial, kultural dan ekonomi yang tidak seimbang antara pihak-pihak yang terlibat, dalam pertukaran dua arah yang asimetris dalam hal sumberdaya, keuntungan, nilai dan perasaan. Mengutip pandangan Clegg (1989), *aid* selalu berhubungan dengan *power relation*: "*the aid-relationship is a power relationship*". Menurut Lukes (1974), ada tiga dimensi atau *levels of power* dalam *aid-relationships*, yaitu: (a) Kekuasaan atas sumber daya, baik sumberdaya manusia ataupun material; (b) Kekuatan dalam membentuk dan memelihara struktur, di mana struktur dan lembaga bantuan internasional sebagian besar dikendalikan oleh lembaga donor; dan (c) Kekuatan untuk membentuk wacana dominan, yang didalamnya termasuk perubahan dalam wacana

bantuan, termasuk laporan organisasi bantuan dan individu, yang diperkenalkan oleh lembaga donor, evaluator dan akademisi mendukung. Termasuk didalamnya teori-teori pembangunan, metodologi perencanaan dan evaluasi, dan internalisasi individual akan wacana pembangunan yang semuanya merujuk pada perspektif Barat (Rist, 1999; Cooke dan Kothari, 2001; Dale, 2003; Gasper, 2000, Crewe and Harrison, 1998).

Pada dekade 1980-an donor mulai banyak berinteraksi dengan NGO di negara-negara dunia ketiga. Selanjutnya di awal 1990-an, donor mulai banyak mendukung pengembangan potensi politik NGO di berbagai negara tersebut Politik dimaknai dalam 2 sifatnya, yaitu: (a) Proses pengambilan keputusan mengenai alokasi sumberdaya, di mana terjadi pertarungan terus menerus antar kelompok-kelompok yang berbeda dalam memperebutkan sumberdaya tersebut; (b) Proses di mana pemaknaan sosial dan identitas dibentuk melalui ideologi, relasi kultural dan ritual simbolik (Clarke, 1998:5-6). Menurut Clarke, untuk menjadi 'politik', maka NGO harus: (a) Berpartisipasi dalam proses yang dirancang untuk menciptakan makna sosial dan upaya untuk melekat sebagai kelompok atau kelompok terkait dengan pemaknaan sosial tersebut; dan (b) Atas dasar pemaknaan sosial bersama tadi, NGO berpartisipasi dalam distribusi sumber daya dan dalam perjuangan untuk mempengaruhi distribusi tersebut. Ada dua tingkat keterlibatan politik NGO, yaitu: (a) Aktif dalam upaya mempengaruhi distribusi sumber daya dalam konteks makna sosial tertentu (ideologi), di mana hal ini terkait dengan *political engagement*; dan (b) Aktif dalam mempengaruhi makna sosial dan untuk membantu kohesi kelompok-kelompok sosial (Clarke, 1998:6)

Di Amerika Serikat (dan negara-negara Eropa) pendanaan NGO banyak disokong dan bergantung dari sumbangan negara dan simpatisan, di mana beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pendanaan dari negara tersebut dapat meningkatkan atau justru menekan aktivitas politik NGO (Chaves, Stephens, dan Galaskiewicz, 2004:293 dan 313). Namun di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, NGO/CSO justru banyak disokong pendanaannya oleh lembaga donor asing (*overseas donor agencies*), baik secara langsung, melalui perwakilan donor asing di dalam negeri, ataupun donor lokal yang umumnya berafiliasi atau sebagai penyalur bantuan dari negara atau lembaga donor asing. Menurut peneliti, terbatasnya kapasitas keuangan dan kesungguhan negara untuk mendukung *civil society* yang kuat, kemiskinan dan tidak kuatnya budaya *charity* atau *philanthropy* mempengaruhi kondisi tersebut.

Relasi donor dan penerima bantuan sangat beragam, karena terkait dengan bagaimana *power relation* yang terbangun diantara kedua pihak. Gaventa (2006:29) mengutip analisa dari VeneKlasen dan Miller (2002) yang membagi *power* dalam tiga bentuknya, yaitu: (a) *Visible power*, yang dapat dilihat secara fisik dari orang atau lembaga atau struktur organisasi yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pengambilan keputusan; (b) *Hidden power*, yaitu orang atau lembaga tertentu yang memiliki pengaruh dan/atau menentukan siapa yang dapat terlibat dalam pengambilan keputusan dan apa agenda yang akan dibahas; dan (c) *Invisible power*, yaitu *power* yang bersifat psikologis dan ideologis, yang mempengaruhi pikiran dan kesadaran (*mind and consciousness*) mengenai cara pandang terhadap dunia, persoalan, posisi diri, relasi dengan pihak lain, jalan perubahan, dan lainnya.¹²³ Kapasitas NGO/CSO dalam membangun kerangka dan strategi

¹²³ Menurut peneliti, ketiga bentuk *power* tadi juga dapat digunakan dalam analisa mengenai hubungan antar aktor dalam sebuah kelompok atau organisasi. Dalam konteks FKKB, dengan bentuk kelembagaan dan kepengurusannya yang 'cair', *visible power* sulit terlihat dalam struktur organisasinya. Namun, terkait dengan adanya kecenderungan sebagian pegiat atau pesertanya yang memiliki pengaruh untuk mengarahkan agenda dan aktivitas FKB, menunjukkan adanya *hidden*

gerakannya sendiri, menentukan agenda dan membangun kerjasama yang setara dengan pihak lain khususnya donor sangatlah beragam, pada akhirnya akan dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan NGO/CSO terhadap pendanaan dari donor, dan pengaruh politik yang dapat diperolehnya dari kedekatan tersebut. Sorj (2005:3) menyebut NGO/CSO yang menggantungkan pendanaan dan agenda sosial-politiknya dari donor sebagai *'dependent CSO'*.

Jika situasi tersebut dilihat dari perspektif Habermas, idealnya tentu saja diharapkan dapat terjadi proses diskursus yang setara dan argumentatif antara pemberi dan penerima donor dalam menentukan pendekatan perubahan sosial, agenda, dan kegiatan. Tindakan komunikatif mengambil peran ketika para pihak yang terlibat dapat mengharmonisasikan kepentingan bersama.

"...when actors are prepared to harmonize their plans of actions through internal means, committing themselves to pursuing their goals only on the condition of agreement about the definitions of the situation and the prospective outcomes" (Habermas, 1995:134).

Namun jika mangacu pada pandangan Clegg (1989) di atas, pada prakteknya diskursus antara pemberi dan penerima donor tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Sejak awal sudah terbangun posisi yang tidak setara dalam hal kesenjangan akses sumberdaya (pengetahuan, konsep, manajemen/administrasi, dan tentu saja pendanaan) diantara kedua belah pihak. Hal tersebut juga dipengaruhi karakteristik atau *'behavior'* dari masing-masing donor yang juga cenderung berbeda, dalam membuka ruang dialog yang dapat mempertemukan kepentingan pemberi dan penerima donor. Bagi donor yang kaku dan *'saklek'* dengan pendekatan dan agendanya, relasi yang terbangun adalah *'take it or leave it'*, di mana donor hanya akan memberi bantuan pada calon penerima donor yang bersedia sepenuhnya mengikuti aturan main yang sudah ditetapkannya. Sebaliknya, bagi NGO/CSO yang menggantungkan sepenuhnya pendanaan dan pengaruhnya dari hubungannya dengan donor, relasinya adalah *'apapun yang lu jual gua beli'*, dalam arti NGO/CSO tersebut hanya akan mengikuti saja semua agenda dan mekanisme yang ditetapkan oleh donor. Situasinya kembali pada kritik Habermas mengenai *'kolonisasi kehidupan'* (*colonization of the life-world*) sebagai akibat pengaruh dan tekanan uang dan kekuasaan (*power*).

Dari perspektif tersebut, peneliti membedakan tipe-tipe forum warga, NGO dan CSO terkait dengan siapa aktor yang menjadi pendorong utama muncul dan bertahannya (*sustainability*) dari institusi masyarakat tersebut, yaitu: (a) warga/komunitas itu sendiri (*community or civil society driven*); (b) para aktivis (*activist/intellectual driven*); (c) negara/pemerintah (*state/government driven*); dan (d) negara/lembaga donor (*donor agency driven*). Dalam konteks FKKB, menurut peneliti, *activist/intellectual driven* menjadi faktor utama, diikuti oleh *community driven*, meskipun belum optimal. Sementara *donor driven* dapat dikatakan penting tapi tidak menentukan. Sehingga, jika diajukan pertanyaan: *"Apakah FKKB dapat bertahan dan berkembang tanpa dukungan donor?"*, peneliti cenderung berpendapat hal tersebut mungkin untuk dilakukan, sejauh ada upaya sungguh-sungguh dalam mengoptimalkan kapasitas kelompok dan jaringan *civil society* yang ada di Kabupaten Bandung.

power tadi, yang sampai tingkat tertentu mungkin juga dipengaruhi oleh adanya *invisible power* dari sebagian kecil pegiatnya yang *'dituakan'* atau dianggap pemimpin informal.

4.2.12 Ikhtisar Analisa Mengenai Relasi FKKB dengan Aktor Demokrasi Lainnya

Dari hasil analisa tadi, temuan-temuan utama terkait dengan relasi FKKB dengan aktor-aktor demokrasi lainnya, dapat disarikan sebagai berikut:

Tabel 4.3: Ikhtisar Analisa Mengenai Posisi dan Relasi FKKB dengan Aktor-aktor Demokrasi Lain

Aktor Demokrasi	Posisi dan Relasi FKKB	Catatan Peneliti
FAB	<ul style="list-style-type: none"> • FAB dipandang sebagai inisiator dan fasilitator awal. • Gagasan FAB sejalan dengan gagasan komunitas aktivis di Kabupaten Bandung. • Selanjutnya FAB dapat ditempatkan sebagai mitra diskusi dan jaringan pendukung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peran aktor eksternal sangat besar di awal pengembangan gagasan FKKB, meskipun peran kelompok <i>civil society</i> di Kabupaten Bandung juga sudah memiliki gagasan yang kurang lebih sejalan dengan itu, dan lebih banyak berperan dalam implementasi dan institusionalisasi gagasan tersebut.
Konstituen	<ul style="list-style-type: none"> • Kepesertaan inti FKKB adalah jaringan Forum Diskusi Anggaran (FDA) dan Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK). • Peserta FKKB yang bertahan sebagian besar dari kedua jaringan tersebut. • Ada harapan agar lebih banyak aktivis diluar jaringan FDA dan PSDK yang terlibat. • Ada keinginan memperluas kepesertaan FKKB. • Ada semangat membangun kultur egaliter dan solidaritas diantara peserta FKKB. • Meskipun bersifat plural, dorongan untuk membangun harmoni dan identitas bersama di internal FKKB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya ‘tim inti’ dalam pengembangan institusi jaringan semacam FKKB sangat penting. • Meskipun perlu dipikirkan bagaimana menjaga komunikasi dan keterlibatan jaringan yang lebih luas dan telah turut terlibat di dalam kelompok atau institusi tersebut.
Jaringan <i>civil society</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ada keinginan membangun ‘blok politik baru’ di Baleendah sebagai pengimbang NGO/CSO yang dekat dengan pemerintah daerah di Soreang. • Diluar jaringan yang sudah 	<ul style="list-style-type: none"> • Gagasan untuk membangun jaringan <i>civil society</i> yang dapat menjadi ‘kekuatan pengimbang’, harus ditindaklanjuti dengan upaya serius membangun jaringan

Aktor Demokrasi	Posisi dan Relasi FKKB	Catatan Peneliti
	terbangun, FKKB kurang berinteraksi dengan kelompok <i>civil society</i> lainnya.	tersebut. <ul style="list-style-type: none"> • FKKB perlu mengambil inisiatif dan peran untuk mulai membangun interaksi, komunikasi dan kolaborasi dengan jaringan-jaringan lainnya yang lebih luas.
Media	<ul style="list-style-type: none"> • Akses dan pemanfaatan media massa sebagai alat penyebarluasan gagasan dan kegiatan FKKB serta mendorong terbangunnya opini publik masih terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Media merupakan jenis <i>public sphere</i> yang disebut Habermas sebagai ‘publisitas’, dan dalam teori politik kerap dianggap sebagai pilar keempat demokrasi, meskipun belakangan banyak dikritisi karena kekuatan korporasi media lebih banyak menyuarakan opini kelompok atau pemilik media dibandingkan membangun opini publik sebagaimana peran yang mestinya diemban media massa. • Peran media massa sangat penting dalam mensosialisasikan gagasan dan kegiatan FKKB. • Untuk membangun opini tentang keberadaan dan peran FKKB, maka FKKB perlu terlibat dalam kegiatan-kegiatan <i>civil society</i> lainnya, atau dilekatkan dengan kegiatan lembaga lain yang ada jaringan FKKB.
Kontestan Pemilukada	<ul style="list-style-type: none"> • Dari pengalaman FKKB, dialog antara konstituen dan calon Bupati/Wakil Bupati dapat dipandang sangat strategis untuk membangun kontak awal dengan politisi sebelum Pemilukada, sehingga dapat terbangun akses politik dengan Bupati/ Wakil Bupati terpilih pasca Pemilukada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Para mantan calon Bupati/Wakil Bupati yang kalah dalam Pemilukada (beserta jaringannya) tetap dapat dijajaki menjadi bagian dari jaringan informasi dalam memperkuat pengawasan terhadap Bupati/Wakil Bupati terpilih.
Partai Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Para aktivis di FKKB umumnya memiliki sentimen negatif (<i>distrust</i>) terhadap partai politik, karena dianggap gagal menjalankan peran dan kewajiban politiknya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Partai politik (seharusnya) berperan besar dalam melakukan pendidikan politik, rekrutmen politik dan artikulasi aspirasi politik. FKKB dapat mengembangkan dialog

Aktor Demokrasi	Posisi dan Relasi FKKB	Catatan Peneliti
	<ul style="list-style-type: none"> • Dibentuknya FKKB dipandang sebagai antitesis atau media alternatif mengartikulasikan aspirasi kepada pemerintah daerah. • Namun persepsi tersebut bukan dalam sikap ‘anti partai politik’, namun lebih pada ‘kritis terhadap partai politik’, karena pada dasarnya mereka mengharapkan adanya peran positif dari partai politik. 	<p>dengan semua partai terkait dengan proses rekrutmen elit politik di daerah, misalnya mengenai kriteria calon, model kampanye politik dan Pemilu yang dialogis, dan lainnya.</p>
DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakpuasan terhadap politisi, partai politik dan DPRD menjadi faktor pendorong dibentuknya FKKB. • FKKB belum menjadikan DPRD sebagai target interaksi, karena sebelumnya dipandang akan memberatkan jika pada saat bersamaan ‘mengawal’ pemerintah daerah dan DPRD. • Namun sudah ada orientasi ke depan bahwa interaksi dengan DPRD adalah sebuah keniscayaan dalam arena politik di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • DPRD memiliki peran penting terkait fungsi anggaran, pengawasan pemerintah dan memperjuangkan aspirasi warga yang sangat penting dicermati oleh FKKB. • Selama ini tidak ada mekanisme pertanggungjawaban institusi dan anggota DPR/DPRD khususnya kepada publik dan konstituennya (<i>legislative accountability</i>). • ‘Pemberdayaan’ institusi dan anggota DPRD sangat penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi representatif yang sebelumnya dikritisi oleh FKKB. • FKKB perlu mendorong institusi dan anggota DPRD untuk membangun mekanisme yang memudahkan konstituen dapat bertemu dan berdialog (<i>constituency meetings</i>). Selain itu perlu didorong adanya mekanisme akuntabilitas anggota dan kelembagaan kepada konstituennya dan warga secara umum. • Di sisi lain, pemberdayaan warga atau konstituen sehingga mampu berinteraksi secara sehat dengan anggota dan institusi DPRD juga tidak terhindarkan, sehingga dapat mengurangi relasi transaksional pragmatis yang

Aktor Demokrasi	Posisi dan Relasi FKKB	Catatan Peneliti
		<p>dipandang sebagai persoalan saat ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk menjaga independensi dan integritas, FKKB perlu membangun relasi yang sama terhadap semua anggota DPRD dari seluruh partai politik yang ada.
Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah dipandang sebagai pihak yang harus diawasi, dikritisi dan dipengaruhi . • Strategi yang digunakan adalah dengan membangun dialog dan kemitraan ktiris dengan pemerintah daerah. • FKKB menghindari opsi untuk memperoleh dukungan logistik dari pemerintah daerah karena ingin menjaga integritas dan independensi, meskipun dengan tingkat interaksi saat ini hal tersebut tampaknya sangat dimungkinkan. • Pemerintah daerah membuka ruang pada FKKB untuk dapat terlibat lebih banyak dan aktif memberikan kritik dan rekomendasi mengenai masalah pembangunan di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • FKKB jangan terjebak hanya sebagai ‘watchdog’ tapi harus mampu meningkatkan proses demokratisasi di daerah, dengan mendorong perubahan orientasi dan proses pengambilan keputusan kebijakan publik di daerah. • Keterbatasan sumberdaya di FKKB membuat peluang tadi belum dapat direspon secara optimal. • FKKB harus berupaya menggalang dukungan logistik untuk mengefektifkan peran dan kegiatannya, misalkan dengan menjalin kerjasama dengan NGO/CSO lain atau lembaga donor.
KPUD	<ul style="list-style-type: none"> • KPUD dipandang sebagai pihak yang memiliki otoritas formal terkait Pemilu/ Pemilukada di daerah. • Sejauh ini KPUD merespon positif model pendidikan politik warga melalui dialog konstituen dan para politisi dan bahkan partai politik sebelum Pemilukada. • FKKB berharap model yang dikembangkannya dapat diadopsi atau minimal dapat dikerjasamakan dengan KPUD. 	<ul style="list-style-type: none"> • Interaksi dengan KPUD dapat mulai dibangun kembali sejak sekarang, misalkan melalui diskusi-diskusi kecil mengenai evaluasi dan pengembangan pola-pola kampanye nanti, sembari menjajaki peluang kerjasama yang dimungkinkan pada momentum Pemilukada 2015 nanti.
Akademisi dan Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Akademisi cukup banyak terlibat pada persiapan awal kegiatan dialog konstituen dan calon Bupati/Wakil Bupati. • Lokasi dialog konstituen dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Akademisi dan kampus terlihat kurang antusias untuk terlibat lebih banyak dalam praktik FKKB. • Secara teoritik, kalangan

Aktor Demokrasi	Posisi dan Relasi FKKB	Catatan Peneliti
	<p>calon Bupati/Wakil Bupati dilakukan di lingkungan kampus karena dianggap netral dan dapat membangun nuansa akademik.</p>	<p>akademik dan lingkungan perguruan tinggi memiliki potensi besar dalam mendorong demokratisasi. Ditinjau dari perspektif Habermas, mereka memiliki kompetensi yang lebih besar dalam melakukan diskursus yang inklusif, setara dan argumentatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kalangan akademisi dan perguruan berpeluang dapat berperan lebih besar mendorong tumbuhnya <i>public sphere</i> setidaknya di lingkungan atau komunitas sekitar kampus. Tentunya dengan terlebih dahulu membangun kontak dan interaksi yang cukup mendalam dengan kekuatan atau kelompok <i>civil society</i> yang ada, sehingga dapat terbangun praksis bersama.
Donor	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan donor dipandang masih diperlukan untuk membantu konsolidasi dan kegiatan-kegiatan yang relatif besar. • Kerjasama FKKB dengan donor dapat menggunakan lembaga lain, baik FAB maupun PSDK. 	<ul style="list-style-type: none"> • FKKB dapat bertahan tanpa dukungan donor. Namun tampaknya masih sulit menghindari ketergantungan dukungan donor untuk kegiatan yang cukup besar.

4.3 Model Kelembagaan Partisipasi Politik yang Dikonstruksikan dan Dipromosikan oleh FKKB

4.3.1 Kepesertaan di FKKB¹²⁴

Para pegiat FKKB memaknai konstituen sebagai warga Kabupaten Bandung yang pada prinsipnya dipandang memiliki hak pilih dalam Pemilu dan Pemilukada, dan

¹²⁴ Peneliti memilih menggunakan istilah 'kepesertaan' dan bukan 'keanggotaan', karena pada awalnya warga atau konstituen di FKKB terlibat hanya sebagai peserta dalam kegiatan dialog konstituen dan kontestan Pemilukada. Selain itu, karena sifat kelembagaan FKKB yang 'cair', maka status 'keanggotaan'-nyapun tidak setegas sebagaimana lazimnya organisasi yang formal lainnya.

berarti pula memiliki hak untuk terlibat aktif dalam proses perumusan kebijakan publik dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Kan kalau secara prinsip, bahwa semua orang yang punya hak pilih itu adalah konstituen. Secara filosofi, saya pikir semua orang itu adalah konstituen kan, dan seharusnya semua orang yang telah memilih itu punya tanggung jawab bagaimana dia mengingatkan orang yang sudah dipilihnya, siapapun dia orangnya... (Setiawan-Koordinator Konsolidasi FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Menurut saya konstituen itu... Saya ini orang Kabupaten Bandung... Disini ada pemerintahan, nah saya diposisikan sebagai konstituen, untuk mengaspirasikan... memonitoringlah kalau bisa... pemerintahan di Kabupaten Bandung. Karena saya persepsinya seperti itu, maka saya harus terlibat... Jadi nggak ada batasan dia dari mana dari mana... Asalkan dia punya hak... punya kepedulian ke Kabupaten Bandung... Itu persepsi saya... kenapa kita perlu ikut Forum Konstituen ya... (Nanang-Peserta FKKB; Wawancara; 29 Maret 2012)

Terkait dengan pemaknaan konstituen tersebut, FKKB kemudian dipandang perlu dikembangkan dari hanya nama sebuah kegiatan dialog antara konstituen dengan calon Bupati/Wakil Bupati, menjadi sebuah wadah atau ruang konsolidasi konstituen dalam mendiskusikan dan mendialogkan persoalan-persoalan yang ada di daerah, baik diantara konstituen sendiri maupun dengan pihak lain, khususnya pemerintah daerah (lihat Gambar 4.1: Institusionalisasi FKKB). Pada tahap awal persiapan dialog, yang terlibat hanyalah para aktivis Kabupaten Bandung khususnya yang ada di FDA dan PSDK. Merekalah yang kemudian terlibat aktif dalam melakukan *assessment* (pemetaan) masalah dan tokoh komunitas (*credible source*) yang akan dilibatkan dalam dialog dengan calon Bupati/Wakil Bupati.

Jadi mengenai siapa anggota FK, mulai dari assessment itu kan dengan metode bola salju saja... Bagaimana rekrutmen di awal seperti bola salju... Misalkan di awal kan hanya para assessor ya, yang harus melakukan assessment masalah dan mengidentifikasi tokoh potensial... eh bukan tokoh, tapi orang yang dianggap sebagai komunikator bagi komunitasnya kemudian... di pelosok-pelosok. Kemudian mereka yang mengajak tokoh dan daftar permasalahannya itu ke dalam FGD... (untuk) menginventarisir masalah tadi sehingga menjadi bisa lebih sistematis. Ini kan proses yang kemudian menjadikan bertambah terus pegiat FK ini. Sampai kemudian mencapai puncaknya di event di IT Telkom... (Tarum-

Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; FGD; 19 April 2012)

Kita pilih mereka yang sudah memiliki kesadaran politik yang baik. Ya dari aktivis-aktivis LSM, aktivis komunitas, ormas... Jadi mereka yang sudah terbukti melakukan atau memiliki kesadaran politik itu. Nah ini jumlahnya memang tidak banyak, tidak mungkin banyak ya... Tapi kita harapkan mereka akan menjadi promotor untuk gagasan ini... Mereka akan menjadi simpul untuk membuka komunikasi dengan masyarakat. Jadi Forum Konstituen itu memang akhirnya bukan seluruh pemilih, tapi simpul-simpul dalam komunitas atau tokoh masyarakat... bisa Ketua RT, RW, bisa pengurus mesjid, semacam itu... (Oky-Sekjen FAB; Wawancara; 24 Desember 2011)

Dalam gagasan awal, *credible source* ingin dilibatkan adalah yang independen dalam arti bukan anggota partai, meskipun ada kemungkinan --yang tentunya sulit untuk dipastikan-- mereka sudah memiliki preferensi pada calon-calon tertentu.

Saya memang sengaja mencari yang independen, sebab kalau waktu itu Forum Konstituen pesertanya dari anggota partai yang sudah punya calon, maka prosesnya akan bias, gitu lho... jadi kriteria yang dibangun, lalu bagaimana mem-valuasi kriteria itu ini aka dipengaruhi oleh preferensi justru dari pengurusnya sendiri... itu justru yang kita hindari... Jadi kalau itu yang terjadi maka akan ada systematic bias... (Radhar-Ketua FAB; Wawancara; 4 April 2012)

Hasil 'rekrutmen' *credible source* tersebut kemudian menghasilkan komposisi peserta dialog yang sangat plural dilihat dari aspek gender, usia, kondisi sosial ekonomi, organisasi, isu dan wilayah. Meskipun perlu ditekankan bahwa aspek gender, usia, dan kondisi sosial ekonomi tidak menjadi pertimbangan utama dalam proses rekrutmen tadi.

Itulah, di FK ini komplit lho... ada anggarannya, kebencanaannya, lingkungan hidupnya... Masing-masing punya kompetensinya sendiri... Nah mangkanya Forum Konstituen ini terbentuk dari semua elemen... Berbicara soal tukang becak, ada lho di FK... Jadi itulah keunggulan FK... (Tedi-Peserta FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Dari proses tersebut terlihat bahwa warga yang terlibat dalam forum dialog FKKB merupakan individu-individu yang aktif di komunitas atau organisasi-organisasi

berbasis isu atau sektoral, dipandang memiliki pemahaman dan ketertarikan pada kegiatan politik, dan bersedia ikut dalam proses dialog tersebut. Kepesertaan mereka dalam forum dialog kemudian memang menjadi bersifat individual dan tidak mengatasnamakan lembaganya masing-masing, namun dipandang dapat mewakili beragam isu dan/atau wilayah di Kabupaten Bandung.

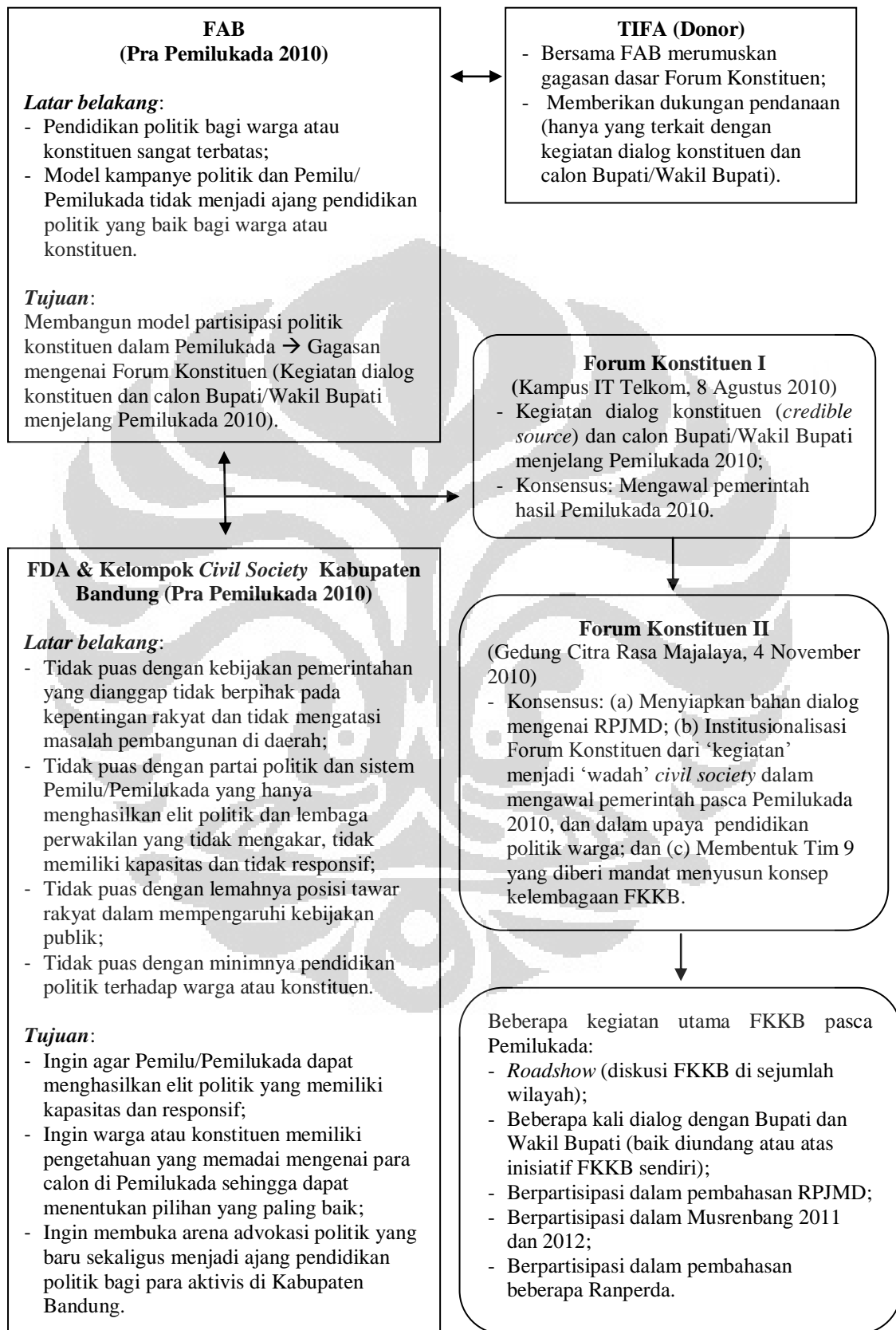
Jadi keanggotaan FK ini individu, tidak mengatasnamakan organisasi. (Untuk selanjutnya) Secara kesepakatan tidak tertulis, siapapun bisa terlibat dalam Forum Konstituen. Karena kita yakin orang-orang yang mau terlibat dalam Forum Konstituen memang mereka yang punya kecenderungan lain di Kabupaten Bandung... (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; FGD; 19 April 2012)

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pada tahap awal ini kepesertaan warga atau konstituen adalah bersifat plural (beragam), namun tidak sepenuhnya inklusif, karena pesertanya ‘dipilih’ dan dibatasi jumlahnya. Singkatnya, meskipun ada semacam kesepahaman di awal bahwa forum dialog FKKB tersebut bersifat terbuka bagi semua warga atau konstituen di Kabupaten Bandung, namun pada praktiknya tidak atau belum bersifat terbuka.

Mereka yang terlibat dalam FKKB juga dapat dikatakan merupakan gabungan dari anggota masyarakat yang status sosial dan ekonominya beragam. Sebagian peserta FKKB memang berasal dari kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi (SMA dan perguruan tinggi), namun lebih banyak diantara mereka yang tingkat pendidikannya rendah. Sebagian kecil dapat dikatakan termasuk kelompok elit lokal (kepala desa, pengurus pondok pesantren, ketua serikat buruh atau kelompok tani), namun banyak pula yang berasal dari kelompok marginal (seperti kelompok tukang ojek, penarik becak, pedagang kaki lima, komunitas korban bencana, pengangguran, dan lainnya).¹²⁵

¹²⁵ Peserta FKKB bersifat individu (bukan lembaga atau bukan perwakilan lembaga) dari beragam latar belakang organisasi, seperti: Paguyuban Becak Majalaya; Ojeg Cicalengka; Baraya Bandung Cinta Citarum (korban banjir); Golongan Miskin (GOMIS); FDA; PSDK; Baraya Tani; Karang Taruna; Perangkat Desa; ASGITA; PASEBAN; MPLH Godong Sewu; TKA Miftahul Hasanah; KOMPEPAR; LMDH; Viking Soreang (kelompok fans Tim sepakbola PERSIB Bandung); Forum Masyarakat Tani; YAMISA; LPMD PULMAS EPM; KOPPAS Abadi; KNPI Dayeuh Kolot; PGRI; Lingkung Seni Mekarwangi; Lembaga Wakaf Pohon; Kelompok Pengelola Air; Asosiasi BPD; PII; BIRU; FKPPA (Forum pensiunan PJKA); Kelompok tani; Kader Posyandu; UEP Taruna Mukti; IPPNU; HMI; Garda Caah; Pesantren Abbasyariah; FKPPi; PGHI; dan lain-lain.

Gambar 4.1: Institusionalisasi FKKB



Dari segi jumlah keterlibatan perempuan di FKKB terbilang minim, hanya sekitar 15% dari 200-an peserta dialog antara konstituen dan calon Bupati/Wakil Bupati sebelum Pemilu. ¹²⁶ Meskipun tidak dapat digeneralisir, kondisi tersebut menggambarkan sulitnya mencari figur perempuan aktivis di komunitas yang berminat untuk terlibat dalam kegiatan politik diluar mainstream seperti FKKB. Meskipun lebih sedikit, keterlibatan mereka di FKKB tidak dapat diremehkan, karena menurut para informan para perempuan turut aktif berdiskusi di berbagai forum dialog yang diselenggarakan FKKB. Bahkan ada dua perempuan di Tim 9 yang dimandatkan untuk merumuskan bentuk kelembagaan FKKB.

Ketika terjadi institusionalisasi FKKB yang bertransformasi dari nama kegiatan menjadi sebuah kelompok atau institusi yang konsensusnya dibuat pada pertemuan FK II, kepesertaan FKKB 'baru' ini diasumsikan sama dengan peserta dialog FKKB antara konstituen dengan calon Bupati/Wakil Bupati sebelum Pemilu (atau FK I). Dalam FK II itu pula dihasilkan konsensus untuk membentuk sebuah tim kecil yang kemudian disebut Tim 9, ¹²⁷ yang bertugas merumuskan konsep kelembagaan FKKB selanjutnya.

Tim 9 dipilih pada saat FK II, setelah FK I yang di Telkom... Tim 9 dikasih mandat untuk menyiapkan kelembagaan FK ke depan... Pemilihannya lebih atas pertimbangan figur saja... Pak Ali... dia koordinator Tim 9-nya... (Oky-Sekjen FAB; Wawancara; 24 Desember 2011)

Kepesertaan FKKB yang masih diisi oleh *credible source* yang dapat dipandang sebagai elit komunitas belum memenuhi prinsip inklusivitas dari sebuah *political public sphere*. *Credible source* seolah menjadi perantara atau perwakilan baru bagi warga atau konstituen secara umum. Sementara fungsi *credible source* untuk menindaklanjuti hasil dialog dengan membangun dialog lanjutan di masing-masing komunitas/kelompok/organisasi juga sulit dipastikan efektifitasnya. Kepesertaan FKKB yang elitis dapat dipahami karena awalnya memang hanya

¹²⁶ Masih timpangnya partisipasi laki-laki dan perempuan di FKKB mengingatkan akan kekhawatiran Benhabib (1996 dan 2002) dan Young (1996) mengenai adanya bias laki-laki dalam gagasan demokrasi deliberatif (lihat halaman 41 laporan ini).

¹²⁷ Kesembilan orang yang dipilih sebagai anggota Tim 9 adalah Ali (Koordinator); Tarum*; Nadri*; Derry*; Elyz; Ihsan*; Ari; Edi; dan Titi*. (Catatan: Bertanda * adalah nama samaran).

merupakan peserta dalam dialog pra Pemilukada. Namun ketika sudah menginstitusionalisasi, mempertahankan hal tersebut berarti berpotensi mengeksklusi warga lainnya untuk juga dapat berpartisipasi. Karenanya, FKKB perlu segera membuat mekanisme mengenai kepesertaan yang lebih inklusif, dimana semua konstituen atau warga yang memiliki hak pilih di Kabupaten Bandung dapat ikut dan berpartisipasi penuh dalam FKKB.

4.3.2 Sifat dan Bentuk Kelembagaan FKKB

Tim 9 kemudian merumuskan sejumlah opsi mengenai sifat dan bentuk kelembagaan FKKB, yang hasilnya kemudian dibahas dalam beberapa kali ‘roadshow’ FKKB . Ada dua opsi sifat kelembagaan yang ditawarkan, yaitu: (a) Organisasi yang ‘cair’, dalam arti lebih berwatak jaringan dengan struktur organisasi, keanggotaan dan program yang longgar; dan (b) Organisasi yang relatif lebih ‘permanen’, dengan struktur kepengurusan, keanggotaan dan program yang jelas dan sistematis, dan status hukum yang formal dan jelas.¹²⁸ Bahkan saat itu sudah ada anggota Tim 9 yang menyiapkan draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKKB.

Namun pertemuan-pertemuan tersebut tidak berhasil mencapai konsensus mengenai sifat dan bentuk kelembagaan, karena adanya perbedaan pendapat yang alot diantara anggota Tim 9 itu sendiri. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu stamina Tim 9 untuk membahas agenda tersebut pelan-pelan mulai mengendur dan akhirnya belum teragendakan lagi (sampai saat penelitian ini dilakukan), sehingga kondisi FKKB saat ini memang menjadi organisasi yang bersifat cair saja.

.... kita belum mempertegas mau seperti apa sih FK ini... Belum ada diskusi lagi... Jadi ya cair saja... (Ali-Mantan Koordinator Tim 9 FKKB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Alasan utama dari anggota Tim 9 yang menginginkan agar FKKB dapat diformalkan adalah mengenai aspek legalitas, yang dipandang sangat penting

¹²⁸ Notulensi rapat FKKB di Pasirjambu tanggal 8 Januari 2011.

ketika FKKB akan menjalankan fungsi-fungsinya dan berhubungan atau bekerjasama dengan pihak lain.

Ya sebaiknya mah bisa berbadan hukum, punya SOP sendiri, bagaimana FK menjalankan fungsinya, baik terhadap masyarakat ataupun terhadap pemerintah... Kalau forumkan dari berbagai lembaga, mungkin wakil-wakilnya juga... (Titi-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 30 Maret 2012)

Saya berpikir bahwa Forum Konstituen sudah mendapat respon dari Pemda... Tapi kita perlu legalitas yang lebih kuat lagi Pak... Mudah-mudahan, itu bisa dibahas kembali di FK... Setidaknya untuk memperpanjang silaturahmi kita Pak, jangan putus-putus... (Ihsan-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 19 April 2012)

Sementara, alasan dari anggota Tim 9 yang kurang sepaham dengan gagasan untuk memformalkan dan melegalkan FKKB diantaranya karena menganggap karakteristik individu warga, tingkat keterlibatan, dan isu yang diangkat dan persepsi mengenai perubahan sosial yang begitu beragam dan sulit untuk diikat dalam satu mekanisme kelembagaan yang ketat. Membuat lembaga formal yang baru juga dipandang akan menambah beban, mengingat telah banyaknya lembaga yang diikuti dan dikelola khususnya oleh pegiat-pegiat FKKB di jaringan PSDK dan FDA saat ini. Selain itu, kelembagaan yang cair juga dipandang membuat gerakan FKKB justru lebih lincah dalam menyikapi momentum politik yang ada.

Di tingkatan kita memang tidak sampai melembagakan... Karena kita meyakini bahwa credible source ini memiliki keyakinan perubahan yang berbeda beda gitu ya, dan lintas sektor... Jadi kita konsolidasinya ya lebih bagaimana pendidikan politik ini sampai ke masyarakat... (Derry-Anggota Tim 9 FKKB; Wawancara; 1 April 2012)

Masalahnya, di teman-teman sendiri sudah banyak peralatan yang ada, banyak teman-teman yang juga kemudian bikin komunitas baru, bikin bendera... Dan kalau FK di tingkat kabupaten dilembagakan itu menambah pekerjaan teman-teman untuk mengurus lembaga baru... dan ada kemungkinan justru akan mengerucut pada individu-individu tertentu saja... Tapi kalau dia event justru dapat menarik peserta-peserta baru ... (dan) jaringan ini akan tetap terbangun kan... Kalau Kabupaten kan wilayahnya relatif kecil kan..., Interaksi para aktivisnya dapat terjadi setiap hari pada beragam event... Tinggal bagaimana masyarakat ini punya suatu label event yang punya nilai politik di mata

pemerintah... Karena kalau dilegalkan khawatir nanti malah mereduksi, jadi sibuk mengurus kelembagaan... nanti di tengah jalan malah ada penelikungan dll. Kalau event wibawanya tetap dapat dibangun. Syaratnya itu tadi, civil society-nya memang tumbuh di kabupaten itu... Kalau nggak kan siapa nanti yang mau ikutan forum itu...¹²⁹ (Tarum-Anggota Tim 9 FKKB dan Mantan Fasilitator FAB; Wawancara; 28 Maret 2012)

Dalam hal ini FAB juga memiliki pandangan yang kurang lebih senada dengan anggota Tim 9 yang condong pada pilihan untuk tidak memformalkan FKKB. Saat ini FKKB dinilai sudah menjadi entitas yang keberadaannya secara politik sudah diakui dan sampai tingkat tertentu juga sudah memiliki daya tawar dan pengaruh yang cukup besar dalam relasi dengan pemerintah daerah.

...intinyakan, setelah sekian putaran, bisa mengundang Bupati atau Wakil Bupati, responnya begitu...[Cat.: direspon cukup baik] bagiku ya sudah... Dalam arti begini, untuk berikutnya kita sudah ngomong hal berikutnya... soal elegan, kapasitas, stamina, strategi gitu ya... Tapi dalam proses kelembagaan dan lainnya, sebenarnya ini sudah jadi 'barang' sebenarnya... Nah berikutnya bagaimana-bagaimana lagi teknisnya, ya sudah agak repot... Karena ini sudah jadi 'barang'... itu sudah jadi 'sesuatu' sebenarnya... Misalnya mau dilihat dari posisi tawar, modal sosial, pengaruh, itu udah sebenarnya... (Oky-Sekjen FAB; Wawancara; 24 Desember 2011)

Menilik pada situasi di atas, salah satu kendala utama dari situasi mengambangnya kejelasan bentuk kelembagaan FKKB adalah pada belum tuntasnya Tim 9 melaksanakan tugasnya dalam menyusun rekomendasi mengenai sifat dan bentuk kelembagaan FKKB. Akibatnya, dimata pegiat FKKB yang lain, FKKB dapat dikatakan mengalami stagnasi karena tidak memiliki mekanisme dan agenda yang jelas. Kondisi tersebut menyebabkan interaksi FKKB dengan pihak lain maupun keterlibatan FKKB dalam sejumlah kegiatan khususnya dengan pemerintah daerah, menjadi lebih bersifat reaktif dan bukan berangkat dari satu strategi yang jelas dalam melakukan kontrol terhadap pemerintahan, advokasi kebijakan, maupun pendidikan politik terhadap warga atau konstituen seperti yang menjadi tujuan awalnya.

¹²⁹ Pandangan ini sejalan dengan pendapat sejumlah ahli bahwa dibutuhkan adanya *active citizen* yang bersedia terlibat dalam proses deliberasi (lihat halaman 45, *footnote* 58).

Akibat melemahnya konsolidasi khususnya di Tim 9, menjadikan FKKB kerap kesulitan untuk dapat merespon secara cepat ketika ada dinamika politik yang harus disikapi, seperti adanya undangan dialog atau untuk terlibat dalam kegiatan perumusan kebijakan daerah. Contoh kasus, ketika ada undangan untuk terlibat dalam Musrenbang 2012, konsolidasi FKKB terasa sangat lemah. Sebagian anggota Tim 9 kemudian menunjuk salah seorang pegiat FKKB untuk ditugaskan untuk mengkoordinasikan Tim 9 ini, dan juga mewakili Forum Konstituen ketika berhubungan dengan pihak lain.

Karenanya sebagian pegiat FKKB memandang penting dapat dibuat aturan main yang lebih jelas. Sehingga meskipun FKKB saat ini memang cenderung masih dipertahankan dalam sifat kelembagaannya yang cair, namun dipandang perlu memiliki panduan semacam kode etik dalam hubungan sesama peserta FKKB dan ketika FKKB berhubungan dengan pihak lain, selain ada diantara pegiat FKKB yang memang diberi mandat sementara untuk menjaga komunikasi tadi. Dalam hal ini peran Tim 9 diharapkan dapat berfungsi kembali untuk merumuskan kebutuhan tersebut.

Bentuk itu penting, tapi tidak membatasi peran lah... Meskipun FK ini cair namun tetap harus terorganisir, perlu ada pola... sistemnya mau seperti apa? Memang penting kita diskusikan secara khusus... Terlepas apakah kita akan menjadi organisasi atau cair seperti ini, itu akan kita bahas kemudian... (Setiawan-Koordinator Konsolidasi FKKB, FGD; 19 April 2012)

Kalau khusus membahas itu tampaknya seluruh Tim 9 harus dapat berkumpul dulu ya... Kalau kita mau bersifat cair, sudah saja kita buat kesepakatan, baik tertulis ataupun tidak tertulis... Jadi bentuknya bukan AD/ART, tapi kesepakatan bersama. Jadi kita tidak merasa risih dan sungkan ketika kita berkumpul sesama kawan... (Didi-Peserta FKKB; FGD; 19 April 2012)

4.3.3 Model Kelembagaan Partisipasi Politik

Dari paparan di atas, tergambar bahwa model partisipasi politik yang ada di FKKB menitikberatkan pada adanya sebuah wadah atau ruang konsolidasi, diskusi dan dialog bagi konstituen, baik diantara konstituen sendiri maupun dengan pemerintah daerah. Tujuannya adalah sebagai bagian dari upaya pendidikan politik

warga, memperkuat konsolidasi *civil society*, dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan khususnya pada kebijakan-kebijakan strategis. Selain itu, merujuk pada pengalaman melakukan dialog antara konstituen dan calon Bupati/Wakil Bupati, juga bertujuan untuk memperluas ruang partisipasi politik warga pada proses rekrutmen elit politik di daerah, yang dipandang tidak hanya sebatas memberikan suara dalam Pemilu saja.

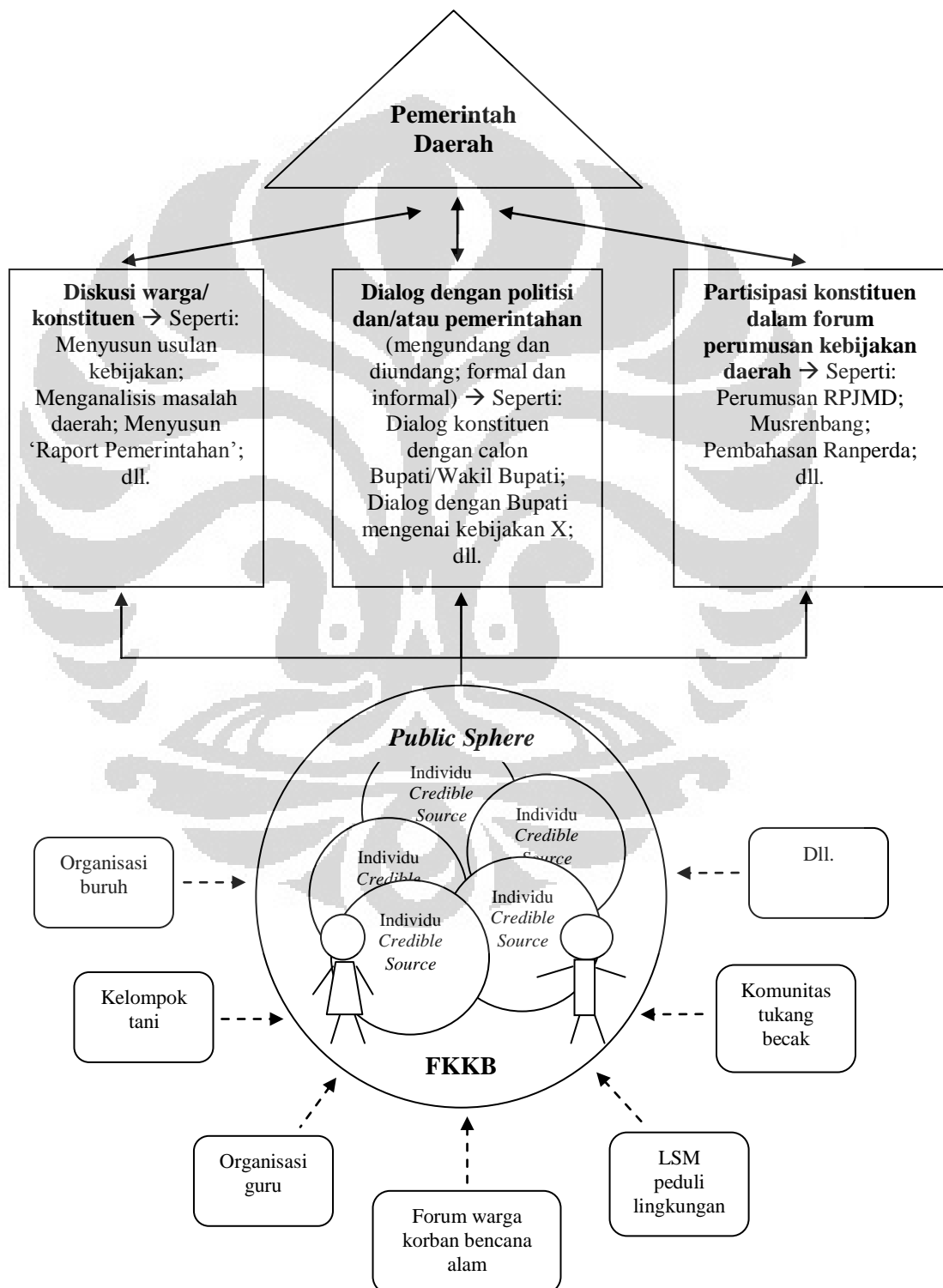
Telah diulas pula bahwa kepesertaan konstituen di FKKB bersifat individual (bukan lembaga, dan bukan perwakilan lembaga). Merujuk pada proses rekrutmen peserta FKKB pada saat persiapan dialog konstituen dan calon Bupati dan Wakil Bupati FK I (di IT Telkom), peserta FKKB adalah para *credible source* dari berbagai organisasi, kelompok atau komunitas dengan beragam isu di wilayah Kabupaten Bandung. Proses tersebut menunjukkan FKKB sejak awal didesain sebagai satu kelompok yang plural namun ‘semi inklusif’, karena pesertanya adalah dipilih melalui proses pemetaan oleh panitia atau tim awal FKKB. Sifat kelembagaan FKKB kemudian memang menjadi cenderung cair, dimana tidak ada struktur kepemimpinan dan kepengurusan yang rigid sebagaimana pada organisasi formal pada umumnya.

Sebagai ruang tempat bertemu, berdiskusi dan berdialog para konstituen di Kabupaten Bandung, FKKB dapat disebut sebagai ruang publik. Dalam ruang publik tersebut, opini publik dirumuskan, diolah dan dibentuk untuk selanjutnya diresonansikan dan diartikulasikan kepada sistem politik yang ada di daerah, khususnya terhadap pemerintah daerah. Dalam berbagai dialog baik formal maupun informal dengan pemerintah daerah, dan keterlibatan dalam dialog perumusan kebijakan daerah, FKKB telah berperan sebagai ruang deliberasi.

Gambar 4.2 mencoba menyederhanakan alur terbentuk dan beroperasinya FKKB sebagai ruang publik dan interaksinya dengan sistem politik yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pemerintah daerah. Disana tergambar bagaimana FKKB berfungsi sebagai wadah dari individu-individu warga atau konstituen yang berasal dari beragam kelompok dan organisasi, yang secara bersama mendiskusikan dan mendialogkan berbagai isu atau masalah yang ada di daerah.

Proses diskusi dan dialog tersebut menghasilkan opini publik yang selanjutnya menjadi bahan dalam dialog dengan pemerintah daerah, ataupun ketika terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik di daerah.

Gambar 4.2: FKKB sebagai *Public Sphere*



4.3.4 Ikhtisar Analisa Mengenai Model Kelembagaan FKKB

Dari uraian di atas, temuan-temuan utama terkait dengan model kelembagaan yang dikonstruksikan dan dipromosikan oleh FKKB, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.4: Ikhtisar Analisa Mengenai Model Kelembagaan FKKB

FKKB	Pra Pemilukada 2010	Pasca Pemilukada 2010	Catatan Peneliti
Aktor Utama dalam Inisiasi Awal	<ul style="list-style-type: none"> • FAB, sebagai inisiator dan fasilitator. • TIFA (donor). • Kelompok <i>civil society</i> di Kabupaten Bandung sebagai eksekutor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok <i>civil society</i> di Kabupaten Bandung sebagai pemilik dan pelaku utama FKKB. • FAB sebagai mitra dialog FKKB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peran ‘kelas menengah terdidik’ dan dukungan ‘eksternal’ sangat menonjol dan menentukan dalam inisiasi FKKB.
Kepesertaan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Credible source</i> dari berbagai komunitas, kelompok dan organisasi dari berbagai wilayah di Kabupaten Bandung. • Keterlibatan perempuan, kelompok miskin dan warga pada umumnya masih terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan kepesertaan di kegiatan sebelumnya. • Bersifat individual (bukan lembaga atau perwakilan lembaga). • Secara prinsip bersifat terbuka (inklusif). 	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta FKKB dapat dipandang sebagai jaringan dari individu-individu para <i>credible source</i> atau simpul-simpul jaringan komunitas lainnya. • Kepesertaan FKKB yang masih diisi oleh <i>credible source</i> yang dapat dipandang sebagai elit komunitas secara teknis memang lebih mudah dikonsolidasikan, namun belum memenuhi prinsip inklusivitas dari sebuah <i>political public sphere</i>. • FKKB perlu segera membuat mekanisme mengenai kepesertaan yang lebih inklusif, dimana semua

FKKB	Pra Pemilukada 2010	Pasca Pemilukada 2010	Catatan Peneliti
			konstituen atau warga yang memiliki hak pilih di Kabupaten Bandung dapat ikut dan berpartisipasi penuh dalam FKKB, dengan perhatian khusus bagi keterlibatan perempuan dan kelompok marginal.
Sifat/Bentuk	<ul style="list-style-type: none"> • Forum Konstituen sebagai kegiatan, dengan peserta yang plural namun dipilih (<i>credible source</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Forum Konstituen sebagai institusi. • Belum disepakati apakah menjadi institusi yang cair atau rigid/formal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Di awal FKKB merupakan institusi plural namun semi inklusif. • FKKB perlu membuka diri sehingga dapat sungguh-sungguh menjadi instiusi yang plural dan inklusif. • Institusi yang cair tetap memerlukan struktur dan mekanisme yang disepakati bersama. • Perlu diperjelas mengenai bentuk kelembagaan dan juga kepemimpinan untuk menghindari tudingan adanya kesengajaan mempertahankan ‘oligarki’ kepemimpinan di orang-orang tertentu.¹³⁰

¹³⁰ Perbedaan *power* diantara orang-orang dalam sebuah organisasi ‘secara alamiah’ akan memisahkan antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Merujuk pada teori Michels ([1911] 2011) mengenai ‘*the iron law of oligarchy*’, di mana pada intinya menyatakan bahwa dalam organisasi apapun akan ada kecenderungan kepemimpinan terkonsentrasi pada beberapa orang yang relatif memiliki keunggulan tertentu, seperti intelektualitas, jaringan, dan sumberdaya lainnya. Adanya ancaman kekuasaan organisasi jatuh di tangan kaum intelektual dan profesional ini, karena mereka relatif memiliki kemampuan yang lebih lengkap dalam merumuskan gagasan, mempengaruhi massa, dan manajerial (lihat, Michaels, 2011:52-58). Karenanya, Brym (1993:45) dalam analisisnya terhadap gagasan Michels tadi mengingatkan bahwa dalam organisasi gerakan sosial demokratis sekalipun, kaum intelektual harus berhati-hati untuk tidak menguasai segalanya

FKKB	Pra Pemilukada 2010	Pasca Pemilukada 2010	Catatan Peneliti
Kepengurusan dan Mekanisme	<ul style="list-style-type: none"> • Kepanitian kegiatan dialog konstituen dan calon Bupati/Wakil Bupati. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandat terakhir ada pada Tim 9 untuk merumuskan sifat/bentuk kelembagaan. • Tidak ada mekanisme yang jelas, misalnya mengenai program/ kegiatan, hubungan internal dan eksternal, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi internal bersifat informal. • Kepemimpinan informal ada di beberapa figur yang terlibat sejak awal. • Sejauh ini belum ada konflik karena hubungan emosional dan perkawanan yang sudah terjalin sebelumnya, meskipun ketidakpuasan atas keterbatasan mekanisme yang ada mulai muncul. • Tim 9 perlu menuntaskan mandatnya agar ada kejelasan sifat dan bentuk kelembagaan (dan mekanisme) FKKB.
Efek/Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi informasi mengenai performa dan gagasan calon Bupati/ Wakil Bupati. • Terbangunnya konsensus untuk mengawal janji kampanye siapapun calon yang terpilih sebagai Bupati/Wakil Bupati. • Meningkatkan kapasitas politik peserta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka akses untuk berdiskusi dan berdialog dengan Bupati/ Wakil Bupati. • Menjadi kelompok yang cukup diperhitungkan di kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya akses politik FKKB, antara lain: Karakter personal Bupati/Wakil Bupati, interaksi yang terbangun sejak pra Pemilukada, serta perubahan konstelasi politik khususnya relasi pemerintah daerah dan NGO/CSO. • FKKB berperan sebagai <i>'school of democracy'</i> yang bermanfaat meningkatkan kapasitas politik

sendiri, dan justru melupakan warga, konstituen atau anggota yang ada di dalam organisasi tersebut.

FKKB	Pra Pemilukada 2010	Pasca Pemilukada 2010	Catatan Peneliti
			<p>warga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FKKB sebagai <i>CSO</i> telah berperan membangun <i>civic engagement</i> dan <i>civic trust</i> sebagai <i>social capital</i> di kelompok atau jaringan tersebut.
Dampak	<ul style="list-style-type: none"> • FKKB tidak mencari tahu apakah informasi dari dialog disebarkan oleh semua <i>credible source</i> dan mempengaruhi preferensi pemilih lainnya dalam Pemilukada 2010. Tapi ada sejumlah kasus di mana hasil dialog mempengaruhi preferensi politik tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> • FKKB belum mencari tahu apakah ada kebijakan yang secara khusus terpengaruh oleh partisipasi mereka. Tapi ada sejumlah kasus di mana masukan, kritik dan saran FKKB dianggap telah diadopsi dalam kebijakan pemerintah daerah. • Namun secara umum perilaku aparat dan kebijakan publik di daerah dipandang belum banyak berubah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi advokasi kebijakan publik belum cukup sinergis antara FKKB dengan NGO/CSO lain yang dipandang sebagai jaringan <i>civil society</i> di Kabupaten Bandung, sehingga dampaknya belum optimal. • Perlu konsolidasi, dialog dan membangun konsensus baru diantara jaringan <i>civil society</i> di Kabupaten Bandung. • Meskipun ruang dialog relatif lebih terbuka, namun praktik ‘tokenisme’ dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan publik masih belum banyak berubah dari kondisi sebelumnya.
Kendala	<ul style="list-style-type: none"> • Kecurigaan dan keengganan sebagian <i>credible source</i> untuk diajak terlibat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi melemah, akibat animo berpartisipasi yang menurun, keterbatasan logistik dan kesibukan di organisasi asal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan-kegiatan kecil dapat dilakukan secara swadaya oleh FKKB, namun untuk konsolidasi dan kegiatan besar dipandang membutuhkan dukungan logistik

FKKB	Pra Pemilukada 2010	Pasca Pemilukada 2010	Catatan Peneliti
			dari luar. <ul style="list-style-type: none"> • Perlu strategi dan upaya konsolidasi sumberdaya.
Hambatan	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan waktu yang sangat berdekatan dengan pelaksanaan Pemilukada. • Kecurigaan sebagian pihak bahwa FKKB merupakan kendaraan politik calon tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses partisipasi relatif lebih terbuka dari sebelumnya, namun pengambilan keputusan publik masih di tangan pemerintahan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hambatan struktural berupa belum adanya kesungguhan untuk menjalankan kebijakan transparansi dan partisipasi publik di pemerintah daerah. • Belum ada kebijakan terobosan yang signifikan dari pemerintah daerah. • Perlu upaya lebih keras untuk mempengaruhi dan mendesak kebijakan pemerintah daerah yang lebih responsif.

Dari alasan pembentukan, konsep, strategi dan upaya FKKB terkait demokratisasi di daerah, berkembang pula sejumlah gagasan pendalaman dan replikasi model FKKB, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4.5: Ikhtisar Gagasan Pendalaman dan Replikasi

	Pra Pemilukada	Pasca Pemilukada	Catatan Peneliti
Gagasan Pendalaman	<ul style="list-style-type: none"> • Gagasan memperbanyak dialog konstituen dan calon Bupati/ Wakil Bupati. • Gagasan memperluas jaringan FKB sampai ke tingkat kecamatan atau daerah pemilihan. • Gagasan membuka ruang keterlibatan warga yang lebih luas di FKKB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gagasan untuk mulai masuk ke isu pengawasan terhadap lembaga legislatif, seperti saat reses DPRD. • Gagasan membuka ruang keterlibatan warga yang lebih luas di FKKB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gagasan tersebut membutuhkan konsolidasi yang kuat di FKKB dan jaringan <i>civil society</i> di Kabupaten Bandung, karena membutuhkan sinergi dan dukungan sumberdaya yang cukup besar.

Gagasan Replikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Gagasan dialog konstituen menjelang Pemilukada Kabupaten Bandung 2015. • Gagasan dialog komunitas sebelum Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bandung. • Gagasan dialog konstituen terkait Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013. • Mendorong kegiatan serupa di daerah lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gagasan untuk mendorong terbentuknya institusi serupa di daerah lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi gagasan dan pengalaman FKKB masih sangat terbatas, dan perlu ditingkatkan.
--------------------------	--	---	--

4.4 FKKB Ditinjau dari Teori tentang Forum Warga, Partisipasi Politik, Demokrasi Deliberatif dan Demokrasi Asosiatif

4.4.1 FKKB ditinjau dari Teori tentang Forum Warga

Sumarto (2009) mendefinisikan 'Forum Warga' sebagai suatu forum konsultasi dan penyaluran aspirasi warga untuk urusan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal dengan ciri, diantaranya terbentuk dari aliansi berbagai kelompok/organisasi dan individu tokoh lokal, berfungsi sebagai wadah yang digunakan untuk merumuskan dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi komunitas, dan biasanya bersifat sektoral atau teritorial. Merujuk pada karakteristik FKKB yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, FKKB dapat dikategorikan sebagai forum warga dalam definisi Sumarto (2009) tadi, karena merupakan organisasi dari kumpulan individu para tokoh (*credible source*) yang bersifat teritorial (hanya di wilayah Kabupaten Bandung saja), yang aktif mendiskusikan, mendialogkan dan mencari penyelesaian isu/masalah di daerah.

Menurut Sumarto (2009), forum warga umumnya lahir dari kebutuhan akan wadah komunikasi, pengorganisasian masyarakat, dan aksi bersama; sebagai kelanjutan dari suatu program/proyek dari pemerintah, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga donor, atau lainnya; atau sebagai 'prasyarat' atau kewajiban yang

harus dipenuhi untuk dapat terlibat dalam suatu program/proyek tertentu. Merujuk pada proses pembentukannya, FKKB dapat dikatakan sebagai forum warga yang lahir dari kebutuhan akan wadah komunikasi, pengorganisasian masyarakat, dan aksi bersama, namun sekaligus juga merupakan kelanjutan dari sebuah program/proyek, namun sejak awal juga ditempatkan sebagai kolaborasi antara skema program (FAB dan donor) dan skema advokasi kelompok *civil society* di tingkat lokal (jaringan PSDK dan FDA di Kabupaten Bandung).

FKKB lahir dari ketidakpuasan warga di Kabupaten Bandung atas kinerja partai politik dan lembaga legislatif di daerah yang dipandang tidak menjalankan fungsinya dalam melakukan pendidikan politik, merepresentasikan aspirasi rakyat, dan melakukan rekrutmen elit politik secara sehat dan dapat menghasilkan pemimpin yang kompeten dan responsif. FKKB juga dibentuk sebagai respon atas ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan di daerah. FKKB juga dibentuk sebagai upaya menjawab kegelisahan para aktivis di Kabupaten Bandung terhadap lemahnya konsolidasi dan daya tawar *civil society* terhadap kekuasaan yang direpresentasikan oleh pemerintahan daerah.

Pada awalnya, bagi FAB dan TIFA, FKKB merupakan bagian dari 'eksperimentasi' dalam pencarian model perluasan partisipasi politik warga di daerah. Gagasan tersebut kemudian berkembang, dimana FKKB kemudian dibentuk sebagai forum warga yang berfungsi sebagai alternatif saluran aspirasi warga, pada saat (a) Dalam proses pra Pemilukada, dimana warga sebagai konstituen pemilih dapat berdialog dengan pra calon Bupati/Wakil Bupati untuk dapat mengetahui performa dan tawaran gagasan mereka; dan (b) Pada saat pasca Pemilukada dengan menjadi kekuatan kontrol sekaligus wadah bagi warga untuk dapat berdialog langsung dengan pemerintah daerah. FKKB juga dipandang sebagai alat dan jaringan gerakan advokasi yang lebih luas dan komprehensif (dari segi isu dan pluralitas kepesertaan) dari kerja-kerja advokasi sektoral dan kewilayahan yang sudah dilakukan sebelumnya.

FKKB juga dibentuk atas dasar keinginan dapat menjadi ruang pendidikan politik khususnya bagi para aktivis sosial, dan umumnya bagi warga di Kabupaten Bandung. Lebih jauh, FKKB ditempatkan sebagai bagian dari keinginan sebagian aktivis tersebut untuk dapat membangun apa yang mereka sebut sebagai 'blok politik baru', yang dapat berfungsi sebagai pengimbang dari kekuatan pemerintah daerah dan LSM dan organisasi kemasyarakatan lain yang dekat dengan pemerintah daerah. Dari kacamata dialektika, FKKB sebagai forum warga dapat dipandang sebagai 'antitesis' dari partai politik dan lembaga representatif di daerah yang dipandang kurang berfungsi dalam merespons kepentingan warga atau konstituen di Kabupaten Bandung. Meskipun bukan dalam arti menggantikan, namun lebih sebagai alternatif saluran aspirasi warga.

Proses pembentukan atau institusionalisasi FKKB sebagai forum warga dapat dilihat dari perspektif institusionalisme pilihan rasional (Marsh & Stoker, 2011:114). Dari perspektif tersebut, alasan pembentukan FKKB adalah karena dipandang bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah kolektif yang telah diuraikan di atas. Bergabung dalam kelompok dipandang lebih menguntungkan dibandingkan memperjuangkan aspirasi secara sendiri-sendiri, karena dapat meningkatkan *bargaining position* terhadap pihak lain, dalam hal ini pemerintah daerah. Namun tampaknya institusionalisasi FKKB tidak dapat seluruhnya dipandang linier dan sesederhana itu. Adanya momentum politik Pemilu 2014 yang menjadi faktor penarik antusiasme warga untuk berpartisipasi, adanya kesempatan dalam bentuk fasilitasi FAB yang didukung TIFA (logistik pertemuan dan uang transport), adanya jaringan perkawanan diantara banyak aktivis yang terlibat, dan faktor-faktor lainnya, kemungkinan turut mempengaruhi kondisi yang mendukung dapat dibentuknya FKKB.

Dalam hal ini FKKB juga dapat dilihat dari teori jaringan,¹³¹ di mana aktor atau peserta FKKB adalah individu-individu yang dianggap sebagai simpul komunitas atau kelompok (yang disebut FAB sebagai *credibel source*). Jadi simpul-simpul tersebut juga memiliki jaringannya sendiri, yang saling silang hubungan

¹³¹ Aktor dalam jaringan dapat individu dan/atau kelompok (komunitas, organisasi, dan lainnya), lihat Ritzer dan Goodman (2010:470).

pertemanan dan aktivitas lain diantara anggota jaringan-jaringan tersebut sedikit banyak juga turut mempengaruhi alasan-alasan keterlibatan mereka di FKKB kemudian. Jaringan terbesar dalam FKKB adalah yang berasal dari para aktivis yang tergabung dalam Forum Diskusi Anggaran (FDA), yang intinya lagi adalah jaringan Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK). Jaringan inti inilah yang banyak menggerakkan aktivitas FKKB. Bahwa keterlibatan para *credible source* di FKKB kemudian dipandang elitis (belum sepenuhnya inklusif) adalah dalam pengertian bahwa FKKB belum melibatkan warga secara umum dalam kegiatan-kegiatan diskusi dan dialog yang diselenggarakannya.

Dalam teori jaringan dari Granovetter (1983)¹³² ada yang disebut sebagai 'ikatan kuat' dan 'ikatan lemah'. Jaringan PSDK dan FDA di FKKB mungkin dapat disebut sebagai 'ikatan kuat', di mana relasi perkawanan diantara mereka sudah terbangun cukup lama. Sementara peserta FKKB diluar jaringan PSDK dan FDA mungkin dapat dianalogkan dengan 'ikatan lemah' tadi, karena interaksinya memang baru terbangun pada saat FKKB ini akan dibentuk. Dalam perkembangannya kemudian, peserta FKKB yang relatif aktif memang lebih banyak yang berasal dari mereka yang dikategorikan 'ikatan kuat' dibandingkan dengan yang dari 'ikatan lemah' tadi.

Sebagai kumpulan 'jaringan-jaringan', FKKB juga dapat dilihat dari perspektif institusionalisme jaringan (Marsh & Stoker, 2011:114). Dalam perspektif ini, FKKB adalah individu-individu dari berbagai latar belakang organisasi dan jaringan berkumpul, yang kemudian membangun konsensus tujuan bersama untuk 'menguji calon Bupati/Wakil Bupati' sebelum Pemilu 2010, dan 'mengawal Bupati/Wakil Bupati' atau pemerintah daerah pasca Pemilu, melalui kegiatan-kegiatan diskusi, dialog dan partisipasi dalam perumusan dan pengawasan kebijakan publik di daerah. Konsensus dalam jaringan ini harus dibangun melalui proses negosiasi terus-menerus, sebagaimana yang terjadi pada perumusan sifat dan bentuk kelembagaan FKKB yang belum tuntas sampai saat ini.

¹³² *ibid.*

Cara pandang yang berbeda diantara para pegiat dan peserta FKKB mengenai sifat dan bentuk kelembagaan tersebut dapat dilihat sebagai adanya kalkulasi yang berbeda mengenai '*cost and benefit*' dari diformalkan atau tidaknya FKKB sebagai sebuah organisasi (lihat Sub BAB 4.3.2). Sebagian memandang formalisasi FKKB justru akan merugikan karena akan menjadi beban dari bertambahnya instrumen atau organisasi baru (sementara mereka merasa sudah disibukkan dengan organisasi asalnya masing-masing), adanya ancaman terjebak dalam 'birokratisme' lembaga baru yang justru mengecilkan semangat aksi kolektif untuk perubahan, dan lainnya. Sementara sebagian yang lain memandang formalisasi FKKB akan menguntungkan dalam memperjelas relasi dengan pihak lain, ataupun menggalang dukungan sumberdaya, khususnya pendanaan. Pada beberapa kasus, formalisasi FKKB dipandang dapat memperkuat legitimasi kelompok, khususnya bagi para aktivis yang bermain di level komunitas dan membutuhkan adanya klaim bahwa mereka merupakan bagian dari organisasi yang lebih besar di level kabupaten. Hal tersebut tampaknya dianggap dapat meningkatkan prestise dan status sosial mereka di mata komunitas dan birokrasi tingkat bawah. Sementara buat para aktivis yang arena aktivitasnya sudah di level kabupaten, merasa tidak membutuhkan dukungan legitimasi semacam itu.

Namun dalam perspektif interpretif, pilihan-pilihan sikap tadi tidak semata-mata didasarkan alasan yang rasional dalam kalkulasi untung rugi. Keyakinan dan preferensi¹³³ dari pengalaman sosial sebelumnya juga mempengaruhi interpretasi mereka terhadap situasi sosial yang mereka hadapi kemudian. Hal ini terlihat pada kecenderungan sebagian pegiat FKKB untuk menghindar dari opsi memanfaatkan dukungan dana dari pemerintah (APBD). Secara rasional hal tersebut 'seharusnya' dipandang menguntungkan karena dapat membantu menggerakkan roda kegiatan FKKB, apalagi peluang tersebut dapat dikatakan cukup terbuka lebar mengingat adanya akses langsung mereka ke Bupati dan Wakil Bupati, untuk mendapatkan hibah ataupun bantuan sosial seperti yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan lainnya. Namun adanya pertimbangan lain mengenai kekhawatiran terganggunya independensi dan integritas mereka secara kolektif,

¹³³ Dalam pendekatan interpretif, tindakan seseorang dipandang dipengaruhi oleh keyakinan dan preferensinya. Lihat Marsh dan Stoker, 2011:160.

serta kekhawatiran bahwa dana semacam itu justru akan menjadi sumber konflik di dalam kelompok sebagaimana pernah mereka alami atau lihat di organisasi-organisasi lainnya, telah mendorong mereka untuk memilih opsi tidak mengakses peluang memperoleh dukungan dana dari pemerintah daerah tersebut.

Sementara itu, dikaitkan dengan rumusan Sumarto (2005, yang merujuk pada Warren, 2001) mengenai dimensi perubahan dari adanya forum warga, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa FKKB bermanfaat meningkatkan kapasitas politik individu-individu yang terlibat, seperti dalam hal analisis, komunikasi, dan kepercayaan diri berhadapan dengan pihak lain, khususnya terhadap politisi dan aparat pemerintahan. FKKB juga menjadi ruang konsolidasi dari upaya advokasi persoalan dan kebijakan daerah, sehingga kekuatan dan daya tawar warga menjadi lebih diperhitungkan oleh pihak lain.

Sedangkan jika dibandingkan dengan kendala yang umum terjadi pada forum warga (lihat BAB 2), situasi FKKB dapat dipetakan sebagai berikut:

- (a) Di banyak forum warga umumnya ada kecenderungan terabaikannya masalah atau isu lain diluar isu utama yang menjadi fokus forum warga. Dalam konteks FKKB, beragam isu atau masalah di Kabupaten Bandung relatif cukup terakomodasi (multi sektoral). Peserta FKKB yang berasal dari beragam latar belakang aktivitas di beragam isu dan organisasi membuat FKKB menjadi semacam salah satu ruang publik yang menjadi 'pusat pembahasan masalah' yang ada di daerah;
- (b) Di banyak forum warga umumnya ada kecenderungan forum tersebut menjadi elitis dan tidak terakses oleh warga kebanyakan. Dalam konteks FKKB, desain awalnya memang ditujukan pada upaya konsolidasi dan pelibatan *credible source* atau individu-individu dari berbagai komunitas, kelompok dan organisasi yang dipandang memiliki kapasitas sebagai rujukan atau sumber informasi di komunitasnya tersebut. Memang ada orientasi untuk selanjutnya untuk membuka ruang bagi keterlibatan warga atau konstituen, namun gagasan tersebut belum diturunkan dalam mekanisme yang jelas;

- (c) Di banyak forum warga umumnya ada hambatan sosio-kultural terhadap kehidupan asosiasional. Dalam konteks FKKB, *trust* diantara peserta khususnya di pegiat FKKB tampaknya cukup tinggi. Sejauh ini belum tampak adanya konflik yang muncul akibat dari terganggu atau kurangnya *trust* tersebut. Adanya kecenderungan sebagian peserta FKKB yang dianggap oportunistis jelas sulit terhindarkan dalam kelompok yang cukup besar dan plural seperti FKKB ini. Sedangkan terkait dengan relasi diantara sesama peserta FKKB sejauh yang dapat diamati terlihat adanya hubungan yang cukup egaliter, baik dalam relasi di situasi informal (seperti saat *ngobrol*) maupun yang relatif formal (dalam pertemuan atau rapat). Masalah yang cukup menonjol terlihat pada persoalan kepemimpinan. Sebagai organisasi yang cair, kepemimpinan secara formal memang tidak ada, karena yang ada hanya semacam tim *ad-hoc* untuk yang diberi mandat tertentu oleh forum (Tim 9). Sementara kepemimpinan informal memang tampak pada beberapa pegiat FKKB, namun tentunya sulit untuk dapat digunakan terus menerus mengingat tidak ada mekanisme yang 'memaksa' untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal atau agenda tertentu. FKKB lebih menunjukkan ciri-ciri *Gemeinschaft* atau paguyuban dibandingkan ciri dari organisasi modern yang diajukan Tönnies (1887);¹³⁴
- (d) Di banyak forum warga umumnya semangat kolektif anggota atau aktivis forum warga tidak stabil. Dalam konteks FKKB hal tersebut sangat tampak dari menurunnya konsolidasi FKKB pasca keterlibatan mereka pada forum dialog dengan calon Bupati/Wakil Bupati sebelum Pemilu, dan terlebih pasca momentum perumusan RPJMD. Selain sudah berlalunya momentum Pemilu yang merupakan magnet yang

¹³⁴ Tönnies (1887) menyebut *Gemeinschaft* atau paguyuban sebagai pola masyarakat yang ditandai dengan hubungan anggota-anggotanya bersifat pribadi, sehingga menimbulkan ikatan yang sangat mendalam dan batiniah, misalnya pola kehidupan masyarakat pertanian umumnya bersifat komunal yang ditandai dengan ciri-ciri masyarakat yang homogen, hubungan sosialnya bersifat personal, saling mengenal, serta adanya kedekatan hubungan yang lebih intim. Menurut Harris (2001: xvii), Tönnies memaknai *Gemeinschaft* sebagai komunitas 'organik' yang ditandai oleh adanya ikatan kekerabatan, persahabatan, kebiasaan, sejarah dan kepemilikan komunal barang primer.

kuat untuk dapat menarik partisipasi politik warga atau konstituen secara massif, faktor lain yang mempengaruhi melemahnya konsolidasi tersebut adalah kesibukan para peserta FKKB di organisasi masing-masing, dan terbatasnya sumberdaya yang dapat mendukung upaya konsolidasi dan aktivitas lainnya;

(e) Di banyak forum warga umumnya ada ketergantungan pada pihak sponsor yang mendanainya. Dalam konteks FKKB, beberapa kegiatan awalnya memang didukung oleh pendanaan dari lembaga donor (dari TIFA, yang dikelola oleh FAB). Namun setelah itu cukup banyak kegiatan FKKB yang dapat dilakukan sendiri secara swadaya, meskipun tidak dapat dipungkiri terbatas pada kegiatan-kegiatan kecil dan sporadis. Memang ada harapan di FKKB untuk dapat memperoleh dukungan dari donor, namun upaya tersebut belum dilakukan lagi;

(f) Di banyak forum warga umumnya mengalami hambatan pada struktur pemerintahan lokal dan terbatasnya ruang politik. Dalam konteks FKKB, hambatan terkait ketersediaan ruang politik tersebut tampaknya relatif kecil mengingat saat ini mereka memiliki akses langsung ke kepala daerah untuk dapat melakukan dialog baik formal maupun informal, dan kerap terlibat dalam berbagai forum perumusan kebijakan publik di daerah. Meskipun pengecekan atau pengukuran dampak dari partisipasi tersebut belum dilakukan oleh FKKB, sehingga sulit untuk diketahui efektifitasnya. Namun ruang politik tersebut masih terbentur pada hambatan struktural dimana akses pengambilan keputusan dan sumberdaya hampir sepenuhnya masih ada di tangan institusi formal pemerintahan.

4.4.2 FKKB ditinjau dari Teori Partisipasi Politik

Pada BAB 2 telah diuraikan beberapa teori mengenai partisipasi politik dari Huntington dan Nelson (1994) yang menekankan pada karakteristik atau sifat partisipasi, Faulks (2010) yang menekankan pada aspek *developmental* dalam partisipasi, dan Verba et. al. (1995) yang menekankan pada pengaruh partisipasi

terhadap proses pembuatan atau pelaksanaan kebijakan publik dan proses rekrutmen pejabat publik.

Dikaitkan dengan teori partisipasi politik dari Huntington dan Nelson, temuan penelitian menunjukkan partisipasi politik warga atau konstituen di FKKB kerap diposisikan sebagai representasi dari partisipasi sebagai kolektif atau kelompok. Hal ini diindikasikan dengan sering digunakannya identitas FKKB meskipun partisipasi tersebut dilakukan secara individual, dan gagasan yang dibawanya tidak selalu merupakan hasil diskusi atau dialog terlebih dahulu di FKKB. Sebaliknya, pihak lain (dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD) juga kerap memposisikan partisipasi individual mereka yang telah teridentifikasi sebagai 'orang FKKB' sebagai representasi FKKB secara kolektif. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh sifat kelembagaan FKKB yang memang cair, dalam arti tidak memiliki keanggotaan, struktur, program dan mekanisme yang ketat. Selain itu, partisipasi tersebut ada yang dilakukan secara terorganisir (terencana, melalui persiapan dan diskusi yang cukup mendalam, dan dengan mandat kolektif yang jelas), dan ada pula yang bersifat sporadis dalam arti dilakukan oleh individu namun mengatasnamakan kolektif, atau lebih sebagai respon atas undangan atau ajakan berpartisipasi dari pihak lain. Karakteristik partisipasi FKKB juga lebih bersifat damai (non kekerasan) karena memang mengutamakan diskusi dan dialog dalam merumuskan dan menyampaikan gagasannya.

Begitupula terhadap bagian dari teori Verba et.al. mengenai partisipasi dalam mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, dan dalam rekrutmen pejabat publik. Gagasan awal FKKB terutama memang berkaitan dengan upaya mempengaruhi proses rekrutmen elit politik di daerah dalam momentum Pemilukada, melalui kegiatan dialog antara konstituen dengan calon Bupati/Wakil Bupati sebelum pelaksanaan Pemilukada. FKKB kemudian bertransformasi menjadi sebuah institusi yang bersifat cair dari para konstituen tersebut, yang diorientasikan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di daerah.

Namun berbeda dengan perspektif Verba et.al. yang menekankan pentingnya budaya politik berupa adanya penghormatan warga terhadap sistem politik yang berlaku dan adanya keinginan untuk berpartisipasi, pengalaman FKKB menunjukkan kesadaran berpartisipasi warga lebih didorong oleh alasan keinginan mengkritisi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan agar lebih responsif, dan terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dengan kata lain, budaya politik yang dikembangkan FKKB bukan budaya 'penghormatan pada otoritas' dan partisipasi (ala Verba), namun budaya politik kritik dan partisipasi, dimana ideal yang diinginkan adalah partisipasi sebanyak mungkin warga dan bukan sebagian elit saja.

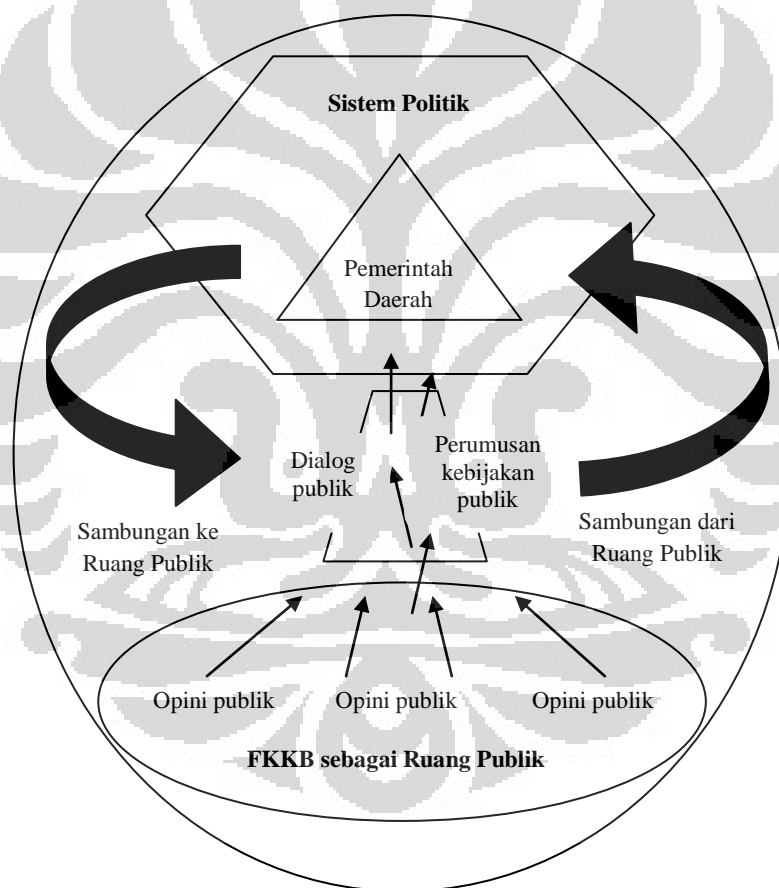
Pengalaman FKKB tampaknya mengkonfirmasi gagasan utama teori partisipasi dari Faulks. Ada kesamaan dalam hal memandang partisipasi sebagai suatu upaya dan proses mengkonsolidasikan kekuatan *civil society* dan melakukan pendidikan politik terhadap warga atau konstituen, sehingga memiliki kesadaran dan kapasitas politik yang memadai dalam mengartikulasikan hak dan kewajibannya (lihat Sub BAB 4.1.2 mengenai tujuan dan institusionalisasi FKKB).

4.4.3 FKKB ditinjau dari Teori Demokrasi Deliberatif

Teori demokrasi deliberatif dari Habermas memusatkan diri pada prosedur bagaimana dapat dihasilkannya kesepakatan diantara para pihak yang terlibat dalam diskursus, dan legitimasi (kesahihan) dari kesepakatan tersebut. Dalam konteks hubungan *civil society* dan sistem politik (pemerintah, peradilan dan parlemen), model demokrasi deliberatif menyoroti dengan cara manakah opini-opini mayoritas dihasilkan, sehingga memiliki legitimasi dan layak untuk dipatuhi. Terkait dengan konsep *civil society*, Habermas memaknainya sebagai kumpulan dari perhimpunan, organisasi dan gerakan yang spontan, yang mengolah dan meresonansikan persoalan kemasyarakatan di wilayah privat ke ruang publik politis. *Civil society* dipandang sebagai asosiasi otonom yang lepas dari kepentingan birokrasi dan pasar.

Jika merujuk pada konsep besar tadi, FKKB dapat dikategorikan sebagai sebuah *civil society organization*, karena dibentuk oleh warga atau konstituen di Kabupaten Bandung (dengan sokongan NGO dan lembaga donor), dan bukan dibentuk oleh institusi atau organisasi politik dan institusi ekonomi atau kekuatan modal tertentu. Selain itu FKKB juga berfungsi sebagai arena dimana konstituen dapat berkumpul, berdiskusi dan berdialog mengenai berbagai persoalan di Kabupaten Bandung, dan kemudian mendialogkannya kembali pada pemerintahan daerah.

Gambar 4.3: Hubungan FKKB sebagai *Public Sphere* dengan Pemerintah Daerah



Sumber: Dimodifikasi dari Hardiman (2009)

Fungsi tersebut juga dapat dikatakan sejalan dengan konsep Habermas mengenai *political public sphere*, yang dimaknainya sebagai hakekat kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri dari warga negara dapat berlangsung. Dalam hal ini FKKB

dapat dipandang sebagai *public body* yang menjadi ruang diskursif atau arena diskursus warga atau konstituen dalam merumuskan opini publik, yang selanjutnya mendialogkannya dengan sistem politik yang ada (khususnya yang direpresentasikan oleh pemerintah daerah), selain dalam bentuk memberikan suara dalam Pemilu dan Pemilukada. Dari model yang diadaptasi dari Hardiman (2009), relasi antara FKKB sebagai *public sphere* dengan sistem politik (pemerintah daerah) coba disederhanakan seperti pada Gambar 4.3. FKKB sebagai *public sphere* menjadi ruang diprosesnya *opini public* yang kemudian diresonansikan melalui dialog publik dan keterlibatannya dalam forum-forum perumusan kebijakan publik bersama pemerintah daerah. Meskipun, sekali lagi, menjadi catatan bahwa keterlibatan warga dalam FKKB masihlah sangat terbatas (belum sepenuhnya inklusif) dan proses diskursus yang terjadi tidak sepenuhnya sesuai dengan model ideal yang diinginkan Habermas.

Habermas juga mengajukan konsep mengenai legitimasi sebuah kebijakan publik yang harus melalui prosedur diskursus teoritis (pengujian atas klaim kebenaran) dan diskursus praktis (pengujian atas klaim ketepatan)¹³⁵ yang dilakukan secara argumentatif untuk mencapai konsensus yang bukan dari hasil paksaan atau kekerasan, dan dengan memperhatikan prinsip universalitas kepentingan warga lain khususnya yang akan terkena langsung keputusan atau kebijakan tersebut. Berkaitan dengan konsep tersebut, temuan penelitian menunjukkan adanya orientasi FKKB untuk membangun komunikasi yang dialogis, baik di internal maupun ketika berinteraksi dengan pihak lain, khususnya dengan pemerintahan daerah. Oleh para aktivis di Kabupaten Bandung, FKKB cenderung diposisikan dan digunakan sebagai kelompok atau organisasi *civil society* yang berwatak kooperatif/kolaboratif yang berorientasi konsensus, dalam pengertian menggunakan instrumen dialog ketimbang demonstrasi atau kekerasan dalam memperjuangkan aspirasinya. Dalam hal ini, orientasi untuk mencapai pemahaman dan konsensus bersama dalam pilihan strategi FKKB, dapat dikatakan sejalan dengan bingkai konsep Habermas mengenai diskursus tadi.

¹³⁵ Habermas juga menyebutkan mengenai uji kejujuran atas sebuah klaim kesahihan. Menurut Habermas, konsensus yang rasional hanya dapat dicapai setelah ada pengujian atas klaim kebenaran, ketepatan dan kejujuran tersebut. Masalah komunikasi muncul ketika ada masalah terkait proses pengujian atas sebagian atau seluruh klaim tersebut (lihat Hardiman, 2009:37-38).

Namun pola komunikasi dialogis yang dikembangkan FKKB tidak dapat sepenuhnya berada dalam situasi komunikasi ideal seperti dibayangkan oleh Habermas, karena tidak terpenuhinya prasyarat diskursus praktis yaitu proses komunikasi yang ideal dan aturan-aturan komunikasi yang ideal.¹³⁶ Kompetensi komunikasi (dalam membangun argumentasi yang rasional untuk menguji klaim-klaim kesahihan/kebenaran dalam perspektif Habermas) yang bervariasi diantara peserta FKKB dan pemerintah daerah, desakan untuk segera menghasilkan keputusan karena keterbatasan waktu yang tersedia, dan adanya pertimbangan untuk mengakomodasi pendapat yang beragam untuk tujuan menjaga kesolidan kelompok, merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi sulitnya penerapan prasyarat diskursus yang ditetapkan Habermas tersebut. Keputusan bersama, meskipun itu merupakan hasil konsensus, namun tidak selalu dihasilkan dari proses diskursus yang argumentatif. Pola sinkronisasi dan harmonisasi gagasan lebih sering dilakukan akibat adanya sejumlah kendala dan hambatan tadi. Di bagian ini, teori Habermas terlihat kesulitan untuk dapat diterapkan secara penuh.

Namun, Habermas sendiri tampaknya memang sudah menyadari bahwa dalam *Realpolitik* akan sangat sulit diharapkan dapat dilakukan diskursus yang selalu sukses bermuara pada konsensus. Jika komunikasi hendak terus berlanjut, para pihak harus mencari kompromi dengan cara mentoleransi berbagai alasan atau keyakinan etis-politis dan menemukan keseimbangan (Hardiman, 2009:117-118, mengutip Habermas, 1993:205). Dalam hal ini, dimungkinkan melakukan perundingan untuk mencari kompromi tersebut. Hanya saja, perundingan tersebut harus dilakukan menurut sebuah prosedur yang harus dilegitimasikan di dalam diskursus moral, yaitu bahwa kompromi tersebut harus sesuai dengan norma-

¹³⁶ Hardiman (2009:48-49) menafsirkan pandangan Habermas mengenai prasyarat komunikasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh konsensus yang dapat diterima umum, sebagai berikut: “(a) Keikutsertaan di dalam diskursus hanya mungkin jika orang menggunakan bahasa yang sama dan secara konsisten mematuhi aturan-aturan logis dan semantic dari bahasa tersebut; (b) Kesamaan dalam memperoleh kesempatan dalam diskursus hanya dapat terwujud, jika setiap peserta memiliki maksud untuk mencapai konsensus yang tidak memihak dan memandang para peserta lainnya sebagai pribadi-pribadi otonom yang tulus, bertanggungjawab dan sejajar dan tidak menganggap mereka hanya sebagai sarana belaka; (c) Harus ada aturan-aturan yang dipatuhi secara umum untuk mengamankan proses diskursus dari tekanan dan diskriminasi.”. Hanya argumentasi yang lebih baik yang dianggap dapat “memaksa” tercapainya konsensus tersebut.

norma yang dapat diuniversalkan, yaitu harus mendapat persetujuan semua pihak yang terkena hasil kompromi tersebut.¹³⁷

Habermas sendiri tidak menjelaskan bagaimana cara memperoleh 'persetujuan semua pihak tersebut', namun hanya merujuk pada kemampuan rasio dalam menguji norma-norma yang masih kontroversial dalam perundingan tersebut. Hardiman (2009:119-120) mengkritisi adanya ketidakjelasan dan kemungkinan kesulitan dalam menakar norma-norma tersebut hanya dengan mengandalkan rasio semata. Meskipun menyinggung mengenai kemungkinan digunakannya angket atau kuesioner, namun Hardiman juga tidak memberikan tawaran yang tegas mengenai cara mengetahui atau memperoleh persetujuan para pihak tersebut. Dalam hal ini peneliti memandang bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan perundingan tersebut dapat merujuk pada opini publik yang berasal dari sumber-sumber non diskursus. Hasil survei dan polling misalnya, yang meskipun bukan merupakan sikap seluruh pihak yang terkait dengan isu perundingan, namun setidaknya dapat mencerminkan kecenderungan persetujuan atau penolakan atas isu-isu tersebut. Jika dapat dilakukan sensus atau referendum terkait isu tersebut di kelompok masyarakat yang kemungkinan terkena hasil kebijakan, tentu akan jauh lebih baik untuk menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kompromi dimaksud tadi.

Faktor lain yang tampaknya juga cukup menonjol diantara pegiat FKKB -- khususnya dalam dialog dengan pemerintahan daerah--, adalah adanya kecenderungan merasa sudah cukup puas dengan adanya sebuah proses dialog, tanpa berorientasi lebih jauh untuk memastikan hasil dialog tersebut memang sudah melalui proses uji klaim kebenaran, ketepatan dan kejujuran secara argumentatif seperti yang dibayangkan Habermas. Bahkan terlihat kecenderungan kurang mempedulikan tindak lanjut dari dialog tersebut, apakah gagasan, kritik atau rekomendasi yang telah disampaikan dan didialogkan tersebut memang diadopsi dalam keputusan atau kebijakan pemerintah ataukah tidak.

¹³⁷ Habermas (1998a:140-141) membahas mengenai model-model resolusi konflik dan formasi kehendak bersama (*collective will-formation*) dalam pengambilan keputusan yaitu 'konsensus' dan 'arbitrasi' serta 'keputusan oleh otoritas' dan 'kompromi'.

Hal tersebut bukan saja karena FKKB memang tidak secara sadar merujuk pada model diskursus yang ditawarkan Habermas, namun kemungkinan dipengaruhi juga oleh cara pandang minimalis, bahwa kesempatan dapat berdialog dengan pemerintahan daerah sudah dipandang sebagai sebuah 'kemewahan', jika merujuk pada pengalaman mereka sebelumnya dalam interaksi dengan pemerintah daerah dimana ruang dialog tersebut cenderung lebih tertutup. Dalam hal ini perspektif 'backward looking' lebih dominan mempengaruhi terbentuknya ekspektasi warga dalam relasi dengan sistem politik yang ada, khususnya dengan pemerintahan daerah. Meskipun dalam hal ini juga perlu dicermati adanya kemungkinan untuk terjebak memandang dialog hanya sebagai formalisme semata, bahwa asal sudah didiskusikan atau didialogkan dengan pihak lain maka segala keputusan yang ditetapkan kemudian dianggap sudah memiliki legitimasi.¹³⁸ Masalah lebih besar dapat muncul jika ruang dialog semu tersebut secara sadar memang diciptakan oleh pihak tertentu untuk memanipulasi opini publik dan kebijakan publik bagi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dialog tentunya tidak dapat dilakukan sepihak, namun membutuhkan peran timbal balik dari semua pihak yang terlibat, yang dalam kasus di atas adalah *civil society* dan pemerintahan daerah, birokrasi dan elit politik yang terkait. Dalam hal ini, level diskursus yang dapat dikembangkan oleh *civil society* juga tidak dapat dilepaskan dari tingkat keterbukaan sistem politik dan persepsi elit politik dan birokrasi terhadap peluang dapat dilakukannya diskursus pada level yang lebih tinggi. Dengan demikian jika dikontraskan dengan 'model diskursus ideal' dalam konsep Habermas, apa yang berlangsung saat ini di FKKB mungkin dapat disebut sebagai 'model diskursus minimal', dalam arti tetap dapat dianggap sebagai

¹³⁸ Model perencanaan partisipatif atau konsultasi publik yang dilaksanakan oleh institusi pemerintahan umumnya berada dalam kondisi 'formalisme' tersebut. Sebuah rancangan keputusan atau kebijakan (seperti draft RPJMD, RAPBD, Ranperda, dll.) yang dibuat sendiri oleh institusi pemerintahan (atau umumnya dibantu lembaga konsultan), kemudian di konsultasi publik-kan, yang kemudian perumusan akhir dan penetapannya dilakukan sendiri oleh institusi pemerintahan tersebut. Praktik tersebut dapat dikaitkan dengan jenjang partisipasi warga dari Arnstein (1969) yang dikutip Iffe dan Tesoiero (2008:299). Arnstein membagi gradasi partisipasi mulai dari yang 'non partisipasi' (termasuk perilaku manipulasi, terapi, dan menginformasikan); 'tokenisme' (termasuk konsultasi, menenangkan, dan kemitraan), dan 'partisipasi deliberatif' (termasuk pendelegasikan kekuasaan dan kontrol oleh warga negara). Dari perspektif tersebut, model demokrasi deliberatif dapat dipandang sebagai upaya mengurangi derajat tokenisme dari modus 'menenangkan' menjadi kemitraan. Sementara model demokrasi asosiatif secara konsep dekat dengan tingkatan 'partisipasi deliberatif' dari Arnstein tadi.

sebuah diskursus meskipun tidak dalam pengertian diskursus versi Habermas sepenuhnya. Diskursus FKKB yang dilakukan tetap dipandang sebagai suatu bentuk deliberasi jika dipandang dari perspektif Morrel (2005), karena dilakukan melalui proses dialog warga (*civic dialogue*), diskusi deliberatif dan pengambilan keputusan deliberatif (*deliberative decision making*).

Dalam struktur kepesertaan FKKB yang pada awalnya secara konseptual diisi oleh para *credibel source* yang setelah saling berdialog diharapkan dapat menyebarkan informasinya ke publik, dari kaca mata Habermas juga menunjukkan belum utuhnya praksis diskursus dalam FKKB. Idealnya, hasil diskursus di internal FKKB ataupun antara FKKB dengan pemerintah daerah misalnya, dapat didialogkan lagi pada sumber-sumber sosiologis dan ruang publik lain dimana *credibel source* tadi berasal, seperti keluarga, komunitas, kelompok masyarakat, dan lain-lain. Sehingga dapat dilakukan reproduksi *public sphere* di tempat lain. Namun paling jauh yang terjadi umumnya adalah para peserta hanya dapat FKKB menginformasikan saja informasi yang mereka ketahui tanpa melalui proses diskursus lain, dan dapat memperkuat atau mungkin membentuk opini publik yang baru. Selain adanya hambatan dimana anggota masyarakat lain kurang responsif terhadap informasi yang diberikan, motivasi dan inisiatif peserta FKKB untuk melakukan diskursus di ruang publik yang lain juga dapat dikatakan minim (seperti dinyatakan sejumlah informan penelitian ini).¹³⁹

Sementara itu, kecenderungan para pegiat FKKB yang lebih condong pada sifat dan bentuk kelembagaan yang cair sesungguhnya sejalan dengan konsep Habermas mengenai *public sphere* yang pada intinya dipandang sebagai kondisi-kondisi komunikasi dan bukan sebagai institusi atau organisasi dengan keanggotaan tertentu dan aturan yang mengikat (Hardiman, 2009:135).¹⁴⁰

¹³⁹ Situasi tersebut sangat pas dengan sinyalemen Habermas (2007:298) yang menyatakan, “...mereka yang sering terlibat dalam diskusi (atau relatif banyak menyuarakan informasi terakurat) ternyata tidak memiliki niatan apapun selain hanya menginformasikan ide-ide mereka dan mempengaruhi orang lain yang tidak memiliki banyak informasi... menunjukkan betapa kecilnya kontribusi mereka bagi proses pembentukan opini publik”.

¹⁴⁰ FKKB dapat dipandang sebagai asosiasi dari definisi klasik Cole (1920) yang dikutip Elstub (2008:101), karena merupakan kelompok dari orang-orang yang memiliki tujuan atau agregasi tujuan yang sama dan terlibat dalam suatu program aksi bersama, dan sampai tingkat tertentu memiliki aturan tindakan bersama (lihat halaman 53 laporan penelitian ini).

4.4.4 FKKB ditinjau dari Teori Demokrasi Asosiatif

Jika teori demokrasi deliberatif khususnya dari Habermas lebih menekankan pada 'prosedur' bagaimana sebuah keputusan publik dihasilkan, di mana batas-batas antara negara dan *civil society* masih sangat dihargai, maka teori demokrasi asosiatif justru menitikberatkan pada adanya institusi dan mekanisme bersama antara pemerintah dan *civil society* dalam merumuskan dan memutuskan kebijakan serta mengelola sumberdaya (khususnya anggaran) terkait kebijakan-kebijakan tersebut.

Fung dan Wright (2003) mengajukan pendekatan *Empowered Participatory Governance* (EPG) yang merujuk pada pengalaman di Chicago, Porto Alegre, West Bengal dan Kerala. EPG berperan sebagai perantara (*intermediary*) antara warga dengan struktur formal negara, sebagai institusional arena dimana warga dapat terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan, yang umumnya muncul akibat adanya desakan dari organisasi-organisasi gerakan sosial, yang bertujuan untuk mendukung upaya kontrol di tingkat lokal, akuntabilitas pemerintahan, atau keadilan sosial. Asosiasi dapat menjalankan peran sebagai pembentuk (*generative role*) dari model EPG tersebut. Asosiasi juga dapat berperan merekrut dan memobilisasi warga, serta melengkapi individu-individu dengan kapasitas yang diperlukan dalam partisipasi politik, seperti memotivasi, mendukung informasi, dan meningkatkan keterampilan politik, melalui berbagai bentuk pelatihan dan peningkatan kapasitas.

Dalam konteks kelompok *civil society* di Kabupaten Bandung, ada kesadaran yang cukup kuat untuk dapat mengembangkan forum warga atau asosiasi warga yang dapat berperan melakukan pendidikan politik terhadap warga, memperkuat *civil society* dan 'mengawal' pemerintahan tampaknya. Meskipun demikian, kesadaran tersebut belum menjadi suatu agenda yang diturunkan dalam strategi gerakan yang komprehensif. Peran yang dimainkan oleh NGO atau kelompok masyarakat lainnya umumnya baru dilakukan dalam bentuk pendidikan politik warga, advokasi kasus dan advokasi kebijakan. Dibentuknya FKKB dapat

dikatakan baru pada level pembentukan embrio dari asosiasi warga yang lebih besar dan dengan peran yang lebih banyak.

Dari enam jenis kontribusi dari keberadaan asosiasi warga terhadap demokrasi yang diajukan Fung (2003), FKKB baru bermain di tataran: (a) Mendorong kebebasan berasosiasi; (b) Melakukan sosialisasi kewarganegaraan dan pendidikan politik; (c) Melakukan perlawanan dan menjadi kekuatan kontrol; (d) Merepresentasikan kepentingan warga; dan (e) Memfasilitasi deliberasi publik. Sementara berkaitan dengan peran (f) Keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan publik di pemerintahan, hal tersebut belum dimungkinkan karena hambatan struktural dimana sistem politik yang ada masih menempatkan lembaga eksekutif dan legislatif sebagai pemutus akhir pengambilan keputusan publik tersebut.

Namun menjadi satu catatan khusus, bahwa sampai saat ini relasi antara FKKB sebagai forum warga atau asosiasi dengan DPRD sebagai lembaga representatif yang saat ini masih sangat minim. DPRD belum menjadi target utama FKKB dalam mempengaruhi proses dan produk kebijakan publik di daerah. Sementara, sesungguhnya peran asosiasi semacam FKKB sangat strategis dan telah memiliki modal politik yang cukup besar untuk melakukan upaya mempengaruhi kebijakan tersebut. Fung (2003:523) berpendapat bahwa asosiasi dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas representasi kepentingan warga terhadap lembaga perwakilan dan pemerintah, dengan cara:

- (a) Meningkatkan cara bagaimana kepentingan warga dapat terwakili (diperjuangkan oleh para pembuat kebijakan) dan dituangkan dalam hukum dan kebijakan yang dibuat oleh negara;
- (b) Menyediakan saluran tambahan atau alternatif bagi individu-individu untuk mendesakkan isu-isu publik yang menjadi perhatian mereka, misalnya melalui *voting*, lobby, dan kontak langsung dengan pejabat pemerintah;
- (c) Melampaui batas-batas wilayah administratif, atau wilayah pemilihan jika terkait dengan anggota dan lembaga legislatif, sehingga lebih berpeluang

- dapat menyuarakan aspirasi warga di daerah-daerah yang jarang dijangkau politisi atau program pemerintah;
- (d) Lebih berpeluang dapat lebih intensif melakukan desakan atau upaya mempengaruhi kebijakan dibandingkan dengan saluran-saluran perwakilan formal;
- (e) Selain meningkatkan kualitas keterwakilan, asosiasi juga meningkatkan kesetaraan keterwakilan politik (*equality of political representation*), terutama bagi masyarakat yang terpinggirkan;

Model yang ditawarkan oleh Fung memang dibangun dari pengalaman negara-negara yang umumnya berbentuk federal, dimana negara-negara bagian tersebut memiliki kewenangan sangat besar dalam menentukan sendiri mekanisme perwakilan, perencanaan dan penganggaran pembangunan di wilayahnya masing-masing. Sebagai contoh, di Porto Alegre sebagai ibukota Negara Bagian Rio Grande do Sul dengan penduduk 1,3 juta jiwa, pada tahun 1988 partai politik yang berkuasa yaitu Workers' Party atau Partido dos Trabalhadores (PT) yang beraliran 'Kiri' dapat menginisiasi sebuah mekanisme baru dalam perencanaan pembangunan dan anggaran publik (*participatory budgeting*) melalui pembentukan Regional Plenary Assembly di 16 region yang anggotanya terdiri dari perwakilan pemerintah daerah dan perwakilan-perwakilan komunitas (*representatives of community*) seperti asosiasi warga, asosiasi pemuda, organisasi olahraga, termasuk organisasi pelaksana proyek kesehatan, transportasi, pendidikan, dan lainnya. Mereka bertemu secara rutin untuk berdiskusi mulai dari mengevaluasi program dan anggaran tahun berjalan/sebelumnya dan program dan anggaran untuk tahun berikutnya (lihat Fung, 2003:10-12). Model *representativeness* semacam itu membuat warga dapat terlibat langsung dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan dan penganggaran publik. Sementara sistem perwakilan komunitas dalam perencanaan dan penganggaran publik seperti itu tidak ada di Indonesia. Kalaupun perwakilan masyarakat dilibatkan dalam Musrenbang misalnya, hal tersebut sekedar bentuk konsultasi publik, sementara keputusan akhir tetap ada di tangan institusi pemerintahan.

Selain itu, terkait dengan *representativeness* di Indonesia, sistem pemilihan umum yang digunakan tampaknya memang sejak awal telah beresiko menciptakan adanya jarak antara politisi/anggota legislatif dengan konstituen. Secara teoritik, sistem distrik (*single-member constituency* atau *single-member-district*) sesungguhnya memberi peluang lebih besar bagi terbangunnya kedekatan antara politisi dan konstituen, karena dari tiap distrik hanya ada satu wakil yang juga umumnya harus berasal dari distrik tersebut. Karena kecil atau tidak terlalu besarnya distrik maka biasanya ada hubungan atau kedekatan antara kandidat dengan masyarakat di distrik tersebut. Diasumsikan kandidat lebih mengenal masyarakat maupun kepentingan yang mereka butuhkan. Selain itu, sistem ini juga akan mendorong partai politik untuk melakukan penyeleksian yang lebih ketat dan kompetitif terhadap calon yang akan diajukan untuk menjadi kandidat dalam pemilihan.¹⁴¹

Sementara pada sistem proporsional terbuka seperti yang digunakan di Indonesia saat ini, lebih mengutamakan adanya proporsi atau perimbangan keterwakilan antara jumlah penduduk dengan kursi di suatu daerah pemilihan.¹⁴² Meskipun dianggap dapat lebih menyelamatkan suara pemilih dan menguntungkan partai dengan suara lebih sedikit, namun calon-calon anggota legislatif yang dimunculkan sangat banyak, dan dimungkinkan bukan politisi yang memang berasal dari daerah tersebut. Akibatnya, antara pemilih dengan kandidat tidak ada kedekatan secara emosional. Pemilih tidak atau kurang mengenal kandidat, dan kandidat juga tidak mengenal karakteristik daerah pemilihannya, masyarakat pemilih dan aspirasi serta kepentingan mereka. Selain itu, kandidat lebih memiliki keterikatan dengan partai politik sebagai saluran yang mengusulkan mereka.

¹⁴¹ Lihat “Modul 1 Pemilih Untuk Pemula” dari KPU, Sumber: http://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1b.pdf, diakses 23 Juni 2012.

¹⁴² UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 5 menyebutkan: (1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka; (2) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Diasumsikan, kandidat yang terpilih mungkin tidak akan memperjuangkan dengan gigih kepentingan pemilih karena tidak adanya kedekatan emosional tadi.¹⁴³

Meskipun demikian, bahkan para anggota legislatif atau legislator di negara-negara yang sudah lebih awal menggunakan sistem demokrasi sekalipun tidak lepas dari kritik. Kritik tersebut, antara lain: (a) Banyak legislator yang terlalu bergantung pada opini publik (dari media) dibandingkan apa yang sungguh-sungguh terjadi di konstituennya; (b) Banyak legislator yang terputus hubungannya (*disconnected*) dari konstituen yang seharusnya mereka wakili; (c) Banyak legislator yang terlalu dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan; (d) Ada pula yang mengkritik bahwa secara alamiah model demokrasi representatif memang kurang mampu mengambil peran sentral dalam proses penyusunan kebijakan publik (lihat Mezey, 2008:xi).

Dalam teori politik, memang dibedakan antara sistem republik dan demokrasi. Sistem demokrasi lebih dekat dengan apa yang dikenal sebagai demokrasi langsung (*direct democracy*) di mana rakyat dapat secara langsung memberikan suara dan mempengaruhi keputusan politik, seperti praktek politik di masa Athena Kuno atau Swiss modern sekarang. Sementara dalam sistem republik, pada dasarnya rakyat memilih sejumlah wakil dari mereka, sehingga rakyat secara tidak langsung mempengaruhi keputusan atau kebijakan publik, dan kontrol atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Mezey (2008:2) membedakan antara sistem republik atau representatif (*representative democracy*) dengan sistem demokrasi atau demokrasi langsung. Salah satu cirinya adalah bahwa legislator (*representatives*) bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan kepada konstituen yang telah memilih mereka. Pertanggungjawaban (akuntabilitas) tersebut dapat berupa: (a) Pertanggungjawaban sejak masa kampanye Pemilu, seperti tawaran atau janji kampanye yang memang terkait langsung dengan kepentingan dan kebutuhan konstituen; (b) Setelah Pemilu (misalnya terkait dana kampanye); dan (c) Secara regular dalam masa jabatan legislator tersebut, seperti aspirasi konstituen yang telah diperjuangkan, kebijakan yang dihasilkan, atau

¹⁴³ Lihat “Modul 1 Pemilih Untuk Pemula” dari KPU, Sumber: http://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf, diakses 23 Juni 2012.

program pemerintahan yang terkait dengan konstituen (mengenai akuntabilitas dan *policy representation* ini lihat Mezey, hal. 134-138).

Dalam sebuah laporannya, UNDP¹⁴⁴ mencatat bahwa dalam sebuah negara demokratis adalah sebuah keharusan bagi pemerintah termasuk lembaga legislatif untuk secara rutin berkonsultasi, berinteraksi dan saling bertukar gagasan dan informasi dengan publik, sehingga warga dapat mengekspresikan preferensi dan memberikan dukungan atau penolakan terhadap kebijakan yang akan atau telah berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Ketika warga dapat membuat kesepakatan-kesepakatan dengan anggota legislatif yang telah mereka pilih, hal tersebut akan memperkuat hubungan antara legislator dan konstituen dan memberi dukungan pada legislator untuk dapat bersuara dan bertindak atas nama konstituen. Hubungan legislator dan konstituen yang efektif akan berkontribusi terhadap demokrasi dengan memperkuat koneksitas warga terhadap pemerintahan, dan dengan menyediakan *assessment* kondisi dan kebutuhan sesungguhnya dari rakyat dalam hal perumusan dan pelaksanaan program pembangunan.

Menurut UNDP, legislator yang memiliki ikatan yang kuat dengan konstituennya --khususnya yang dipilih dalam sistem Pemilu distrik (*single-member districts*)--, umumnya lebih berpeluang dapat dipilih kembali sekaligus dapat meningkatkan karier politik mereka sendiri. Bagi konstituen, mereka memperoleh keuntungan bahwa gagasan dan isu-isu yang mereka angkat dapat didengar dalam proses perumusan kebijakan, atau setidaknya mereka memiliki perwakilan sekaligus pembela yang bertindak atas kepentingan warga dan atas nama warga ketika akan/ada kebijakan pemerintahan yang akan berpengaruh terhadap warga.

Dari hasil studinya di berbagai negara tersebut, UNDP mencatat bahwa di banyak negara ada sejumlah upaya yang dilakukan oleh institusi dan/atau anggota legislatif dalam upaya menyediakan waktu, tempat dan sumberdaya untuk dapat berinteraksi dengan konstituen mereka (*constituency meetings*) secara rutin dan bermakna. Pada intinya adalah bagaimana legislator dapat membangun sebuah

¹⁴⁴ Sumber: <http://mirror.undp.org/magnet/Docs/parliaments/notes/Constituency%20Relations%205%20.htm>, diakses 23 Juni 2012.

pola komunikasi yang rutin dan mudah diakses oleh konstituen. Beberapa pola yang umum digunakan seperti: (a) Membuka kantor atau sekretariat tempat pertemuan legislator dan konstituen, seperti dilakukan di Chili; (b) Legislator membuka sekretariat atau tempat pertemuan di distrik pemilihannya, seperti di Polandia dan Palestina; (c) Legislator menyiapkan staff dan sumberdaya pendukung yang dapat membantunya secara rutin berkomunikasi dengan konstituennya; (d) Dukungan dari anggaran publik bagi legislator untuk berkomunikasi dengan konstituen di daerah pemilihannya, seperti di Amerika Serikat dan Chili.

Model atau pola yang diulas UNDP tadi sesungguhnya juga sudah banyak dilakukan di Indonesia. Banyak anggota legislatif (khususnya di DPR) yang membuka kantor atau sekretariat komunikasi di daerah pemilihannya. Secara formal juga ada mekanisme dukungan dana/sumberdaya bagi anggota DPR dan DPRD untuk melakukan reses ke konstituennya. Selain yang sifatnya formal (pertemuan yang dirancang khusus), banyak pula politisi atau anggota legislatif yang mencoba mengembangkan pola-pola komunikasi informal dengan konstituennya. Thamrin (2009) dalam sebuah laporan untuk LGSP-USAID Indonesia mencatat sejumlah inovasi yang dilakukan anggota dan lembaga legislatif di beberapa daerah dalam upaya meningkatkan transparansi, partisipasi dan keterhubungan antara anggota legislatif dan konstituennya. Meskipun demikian laporan tersebut juga memberi catatan mengenai tidak jelasnya mekanisme dalam UU mengenai Susunan dan Kedudukan Anggota DPR, DPRD dan DPD, dan UU mengenai Pemerintah Daerah dalam hal pertanggungjawaban anggota DPR/DPRD terhadap konstituen.¹⁴⁵ Berbeda dengan pemerintah daerah yang secara reguler diwajibkan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, DPRD dan masyarakat, namun terhadap institusi dan anggota

¹⁴⁵ UU No. 22 tahun 2003 pada Pasal 351 Butir (k.) menyebutkan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk “memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya”. Sementara pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 45 menyebutkan bahwa Anggota DPRD mempunyai kewajiban yang salah satunya pada Butir (g.) yaitu “memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya”.

legislatif di pusat dan daerah justru tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, bahkan kepada konstituen di daerah pemilihannya sendiri sekalipun.

Contoh-contoh dari laporan LGSP-USAID memberikan informasi bahwa tidak semua anggota legislatif di daerah enggan atau takut bertemu konstituennya dan hanya menggunakan dana publik untuk kepentingannya sendiri. Namun dalam konteks Kabupaten Bandung, persepsi dan preferensi warga terhadap anggota dan lembaga legislatif pada faktanya masih belum banyak bergeser dari situasi yang disebutkan terakhir tadi. Dalam situasi demikian, asosiasi warga seperti FKKB sangat berpeluang dan sekaligus diharapkan untuk dapat mengambil peran lebih besar dalam memberdayakan warga sekaligus anggota dan lembaga legislatif di daerah melalui praktik-praktik langsung bersama kedua pihak tersebut.

Sementara itu, FKKB juga cenderung masih berhati-hati ketika berhubungan dengan pemerintahan daerah, terutama yang berkaitan dengan kemungkinan mengakses anggaran publik di APBD. Meskipun dukungan dari APBD terhadap organisasi masyarakat tersebut adalah bagian dari hak warga dan sekaligus kewajiban pemerintah, dan di sisi lain FKKB kerap mengalami hambatan dalam konsolidasi dan pengembangan kegiatan FKKB akibat terbatasnya sumberdaya, namun FKKB masih khawatir dengan kecenderungan kooptasi pemerintahan yang dapat mengancam kemandiriannya. Selain itu FKKB juga khawatir dukungan anggaran tersebut justru dapat menjadi potensi rusaknya konsolidasi internal FKKB, sebagaimana banyak mereka saksikan terjadi di organisasi atau forum sejenis di Kabupaten Bandung sebelumnya.

Jika menggunakan terminologi '*backward looking*' dan '*forward looking*' dari Roberts (2010) berkenaan dengan cara pandang atau preferensi warga terhadap politisi dan pemerintahan, dapat dikatakan FKKB lebih dominan menggunakan perspektif yang pertama tadi. Dalam hal ini, relasi yang dibangun lebih didasarkan pada preferensi yang terbentuk dari pengalaman sebelumnya dengan pemerintahan daerah, dan bukan pada orientasi pada sesuatu yang ingin dicapai. Dimana pengalaman relasi tersebut tampaknya lebih menonjol yang bernuansa negatif dari sisi pandang warga, seperti adanya kontrol politik yang kuat, pelemahan *civil*

society, ruang partisipasi yang sempit (tokenisme), kebijakan publik yang tidak responsif, politisasi birokrasi dan anggaran publik, politik uang dalam Pemilu/Pemilukada; dan lain-lain. Akibatnya, *trust* warga terhadap pemerintahan menjadi lemah, dan harapan warga terhadap pemerintahanpun juga menjadi minimalis.

Di sisi lain, hasil penelitian ini menunjukkan sikap aparat pemerintah daerah cenderung masih menempatkan warga atau organisasi *civil society* sebagai pihak atau aktor yang perlu dilibatkan. Dalam konteks penyusunan dan pengambilan keputusan publik, warga memang diharapkan dapat turut berpartisipasi dengan memberikan informasi, usulan, gagasan, kritik, atau rekomendasi, namun keputusan akhir tetap di tangan pemerintahan daerah. Bahkan pemerintahan daerah cenderung masih menggunakan terminologi lama seperti 'LSM yang konstruktif dan destruktif' ketika memetakan konstelasi organisasi *civil society* yang ada di daerah. Pemerintahanpun menjadi 'pilih-pilih' terhadap NGO/CSO yang dianggap dapat diajak bekerjasama baik dalam konteks perumusan kebijakan publik ataupun akses anggaran publik di APBD dalam bentuk proyek, hibah ataupun bantuan sosial.¹⁴⁶ Meskipun secara normatif kepala daerah membuka ruang bagi keterlibatan semua NGO/CSO, namun pada prakteknya hal tersebut berbeda-beda tergantung pada sikap masing-masing kepala SKPD (Satuan Kerja Pemerintah daerah, yaitu Dinas, Badan, dan Lembaga) di daerah.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Menurut para informan dari FKKB dan FDA, bahkan mereka juga masih kerap kesulitan untuk mengakses dokumen-dokumen publik khususnya mengenai anggaran dari pemerintah daerah, meskipun sudah ada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (yang telah berlaku efektif tahun 2010) dan Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Andi, salah seorang Kepala Sub Bidang di Bappeda yang menurut FKKB termasuk staff di pemerintah daerah yang paling banyak berinteraksi dengan NGO/CSO di Kabupaten Bandung. Kondisi tersebut mengindikasikan belum adanya perubahan mendasar dari kesimpulan penelitian LIPI (2001) di Kabupaten Bandung pada awal 'Reformasi' yang sudah diulas di halaman 11, bahwa ciri-ciri birokrasi tradisional masih kuat di Kabupaten Bandung. Demikian pula dengan analisa Etzioni-Halevy (2011:225) bahwa birokrasi bebas memilih sendiri kelompok kepentingan yang akan mereka dengarkan (lihat *footnote* 35 di halaman 22 laporan penelitian ini). Selain itu, kecenderungan 'pilih-pilih' tadi juga sejalan dengan analisa Yang dan Callahan (2007) mengenai dan perilaku manajer publik dalam menyikapi prinsip-prinsip partisipasi, dan pendapat dari Meier dan O'Toole (2006) mengenai *bureaucratic values* yang diulas pada halaman 32 laporan ini. Di Kabupaten Bandung, keterbukaan pemerintah daerah masih bergantung pada *political will* kepala daerah dan tampaknya belum terinstitusionalisasi secara penuh karena pada prakteknya, karena adanya perbedaan sikap kepala-kepala SKPD dalam menyikapi tuntutan partisipasi dan transparansi dari warga. Dalam hal ini posisi warga masih sangat lemah karena tidak ada jaminan bahwa keterbukaan dapat bertahan atau menjadi lebih baik.

Hambatan dari gagasan institusionalisasi pendalaman demokrasi berupa devolusi peran negara/pemerintah yang didesentralisasikan kepada institusi warga membutuhkan kemauan baik dari kekuatan *civil society* maupun --dan terutama-- pemegang kekuasaan politik yang ada, seperti yang terjadi di Porto Alegre dan Kerala. Prasyarat tersebut yang belum ada di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bandung. Gagasan dan konsep desentralisasi masih bertarung pada pada tataran internal struktur pemerintahan dan birokrasi: dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (melalui pelimpahan sejumlah kewenangan dan Dana Perimbangan), dan belakangan dari pemerintah daerah ke pemerintah desa (melalui Alokasi Dana Desa). Gagasan mengenai devolusi peran negara/pemerintah dan perencanaan serta pengelolaan bersama anggaran publik antara pemerintah dan *civil society* tampaknya belum lagi masuk dalam wacana mainstream pendalaman demokrasi di Indonesia. Bentuk konkret dari akses publik terhadap anggaran publik masih dalam skema hibah atau bantuan sosial dari pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan saja.

Dengan kata lain, gagasan demokrasi asosiatif seperti dibayangkan Fung dan kawan-kawan masih memerlukan jalan cukup panjang untuk dapat direalisasikan di Indonesia, karena belum berkembang wacana mengenai konsep dan model *intermediary institutions* seperti dibayangkan Fung. Selain itu, tidak ada kekuatan politik besar (pemerintah atau partai politik dan *civil society*) yang menjadi pelopor untuk menginisiasi model tersebut seperti yang terjadi di Porto Allegre dan Kerala. Mengacu pada pendapat Cohen dan Rogers (2005, yang dikutip Fung, 2003:535) dan Baber (1984, yang dikutip Fung, 2007: 448-450), ada prasyarat yang perlu dipenuhi, yaitu adanya *institusional reforms* yang memungkinkan asosiasi-asosiasi warga dapat berpartisipasi secara kooperatif dengan para pejabat publik dan birokrasi dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan administrasi publik. Dalam pandangan peneliti, institusionalisasi dan legalisasi 'ruang bersama perencanaan dan pengelolaan sumberdaya publik' antara pemerintah dan CSO tersebut memang harus dilakukan oleh pemerintah, namun inisiatif awal untuk

Kondisi ini mengkonfirmasi hasil kajian JPIP (2006) mengenai dominannya peran kepala daerah dalam menentukan demokratisasi di daerah (lihat halaman 5 dan 33 laporan ini).

mendorong dapat dibangunnya ruang tersebut tampaknya memang harus dimulai dari tekanan *civil society* sendiri.

4.4.5 Ikhtisar Tinjauan Teoritik Terhadap FKKB

Dari uraian sebelumnya mengenai hasil analisa tinjauan teoritik terhadap keberadaan FKKB, temuan-temuan utama disajikan pada tabel berikut:

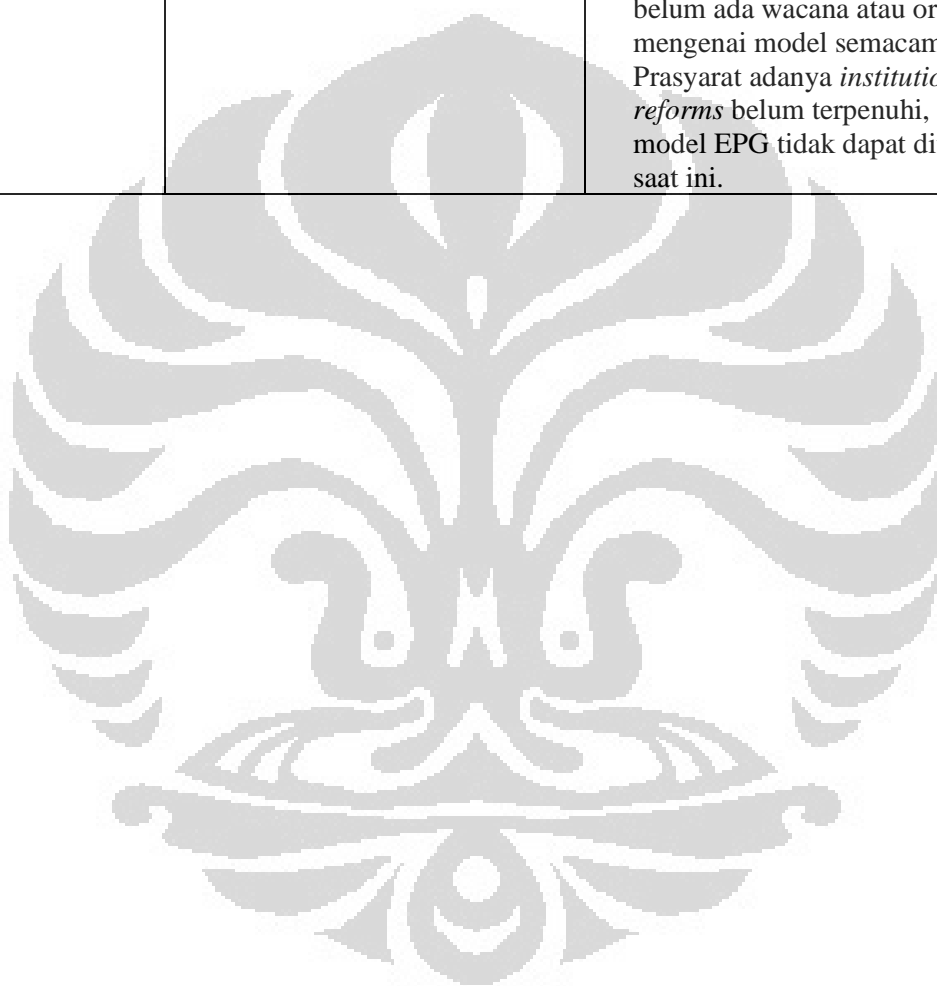
Tabel 4.6: Ikhtisar Tinjauan Teoritik Terhadap FKKB

Teori	Konfirmasi	Perbedaan/Kritik
<p>Teori tentang Forum Warga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • FKKB sebagai institusi dari kumpulan individu dan berwatak teritorial. • FKKB lahir dari kebutuhan akan wadah komunikasi, pengorganisasian masyarakat dan aksi bersama, namun sekaligus sebagai kelanjutan/pengembangan dari suatu program, yang disinergikan dengan agenda advokasi kelompok <i>civil society</i> lokal. • FKKB dibentuk untuk membantu menyelesaikan masalah di daerah. • FKKB bisa dikatakan elitis, karena pada awalnya hanya berorientasi melibatkan <i>credible source</i> yang dapat dipandang sebagai elit komunitas. Secara kuantitatif, partisipasi perempuan juga terbilang masih sedikit di FKKB. • Hambatan sosiokultural dalam kehidupan asosiasional kemungkinan karena FKKB lebih dekat dengan ciri <i>Gemeinschaft</i> (komunitas) dibandingkan sebuah organisasi modern. • Semangat kolektif yang tidak stabil juga terlihat di FKKB. • Ketergantungan pada dukungan donor untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • FKKB bukan forum warga yang berbasis sektoral atau isu (seperti isu lingkungan hidup, perencanaan/penganggaran partisipatif, dan lain-lain), tapi bermain di arena politik, yaitu melakukan pendidikan politik dan Pemilukada, dan kontrol terhadap pemerintahan. • FKKB juga diorientasikan menjadi bagian dari upaya membangun ‘blok politik baru’ di daerah. • FKKB tidak hanya fokus di satu isu/sektor, tapi bersifat multi isu/sektor. • Ruang politik FKKB cukup terbuka, khususnya dalam interaksi dengan pemerintah daerah. Namun hambatan struktural terkait terbatasnya peran dalam pengambilan keputusan publik masih terjadi.

Teori	Konfirmasi	Perbedaan/Kritik
Teori Partisipasi Politik	<p>kegiatan dalam skala besar masih sulit dihindarkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Partisipasi politik di FKKB sejalan dengan teori Huntington dan Nelson mengenai partisipasi individual dan kolektif, terorganisir dan spontan, damai, legal. Untuk beberapa hal dapat dikatakan efektif (seperti pendidikan politik), namun untuk pengaruhnya terhadap kebijakan publik tampaknya belum jelas terlihat. Partisipasi politik FKKB juga sejalan dengan teori dari Verba et.al. mengenai partisipasi langsung (dialog dan terlibat dalam perumusan kebijakan publik di daerah), dan tidak langsung (mempengaruhi proses Pemilu/kada dengan dialog antara konstituen dan calon Bupati/Wakil Bupati). Partisipasi politik di FKKB sejalan dengan teori Faulks, bahwa partisipasi bertujuan lebih luas untuk menyatukan <i>civil society</i> dan mengedukasi warga negara. 	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi politik di FKKB tidak berlandaskan pada budaya politik ‘penghormatan pada otoritas’ (Verba, et.al.), tapi justru pada keinginan untuk melakukan kritik dan partisipasi terhadap sistem politik dan otoritas yang ada, namun dengan jalan damai atau dialogis. (Sebagai catatan, sampai saat ini FKKB belum pernah melakukan demonstrasi atau menunjukkan sikap oposisi secara terbuka).
Teori Demokrasi Deliberatif	<ul style="list-style-type: none"> Strategi dan upaya FKKB dalam mendeliberasi proses politik dalam rekrutmen elit politik dan penyusunan kebijakan publik di daerah sejalan dengan konsep Habermas mengenai demokrasi deliberatif. FKKB dapat dikategorikan sebagai <i>civil society organization</i> karena dibentuk oleh warga dan bukan oleh institusi birokrasi dan pasar. FKKB dapat disebut sebagai <i>political public sphere</i> karena arena diskursus warga atau konstituen dalam merumuskan opini publik, 	<ul style="list-style-type: none"> Pada prinsipnya konsep diskursus dari Habermas dicirikan oleh adanya dialog yang inklusif, setara dan argumentatif. Dalam konteks FKKB, diskursus belum sepenuhnya inklusif (terbuka bagi seluruh warga), karena yang terlibat adalah masih terbatas pada para individu simpul jaringan (<i>credible source</i>). Diskursus yang terjadi relatif cukup setara diantara mereka yang terlibat. Sementara kapasitas argumentasi juga belum merata di seluruh peserta yang terlibat. Model diskursus ideal dari Habermas sulit diterapkan sepenuhnya dalam diskursus di

Teori	Konfirmasi	Perbedaan/Kritik
	<p>yang selanjutnya mendialogkannya dengan sistem politik yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FKKB juga berorientasi mengembangkan diskursus dalam pengambilan keputusan atau dialog dengan pihak lain. • FKKB mengambil jalan damai (koperatif/ kolaboratif) dalam memperjuangkan aspirasinya. • Sifat kelembagaan FKKB yang 'cair' sejalan dengan pandangan Habermas mengenai <i>public sphere</i> yang merupakan kondisi komunikasi dan bukan institusi atau organisasi dengan keanggotaan dan aturan yang mengikat. 	<p>FKKB, karena tidak terpenuhinya prasyarat mengenai kompetensi komunikasi, kecenderungan mengakomodasi dan mengharmonisasi beragam pendapat yang ada, dan adanya <i>constraints</i> waktu dan kemendesakkan untuk adanya keputusan. Mungkin dapat disebut sebagai 'diskursus minimal', yang lebih dekat dengan teori dari Morrel (2005) mengenai tiga bentuk deliberasi yaitu dialog warga (<i>civic dialogue</i>), diskusi deliberatif dan pengambilan keputusan deliberatif (<i>deliberative decision making</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecenderungan warga sudah merasa cukup puas dapat berdialog dengan otoritas politik yang ada di daerah membuat kurang memperhatikan kedalaman substansi dialog, hasil akhir dari dialog dan tindak lanjut hasil dialog tersebut.
Demokrasi Asosiatif	<ul style="list-style-type: none"> • Dari enam jenis kontribusi dari keberadaan asosiasi warga terhadap demokrasi yang diajukan Fung (2003), FKKB ada di tataran: (a) Mendorong kebebasan berasosiasi; (b) Melakukan sosialisasi kewarganegaraan dan pendidikan politik; (c) Melakukan perlawanan dan menjadi kekuatan kontrol; (d) merepresentasikan kepentingan warga; dan (e) Memfasilitasi deliberasi publik (lihat Sub BAB 2.2.3 pada halaman 50-53). 	<ul style="list-style-type: none"> • Sementara berkaitan dengan peran (f) Keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan publik di pemerintahan, hal tersebut belum dimungkinkan karena hambatan struktural dimana sistem politik yang ada masih menempatkan lembaga eksekutif dan legislatif sebagai pemutus akhir pengambilan keputusan publik tersebut. • Model <i>Empowered Participatory Governance</i> (EPG) yang diajukan Fung sebagian dapat dibentuk atas desakan kekuatan <i>civil society</i>, yang kemudian didukung dan dilegalkan oleh otoritas politik yang ada. Dalam konteks FKKB, orientasi dan peran yang diambil baru sebatas kontrol dan terlibat dalam perumusan kebijakan. Wacana dan orientasi model EPG tampaknya belum banyak didiskusikan. Bahkan dalam hal opsi untuk mengakses sumberdaya

Teori	Konfirmasi	Perbedaan/Kritik
		<p>dari APBD-pun FKKB cenderung menghindarinya, karena khawatir terkooptasi dan kehilangan independensinya. Dalam hal ini orientasi FKKB belum masuk dalam skema model EPG-nya Fung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dari sisi partai politik dan pemerintah daerahpun tampaknya belum ada wacana atau orientasi mengenai model semacam itu. Prasyarat adanya <i>institutional reforms</i> belum terpenuhi, sehingga model EPG tidak dapat diterapkan saat ini.



BAB 5 REFLEKSI, KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Refleksi dan Implikasi Teoritis

Dari uraian temuan dan analisa di BAB 4, FKKB merupakan model forum warga yang cukup unik karena mencoba berperan dalam proses rekrutmen politik di Pemilu tahun 2010, dan selanjutnya menjalankan peran politik ‘mengawal’ kebijakan pemerintah yang baru Pasca Pemilu. Dalam hal ini FKKB berperan membangun ‘*civic engagement*’ antara warga dengan pemerintahan di daerah. Kemunculan FKKB sebagai aktor demokrasi yang baru di Kabupaten Bandung cukup menonjol selain hadir pada momentum politik yang tepat juga dipandang telah mampu menawarkan suatu model pendidikan politik dalam bentuk kampanye politik dialogis antara calon Bupati/Wakil Bupati dengan warga atau konstituen yang plural dari beragam kelompok, organisasi dan wilayah di Kabupaten Bandung. Model kampanye dialogis tersebut kemudian oleh banyak pihak dipandang menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan metode kampanye yang dikembangkan oleh KPU/KPUD selama ini, yang dinilai lebih menonjolkan aspek formalitas dan normatif belaka.

Kelompok warga atau konstituen di Kabupaten Bandung yang berkumpul dalam FKKB dapat disebut sebagai *civil society* karena dibentuk sendiri oleh warga, meskipun tidak dapat dilepaskan dari dukungan aktor luar yaitu FAB dan lembaga donor. Dialog-dialog tersebut dapat juga dikategorikan sebagai sebuah *public sphere* dalam konsep Habermas, meskipun belum dapat disebut bersifat inklusif sepenuhnya, karena peserta yang terlibat adalah para simpul jaringan komunitas atau yang mereka sebut sebagai *credible source*, yang notabene dapat dikategorikan sebagai para elit komunitas. Diskursus yang terjadi juga tidak sepenuhnya dapat dilakukan sebagaimana dibayangkan Habermas, karena adanya keragaman kompetensi komunikasi, keinginan menjaga kohesi dan harmoni kelompok, dan pertimbangan

keterbatasan waktu untuk segera mengambil keputusan. Kompromi lebih banyak terjadi dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Gagasan dan inisiatif kelompok *civil society* di Kabupaten Bandung untuk menginstitutionalisasi FKKB dapat dipandang sebagai pengembangan strategi dalam merespon peluang yang mungkin dapat diambil pasca Pemilu. FKKB kemudian menjadi wadah diskusi dan dialog di internal warga dan dengan pemerintah terpilih pasca Pemilu, baik dalam bentuk dialog informal, dialog formal, ataupun keterlibatan mereka dalam proses pembahasan dan perencanaan kebijakan publik di daerah. Sementara itu, pembahasan mengenai bentuk kelembagaan FKKB pernah cukup intensif dilakukan, meskipun kemudian terputus dan belum dilanjutkan lagi. Ada perbedaan pandangan antara apakah FKKB harus diformalkan ataukah tetap menjadi sebuah kelompok yang 'cair' saja.

Arena politik yang dimasuki FKKB juga masih terbatas di eksekutif atau pemerintah saja, terutama karena secara historis pembentukan FKKB awalnya memang terkait dengan proses Pemilu. Ada sejumlah gagasan terkait dengan perluasan arena politik, seperti melakukan monitoring dan mengkritisi kinerja DPRD, mereplikasi model dialog FKKB dalam Pilkada, dan lainnya. Namun disisi lain konsolidasi FKKB juga cenderung mengendur. Aktivitas lebih banyak digerakkan oleh para aktivis di FDA dan PSDK yang memang sejak awal terlibat dalam pembentukan FKKB. Belum adanya momentum politik yang dipandang 'pas' dan keterbatasan sumberdaya untuk melakukan kegiatan dalam skala cukup besar, membuat aktivitas FKKB cenderung hanya berupa diskusi-diskusi kecil informal dan respon atas perkembangan isu atau agenda dari luar.

Keberadaan FKKB juga dipandang sebagai '*school of democracy*' sekaligus sebagai 'panggung politik' khususnya bagi para aktivis komunitas untuk belajar '*civic skill*' dan membangun '*political track*'. Ada harapan agar dari FKKB dapat muncul tokoh-tokoh politik baru yang dapat mengambil peran dalam arena politik dan jabatan

publik khususnya di daerah. Dikaitkan dengan peluang lebih terbukanya upaya demokratisasi di era otonomi daerah, khususnya berkenaan dengan peningkatan civic enegagement antara warga dengan pemerintah daerah, FKKB dapat berperan lebih besar dalam mendorong upaya *deepening democracy* (perluasan keterlibatan aktor sosial dalam arena politik di daerah), dan *extending democracy* (perluasan arena-arena pengambilan keputusan publik yang sebelumnya di dominasi aktor privat dan elit negara).

Pada BAB 4 situasi-situasi tersebut juga sudah coba dianalisa dari perspektif dan sejumlah teori politik dan sosiologi politik, di mana ada bagian dari karakteristik FKKB yang mengkonfirmasi dan ada pula yang berbeda dengan teori-teori tersebut (lihat Sub BAB 2.3 Kerangka Konseptual, dan Sub BAB 4.4 FKKB Ditinjau dari Teori tentang Forum Warga, Partisipasi Politik, Demokrasi Deliberatif dan Demokrasi Asosiatif). Dengan kata lain, ada bagian dari teori-teori tadi yang dapat diaplikasikan, dan ada yang tampaknya sulit untuk diterapkan karena perbedaan konteks politik dan/atau tidak tersedianya prasyarat yang dibutuhkan. Beberapa proposisi dari temuan teoritik tersebut disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.1: Proposisi Habermas Tentang FKKB
Sebagai *Civil Society Organization* dan *Public Sphere***

No.	Proposisi	Dukungan Temuan
1	<i>Civil society</i> terdiri atas perhimpunan-perhimpunan, organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan (plural) yang kurang lebih bersifat spontan.	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta FKKB adalah individu-individu yang meskipun berasal dari beragam komunitas, kelompok dan organisasi, namun pesertanya bukan institusi atau perwakilan dari institusi-institusi tersebut. • Pembentukan FKKB secara evolutif (dari kegiatan dialog menjadi institusi), namun FKKB bukan kelompok yang spontan tapi relatif terencana.
2	Kelompok-kelompok warga terbentuk jika warganegara dapat secara bebas mencapai	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya jaminan konstitusional mengenai kebebasan berserikat dan

No.	Proposisi	Dukungan Temuan
	kesepakatan untuk meraih tujuan-tujuan sosial politis mereka dan membentuk sebuah asosiasi otonom yang lepas dari kepentingan birokrasi dan pasar (<i>market</i>).	<p>menyatakan pendapat menunjukkan tidak lepasnya kepentingan negara atau pemerintah terhadap keberadaan ruang publik itu sendiri, baik sekedar membangun citra atau memang sungguh-sungguh memandang pentingnya peran <i>civil society</i> dalam demokrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Munculnya FKKB, seperti halnya banyak CSO lainnya, tidak dapat dilepaskan dari peran atau dukungan donor, yang <i>notabene</i> juga punya kepentingan lain terkait dengan preferensi mereka terhadap iklim politik dan ekonomi atau pendekatan tertentu terhadap pasar. Jadi kemungkinan adanya kepentingan tidak langsung dari dan untuk kekuatan pasar sulit untuk dihindarkan juga.
3	Dalam diskursus semua isu dibahas bersama dalam posisi yang setara tanpa tekanan pihak lain.	Di internal FKKB, ‘tekanan’ dalam diskursus justru muncul dari kebutuhan untuk menjaga kohesifitas dan harmoni dalam kelompok, selain <i>constrain</i> waktu atau kemendesakkan untuk segera dapat mengambil keputusan.
4	Diskursus berorientasi konsensus, tapi bisa dengan negosiasi dan kompromi dengan syarat-syarat tertentu.	Akibat ‘tekanan’ di atas, di FKKB kompromi tampaknya lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan.
5	<i>Public opinion</i> mengacu pada tugas kritik dan kontrol dari <i>public body</i> secara informal.	FKKB menyampaikan opininya baik secara formal maupun informal.
6	Diskursus perlu kompetensi komunikasi.	Kompetensi komunikasi di FKKB beragam sehingga situasi bicara ideal versi Habermas sulit dikembangkan.
7	Diskursus bersifat inklusif.	<ul style="list-style-type: none"> • FKKB tidak dapat dikatakan inklusif sepenuhnya karena peserta awalnya dipilih yaitu para <i>credible source</i> yang <i>notabene</i> adalah elit atau orang yang berpengaruh di komunitasnya.

No.	Proposisi	Dukungan Temuan
		<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi perempuan di FKKB masih terbatas.
8	<i>Public sphere</i> pada intinya dipandang sebagai kondisi-kondisi komunikasi dan bukan sebagai institusi atau organisasi dengan keanggotaan tertentu dan aturan yang mengikat.	Bentuk kelembagaan FKKB yang manifes adalah 'cair' (tidak diformalkan).
9	Adanya jaminan konstitusional untuk ruang publik atau <i>civil society</i> yang otonom.	Konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat, bahkan di Kabupaten Bandung ada Perda mengenai Transparansi dan Partisipasi, namun pelaksanaannya dipandang masih belum optimal.

Selanjutnya berbagai implikasi teoritik penelitian ini yang sudah dibahas pada BAB 4 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2: Implikasi Teoritik

No.	Teori	Temuan	Implikasi Teoritik
Teori-teori tentang Forum Warga			
1	Forum warga terbentuk dari aliansi berbagai kelompok/ organisasi dan individu tokoh lokal.	FKKB sebagai forum warga dari kumpulan individu para tokoh (<i>credible source</i>) yang pada awalnya dikonsolidasikan atau dimobilisasi oleh NGO/CSO inisiator.	Menambahkan aspek mobilisasi untuk partisipasi di awal pembentukan forum warga.
2	Forum warga umumnya lahir dari kebutuhan akan wadah komunikasi, pengorganisasian masyarakat, dan aksi bersama; sebagai kelanjutan dari suatu program/proyek; atau sebagai syarat dari suatu program/proyek.	FKKB lahir sebagai kelanjutan dari sebuah program/proyek, namun sejak awal juga ditempatkan sebagai kolaborasi antara skema program (FAB dan donor) dan skema advokasi kelompok <i>civil society</i> di tingkat lokal .	Menambahkan aspek kolaborasi kepentingan dan gagasan dari aktor lokal (kelompok <i>civil society</i> di lokal) dan aktor eksternal (NGO pendamping maupun lembaga donor).

No.	Teori	Temuan	Implikasi Teoritik
3	Di banyak forum warga umumnya ada kecenderungan terbaikannya masalah atau isu lain diluar isu utama yang menjadi fokus forum warga.	Dalam konteks FKKB, beragam isu atau masalah di Kabupaten Bandung relatif cukup terakomodasi (multi sektoral).	Menambahkan mengenai tipe forum warga yang multi isu/sektor, mulai dari isu politik (Pemilukada) sampai pada perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
4	Di banyak forum warga umumnya ada kecenderungan forum tersebut menjadi elitis dan tidak terakses oleh warga kebanyakan.	Desain awal FKKB berupa konsolidasi <i>credible source</i> atau individu dari berbagai komunitas, kelompok dan organisasi yang dipandang memiliki kapasitas sebagai rujukan atau sumber informasi di komunitasnya tersebut, meskipun ada orientasi untuk selanjutnya membuka keterlibatan warga lain.	Mengkonfirmasi kecenderungan elitis forum warga.
5	Di banyak forum warga umumnya ada hambatan sosio-kultural terhadap kehidupan asosiasional.	Hambatan kehidupan asosiasional di FKKB kurang menonjol karena latar budaya peserta FKKB umumnya homogen, yaitu dari suku Sunda. FKKB lebih menunjukkan ciri-ciri <i>Gemeinschaft</i> (paguyuban).	Menegaskan kemungkinan faktor kesamaan dan perbedaan latar belakang budaya dari orang-orang yang terlibat dalam forum warga terhadap kehidupan asosiasional. Dalam masyarakat yang heterogen, hambatan sosio kultural tersebut kemungkinan lebih tinggi (Hal ini menurut peneliti masih memerlukan kajian lain yang lebih mendalam).
6	Di banyak forum warga umumnya semangat kolektif anggota atau aktivis forum warga tidak stabil.	Dalam konteks FKKB hal tersebut sangat tampak dari menurunnya konsolidasi FKKB pasca keterlibatan mereka pada forum dialog dengan calon Bupati/Wakil Bupati sebelum Pemilukada, dan terlebih pasca momentum perumusan RPJMD.	Mengkonfirmasi tidak stabilnya semangat kolektif dan aktivitas forum warga.

No.	Teori	Temuan	Implikasi Teoritik
7	Di banyak forum warga umumnya ada ketergantungan pada pihak sponsor yang mendanainya.	Kegiatan FKKB awalnya didukung oleh lembaga donor. Selanjutnya cukup banyak kegiatan FKKB yang dapat dilakukan sendiri secara swadaya, meskipun tidak dapat dipungkiri terbatas pada kegiatan kecil dan sporadis.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkritisi kesimpulan mengenai peran donor. Donor dibutuhkan, tapi bukan selalu berarti ketergantungan. • Menambahkan aspek keterbatasan kemampuan forum warga untuk mendanai kegiatannya, khususnya pada skala kegiatan yang relatif besar.
8	Di banyak forum warga umumnya mengalami hambatan pada struktur pemerintahan lokal dan terbatasnya ruang politik.	FKKB memiliki akses langsung ke kepala daerah untuk berdialog dan terlibat dalam berbagai forum perumusan kebijakan publik di daerah. Meskipun ada hambatan struktural di mana akses pengambilan keputusan dan sumberdaya hampir sepenuhnya masih ada di tangan institusi formal pemerintahan.	Menambahkan bahwa meskipun ruang politik relatif terbuka namun masih ada hambatan struktural terkait peran warga dalam pengambilan keputusan. Penguasaan sumberdaya politik yang timpang ini berimplikasi pada <i>power relation</i> yang juga timpang antara negara dan warga.
9	Teori dari Warren (2001) mengenai dimensi perubahan dari adanya forum warga: efek pengembangan individu, efek terhadap <i>public sphere</i> , dan efek institusional.	Munculnya forum warga sebagai institusi baru selain dapat membuka arena partisipasi baru, juga dapat memunculkan komplikasi dengan NGO/CSO yang sebelumnya sudah ada mengenai peran dan <i>positioning</i> yang diambil.	Menambahkan adanya efek dari munculnya forum warga yang mempengaruhi konstelasi di jaringan <i>civil society</i> itu sendiri.
10		Dialog FKKB antara warga atau konstituen dengan calon Bupati/Wakil Bupati, dan dialog selanjutnya dengan pemerintah daerah pasca Pemilu telah membuka arena politik baru bagi warga. Namun dialog tersebut belum dapat dikatakan inklusif.	Menambahkan bahwa meskipun dapat dilakukan <i>extending democracy</i> (perluasan arena partisipasi), namun tidak menjamin terciptanya <i>deepening democracy</i> (perluasan keterlibatan aktor sosial dalam arena pengambilan keputusan publik).

No.	Teori	Temuan	Implikasi Teoritik
Teori-teori tentang Partisipasi Politik			
1	Verba et.al. (1995) menekankan pada budaya politik berupa 'penghormatan warga' terhadap sistem politik dan adanya keinginan berpartisipasi.	Partisipasi politik FKKB terutama didasarkan pada kritik atas kelemahan dari pelaksanaan model demokrasi representatif, dan kurang responsifnya pemerintah terhadap masalah pembangunan yang ada di daerah.	Mengkritisi dan menambah teori Verba et.al. (1995), bahwa dalam sistem politik yang belum demokratis, alasan partisipasi warga justru dapat muncul dari keinginan mengkritisi sistem itu sendiri.
2	Wang dan Wart (2007:276) berpendapat bahwa meskipun partisipasi warga meningkat namun tidak dengan sendirinya menciptakan <i>public trust</i> jika tidak ada realisasi dari apa yang dijanjikan atau disepakati.	Adanya ketidakpuasan peserta FKKB mengenai kinerja pemerintah daerah dan pemenuhan janji kampanye.	Mengkonfirmasi pendapat Wang dan Wart (2007) mengenai hubungan yang tidak selalu simetris antara partisipasi dan <i>public trust</i> .
3	Tingkatan partisipasi 'tokenisme' menurut Arnstein (1969), yaitu kondisi di mana rakyat diminta konsultasinya atau diberi informasi mengenai suatu keputusan, tetapi sebenarnya mereka hanya memiliki sedikit atau sama sekali tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan.	Meskipun ruang partisipasi dalam dialog dan perumusan kebijakan publik di daerah relatif lebih terbuka, namun keputusan akhir masih ada di tangan lembaga pemerintahan daerah.	Mengkonfirmasi pendapat Arnstein (1969) tentang 'tokenisme' dalam partisipasi.
Teori Demokrasi Deliberatif Habermas dan lainnya			
1	Habermas (1998) merujuk kultur masyarakat borjuis di Eropa dalam membangun konsepnya tentang <i>public sphere</i> .	Di FKKB dan masyarakat Sunda pada umumnya ada budaya 'ngawangkong' (ngobrol), 'ngariung' (kumpul-kumpul) dan 'ngadu bako' (diskusi santai, biasanya sambil merokok bersama atau saling bertukar tembakau).	Menambahkan bahwa faktor budaya 'ngobrol' dan diskusi di masyarakat kelas bawah kemungkinan juga berpengaruh pada peluang tumbuhnya <i>public sphere</i> .

No.	Teori	Temuan	Implikasi Teoritik
2	Bahasa dipandang penting oleh Habermas (1984) sebagai media untuk dapat mencapai saling pemahaman dan membantu mengkoordinasikan tindakan bersama.	Di FKKB, dialog dilakukan dengan 'bahasa rakyat', yaitu menggunakan bahasa Sunda sehari-hari yang bercampur dengan bahasa Indonesia, dengan cara yang menurut mereka 'kritis tapi beretika'.	Masyarakat Sunda relatif lebih egaliter dalam menyampaikan gagasan, dibandingkan dengan suku lain di Jawa misalnya. Menambahkan pengaruh kultur dan karakter bahasa di suatu daerah dalam pengembangan diskursus.
3	Birokrasi bebas memilih sendiri kelompok kepentingan yang akan mereka dengarkan (Etzioni-Halevy, 2011)	<ul style="list-style-type: none"> Meskipun pemerintah memberi ruang untuk 'hidup' bagi munculnya CSO, namun pemerintah dapat 'pilih-pilih' NGO atau CSO mana yang mau mereka terima atau dapat diajak dialog. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengkonfirmasi pendapat Etzioni-Halevy (2011) mengenai perilaku birokrasi yang selektif dalam menjalin interaksi dengan NGO/CSO. Menambahkan aspek lemahnya peluang <i>civic engagement</i> dalam konsep demokrasi deliberatif karena tidak adanya jaminan bahwa partisipasi warga akan mendapatkan respon yang setara dari pemerintah/negara.
4	Kritik Benhabib (1996 dan 2002) dan Young (1996) mengenai kemungkinan adanya bias laki-laki dalam gagasan demokrasi deliberatif.	Masih terbatasnya perempuan yang terlibat di FKKB.	Mengkonfirmasi kritik Benhabib (1996 dan 2002) dan Young (1996) mengenai kemungkinan bias gender dalam konsep demokrasi deliberatif.
5	Fung (2005) menyatakan bahwa perlu adanya fasilitator yang netral dalam suatu proses deliberasi.	Netralitas FAB dan FKKB dalam dialog konstituen dan calon Bupati/ Wakil Bupati saat pra Pemilukada 2010.	Mengkonfirmasi pendapat Fung (2005) mengenai fasilitator yang netral dalam proses deliberasi.
Teori Demokrasi Asosiatif Fung dan lainnya			
1	Model <i>Empowered Participation Governance</i>	Meskipun secara konsep <i>civic engagement</i> lebih kuat	<ul style="list-style-type: none"> Mengkonfirmasi pendapat Baber (1984)

No.	Teori	Temuan	Implikasi Teoritik
	(EPG) dari Fung dan Wright (2003) memberi ruang lebih besar dan legal bagi partisipasi warga dalam merancang dan menentukan kebijakan publik dalam institusi bersama antara warga dan dan struktur formal negara, sehingga <i>civic engagement</i> lebih dapat terjamin.	terbangun dalam model demokrasi asosiatif dibandingkan demokrasi deliberatif, namun kebijakan dan institusi semacam EPG tidak ada di Kabupaten Bandung.	<p>dan Cohen dan Rogers (2005) mengenai adanya prasyarat <i>institutional reforms</i> bagi pelaksanaan EPG, yang hanya dapat dilakukan oleh kekuatan politik baik partai ataupun pemerintahan yang berkuasa, bersama dengan kekuatan politik dari <i>grassroot</i> (<i>civil society</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menambahkan bahwa <i>grassroot</i> harus mampu membangun kekuatan politik dengan membentuk atau berafiliasi dengan partai politik yang pro perubahan, dan merebut kekuasaan politik secara konstitusional di pemerintahan untuk mendorong adanya <i>institutional reforms</i> tersebut.

Sementara itu, berkaitan dengan ikhtisar analisa kebijakan yang berhubungan dengan penelitian ini dan telah diulas di BAB 4, disajikan pada tabel di berikut ini:

Tabel 5.3: Proposisi Kebijakan

No.	Kebijakan	Dukungan Temuan	Implikasi Kebijakan
1	Sistem Pileg proporsional yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 5).	Sistem Pemilu proporsional membuat legislator tidak memiliki kedekatan emosional dengan konstituen dan daerah pemilihannya, sehingga	Perlu mempertimbangkan sistem pemilihan umum yang lebih menjamin kedekatan politisi/legislator dengan warga atau konstituennya,

		lemah dalam memperjuangkan aspirasi dan mempertanggungjawabkan kinerjanya.	seperti sistem campuran distrik dan proporsional.
2	Metode kampanye dalam Pileg (yang pada dasarnya juga sama dengan kampanye Pemilu dan Pemilukada) yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pasal 82.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlihat tidak adanya aturan yang jelas mengenai pengembangan model kampanye dialogis yang sesungguhnya lebih berpotensi dapat menjadi sarana pendidikan politik. • KPU/KPUD hanya menjalankan ketentuan normatif UU mengenai kampanye. 	Perlu perubahan kebijakan mengenai metode kampanye yang lebih dialogis dan mendukung upaya pendidikan politik rakyat.
3	UU No. 22 tahun 2003 pada Pasal 351 Butir (k.) menyebutkan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk “... <i>memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya</i> ”.	Pertanggungjawaban semacam ini tidak jelas implementasinya di daerah. Legislatur menjadi berjarak dengan warga atau konstituen, dan tidak merasa perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya.	Perlu perubahan kebijakan yang lebih tegas dan jelas mengenai metode atau cara pertanggungjawaban legislator dan partai politik terhadap konstituen dan rakyat pada umumnya.
4	UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 45 menyebutkan bahwa Anggota DPRD mempunyai kewajiban yang salah satunya pada Butir (g.) yaitu “... <i>memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya</i> ”.		
5	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Warga masih kesulitan mengakses dokumen publik di daerah.	Perlu desakan kuat terhadap institusi publik untuk menjalankan

			kewajibannya terkait dengan akses informasi dan dokumen publik.
6	Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung.	Implementasinya dipandang belum optimal.	Perlu mempertegas mengenai mekanisme sanksi jika diabaikannya ketentuan dalam Perda tersebut, selain perlu desakan kuat dari <i>civil society</i> terhadap pemerintahan daerah untuk menjalankan Perda tersebut.

5.2 Kesimpulan

Dari analisa atas hasil temuan penelitian pada BAB 4, peneliti mencoba menarik beberapa kesimpulan sekaligus untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian dalam tesis ini, sebagai berikut:

- (1) FKKB dibentuk oleh kelompok *civil society* di Kabupaten Bandung dan mengambil peran sebagai aktor demokrasi berangkat dari ketidakpuasan atas implementasi demokrasi representatif, disfungsi partai politik dan keprihatinan atas masalah pembangunan di daerah serta kurang responsifnya pemerintahan daerah dalam menyikapi masalah-masalah tersebut. Strategi yang digunakan FKKB dalam meningkatkan demokratisasi di daerah adalah dengan mendeliberasi proses sirkulasi atau rekrutmen elit politik menjelang Pemilukada, dan upaya membangun relasi yang relatif setara dan intensif antara warga, politisi dan pemerintah daerah baik sebelum Pemilukada maupun pasca Pemilukada. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi opini publik mengenai calon Bupati/Wakil Bupati, mempengaruhi muatan kampanye para calon tersebut, membangun kontak dan dialog (informal maupun formal) dengan pejabat publik terpilih sehingga dapat meningkatkan intensitas dan kualitas partisipasi warga dan keterbukaan pemerintah. Dampak

yang diharapkan adalah dapat terbangunnya *civic engagement* dan dapat dihasilkan kebijakan publik yang lebih responsif dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Strategi tersebut diimplementasikan dalam bentuk upaya memperkuat konsolidasi *civil society*, meningkatkan kapasitas politik warga di mana FKKB berperan sebagai ‘*school of democracy*’, membangun dialog antara warga/konstituen dengan calon Bupati/Wakil Bupati sebelum Pemilukada, dan dengan Bupati/Wakil Bupati terpilih pasca Pemilukada.

- (2) FKKB menempatkan dirinya sebagai bagian dari kekuatan *civil society* di Kabupaten Bandung, yang mengambil peran ‘menjahit’ simpul-simpul jaringan komunitas dan mengkonsolidasikan dan mendialogkan isu, masalah, dan gagasan dari berbagai sektor dan wilayah, untuk didialogkan kembali dengan para politisi (sebelum Pemilukada) dan pada pemerintah daerah (pasca Pemilukada). Dalam hal ini FKKB berfungsi sebagai salah satu forum warga sekaligus *political public sphere* dan membuka arena diskursif dan partisipasi politik yang baru di Kabupaten Bandung. FKKB diorientasikan menjadi kekuatan ‘blok politik baru’ sebagai pengimbang pemerintah daerah maupun kelompok NGO/CSO yang ‘dekat’ dengan pemerintah daerah. Fokus advokasi FKKB memang baru terhadap pemerintah daerah (dan belum ke DPRD ataupun aktor lainnya), dalam posisi sebagai mitra kritis. FKKB belum secara sistematis dan intensif membangun jaringan dengan NGO/CSO lain diluar jaringan yang sudah ada. Begitupun terhadap media massa, perguruan tinggi dan lembaga donor. Peluang memanfaatkan kontak yang sudah terjalin dengan KPUD Kabupaten dan Provinsi juga belum dilakukan.
- (3) Model kelembagaan yang terbentuk di FKKB dapat dikatakan belum cukup jelas, karena belum disepakati oleh para pegiat dan peserta FKB. Model kelembagaan yang manifes saat ini adalah sebuah institusi jaringan yang pesertanya adalah kumpulan individu yang merupakan simpul-simpul jaringan komunitas dan sektoral (*credible source*), dengan kepemimpinan,

kepengurusan dan mekanisme kelembagaan yang cair (tidak atau belum diformalkan). Kepesertaan FKKB bersifat individual (bukan lembaga dan bukan perwakilan lembaga). Komunikasi diantara peserta FKKB lebih sering dibangun secara informal, kecuali ketika ada momentum politik yang harus direspon segera (seperti saat Musrenbang, LKPJ Bupati, dan lainnya). Isu yang diangkat FKKB terutama adalah hasil rumusan dari diskusi dan dialog panjang mereka pada saat sebelum Pemilukada dan saat penyusunan rekomendasi FKKB untuk perumusan RPJMD 2010-2015, maupun isu atau masalah aktual yang muncul kemudian. Isu tersebut dapat dikatakan merupakan hasil kompilasi dan kristalisasi dari isu-isu yang dibawa oleh individu para simpul jaringan komunitas dan sektoral tadi. Isu tersebut kemudian menjadi bahan dalam dialog formal dan informal dengan pemerintah daerah, maupun dalam keterlibatan mereka di forum-forum perumusan kebijakan daerah (lihat Gambar 4.3).

Dari ketiga jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut, peneliti mencoba menjawab masalah penelitian dalam tesis ini, yaitu mengenai bagaimana FKKB sebagai asosiasi atau forum warga mendorong partisipasi politik dan upaya demokratisasi di Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

- (1) Dalam hal ini dapat dikatakan FKKB cukup berhasil membuat terobosan dan memecah kebekuan politik di Kabupaten Bandung. Dialog antara warga/konstituen sebagai *responsible voters* dengan calon Bupati/Wakil Bupati sebelum Pemilukada 2010 telah memberikan kesadaran baru bahwa momentum Pemilukada bukanlah panggung dan arena politik yang monopoli milik politisi, partai politik dan pemerintah (termasuk KPUD) saja. Bahwa warga --yang bukan dimobilisasi atau digerakkan oleh kekuatan politik atau ekonomi tertentu-- dapat menyelenggarakan kegiatan ‘kampanye dialogis’ yang melibatkan banyak perwakilan masyarakat dari beragam isu, sektor dan wilayah, dapat berdialog secara wajar dan setara dengan para politisi yang

notabene akan menjadi Bupati/Wakil Bupati mereka nantinya. Bahkan metode dialog politik yang dilaksanakan warga tersebut dipandang sebagai inisiatif baru dalam dunia politik di Indonesia, dan lebih baik dibanding model kampanye Pemilu/Pemilukada yang mengandalkan panggung hiburan atau dialog kandidat di TV yang dilaksanakan KPUD. FKKB dapat dikatakan telah membuat ‘*benchmark*’ bagaimana dialog politik yang dikelola oleh warga harus dilaksanakan, khususnya di Kabupaten Bandung.

- (2) Terjadi demitologi proses politik dan politisi: bahwa rakyat biasa juga mampu merancang dan melaksanakan dialog politik yang cukup bermutu, dan bahwa politisi bukan orang yang hebat dalam segala hal. Pengalaman tersebut telah menaikkan moril dan kepercayaan diri warga, bahwa asalkan ada kesempatan dan ruang partisipasi, mereka juga mampu menyampaikan gagasan yang sama baik --atau bahkan mungkin lebih baik-- dengan para politisi tersebut. Meskipun dengan bahasa yang ‘polos’ dan jauh dari istilah akademis, mereka berani menyampaikan beragam masalah yang mereka hadapi, bahkan berani memberikan bantahan, kritik ataupun saran kepada pada politisi tersebut.
- (3) Upaya dialog warga/konstituen dengan calon Bupati/Wakil Bupati sebelum Pemilukada sebagai sebuah arena diskursus kepemimpinan publik yang belum banyak dimasuki atau dilakukan oleh forum warga lain,¹⁴⁸ dan belum pernah dilakukan sebelumnya di Kabupaten Bandung, ternyata juga mampu membangun citra positif menjadi modal sosial yang besar bagi kelompok ini. Relatif terbangun *trust* bahwa kelompok ini memiliki tujuan yang baik dan tidak sekedar mencari keuntungan jangka pendek, di tengah situasi maraknya perilaku politik transaksional pragmatis, khususnya pada momentum politik besar seperti Pemilukada. Pasca Pemilukada, FKKB dapat berinteraksi secara cukup intensif dengan Bupati/Wakil Bupati terpilih dan pemerintah daerah

¹⁴⁸ Istilah yang peneliti gunakan untuk menyebut arena partisipasi di ruang politik pada momentum Pemilu/Pemilukada. Lihat Gambar 2.3 tentang kerangka pikir mengenai faktor yang mempengaruhi pembentukan, karakteristik deliberasi, arena partisipasi, dan tujuan forum warga di Indonesia.

pada umumnya, baik dalam pertemuan informal maupun formal, dan dalam kegiatan perumusan kebijakan strategis di daerah (RPJMD, Musrenbang, dan lainnya). Hal tersebut semakin menegaskan adanya pengakuan politik terhadap kelompok ini, maupun pengakuan akan kapasitas analisis dan politik sebagai kelompok secara umum, dibandingkan NGO/CSO lainnya. Bahkan FKKB berani untuk memilih opsi untuk tidak mengakses dana APBD untuk mendukung kegiatannya, meskipun mereka membutuhkan hal tersebut, dan secara politis itu dimungkinkan dengan interaksi yang cukup intensif dengan kepala daerah.

- (4) Memang ada fakta bahwa pasca Pemilu pada konsolidasi FKKB cenderung menurun, namun itu tidak membuat FKKB mati. Kegiatan-kegiatan kecil tetap dilaksanakan, meskipun untuk kegiatan besar mereka merasa perlu ada dukungan logistik dari pihak lain. Namun pengalaman mereka sebelumnya telah menumbuhkan beragam gagasan dan harapan untuk pendalaman demokrasi dalam kabupaten sendiri, seperti membentuk FKKB di tiap kecamatan atau daerah pemilihan, mengawal kegiatan reses anggota DPRD, melakukan dialog konstituen pada pemilihan kepala desa (Pilkades), bekerjasama dengan KPUD dalam melakukan dialog politik, dan sebagainya. Bahkan muncul gagasan diantara mereka untuk melakukan replikasi pada Pemilu Kabupaten Bandung tahun 2015, Pemilu Provinsi Jawa Barat 2013, dan mendorong pembentukan institusi sejenis di daerah-daerah lain. Pengalaman politik yang telah dilalui khususnya sejak menjelang momentum Pemilu 2010 lalu telah meningkatkan kepercayaan diri dan imajinasi politik mereka sendiri. Dan dua hal tersebut menurut peneliti adalah modal awal yang tak ternilai dalam mendorong partisipasi politik dan demokratisasi di Kabupaten Bandung.

5.3 Rekomendasi

Dari uraian dan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi untuk pengembangan FKKB selanjutnya, sebagai berikut:

- (1) FKKB perlu memperjelas skema kepesertaan dan kelembagaannya. Jika konstituen dimaknai sebagai warga di Kabupaten Bandung yang memiliki hak pilih, maka konstituen yang terlibat di FKKB semestinya dapat lebih inklusif dan plural, dengan memberikan perhatian khusus bagi keterlibatan perempuan dan masyarakat marginal. Peluang keberlanjutan dan manfaat FKKB akan dapat ditingkatkan ketika mampu membuka melaksanakan diskusi dan dialog secara reguler dan intensif baik di tingkat kabupaten maupun di komunitas-komunitas. FKKB yang inklusif sekaligus dapat mendorong pesertanya untuk melakukan diskursus serupa di tingkat komunitas, akan memperkuat basis legitimasi FKKB, memperkaya isu atau aspirasi yang akan didialogkan ke pemerintahan daerah, sekaligus menjadikan FKKB mampu menjalankan peran pendidikan politik yang dicita-citakannya. Tim 9 perlu difungsikan kembali dan didorong untuk menyelesaikan mandatnya untuk menyusun opsi-opsi bentuk kelembagaan dan mekanisme yang nantinya dapat didialogkan diantara peserta FKKB lainnya. FKKB juga perlu memperjelas mengenai masalah kepemimpinan atau representasi FKKB khususnya dalam berinteraksi dengan pihak lain. Kalaupun yang dipilih kemudian adalah bentuk kelembagaan yang 'cair', tetap diperlukan adanya semacam kode etik sebagai panduan umum dalam hal kepesertaan, kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi dan interaksi dengan pihak lain. Terkait dengan komunikasi, mungkin perlu dipertimbangkan adanya hari khusus untuk pertemuan bulanan di mana siapapun warga atau konstituen di Kabupaten Bandung dapat datang, berdiskusi dan berdialog mengenai berbagai isu dan masalah di daerah. Instrumen lain yang dapat dicoba seperti menggunakan *account* atau alamat

khusus di media sosial (internet) yang sudah sangat umum digunakan saat ini. Diskusi atau bahkan *voting* dan *polling* sederhana di grup media sosial ini mungkin justru dapat membantu dalam memetakan persepsi dan sikap peserta FKKB terhadap isu-isu tertentu sebagai bahan dalam dialog dengan pemerintahan daerah dan pihak-pihak lainnya.

- (2) FKKB perlu memperkuat konsolidasinya, yang meskipun dalam skala kecil atau terbatas namun diharapkan tetap mampu menjaga spirit dan eksistensinya sebagai kelompok. Perkembangan isu atau masalah di jaringan FKKB dapat dikompilasi dan dikonfirmasi ulang sebagai bahan amunisi dalam dialog dengan pihak lain, khususnya pemerintah daerah. Kegiatan-kegiatan FKKB dapat ditandemkan dengan kegiatan lembaga atau jaringan yang di lingkungan FKKB sendiri. Selain dapat mengurangi beban logistik, juga dapat memperkuat eksistensi FKKB di dalam dan keluar jaringan yang ada. Sebagai sebuah institusi jaringan, memang dibutuhkan komunikasi dan diskusi yang meskipun tidak setiap saat namun cukup intensif untuk dapat mencapai keputusan atau konsensus bersama.
- (3) Peningkatan kapasitas bagi peserta FKKB adalah hal yang penting. Secara umum kapasitas politik peserta FKKB dipandang di atas rata-rata warga pada umumnya. Namun tetap perlu diupayakan peningkatan kapasitas tersebut, khususnya dalam hal mengemas substansi dialog sehingga tidak sebatas ajang ‘tanya jawab’ (lihat BAB 4, khususnya mengenai Penilaian terhadap Proses Dialog). Upaya memperluas wawasan mengenai model-model partisipasi dan kelembagaan politik yang pernah dilakukan oleh CSO lain juga diperlukan, untuk memperkaya imajinasi dan opsi-opsi yang mungkin dapat diadopsi di Kabupaten Bandung. Keterlibatan FKKB dalam komunitas pengembangan forum warga di tingkat regional dan nasional juga perlu dipertimbangkan. FAB, TIFA dan jaringan lainnya perlu dan dapat dilibatkan untuk membantu dalam upaya tersebut.

- (4) FKKB perlu mulai membangun interaksi dengan DPRD sebagai salah satu aktor politik penting di daerah. FKKB dapat mendorong dan mempengaruhi anggota DPRD untuk lebih banyak berinteraksi dengan konstituennya sehingga dapat terbangun *civic engagement* yang lebih kuat dan akuntabilitas lembaga legislatif kepada publik dan konstituennya. Tantangannya memang berasal dari dua arah, yaitu bagaimana anggota DPRD tersebut mau dan mampu berinteraksi secara berkualitas dengan konstituen, dan sebaliknya, bagaimana konstituen atau warga juga mampu melakukan hal yang sama, dan tidak hanya menjadikan ruang pertemuan tersebut sekedar ajang meminta proyek pembangunan fisik atau sumbangan (untuk kepentingan kelompok ataupun pribadi) saja, seperti yang selama ini umumnya terjadi, dan justru membuat anggota DPRD takut atau enggan untuk bertemu dengan konstituennya sendiri. Sebagai langkah awal adalah bagaimana FKKB dapat mengawal momentum reses DPRD menjadi sebuah pertemuan dialogis yang berkualitas antara anggota DPRD dan konstituen (*constituency meetings*).
- (5) Penting bagi FKKB untuk fokus pada advokasi isu strategis dan berdampak besar bagi demokratisasi di daerah. Selain mendialogkan isu atau masalah aktual di daerah, sangat penting bagi FKKB untuk memilih beberapa isu strategis yang berdampak besar bagi peningkatan partisipasi publik, transparansi pemerintahan daerah dan responsivitas kebijakan publik yang dihasilkan. Misalnya saja, isu mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Transparansi dan Partisipasi Publik, pelaksanaan UU Kebebasan Informasi Publik di daerah, dan lainnya.
- (6) FKKB sesungguhnya sangat strategis dapat berfungsi sebagai ruang konsolidasi *civil society*, wahana pendidikan politik (*school of democracy*) dan dapat menjadi mitra dialog kritis yang kuat bagi pemerintahan daerah di Kabupaten Bandung. Penggunaan FKKB hanya sebagai alat atau institusi

taktis merespon agenda dan momentum politik dari luar telah menyiapkan potensi dan peran strategis tersebut. Perlu dibentuk atau disepakati adanya tim kerja yang anggotanya tidak hanya berasal dari jaringan inti FKKB (yaitu FDA dan PSDK), namun juga dari jaringan lainnya. Sejauh keberadaan FKKB juga bermanfaat bagi jaringan-jaringan tersebut, terbuka peluang untuk menggalang konsolidasi logistik dari jaringan-jaringan tersebut untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan FKKB. Dialog mengenai strategi yang lebih besar dalam membangun ‘blok politik baru’ perlu dilakukan sehingga ada orientasi, strategi dan langkah-langkah konkret untuk menempatkan dan mensinergikan bermacam komunitas, kelompok, NGO dan CSO yang menjadi bagian di dalamnya.

- (7) FKKB perlu lebih menaruh perhatian pada efek dan dampak dari partisipasi politik yang telah dan akan dilakukan. Selain sangat penting untuk mengetahui efektifitas dari kegiatan tersebut dan menunjukkan bahwa FKKB memang memberi manfaat bagi upaya advokasi kebijakan dan politik, juga untuk menghindari terjebak dalam aktivisme belaka. Selain itu juga agar partisipasi dan aspirasi yang disampaikan tidak dimanipulasi oleh pihak lain sekedar sebagai alat untuk melegitimasi atau menjustifikasi kepentingan dan agenda lain diluar apa yang diperjuangkan oleh FKKB (ancaman adanya *free rider* baik dari internal maupun eksternal FKKB).
- (8) Keterbatasan anggaran atau logistik memang kendala klasik di semua organisasi berbasis masyarakat khususnya jika dikaitkan dengan peluang keberlanjutan (*sustainability*) organisasi tersebut. Idealnya, kebutuhan logistik untuk melakukan konsolidasi dan kegiatan lainnya dapat dipenuhi secara swadaya oleh jaringan yang ada di FKKB. Secara terbatas, hal tersebut sesungguhnya sudah dilakukan. Namun jika memang kebutuhan untuk konsolidasi dan kegiatan yang cukup besar dipandang memberatkan dan perlu dukungan dari pihak lain, tentunya hal tersebut perlu dilakukan,

dengan sebelumnya menyiapkan terlebih dahulu mekanisme upaya penggalangan dan pengelolaannya, sehingga nantinya tidak justru menjadi menjadi sumber konflik di internal jaringan FKKB sendiri.

- (9) FKKB perlu membangun opini publik melalui media massa, baik yang dilakukan sendiri ataupun ditandemkan dengan lembaga lain. Selain dapat menyebarkan gagasan dan pengalaman FKKB, juga dapat memperkuat tekanan dalam upaya mempengaruhi kebijakan publik di daerah.
- (10) Berangkat dari refleksi atas pengalaman bersama (baik yang dipandang berhasil ataupun kurang berhasil), FKKB dan FAB (juga dapat melibatkan TIFA) dapat merumuskan suatu model bersama mengenai Forum Konstituen, mulai dari konsep *responsible voters* (konstituen yang bertanggung jawab) pada momentum Pemilu/Pemilukada, konsep *active* dan *responsible citizens* (warga yang aktif dan bertanggungjawab) pasca Pemilukada, opsi-opsi model dialog publik yang plural, inklusif, setara dan argumentatif, serta penguatan jaringan *civil society* di daerah, advokasi kebijakan publik di daerah, dan lainnya.
- (11) Model FKKB khususnya yang berkenaan dengan dialog konstituen dan politisi sebelum Pemilukada dipandang hal yang baru, dan pelaksanaannya secara substantif dan teknis juga dipandang cukup berhasil. Pengalaman ini tentunya perlu disosialisasikan keluar, sehingga membuka peluang adanya gagasan replikasi di daerah lain, dan mungkin dapat membuka akses dukungan logistik bagi pengembangan model FKKB di Kabupaten Bandung dari sumber-sumber lain. Dalam hal ini, FAB, PSDK, FDA, TIFA dan lembaga lain dalam jaringan FKKB dapat membantu upaya sosialisasi tersebut, misalkan melalui kegiatan diskusi atau tukar pengalaman dengan kelompok dan jaringan *civil society* lainnya. Diskusi dengan KPUD Kabupaten dan Provinsi atau bahkan KPU Pusat, akademisi dan perguruan tinggi mengenai model dialog konstituen yang dikembangkan FKKB juga

dapat membantu upaya sosialisasi gagasan dan membuka ruang kerjasama kegiatan selanjutnya.

Selain itu, dari temuan penelitian ini juga peneliti pandang memiliki implikasi kebijakan yang lebih luas, baik kebutuhan akan peninjauan, perubahan dan/atau pembuatan kebijakan baru, mengenai:

- (1) Perlu kebijakan yang lebih tegas mengenai kewajiban partai politik dalam melakukan fungsi-fungsinya, khususnya fungsi pendidikan politik kepada rakyat dan fungsi rekrutmen politik yang dapat menghasilkan calon pejabat publik yang berkualitas dan bertanggungjawab (akuntabel) terhadap publik. Metode paling sederhana misalnya dengan kewajiban partai politik melaksanakan kegiatan temu dan dialog konstituen (*constituency meetings*) secara berkala, dan dilaporkan kepada publik melalui media massa atau media lainnya.
- (2) Perlu kajian dan dialog yang mendalam mengenai opsi-opsi sistem Pemilu/Pemilukada yang lebih memungkinkan terbangunnya kedekatan antara warga atau konstituen dengan calon politisi, khususnya dalam pemilihan legislatif (DPR dan DPRD), sehingga lembaga tersebut dapat lebih responsif dan akuntabel. Sistem Pemilu campuran mungkin dapat menjembatani antara kelebihan dan kekurangan dari sistem distrik maupun sistem yang saat ini digunakan di Indonesia yaitu sistem proporsional.
- (3) Model kampanye Pemilu dan Pemilukada dari pemerintah dan KPUD dipandang 'gagal' dalam menjalankan peran pendidikan politik kepada warga atau konstituen. Perlu perubahan kebijakan mengenai model kampanye politik dan Pemilu/Pemilukada yang lebih berkualitas dan mendidik, seperti kewajiban bagi partai politik dan politisi untuk menyelenggarakan kampanye dialogis sebanyak mungkin dengan melibatkan konstituen yang lebih luas seperti model yang dikembangkan

oleh FKKB. Dalam hal ini KPU dan KPUD dapat membangun mekanisme operasional dari model kampanye semacam itu. KPU/KPUD dapat bekerjasama dengan jaringan NGO/CSO yang dipandang memiliki kompetensi politik dan manajemen memadai untuk melaksanakan hal tersebut.

- (4) Perlu ada kejelasan dan ketegasan mengenai mekanisme pertanggungjawaban institusi dan anggota legislatif kepada publik, khususnya terhadap konstituen di daerah pemilihannya. Ketentuan dalam UU mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD dan DPRD, juga ketentuan yang sama di UU tentang Pemerintah Daerah perlu disempurnakan. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa kewajiban membuat *constituency meetings* secara rutin, menyampaikan laporan kinerja secara berkala, adanya mekanisme audit sosial oleh komunitas atau konstituen, dan lainnya.
- (5) Perlu desakan berbagai pihak bagi dilaksanakannya secara konsisten kebijakan mengenai perluasan transparansi dan partisipasi warga dalam perencanaan dan penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Sebagai contoh adalah implementasi dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan khusus di Kabupaten Bandung adalah implementasi dari Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2004 mengenai Transparansi dan Partisipasi.
- (6) Perlu kajian dan kerjasama berbagai pihak (NGO/CSO, pemerintah, akademisi, perguruan tinggi, partai politik, donor, dan lainnya) mengenai perluasan model demokrasi deliberatif di Indonesia. Misalnya saja semacam model *deliberative opinion polls*,¹⁴⁹ *deliberative polling*,¹⁵⁰ referendum dan

¹⁴⁹ *Deliberative opinion poll* atau jajak pendapat deliberatif, dilakukan dengan mengambil sampel statistik yang mewakili sebuah komunitas, untuk selanjutnya mereka berkumpul untuk membahas masalah-masalah secara deliberatif (musyawarah). Kelompok warga tersebut kemudian di survei, dan hasil jajak pendapat dan pembahasan yang sebenarnya dapat digunakan sebagai dasar merumuskan

pemanfaatan teknologi untuk mendeliberasi proses pengumpulan opini publik dan pengambilan keputusan publik.¹⁵¹ Demikian pula dengan kajian terhadap model demokrasi asosiatif, misalnya dengan membuat proyek ujicoba institusi bersama antara pemerintah daerah dan perwakilan warga dari berbagai NGO/CSO dalam satu isu atau bidang tertentu. Skema ini mungkin sudah ada pada proyek-proyek pembangunan atau pengentasan kemiskinan di level desa atau kecamatan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Model tersebut dapat diujicobakan di level kabupaten/kota dengan sejumlah penyesuaian khususnya dalam hal kepesertaan dan mekanisme pengelolaan sumberdayanya.

rekomendasi kebijakan, atau dalam keadaan tertentu, untuk menggantikan pemungutan suara (*voting*) (lihat Fishkin, 1991).

¹⁵⁰ *Deliberative polling* atau pemungutan suara deliberatif menggabungkan random sampling *deliberative opinion poll* pada isu tertentu dengan kelompok kecil diskusi. Tujuannya adalah untuk mengetahui opini publik yang ada, juga untuk memahami apa opini publik akan terbentuk jika masyarakat memiliki informasi dan secara sungguh-sungguh membahas suatu isu tertentu. Warga dipilih berdasarkan teknik random sampling dalam jumlah sampel yang cukup besar sehingga hasilnya dapat merepresentasikan opini publik yang relatif akurat (lihat Fishkin, 1991).

¹⁵¹ Diantaranya seperti model referenda dan *polling (Deliberative Polls)* yang telah dilakukan oleh Fishkin (2009:97) di sejumlah negara yaitu di Inggris (1994-1998), Uni Eropa (1995), Australia (1999, 2001), Denmark (2000), Bulgaria (2002), Nova Scotia (2004); Hungaria dan Roma (2005); Bulgaria, Roma, Thailand, Italia, Yunani (2006); Italia, Irlandia Utara, Uni Eropa (2007); Hungaria dan Cina (2005 dan 2008). Model lain yang pernah dilakukannya yaitu mulai dari SLOP (*'self-selected listener opinion poll'*) seperti opini pendengar radio yang mereka sampaikan via telepon, atau opini pembaca media cetak, sampai pada model referendum dan *'Deliberation Day'*, dimana ada hari libur menjelang masa pemilihan yang digunakan warga untuk dapat berdialog diantara sesama warga dan dengan para politisi. Lihat Gambar 2.2 mengenai perkembangan teori demokrasi deliberatif.

DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

- Ackerman, B., & Fishkin, J.S. (2004). *Deliberation day*. New Haven: Yale University Press.
- Anheier, H.K. (2004). *Civil society: Measurement, evaluation, policy*. London: Earthscan.
- BAPPENAS. (2003). *Tingkat pemahaman aparaturn pemerintah terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik*. Jakarta: Penulis.
- (2007). *Penerapan tata pemerintahan yang baik*. Jakarta: Penulis.
- (2009). *Menuju tata pemerintahan yang baik: Inovasi di beberapa kabupaten*. Jakarta: Penulis.
- BAPPENAS & UNDP. (2008). *Studi evaluasi dampak pemekaran daerah*. Jakarta: Penulis.
- Baker, C.E. (2004). *Media, market, and democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- (2007). *Media concentration and democracy: Why ownership matters*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Benhabib, S. (1996). *Democracy and difference: Contesting the boundaries of the political*. New Jersey: Princeton University Press.
- Berger, P.L., & Luckmann, T. (1991). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. London: Penguin Books
- Best, H., & Higley, J. (2010). *Democratic elitism: New theoretical and comparative perspectives*. Leiden: BRILL.
- Bohman, J., & Rehg, W. (1997). *Deliberative democracy: Essays on reason and politics*. London: The MIT Press.
- Bryan, S., & Baer, D., (eds.). (2005). *Money in politics: A Study or party financing practices in 22 countries*. Washington: NDI.
- Brym, R. (1993). *Intelektual dan politik*. (Nugraha Kacasungkana, Penerjemah). Jakarta: Grafiti.

- Budiardjo, M. (1982). "Partisipasi dan partai politik: Suatu Pengantar", dalam Miriam Budiardjo (ed.), *Partisipasi dan partai politik sebuah bunga rampai*. Jakarta: Gramedia.
- Budiman, A. & Törnquist, O. (2001). *Aktor demokrasi: Catatan tentang gerakan perlawanan di Indonesia*. Jakarta: ISAI.
- Chandra, E., et.al. (2003). *Membangun forum warga: Implementasi partisipasi dan penguatan masyarakat sipil*. Bandung: AKATIGA.
- Chotim, E.E., (2006). *Hegemoni neoliberal dan forum warga, tinjauan Gramsci tentang demokratisasi lokal di Indonesia: Studi kasus Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat*. Tesis pada Departemen Sosiologi, FISIP-Universitas Indonesia.
- Clarke, G. (1998). *The politics of NGOs in South-East Asia: Participation and protest in the Philippines*. London: Routledge.
- Coppel, C.A. (2006). *Violent conflicts in Indonesia: Analysis, representation, resolution*. New York: Routledge.
- Creswell, J.W. (2003). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed method approaches* (2nd ed.). California: SAGE Publications.
- (2010). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. (Edisi Ketiga). (Achmad Fawaid, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damsar. (2010). *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: Prenada Media.
- Dani, A.A. & de Haan, A. (Ed.). (2008). *Inclusive states social policy and structural inequalities*. Washington D.C.: World Bank.
- DSF-Decentralization Support Facility. (2007). *Costs and benefits of new region creation in Indonesia*. Jakarta: DSF – World Bank.
- Djojosoekarto, A. & Hauter, R. (2003). *Pemilihan langsung kepala daerah: Transformasi menuju demokrasi lokal*. Jakarta: ADKASI dan KAS.
- Dunn, W.N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. (Edisi kedua). [Wibawa S., dkk, Penerjemah]. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A., et.al. (2003a). *Reformasi: Tata pemerintahan dan otonomi daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- (2003b). *Teladan dan pantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan-UGM.
- (2007). *Kinerja tata pemerintahan daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ely, M. (1991). *Doing qualitative research: Circles within circles*. London: The Falmer Press.
- Elstub, S. (2008). *Towards a deliberative and associational democracy*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Etzioni-Halevy, E. (2011). *Demokrasi dan birokrasi: Sebuah dilema politik*. Yogyakarta: Total Media.
- Faulks, K. (2010). *Sosiologi politik: Pengantar kritis*. (Helmi Mahadi dan Shohifullah, Penerjemah). Bandung: Nusa Media.
- Fauzi, N., & Zakaria, R.Y. (2000). *Mensiasati otonomi daerah: Panduan fasilitasi pengakuan dan pemulihan hak-hak rakyat*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Fishkin, J.S. (2001). *Democracy and deliberation: New directions for democratic reform*. New Haven: Yale University Press.
- (2009). *When the people speak: Deliberative democracy and public consultation*. New York: Oxford University Press Inc.
- Fung, A., & Wright, E.O. (eds.). 2003. *Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance. The real utopias project IV*. New York: Verso.
- Grindle, M.S. (2009). *Going local : decentralization, democratization, and the promise of good governance*. New Jersey: Princeton University Press.
- Gutmann, A. & Thompson, D. (2004). *Why deliberative theory?*. New Jersey: Princeton University Press.
- Habermas, J. (1979). *Communication and the evolution of society*. (T. McCarthy, Translator). Boston: Beacon Press.
- (1984). *The Theory of Communicative Action , Volume 1: Reason and The Rationalization of Society*. [Thomas McCarthy, Translator]. Boston: Beacon Press.

- (1995). *Moral consciousness and communicative action*. (Fourth Printing). (Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholse, Translator). Cambridge: MIT Press.
- (1998a). *Between facts and norms*. (Reprint). (William Rehg, Translator). Cambridge: Polity Press.
- (1998b). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. (Thomas Burger and Frederick Lawrence, Translator). Cambridge: MIT Press.
- (ed.). (1998c). *The inclusion of the other: Studies in political theory*. Edited by Ciaran Cronin and Pablo De Greiff. (Einbeziehung des Anderen, Translator). Cambridge: MIT Press.
- (2007). *Ruang publik: Sebuah kajian tentang kategori masyarakat borjuis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hadiwinata, B.S, dan Schuck, C. (2010). *Demokrasi di Indonesia: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadiz, V.R. (2005). *Dinamika kekuasaan: Ekonomi politik Indonesia pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Hansen, K.M. (2004). *Deliberative democracy and opinion formation*. Odense: University Press of Southern Denmark.
- Harahap, O.S.R. (2011). *Tahta pilkada untuk siapa?: Belajar dari Forum Konstituen Kabupaten Bandung*. Bandung: Forum Aktivistis Bandung (FAB) dan Yayasan TIFA.
- Hardiman, F.B. (2009). *Demokrasi deliberatif: Menimbang 'negara hukum' dan 'ruang publik' dalam teori diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Haris, S. (Ed.). (2007). *Desentralisasi dan otonomi daerah: Desentralisasi, demokratisasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Harris, J. (ed.). (2001). *Tönnies: Community and civil society*. (Jose Harris & Margaret Hollis, Translator). Cambridge: Cambridge University Press.
- Hefner, R. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hicks, A.M., Janoski, T., & Schwartz, M.A. (2005). "Political sociology in the new millennium", on Thomas Janoski, Robert Alford, Alexander Hicks, and

- Mildred A. Schawrz (ed.). *The handbook of political sociology: States, civil societies, and globalization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huntington, P.S., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi politik di negara berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi, Edisi 3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- JPIP-Jawa Post Institute of Pro Otonomi. (2006). *Otonomi daerah & otonomi award dua provinsi: Kumpulan hasil monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Jogjakarta*. Surabaya: Penulis.
- Koswara, A. (2006). *Kontestasi kapitalisme neoliberal dan kapitalis rente dalam dinamika pilkada langsung: Studi kasus pilkada langsung 2005 di Kota Cilegon*. Tesis pada Departemen Sosiologi, FISIP-Universitas Indonesia.
- Malik, K., & Wagle, S. (2002). "Civic engagement and development: Introducing the issues", chapter on Fukuda-Parr, Lopes & Malik (Eds.). *Capacity for development: New solutions to old problems*. New York: UNDP.
- Manor, J. (1999). *The political economy of democratic decentralization*. Washington: World Bank
- Marsh, D., & Stoker, G. (2011). *Teori dan metode dalam ilmu politik*. Bandung: Nusa Media.
- McNair, B. (2000). *Journalism and democracy: An evaluation of the political public sphere*. London: Routledge.
- Mezey, M.L. (2008). *Representative democracy: Legislators and their constituents*. New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Michels, R., (2011). *Political parties: A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy*. (Eden & Cedar Paul, Translator). Ontario: Batoche Books.
- Nash, K. (2002). *Contemporary political sociology: Globalization, politics and power*. Massachusetts: Blackwell Publisher.
- American Review of Political Economy*, Vol. 5, No.1 (Pages 1-13), June 2007.

- Newman, J., & Tonkens, E. (2011). *Participation, responsibility and choice: Summoning the active citizen in Western European welfare states*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Nusantara, U.A., et.al. (2010). *Jalan baru pendidikan politik rakyat*. Bandung: FDA & Yayasan Inisiatif.
- O'Donnell, G., & Schmitter, P.C. (1993). *Transisi menuju demokrasi: Rangkaian kemungkinan dan ketidakpastian*. (Nurul Agustina, Penerjemah). Jakarta: LP3ES.
- Pattinasarany, D., & Kusuma, C. (2007). *Transparansi, partisipasi dan pelayanan publik di kabupaten P2TPD: Temuan GDS tahun 2006*. Jakarta: Decentralization Support Facility (DSF).
- Pusey, M. (1987). *Jürgen Habermas*. New York: Routledge.
- Rinaldi, T., et.al. (2007). *Memerangi korupsi di Indonesia yang terdesentralisasi: Studi kasus penanganan korupsi pemerintah daerah*. Jakarta: Justice for the Poor - World Bank.
- Ritzer, G., & Goodman, D.J. (2010). *Teori sosiologi: Dari teori sosiologi klasik sampai perkembangan mutakhir teori sosial postmodern*. Edisi Terbaru. Bantul: Kreasi Wacana.
- Santana K., S. (2010). *Menulis ilmiah: Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Schaffer, F.C., (ed.). (2007). *Elections for sale: The causes and consequences of vote buying*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Schiavo-Campo, S., & Sundaram, P. (2001). *To serve and to preserve: Improving public administration in a competitive world*. Manila: ADB.
- Schultz, J. (1998). *Reviving the fourth estate: Democracy, accountability and the media*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shigetomi, S. (2002). *The state and NGOs: Perspective from Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Simpson, B.R. (2010). *Economists with guns: Amerika Serikat, CIA dan munculnya pembangunan otoriter rezim Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Sumarto, H.Sj. (2005). *New voices of the community?: Citizen forums in reformasi era Indonesia*. Disertasi di Flinders University-Australia, saat ini tengah dipersiapkan untuk dicetak dalam format buku oleh AKATIGA-Bandung.
- (2008). *Membangun partisipasi warga dalam tata pemerintahan daerah di Indonesia: Praktik, kebijakan dan agenda*. Jakarta: LGSP-USAID.
- (2009). *Inovasi, partisipasi, dan good governance: 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tanter, R., & Young, K. (1996). *Politik kelas menengah Indonesia*. (Nur Iman Subono, Arya Wisesa, dan Ade Armando, Penerjemah). Jakarta: LP3ES.
- Thamrin, J. (2009). *Meneropong jejak perjuangan legislatif daerah: Dokumentasi pengalaman DPRD*. Jakarta: LGSP.
- USAID. (2006). *Decentralization 2006: Stock taking on Indonesia's recent decentralization reforms*. Jakarta: DRSP-USAID.
- Verba, S., Schlozman, K.L., & Brady, H. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.
- Waiselfisz, J.J., Noletto, M.J., Bonder, C., Dias, M.T., & Chiechelski, P. 2003. *Paths to social inclusion: Porto Alegre's network of popular participation*. Brasília: UNESCO.
- Wardiat, D., et.al. (2006). *Partisipasi publik di era otonomi di Lombok, Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: LIPI Press.
- Warren, M.E., & Pearse, H. (2008). *Designing deliberative democracy: The British Columbia Citizens' Assembly*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Whitehead, L. (2002). *Democratization: Theory and experience the meaning of democracy*. New York: Oxford University Press.
- World Bank. (2003a). *Decentralizing Indonesia: A regional public expenditure review. Overview Report*. Jakarta: Author.
- (2003b). *World development report 2004: Making services work for poor people*. Washington: Author.

----- (2005). *World development report 2006: Equity and development*.
Washington: Author.

YAPPIKA. (2006). *Desentralisasi setengah hati: Analisis konstruksi berita desentralisasi media massa Indonesia Oktober 2005 - Januari 2006*. Jakarta: Penulis.

Zittel, T., & Fuchs, D. (2007). *Participatory democracy and political participation: Can participatory engineering bring citizens back in?*. London: Routledge.

II. SERIAL

Abelson, J., *et.al.* (2003). “Deliberations about deliberative methods: Issues in the design and evaluation of public participation processes”, on *Social Science & Medicine*, 57 (2003) 239–251.

Anderson, B. (2008). “Exit Suharto: Obituary for a mediocre tyrant”, on *New Left Review* 50, Mar Apr 2008.

Antlöv, H., Brinkerhoff, D.W., & Rapp, E. (2010). “Civil society capacity building for democratic reform: Experience and lessons from Indonesia”, on *Voluntas* (2010) 21:417–439.

Antlöv, H., & Wetterberg, A. (2010). “Masyarakat sipil, akuntabilitas politik dan masa depan pemerintahan daerah”, dalam “Otonomi untuk siapa?”, *Prisma*, Vol. 29, No. 3, Juli 2010, hal. 23-34.

Antlöv, H., & Wetterberg, A. (2011). “Citizen engagement, deliberative spaces and the consolidation of a post-authoritarian democracy: The case of Indonesia”, *Swedish International Centre for Local Democracy (ICLD), Working Paper No. 8*, 2011.

Benson, L., & Harkavy, I. (2002). “The role of community higher education-school partnership in educational and societal development and democratization”, on *Universities and Community School*, Volume 7, Number 1-2 Fall-Winter 2002.

- Brady, H.E., Sidney Verba, S., & Schlozman, K.L. (1995). "Beyond SES: A Resource Model of Political Participation", on *The American Political Science Review*, Vol. 89, No. 2 (Jun., 1995).
- Chambers, S. (2003). "Deliberative democratic theory", on *Annual Reviews Political Science*, 2003, 6:307-326.
- Chaves, M., Stephens, L., & Galaskiewicz, J. (2004). "Does government funding suppress nonprofits' political activity?", on *American Sociological Review*, Vol. 69, No. 2 (Apr., 2004), pp. 292-316
- Chowdhury, S., & Futoshi Yamauchi. (2010). "Has decentralization in Indonesia led to elite capture or reflection of majority preference?". JICA Research Institute. Working Paper No. 14, March 2010.
- de Valk, P. (2010). "Aid taken for granted?: From local 'ownership' towards 'autonomy' in aid projects", on *International Journal of Politics and Good Governance*, Volume 1, No. 1.2 Quarter II 2010.
- Dewansyah, B. (2011). "Deliberasi dalam proses demokrasi elektoral: Praktik Forum Konstituen dalam Pilkada Kabupaten Bandung", dalam *Jurnal Konstitusi*, PSKN-FH Universitas Padjadjaran dan Mahkamah Konstitusi RI, Volume III, No. 1, Juni 2011.
- Evans, P. 2004. "Development as institutional change: The pitfalls of monocropping and the potentials of deliberation", on *Studies in Comparative International Development*, Winter 2004, Vol. 38, No. 4, pp. 30-52.
- Fishkin, J.S., He, B., Luskin, R.C., & Siu, A. (2010). "Deliberative Democracy in an Unlikely Place: Deliberative Polling in China", on *British Journal of Political Science*, 2010, p.1-14.
- Fung, A. (2003). "Associations and democracy: Between theories, hopes, and realities", on *Annual Review of Sociology*, 2003, 29:515-539.
- (2005). "Deliberation before the revolution", on *Political Theory*. Vol. 33 No. 2, June 2005. 397-419.
- (2007). "Democratic theory and political science: A pragmatic method of constructive engagement", on *American Political Science Review*, Vol. 101, No. 3, August 2007, 443-458.

- Fung, A., & Wright, E.O. (2001). "Deepening democracy: Innovations in empowered participatory governance", on *Politics and Society*. Vol. 29 No.1. March 2001, 5-41.
- Gaventa, J. (2006). "Finding the spaces for change: A power analysis", on *Institute of Development Studies (IDS) Bulletin*, Volume 37 Number 6 November 2006.
- Habermas, J. (1974). "The Public sphere: An encyclopedia article (1964)" [Sara Lennox and Frank Lennox, Translator], on *New German Critique*, No. 3 (Autumn, 1974).
- Halvorsen, K.E. (2003). "Assessing the effect of public participation", on *Public Administration Review*. September/Oktober 2003, Vol. 63, No. 5.
- Heller, P. 2001. "Moving the state: The politics of democratic decentralization in Kerala, South Africa, and Porto Alegre", on *Politics and Society*, Vol. 29 (1): 131-163.
- Hickerson, A., & Gastil, J. (2008). "Assessing the difference critique of deliberation: Gender, emotion, and the jury experience", on *Communication Theory* 18 (2008) 281-303.
- INDEF. (1998). "Gejolak tuntutan otonomi daerah: Perspektif ekonomi politik dan implikasinya", INDEF's Policy Assessment. September 1998.
- Takeshi, I. (2006). "The dynamics of local governance reform in decentralizing Indonesia: Participatory planning and village empowerment in Bandung, West Java", on *Journal of Asian and African Area Studies*, 5 (2):137-183.
- (2007). "Institutional choices in the shadow of history: Decentralization in Indonesia", on *World Resources Institute*, Working Paper 34, December 2007.
- Melo, M.A., & Baiocchi, G. (2006). "Deliberative democracy and local governance: Towards a new agenda", on *Journal of Urban and Regional Research*. Volume 30. 3 September, 2006, p.587-600.
- Morrell, M.E. (2005). "Deliberation, democratic decision-making and internal political efficacy", on *Political Behavior*, Vol. 27, No. 1 (Mar., 2005), pp. 49-69.

- Nath, S., & Sobhee, S.K. (2007). "Aid motivation and donor behavior", on Putnam, R.D. (1995). "Bowling alone: America's declining social capital", on *Journal of Democracy*, 6:1, Jan 1995, 65-78.
- Sanders, L.M. (1997). "Against deliberation", on *Political Theory*. June 1997, Volume 25, Number 3, p347(30).
- Sorj, B. (2005). "Civil Societies North-South Relations: NGOs and Dependency", on *The Edelstein Center for Social Research-Brazil, Working Paper 1*, November 2005.
- UNDP. (1997). "Governance for sustainable human development", *UNDP Policy Document*, January 1997. New York.
- Yang, K., & Callahan, K. (2007). "Citizen involvement efforts and bureaucratic responsiveness: Participatory values, stakeholder pressure, and administrative practicality", on *Public Administration Review*. March/April 2007.
- Wang, X., & Wart, M.W. (2007). "When public participation in administration leads to trust: An empirical assessment of managers' perceptions", on *Public Administration Review*, March/April, 2007.

III. KARYA LAIN/KARYA NON CETAK

- Forum Aktivist Bandung (Produser). (2011). *Forum Konstituen*. [Videotape]. Bandung: Forum Aktivist Bandung dan Jelajah Wastu.

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Tujuan dari pedoman wawancara ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian:

- Pertanyaan Utama (PU): *Bagaimana FKKB sebagai asosiasi atau forum warga mendorong partisipasi politik dan upaya demokratisasi di Kabupaten Bandung?*
- (P1) *Mengapa FKKB dibentuk dan mengambil peran sebagai aktor demokrasi, dan bagaimana strategi dan upaya FKKB dapat menjadi media bagi warga untuk meningkatkan demokratisasi di daerah?;*
- (P2) *Bagaimana FKKB memposisikan aktor-aktor demokrasi yang terlibat, sekaligus memposisikan FKKB sebagai agen demokrasi?;*
- (P3) *Model kelembagaan partisipasi politik seperti apa yang dikonstruksikan dan dipromosikan oleh FKKB?.*

Informasi yang perlu diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, yaitu:

- (1) Aspek-aspek sosiologi (AS) → (a) Proses dan konstruksi sosial; (b) Pola relasi; dan (c) Struktur sosial. Termasuk juga mengenai: (d) Aktor; dan (e) Jaringan.
- (2) Arena diskursif (AD) → (a) Pra Pemilukada; (b) Perencanaan pembangunan daerah; (c) Lainnya.
- (3) Kelembagaan/Institusi (K/I) → (a) Struktur; (b) Sumberdaya (orang, waktu, logistik, dana, informasi, akses, dll.); (c) Tujuan; (d) Strategi; (e) Sasaran; (f) Program.
- (4) Teori demokrasi deliberative (TDD) → (a) *Civic dialogue*; (b) *Deliberative discussion*; (c) *Deliberative decision making*; (d) Pembangunan opini publik; (e) Pengembangan *public sphere*.
- (5) Teori demokrasi asosiatif (TDA) → (a) Peran asosiasi sebagai intermediary antara warga dan pemerintah/negara; (b) Peran asosiasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan publik; (c) Peran asosiasi melaksanakan sebagian urusan publik (devolusi peran pemerintah); (d) Peran mengelola sumberdaya termasuk yang diperoleh dari negara; (e) Mekanisme supervisi oleh negara.
- (6) Teori partisipasi politik (TPP) → (a) Keterlibatan; (b) Kontribusi.; (c) Mempengaruhi kebijakan; (d) Kontrol pelaksanaan;

Jenis informasi tadi coba diturunkan dalam panduan umum wawancara di bawah ini. Panduan wawancara ini tidak bersifat rigid, namun lebih sebagai alat bantu bagi peneliti untuk dikembangkan lebih lanjut dalam wawancara sesungguhnya dengan informan.

A. Panduan Wawancara kepada FKKB, FAB dan Donor

(Lanjutan)

Topik	Terkait Pertanyaan dan Jenis Informasi	FKKB	FAB	Donor
Latar belakang informan	- P2 - AS	- Identitas (nama, usia, lama tinggal, dll.) - Pendidikan - Pekerjaan - Pengalaman dalam kegiatan sosial - Pengalaman dalam organisasi	- Identitas (nama, usia, lama tinggal, dll.) - Pendidikan - Pekerjaan - Pengalaman dalam kegiatan sosial - Pengalaman dalam organisasi	- Identitas (nama, usia, dll.) - Posisi dan tugas di lembaga
Latar belakang pembentukan asosiasi atau forum warga	- P1 - AS - TDD - TDA	- Proses dan tahapan pembentukan - Alasan (masalah apa yang ingin dijawab atau dipecahkan) - Tujuan awal	- Proses dan tahapan pembentukan - Alasan (masalah apa yang ingin dijawab atau dipecahkan) - Tujuan awal	- Proses dan tahapan pembentukan - Alasan (masalah apa yang ingin dijawab atau dipecahkan) - Tujuan awal
Peran dalam pembentukan FKKB	- P2 - AS - TDD - TDA - TPP	- Peran pribadi dan/atau organisasi asal - Peran pihak lain <ul style="list-style-type: none"> • Aktor <i>state</i> (negara) • Aktor <i>non-state</i> (non-negara) 	- Peran FAB - Peran pihak lain <ul style="list-style-type: none"> • Aktor <i>state</i> (negara) • Aktor <i>non-state</i> (non-negara) 	- Peran Donor - Peran pihak lain <ul style="list-style-type: none"> • Aktor <i>state</i> (negara) • Aktor <i>non-state</i> (non-negara)
Kelembagaan	- P1 - P2 - P3 - K/I - TDD - TDA	- Kelengkapan organisasi dan manajemen: <ul style="list-style-type: none"> • Keanggotaan/kepesertaan dalam FKKB • Struktur organisasi FKKB • Mekanisme FKKB • Tujuan FKKB • Sasaran FKKB • Strategi FKKB • Program dan/atau kegiatan FKKB • Komunikasi dan koordinasi • Dokumentasi/pencatatan/pelaporan • Status hukum lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Keanggotaan/kepesertaan dalam FKKB • Struktur organisasi FKKB • Mekanisme FKKB • Tujuan FKKB • Sasaran FKKB • Strategi FKKB • Program dan/atau kegiatan FKKB • Komunikasi dan koordinasi • Dokumentasi/pencatatan/pelaporan • Status hukum lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Keanggotaan/kepesertaan dalam FKKB • Struktur organisasi FKKB • Mekanisme FKKB • Tujuan FKKB • Sasaran FKKB • Strategi FKKB • Program dan/atau kegiatan FKKB • Komunikasi dan koordinasi • Dokumentasi/pencatatan/pelaporan • Status hukum lembaga

(Lanjutan)

Topik	Terkait Pertanyaan Penelitian dan Jenis Informasi	FKKB	FAB	Donor
		- Bagaimana proses penyusunan kelengkapan tersebut?; Siapa membuat?; Siapa yang terlibat?		
Stakeholders dan Jaringan	- P2 - TDD - TDA - TPP	- Pihak yang dianggap sebagai jaringan FKKB? → • Jaringan kekuasaan, kepentingan, dan <i>sentiment</i> (perasaan) • Jaringan horizontal dan vertikal - Bagaimana hubungan FKKB dengan: • <u>Aktor state</u> → Pemerintah Daerah; KPUD; Politisi dan partai politik; dll. • <u>Aktor non-state</u> → FAB; Masyarakat Kabupaten Bandung; Organisasi asal; Forum warga lain; NGO lain; Media massa; Akademisi; Donor; dll.	- Pihak yang dianggap sebagai jaringan FKKB? • Jaringan kekuasaan, kepentingan, dan <i>sentiment</i> (perasaan) • Jaringan horizontal dan vertikal - Bagaimana hubungan FKKB dengan: • <u>Aktor state</u> → Pemerintah Daerah; KPUD; Politisi dan partai politik; dll. • <u>Aktor non-state</u> → FAB; Masyarakat Kabupaten Bandung; Organisasi asal; Forum warga lain; NGO lain; Media massa; Akademisi; Donor; dll.	- Pihak saja yang dianggap sebagai jaringan FKKB? • Jaringan kekuasaan, kepentingan, dan <i>sentiment</i> (perasaan) • Jaringan horizontal dan vertikal - Bagaimana hubungan FKKB dengan: • <u>Aktor state</u> → Pemerintah Daerah; KPUD; Politisi dan partai politik; dll. • <u>Aktor non-state</u> → FAB; Masyarakat Kabupaten Bandung; Organisasi asal; Forum warga lain; NGO lain; Media massa; Akademisi; Donor; dll.
Upaya atau kegiatan konkret yang telah dilakukan oleh dan/atau bersama FKKB	- P1 - P2 - P3 - AD - TDD - TDA - TPP	- Jenis kegiatan; waktu; lokasi; agenda; internal atau eksternal - Peserta dari FKKB yang terlibat (gender, usia, ketokohan, dll.) - Pihak eksternal yang terlibat (aktor <i>state</i> dan <i>non-state</i>) • Komunikasi internal → rapat/ pertemuan • Sosialisasi → Sosialisasi/kampanye; 'kaderisasi'; • Diskursus dan <i>decision making</i> → Diskusi, dialog, konsultasi publik; perencanaan kebijakan; • <i>Capacity building</i> → Pendidikan/ Pelatihan; Workshop	- Peran FAB dalam kegiatan FKKB - Jenis kegiatan; waktu; lokasi; agenda; internal atau eksternal - Peserta dari FKKB yang terlibat (gender, usia, ketokohan, dll.) - Pihak eksternal yang terlibat (aktor <i>state</i> dan <i>non-state</i>) • Komunikasi internal → rapat/ pertemuan • Sosialisasi → Sosialisasi/kampanye; 'kaderisasi'; • Diskursus dan <i>decision making</i> → Diskusi, dialog, konsultasi publik; perencanaan kebijakan; • <i>Capacity building</i> → Pendidikan/	- Dukungan Donor bagi kegiatan FAB dan FKKB - Jenis kegiatan; waktu; lokasi; agenda; internal atau eksternal - Peserta dari FKKB yang terlibat (gender, usia, ketokohan, dll.) - Pihak eksternal yang terlibat (aktor <i>state</i> dan <i>non-state</i>) • Komunikasi internal → rapat/ pertemuan • Sosialisasi → Sosialisasi/kampanye; 'kaderisasi'; • Diskursus dan <i>decision making</i> → Diskusi, dialog, konsultasi publik; perencanaan kebijakan;

(Lanjutan)

Topik	Terkait Pertanyaan Penelitian dan Jenis Informasi	FKKB	FAB	Donor
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Networking</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan; Workshop • <i>Networking</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Capacity building</i> → Pendidikan/ Pelatihan; Workshop • <i>Networking</i>
Upaya atau kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat oleh dan/atau bersama FKKB	<ul style="list-style-type: none"> - P1 - P2 - P3 - AD - TDD - TDA - TPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis kegiatan; waktu; lokasi; agenda; internal atau eksternal - Peserta dari FKKB yang terlibat (gender, usia, ketokohan, dll.) - Pihak eksternal yang terlibat (aktor <i>state</i> dan <i>non-state</i>) • Komunikasi internal → rapat/ pertemuan; evaluasi; pertanggungjawaban ke 'anggota'; pemilihan pengurus; dll. • Sosialisasi → Sosialisasi/kampanye; 'kaderisasi'; • Diskursus dan <i>decision making</i> → Diskusi, dialog, konsultasi publik; perencanaan kebijakan; • <i>Capacity building</i> → Pendidikan/ Pelatihan; • <i>Networking</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Peran FAB dalam kegiatan FKKB - Jenis kegiatan; waktu; lokasi; agenda; internal atau eksternal - Peserta dari FKKB yang terlibat (gender, usia, ketokohan, dll.) - Pihak eksternal yang terlibat (aktor <i>state</i> dan <i>non-state</i>) • Komunikasi internal → rapat/ pertemuan; evaluasi; pertanggungjawaban ke 'anggota'; pemilihan pengurus; dll. • Sosialisasi → Sosialisasi/kampanye; 'kaderisasi'; • Diskursus dan <i>decision making</i> → Diskusi, dialog, konsultasi publik; perencanaan kebijakan; • <i>Capacity building</i> → Pendidikan/ Pelatihan; • <i>Networking</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Donor bagi kegiatan FAB dan FKKB - Jenis kegiatan; waktu; lokasi; agenda; internal atau eksternal - Peserta dari FKKB yang terlibat (gender, usia, ketokohan, dll.) - Pihak eksternal yang terlibat (aktor <i>state</i> dan <i>non-state</i>) • Komunikasi internal → rapat/ pertemuan; evaluasi; pertanggungjawaban ke 'anggota'; pemilihan pengurus; dll. • Sosialisasi → Sosialisasi/kampanye; 'kaderisasi'; • Diskursus dan <i>decision making</i> → Diskusi, dialog, konsultasi publik; perencanaan kebijakan; • <i>Capacity building</i> → Pendidikan/ Pelatihan; • <i>Networking</i>
Hasil yang telah dicapai	<ul style="list-style-type: none"> - P1 - TDD - TDA 	<ul style="list-style-type: none"> - Hal yang dianggap sebagai keberhasilan? - Alasan/penjelasannya? • Pengakuan/legitimasi/<i>trust</i> • Proses diskursus • Kolaborasi • Masukan diterima dan dilaksanakan • Terlibat dalam pengambilan keputusan • Kebijakan yang disahkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Hal yang dianggap sebagai keberhasilan FKKB dan FAB? - Alasan/penjelasannya? • Pengakuan/legitimasi/<i>trust</i> • Proses diskursus • Kolaborasi • Masukan diterima dan dilaksanakan • Terlibat dalam pengambilan keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Hal yang dianggap sebagai keberhasilan FKKB, FAB dan Donor? - Alasan/penjelasannya? • Pengakuan/legitimasi/<i>trust</i> • Proses diskursus • Kolaborasi • Masukan diterima dan dilaksanakan • Terlibat dalam pengambilan keputusan

(Lanjutan)

Topik	Terkait Pertanyaan Penelitian dan Jenis Informasi	FKKB	FAB	Donor
		<ul style="list-style-type: none"> • Jadi narasumber/rujukan • Jaringan dan dukungan sumberdaya bertambah • Dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang disahkan • Jadi narasumber/rujukan • Jaringan dan dukungan sumberdaya bertambah • Dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang disahkan • Jadi narasumber/rujukan • Jaringan dan dukungan sumberdaya bertambah • Dll.
Pengaruh	<ul style="list-style-type: none"> - P1 - P2 - P3 - AAS - TDD - TDA - TPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh dari keberadaan dan upaya FKKB?, bagi: <ul style="list-style-type: none"> • Aktor-aktor: <ol style="list-style-type: none"> (1) Aktor <i>state</i> → Pemerintah Daerah; KPUD; Politisi dan partai politik (2) Aktor <i>non-state</i> → Pribadi; FKKB sendiri; FAB; Organisasi asal informan; Forum warga lain; NGO lain; Donor; Masyarakat Kabupaten Bandung; Pihak-pihak lain (termasuk di luar Kabupaten Bandung); Donor • Proses demokratisasi → <i>public sphere</i>; asosiasi warga; <i>trust</i>; kolaborasi; kualitas dan keberpihakan kebijakan; pencegahan KKN; • Struktur (relasi <i>state-society</i>); • Kultur demokrasi → kesadaran kritis; pruralis; dialogis; dll. - Adakah pihak yang kemungkinan merasa dirugikan dari keberadaan FKKB?; Apa kerugiannya?; Mengapa?; Bagaimana penyikapan atas hal tersebut? 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh dari keberadaan dan upaya FKKB?, bagi: <ul style="list-style-type: none"> • Aktor-aktor: <ol style="list-style-type: none"> (1) Aktor <i>state</i> → Pemerintah Daerah; KPUD; Politisi dan partai politik (2) Aktor <i>non-state</i> → Pribadi; FKKB sendiri; FAB; Organisasi asal informan; Forum warga lain; NGO lain; Donor; Masyarakat Kabupaten Bandung; Pihak-pihak lain (termasuk di luar Kabupaten Bandung); Donor • Proses demokratisasi → <i>public sphere</i>; asosiasi warga; <i>trust</i>; kolaborasi; kualitas dan keberpihakan kebijakan; pencegahan KKN; • Struktur (relasi <i>state-society</i>); • Kultur demokrasi → kesadaran kritis; pruralis; dialogis; dll. - Adakah pihak yang kemungkinan merasa dirugikan dari keberadaan FKKB?; Apa kerugiannya?; Mengapa?; Bagaimana penyikapan FKKB atas hal tersebut? 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh dari keberadaan dan upaya FKKB?, bagi: <ul style="list-style-type: none"> • Aktor-aktor: <ol style="list-style-type: none"> (1) Aktor <i>state</i> → Pemerintah Daerah; KPUD; Politisi dan partai politik (2) Aktor <i>non-state</i> → Pribadi; FKKB sendiri; FAB; Organisasi asal informan; Forum warga lain; NGO lain; Donor; Masyarakat Kabupaten Bandung; Pihak-pihak lain (termasuk di luar Kabupaten Bandung); Donor • Proses demokratisasi → <i>public sphere</i>; asosiasi warga; <i>trust</i>; kolaborasi; kualitas dan keberpihakan kebijakan; pencegahan KKN; • Struktur (relasi <i>state-society</i>); • Kultur demokrasi → kesadaran kritis; pruralis; dialogis; dll. - Adakah pihak yang kemungkinan merasa dirugikan dari keberadaan FKKB?; Apa kerugiannya?; Mengapa?; Bagaimana penyikapan FKKB atas hal tersebut?
Hal yang belum tercapai	<ul style="list-style-type: none"> - P1 - TDD - TDA 	<ul style="list-style-type: none"> - Hal-hal yang dianggap belum tercapai? - Alasan/penjelasannya? <ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan FKKB 	<ul style="list-style-type: none"> - Hal-hal yang dianggap belum tercapai bagi FKKB dan FAB? - Alasan/penjelasannya? 	<ul style="list-style-type: none"> - Hal-hal yang dianggap belum tercapai bagi FKKB dan TIFA? - Alasan/penjelasannya?

(Lanjutan)

Topik	Terkait Pertanyaan Penelitian dan Jenis Informasi	FKKB	FAB	Donor
	- TPP	<ul style="list-style-type: none"> • Sumberdaya FKKB • Jaringan FKKB • Agenda politik FKKB 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan FKKB • Sumberdaya FKKB • Jaringan FKKB • Agenda politik FKKB 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan FKKB • Sumberdaya FKKB • Jaringan FKKB • Agenda politik FKKB
Keunikan atau kekhasan	<ul style="list-style-type: none"> - P1 - P2 - P3 - TDD - TDA - TPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Apa kesamaan FKKB dibanding asosiasi atau forum warga lain? - Apa yang membedakan FKKB dibanding asosiasi atau forum warga lain? - Kelebihan? - Kelemahan? 	<ul style="list-style-type: none"> - Apa kesamaan FKKB dibanding asosiasi atau forum warga lain? - Apa yang membedakan FKKB dibanding asosiasi atau forum warga lain? - Kelebihan? - Kelemahan? 	<ul style="list-style-type: none"> - Apa kesamaan FKKB dibanding asosiasi atau forum warga lain? - Apa yang membedakan FKKB dibanding asosiasi atau forum warga lain? - Kelebihan? - Kelemahan?
Kendala dan Hambatan	<ul style="list-style-type: none"> - P1 - P2 - P3 - AAS - TDD - TDA - TPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Apa atau siapa yang dianggap sebagai kendala dan/atau hambatan bagi eksistensi maupun peran FKKB • Aktor • Struktur • Kultur • Proses - Bagaimana strategi dan upaya yang telah dilakukan FKKB untuk 'mengatasinya'? 	<ul style="list-style-type: none"> - Apa atau siapa yang dianggap sebagai kendala dan/atau hambatan bagi eksistensi maupun peran FKKB • Aktor • Struktur • Kultur • Proses - Bagaimana strategi dan upaya yang telah dilakukan FKKB untuk 'mengatasinya'? 	<ul style="list-style-type: none"> - Apa atau siapa yang dianggap sebagai kendala dan/atau hambatan bagi eksistensi maupun peran FKKB • Aktor • Struktur • Kultur • Proses - Bagaimana strategi dan upaya yang telah dilakukan FKKB untuk 'mengatasinya'?
Sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> - P2 - P3 - K/I - TDA - TPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Saat ini: • Orang (jumlah, kapasitas, gender, keterwakilan; dll) • Waktu • Logistik /tempat/alat • Dana (jenis kebutuhan, besaran, sumber) • Informasi • Akses 	<ul style="list-style-type: none"> - Saat ini: • Orang (jumlah, kapasitas, gender, keterwakilan; dll) • Waktu • Logistik /tempat/alat • Dana (jenis kebutuhan, besaran, sumber) • Informasi • Akses 	<ul style="list-style-type: none"> - Saat ini: • Orang (jumlah, kapasitas, gender, keterwakilan; dll) • Waktu • Logistik /tempat/alat • Dana (jenis kebutuhan, besaran, sumber) • Informasi • Akses
Keberlanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - P3 - TDD 	<ul style="list-style-type: none"> - Peluang keberlanjutan FKKB? - Faktor-faktor yang mendukung? → internal dan eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> - Peluang keberlanjutan FKKB? - Faktor-faktor yang mendukung? → internal dan eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> - Peluang keberlanjutan FKKB? - Faktor-faktor yang mendukung? → internal dan eksternal

(Lanjutan)

Topik	Terkait Pertanyaan Penelitian dan Jenis Informasi	FKKB	FAB	Donor
	- TDA	- Faktor-faktor yang menghambat? → internal dan eksternal - Strategi bagi keberlanjutan?	- Faktor-faktor yang menghambat? → internal dan eksternal - Strategi bagi keberlanjutan? - Peran dan dukungan yang dapat dilakukan FAB?	- Faktor-faktor yang menghambat? → internal dan eksternal - Strategi bagi keberlanjutan? - Peran dan dukungan yang dapat dilakukan Donor?
Proyeksi	- P2 - P3	- <i>Positioning</i> dan peran apa yang ingin dijalankan FKKB ke depan? - Pola hubungan dengan pihak-pihak lain di masa depan? - Strategi mencapai proyeksi	- <i>Positioning</i> dan peran apa yang ingin dijalankan FKKB ke depan? - Pola hubungan dengan pihak-pihak lain di masa depan? - Strategi mencapai proyeksi	- <i>Positioning</i> dan peran apa yang ingin dijalankan FKKB ke depan? - Pola hubungan dengan pihak-pihak lain di masa depan? - Strategi mencapai proyeksi
Kebutuhan	- P2 - P3	- Yang dapat dipenuhi sendiri oleh FKKB? - Yang memerlukan dukungan dari pihak lain? - Strategi memenuhi kebutuhan tersebut?	- Yang dapat dipenuhi sendiri oleh FKKB? - Yang memerlukan dukungan dari pihak lain? - Strategi memenuhi kebutuhan tersebut?	- Yang dapat dipenuhi sendiri oleh FKKB? - Yang memerlukan dukungan dari pihak lain? - Strategi memenuhi kebutuhan tersebut?
Penilaian ke dalam FKKB	- P1 - P2 - P3 - TDD - TDA - TPP	- Kuantitas dan kapasitas anggota - Hubungan antar anggota - Keterwakilan dan peran perempuan - Keterwakilan dan peran masyarakat miskin - Intensitas pertemuan dan kegiatan lain - Keaktifan anggota - Konflik dan resolusi konflik dalam organisasi	- Kuantitas dan kapasitas anggota - Hubungan antar anggota - Keterwakilan dan peran perempuan - Keterwakilan dan peran masyarakat miskin - Intensitas pertemuan dan kegiatan lain - Keaktifan anggota - Konflik dan resolusi konflik dalam organisasi	- Kuantitas dan kapasitas anggota - Hubungan antar anggota - Keterwakilan dan peran perempuan - Keterwakilan dan peran masyarakat miskin - Intensitas pertemuan dan kegiatan lain - Keaktifan anggota - Konflik dan resolusi konflik dalam organisasi
Penilaian keluar FKKB	- P1 - P3 - TDD - TDA	- Independensi FKKB - Opini pihak lain tentang FKKB - Jika FKKB memperoleh dukungan (dana, tempat, alat, dll.) dari pemerintah?; Konsekuensinya?	- Independensi FKKB - Opini pihak lain tentang FKKB - Jika FKKB memperoleh dukungan (dana, tempat, alat, dll.) dari pemerintah?; Konsekuensinya?	- Independensi FKKB - Opini pihak lain tentang FKKB - Jika FKKB memperoleh dukungan (dana, tempat, alat, dll.) dari pemerintah?; Konsekuensinya?
Lesson learned dan Peluang Replikasi	- P1 - P3 - TDD - TDA	- Pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman FKKB? - Peluang replikasi kegiatan dan model kelembagaan FKKB?; Hal yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan?	- Pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman FKKB? - Peluang replikasi kegiatan dan model kelembagaan FKKB?; Hal yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan?	- Pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman FKKB? - Peluang replikasi kegiatan dan model kelembagaan FKKB?; Hal yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan?

B. Panduan Wawancara kepada Cabup/Cawabup, Pemda dan KPUD

(Lanjutan)

Topik	Terkait Pertanyaan Penelitian dan Jenis Informasi	Cabup & Cawabup / Parpol	KPUD	Pemda
Pengetahuan akan FKKB	<ul style="list-style-type: none"> - P1 - P2 - AS - AD - K/I - TPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses mengenal FKKB - Pengetahuan tentang FKKB: <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan • Kegiatan • Aktor • Jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses mengenal FKKB - Pengetahuan tentang FKKB: <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan • Kegiatan • Aktor • Jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses mengenal FKKB - Pengetahuan tentang FKKB: <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan • Kegiatan • Aktor • Jaringan
Aktivitas konkret yang pernah dilakukan bersama FKKB	<ul style="list-style-type: none"> - P1 - P2 - AD - TDD - TDA 	<ul style="list-style-type: none"> - Nama kegiatan (lokasi dan waktu) - Peran dalam kegiatan - Alasan bersedia terlibat dalam kegiatan - Pihak lain yang terlibat - Hasil - Penilaian terhadap kegiatan tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Nama kegiatan (lokasi dan waktu) - Peran dalam kegiatan - Alasan bersedia terlibat dalam kegiatan - Pihak lain yang terlibat - Hasil - Penilaian terhadap kegiatan tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Nama kegiatan (lokasi dan waktu) - Peran dalam kegiatan - Alasan bersedia terlibat dalam kegiatan - Pihak lain yang terlibat - Hasil - Penilaian terhadap kegiatan tersebut
Pengaruh	<ul style="list-style-type: none"> - P1 - P2 - P3 - AAS - TDD - TDA - TPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh dari keberadaan dan upaya FKKB?, bagi: <ul style="list-style-type: none"> • Aktor-aktor: <ul style="list-style-type: none"> (3) Aktor <i>state</i> → Pemerintah Daerah; KPUD; Politisi dan partai politik (4) Aktor <i>non-state</i> → Pribadi; FKKB sendiri; FAB; Organisasi asal informan; Forum warga lain; NGO lain; Donor; Masyarakat Kabupaten Bandung; Pihak-pihak lain (termasuk di luar Kabupaten Bandung); Donor • Proses demokratisasi → <i>public sphere</i>; asosiasi warga; <i>trust</i>; kolaborasi; kualitas dan keberpihakan kebijakan; pencegahan KKN; • Struktur (relasi <i>state-society</i>); • Kultur demokrasi → kesadaran kritis; 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh dari keberadaan dan upaya FKKB?, bagi: <ul style="list-style-type: none"> • Aktor-aktor: <ul style="list-style-type: none"> (3) Aktor <i>state</i> → Pemerintah Daerah; KPUD; Politisi dan partai politik (4) Aktor <i>non-state</i> → Pribadi; FKKB sendiri; FAB; Organisasi asal informan; Forum warga lain; NGO lain; Donor; Masyarakat Kabupaten Bandung; Pihak-pihak lain (termasuk di luar Kabupaten Bandung); Donor • Proses demokratisasi → <i>public sphere</i>; asosiasi warga; <i>trust</i>; kolaborasi; kualitas dan keberpihakan kebijakan; pencegahan KKN; • Struktur (relasi <i>state-society</i>); • Kultur demokrasi → kesadaran kritis; 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh dari keberadaan dan upaya FKKB?, bagi: <ul style="list-style-type: none"> • Aktor-aktor: <ul style="list-style-type: none"> (3) Aktor <i>state</i> → Pemerintah Daerah; KPUD; Politisi dan partai politik (4) Aktor <i>non-state</i> → Pribadi; FKKB sendiri; FAB; Organisasi asal informan; Forum warga lain; NGO lain; Donor; Masyarakat Kabupaten Bandung; Pihak-pihak lain (termasuk di luar Kabupaten Bandung); Donor • Proses demokratisasi → <i>public sphere</i>; asosiasi warga; <i>trust</i>; kolaborasi; kualitas dan keberpihakan kebijakan; pencegahan KKN; • Struktur (relasi <i>state-society</i>); • Kultur demokrasi → kesadaran kritis;

(Lanjutan)

Topik	Terkait Pertanyaan Penelitian dan Jenis Informasi	Cabup & Cawabup / Parpol	KPUD	Pemda
		<ul style="list-style-type: none"> Kultur demokrasi → kesadaran kritis; pruralis; dialogis; dll. - Adakah pihak yang kemungkinan merasa dirugikan dari keberadaan FKKB?; Apa kerugiannya?; Mengapa?; Bagaimana penyikapan atas hal tersebut? 	<p>pruralis; dialogis; dll.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adakah pihak yang kemungkinan merasa dirugikan dari keberadaan FKKB?; Apa kerugiannya?; Mengapa?; Bagaimana penyikapan FKKB atas hal tersebut? 	<p>pruralis; dialogis; dll.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adakah pihak yang kemungkinan merasa dirugikan dari keberadaan FKKB?; Apa kerugiannya?; Mengapa?; Bagaimana penyikapan FKKB atas hal tersebut?
Keunikan atau kekhasan	<ul style="list-style-type: none"> - P1 - P2 - P3 - TDD - TDA - TPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Apa kesamaan FKKB dibanding asosiasi atau forum warga lain? - Apa yang membedakan FKKB dibanding asosiasi atau forum warga lain? - Kelebihan? - Kelemahan? 	<ul style="list-style-type: none"> - Apa kesamaan FKKB dibanding asosiasi atau forum warga lain? - Apa yang membedakan FKKB dibanding asosiasi atau forum warga lain? - Kelebihan? - Kelemahan? 	<ul style="list-style-type: none"> - Apa kesamaan FKKB dibanding asosiasi atau forum warga lain? - Apa yang membedakan FKKB dibanding asosiasi atau forum warga lain? - Kelebihan? - Kelemahan?
Keberlanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - P3 - TDD - TDA 	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah asosiasi warga semacam FKKB memang diperlukan? - Apa yang perlu dilakukan FKKB agar dapat berkelanjutan? 	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah asosiasi warga semacam FKKB memang diperlukan? - Apa yang perlu dilakukan FKKB agar dapat berkelanjutan? 	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah asosiasi warga semacam FKKB memang diperlukan? - Apa yang perlu dilakukan FKKB agar dapat berkelanjutan?
Independensi	<ul style="list-style-type: none"> - P3 - K/I - TDA 	<ul style="list-style-type: none"> - Independensi -vs- interdependensi FKKB - Jika FKKB memperoleh dukungan (dana, tempat, alat, dll.) dari pemerintah?; Konsekuensinya? 	<ul style="list-style-type: none"> - Independensi -vs- interdependensi FKKB - Jika FKKB memperoleh dukungan (dana, tempat, alat, dll.) dari KPUD atau pemerintah?; Konsekuensinya bagi FKKB?; Apakah dimungkinkan dalam mekanisme KPUD? 	<ul style="list-style-type: none"> - Independensi -vs- interdependensi FKKB - Jika FKKB memperoleh dukungan (dana, tempat, alat, dll.) dari KPUD atau pemerintah?; Konsekuensinya bagi FKKB?; Apakah dimungkinkan dalam mekanisme KPUD?
Lesson learned dan Peluang Replikasi	<ul style="list-style-type: none"> - P1 - P3 - TDD - TDA - TPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman FKKB? - Peluang replikasi kegiatan dan model kelembagaan FKKB?; Hal yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan? 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman FKKB? - Peluang replikasi kegiatan dan model kelembagaan FKKB?; Hal yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan? 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman FKKB? - Peluang replikasi kegiatan dan model kelembagaan FKKB?; Hal yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan?

Lampiran 2: Pedoman Observasi

Pedoman FGD ini digunakan untuk membantu dalam memperoleh informasi yang sulit diperoleh dalam wawancara dan FGD, sekaligus sebagai pembanding dalam melakukan validasi (triangulasi). Sasaran informasi ini untuk menggambarkan situasi dan kondisi dalam intitusi FKKB, interaksi antar anggota dan dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan penelitian (lihat penjelasan Lampiran 2: Pedoman Wawancara).

Topik	Terkait Pertanyaan Penelitian dan Jenis Informasi	Aspek yang di Observasi
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - AS - K/I 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat berkumpul/sekretariat - Kelengkapan/pendukung organisasi/kegiatan - Simbol-simbol
Interaksi Antar Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - TDD 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecenderungan relasi (dominasi, egaliter, patron-klien, konflik, persaingan, dll.) → terkait dengan gender, usia, pendidikan, status, dll. - Bahasa, <i>gesture</i>, simbol - Jarak sosial → dekat atau jauh
Pertemuan dan Rapat Internal	<ul style="list-style-type: none"> - P1 - TDD - TPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Suasana pertemuan (formal, informal, kaku, akrab, dll.) - Penentuan jadwal, tempat dan agenda - Mekanisme undangan/informasi - Peserta dan pemimpin (Jarak sosial → dekat atau jauh) - Proses pembahasan - Proses pengambilan keputusan - Pembagian peran atau penugasan
Interaksi dengan Aktor Negara	<ul style="list-style-type: none"> - P2 - AS - AD - TDD - TDA - TPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahasa, <i>gesture</i>, simbol - Pesan dan respon - Kecenderungan relasi (dominasi, egaliter, patron-klien, konflik, persaingan, dll.) - Jarak sosial → dekat atau jauh - Pengakuan atas keberadaan FKKB
Interaksi dengan Aktor Non-Negara	<ul style="list-style-type: none"> - P2 - AS 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahasa, <i>gesture</i>, simbol - Pesan dan respon - Kecenderungan relasi (dominasi, egaliter, patron-klien, konflik, persaingan, dll.)

(Lanjutan)

Topik	Terkait Pertanyaan Penelitian dan Jenis Informasi	Aspek yang di Observasi
	<ul style="list-style-type: none"> - AD - TDD - TDA - TPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Jarak sosial → dekat atau jauh - Pengakuan atas keberadaan FKKB
Produk, Media	<ul style="list-style-type: none"> - AS 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahasa, simbol - Pesan <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen tertulis • Foto/video • Kliping • DLL

Lampiran 3: Pedoman FGD

Pedoman FGD ini digunakan untuk memperoleh informasi dari informan secara berkelompok, sekaligus sebagai pembanding dalam melakukan validasi (triangulasi). Sasaran informasi ini untuk menggambarkan situasi dan kondisi dalam intitusi FKKB, interaksi antar anggota dan dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan penelitian (lihat penjelasan Lampiran 2: Pedoman Wawancara).

FGD	Topik	Terkait Pertanyaan Penelitian dan Jenis Informasi	Pertanyaan
FGD 1 → Laki-laki dan perempuan yang paling aktif dan tahu banyak tentang FKKB	Kelembagaan	- P1 - P2 - P3	- Alasan, tujuan dan proses pembentukan FKKB - Keterwakilan peserta → gender, isu, sektor, usia, + ‘rekrutmen peserta baru’ - Sumberdaya → kuantitas, kualitas, dukungan - Pola Komukasi dan pengambilan keputusan di FKKB - Status kelembagaan
	Stakeholder dan Jaringan	- P2	- Stakeholder dan jaringan FKKB <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan horizontal dan vertikal; aktor <i>state</i> dan <i>non-state</i>; dekat dan jauh • Pola interaksi dan interelasi
	Peran dan Pengaruh	- P1 - P2 - P3	- Peran yang dijalankan FKKB → Tujuan dan sasaran, strategi - Upaya konkret yang pernah dilakukan FKKB: <ul style="list-style-type: none"> • Pra Pemilukada • Pembahasan RPJMD • Pertemuan pemerintah dan organisasi masyarakat • Pertemuan dengan NGO dan forum warga lain • Mengajukan usulan kebijakan • Kampanye di media, menjadi narasumber, dll. - Pengaruh dari upaya FKKB → Pengakuan, kritik/usulan yang diterima, terlibat dalam pembahasan dan pengambilan keputusan, dll.
	Kontribusi	- P1	- Manfaat FKKB <ul style="list-style-type: none"> • Aktor <i>state</i> → Pemerintah daerah, KPU, Cabup/cawabup, Parpol • Aktor <i>non-state</i> → pribadi, organisasi asal, NGO, donor, masyarakat • Proses dan budaya demokrasi

(Lanjutan)

FGD	Topik	Terkait Pertanyaan Penelitian dan Jenis Informasi	Pertanyaan
	Keberlanjutan	- P1 - P2 - P3	- Keberlanjutan FKKB → kekuatan, kelemahan, hambatan/peluang, peluang, kebutuhan, strategi.
FGD 2 → Laki-laki yang cukup aktif dan cukup tahu tentang FKKB	Kelembagaan dan Kegiatan	- P1 - P2 - P3	- Keterwakilan dan peran peserta → gender, isu, sektor, usia, + 'rekrutmen peserta baru' - Sumberdaya → kuantitas, kualitas, dukungan - Pola komunikasi dan pengambilan keputusan di FKKB - Kegiatan FKKB
	Stakeholder dan Jaringan	- P2	- Stakeholder dan jaringan FKKB • Jaringan horizontal dan vertikal; aktor <i>state</i> dan <i>non-state</i> ; dekat dan jauh • Pola interaksi dan interelasi
	Kontribusi	- P1 - P2 - P3	- Manfaat FKKB • Aktor <i>state</i> → Pemerintah daerah, KPU, Cabup/cawabup, Parpol • Aktor <i>non-state</i> → pribadi, organisasi asal, NGO, donor, masyarakat • Proses dan budaya demokrasi
	Keberlanjutan	- P1	- Keberlanjutan FKKB → kekuatan, kelemahan, hambatan/peluang, peluang, kebutuhan, strategi.
FGD 3 → Perempuan yang cukup aktif dan cukup tahu tentang FKKB	Kelembagaan dan Kegiatan	- P1 - P2 - P3	- Keterwakilan dan peran peserta → gender, isu, sektor, usia, + 'rekrutmen peserta baru' - Sumberdaya → kuantitas, kualitas, dukungan - Pola komunikasi dan pengambilan keputusan di FKKB - Kegiatan FKKB
	Stakeholder dan Jaringan	- P1 - P2 - P3	- Stakeholder dan jaringan FKKB • Jaringan horizontal dan vertikal; aktor <i>state</i> dan <i>non-state</i> ; dekat dan jauh • Pola interaksi dan interelasi
	Kontribusi	- P2	- Manfaat FKKB • Aktor <i>state</i> → Pemerintah daerah, KPU, Cabup/cawabup, Parpol • Aktor <i>non-state</i> → pribadi, organisasi asal, NGO, donor, masyarakat • Proses dan budaya demokrasi
	Keberlanjutan	- P1 - P2 - P3	- Keberlanjutan FKKB → kekuatan, kelemahan, hambatan/peluang, peluang, kebutuhan, strategi.

Lampiran 4: Daftar Nama Informan Penelitian

No	Nama	Alias	P/L	Keterangan	Pertimbangan
1.	Ali	V	L	Mantan Koordinator Tim 9 FKKB	Pemimpin informal; Pegiat ('pengurus') FKKB.
2.	Setiawan	V	L	Koordinator Konsolidasi FKKB	Pegiat FKKB.
3.	Tarum	V	L	Anggota Tim 9 FKKB / Mantan Fasilitator FAB	Katalisator FAB dan kelompok <i>civil society</i> ; Pegiat FKKB
4.	Nadri	V	L	Anggota Tim 9 FKKB	Aktivis komunitas (senior); Pegiat FKKB.
5.	Ihsan	V	L	Anggota Tim 9 FKKB	Aktivis komunitas (senior); Pegiat FKKB.
6.	Titi	V	P	Anggota Tim 9 FKKB	Aktivis komunitas; Pegiat FKKB.
7.	Derry	V	L	Anggota Tim 9 FKKB	Aktivis komunitas; Pegiat FKKB
8.	Nanang	V	L	Peserta FKKB	Aktivis komunitas
9.	Wati	V	P	Peserta FKKB	Aktivis komunitas
10.	Sari	V	P	Peserta FKKB	Aktivis komunitas
11.	Tedi	V	L	Peserta FKKB	Aktivis komunitas (senior)
12.	Yana	V	P	Peserta FKKB	Aktivis komunitas
13.	Lastri	V	P	Peserta FKKB	Aktivis komunitas & NGO
14.	Radhar	-	L	Ketua FAB	Konseptor/Inisiator.
15.	Okky	-	L	Sekjen FAB	Konseptor/Inisiator.
16.	Osin P.	-	L	Ketua KPUD Kab.	Otoritas dalam Pemilukada
17.	Ferry K.	-	L	Ketua KPUD Prov.	Otoritas dalam Pemilukada
18.	Kusnadi	V	L	Calon Bupati/Wakil Bupati	Politisi senior; eks DPRD; Latar belakang partai besar
19.	Jaka	V	L	Calon Bupati/Wakil Bupati	Aktivis pemberdayaan masyarakat; Calon independen; Pasangan Toto
20.	Toto	V	L	Calon Bupati/Wakil Bupati	Birokrat; Dekat dengan kelompok <i>civil society</i> ; Calon independen; Pasangan Jaka
21.	Deden Rumaji	-	L	Wakil Bupati Kabupaten Bandung (Observasi)	Calon Bupati/Wakil Bupati 2010 (politisi/pengusaha); Pemerintah daerah.
22.	Andi	V	L	Kasubbid di Bappeda Kabupaten Bandung	Pemerintah daerah; sering berinteraksi dengan NGO.
23.	Heryadi	-	L	TIFA	Donor
24.	Mickael	-	L	TIFA	Donor

Lampiran 5: Daftar Nama Peserta FGD

No.	Nama (Alias)	Keterangan	Pertimbangan
1	Tarum	Anggota Tim 9 FKKB	Pegiat FKKB
2	Barkah	FDA/FKKB	Peserta FKKB
3	Soni	PEMKAB (Persatuan Mahasiswa Kabupaten Bandung) / FKKB	Peserta FKKB
4	Iman	UNIBBA/FKKB	Peserta FKKB
5	Didi	TALAS/FKKB	Peserta FKKB
6	Ihsan	Anggota Tim 9 FKKB	Pegiat FKKB
7	Somad	PMII / FKKB	Peserta FKKB
8	Saka	FDA/FKKB	Peserta FKKB
9	Erman	PSDK/FKKB	Peserta FKKB
10	Wahyu	PSDK/FKKB	Peserta FKKB
11	Ali	Mantan Koordinator Tim 9 FKKB	Pegiat FKKB
12	Setiawan	FDA/FKKB (Koordinator Konsolidasi FKKB)	Pegiat FKKB

Catatan:

- FGD dilaksanakan di Baleendah pada tanggal 19 April 2012
- Pegiat adalah peserta FKKB yang menjadi 'pengurus' FKKB.

Lampiran 6: Hasil Pengolahan Data

Data dikelompokkan mengacu pada tiga pertanyaan penelitian di kolom (P), yaitu:

- (1) *Mengapa FKKB dibentuk dan mengambil peran sebagai aktor demokrasi, dan bagaimana strategi dan upaya FKKB dapat menjadi media bagi warga untuk meningkatkan demokratisasi di daerah?;*
- (2) *Bagaimana FKKB memposisikan aktor-aktor demokrasi yang terlibat, sekaligus memposisikan FKKB sebagai agen demokrasi?;*
- (3) *Model kelembagaan partisipasi politik seperti apa yang dikonstruksikan dan dipromosikan oleh FKKB?.*

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
1	Asep Warlan	L	Akademisi	Notulensi Workshop Credible Source, 3 Agustus 2010	Yang kita bahas dalam forum ini adalah aspek visi misi kandidatnya. Hal ini perlu didampingi oleh ahlinya, misalkan ahli kesehatan dan sebagainya. ... Seringkali kandidat membuat hal yang awang-awang... Jadi kita perlu mengkritisi bagaimana cara mewujudkan visi misi tersebut. Dengan pertanyaan tersebut maka kita dapat melihat manakah yang benar-benar mengerti mengenai visi misi mereka. Dana dari mana?, Siapa yang mengerjakan?, Dengan cara apa mewujudkannya?, Bagaimana jika itu gagal?, Apa yang akan dilakukan?.	Kontestan Pemilu/Pilkada	Visi dan misi kandidat.	1	Agenda politik; Kontrol politik.
2	Asep Warlan	L	Akademisi	Notulensi Workshop Credible Source, 3 Agustus 2010	Bagaimana peran masyarakat sipil dalam rangka meningkatkan kualitas Pilkada ini, agar berbeda dengan wilayah lain?. Supaya kita yakin kita tidak akan ditinggalkan dan tidak tertinggal. Yang pertama adalah membangun solidaritas diantara kita agar pengetahuan kita setara dengan para kandidat, dan agar kita tidak diadu-domba antar sesama pemilih. Yang kedua adalah pendampingan dari ahli bahwa janji-janji yang diucapkan oleh kandidat apakah sudah dipenuhi atau belum. Kemudian kita melakukan penekanan tertentu terhadap janji mereka. Ketiga kita harus memiliki database yang kuat atau informasi terhadap visi misi mereka, kita harus memiliki catatan yang baik agar data kita tuntut. Yang keempat adalah apa yang dilakukan jika tidak terpenuhi. Sehingga kita harus benar-benar mencatat, agar nantinya kita dapat menagihnya dengan yakin.	<i>Civil society</i>	Peran <i>civil society</i> dalam Pemilu/Pilkada.	1	Partisipasi politik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
3	Asep Warlan	L	Akademisi	Notulensi Workshop Credible Source, 3 Agustus 2010	... kalau nilai lokal yang ingin diusung, maka jangan sampai akan menimbulkan konflik seperti di daerah lain, kerusuhan, dsb. Maka itu kita harus memunculkan nilai lokal yang menunjukkan kesantunan, karena pada akhirnya, dengan cara kekerasan nanti malah akan mengorbankan masyarakat juga. Maka kita harus percaya dari sekian yang terburuk, masih ada yang akan kita bimbing dan awasi untuk jadi yang terbaik.	Kontestan Pemilu/Pilkada	Nilai lokal.	1	Budaya politik.
4	Dede Maryana	L	Akademisi	Notulensi Diskusi FK, 27 Juli 2010, Hotel Grand Pacific	Pada Kabupaten Bandung ini sudah tidak jelas apakah basis ideologi ini masih diperhatikan atau tidak. Terdapat kesan, yang penting jagoan saya menang... Mudah-mudahan forum ini dapat menekan perilaku-perilaku seperti itu.	FK	Tidak menonjolnya peran ideologi dalam Pemilu/ Pilkada.	1	<i>Political ideology.</i>
5	Dede Maryana	L	Akademisi	Notulensi Diskusi FK, 27 Juli 2010, Hotel Grand Pacific	Kemudian juga, terkait dengan isu-isu yang terdapat di Kabupaten Bandung, terdapat harapan agar forum ini bisa menggerakkan publik pemilih kandidat yang secara bertahap menyelesaikan problematika yang riil di daerahnya. Forum semacam ini harus dirintis sehingga ada sesuatu yang dapat memecahkan kebekuan-kebekuan demokrasi kita dengan terobosan seperti ini.	FK	Kebutuhan mendorong menjawab masalah riil di daerah dan terobosan dari kebekuan demokrasi.	1	Tujuan politik; <i>Frozen democracy.</i>
6	Tarum	L	FAB	Wwer, 28 Maret 2012	(Replikasi di Jabar) Kalau untuk Jawa Barat, kalau mau mempengaruhi satu Jawa Barat mungkin akan sulit juga ya... Tapi kalau mau efektif ya bisa di organ-organ yang ada di Bandung... misalnya LBH, WALHI, FDA, Inisiatif, serikat buruh, serikat tani... Ada banyak perwakilan dengan spesifikasi tertentu kan... Tapi kalau tulang-tulangnya kan gampang nih... relatif jaringan kita kan... Nanti tinggal yang lainnya kan tinggal tambah aja kan... Secara isu kan sudah terwakili itu... Kalau sekarang ini konvensi itu mulai diaktifkan oleh Bamus Jabar, BBC... Tapi mereka lebih bagaimana memilih calon... Merekomendasikan calon yang akan dipilih... Tapi dulu kita perdebatannya juga soal itu, apakah kita memberikan penilaian soal calon itu ataukah tidak...	<i>Civil society</i>	Gagasan repilkasi FK di tingkat Jawa Barat.	1	<i>Political network; Civil society organizations.</i>

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
7	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Banyak teman-teman yang aktif di FK sekarang itu berangkat dari inisiasi awal pembentukan Pusat Sumber Daya Komunitas atau PSDK yang difasilitasi oleh Yayasan Inisiatif pada sekitar tahun 2004-2005... yang konsern pada penguatan komunitas peduli Citarum, dengan mencermati anggaran daerah yang terkait dengan persoalan lingkungan hidup... selanjutnya ketika Inisiatif punya program pendampingan desa, teman-teman itu juga dilibatkan, dengan dukungan TIFA dan FORD, masuk ke isu perencanaan dan penganggaran, masuk ke persoalan kesehatan, pendidikan, dsb, yang selanjutnya menjadi Forum Demokrasi Anggota (FDA).	Civil society	NGO dan jaringan lokal yang menjadi peserta FK.	1	<i>Political network.</i>
8	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Ya lebih pada gimana mendesakkan agenda ini bisa menjadi bagian dari agenda calon, siapapun yang nanti terpilih. Disadari bahwa inikan akan menjadi alat tagih... bahwa ketika kita terlibat dalam advokasi RPJMD atau lainnya itu akan menjadi lebih nyambunglah...	Kontestan Pemilu/Pilkada	Hasil dialog dan kesepakatan dengan kandidat sebagai "alat tagih".	1	Kontrol politik.
9	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Menariknya dari FK ini ada sebuah proses diskusi yang panjang, yang diawali dengan assessment untuk menentukan isu-isu pokok yang ada di masyarakat termasuk kontak-kontak person yang potensial untuk diajak merumuskan isu-isu tersebut... Isu pokok tadi dibawa ke FGD, workshop pra pertemuan dengan calon-calon... Sempat ada kuesioner di awal itu, meski sebarannya kurang luas sih... Tapi itu jadi salah satu sumber merumuskan isu-isu pokok tadi...	FK	Kelebihan dari sisi persiapan warga untuk berdialog dengan politisi/kandidat.	1	Diskusi politik.
10	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Di event dapat mengundang calon dan sebagian besar hadir. Masyarakat yang hadir juga sudah relatif siap dengan pemahaman, pertanyaan, dan sebagainya. Dan secara politik ini sebetulnya akan bagus untuk advokasi selanjutnya. Tapi problemnya pada pengorganisasiannya berikutnya. Kita tidak fokus dalam mengelola FK ini.	FK	Kelebihan dari sisi penyelenggaraan, dan kekurangan dari sisi pengelolaan selanjutnya.	1	Dialog politik.
11	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Mestinya sekarang ini fasenya fase penataan Kabupaten Bandung nih... Membangun sinergi antar... kan ada banyak peralatan yang dibangun nih...soal Citarum, soal anggaran...	FK; jaringan <i>civil society</i> di Kabupaten Bandung	Banyak organisasi, lemah dalam sinergi dan pembagian peran.	1	Sinergitas <i>civil society</i> .

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
12	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Karena juga <i>sebenarnya</i> juga dalam kurikulum pendidikan teman-teman belum sampai pada bagaimana membangun gerakan yang lebih luas... selama ini kan berangkat dari kerja advokasi, yang parsial-parsial ya... Belum ada <i>training</i> politik... Sekarang <i>kadung</i> mulai bercabang kan, soal loyalitas, dll... Karena masing-masing ini kan sudah mulai punya jaringan baru dan sebagainya... Kalau di tingkat event ya keagalannya dalam memanfaatkan itu... memanfaatkan positioning FK setelah selesai dan Pilkada... Di <i>urang sorangan</i> masalahnya... Kita belum punya strategi bagaimana pengorganisasi sebuah daerah gitu ya... Belum jadi diskusi yang fokus soal itu... Ya soal politiknya... soal jaringannya...	FK; jaringan <i>civil society</i> di Kabupaten Bandung	Kekurangan dalam hal visi, strategi, kapasitas dan jaringan politik.	1	Visi, strategi, kapasitas dan jaringan politik.
13	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Sebetulnya ini hal yang menarik menurut gua, Can... bagaimana menempatkan satu wilayah kabupaten kota sebagai sebuah arena pengembangan gerakan yang relatif komplit, ada strateginya, ada pembagian kerjanya, dan sebagainya... Berpikir seperti sebuah partai tapi dalam lingkup kabupaten... <i>gank</i> politik lah...	FK; jaringan <i>civil society</i> di Kabupaten Bandung	Kekurangan dalam hal visi, strategi, kapasitas dan jaringan politik.	1	Visi, strategi, kapasitas dan jaringan politik.
14	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Tapi memang kalau problem pokoknya sih di skema pengorganisasian Kabupaten Bandung... rencana strategis gerakan dan advokasi...	FK	Kekurangan dalam hal visi, strategi, kapasitas dan jaringan politik.	1	Visi, strategi, kapasitas dan jaringan politik.
15	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Kalau bayangan gua memang perlu semacam training politik buat teman-teman... untuk merumuskan strategi tadi...	FK	Kebutuhan <i>capacity building</i> .	1	<i>Capacity building</i> (pendidikan politik)
16	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Secara jumlah untuk ukuran kabupaten memadai lah, dari sisi sebaran, asal organisasi... Peserta FK memang beragam... Di awal saat assesment melihat faktor sebaran berdasar wilayah, posisi Timur, Barat, Selatan, Tengah... Tapi untuk soal kualitas, pemahaman... ya untuk di kalangan pegiatnya relatif baiklah... mereka sudah banyak yang paham bagaimana pengorganisasi desa, perencanaan desa, penganggaran, analisis problem lingkungan, ya sudah bagus lah... Itu di tingkat tim intinya... Itu kan hal yang sudah biasa teman-teman lakukan.... Hanya di kapasitas politik yang mungkin masih lemah. Bagaimana menjadikan FK sebagai suatu alat advokasi... memainkan itu...	FK	Komposisi dan kualitas peserta FK.	1	Pluralis; Keterwakilan; Ketersebaran.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
17	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	FK idealnya dapat berperan sebagai <i>pressure</i> politik... Idealnya memang dilembagakan. Tapi kalau dari pengalaman selama ini hal itu justru menambah pekerjaan konsolidasi... Kalau melihat kondisi di Kabupaten Bandung ini kan sudah banyak forum... Yang belakangan ini muncul juga Syarekat Hijau yang isinya kurang lebih itu-itu juga... Sehingga kalau bayangan gua, ini akan relatif lebih simpel tapi juga bisa dipakai untuk <i>pressure</i> tadi. Kalau untuk kontak-kontak membangun jaringan kan sebetulnya sudah terbangun tuh, karena memang banyak kontak yang baru juga kan di FK itu, yang bisa diintensifkan...	FK	Peran FK sebagai <i>pressure groups</i> .	1	<i>Pressure group</i> .
18	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	(Manfaat) Itu membangun sebuah hal yang baru dalam konteks event politik pilkada, yaitu bagaimana mempertemukan dengan konstituen untuk bicara soal gagasan. Kemudian kalau itu dioptimalkan sebetulnya itu bisa jadi alat kontrol kemudian untuk masuk ke advokasi kebijakan yang lebih jauh. Kalau dari sisi teman-teman sendiri, ya tentunya teman-teman bisa dapat pengalaman dari event politik ini. Ini juga bisa jadi <i>entry</i> buat teman-teman di lapangan untuk melakukan advokasi berbasis politik juga kan... Kesimpulan teman-teman itu sekarang bahwa ngga mungkin nih advokasi tanpa pendekatan politis... karena selama ini selalu mentok lah... karena kalau bicara anggaran kan itu juga politis, gimana proses anggaran di eksekutif dan legislatif... Disisi lain juga memanggungkan orang... Tapi memang belum pernah ada evaluasi soal ini sih...	FK	Manfaat dan peran FK.	1	Konstituensi; Kontrol politik; <i>Policy advocacy</i> .
19	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	(Adopsi usulan/kritik FK oleh pemenang) Itu juga belum dikaji bener ya... Itu kan mestinya di visi-misi.. Kalaupun FK mau ada lagi, itu mestinya mempengaruhi visi-misi calon yang akan maju... Tapi ketika ini terselenggara kan mereka para calon sudah punya visi-misi nya...	FK	Pengaruh dan peran FK.	1	<i>Political programs</i> .
20	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Di awal sudah dipetakan pada saat assessment awal... Misalnya dulu ada jaringan PSDK yang lama tidak komunikasi maka coba di kontak dan diajak lagi... Meskipun kalau di event besar pertemuan dengan calon di Telkom itu sudah lebih terbuka, ada ormas, serikat buruh, dll. Kalau dengan pihak lain belum ofensiflah pengembangan jaringannya... tetep masih FAB...	FAB; FK	Jaringan FK.	1	Inklusifitas; <i>Networking</i> .

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
21	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Pada dasarnya dirancang... tapi problem pendanaan dari TIFA itu terlambat, sehingga susah membuat komitmen dengan pihak lain. Karena waktu mepet dengan pelaksanaan Pilkada, semua kegiatan jadi di <i>push</i> waktu itu... Lain perkara kalau FK ini bisa dibuat murni dari masyarakat... Itu mungkin sebetulnya... Untuk event-event pasti butuh logistik, untuk makan, tempat, dan lainnya, standarlah... dan itu bisa kalau konsolidasinya sudah terbangun <i>gua</i> kira...	FAB; FK;TIFA	Minimnya peran media massa dalam kampanye gagasan dan kegiatan FK. Kebutuhan logistik.	1	<i>Support system</i> ; Konsolidasi.
22	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Ada harapan teman-teman Kabupaten Bandung dapat terlibat dalam dinamika Provinsi Jabar. Kelebihannya kan faktor jarak, dekat gitu... dari sisi mobilisasi massa juga lebih dekat... Untuk memperkuat kekuatan mereka di Kabupaten menjadi penting untuk mereka punya pengalaman di tingkat yang lebih tinggi kan... Contohnya SHI Jabar, WALHI Jabar, itu teman-teman Kabupaten Bandung sudah mulai masuk juga... Cuma memang belum sistematis bagaimana aktivitas dan rekrutmen, juga pusat pendidikan dan pelatihannya...	FK; jaringan <i>civil society</i> di Jawa Barat.	Harapan untuk berkiprah di level provinsi.	1	Perluasan peran politik; Arena politik; <i>Networking</i> ; <i>Capacity building</i> .
23	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Nggak lama pasca Pilkada FK juga diundang oleh Wabup terpilih dalam pertemuan... Tapi itu difasilitasi sama Yayasan Inisiatif ya... Ada juga pertemuan informal dengan Bupati waktu itu di rumah makan... FK juga ikut... <i>Dateng</i> Bupati waktu itu... Tapi sebetulnya itu lebih terkait dengan isu Chevron ya, dan Bupati merasa perlu ketemu WALHI yang diidentifikasi menentang Chevron... Jadi Bupati ngundang WALHI dan jaringan teman-teman di Kabupaten... Sekitar 3-4 kali pertemuanlah dengan Pemda itu... Terakhir di Musrenbang RKPD bulan Maret 2012 ini FK juga masih diundang... Pernah ketemu di rumah dinas Bupati itu dua kali waktu itu, pertemuan informal...	FK; Wakil Bupati; Pemerintah daerah.	Pemerintah daerah cenderung masih memperhitungkan FK, dengan diundangnya FK dalam beberapa kegiatan perencanaan daerah. Pertemuan informal juga beberapa kali berlangsung.	1	Dialog politik; Komunikasi formal dan informal; Interaksi dan interelasi negara dengan <i>civil society</i> .
24	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Pertemuan-pertemuannya memang lebih bersifat dialog atau diskusi... Kalau terkait pengambilan keputusan mungkin ya Musrenbang itu ya... Meskipun sudah ada draft ya...	FK; Bupati	Keterlibatan FK dalam kegiatan diskusi, dialog dan pengambilan keputusan di daerah.	1	Diskusi, dialog dan pengambilan keputusan.
25	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Kalau di awal ada training atau pengarahannya, untuk surveyor itu...assessment permasalahan itu... Hal lainnya belum ada lagi...Kapasitas lain misalnya mengenai analisis anggaran, berinteraksi dengan Pemda, dan lainnya relatif sudah ada di teman-teman, tapi melalui pintu pelatihan pihak lain, bukan dalam konteks FK...	FK	<i>Capacity building</i> .	1	<i>Capacity building</i> (pendidikan politik)
26	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Sempat bikin tabloid sekali, dan itu menjelang pemilihan... Isinya tentang isu-isu pokok dan profil para calon... Hubungan dengan media, paling ngundang wartawan aja ya...	FK	Pemanfaatan media.	1	Media kampanye/ sosialisasi

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
27	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	(Gagasan untuk FK ke depan) Kalau di PSDK, Ali, soal itu ada... FK tetap dipandang sebagai hal yang strategis... Cuma ya itu tadi masalah resource... Memang belum didiskusikan secara matang tentang bagaimana hal itu memungkinkan untuk dapat dilakukan tanpa menunggu resource dari pihak lain... Soal menjaga bendera FK tetap ada itu masih terus dilakukan...	FK	FK dipandang strategis dan perlu dipertahankan. Kendala utama adalah keterbatasan logistik.	1	Strategi dan taktik politik; Kemandirian; Ketergantungan.
28	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	(Situasi diskusi di FK) Dinamis... karena mereka sudah biasa <i>ngawangkong</i> ya... Adalah debat macam gitu...	FK	Budaya diskusi dan dialog di FK.	1	Debat.
29	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	(Pengaruh FK) Ya kalau kelompok ini memang sudah diperbincangkan... <i>gank</i> ... gerombolan lah.... Tapi kalau FK kan memang jarang muncul ya... Kalaupun diundang dalam Musrenbang kemarin, jangan-jangan mungkin karena memang ada catatan sebelumnya di mereka bahwa ada "lembaga" itu, bahwa pernah ngundang Wakil Bupati.... Itu pemikiran pesimisnya ya... Sehingga FK ada dalam list organisasi masyarakat sipil Kabupaten Bandung, mungkin begitu... Meskipun teman-teman itu selang beberapa hari sebelum Musrenbang itu baru saja aksi soal pengadaan mobil dinas Pemkab... FDA, bukan FK... Tapi kan mereka pasti tahu lah bahwa itu dari kelompok yang sama... Tapi di Musrenbang itu FDA masih diundang juga. Artinya <i>pressure</i> lewat demo tadi tidak membuat FDA di <i>black-list</i> atau gimana...	FK	FK tetap diundang dalam Musrenbang 2012 meskipun FDA beberapa waktu sebelumnya demonstrasi soal pengadaan mobil dinas.	1	<i>Civil society</i> ; Pengaruh politik; Protes/demonstrasi; Kelompok politik; <i>Political pressure</i> .
30	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	(Keunikan FK) Pada kapasitas para pegiatnya dalam merumuskan masalah ketatapemerintahan... ketika merumuskan isu-isu mereka sudah punya konten, sehingga bisa nyambung... Upaya di advokasi kebijakan itu melengkapi politiknya, dia memberi modal politik bagi kerja advokasi kebijakan selanjutnya.	FK	Kapasitas pegiat FK dalam advokasi kebijakan.	1	Advokasi kebijakan; Advokasi politik; Modal politik.
31	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Peluangnya besar, karena memang selama ini instrumen demokrasi yang ada memang tidak memberikan ruang yang memadai antara orang yang memberi mandat dengan orang yang diberi mandat, kecuali pada saat Pemilu saja... Padahal di tengah itu (Cat: diantara Pemilu) ada banyak kebutuhan untuk partisipasi masyarakat... menagih janji di awal... Sehingga kalau di tingkat masyarakat ini jadi suatu kebutuhan. Tinggal soal <i>focusing</i> , bahwa ini di <i>manage</i> serius atau tidak... Disitu problemnya...	FK	Peluang eksistensi FK ke depan.	1	Instrumen/ infrastruktur demokrasi; Mandat politik; Partisipasi politik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
32	Oky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	Termasuk misalnya waktu pendekatan ke calon Bupati kan... Jadi ada dua perhatian utama kalau dari aku tuh... Pertama, bagaimana meyakinkan para calon Bupati untuk mau hadir... Kedua, bagaimana kita meyakinkan para tokoh mau berpartisipasi... Nah dua titik berat itu sebenarnya yang paling rentan... Kita sebenarnya kalau dalam rangka meyakinkan calon Bupati, kita melakukan berbagai cara, salah satunya kita melakukan pertemuan di Hotel Grand Pacific itu, disitu seluruh calon Bupati dan Wakil Bupati kita undang, termasuk KPU Jabar... termasuk wartawan... Di forum itu juga kita undang pakar... intinya adalah untuk meyakinkan si calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir, bahwa KPU Jabar hadir, dan para professor hadir gitu ya... Pakarnya itu Budi Radjab, Dede Maryana...	FK; Kontestan Pilkada; Akademisi; KPUD.	Titik kritis: (a) meyakinkan para calon agar mau hadir dalam dialog dengan konstituen; (b) meyakinkan para <i>credible sources</i> mau berpartisipasi.	1	<i>Political trust.</i>
33	Oky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	(Faktor yang paling dominan mempengaruhi bisa terjadinya forum ini? Diluar logistik?) Visi menurut aku... visi terhadap kegiatan... Pengalaman kemarin, kita harus punya imajinasi, dan itu ngga ada teorinya, jadi kita harus mereka-reka... Jadi ginilah, acara puncaknya adalah dialog tokoh sebanyak 200 orang dengan calon Bupati dan Wakil Bupati... kira-kira begitulah imajinasinya... Nah kita harus berpikir, misalnya untuk menuju dialog yang bagus, berkualitas, dan sehat begitu kan, prasyarat-prasyaratnya apa... Apa kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita sukai atau kita anggap dapat mengganggu...	FAB; FK; Kontestan Pilkada 2010.	FK dilaksanakan tanpa rujukan, lebih dipandu oleh visi dan imajinasi.	1	<i>Political meeting; Dialog politik.</i>
34	Oky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	Begitu juga terhadap para tokoh... okelah dialog... tapi kalau <i>ujug-ujug</i> kita undang 200 orang itu kan mereka bisa bingung juga... artinya perlu ada forumnya... ada pembekalan, diskusi awal, dan sebagainya...	FAB; FK	Pengkondisian <i>credible source</i> sebelum dialog dengan kandidat.	1	Pembekalan politik.
35	Oky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	Termasuk kita harus berimajinasi, apa yang membuat si calon Bupati ini mau datang... Nah, kalau dalam konteks politik apakah ini <i>sexy</i> ?... bisa mendulang suara?... Nah kita sebagai penyelenggaraan harus bisa meyakinkan bahwa acara ini <i>sexy</i> , ini bisa mendulang suara, karena pesertanya ini tokoh...	Kontestan Pemilu/Pilkada	Pengkondisian kandidat agar mau hadir dalam dialog dengan konstituen.	1	Lobby politik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
36	Oky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	Nah itu juga alasan kita memilih tempat... dari awal kita memilih kampus... Unpad tidak dipilih misalnya, karena itukan Kota Bandung, sementara kegiatan ini di Kabupaten Bandung... Kalau di Kota Bandung, meskipun akses kita mungkin lebih mudah, khawatir nanti pertanyaan orang... Nah itu terbukti jadi persoalan dari para tokoh... Tokoh ini tidak menyimak... Pada saat pertemuan para tokoh sebelum acara puncak itu dia protes, " <i>Pilkada inikan di Kabupaten Bandung, kenapa acara dialog dengan calon di Kota Bandung...?</i> ". Ya lalu kita bilang, " <i>Coba tolong dilihat lagi Pak di brosur dan undangan... itu acaranya nanti di Telkom, di Baleendah...</i> ". Kata dia, " <i>Oh iya ya, maaf, saya kurang perhatikan...</i> ". Nah jadi itu imajinasi, kita sudahantisipasi... Kenapa kampus? Karena itu posisinya netral gitu ya...	FK; Kampus.	Lokasi kegiatan di Kabupaten Bandung, dan dilaksanakan di kampus karena dinilai netral.	1	Lokasi dialog.
37	Oky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	(Konsep awalnya apakah sudah dibayangkan jadi kegiatan panjang?)Tidak... jadi sebenarnya bahkan sampai ke proposal yang kita ajukan ke TIFA, Forum Konstituen itu kita lakukan dua kali... Itu <i>gua</i> ubah di tengah jalan... Setelah acara di Telkom, itu secara psikologis sudah puncaknya, karena setelah itu Pilkada... kan waktunya <i>mepet</i> ... Menjelang Pilkada Putaran Kedua, kupikir mending energi kita arahkan untuk membuat <i>bridging</i> agar kelembagaan ini bisa terus gitu... Kita harus fasilitasi itu... Karena, pertama, kawan di Kabupaten Bandung itu di tengah jalan juga ngomong... " <i>Iya ini bagus untuk ngontrol pemerintahan ke depan...</i> ". Jadi ini memang orientasinya sudah ke depan, bukan sekedar proyek degan TIFA ini kita sukseskan... Jadi secara substansi para pegiat di Kabupaten Bandung itu melihat ini untuk memantau kinerja Bupati ke depan... Indikatornya misalnya lewat RPJMD-lah secara umumnya... " <i>Oh iya setuju</i> " kubilang... Bagi aku ini juga bukan program untuk program, tapi harus substantif... Nah itu yang kemudian aku buat istilah kalau di teman-teman itu FK II... disinilah kita bikin <i>bridging</i> itu...	FK; TIFA.	Perubahan desain FK dari <i>event</i> menjadi "lembaga".	1	Institusionalisasi.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
38	Okky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	Jadi itu adalah respon kita atas perkembangan di lapangan... Setelah Telkom, sebetulnya kita masih ada tanggungjawab bikin FK satu lagi untuk debat para calon itu... Tapi kupikir karena sudah masuk kampanyenya di KPUD, daripada bikin dialog dengan calon sekali lagi seperti di Telkom itu, lebih baik dan bermanfaat untuk membuat <i>bridging</i> kelanjutan FK ini... Karena suasana politiknya di Pilkada Putaran Dua itu kan juga sudah beda, ketika tinggal dua pasangan kandidat... Mereka, para pasangan itu, juga udah <i>pengen</i> yang konkret-konkret aja kan... Setidaknya bayangan aku begitulah kalau aku jadi dua kandidat ini... sudah bukan lagi diskusi gitu... Tapi memang tidak diajari juga sih	FK; TIFA.	Perubahan desain FK dari <i>event</i> menjadi "lembaga".	1	Perluasan atau perpanjangan partisipasi politik; Institusionalisasi.
39	Okky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	(Media lain selain tabloid?) Media massa memang tidak tergarap benar... Kita garap tapi dengan standar gitu... wartawan kita undang kalau ada acara, dan sebagainya... Sempat kepikiran untuk menggunakan TV dan radio, tapi kalau energinya kurang ya susah juga ya... Sempat juga ada gagasan kawan-kawan di kabupaten untuk pakai radio komunitas, tapi ngga tergarap juga...	FK; Media.	Media kurang tergarap.	1	Media kampanye/ sosialisasi
40	Okky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	(Ada kesan mereka menunggu FAB?) <i>Nggak</i> juga ya... misalnya ketika mereka menghadapi Musrenbang itu... dalam arti bukan 200 orang, tapi tim kecilnya adalah... mereka kumpul membahas itu... Kadang di PSDK, kadang di tempat salah satu tokoh... Jadi waktu Tim 11 itu mereka sudah sempat <i>roadshow</i> , Can... Hari ini di tempat si A, berikutnya di si B... begitu... Mereka memang tidak punya tempat... Sebetulnya, yang kukira masih dalam taraf wajar ya, mereka mengharap logistik, dalam konteks dengan TIFA ini... itu yang aku tangkap... Sebenarnya ini yang agak... beberapa bulan ini aku masih komunikasi juga kan ya... Setelah pertemuan FK II itu sudah tidak ada lagi pertemuan besar... karena dana dari TIFA sudah habis dan belum ada dukungan lagi ya...	FK; TIFA.	Kendala logistik dalam pengorganisasian FK.	1	Sumberdaya (logistik).
41	Okky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	Tapi diluar soal itu, kalau ini bisa jalan terus, kita sudah sempat ngobrol, FAB, Tim 9 FK dan TIFA, ada banyak kesamaan bahwa ini jangka panjang, bisa berperan mengontrol Bupati, itu sama... Tapi memang belum ada pembahasan secara mendalam tentang bagaimana itu dilakukan... Nah jadi pertemuan-pertemuan itu masih umum saja... Pernah juga pertemuan di FAB dengan teman-teman Tim FK itu waktu mau bikin proposal ke TIFA... tapi diskusinya juga masih global ya...	FK; TIFA.	Peran FK dan gagasan mencari dukungan logistik dari pihak lain.	1	Misi; Strategi.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
42	Okky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	(Posisi DPRD?) Itu belum sempat dielaborasi, meskipun dalam FK II sempat muncul lontaran keinginan, “ <i>Membangun kapasitas anggota Dewan...</i> ”, gitu... Tapi ada yang menanggapi, “ <i>Wah..., pemerintah aja satu hal, legislatif juga satu hal...</i> ”. Ya akhirnya nggak jadi... Tapi kenapa muncul itu, mungkin karena mereka sudah punya <i>link-link</i> gitu... Tapi yang aku tangkap kemudian pasca FK II itu, legislatif itu tidak jadi perhatian... Kalaupun nantinya bareng ya mungkin nanti sebagai <i>partner</i> misalnya untuk menggedor pemerintah atau apa... Tapi konkretnya gimana, belum dibicarakan tuntas...	FK; DPRD.	DPRD belum menjadi target. Kemungkinan menempatkan DPRD sebagai partner mengontrol pemerintah.	1	Kolaborasi.
43	Okky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	(Mungkinkah karena awalnya memang lebih terkait dengan Pilkada?) Itu betul... Tapi di pasca Pilkada itukan masih <i>running</i> nih... Di tingkat aku pribadi kenapa nggak ambil itu, karena gini, kita fokus ke pemerintah, kita kontrol, yang jika dalam prosesnya kita gandengan tangan dengan DPRD, ya nggak masalah... Tapi jangan diprogramkan, nanti jadi beban... Karena jadi muncul dua variabel tuh... Meskipun variabel yang keduanya adalah untuk bareng-bareng gitu ya...	FK; DPRD.	DPRD belum menjadi target. Kemungkinan menempatkan DPRD sebagai partner mengontrol pemerintah.	1	Kolaborasi.
44	Okky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	Kalau bayangan aku pribadi, FK ini akan berpolitik... itu maksudku soal <i>grey area</i> tadi... jadi soal visi, tujuan, moral segala macam harus <i>clear</i> ... Nah berikutnya harus elegan... Berpolitik dalam arti dia harus berhubungan dengan <i>stakeholders</i> di kabupaten, termasuk DPRD, termasuk bahkan kepolisian dan ormas-ormas lain... Dia harus melakukan itu... jadi kalau FK ini panjang bayangannya dia akan bersentuhan dengan DPRD juga. Tentu saja yang akan kita pake kepentingan FK gitu kan... apakah itu kolaboratif atau konfrontatif...	FK; Pemerintah daerah; DPRD.	FK berpolitik, dengan strategi kolaboratif atau konfrontatif.	1	Stakeholders; Kolaborasi; Konfrontasi.
45	Okky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	(FK di Pilbup, Pilgub, Pileg?) Aku tuh ngomong waktu pertemuan ada Radhar dan Hariyadi itu... Tujuannya sih untuk meningkatkan <i>confident</i> kawan-kawan saja... “Jadi nanti Pilbub 2013, yang bikin dialog dengan calon sudah bukan kita lagi... tapi mereka yang datang ke kantor FK...”. Tapi ya ada juga, seperti dari Tarum dan aku mendukung ya, misalnya pemikiran bahwa ini penting, dan ini juga dapat <i>men-support</i> teman-teman yang mau jadi kepala desa misalnya... Bahkan kalau nanti ada dari pegiat FK yang mau jadi caleg atau apa gitu... Nah kalau untuk kepala desa, mereka sudah punya proyeksi si Derry itu, tahun 2012... Mereka mau dorong jadi kepala desa...	FK.	FK dapat juga berperan mendukung jaringannya yang maju ke arena politik.	1	Jabatan publik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
46	Okky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	Yang aku cermati di koran-koran juga ngga ada tuh yang memberitakan calon A jelek atau gimana... Program ini secara keseluruhan memang menampilkan dirinya katakanlah independen... baik ke tokoh, para calon, maupun koran ya... Ngga tersiar kabarlal bahwa FK mendukung satu calon tertentu misalnya... Atau misalnya para tokoh-tokoh itu pada proses-proses berikutnya memperotes FAB karena tidak netral, misalnya...	FK.	Citra independensi dan netralitas FK dan FAB di publik cukup terjaga.	1	Independensi; Netralitas.
47	Okky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	Nah waktu H-1 sebelum Telkom itu aku juga tekankan ke para tokoh, bahwa kita harus jaga itikad besok... Jadi meskipun bapak dan ibu sudah menentukan pilihan si A, sudah punya jagonya, tapi besok harus menghormati ketika ada kandidat lain yang muncul, tidak boleh <i>nyorakin</i> ... Hu... Nah yang seperti itu aku tekankan, meskipun sudah ada di tata tertib kan...	FK.	Tata tertib dalam dialog dengan kandidat.	1	Etika politik.
48	Okky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	(Memang tidak di setting untuk kontrak politik?) Oh itu memang agak kencang waktu H-1 itu, waktu konsolidasi 200 orang itu... Dari kawan kita juga... (teriak), " <i>Kontrak politik...!</i> ". Kan Eko yang fasilitasi gitu kan. Eko bilang, " <i>Oh nggak, kita nggak ada kontrak politik... dimanamana kontrak politik juga sama aja nggak jalan</i> ". Jadi memang kemudian kita nggak bikin kontrak politik...	FK.	Dalam dialog dengan kandidat memang tidak di setting untuk membuat kontrak politik.	1	Kontrak politik; Konsensus.
49	Okky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	Sempet juga muncul hal lain waktu konsolidasi 200 orang itu, " <i>Kita ngomongnya mesti gimana nih... kita nggak mau diatur-atur cara ngomongnya...</i> ". Kubilang, " <i>Oh nggak... Bapak, Ibu, Akang, Teteh semua itu bebas mengekspresikan gaya bahasanya seperti apa... Mau gaya aktivis atau lainnya silakan... bebas, asal sopan, tidak menyinggung SARA...</i> ". Tepuk tangan mereka semua... seneng... ha...ha....	FK.	Ekspresi atau gaya penyampaian pendapat dari konstituen kepada kandidat.	1	Komunikasi politik; Bahasa dan simbol.
50	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	Jadi suatu Pemilu yang baik itu kan, pertama, dia punya sistem yang baik, yaitu sistem yang obyektif... Siapa yang dipilih oleh rakyat, itulah yang diangkat... Yang kedua, punya panitia yang baik, yang jujur, adil... Yang ketiga, pesertanya itu baik, yaitu partai yang baik... partai yang mempunyai prosedur-prosedur yang baik untuk memilih bakal calon. Dan yang terakhir adalah pemilih yang baik, yaitu pemilih yang bertanggungjawab... pemilih yang tidak asal memilih. Nah kontrasnya itu adalah antara pemilih yang bertanggungjawab dengan pemilih yang tidak bertanggungjawab, atau pemilih yang asal-asalan.	FK.	Adanya <i>responsible voter</i> sebagai syarat bagi Pemilu yang baik.	1	<i>Fair and legitimate elections.</i>

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
51	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	Nah Forum Konstituen itu berada disitu, mencoba menaikkan gradasi tanggung jawab dan kesadaran pemilih itu... jadi tidak hanya sekedar menonton... apalagi tidak menonton sama sekali, tidak peduli sama sekali... tapi dia lebih aktif. Nah itulah yang kita sebut sebagai Forum Konstituen, yaitu suatu forum, suatu organisasi, yang didalamnya itu ada anggota-anggota yang secara aktif menyeleksi kandidat-kandidat dalam pemilu. Ya mereka menentukan kriteria, mereka menyelenggarakan pertemuan dengan para kandidat,...	FK.	FK adalah organisasi para <i>responsible voters</i> di Kabupaten Bandung.	1	Forum Konstituen.
52	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	(Jadi memang di set khusus untuk Pilkada?) Ya memang karena Pilkada itu lebih <i>manageable</i> untuk Forum Konstituen. Calonnya ngga banyak... sehingga mereka bisa lebih efisien memilih itu. Berbeda dengan Pileg, orangnya bisa ratusan... Saya kira kurang cocoklah buat Forum Konstituen.	FK.	Model FK dipandang paling cocok untuk Pilkada.	1	Forum Konstituen.
53	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	(Jadi pada saat calon sudah ada, bukan pada saat partai memilih calon ya?) Jadi memang begitu. Karena memang prosesnya... proses pemilihan bakal calon itu kan di partai. Sedangkan keterlibatan pemilih itu adalah ketika proses bakal calon sudah selesai. Jadi kita nggak dorong ke depan, karena kalau ke depan itu sudah lain, itu sudah tindak politik... mempromosikan bakal calon atau mempengaruhi partai... saya kira itu sudah tindak politik, jadi bukan konstituen lagi... Kalau konstituen itu masuk ketika sudah ada calon... Konstituen kita makna sebagai pemilih...	FK.	FK memang "main" ketika sudah ada calon/kandidat.	1	Constituency; Tindak politik (<i>political action</i>).
54	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	Ya kita ngga bisa langsung, karena itukan melibatkan banyak orang. Yang kita pilih tadi ya tokoh-tokoh... yang kredibel sebagai sumber informasi, sehingga masyarakat percaya apa mereka sampaikan itu adalah informasi yang benar, tepat... nah itu yang kita pilih. Tapi di dalam prakteknya itu saya nggak tahu seberapa efektif, karena kita memang tidak mengukur ya... Tapi kalau kenyataan di lapangan memang, di daerah dimana kita memiliki <i>credible source</i> , itu perolehan suara dari kandidat yang kita unggulkan itu bagus...	FK; <i>Credible source</i> ; Kontestan Pilkada.	Di daerah dimana ada <i>credible source</i> , kandidat yang "diunggulkan" memperoleh suara signifikan.	1	<i>Credible source</i> .

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
55	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	(Jadi sejak awal sudah ada kandidat yang didorong?) Tidak ada, tapi dari proses saja... Prosesnya itu, kita bikin <i>political meeting</i> ... kita ajak mereka presentasi... ada beberapa event itu... ada 2 seminar, dan terakhir ada Forum Konstituen. Pertama itu seminar-seminar kecil yang melibatkan para penggagas dan pengurusnya. Lalu setelah itu mereka kita tampilkan di dalam event yang namanya Forum Konstituen. Disana itu mereka ya berpidatolah, menyampaikan gagasan... ada dialog, ada interaksi ya disana. Nah setelah interaksi itu, baru Forum Konstituen itu diunggulkan dari sana. Kemudian setelah itu mereka mengkampanyekan unggulannya itu. Ada beberapa peralatan yang digunakan waktu itu. Ada bulletin atau tabloid yang kita bikin. Lalu juga ada kampanye <i>mouth to mouth</i> menyampaikan kepada publik dari forum ini...	FK; <i>Credibile source</i> ; Kontestan Pilkada.	Kandidat yang "diunggulkan" muncul dari proses FK.	1	<i>Political meeting</i> ; Dialog politik; Kampanye politik.
56	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	(Setting organisasi?) Kalau pada dasarnya sih Forum Konstituen itu selesai ketika Pemilu berakhir. Jadi <i>mission</i> dari Forum Konstituen yang mengajak pemilih itu <i>responsible</i> dengan pilihannya itu, kita nyatakan selesai ketika Pemilu berakhir... Artinya mereka sudah melakukan pemilihan secara bertanggungjawab. Nah, cuma dalam perkembangannya kemudian ada perkembangan baru, karena si Bupati kemudian menghubungi mereka lagi mengajak untuk membantu menjalankan pemerintahan mengawal program-program yang sudah dicanangkan sebelumnya. Nah ini kemudian teman-teman disana itu berinisiatif ya... Saya waktu itu tidak mempermasalahkan apakah mau pakai nama Forum Konstituen atau bikin institusi baru gitu ya, buat saya sama sajalah... Karena satu kegiatan yang berhasil itu sudah pasti memiliki efek <i>extention</i> ya... Jadi saya kira itu hal yang baik pula, para simpul ini menjadi harus semacam mempertanggungjawabkan <i>campaign</i> mereka juga... Mereka konstituen gitu ya, ketika sudah menang bagaimana ini? Semangat penagihan dari bawah itu. Maka lumrah kalau para simpul ini terlibat juga dalam kebijakan pemerintah daerah.	FK.	Desain FK di awal memang sebagai event, namun kemudian ada kebutuhan dan gagasan untuk menjadikannya sebagai sebuah forum yang tetap. FAB tidak mempermasalahkan penggunaan nama FK oleh para pegiat di Kabupaten Bandung.	1	Arena politik (<i>pasca alection</i>); Kolaborasi.
57	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	Yang lumayan berhasil itukan sebetulnya proses pelatihan, yang dilakukan untuk membangun kesadaran ini... Jadi pelatihan yang pertama itu pelatihan tentang apa itu Pemilu, bagaimana sistemnya... Lalu yang kedua bagaimana mengevaluasi kandidat... Yang ketiga itu bagaimana mengorganisasi Forum Konstituen itu...	FK.	Upaya <i>capacity building</i> dipandang berhasil; Proses evaluasi dan refleksi akhir dipandang kurang.	1	<i>Capacity building</i> ; Kesadaran politik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
58	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	(Proses, diskusi, debat terbangun nggak?) Iya, intens itu... <i>rame</i> ... Mangkanya kita bantu mereka dengan pakar kan... Jadi dalam penyusunan itu ada pakar... Asep Warlan, Dede Maryana... Waktu di Telkom itu interaksinya cukup intens ya... Jadi sampai kandidatnya itu turun langsung mendekati peserta untuk coba meyakinkan... jadi memang kita biarkan interaksinya itu natural... Jadi bukan pertanyaan lalu dikumpulkan untuk dijawab... Tapi kita biarkan ada <i>contra argument</i> ... Memang tidak antar calon, tapi calon dengan peserta...	FK; Akademisi; Kontestan Pilkada.	Proses diskusi dan dialog yang dinamis baik di dalam FK maupun dengan kandidat.	1	Dialog akademisi, politisi dan warga.
59	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	Pertemuan yang besar memang cuma sekali di Telkom... Tapi mereka sudah bertemu di seminar-seminar kecil sebelumnya ya... Idealnya sih mungkin dua kali ya... satu presentasi individual, dan satu lagi debat antar calon... ada forum debat gitu...	FK.	Konsep idealnya ada dua kali dialog, yaitu presentasi individu dan debat antar kandidat.	1	Debat publik.
60	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	(Teradopsi aspirasi Forum Konstituen pada pemenang Pilkada?) Oh iya... buktinya yang saya dengar ya, mereka diundang, dan sudah keluar masuk kantor Bupati, Wakil Bupati... Jadi banyak agenda-agenda yang nyambung ya...	FK.	Aspirasi dari FK teradopsi oleh pemerintah pemenang Pilkada. Interaksi FK dengan Bupati/Wakil Bupati terjalin cukup intens.	1	Pengaruh.
61	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Menariknya, ini terkait dengan partisipasi politik... kita tidak hanya terlibat dalam proses pemilihan tapi kita juga mendorong gagasan-gagasan masyarakat ke calon-calon atau kandidat. Kedua, kita menyebarluaskan janji-janji kandidat, dan itu yang akan kita kawal, siapapun Bupati yang terpilih...	FK; Kontestan Pilkada; Pemenang Pilkada.	Partisipasi politik dan ruang untuk saling dialog dan mempengaruhi antara kandidat dengan konstituen. Serta mengawal janji kampanye pemenang Pilkada.	1	Partisipasi politik pra dan pasca Pemilu.
62	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Sebelum RPJMD itu, ketika pasangan Dadang Naser dan Deden Rumaji dilantik, ya sekitar 5 hari kemudian dari pelantikan, kita coba ngetes ya, masih inget nggak mereka... Dulu kan sebelum Pilkada mereka pernah kita undang semua kandidat, mereka disitu memberikan pemaparan visi misinya, setelah Pilkada ya kita tagih komitmennya, bagaimana mereka merealisasikan janji-janji kampanyenya, komitmen bahwa mereka akan melibatkan publik dalam pengambilan keputusan penting di daerah...	Bupati/Wakil Bupati.	<i>Test case</i> pasca pelantikan Bupati/Wakil Bupati terpilih.	1	Komitmen politik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
63	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Persiapan kita kan juga panjang. Sering diskusi teman-teman FK, kira-kira apa yang akan kita dorong disana... Misalnya ada teman-teman dari petani untuk mendorong isu-isu reforma agraria... Kesehatan, bagaimana implementasi Jamkesmas... Disana terjadi diskusi, yang bagi saya waktu itu terjadi diskusi yang cukup tajam gitu ya... Ada <i>sharring</i> , ada kritik, dan sebagainya...	Bupati/Wakil Bupati; Bapeda.	FK mempersiapkan diri untuk dialog tentang RPJMD. Proses dialog berlangsung dinamis.	1	Diskusi warga.
64	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Kalau di kebijakan reforma agraria itu masuk. Kemarin itu di Kecamatan Cipelah itu ada program itu... Redistribusi lahan yang selama ini sudah dikuasai oleh masyarakat, oleh BPN dilegalkan dan juga Pemda mendorong program akses reformnya, seperti program ketahanan pangan, dan koperasinya juga masuk disitu... Terus soal kebencanaan, sekarang ini relatif teman-temanlah yang punya banyak gagasan dan masuk tim kebencanaan ini. Kita sekarang sedang menyusun Ranperda Kebencanaan, juga Rencana Pengurangan Resiko Bencana. Kita <i>leading</i> disitu. Tim gabungan sama BPBD...	Pemerintah daerah; BPN; BPBD.	Gagasan mengenai reforma agraria ada yang diadopsi pemerintah daerah. Juga terlibat dalam Ranperda Kebencanaan.	1	Partisipasi politik.
65	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Belum kita cek juga ya di RPJMD itu, apakah ada usulan-usulan kita yang masuk atau tidak... Tapi ada beberapa yang sama juga sebetulnya, soal program Jaminan Kesehatan, konsep pertanian terpadu juga klop dengan konsepnya Bupati...	Pemerintah daerah.	FK belum memeriksa efektifitas hasil dialog dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah.	1	Pengaruh/efek partisipasi.
66	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Kan kalau dalam konsep tata kelola pemerintahan itu kan ada kebutuhan akan partisipasi masyarakat yang kuat ya. Inilah yang paling penting ingin kita dorong. Pertama, pentingnya konsolidasi menjelang Pilkada itu. Kita ingin membangun sebuah kekuatan masyarakat sipil yang punya daya tawar politik yang kuat. Salah satunya lewat konsolidasi massa, dan konsolidasi gagasan... Jadi kita bukan hanya hadir di sebuah forum dimana disitu ada banyak orang, tapi juga kita bisa hadir dengan nilai dan gagasan-gagasan dari masyarakat yang akan mempengaruhi kebijakan daerah.	<i>Civil society</i> ; Pemerintah daerah.	Keinginan untuk berpartisipasi melalui upaya membangun konsolidasi <i>civil society</i> dan gagasan sehingga memiliki daya tawar yang tinggi dalam mempengaruhi kebijakan.	1	Bargaining politic; Civil society; Konsolidasi massa; Formulasi gagasan; Nilai-nilai masyarakat; Advokasi kebijakan.
67	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Kedua, terkait dengan pendidikan politik sebenarnya, yang selama ini sarat dengan <i>money politics</i> , dan selesai hanya sampai dengan bilik suara saja... nah kita sebenarnya ingin mendorong sejauh itu. Melakukan penyadaran ke publik bahwa partisipasi mereka tidak berhenti sampai disitu.	Publik.	Keinginan dapat melakukan pendidikan politik kepada publik.	1	Pendidikan politik; <i>Money politics</i> ; Partisipasi politik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
68	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Yang lebih penting adalah bagaimana mengawal janji-janji kandidat, termasuk juga terlibat jauh dalam proses pengambilan keputusan. Untuk sampai kesana kan pertama ya tadi, prasyarat konsolidasi masyarakatnya harus kuat. Gagasannya memang "cantik" ya, dalam arti bukan hanya sekedar omong kosong.	Kontestan Pemilu/Pilkada; Pemerintah daerah.	Keinginan menagih janji pemenang Pilkada pada saat kampanye.	1	Kekuatan <i>civil society</i> ; Kontrol politik.
69	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Tapi pesannya yang ingin kita sampaikan baik ke publik maupun pemerintah daerah, bahwa nih ada kelompok masyarakat yang mengawal, mengawasi dan ingin terlibat dalam semua proses penyusunan kebijakan...	Publik; Pemerintah daerah.	Pesan politik ke publik dan pemerintah daerah mengenai keberadaan dan peran FK.	1	Opini publik.
70	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Sebetulnya kalau secara tertulis kita tidak ada kontrak politik secara tertulis. Tapi kita mendokumentasikan semua apa yang mereka sampaikan, <i>statement</i> mereka, mereka media cetak, melalui radio gitu ya itu kita sebarkan ke masyarakat...	Kontestan Pilkada.	Tidak ada kontrak politik secara tertulis.	1	Konsensus moral.
71	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Yang mendasarnya di FK model komunikasinya dua arah, tidak transaksional. Ada substansi yang yang kita siapkan dan kita diskusikan... Kalau kampanye lain atau sebelumnya hanya datang ramai-ramai saja... Syukur-syukur nih ada transport kan gitu... Nah kalau ini di FK kan kita sering ngumpul menyiapkan bahan-bahan apa sih yang akan kita diskusikan dengan para calon itu...	KPUD; Partai politik; Kontestan Pilkada.	Perbedaan FK dengan model kampanye yang umum.	1	Komunikasi dialogis; Dialog substantif.
72	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Kalau di <i>internal campaign</i> di yang sering terlibat FK, itu juga hal yang baru sebenarnya. Itu kan beragam juga kan, termasuk juga tim-tim sukses kandidat ada di dalamnya, he..he.. Tapi disitu ya kita berbaur saja... Bahwa masing-masing punya jago ya itu kan hak dia. Tapi komitmen dia bahwa kita sebagai kelompok yang akan mengawal siapapun Bupati yang terpilih, ya itu memang terbangun di kawan-kawan...	Tim Sukses Pilkada.	Komitmen FK untuk mengawal kebijakan siapapun kandidat yang menang.	1	Konsensus politik (di internal FK).
73	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Sebetulnya posisi kita masih ngambang. Apakah kita akan mengambil posisi seperti rezim sebelumnya, ya sudahlah kita teriakkan... Atau memang kita terlibat jauh ke dalam, menjadi <i>partner</i> pemerintah gitu ya... Setahun pertama pola yang kita gunakan yaitu yang kedua tadi, kita coba dekati dia. Kita terlibat, dan kebetulan selalu diundang, selalu aktif hadir disitu... Sekarang agak kita geser lagi... Bupati juga mungkin kaget ya... Kita ini sering komunikasi dan ngobrol dengan dia, tapi kemarin kita aksi. Pertama kita soal asset daerah yang amburadul. Kedua tentang pengadaan mobil dinas, yang pemborosan... Tapi itu pakai nama FDA...	Pemerintahan daerah.	Memainkan strategi kolaboratif dan konfrontatif.	1	Interelasi (dengan pemerintah daerah).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
74	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Itu juga yang membuat kita memposisikan FK ini dalam konteks teman-teman. Karena yang menggerakkan FK ini kan sebetulnya teman-teman FDA juga kan. Jadi dari kacamata publik ataupun dia (Bupati), sudah paham betul bahwa yang namanya FK itu adalah ya <i>eta-eta keneh... anu sok biasa aksi...</i> Jadi terakhir ini memang kita gunakan FK ya sebagai sebuah alat baru, kalau, misalnya kita gunakan bendera FDA ini pasti akan kesulitan, maka kita pakai FK... Tapi memang tidak seluruhnya, karena memang FDA plus gitu ya. Ada juga kawan-kawan lain hasil konsolidasi FK... Kita belum juga bisa mengatakan bersikap ya, posisi strategisnya FK ini... FK ini akan seperti apa belum didiskusikan lagi. Tapi ya minimal bendera, eksistensinya masih ada...	FDA; Pemerintahan daerah.	Pembagian peran di mana FK kolaboratif dan FDA lebih "konfrontatif".	1	Instrumen aksi politik; Kelompok politik; Strategi politik.
75	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Meskipun usulan-usulan itu sudah ada ya dari kawan-kawan diluar jaringan kita, coba kita bentuk FK per kecamatan, atau setidaknya per Dapil... Jadi setidaknya tidak sekedar dalam konteks mengawal Bupati atau Eksekutif, tapi juga mengawasi legislatif atau Dewan dari Dapilnya masing-masing... Ada perbaikan misalnya di forum-forum reses... Reses ini tidak efisien kan... Nah ada harapan agar FK dapat mengawal forum reses ini agar ada penguatan di sisi substansi misalnya... Tapi itu belum kita garap ya...	FDA; PADK; <i>Civil society</i> ; Pemerintah daerah.	Gagasan mengenai format kelembagaan FK dan pengembangan agenda.	1	Perluasan partisipasi; Arena diskursif.
76	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Kalau personal ada. Anggota Pansus di Dewan mengundang kita dalam pembahasan Ranperda Bangunan dan Rencana Tapak atau siteplan. Bareng dengan lembaga lain, bukan hanya FK...	DPRD.	Hubungan dengan DPRD.	1	Kontak dengan politisi.
77	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	(Pelajaran dari pengalaman FK) Ada perbaikan kualitas, Mas... dalam hal relasi konstituen dan kandidat... Juga ada pendidikan politik yang kita sampaikan ke publik tentang pesta demokrasi... Jangan <i>money politics</i> , jangan hanya mendengar janji kampanye, tapi juga harus mengawal dan memberikan masukan terhadap rancangan-rancangan kebijakan... Juga ada semangat baru untuk membangun kekuatan masyarakat... Ada ruang baru konsolidasi masyarakat sipil dalam rangka mempersiapkan pemerintahan yang baru..., Jadi pemerintahannya menyiapkan diri juga, dan masyarakatnya juga punya ruang baru... Ruang baru ini yang termasuk ruang-ruang yang selama ini belum ada yang memainkan, ada ruang kosong yang coba diisi oleh FK... Ruang kosong dalam arti kelompok masyarakat yang punya sikap politik yang cerdas dan terkonsolidasi gitu... Karena belum ada kan selama ini...	<i>Civil society</i> ; Kontestan Pilkada; Pemerintah daerah.	Konsolidasi <i>civil society</i> untuk mengisi "ruang kosong" lewat pendidikan politik warga.	1	Relasi konstituen dan politisi; <i>Public sphere</i> ; Konsolidasi <i>civil society</i> ; Kontrol politik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
78	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Ada desakralisasi proses politik Pilkada ini... Terkadang masyarakat atau konstituen inikan inferior ketika berhadapan dengan kandidat gitu ya... Nah ketika bisa berhadapan langsung dan bisa maki-maki dia, itu ada perasaan bahwa calon ini tidak selalu lebih pintar dari kami gitu ya... Itu pendidikan politik ya, menurut saya FK cukup berhasil disitu ya... "Kitu wae teu nyaho...!!"... Kan banyak pertanyaan-pertanyaan sederhana dari masyarakat tapi kandidat ngga bisa jawab... Masyarakat kan bisa komentar "Belul.., kitu rek jadi Bupati...!!" ... Nah itu dia cerita kan ke keluarga dan teman-temannya sepulang ke kampungnya dari pengalaman dia berinteraksi dengan kandidat... Nah itu harapannya... Kita ingin membuat pilihan-pilihan lebih terbuka melalui kegiatan pendidikan politik... Karena memang tidak ada yang melakukan itu. Bedanya disitu... Tidak ada kelompok yang melakukan itu...	Kontestan Pilkada.	FK sebagai pendidikan politik ke warga sehingga lebih berani dan percaya diri berhadapan dengan politisi, menilai kapasitas politisi, dan dan menginformasikan ke lingkungannya.	1	Desakralisasi proses politik; <i>Inferior complex</i> ; Uji publik; Kapasitas politik (politisi).
79	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Itu kan tidak statis dalam hal relasi penguasa dan masyarakat ya... Ada dinamika lah... Memang kita juga harus jeli melihat situasi itu... Misalnya tadi kalau kita ini memang harus <i>soft</i> , sebagai partner, sebagai kawan diskusi... Tapi kapan juga kapan kita harus bersifat kritis, kapan harus aksi gitu ya... Dan ternyata, sampai saat ini, ketika kejadian demo kemarin, walaupun tidak atas nama FK, tapi Bupati menangkap itu... Dia dapat cerita dari kawannya, dari dalam itu, kan tidak baik juga kalau ada persepsi di Bupati bahwa dia sudah menaklukan teman-teman CSO ini kan... Nah setelah aksi kemarin, dia baru sadar bahwa dia punya janji ke temen-temen, untuk memfasilitasi workshop untuk mempertajam lagi agenda-agenda masyarakat ini... Ada informasi dari kawan yang cerita ke saya begitu... Kita tidak menutup diri, meskipun kita sering diskusi dengan dia bukan berarti kita menjadi kawan yang baik bagi dia. Artinya kalau ada kebijakan dia yang keliru ya kita akan teriak...	Pemerintah daerah.	Strategi kolaboratif dan konfrontatif.	1	Strategi politik; Dinamika politik; Relasi warga dan pemerintah; Kolaborasi; Konfrontasi.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
80	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Kalau FAB kan berdasarkan program, begitu <i>election</i> selesai mereka kan relatif sudah tidak aktif lagi... Jadi setahun ini FK memang kita lakukan secara swadaya, jadi ada beberapa pertemuan, <i>roadshow</i> gitu ya, yang muter dari Pangalengan, terus ke Pasir Jambu, disitu swadaya muncul... Karena ada beberapa agenda, misalnya ada undangan... Pemda mengundang FK misalnya, kita ngumpul, kita bahas apa yang harus disiapkan, berbagi tugas, berbagi peran gitu... Tapi kalau sampai ke FK yang seperti dulu pertemuan besar, itu berat... Ngga akan bisa... Bahwa kita bikin pertemuan besar tanpa <i>support</i> dari luar, itu berat... Tapi secara prinsipil kalau nanti kita bikin sesuatu seperti jelang Pilkada ke depan itu sangat mungkin... Kita sudah punya pengalaman, jaringan lebih luas lagi, dari sisi eksistensinya juga sudah ada, itu kan akan memudahkan kita lagi untuk melakukan hal yang sama...	FAB; Pemerintah daerah.	Kegiatan FK yang "kecil" masih bisa dilakukan secara swadaya. Tapi kalau untuk event vesar akan sulit tanpda ada support dari luar.	1	Swadaya; Pengorganisasian; Modal politik.
81	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Ada pemikiran sebetulnya untuk mempraktekkan lagi pengalaman FK dalam Pilkada Kabupaten kemarin di Pilgub Jabar sekarang ini... Tapi ya masih ngobrol-ngobrol ringan lah, belum serius... Kita juga bertanya sih, FAB punya agenda di Pilgub ngga? Soalnya kan FK itu lisensinya FAB itu, he..he...	FAB.	Gagasan untuk relikasi di Pilgub 2013.	1	Replikasi; Perluasan partisipasi; Arena politik yang lebih luas.
82	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	(Faktor yang perlu dicermati dalam replikasi) Kalau akan direplikasi di daerah lain, konteks daerah itu dinamikanya akan berbeda ya, hasilnya juga akan berbeda... Inisiatornya, artinya teman-teman CSO yang menginisiasi FK ini ya, artinya harus cermat juga memilih teman-teman mana yang punya potensi untuk dilibatkan... CSO ini memang yang harus kuat jaringannya, punya pengalaman dalam kerja pengorganisasian, punya jaringan politik, jaringan ke birokrasi, ke dewan... Kelompok itu yang memungkinkan dia bisa banyak memodifikasi, menginovasi... Apalagi kalau ada kelompok dari luar yang masuk terus dia yang mengelola di lapangan, itu ngga akan bisa... maksudnya tidak akan bisa, hasilnya tidak akan maksimal...	<i>Civil society</i> di daerah lain.	Hal penting yang perlu diperhatikan ketika akan replikasi model Fk di daerah lain.	1	<i>Civil society organizations</i> ; Jaringan; Kapasitas politik.
83	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Sebetulnya memang lebih cocok sebelum Pilkada... Saat itu kan <i>euphoria</i> masyarakat muncul... FK merespon itu... kalau sebelum itu, mungkin area mainnya berbeda ya...	<i>Civil society</i> di daerah lain.	Model FK dipandang paling cocok untuk Pilkada.	1	Arena politik (sekitar Pemilu).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
84	Setiawan	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Selain itu impiannya adalah bagaimana jika ada kepala daerah terpilih apakah itu Bupati atau Gubernur dia sadar bahwa dia jadi itu karena kita gitu lho... Sehingga jika mereka mengambil kebijakan yang merugikan konstituen mereka tahu bahwa akan ada gerakan dari konstituen untuk mempertanyakan kebijakan tersebut... Harapan jauhnya seperti itu... Sederhananya, bagaimana kita dapat terlibat dalam forum-forum pengambilan kebijakan strategis, seperti Musrenbang... Minimalnya kita diundang... Baru saja FK diundang ketika ada kegiatan penyusunan Musrenbang RKPD... Terus yang dulu RPJMD kita juga diundang...	Bupati; Gubernur; Pemerintah daerah.	Harapan mengenai pengaruh dan peran FK.	1	Mandat politik; <i>Pressure groups</i> ; Partisipasi politik; Penyusunan kebijakan.
85	Setiawan	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Kita masih sering diundang dalam perencanaan, seperti saat Musrenbang. Tahun lalu Musrenbang ke Provinsi juga ada salah satu kawan kita... Ya memang secara lebih jauh ke substansi kita memang belum mengecek sejauh itu...	Pemerintah daerah.	Interaksi FK dengan pemerintah daerah.	1	Partisipasi (pengaruh/efek).
86	Setiawan	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Kalau kita nih kan lempeng aja ya, jadi kita ngga mikirnya ke kanan-kiri... Mereka juga lihat bahwa kalau kita ngomong juga konkret... Jadi itu yang salah satu yang mereka perhitungkan...	Pemerintah daerah.	Keberhasil dalam bentuk pengakuan sebagai sebuah kelompok yang berbeda.	1	Konsistensi; Kritis.
87	Setiawan	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Kalau harapan sih kita ngga muluk ya, minimal ya suara kita di dengar. Tapi tadi kan sudah disinggung bahwa ada persoalan bagaimana dapat membangun konsolidasi internal yang semakin kuat. Bukan sekedar dalam arti banyak orang, tapi juga bagaimana substansinya lebih kena gitu... Dan ini juga ketika bicara dalam konteks hari ini, ketika sudah ada kepala daerah, kita sudah tidak lagi bisa menyampaikan seenaknya apa yang kita mau, tapi kita juga harus melihat apa yang mereka rencanakan. Nah, proses-proses itu yang hari ini memang belum maksimal kita lakukan. Kalau saya sih melihatnya, kalau sekarang posisi kita lebih bagaimana mengawal apa yang sudah dia sodorkan, jadi kita tidak dalam posisi apa yang kita sodorkan lagi... Proses konsolidasi ini yang menurut saya harus lebih dimaksimalkan lagi...	Jaringan FK; Pemerintah daerah.	Harapan mneingkatnya kesadaran di jaringan dan konsolidasi di dalam FK sehingga dapat menjadi kekuatan dalam kontrol pemerintahan.	1	Responsifitas pemerintahan; Kritik yang substantif dan argumentatif; Inisiatif; Reaktif.
88	Setiawan	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Kita berusaha untuk tetap konsisten, mencoba untuk lurus, bahwa apa yang kita sampaikan memang kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak gertak sambal-lah istilahnya...	Jaringan FK; Pemerintah daerah.	Konsistensi FK.	1	Kritik yang substantif dan argumentatif; Konsistensi.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
89	Setiawan	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Terus kan bukan mereka yang ngundang kita, tapi kita yang mengundang mereka, bukan hanya satu calon tapi semua para calon untuk bertemu, berdialog dan berdebat bersama masyarakat...	Kontestan Pilkada.	Kelebihan model FK.	1	<i>Active citizen.</i>
90	Setiawan	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Ada hal yang menarik pasca pertemuan dengan kandidat itu... Ada peserta yang hadir itu awalnya mengidolakan si A, tapi ketika dia sudah lihat langsung... Beda kan kalau cuma lihat di TV dengan lihat langsung... Pasca itu pilihannya jadi berubah, pasca itu dia pilih si C... Kejadian seperti itu yang jadi pelajaran menarik... Bahwa memilih itu bukan cuma persoalan asal milih aja, tapi juga penilaian bahwa "Ah si ini nih yang pantes memimpin"... dari dialektika dia ketika berbicara, substansi yang dia paparkan... Nah itu, ada perubahan-perubahan itu di kepala para peserta FK ini... Ketika dia pulang dari pertemuan itu, dia juga mempengaruhi teman-temannya yang lain kan... Menyampaikan pesan bahwa anda jangan lihat si A punya uang, jangan lihat ini saudara, tapi anda lihat bahwa ini punya kapasitas untuk memimpin ataukah tidak... Lebih kesitu...	Kontestan Pilkada; <i>Credible source.</i>	Contoh kasus di mana dialog kandidat dengan konstituen bisa mengubah preferensi politik.	1	Preferensi politik; Dialog (dampak); Sosialisasi.
91	Setiawan	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Harapannya memang demikian... Persoalan mempengaruhi kan tergantung bagaimana posisi tawar kita... Kalau posisi tawar kita tinggi, kemungkinan kita bisa lebih mempengaruhi pemerintahan yang baru ini. Ketika kita ngumpul sekitar 200 orang, ini kan yang akan memperkuat legitimasi kita sebagai masyarakat sipil, bahwa para calon itu punya beban moral terhadap masyarakat... Ketika si pemerintahan ini terbentuk, dia juga ada kewaspadaan-kewaspadaan itu...	Kontestan Pilkada; Pemerintah daerah; <i>Civil society.</i>	Legitimasi dan posisi tawar FK sebagai bagian dari <i>civil society.</i>	1	<i>Bargaining position;</i> Legitimasi; <i>Civil society;</i> Tanggung jawab moral.
92	Setiawan	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Bayangan kita waktu itu dan sampai sekarang juga, bahwa pekerjaan ini belum selesai... Ini belum selesai... Pekerjaan kita masih panjang... Ya minimalnya kita mengawal pemerintahan yang hari ini ada... Maka strategi kita adalah memainkan lembaga-lembaga yang ada di FK sendiri, seperti PSDK, FDA... Itu menjadi pionir-pionir, yang justru FDA dan PSDK ini lebih banyak berperan dari sisi substansi gitu... Kita konsolidasinya memang jadi lebih bersifat informal, tidak secara gebyar gitu... Paling secara individu-individunya kita undang, gimana nih dinamikanya sekarang seperti ini? Gitu...	PSDK; FDA.	Keterbatasan di FK membuat misi mengawal dan mengontrol pemerintahan lebih banyak menggunakan PSDK dan FDA. Koordinasi di FK dilakukan secara terbatas dan informal.	1	Kontrol pemerintahan; Strategi; Pembagian peran; Konsolidasi.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
93	Setiawan	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Jarang ya. Karena sejak awal kita juga kurang mempopulerkan FK di media ya... Harapan kita dulu waktu melakukan <i>roadshow</i> dulu itu, kita ingin membangun di <i>grassroot</i> , bagaimana kita lebih memperkuat substansilah diskusi melalui forum-forum diskusi dan partisipasi ini... Jadi bagaimana kita juga bukan hanya hadir disitu, duduk, dengerin... Tapi kita ingin punya kepentingan menyadarkan yang belum sadar bahwa... Yaa.. jargon dulu itu kan bagaimana FK ini mendidik menjadi pemilih yang cerdas... Ini yang coba yang kita bangun... Saya juga pernah sih menulis di beberapa media, tapi ngga tau mungkin tulisannya yang kurang pas atau gimana ya, tidak dimuat gitu... Cuma kebetulan waktu itu saya punya media sendiri, ya sudah aja di media sendiri...	Media massa.	FK kurang muncul di media massa.	1	Kampanye/sosialisasi; Diskusi komunitas; Pendidikan politik.
94	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Akhirnya gagasan-gagasan untuk membangun Kabupaten Bandung dituangkan oleh Forum Konstituen ini... Nah disana... Diakui tidak diakui, diterima tidak diterima, tapi kami sudah menyampaikan... Ini lho kebutuhan masyarakat secara riil dan utuh... Meskipun disini ada FDA yang ngurus anggaran, PSDK yang ngurus lingkungan, ada juga dari kebencanaannya... tahu dan mengetahui bahwa dari setiap APBD itu tidak berpihak secara utuh kan... Jangankan di Kabupaten Bandung, di Indonesia saja selalu tidak berpihak... Tapi kita tidak melihat itu, tapi ini loh, kami ada ikut menunjang, ikut membantu... Kata Pak Bupati sendiri mah kan "Maju, Mandiri dan Berdaya Saing"... Nah kami ikut serta di dalamnya... Maju, dalam pola pikir, bagaimana mengembangkan sumberdaya yang beretika dan berestetika, walaupun kami ini hanya SD... Karena kalau kami ini gelarnya sudah <i>S tilu</i> , <i>S lilin mah</i> mungkin sudah duduk di Dewan... he...he... Nya' Alhamdulillah, Abah sendiri juga di Dewan Pendidikan Sekolah... walaupun hanya <i>sa'ukur neken hungkul</i> ... he...he... Mangka itu, dengan Forum Konstituen ini kami berharap itu tidak mati suri lah... apapun, sekecil apapun kami selalu berupaya...	FDA; PADK; Pemerintah daerah.	FK lahir dari gagasan untuk membangun daerah, dengan menyampaikan persoalan riil di masyarakat kepada pemerintah.	1	Aspirasi; Kebijakan tidak aspiratif; Kritik konstruktif.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
95	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Karena kalau <i>single fighter</i> , Abah sendiri atau orang lain mungkin lebih vokal, tapi kalau ke vokalan itu tanpa ditunjang oleh kesatuan yang utuh itu akan didengar tapi tidak pernah direalisasikan... atau bahkan mungkin diabaikan, hanya dianggap angin lalu... Tapi kalau diwadahi, sedikit tidaknya, <i>power</i> kita itu diperhitungkan gitu... Kekuatan <i>civil society</i> -nya diperhitungkan... karena kami kan berangkat dari <i>civil society</i> ... Kedua tanpa indikasi politik tertentu, tapi murni, dalam arti kata kita menyampaikan aspirasi masyarakat secara luas...	<i>Civil society</i> .	Menyuarakan aspirasi sebagai kelompok lebih efektif dibandingkan sendiri.	1	Individu; Kelompok; Organisasi; <i>Power</i> ; Pengaruh; <i>Civil society</i> .
96	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Alhamdulillah kita berbagi dengan siapapun... dari kalangan bawah sampai legislatif kami diterima, karena kami positif... Walaupun mengkritisi, tajam setajam apapun, tetap kami punya etika... Karena kami tidak mau Forum Konstituen ini disebut karbitan, kacangan... Walaupun kami di kalangan yang menurut mereka mungkin ada yang memandang sebelah mata ya kami biarkan saja...	Pemerintahan daerah.	FK bersikap positif, karena berdialog dan mengkritisi dengan etika.	1	<i>Sharring knowledge</i> ; Kritik; Etika politik.
97	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Karena kami selalu mengingatkan mereka, awas jangan membohongi publik mengenai kebijakan atau anggaran dengan berbagai alibi-alibi... Tapi kami pun tidak akan ikut campur pada tatanan rumah tangga atau sistem yang berlaku... Yang penting sejauhmana keberpihakannya, setiap kebijakan itu dirasakan dan dapat dinikmati masyarakat... walaupun belum memenuhi keadilan masyarakat secara utuh...	Pemerintahan daerah.	FK mengingatkan pemerintahan daerah untuk berpihak pada rakyat, tetapi FK tidak ikut campur pada sistem yang berlaku di pemerintahan.	1	Responsifitas pemerintahan; Kebohongan publik; Ruang publik dan sistem politik.
98	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Nah dari keprihatinan semacam itulah muncul FK, yang riil berjuang di jalur kita... Meskipun kadang kala mangkel juga, karena ketika kita menyampaikan aspirasi, mereka bilang, " <i>Iya... iya...</i> ", tapi <i>cicing</i> ... ya nggak eksekutif, legislatif... Tapi nggak apa, yang penting ada gebrakan-gebrakan... Dan sebagian besar kita selalu dilibatkan, terutama dalam hal-hal memutuskan sesuatu di Kabupaten Bandung FK selalu dilibatkan... Berarti ini sudah ada satu tanda kita dilirik oleh mereka... karena mungkin dia menilai ini akan besar, karena memang besar... Tetapi kami tidak menggerakkan besar-besaran, cukup diwakili... Gerakan massa kan <i>image</i> -nya sudah lain... demo lah... Tapi kami tidak demo secara frontal, tapi cukup perwakilan saja...	Pemerintahan daerah.	Pemerintah daerah yang kerap hanya menampun aspirasi tanpa menindaklanjuti.	1	Responsifitas pemerintah; Gerakan massa; Konfrontasi; Keterwakilan publik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
99	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Ada beberapa hal... dulu di kesehatan kan bayar, di dobrak oleh kita itu kan akhirnya gratis... Di kebencanaan, dulu di FK dan para relawan ini kan berjuang, sekarang tinggal koordinasi... Bahkan ikut merumuskan Perda tentang Kebencanaan... Kami disuruh bikin draft, di share dengan mereka... Artinya kan kami betul-betul dibutuhkan oleh mereka... Dengan adanya wadah ini kami bisa lebih di dengar... Walaupun mungkin ada yang bilang, apalah FK itu, intelektual juga bukan... Tapi ternyata daya nalar kami diakui, selain itu kami tidak pernah meminta sepeserpun... <i>"Ini lho kami punya ide..."</i> , akhirnya itu yang bisa didiskusikan... <i>"Ini lho Pak Wakil, ada masalah ini..."</i> , <i>"Oh iya..."</i> ... akhirnya itu bisa diadopsi... meskipun tidak seluruhnya... Jadi peran kami itu betul-betul strategis buat mereka...	Pemerintah daerah.	Peran jaringan FK mempengaruhi kebijakan daerah.	1	Advokasi kebijakan (keberhasilan).
100	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Jarang, selama Abah bergelut menjadi aktivis pengkritisi kebijakan jarang kita bisa ketemu dan diskusi dengan pemerintah... Dulu bahkan dengan gebrak meja... Tapi sekarang dengan tanpa gebrak meja, kita bisa berargumen dengan rasio, dan logika menurut akal sehat, gagasan kami malah bisa diterima... Cuma itu tadi, meskipun sebegus apapun gagasan mereka tidak akan mengakui terbuka, karena kalau begitu berarti kami yang lebih pantas duduk disitu... Itu politis ya... Misalkan kita mengajukan 10 item gagasan, tetap akan mereka revisi bahasanya... Seperti lagulah, kita membuat syair, sama yang <i>ngaransirnya tetep di oprek-oprek</i> ... akhirnya bukan murni dari si pembuat syair kan, tapi jadi buatan bareng sama yang <i>ngaransirnya</i> ... Begitu pula dengan aspirasi kami... Ibarat lagu, syair dari kami disesuaikan dengan musiknya lah... Jadi diterima aspirasi kami, tapi di <i>cross</i> dengan keinginan dan kebutuhan mereka... Tapi ada satu kalimat saja yang masuk dalam kebijakan, itu kan sudah luar biasa... Itu keberhasilan buat kami...	Pemerintah daerah.	Dulu jarang bisa bertemu pemerintah, dan dalam menyampaikan aspirasi sampai harus bersitegang. Sekarang bisa dialog dan sekarang relatif bisa mempengaruhi kebijakan.	1	Mempengaruhi kebijakan.
101	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	(Efek bagi FK?) Oh ya berpengaruh... Apa lagi nih kebijakan yang perlu dicermati? Apa lagi yang belum menyentuh kepentingan masyarakat? Kami merumuskan... ini sudah, itu belum... walaupun secara matematika sulit dipastikan, tapi adalah bahasa-bahasa yang masuk... Itu kami merumuskan... Itu kebanggaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun... Akhirnya kami, kreativitas adik-adik disini terutama, bersemangat... Motivasinya disitu...	Pemerintah daerah.	Meskipun sulit memastikan secara persis, tapi sedikit banyak gagasan dan kritik FK dipandang dapat diadopsi oleh kebijakan pemerintah.	1	Analisis masalah; Isu advokasi;

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
102	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Karena itu, kalau ada rekan dari tempat lain kesini, Abah selalu bilang, sok bangun yang seperti FK ini... Tapi jangan membentuk untuk sekedar teriak saja, tapi membantu berpikir mengenai maju mundurnya wilayah kita... Gerakan ini dampaknya akan seperti apa? Terasakan atau tidak hasilnya? Itu harus dirumuskan dulu...	<i>Civil society</i> di wilayah lain.	Mengharapkan ada forum sejenis FK di daerah lain.	1	Replikasi.
103	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	(Tidak terkontaminasi, faktor apa yang mempengaruhi?) Karena kami berangkat dari keinginan menyuarakan aspirasi... Satu persatu akhirnya dikumpulkan... Satu visi, satu misi dengan tanpa motivasi ingin menguntungkan diri sendiri, ingin kaya... Gitu!... Karena berangkat dari masalah yang dialami langsung... Karena itu Alhamdulillah, FK ini oleh Bupati, Wakil Bupati, eksekutif, legislatif, kita di dengar...	Pegiat dan komunitas yang terlibat dalam FK.	FK adalah wadah akumulasi dan perumusan aspirasi warga untuk dikemas dan disampaikan ke pemerintahan daerah.	1	<i>Problem based;</i> Aspirasi.
104	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Tapi tujuan kami mendirikan FK ini peran aktifnya bukan sekedar mengkritisi, tapi memberi masukan yang positif untuk... yah kalau disebut untuk orang lain rasanya gimana gitu yah... ya untuk diri kita sendiri saja sebagai masyarakat yang ada di FK... karena kami elemen masyarakat yang merasakan langsung masalah-masalah itu...	Pemerintahan daerah; <i>Civil society</i> di daerah lain.	FK bukan sekedar mengkritisi tapi juga berupaya memberikan masukan yang positif.	1	Kritis; Konstruktif.
105	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	(Pengaruh terhadap iklim demokratisasi?) Yah betul, jadi kami tidak saja didengarkan, tapi dilibatkan... Seperti kemarin kami dilibatkan dalam Ranperda Tapak, itu kami diundang... dulu kan tidak pernah... Dialog, itu juga terjadi... walaupun suara kami suara lantang... suara rakyatkan kadangkala tanpa tedeng aling-aling, apa yang dirasakan, dipikirkan, itu yang disampaikan... Walaupun mungkin menurut kaum elit itu tidak sesuai logika atau tidak, itu tidak kami hiraukan... Pada dasarnya kami menyampaikan apa yang dirasakan, dan menurut kami itu logika... Bahasa yang kami keluarkan walaupun <i>songong</i> , itukan logika, menurut daya nalar... Kalau yang dibicara itu bukan dari yang dirasa, itu bukan logika, itu semu... Kalau kami menyuarakan karena kami merasakan, maka kami teriakkan...	Pemerintahan daerah.	Dalam dialog dengan pemerintah, FK menyampaikan dengan dengan "bahasa rakyat".	1	Keterbukaan pemerintah; "Bahasa rakyat".

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
106	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	(Pertemuan warga dengan calon di Telkom?)Perbedaan kegiatan dialog dengan calon di Telkom dibandingkan dengan kampanye yang lain itu, kegiatan kita lebih utuh dan dinamis, antara calon pemimpin dengan yang dipimpin... jadi tidak <i>omdo</i> , tidak sepihak... Ketika dia menyampaikan keinginannya, visi-misinya, itu kami cermati, kami pelajari... Ini sesuai tidak dengan adat istiadat, karakter, budaya di Kabupaten? Sinkron tidak dengan situasi yang ada?...	Kontestan Pilkada; KPUD.	Perbedaan model FK dengan kampanye Pilkada oleh KPUD atau partai politik.	1	Kampanye Politik dan Kampanye Pemilu; Kampanye dialogis.
107	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Waktu itu ada salah seorang calon Bupati yang bilang, bahwa jika dia terpilih akan memberi setiap desa Rp 1 milyar... Nah itu satu hal yang positif... Tapi kami tidak menerima begitu saja... Kami mempertanyakan, apakah itu bisa terjadi? Sementara anggaran Kabupaten Bandung segini lho... Banyak kebutuhan belanja tidak langsung-nya, dibanding belanja publiknya... Ini mimpi... Wah ini <i>mah mustahalah</i> ... Darimana uangnya? Tidak masuk logika... Ini yang tidak rasional... Kami sampaikan, tolonglah dikemas gagasannya...	Kontestan Pilkada.	Dalam dialog dengan kandidat, FK dapat mendengar, mengkritisi, mempertanyakan gagasan atau janji kandidat.	1	Kapasitas politik (kontestan Pilkada); Kampanye Pemilu.
108	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Nah akhirnya kan terpetakan oleh kita... Tidak jelek semua, tapi adalah yang masuk akal... Karena kalau buat kami ya yang masuk akal... Tidak <i>ceunah</i> ... tidak angan-angan... Tapi fakta dan data, yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada... Jadi kita berdialog, berinteraktif, sambil merenung apa yang dia bicarakan... <i>Omdo</i> atau memang bisa terealisasi... Ternyata memang banyak <i>omdo</i> -nya... Karena kami tidak buta anggaran, karena sudah dididik oleh FK...	Kontestan Pilkada.	Dalam dialog dengan kandidat, FK dapat menilai pemahaman kandidat akan persoalan di daerah, kualitas gagasan dan personalitas kandidat.	1	Kapasitas politik (kontestan Pilkada); Kampanye Pemilu; Dialog; Kapasitas warga.
109	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Model dialog seperti di Telkom itu perlu dilakukan di banyak tempat... Lebih dinamis, lebih rasional, dan lebih masuk ke logika... Bisa interaktif... Jadi tidak ditanya oleh para moderator, seperti di TV, yang tidak mewakili masalah dan kepentingan kami... Tapi kalau di FK, kita bisa bilang, ini masalah lho sesungguhnya... karena yang berbicara konstituen... rakyat... sipil murni... yang tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik lainnya... Kalau dialog lain yang sudah di <i>setting</i> itu kan sebetulnya itukan hanya pengaburan, dongeng... Tapi kami terlibat... walaupun tidak semua masyarakat, tapi kami mewakili dari semua komponen... Pertaniannya, peternakannya, anggarannya, buruhnya...	Kontestan Pilkada; KPUD; Media.	Perbedaan dialog model FK dengan kampanye umumnya.	1	Agenda <i>setting</i> ; Konstituensi; Masalah publik; Kepentingan publik; Ketrwakilan warga.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
110	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Jadi sebetulnya yang kita lakukan di FK dengan FAB di Telkom itu lebih elegan... Tersampaikan, dan lebih dipahami semua kandidat... <i>Sok we</i> semua kandidat bicara... Kami mendengar, mengamati, meneliti, mempelajari mana yang lebih baik diantara yang paling baik... Dan setelah ada yang jadi, kami bertanggungjawab... Suka tidak suka karena kami sudah terlibat... Tapi kalau kampanyenya di jalanan... Itu tidak menyentuh dan tidak disentuh masalah masyarakat... Setelah jadipun tidak disentuh itu yang ikut kampanye di jalanan rame-rame...	Kontestan Pilkada; KPUD; Media.	Perbedaan dialog model FK dengan kampanye umumnya.	1	Kapasitas politik (kontestan Pilkada); Kampanye Pemilu; Transaksi politik; Dialog publik.
111	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	<i>Mangkanya</i> kalau di daerah lain ada, bagus sekali itu... Seperti sekarang ya mau Pilgub, <i>kitu wae lah jiga</i> FK... Tidak mengganggu ketertiban umum, tidak merusak sarana dan prasarana umum, lebih elegan, lebih dipahami, lebih dimengerti... Visi misinya jelas terdengar... Tidak hanya <i>nyetel</i> dangdut... Kita ada selingan ada nyanyi suara anak-anak konstituen berteriak, he...he... Tapi maukah? Tinggal pertanyaannya, maukah?	Kontestan Pilkada; Pemerintah daerah; <i>Civil society</i> .	Harapan model FK bisa diadopsi oleh KPU.	1	Kapasitas politik (kontestan Pilkada); Kampanye Pemilu; Transaksi politik; Dialog publik.
112	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Jadi seharusnya itu sering dilakukan... Minimal kita jadi turut bertanggungjawab ketika ada satu kandidat yang memenangkan pertarungan politik itu... jadi kita bisa menagih janji... " <i>Dulu anda bilang ini itu... ini rekamannya... ini majalahnya... semua komplit... sekarang bagaimana realisasinya...?</i> " Nah itu, jadi kami tidak <i>asbun</i> ... karena kami terlibat dalam wacana kampanyenya...	Kontestan Pilkada; Pemerintah daerah; <i>Civil society</i> .	Dengan dialog, janji kandidat dapat menjadi "alat tagih" kepada pemenang Pilkada.	1	<i>Responsible citizen</i> ; Kontrol politik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
113	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	(Kenapa para calon mau datang?) Kalau menurut Abah, mudah-mudahan tidak salah ya, satu, karena keeleganan acara kita... dia merasa elegan, karena tempat dan wilayahnya di daerah akademis. Kedua, para pengundangnya yaitu komunitas yang tergabung dalam FK ini adalah dinamis dan terdiri dari banyak elemen masyarakat. Ketiga, tantangannya berani <i>nggak</i> tidak di belakang layar... Kan sekarang mah, kampanye si A di sana, si B di tempat lain... Sekarang disatukan di satu tempat berhadapan dengan Forum Konstituen... Adu jago, adu janji... Yang menilai jadi jurinya kita-kita ini masyarakat... bukan moderator... Dia yang berbicara, kita yang menanggapi, dialog... Lebih elegan, makanya lebih terhormat dia... Dan ditantang keberaniannya berhadapan dengan warga... Biasanyakan kampanye, si A ngomong, nanti si B nanggapi ngomong di kampanyenya sendiri di tempat lain... Kalau di FK kan berhadapan... Kalau waktu itu dari semua kandidat yang hadir ada ketersinggungan, <i>sok</i> aja mereka berdebat, kami yang akan menilai...	Kontestan Pilkada.	Alasan mengapa para kandidat bersedia hadir dalam acara FK.	1	<i>Public sphere</i> ; Kampanye Pemilu; Dialog; Inklusifitas.
114	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	(Keanggotaan atau kepesertaan FK?) Kekurangan dan kelebihan pasti ada dimanapun... Kita tidak menyoroti soal kekurangan atau kelebihan, tapi sinkronisasinya... Misalnya, dari kalangan perempuan apa gagasannya?... Suka atau tidak suka kami kemas dulu... Ini apa? Bagaimana?... Tidak kita diskusikan mendalam dulu... Setelah dikemas baru dipersempit... Akhirnya <i>deal</i> ... Tapi kalau belum apa-apa sudah didiskusikan panjang lebar, itu akan bermasalah... Maka disanalah saling menghargai... yang akademisinya, yang perempuan, yang petani.... Silakan berbicara saja dulu, kita semua tampung... Catat dulu semua... Tidak dimentahkan, misalnya " <i>Wah ini nggak bisa...!</i> "... Tidak begitu, tapi kemas saja dulu... " <i>Ini lho ada sekian item gagasan atau pendapat dari yang hadir.... Waktu kita sempit, tapi perlu hasil dan kesimpulan... Bagaimana masukan yang ini? Bisa digabung atau disambungkan nggak dengan gagasan yang itu?...</i> " Nah itu enaknya disini... Karena itu pimpinan FK ini memang harus bisa memfasilitasi dengan bijaksana... Karena beragam latar belakang tadi... Terlepas dari kurang dan lebih, enak tidak enak kita sikapi saja secara baik...	Pegiat FK.	Pola dialog dan pengambilan keputusan di FK.	1	Dialog dan harmonisasi gagasan (internal FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
115	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Jadi sebelum diskusi kita sudah terwakilkan atau disiapkan... <i>Sok</i> soal kebencanaan disiapkan dulu apa yang mau disampaikan... silakan soal kesehatan juga dibahas dulu... Jadi ketika kita audiensi dengan pihak manapun itu sudah dianggap terwakili berbagai masalah tersebut... Tidak ada perdebatan yang kelewat tajam... walaupun ada itu bisa diharmonisasikan, karena fasilitator di FK nya bisa memfasilitasi, misalkan, " <i>Tadi dari pihak rekan ini ada gagasan ini, terus rekan lain memberi sanggahan begitu... Nah gimana kalau soal ini kita kemas gagasan ini seperti ini... Coba kita kaji dulu...</i> ". Akhirnya, oh iya begitu...	Pegiat FK.	Pola dialog dan pengambilan keputusan di FK.	1	Dialog dan harmonisasi gagasan (internal FK).
116	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Nah ketika kita berhadapan dengan pihak lain, katakanlah dengan pemerintahan disini, kan kita terdiri dari beragam latar belakang tadi, misalkan seperti Abah di kebencanaan, saya menguasai soal itu, ya akan lebih banyak bicara di persoalan itu... meskipun katakanlah Abah tau soal anggaran, tapi silakan rekan dari FDA yang lebih menguasainya untuk lebih banyak menyampaikan...	Pegiat FK; Pemerintahan daerah.	Pembagian peran di FK ketika dialog dengan pihak lain.	1	Pembagian peran (internal FK).
117	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	(FK perlu dipertahankan?) FK sangat penting... bukan penting lagi, tapi sangat penting untuk dipertahankan... Karena itu tadi, dari semua kalangan ada di dalamnya... Bisa mengadopsi apa yang diinginkan, untuk dirumuskan, dan untuk disampaikan kepada pihak terkait...	Pegiat FK.	Keinginan untuk dipertahankan FK.	1	Keberlanjutan (FK).
118	Nadri	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	Jadi dalam konteks Forum Konstituen kita, adalah satu semangat bahwa kita punya calon independen yang tidak punya afiliasi, bendera... Sementara itu kan harus terhimpun, harus terkondisikan, harus ada akses dari atas ke bawah, dari bawah ke atas... Pendukung independen terlampau vulgar... walaupun dalam Forum Konstituen itu juga tidak <i>pure</i> ya, ada yang kesana, ada yang kesini... Tapi lebih kepada mereka tidak tersalurkan, tidak punya ruang bagi akses mereka beraktivitas dengan partainya... lebih pada individu kandidatnya... gitu lho latar belakangnya kalau mau bicara yang kita ya... Bukan satu tatanan yang diatur, di set... tidak, itu sangat insidental... insidental dalam arti kebutuhan... kepentingannya fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat ini yang tidak punya afiliasi secara formal...	FK; Calon Kepala daerah dari independen.	Partai politik kurang berfungsi. Masyarakat mencoba mendorong calon independen, tapi calon independen sulit untuk menang.	1	Disfungsi partai; Respon warga.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
119	Nadri	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	(Masih ada targetan itu lagi ke depan?) Oh ya harus... sampai mati! Kita ini udah mati, <i>tenggelem...</i> bangsa yang tidak berbudaya itu Indonesia... Begitu beraninya elit-elit, tokoh-tokoh, bermain mengatasnamakan rakyat untuk kepentingannya... Maka agenda kita adalah membangun kekuatan terlebih dahulu, minimal kekuatan <i>bargaining</i> dalam kepentingan rakyat... Bagaimana kita membangun musuh bersama... musuh bersama itu bukan individu, bukan bendera... Tapi ketidakmampuan itulah musuh bersama... Ketidakmampuan birokrasi menata, mengelola Kabupaten ini kita jadikan musuh bersama...	Elit politik; Birokrasi.	Perlunya membangun musuh bersama, yaitu ketidakmampuan birokrasi dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.	1	<i>Bargaining power;</i> <i>Common isu;</i> <i>Common enemy.</i>
120	Nadri	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	Kita bangun kekuatan <i>bargaining</i> ... <i>Bargaining</i> apa? Bukan posisi lu mundur gua maju... <i>Bargaining</i> dalam arti kata, prioritas bagi kemaslahatan rakyat... Kalau dibahasederhanakan seperti itu... Dinamikanya tentu bermacam-macam, tapi garis bawahnya itu... Sekarang sedang kita bangun... sementara ini ruang-ruangnya memang tertutup, karena mereka sudah <i>split</i> ... Tidak afiliasi adalah musuh... dalam pengertian <i>ngarecokeun</i> ... dalam pengertian Sunda itu... Memang kalau dengan orang-orang yang kurang kompetensinya, itu mainan buat mereka... transaksional itu saja beres itu...	Elit politik; Bupati/Wakil Bupati.	Membangun <i>bargaining position</i> dengan rezim yang berkuasa di daerah saat ini.	1	<i>Bargaining position;</i> Dikotomi <i>in-group</i> dan <i>out-group</i> ; Politik transaksional.
121	Nadri	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	Tapi sekarang terbukti masih banyak kawan-kawan saya yang tetap eksis dalam idealisme dalam pengertian tadi... Itu yang kita bangun sekarang... Karena kalau kita bicara geser mengeserkan kesannya jadi kudeta nanti... Kita tidak disana... Oke lo udah jadi Bupati, tapi yang akan kita <i>pressure</i> terus itu adalah kinerja dan kemampuannya... Dan itu sedang berjalan...	Elit politik; Bupati/Wakil Bupati.	Melakukan <i>pressure</i> terhadap kebijakan Bupati/Wakil Bupati yang tidak berpihak pada rakyat.	1	Idealisme; <i>Pressure groups.</i>
122	Nadri	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	Sebetulnya ruangnya bukan tertutup sama sekali, tapi malu-malu... Karena beberapa sudah mereka sadari ya... Saya lihat itu... Mereka punya <i>think tank</i> ... mereka punya komunitas-komunitas yang memang Ring 1 mereka, mulai mereka mendekati kita... Tapi caranya masih recehan gitu... Lah memang kita ini disangka apa? Kalau mau <i>fair</i> aja dong, duduk bareng...	Elit politik; Bupati/Wakil Bupati.	Dalam pertemuan-pertemuan informal dominasi ada di tangan Bupati/Wakil Bupati. Menginginkan dialog yang terbuka saja.	1	Resistensi politik; Kooptasi; Dialog tertutup; Dialog publik; Konsensus; Klaim politik; Justifikasi; <i>Fairness.</i>

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
123	Nadri	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	(Buat masyarakat yang tidak tergabung dalam partai, apa yang bisa dilakukan, seperti Forum Konstituen itu?) Kita konsolidasi terus, karena Forum Konstituen itu kan banyak komunitas-komunitasnya. LSM-LSM... jadi orang-orang dalam Forum Konstituen ini juga ada di komunitas-komunitas... jadi ini yang kita konsolidasi, untuk melakukan <i>pressure</i> , <i>bargaining</i> tadi ya terhadap kebijakan. Mendapatkan posisi itu saya kira... dan sekarang sedang berlangsung, walaupun belum optimal...	FK: Konstituen non partai politik.	Membangun konsolidasi komunitas-komunitas untuk melakukan <i>pressure</i> dan <i>bargaining</i> dengan penguasa.	1	Konsolidasi <i>civil society</i> .
124	Nadri	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	Kalau evaluasi dua tahun pemerintahan kita sudah punya rencana, kalau satu tahun belumlah... Kita juga harus objektif... tapi kalau dua tahun cukup pas, itu akan tergiring dengan sendirinya, karena rekan-rekan kita dari komunitas-komunitas itu juga sudah merasakan bahwa sebagai indikasi saja bahwa akan lebih baik, itu tidak ada... Sekarangkan masuk tahun kedua, tentu-tentu sudah masuk agenda kita... meskipun itu masih dalam diskusi ya...	FK; Birokrasi.	Perlunya FK melakukan evaluasi terhadap pemerintah daerah.	1	Evaluasi kinerja pemerintah.
125	Ali	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	Kita juga ada muatan politik, tidak ada di ruang hampa... Termasuk juga FK, yang perlu saya jelaskan bahwa ada tarik menarik kepentingan juga disitu... bukan hanya di kawan-kawan yang leading disitu, tapi kawan-kawan lain juga punya kepentingan yang lain disitu... Tapi yang ingin kita dorong kan tadi, pembangunan karakter politiknya... itu yang harus jadi pembelajaran... pendidikan politiklah kalau bagi kami... Termasuk juga di Putaran Kedua itu kan kita juga dorong Kang Kusnadi nih... itu juga kita gunakan...	FK; Kontestan Pilkada.	Peserta FK juga tidak homogen, ada yang berpartai dan non partai. Tapi FK ingin melakukan pendidikan politik buat semua pihak.	1	Kepentingan politik; Karakter politik; Pendidikan politik.
126	Ali	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	Termasuk yang tadi itu, "Raport Merah", itu sebagai upaya kita mendelegitimasi lawan politik kita... dengan upaya-upaya pengukuran kinerja secara kualitatif dan kuantitatif...	Bupati sebelumnya.	Penyusunan "Raport Merah" sebelum Pilkada, adalah bentuk upaya mendelegitimasi pengaruh Bupati sebelumnya.	1	Delegitimasi politik; Kinerja pemerintah.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
127	Ali	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	Itulah tadi, ruang-ruang kosong sebetulnya banyak yang belum diisi, ... ruang kosong yang tidak diisi partai ataupun kekuatan lain... Kita inikan lebih banyak pada pemula ya, sampai sekarang juga begitu... lebih banyak anak muda, mahasiswa... yang selama ini juga belum tersentuh... Kita ini anggap suatu saat akan jadi potensi kekuatan politik kita... Kalau yang <i>kolot-kolot mah sudah lapur</i> Kang... sudah terbentuk itu...	FK; Pemuda; Mahasiswa; Pemilih pemula; Pemilih non partai.	FK banyak menggarap "ruang kosong" yang tidak digarap oleh partai. Harapannya itu merupakan pendidikan politik sekaligus investasi politik di masa depan.	1	Ruang publik; Pemilih muda.
128	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	Jadi menurutku ya memang kita berangkat dari berangkat demokrasi politiklah, PemiluKada... Itu jadi wahana bagi warga untuk bisa "bernegosiasi", dalam arti gimana masyarakat bisa mengetahui kredibilitas si calon, ya termasuk visi-misinya lah... Karena waktu dialog itu ditayangin, bahkan dibuat profil, bagaimana semua calon di profilkan, visi-misinya apa, latar belakang juga... Lalu ada tabloid kita buat, itu disebar pasca dialog Forum Konstituen itu dilakukan...	Kontestan Pilkada.	FK masuk di ranah demokrasi politik, dengan menguji kredibilitas kandidat dan mensosialisasikannya ke masyarakat.	1	Demokrasi politik; Dialog publik; Kapasitas dan kredibilitas kontestan Pemilu; Sosialisasi.
129	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	Karena ada beberapa tahapan, pertama konsolidasi internal dalam rangka menentukan <i>assessor</i> di masing-masing wilayah... Kan ada 31 kecamatan, jadi tiap kecamatan ada satu <i>assessor</i> untuk mencari <i>credible source</i> , atau tokoh setempat yang berpengaruh, yang dapat mempengaruhi dinamika di lokalnya, agar sama-sama menilai kandidat, dan pada akhirnya mensosialisasikan kemudian siapa yang layak menjadi pimpinan di Kabupaten Bandung.	<i>Assessor; Credible source.</i>	Kegiatan FK diawali dengan konsolidasi dan melakukan <i>assessment</i> untuk mencari <i>credible source</i> di komunitas-komunitas.	1	<i>Credible source.</i>
130	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	Kemarin itu, pasca Pilkada memang tidak terwadahi Forum Konstituen ini... Kemarin kita hanya sampai Musrenbang pembahasan RPJMD. Karena mempengaruhi substansi RPJMD itu merupakan tindak lanjut dari Forum Konstituen secara keseluruhan... Jadi substansi yang ingin dipengaruhi adalah visi misi atau konsep pembangunan Pemda... Walaupun setiap calon inikan visi misinya adalah agenda pembangunan lima tahun mereka. Kita tahu bahwa, visi misi calon inilah yang akan mewarnai RPJMD. Tapi harapan kita memang adalah kita bisa terus terlibat... karena proses selama ini proses perencanaan dan penganggaran ini tidak pernah dibuka...	FK; Pemerintah daerah.	Selanjutnya FK berupaya mempengaruhi visi, misi dan konsep pembangunan pemerintah daerah dalam RPJMD.	1	Advokasi/ mempengaruhi kebijakan; Transparansi (dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
131	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	Memang seharusnya keberadaan Forum Konstituen ini kalau menurut saya yah, bagaimana pemerintah daerah ini memandang diperkuat posisinya, karena secara historis dari awal, dia memiliki jejak yang cukup bagus... termasuk dalam hal kompilasi agenda-agenda pembangunan. Nah Forum Konstituen kan punya kompilasi itu dari setiap kandidat. Artinya, siapapun yang terpilih, dari beberapa agenda pembangunan yang muncul dari beberapa kandidat, harapannya ini diakomodir gitu... Itu tujuannya... Jadi, kita meyakini bahwa setiap kandidat itu punya visi yang bagus, agenda pembangunan yang bagus pula, kita perlu mengkompilasi itu sehingga bisa diterjemahkanlah oleh siapapun yang terpilih...	FK; Kontestan Pilkada.	FK memiliki "historis" yang bagus, dan memiliki kompilasi agenda atau janji yang ditawarkan semua kandidat pada saat kampanye.	1	Mengawal agenda pembangunan.
132	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	Tapi misalkan tahun 2015 ada Pilkada lagi, Forum Konstituen pasti bangkit kembali... Wilayahnya disitu... Kalau menurut saya begitu... Sebetulnya di Pilgub dan Pileg semestinya begitu... Artinyakan kita memfasilitasi setiap kandidat pada akhirnya... Mengapa memfasilitasi? Ya intinya bagaimana menjaga komitmen...	FK; Kontestan Pilkada.	FK akan bergerak intensif pada moementum Pilkada.	1	Arena politik (Pemilu/ Pilkada).
133	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	Kita di Forum Konstituen juga membuka diri, bahwa di Forum ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat... Dari FDA, PSDK, NU, organisasi-organisasi lain... Nah yang sulit justru konsolidasi di situnya. Kalau Pilkada kan jadi trend isu bersama ya. Nah kalau sudah masuk ke wilayah pembangunan, ada organisasi yang kurang <i>ngeh</i> , apalagi pada isu anggaran misalnya... Nah harapannya memang Forum Konstituen dapat masuk mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran...	FK; <i>Civil society</i> .	Keragaman latar belakang peserta FK membuat konsolidasi menjadi lebih sulit dilakukan. Pemilu/Pilkada menjadi momentum bersama yang menyatukan. Setelah Pilkada, FK lebih diarahkan mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran.	1	Inklusifitas; Plural; Kendala (konsolidasi)

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
134	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	Nah kalau dalam konteks pengawasan pembangunan, kita juga menyadari bahwa organisasi lain juga sibuk dengan urusannya... Tapi agenda Forum Konstituen ini pada dasarnya dijalankan oleh masing-masing organ yang selama ini berinteraksi... oleh FDA, PSDK, dan lainnya... Karena mau tidak mau gagasannya berawal dari situ, maka kita berkomitmen menjalankan apa yang sudah menjadi agenda Forum Konstituen... Tapi kalau ada undangan dari Pemda misalnya ke Forum Konstituen, tetap ada kawan dari kita yang mewakili... Ya prinsipnya agenda Forum Konstituen meskipun konsolidasinya kurang tidak serta merta agenda itu tidak dilakukan, karena gagasan dalam Forum Konstituen itu kan gagasan advokasi kita-kita juga, mau tidak mau, ada atau tidak ada Forum Konstituen, agenda-agenda itu tetap dijalankan...	FK; Civil society.	Agenda FK dibentuk dari agenda-agenda "anggotanya". Agenda tersebut tetap dilaksanakan baik oleh masing-masing "anggota" maupun oleh FK.	1	Agenda taktis-strategis.
135	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	Mungkin konsolidasi lagi bisa untuk mengangkat isu LKPJ tahun 2011, mungkin akan ditempatkan disitu. Mungkin FDA yang akan mengeluarkan hasil analisisnya, dan Forum Konstituen ini yang akan <i>ngepres</i> ke Pemda... Kita memang perlu mempertimbangkan hal-hal taktis – strategis dari agenda advokasi kita... Kapan ini dimunculkan, kapan itu disimpan... Tetaplah... Karena bagaimanapun Bupati juga punya historis dengan Forum Konstituen... Nah kalau nanti FDA membuat analisis tentang kinerja dia, apakah nanti biru merah atau hitam, itu nanti Forum Konstituen yang bisa menyuarakan... Nah, ini jugakan dalam rangka bagaimana <i>re-grouping</i> kembali kawan-kawan yang tergabung dalam Forum Konstituen... Untuk tetap merawat jaringan yang telah terbangun di Forum Konstituen...	FK; <i>Civil society</i> ; Pemerintah daerah.	LKPJ 2011 kemungkinan menjadi arena konsolidasi FK.	1	Organisasi taktis-strategis; Agenda taktis-strategis; <i>Networking</i> ; Kontrol/evaluasi kinerja pemerintah.
136	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	Kalau di awal kan ada FGD... di tujuh titik... konsolidasi awal, lalu kemudian konsolidasi kedua... baru pertemuan dengan kandidat itu... Karena ini berbasis wilayah, jadi diskusinya bisa beberapa isu atau sektoral di wilayah itu... Kalau pada akhirnya ketika di Forum Konstituen, mereka jadi terintegrasi pada isu-isu tertentu... Yang pendidikan ya di Komisi Pendidikan... yang kesehatan di kesehatan... Sebetulnya di luar Forum Konstituen itu kita juga sering komunikasi... Tapi kemudian itu dibingkai dalam isu demokrasi politik di Forum Konstituen ini...	FK; <i>Credibile source</i> .	Diskusi warga mengenai masalah komunitas dan kabupaten. FK menjadi bingkai dari diskusi-diskusi sejenis sebelumnya.	1	Diskusi isu atau masalah riil.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
137	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	Memang jadi prinsipil diskusinya... karena memang kan yang terlibat disitu istilahnya orang-orang yang <i>credible</i> di wilayahnya... Jadi baik sektoral maupun teritorial, cara pandang para kandidat jadi ada yang terbantahkan, ada yang diiyakan oleh konstituen. Tapi memang jadi positif ya, misalkan ketika ada salah satu dari kawan di Forum Konstituen menilai bahwa pandangan salah satu kandidat itu rancu... Itu jadi pertimbangan juga bagi si kandidat...	FK; <i>Credible source</i> ; Kontestan Pilkada.	Dialog kandidat dan konstituen di FK berlangsung substantif, dan dapat memberi masukan juga ke kandidat.	1	<i>Credibel source</i> ; Adu argumentasi (warga dan kontestan Pilkada).
138	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	Kita memang di Forum Konstituen tidak mengarahkan bahwa si ini jelek, si ini baik... ngga gitu... Ya pada akhirnya kita membuka ruang itu, silakan nilai masing-masing, silakan kritisi masing-masing, lalu kemudian mau memilih ya silakan pilih masing-masing... karena ini ruang kita bersama...	FK; <i>Credible source</i> ; Bupati/Wakil Bupati.	FK netral, tapi <i>credible source</i> yang terlibat dialog dapat menilai, memilih dan mengkampanyekan sendiri pilihannya di komunitas atau lembaganya sendiri.	1	Konsensus (tidak membuat kesepakatan soal kandidat Pilkada yang akan di dukung)
139	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	(Pertemuan dengan calon cuma sekali. Memadai?) Ya itu yang kurang... Jadi kedekatan emosionalnya itu yang kurang... Kurang... Bahkan di sini kan ada 7 daerah pemilihan, ya Forum Konstituen itu baiknya di ke 7 daerah tersebut... Pertama, dari sisi biaya politik, buat mereka (kontestan Pilkada) yang memiliki kredibilitas, itu tidak akan terlalu mahal, gitu ya... Karena dia sudah terbangun opininya, sehingga <i>cost</i> politiknya juga jadi lebih efisien... Pertama itu, kita ingin membantu kandidat agar tidak terlalu menghalalkan proses politik ini dengan uang gitu... Walaupun pada akhirnya ya tetep berjalan ya... Kita tahulah itu, bahwa dari masing-masing kandidat sama, melakukan hal itu... Tapi paling tidak, opini di publik yang kami ingin bangun...	FK; Kontestan Pilkada.	Dialog kandidat dan konstituen hanya sekali dirasa kurang. Sebaiknya dapat dilakukan di 7 daerah pemilihan di Kabupaten Bandung.	1	Kredibilitas politik; Opini publik; Politik transaksional.
140	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Menurut saya yang kelewat kemarin itu adalah tidak adanya kesepakatan tertulis dari calon-calon yang jadi, mandat-mandat ke si calon dari Forum Konstituen itu dijalankan... Jadi ada kekuatan ketika sudah berjalan Bupati itu untuk kita menagih janji-janjinya... Janji-janji itu kan cuma dalam pidato... itu nggak ada semacam MoU kan...	FK; Kontestan Pilkada; <i>Credible source</i> .	Kekurangannya karena tidak ada MoU antara kandidat dengan konstituen.	1	Konsensus (tidak membuat kontrak politik).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
141	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Kalau kemarin juga sih, kurang representatif pesertanya... Contoh, dari tiap kecamatan, yang diambil itu hanya tokohnya saja gitu kan... Yang ada pengaruh di kecamatan... Kalau perlu Forum Konstituen seperti itu jangan hanya sekali gitu kan... atau hanya di satu daerah, kemarin kan hanya di Baleendah... harusnya di tiap kecamatan ada... Ya tapi mungkin karena <i>resource</i> -nya kurang ya... Itu per kecamatan lebih melibatkan kecamatan, itu lebih melibatkan masyarakat ya. Kalau per kecamatan pesertanya 100 orang saja, itu lebih representatif dari masyarakat...	FK; <i>Credible source</i> .	Peserta FK kurang representatif karena hanya melibatkan tokoh. Pelaksanaan dialog dengan kandidat yang hanya sekali juga dipandang kurang.	1	Inklusivitas (peserta 'hanya' tokoh dan terbatas jumlahnya).
142	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Kalau saya lihat itu ada di Forum Konstituennya, tinggal kita merancang saja, untuk ke depannya siapa sih yang pantas untuk memimpin di Kabupaten Bandung... sebelum dia jadi Bakal Calon ya... Ya kita undang saja, dua tahun sebelum Pilkada... kita undang di kecamatan misalnya... Ya itu yang masa penjajaganlah... dari situ masyarakat lebih obyektif melihat si calon...	FK; Kontestan Pilkada.	Ada baiknya FK melakukan dialog dengan orang atau tokoh yang potensial mencalonkan diri dalam Pilkada di tiap kecamatan. Jadi dialog dilakukan sebelum ada penetapan calon Bupati/Wakil Bupati.	1	Dialog dengan partai politik (dalam menentukan kriteria / individu calon).
143	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Mungkin belum pernah juga gitukan, kita konsolidasi terhadap partai-partai terkait pendalaman calon untuk ke depan... jadi kalau mereka nanti punya calon sudah memenuhi kriteria yang kita inginkan... Itu memang lebih baik kalau menurut saya... Contoh mulai dari sekarang si Forum Konstituen mengadakan konsolidasi ke partai-partai, gitu kan... Jadi biar ke depannya itu si Forum ini tidak harus terpengaruh oleh politik transaksional tadi itu kan... karena sudah tahu... Nah ini yang mungkin belum dan... ya ini mungkin nggak dilakukan?, gitu kan pertanyaanya... Kalau mungkin, seperti apa gitu...?...	FK; Partai politik; Bakal calon Kepala Daerah.	FK dapat juga melakukan dialog dengan partai-partai politik mengenai kriteria-kriteria sebelum partai tersebut menetapkan calon atau kandidat dalam Pilkada.	1	Dialog dengan partai politik (dalam menentukan kriteria / individu calon).
144	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Ya sempet sih dibicarakan di teman-teman... misalnya kalau di tiap kecamatan ada radio komunitas kita kan bisa masuk kesana... Kalau lebih jauh ke media nasional, kan itu lebih massif-lah... Kemarin itu juga sempet bikin tabloid-lah... Kita sebar, cuma ya terbatas juga... Ya memang keterbatasan kalau FK itu...	FK; <i>Credible source</i> ; Masyarakat.	Pemanfaatan media oleh FK masih terbatas.	1	Media sosialisasi.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
145	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Kalau yang kemarin, mungkin kalau dia itu guru honorer, yang dia aspirasikan saja soal pendidikan itu... karena mungkin kalau dia bahas isu lingkungan ya kurang paham juga ya... begitu kalau kemarin... Tapi kalau saat diskusi sih yang lain juga bisa komentar dan kasih masukan ya... Tapi untuk ngomong secara mendalam soal lingkungan kan susah... seperti misalnya Bung itu guru, tapi korban banjir, itu sektoral kan... bukan secara luas soal kabupaten... Jadi harus aktivis lingkungan yang bicara seluas, bukan sektoral... tapi mengakomodir masukan-masukan dari kawan-kawan lain... Itu begitu proses kemarinlah...	FK; "Anggota" FK.	Dalam diskusi di FK semua bisa berpendapat untuk semua isu, tapi kemudian dikelompokkan dalam kelompok isu sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing.	1	Harmonisasi (isu); Pembagian peran.
146	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Proses diskusi kemarin ada kepanitiaan itukan FAB dan PSDK... Kalau beberapa kali diskusi yang sebelum dialog kandidat di Telkom itu, ada diskusi dengan tokoh dari tiap kecamatan... lalu ada diskusi tokoh dari desa-desa... Kita di komisikan, ada komisi lingkungan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur... Nanti di presentasikan, di plenokan... Orang yang diskusi di tiap komisi campur juga sih ya, bukan pendidikan semua orang pendidikan gitu... Silakan ajah, konstituen ini yang memilih... karena nggak semua guru juga yang kita undang, dan tidak semua aktivis lingkungan kita undang... jadi ya terserah mereka saja, merasa cukup tahu dan berminat di mana... Yang mandu diskusi ya panitia... ya yang dari PSDK lah kebanyakan... Waktu diskusi itu rame ya... waktu pas Komisi rame perdebatannya... lumayan alot yang saya lihat mah...	FK; FAB; PSDK.	Proses diskusi di internal FK berlangsung dinamis.	1	Diskusi (analisis dan perumusan isu di FK).
147	Ihsan	L	FK	Wwcr, 19 April 2012	Nah pada FK I di Telkom waktu ketemu calon-calon itu, saya menyampaikan mengenai perlunya pembenahan birokrasi pemerintahan... Juga mengenai pengamanan hutan, dan soal guru honorer... Sekarang itu menjadi kebanggaan buat Pak Ihsan, Pak... Karena dalam misi pertama Kabupaten Bandung di RPJMD adalah meningkatkan profesionalisme birokrasi... Kira-kira sejalan dengan apa yang saya harapkan tadi itu...	FK; Kontestan Pilkada.	Masalah yang disampaikan dalam dialog dengan kandidat beberapa diantaranya terakomodir dalam RPJMD.	1	Dialog (dengan kandidat Pilkada).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
148	Ihsan	L	FK	Wwcr, 19 April 2012	Jadi setiap ada kesempatan nama FK selalu saya... Demi Allah!, selalu saya bawa... Seperti ketika rapat di UPTD Cilengkrang, saya sampaikan, "Bahwa masyarakat di Kabupaten sudah punya forum masyarakat sipil, sehingga apabila kalian punya uneg-uneg, itu boleh disampaikan...". Pernah juga Pak Ihsan diundang BEM Unpas... kebetulan ada anggota DPR Pusat dan DPRD Provinsi... saya sampaikan juga soal keberadaan FK... bahwa di Kabupaten Bandung sudah memiliki Forum Konstituen bagi masyarakat sipil di Kabupaten Bandung...	FK; Lembaga lain.	Keberadaan FK kerap disosialisasikan dalam berbagai forum lain.	1	Sosialisasi (ke publik).
149	Ihsan	L	FK	Wwcr, 19 April 2012	Dari pertemuan-pertemuan FK, yang menjadi daya tarik buat Pak Ihsan, dalam diskusi-diskusinya itu selalu hidup... ada pandangan dari sini, ada dari situ... Sehingga Pak Ihsan merasa mencintai forum ini...	FK.	Diskusi di FK dinamis.	1	Diskusi (FK).
150	Ihsan	L	FK	Wwcr, 19 April 2012	Menjadi kebanggaan tersendiri karena FK bukan seperti lembaga yang "Tuk-Cing", dalam bahasa kampung... Bahkan kalau ada hal-hal penting dari FK itu saya simpan catatannya... Hanya belum bisa melangkah di luar kecamatan secara formal... <i>Mangkanya</i> saya mengharapkan, baik formal ataupun tidak formal, ada nama FK, ada pertemuan di Kecamatan Cileunyi... Nanti bisa koordinasi dengan Pak Camat... Posisif FK, Pak... <i>Resep'</i> saya ikut FK...	FK.	FK bukan lembaga yang dibentuk lalu diam.	1	Dialog di tingkat lokal (FK); Perluasan arena (FK).
151	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Waktu itukan ada dialog dengan calon... Forum Konstituen waktu di Telkom. Kalau kita melihat FK itu sebuah gerakan yang menarik, karena kalau Kabupaten Bandung ini kabupaten yang unik, dan memiliki kompleksitas tertentu. Karena itu tokoh-tokoh Jawa Barat selalu berebut mengumpulkan suara disini... Termasuk tokoh-tokoh nasional ya...	FK; Tokoh-tokoh politik.	Kabupaten Bandung menjadi ajang perebutan suara dalam Pemilu oleh tokoh-tokoh politik nasional.	1	Gerakan (FK); Geopolitik (Kabupaten Bandung).
152	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Ya cuma yang memang jadi problem, ruangnya menjadi terbatas karena persoalan waktu... jadi ya karena terbatasnya waktu, dan balapan dengan agendanya KPU, jadi ya cuma beberapa kali yang bisa dilakukan... Dan dibandingkan dengan jumlah pemilih Kabupaten Bandung yang lebih dari 2 juta itu, ya memang ini masih memerlukan pekerjaan panjang ya... Memang karena hanya sekedar di Pilkada, walaupun yang dilakukan itu memang berbeda dari yang lain karena lebih konstruktif, lebih menggali pada kesadaran konstituen, dan akan membongkar kemampuan individu calon, tapi memang harus dilanjutkan juga pasca Pilkada...	FK; KPU; Masyarakat.	Kegiatan FK di sekitar Pilkada lalu masih terbatas dan belum menjangkau banyak masyarakat lainnya. Perlu terus dilanjutkan pasca Pilkada.	1	Ruang dialog; Partisipasi warga (dalam dialog); Keberlanjutan (FK)

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
153	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Akhirnya peran yang harus dimainkan Forum Konstituen itu kan bagaimana menyadarkan warga masyarakat dari tadinya transaksional menjadi lebih benar dalam menentukan pilihan... Jadi memang memerlukan kerja keras... Bagaimana peran kemitraan yang bisa dimainkan Forum Konstituen dengan berbagai Ormas... Karena terus terang, Ormas yang ada saat ini hanyalah sebagai alat mobilisasi juga...	FK; Organisasi kemasyarakatan	Organisasi kemasyarakatan lainnya banyak yang hanya jadi alat mobilisasi politik.	1	Kemitraan (FK dan organisasi kemasyarakatan); Mobilisasi politik.
154	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Mangkanya ini bagaimana memperluas jaringan atau <i>networking</i> dari Forum Konstituen, bagaimana kita perluas kemitraan itu. Dan saya kira setelah kuat jaringan konstituen ini, baru kita bisa melakukan perbaikan secara bertahap. Sehingga mereka ada tanggungjawab bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah sesuatu yang jahat buat bangsa ke depan... Saya kira, dalam sosialisasi politik itu, peran tokoh begitu besar... termasuk peran kyai.	FK; Jaringan politik.	FK perlu memperluas jaringan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk memperluas upaya pendidikan politik rakyat.	1	Networking; Kemitraan; Sosialisasi politik; Tokoh masyarakat (dalam pendidikan politik).
155	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Semangat-semangat politik baru, yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan, rakyat kita dorong lebih berani membangun <i>civil society</i> yang kuat...	<i>Civil society.</i>	Perlu membangun <i>civil society</i> yang kuat.	1	Kedaulatan rakyat; <i>Civil society.</i>
156	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	(Konkretnya apa yang bisa dilakukan FK ke depan?)Selain dari berbicara waktu ya... perlu seringnya dilakukan itu... intensitas ditambah... juga perlu ada kampanye di awal tentang bahan dan materi untuk menjadi tema pembicaraan yang lebih terfokus kepada ruang-ruang pembelajaran politik itu... Jangan ada estimasi tinggi bahwa rakyat sudah mengetahui... Jadi harus ada <i>guidance</i> , sehingga disana nanti akan tergali... Ibarat mengeksplorasi tambang, yang dieksplorasi bukan cuma yang di permukaan, tapi juga di kedalamannya, agar diperkirakan apa yang bisa diperoleh dari tingkat kedalaman itu... Karena nanti bisa seperti KPUD, yang asal gugur kewajiban saja... sudah membuka ruang kampanye, debat, calon menyampaikan pemikirannya, lalu ya sudah... sudah sesuai dengan UU, ya selesai tugas saya, masalah sampai terserah ke masyarakat atau tidak itu tidak penting ...	FK; Konstituen; KPUD.	Pendidikan politik perlu desain, bahan-bahan dan pelaksana yang baik.	1	Model pendidikan politik (FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
157	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Forum Konstituen itu perlu ada beda disitu... Jadi perlu <i>guidance</i> ... Sehingga paling tidak kalau kita sudah memiliki estimasi kedalaman materi yang akan dipelajari itu, seandainya keluar dari <i>track</i> , tidak akan terlalu jauh keluarnya itu... Jadi tetap kita <i>on the track</i> gitu... jadi geser-geser dikit wajar bagi kita dalam mengendalikan sebuah acara seperti itu... Tapi paling tidak, moderator disitu tidak terlalu terjebak terlalu jauh sehingga dia tidak dapat mengendalikan kemana arah ruang diskusi itu... Dengan pengarahan lebih awal ini, si peserta itu yang kita akan ajak berdiskusi di FK itu sudah punya bekal... Baru disana kita bisa mengukur sejauhmana kemampuan si kandidat ini untuk mengelaborasi pertanyaan atau kritik dari konstituen...	FK; Konstituen; KPUD.	Pendidikan politik perlu desain, bahan-bahan dan pelaksana yang baik.	1	Model dialog publik (FK).
158	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Disitu baru dapat diuji kecerdasan si calon dalam menangkap inti masalahnya, sehingga tidak jawaban isu... Apalagi yang jawabannya aneh kayak gitu, yang tidak ada dasar apa-apa dia bilang, " <i>Pokoknya kalau saya jadi Bupati, satu desa akan diberi 2 milyar...!</i> ". Dari mana hitungannya itu? Desa disini ada 273 desa... darimana duitnya untuk ngasih segitu?. Katanya, " <i>Kalau tidak begitu bukan Bupati!</i> ". Ada tuh ngawur begitu... Nah calon yang tadi bilang 2 milyar tadi itu mungkin bahkan ngga tahu besaran APBD Kabupaten Bandung sesungguhnya... Mangkanya Forum Konstituen seharusnya mendesak, disana akan terukur nanti kandidatnya...	FK; Kontestan Pilkada.	Kandidat Pilkada juga ada yang melontarkan gagasan tanpa pemahaman mengenai aspek politik dan kebijakan.	1	Model dialog publik (FK).
159	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Yah harus ada bekal-lah menurut saya bagi peserta... dibekali di awalnya, sehingga sudah sedikit ter- <i>setting</i> tapi ke substansi... Sebab <i>setting</i> -an yang dari Forum Konstituen tentu beda dengan <i>setting</i> -an yang dari KPUD. Akhirnya konstituen itu malah bisa terbantu, " <i>Oh iya ya...</i> ", kan begitu... Dengan catatan, itupun tidak menjadi menjamin bahwa mereka akan memilih si kandidat tersebut... Kalau dalam praktisnya tidak begitu juga... Tidak semata-mata dia paham terus dia juga milih... Karena hal-hal pragmatis juga masih dominan...	FK; Kontestan Pilkada.	Pengetahuan yang memadai tentang kandidat dalam Pilkada tidak otomatis membuat warga memilihnya, karena ada faktor-faktor pragmatis lainnya.	1	Model dialog publik (FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
160	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Itu cukup memberi manfaat ya... Hal-hal seperti Forum Konstituen ini kan memberi hal yang menarik ya... yang jarang... Karena ruangnya cukup terbuka, penyelenggaranya adalah masyarakat, sehingga disana, apalagi kalau rakyat sudah dibekali, rakyat akan lebih mampu mengelaborasi gagasan pemikiran dari kandidat ketika mereka akan tampil di ruang politik...	FK; Kontestan Pilkada.	FK penting dan bermanfaat sebagai pendidikan politik. Sebaiknya tidak hanya pada saat Pilkada saja.	1	Inklusivitas; Inisiatif; Kapasitas komunikasi/ dialog (FK).
161	Setiawan	L	FK	Wwcr, 17 April 2012	Roadshow... pertama disini Baleendah, kedua di Pangalengan tempat Pak Kades, terus Pasir Jambu tempat Pak Edi... Setelah Telkom itu kita masih diskusi-diskusi kecil kok...	FK; Pegiat FK.	Diskusi FK dilakukan beberapa kali di tempat pegiat FK di beberapa wilayah.	1	Diskusi komunitas.
162	Yana	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	Kalau untuk ke depan, acara dialog calon seperti di Telkom perlu diupayakan semua calon bisa hadir... Waktunya juga perlu ditambah, karena kemarin itu terasa singkat ya waktunya... Jadi kita mau mengeluarkan apa yang ingin disampaikan tidak tercapai ya kalau cuma 1 hari. Mungkin ke depannya bisa lebih baik ya, kalau 1 hari 1 calon kan ngga mungkin juga ya, biayanya gimana nih?... Terus saya juga kurang suka, ketika ada calon yang ditanyakan A tapi menjawabnya B ya... <i>Nggak nyambung...</i>	FK; Kontestan Pilkada.	dalam dialog FK dengan kandidat pada Pilkada ke depan semua calon perlu diupayakan hadir, dan dialog tidak cuma sekali.	1	Model dialog (gagasan); Kapasitas komunikasi/ dialog 9kontestan Pilkada).
163	Titi	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	FK ya itu kegiatan dari masyarakat, untuk mencari tahu calon pemimpin itu seperti apa, bagaimana gitu... Otomatiskan merekakan bisa banyak mendapat masukan... Oooo mereka maunya begini, seperti ini... Ya untuk mencari sosok pemimpin yang bijak, yang baguslah...	FK; Kontestan Pilkada.	FK sebagai sarana mengenal dan menguji calon pemimpin di daerah.	1	Interaksi warga dan politisi; Dialog politik (tujuan FK).
164	Titi	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	FK lebih baik sih dari pola-pola kampanye partai dan KPU... Waktu di Telkom, ada diskusi-diskusi... Semua calonkan dipanggil, menyampaikan gagasan, argumen dan visi-misi mereka, dan ditanggapi atau dikritisi oleh masyarakat... Tapi kenyataan sih yang terpilih ya itu-itu juga... Belum ada yang riil dari yang dia ungkapkan...	FK; Kontestan Pilkada; Bupati/Wakil Bupati.	Kampanye dialogis model FK lebih baik dari kampanye pada umumnya. Hanya hasilnya belum seperti yang diharapkan.	1	Interaksi warga dan politisi; Dialog politik (model dan dampak).
165	Titi	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	FK itu ngga selalu harus saat Pilkada saja kalau menurut saya... Jangan sampai hanya berhenti sampai disitu, perlu keberlanjutan... Terkesan jadi sebatas untuk Pilkada aja gitu... Padahal itu masih ada kerja-kerja juga yang diperlukan... Bisa pengawasan dan evaluasi ke Bupati juga... apakah dapat menjalankan janji-janjinya? Terealisasi nggak?... Monitoringlah gitu... Penting juga sih...	FK; Bupati.	FK saat ini perlu melakukan pengawasan atas realisasi janji kampanye Bupati terpilih.	1	Peran FK (pasca Pilkada).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
166	Sari	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	(Kalau sekarang ini mau dijalankan lagi apa yang realistis bisa dilakukan?) <i>Nya' anggota na terkonsolidasi dengan baik we... Pang-pang na di na pendidikan keorganisasian na... Jangan hanya pas Pilkada saja...</i>	FK.	FK perlu konsolidasi dan pendidikan keorganisasian bagi anggotanya.	1	Konsolidasi; Partisipasi (FK).
167	Sari	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Pelatihan <i>heula</i> anggota <i>sigana mah...</i> Kalau mau mengerjakan program bareng pihak lain kan perlu disamakan <i>heula</i> persepsi <i>na...</i> <i>Ulah jiga</i> seperti Forum DAS yang setelah ada proyek malah rebutan diantara anggota <i>na'...</i>	FK; Forum DAS.	FK perlu pelatihan untuk menyamakan persepsi.	1	<i>Capacity building</i> (FK).
168	Sari	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	FK <i>pan</i> masih diakui <i>ku</i> kabupaten... FK bisa menagih janji Bupati waktu Pilkada kamari... Bikin kesepakatan <i>deui jeung</i> Bupati yang menguntungkan masyarakat... Menguntungkan bukan dalam arti proyek ya, tapi terkait akses-akses bagi komunitas-komunitas untuk berkembang... Misalkan kan sudah jelas, waktu sebelum dialog dengan calon di Telkom, kita kan diskusi per sektor, nah <i>ayeuna</i> juga FK <i>kudu nyokot isu per sektor oge</i> untuk mengawasi pemerintahan... Misalkan, isu pertanian, pendidikan... <i>eta lain ukur</i> masalah proyek pertanian, tapi misalnya menyangkut pendidikan di tingkatan petani...	FK; Bupati.	FK perlu memperkuat isu beragam sektor, serta memperjelas dan membangun komitmen baru dengan Bupati.	1	Pengakuan (FK); Kontrol terhadap pemerintah (FK); Diskusi dan dialog (FK).
169	Sari	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Tapi <i>pan kudu</i> berbagi peran <i>oge...</i> nggak bisa semua main disitu... perlu <i>oge nu mikirkeun</i> soal logistik gerakan... apalagi kalau ingin FK bisa jalan... Perangkat <i>mah nggeus siap kitu nya...</i> tapi persoalan logistik <i>oge penting nya'...</i> meskipun itu bukan jadi patokan kita berhenti untuk bergerak... <i>Urang ge' loba ngeritik ka barudak, memang he'euh aya'</i> anggarannya, tapi kan <i>aya'</i> hal lain <i>nu kudu urang sorangan lah</i> , lain berarti <i>kudu nungguan iye' ti donor heula cair</i> , he...he... Mungkin beda <i>nya'</i> didikan aktivis <i>ayeuna mah jeung urang-urang baheula...</i> he...he...	FK; Donor.	FK juga perlu memikirkan dukungan logistik untuk aktivitasnya, dan itu tidak berarti harus bergantung pada bantuan donor.	1	Pembagian peran (FK); Swadaya (FK).
170	Sari	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Mungkin anggota-anggota yang beragam sektor dan wilayah itu bisa melakukan penilaian bagaimana pemerintahan baru sekarang ini... pengumpulan data per sektor... di FK ini Tim 9 bisa bikin tim kajian dari sektor-sektor ini... Kalau kemarin konsolidasi jalan, sekarang FK punya laporan dari masing-masing sektor tadi... Jadi pas Musrenbang kemarin juga <i>ngeumah</i> , karena <i>nggeus aya'</i> data, bukan hanya sekedar isu...	FK.	Jika konsolidasi peserta FK jalan, data dan informasi berbagai sektor dapat menjadi bahan pengawasan FK ke pemerintah daerah.	1	Evaluasi kinerja pemerintah (FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
171	Setiawan	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	FK IV itu di Majalaya, yang waktu itu keputusannya kita akan mengundang Bupati, untuk memastikan apa sih garansi Bupati untuk merealisasikan apa-apa yang sudah dijanjikan di masa-masa kampanye.	FK; Bupati.	FK pernah mengundang Bupati untuk memastikan komitmen Bupati terhadap realisasi janji kampanye.	1	Kontrol terhadap pemerintah.
172	Setiawan	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Ada satu lagi, soal pengawalan reses DPRD... Jadi bukan hanya pengawalan kebijakan eksekutif, tapi juga mengawal proses di DPRD khususnya yang berhubungan dengan masyarakat... Malah waktu itu pengen ada Jambore Konstituen segala... Malah pengennya dihadiri sama Bupati dan Menteri...	FK; DPRD.	FK perlu tidak hanya mengawasi kebijakan pemerintah daerah tapi juga DPRD, misalnya mengenai agenda reses di masyarakat.	1	Kontrol pemerintahan (DPRD).
173	Didi	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Berbicara pada kiprahnya FK bahwa FK ini senantiasa terakomodir oleh pihak pemerintahan ketika kita melakukan <i>action</i> kegiatan. Secara sejarah dimulai dari suasana Pilkada pada waktu itu... ketika kita mengundang para calon di STT Telkom... sampai pada diundangnya FK di perencanaan pembangunan tingkat kabupaten. Barangkali mungkin, untuk melakukan sebuah strategi penguatan ke depan, alangkah lebih baiknya jika kita dapat mereview hasil-hasil daripada kegiatan FK, seperti pembahasan RPJMD dan Musrenbang, yang pasca kegiatan itu kita belum tahu seperti apa hasilnya, dan pelaksanaannya...	FK; Kontestan Pilkada; Pemerintah daerah.	Perlu mereview perjalanan FK sebagai strategi penguatan FK.	1	Refleksi (FK).
174	Didi	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Dan kalau kita mau melakukan pemantauan atau pengawasan di ruang mana, <i>ti pelebih mana urang bisa masuk teh...</i> itu juga harus kita petakan... sehingga minimal kita bisa mengawal program-program yang nantinya bisa diaplikasikan di masyarakat atau di tingkat pemerintahan. Karena Alhamdulillah ya suara FK di dengar banyak oleh pemerintahan, dimana ide-ide FK bisa juga dimasukkan ke salah satu program. Pertama, ketika beberapa point usulan kita bisa masuk ke Bupati, atau kebetulan saja ada kesamaan, atau memang sudah harusnya begitu... Tapi saya pribadi juga belum bisa meraba bagaimana pihak Pemkab ini melaksanakan program tersebut.	FK; Pemerintah daerah.	FK perlu memetakan arena dan strategi terkait dengan peran pemantauan pemerintah daerah.	1	Kontrol terhadap pemerintah; Pengaruh (FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
175	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Hanya saja upaya untuk membangun Forum Konstituen ini menjadi sebuah alat yang lebih solid belum bisa kita lakukan. Ya mudah-mudahan moment sekarang ini bisa menjadi sebuah titik balik lagi dalam upaya mengembangkan Forum Konstituen. Mungkin kita juga bisa juga melihat berbagai ruang yang bisa dimasuki, entah itu event politik, proses perencanaan Kabupaten Bandung, dan lainnya.	FK.	Upaya membangun konsolidasi FK belum cukup kuat dilakukan.	1	Konsolidasi (FK); Arena politik.
176	Erman	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Awalnya kenapa perlu FK, tadi pertama iya, karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Kedua, untuk melihat para calon pemimpin di Pilkada, sejauhmana keberpihakan mereka kepada publik. Kemudian masyarakat bisa menyeleksi bagaimana komitmen mereka, karena selama ini tidak ada jajak publik antara calon dengan masyarakat secara langsung berdiskusi, karena yang biasanya hanya kampanye biasa. Jadi masyarakat bisa menilai dan menyeleksi sendiri, tidak hanya dalam konteks kampanye yang penuh slogan. Selanjutnya setelah Pilkada, bagaimana masyarakat bisa mengawal hasil FK itu. Sebetulnya tujuan dari FK ini kan mengawal pemerintahan yang terbentuk, siapapun yang terpilih. Nah itu, sebenarnya bagaimana kita melakukan pengawalan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti dalam perumusan dan pelaksanaan RPJMD. Jadi itu alasan kenapa FK ini dibentuk.	FK; Masyarakat; Pemerintah daerah; Kontestan Pilkada	FK terbentuk karena: (a) Ketidakpercayaan terhadap pemerintahan; (b) Untuk mengetahui profil dan pemikiran kandidat yang tampil dalam Pilkada; © Setelah Pilkada, masyarakat dapat mengawasi dan terlibat dalam perumusan kebijakan daerah.	1	Distrust pada pemerintah; Uji publik (kontestan Pilkada); Partisipasi pada rekrutmen elit daerah; Kontrol terhadap pemerintahan; Partisipasi pada perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan daerah.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
177	Setiawan	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Di lain pihak kita kesulitan mengakses informasi. Selama ini kita hanya melihat dari brosur, pamphlet, spanduk, tanpa ada profil dan informasi <i>track politic</i> yang jelas mengenai para calon. Nah mungkin ini jadi PR bagi FK ke depan, pertama mengawal agenda-agenda yang dikampanyekan oleh Bupati terpilih. Bagaimana menagih janji dia. Karena kita sebagai konstituen, sebagai pemilih mempunyai hak untuk itu. Kedua, bagaimana ke depan ketika ada pemilihan berikutnya, pencerdasan politik masyarakat itu tetap perlu dilakukan. Bagaimana pencerdasan itu dilakukan dengan memberikan informasi sebesar-besarnya, siapa sih para calon itu. Itu yang seringkali tidak ada, sehingga ketika akan memilih itu ujug-ujug muncul calon yang tidak kita kenal, bahkan kita tidak tahu tuh darimana asalnya. Tau-tau udah ada aja tuh poster gede soal pencalonannya... Nah itu menjadi penting, jangan sampai kita beli kucing dalam karung gitu kan...	FK; Masyarakat; Pemerintah daerah; Kontestan Pilkada.	Banyak kontestan Pemilu/Pilkada yang tidak dikenal warga. Warga perlu informasi yang memadai mengenai latar belakang, tawaran gagasan, dan kapasitas para calon tersebut.	1	Akses informasi (tentang kontestan Pilkada); Pendidikan politik.
178	Iman	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Karena tadi yang disampaikan Setiawan soal beli kucing dalam karung itu, sebetulnya masyarakat itu sudah enggan dengan perpolitikan. Pencerdasan politik itu setidaknya membuat masyarakat paham bahwa suara mereka itu jangan ditukar sekedar Rp 25.000 saja, atau ganteng dan tidak ganteng. Tapi masyarakat dapat menilai kualitas calon pemimpinnya, dan muncul kepuasan di masyarakat bahwa mereka mengetahui track records dari tiap calon. Karena partai politik itu hanya memanfaatkan konstituennya sebagai suara saja. Tidak ada pengawalan sampai akhir bahwa masyarakat harus melakukan hal tersebut. Dengan kata lain, partai politik gagal dalam melakukan pendidikan politik ke masyarakat. Nah FK lahir dalam proses itu, bagaimana mencerdasan politik masyarakat.	FK; Masyarakat.	Pendidikan politik untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam memilih: tidak menjual suara; tidak memilih sebatas pertimbangan tampilan fisik calon; mampu menilai kualitas calon; mengetahui latar belakang calon.	1	Apatisme politik; Disfungsi partai politik; Pendidikan politik; Partisipasi; Kontrol terhadap pemerintah.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
179	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Terkait dengan pertanyaan mengapa FK ini terbentuk, ya harus kita akui kan bahwa gagasan ini memang datang dari luar ya. Itu "istilah" yang ditawarkan dari luar ke Kabupaten Bandung. Pertanyaannya kemudian, mengapa teman-teman di kabupaten merasa tertarik untuk mengapresiasi gagasan itu, bahwa selama ini bukan tidak ada alat bagi masyarakat sipil di Kabupaten Bandung yang memiliki orientasi untuk menjalankan upaya-upayanya. Peralatan-peralatannya sudah ada, hanya mungkin konteksnya sektoral atau bersifat lokal. Kemudian yang lain juga proses advokasinya belum masuk di wilayah politik. Karena advokasinya lebih pada advokasi kebijakan, belum juga masuk dalam ikatan politik dengan para penentu kebijakan. Mungkin disitu mengapa kemudian para pegiat yang sebelumnya sudah bergerak di Kabupaten Bandung kemudian merasa bahwa Forum Konstituen itu bisa menjadi alat pemersatu bagi gerakan perubahan yang sebelumnya masih bersifat sektoral dan lokal tadi.	FK; FAB; <i>Civil society</i> .	Gagasan FK dari FAB, yang sejalan dengan kebutuhan dari kekuatan <i>civil society</i> di Kabupaten Bandung untuk masuk ke ruang politik secara langsung di momentum Pilkada. Sebelumnya, mereka lebih banyak bergerak di advokasi kasus, isu sektoral/kebijakan.	1	Kolaborasi (aktiis Kota dan Kabupaten Bandung); Pengembangan jaringan civil society; Pengembangan kerja advokasi; Solidaritas.
180	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Sama hal yang lain, mengenai praktek politik ini kan sebetulnya sudah lama dilakukan prakteknya ya. Kelebihan FK itu ya karena multi sektoral dan dalam proses kita merumuskan apa yang menjadi tuntutan itu juga relatif sistematis, mulai dari assessment, FGD, kemudian juga merumuskan alternatif tindakan. Kemudian juga ada upaya menguji gagasan dengan mengundang pihak lain, seperti dari KADIN, lembaga lain juga...	FK.	FK sebagai wadah yang prural, dan dibentuk melalui proses yang cukup sistematis.	1	Diskusi warga; Dialog (multi stakeholders).
181	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Nah kalau arah ke depan sebetulnya waktu itu juga pernah didiskusikan, bersamaan dengan pembentukan Tim 9 itu. Misalkan dalam konteks diluar pengawasan pemerintahan pasca Pilkada. Bagaimana "memasarkan" gagasan Forum Konstituen di luar konteks pengawasan kebijakan. Waktu itu sempat didiskusikan mengenai kemungkinan mengembangkan Forum Konstituen di kabupaten lain. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengimplementasikan Forum Konstituen ini di tingkat desa. Apakah misalnya di tingkat Pilkades, akan bagus kalau praktek FK ini diterapkan... mungkin dalam format yang lebih sederhana... Itu gagasan-gagasan yang muncul di luar konteks pengawasan pemerintahan...	FK.	Ada gagasan untuk mengujicobakan model FK di tingkat desa (Pilkades), dan di kabupaten lain.	1	Sosialisasi (gagasan dan model FK); Perluasan arena politik (gagasan FK kecamatan dan desa).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
182	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Ada 200 sekian Pilkades lho... Mengutip yang disampaikan oleh Pak Ihsan tadi, yang memandang perlu ada FK di tingkat kecamatan, untuk memperlebar keterlibatan politik masyarakat sampai tingkat kecamatan... Hanya belum terdiskusikan juga soal format pengembangan Forum Konstituen ini...Pak Ihsan dulu malah sudah pernah bikin draft AD/ART ya, he...he	FK.	Gagasan pengembangan Fk sampai tingkat kecamatan.	1	Perluasan arena politik (gagasan FK kecamatan dan desa).
183	Ali	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Sebetulnya banyak gagasan yang belum bisa terlaksana... Benang merah kita dulu itu kan upaya memperbaiki kualitas arena-arena politik sebenarnya... Kalau Pilkada itukan eksekutif ya, artinya bagaimana memilih Bupati... Nah concern kita adalah bagaimana memperbaiki ruang-ruang demokrasi, fase ini kan ada juga satu wilayah yang belum kita mainkan, yaitu legislatif. Legislatif kan itu mereka punya forum-forum berdialog jugakan dengan masyarakat. Yang selama ini kita nilai tidak efisien ya Pak Ihsan? Reses itu kan ngobrol, selesai, bagi transport... Nah FK yang di kecamatan-kecamatan ini kan per Dapil, yang basisnya kecamatan, jadi kalau penguatan itu terjadi, FK juga bisa mempengaruhi bagaimana upaya perbaikan di reses-reses itu, melalui pendekatan pada anggota Dewan, bagaimana reses ini kita modifikasi sedemikian rupa sehingga dialognya lebih berkualitas. Ada hal yang sederhana misalnya, bagaimana upaya Dewan mengawal proses usulan dalam Musrenbang, itu bisa ditanyakan oleh konsituen, mengenai usulan-usulan yang mereka sampaikan, dan sudah menjadi kewajiban Dewan untuk mengawal usulan itu...	FK; DPRD; Pemerintah daerah.	Tujuan FK adalah sebagai upaya memperbaiki kualitas arena politik dan ruang demokrasi di daerah. Sejumlah agenda yang terlaksana, seperti mengawal proses reses DPRD.	1	Arena politik; Ruang demokrasi; Interaksi warga dengan eksekutif dan legislatif; Kontrol terhadap DPRD.
184	Tedi	L	FK	Dialog FK & Wabup, 23 Apr 2012	Assalamualaikum... (doa pembuka)... Alhamdulillah, Forum Konstituen sareng dari UI, di pasihan waktos ku Pak Wakil tiasa tepang di raraga silaturahmi sareng aya' hal-hal nu bade di bewarakeun, sharring... hatur nuhun ka na waktos na... Pak Wakil Bupati, anu simkuring diberi hormat... kalayan rekan-rekan dari Forum Konstituen... Alhamdulillah... Teu seu'eur tapi mudah-mudahan dengan pertemuan ini setidaknya ada hasil... ada share... dengan para pemimpin Kabupaten Bandung... Dan bagaimanapun juga kita sebagian warga Kabupaten Bandung nu kedah ngamumule'... tidak serta merta mengkritisi, tapi minimal masihan pendapat... Eta panginten Pak Wakil... Nu konkrit na, ti Ketua FK, Bung Ali... Salajeungna', mangga...	FK; Wakil Bupati.	Perlunya dialog warga dengan pemerintah daerah.	1	Interaksi warga dan pemerintah.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
185	Tedi	L	FK	Dialog FK & Wabup, 23 Apr 2012	Informal tapi berbobot <i>kitu'</i> lah...	FK; Wakil Bupati.	Dialog informal tapi berbobot.	1	Interaksi warga dan pemerintah.
186	Ali	L	FK	Dialog FK & Wabup, 23 Apr 2012	<i>Assalamualaikum... Langkung ti payun...</i> Saya mewakili kawan-kawan dari Forum Konstituen menyampaikan salam silaturahmi kepada Pak Wakil Bupati. Terima kasih atas waktu yang diberikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua... Mungkin secara formal ataupun informal, sudah 3 atau 4 kali kami bertemu dengan Pak Wakil Bupati... Ini merupakan sebuah berkah bagi kami dalam rangka mewujudkan komitmen, yang seingat saya terbangun ketika pertemuan di STT Telkom... Waktu itu kami bersama masyarakat yang tergabung dalam Forum Konstituen berkomitmen dengan calon Bupati dan Wakil Bupati ketika itu, siapapun yang memimpin kami, kami akan ikut berpartisipasi, ikut mengawal, sekaligus ikut mengontrol, mengkritisi pemerintahan yang akan berjalan ketika itu... Setelah pertemuan kami dengan Tim Perumus RPJMD waktu itu di ruangan ini juga...	FK; Bupati; Wakil Bupati.	FK dan Wakil Bupati telah bertemu beberapa kali baik di forum formal maupun informal.	1	Konsensus (mengawal pemerintahan).
187	Ali	L	FK	Dialog FK & Wabup, 23 Apr 2012	Sudah setahun lebih ini kami bersama kawan-kawan di berbagai kecamatan ini juga ikut mengawal beberapa sisi program, juga ikut kegiatan perencanaan, dari mulai Musrenbang di tingkat desa, kecamatan, sampai dengan kabupaten, kita juga terlibat aktif di penyusunan-penyusunan dokumen perencanaan publik di Bappeda. Nah untuk pertemuan kali ini, dalam kesempatan yang baik ini, kami dari Forum Konstituen ingin menagih janji Pak Wakil Bupati ketika itu kepada kami, kepada masyarakat Kabupaten Bandung, terkait dengan visi misi yang disemangati filosofi orang Sunda yaitu Sabilulungan... Sejauhmana komitmen Pak Wakil Bupati terhadap implementasi dari janji dan kampanyenya ketika itu, dan bagaimana kemajuan dari program-program yang sudah dijalankan.	FK; Wakil Bupati.	FK menagih janji Wakil Bupati terkait pelaksanaan janji kampanye dan visi dan misi pembangunan di daerah.	1	Partisipasi (FK); Nilai-nilai (suku Sunda); Visi da Misi.
188	Okny	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	(Harapan mereka pasca Telkom?) Ini bisa terus berlanjut secara kelembagaan FK-nya... bisa berlanjut terus... panjang... Kemudian secara kinerjanya juga bisa terkonsolidasi dan ada hal konkret yang bisa mereka lakukan... sama mereka punya pengaruhlah di Bupati...	FK; Pemerintah daerah.	Keberlanjutan FK; Pengaruh ke pemerintah daerah.	1	Keberlanjutan; Kohesifitas; Pengaruh.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
189	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	(Kalau FK dapet support dari Pemda gimana?) Kalau untuk FK kayaknya ngga. Biasanya komunitas-komunitas untuk akses APBD... Sebagai warga kabupaten mereka kan juga berhak untuk akses itu... Tapi kalau FK kayaknya belum... Kalau ada lagi kegiatan macam FK kemarin itu mungkin lebih tepat kerjasama dengan KPUD ya... Itu akan lebih efektif ya... Legalitasnya juga lebih pas... Meskipun mereka punya jaringan sampai ke desa/kelurahan, tapi relasi mereka dengan masyarakat kan <i>kadung problem</i> , dan kalau bisa dikolaborasi dengan FK itu akan lebih efektif... Artinya KPUD berkolaborasi dengan masyarakat sipil dalam konteks penyelenggaraan FK, yang selama ini mereka juga bikin ya macam diskusi publik... Cuma dalam sensasinya kan kurang begitu kuat di masyarakat, pelibatan masyarakatnya juga terbatas...	FK; kelompok warga/ komunitas; Pemerintah daerah; KPUD	Kemungkinan FK mencari dukungan (logistik) dari pemerintah daerah dan/atau KPUD.	2	Akses politik; Kolaborasi; <i>Networking</i> ; Diskusi publik; Partisipasi politik.
190	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Tapi memang kalau di Kabupaten Bandung ini, jarang yang seperti itu Kang... PSDK, FDA saja jarang mengundang secara resmi, surat resmi, gitu ya... Paling ya kalau informal sering interaksi... Kita saja yang sudah berapa tahun ini, PSDK dan FDA yang eksis lebih dulu, juga jarang diundang resmi seperti itu...	FDA; PADK; <i>Civil society</i> .	Komunikasi yang terjalin di dalam FK maupun dengan NGO lain bersifat informal.	2	Komunikasi informal.
191	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Sebetulnya wacana menjelang Pilkada ini sudah jadi wacana disini... Jadi nyambung sebetulnya kan... Ketika kita punya gagasan yang hampir sama dengan FK, ngobrol-ngobrol disini untuk merespon Pilkada, tiba-tiba FAB datang membawa konsep ini, jadi memang klop...	FAB.	Gagasan FK dari FAB "nyambung" dengan gagasan mengenai perlunya mengawal proses Pilkada yang berkembang di FDA dan PSDK.	2	Dialog, konsensus, dan kolaborasi (Aktivis Kota Bandung dan Kabupaten Bandung)
192	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Relatif sama ya... Perbedaannyapun relatif tidak jauh berbeda gitu... Jadi nggak begitu banyak persoalan ya, karena dari sisi gagasan sudah sama... Cuma memang dari sisi gimana implementasinya ini kita diberi keleluasaan penuh oleh FAB. Jadi kita bisa melakukan improvisasi-improvisasi dari konsepnya FAB. Karena juga misalnya FAB punya gagasan tertentu, diskusi dengan kita, relatif memang gagasan dari teman-teman disini yang digunakan...	FAB.	Gagasan FK dari FAB "nyambung" dengan gagasan mengenai perlunya mengawal proses Pilkada yang berkembang di FDA dan PSDK.	2	Dialog, konsensus, dan kolaborasi (Aktivis Kota Bandung dan Kabupaten Bandung)

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
193	Nadri	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	Dulu gampangnya ginilah, karena memang situasinya situasi <i>election</i> , jadi ada orang yang merasa berkepentingan dan terdukung dengan Forum Konstituen ini mau mendukung <i>resource</i> tadi yang saya bilang... Kalau sekarang beda situasinya... maka kalau secara formal yang jalan ya komunitas-komunitas itu, kalau secara besar itu tidak... Karena itu keterbatasannya... ya inilah kabupaten... Kita modalnya cuma dengkul kok... Jadi memang belum ada konsolidasi besar lagi, tapi itu mati juga tidak... Komunitas-komunitas inilah yang terus bergerak... Pertama, tadi itu masalah <i>resource</i> ... Kedua, kita sedang cari isu yang pas... sehingga menjadi suatu moment yang kuat...	FK; Komunitas-komunitas.	Momentum Pilkada membuat animo tinggi di jaringan FK. Tapi sekarang sulit untuk konsolidasi besar, apalagi dengan adanya keterbatasan logistik.	2	Momentum politik; Kendala konsolidasi (resource; isu; momentum).
194	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Forum Konstituen itu memang lebih membangun ya... lebih konstruktif, karena calon itu kan dieksplorasi kemampuannya... kemudian calon dibawa ke dalam ranah, dimana calon harus bisa memberikan solusi terhadap berbagai persoalan daerah... Ya memang harus seperti itu... jadi kelihatan kan mana calon yang punya visi yang jelas, yang abu-abu... mana calon yang punya kompetensi... tergal... ... terdapat berbagai hak bagi masyarakat yang merupakan pemilih yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah hak informasi. Saya melihat bahwa forum ini berusaha untuk memenuhi hak tersebut. Sebenarnya ini adalah tanggung jawab negara, tetapi karena ada keterbatasan hal tersebut, maka teman-teman berinisiatif memberikan hak atas akses informasi tersebut. Agar kita tidak hanya menjadi obyek dan kurang memberikan makna terhadap pemilu. Pilkada ini seringkali hasilnya tidak memuaskan, bahkan menjengkelkan, maka forum ini diharapkan sebaliknya.	FK; Kontestan Pilkada.	FK konstruktif karena membangun dialog sekaligus mengeksplorasi kapasitas kandidat Kepala Daerah dalam Pilkada.	2	Dialog; Rasionalitas; Orientasi pada penyelesaian masalah; Kapasitas (kontestan Pilkada).
195	Asep Warlan	L	Akademisi	Workshop Credible Source, 3 Agustus 2010	... terdapat berbagai hak bagi masyarakat yang merupakan pemilih yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah hak informasi. Saya melihat bahwa forum ini berusaha untuk memenuhi hak tersebut. Sebenarnya ini adalah tanggung jawab negara, tetapi karena ada keterbatasan hal tersebut, maka teman-teman berinisiatif memberikan hak atas akses informasi tersebut. Agar kita tidak hanya menjadi obyek dan kurang memberikan makna terhadap pemilu. Pilkada ini seringkali hasilnya tidak memuaskan, bahkan menjengkelkan, maka forum ini diharapkan sebaliknya.	Pemerintah; Masyarakat.	Hak warga dalam Pemilu/ Pilkada.	2	<i>Citizen political rights</i> ; Transparansi; Konstituensi; Pemilihan Umum.
196	Asep Warlan	L	Akademisi	Workshop Credible Source, 3 Agustus 2010	Hak kedua adalah hak untuk melakukan pemikiran, kajian, suatu masukan terhadap proses pemilu... Kandidat Pilkada seharusnya dilahirkan atau tumbuh dari masyarakat lokal agar nantinya terdapat kearifan lokal dalam pemerintahan Bupati terpilih.	Pemerintah; Masyarakat.	Hak warga dalam Pemilu/ Pilkada.	2	<i>Citizen political rights</i> ; Rekrutmen elit politik; <i>Local wisdom</i> .
197	Asep Warlan	L	Akademisi	Workshop Credible Source, 3 Agustus 2010	Yang ketiga adalah hak untuk menyatakan pendapat. Yang keempat adalah hak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Ini sulit untuk direalisasikan tetapi dapat dibuat mekanisme, misalnya melalui jalur politik, jalur administrasi atau administratif. Kemudian hak untuk melakukan pengawasan jalannya Pilkada. Yang keempat adalah hak atas keadilan.	Pemerintah; Masyarakat.	Hak warga dalam Pemilu/ Pilkada.	2	<i>Citizen political rights</i> ; Partisipasi politik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
198	Dede Maryana	L	Akademisi	Diskusi FK, 27 Juli 2010, Hotel Grand Pacific	Upaya membentuk Forum Konstituen ini harus dihadapkan pada situasi massif dimana voter atau pemilih sudah biasa menjadi pemilih yang dibayar... Para elit sudah merasa membayar kontan sehingga merasa tidak perlu lagi melakukan konsultasi publik, atau menjelaskan bagaimana mereka menjalankan program mereka... Kalau Forum Konstituen dapat berjalan baik, paling tidak kita memulai sistem yang baru karena kita percaya bahwa pada sistem demokrasi ini selalu ada peluang.	FK	Tantangan <i>money politics</i> dalam Pemilu/Pilkada.	2	Politik transaksional; <i>Vote buyer</i> .
199	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Awalnya tokoh... eh bukan tokoh, tapi orang yang dianggap sebagai komunikator bagi komunitasnya kemudian... Yang di fase-fase FGD-FGD di awal itulah yang banyak dilibatkan para <i>credible source</i> itu... Namun pada saat pertemuan para kandidat itu ya dari banyak organisasi lah...	Tokoh (<i>credible source</i>)	Peserta FK	2	Elit komunitas; Aktivistis komunitas; <i>Credible source</i> ; Komunikasi politik.
200	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Kalau gua kan spiritnya memperbanyak orang yang terlibat di komunitas... jadi ya siapapun lah... Melibatkan orang-orang yang bisa jadi penyebar informasi tadi... Tapi mungkin juga tidak semua ya, seperti daerah Soreang tidak menjadi prioritas... Kalau istilah Ali kita mau bikin blok politik baru, he...he...	Tokoh (<i>credible source</i>)	Peserta FK, dan keinginan membangun "Blok Politik" baru.	2	<i>Political groups</i> ; Partisipasi politik.
201	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Kalau di tim inti sih menurut gua tidak ada masalah, <i>nggak</i> tau kalau teman-teman lainnya... Tapi gua kira juga <i>nggak</i> persoalan... Karena dalam FGD-FGD itu kan juga dibahas persoalan-persoalan di komunitas dan daerah yang ujungnya <i>nggak</i> bisa lepas juga dari persoalan politik..., Pilkada... Mereka terlibat memetakan isu, analisis, dan menyusun pokok gagasan yang akan disampaikan ke calon... Karena pada akhirnya FK juga tidak menentukan siapa yang harus dipilih dalam Pilkada kan... Itu pilihan masing-masing... FK hanya mempertemukan konstituen dengan calon-calon...	Tokoh (<i>credible source</i>)	Diskusi dan dialog dalam FK.	2	Diskusi politik; Konsensus.
202	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Secara organisasional belum... lupa juga ada kontrak politik atau tidak ya? Tapi sebenarnya di tingkatan teman-teman itu bervariasi... masing-masing sudah punya pilihan juga gitu... Kalau istilah Ali, "Wah FK mah sebetulnya forum para tim sukses...". Sebenarnya nuansanya banyak juga yang sudah punya pilihan... Tidak secara khusus dipetakan, tapi dinamika itu terbaca kemudian... Sehingga setelah forum konstituen banyak yang terlihat merapat ke calon-calon tertentu misalnya...	Kontestan Pemilu/Pilkada	Peserta FK juga banyak pendukung atau tim sukses beragam kandidat Pilkada.	2	Kontrak politik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
203	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	<i>Nggak</i> ada pembatasan seperti itu... Tapi sebetulnya di sebagian teman-teman sendiri kan sebetulnya juga ada orientasi untuk memunculkan calon yang ingin mereka usung... Ada juga sensasi seperti itu... Bukan FAB nya, karena FAB lebih netral lah... Tapi di lingkaran teman-teman di Kabupaten ada spirit itu.... Nah itu juga barangkali yang menjadi kelemahan, sehingga kita menjadi tidak optimal juga dalam meyakinkan para pihak setelah ada pemenang, bahwa kita ini netral. Itu juga jadi problem... Dukungan ke calon tertentu memang tidak secara terbukalah, tapi banyak pihak yang mungkin juga bisa membaca itu kan... FAB nya tidak, tapi para pelaku di lapangan kan lain lagi...	FAB; FK	FAB dan FK pada dasarnya netral, tetapi ada bagian dari tim inti FK yang mendukung salah satu kandidat Pilkada dari jalur independen.	2	<i>Political distrust</i> (terhadap partai poltiik).
204	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Apalagi advokasi setelah Pilkada itu kan FAB tidak banyak berperan, tapi teman-teman di Kabupaten. Lain perkara kalau FAB juga banyak berperan mendampingi FK, membangun komunikasi dengan pemenang dan lain sebagainya... FAB nya netral, tapi isi FK itu beragam... Nah di FK yang dominan itu teman-teman yang secara politik punya calon tertentu...	FAB; FK	FAB dan FK pada dasarnya netral, tetapi ada bagian dari tim inti FK yang mendukung salah satu kandidat Pilkada.	2	Netralitas fasilitator dalam dialog.
205	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Ya... Tapi mungkin juga pilihan FAB adalah mengembalikan itu ke forum sendiri ... Oleh pemenang Pilkada, FK sudah dipetakan sebagai bagian dari kelompok pendukung calon tertentu tadi... Pada Putaran I Pak Toto tidak lolos... Nah pada putaran dua teman-teman pendukung Pak Toto ini merapat ke pasangan Ridho-Darus... Tapi yang menang kan pasangan Dadang Naser... Tapi tentu juga ada yang merapat ke pemenang sekarang... Tapi memang lebih dominan justru berada di kubu yang berseberangan dengan pemenang... Citra yang muncul adalah banyak orang-orang FK bukan berada dalam rombongan pendukung pemenang sekarang ini... Sambil dibaca bahwa ini gerakan Yayasan Inisiatif... Jadi bukan FAB... he..he.. Tapi mungkin itu yang membuat para calon pada mau datang, karena yang mengkondisikan kan Eko, Mas Radhar, Oky... jadi bukan teman-teman di lapangan... Ada lobby Bandung lah...	FAB; FK; Inisiatif; Pemenang Pilkada	FK dipetakan bagian dari jaringan Yayasan Inisiatif yang mendukung Pak Toto, sehingga dianggap berseberangan dengan pemenang Pilkada sekarang.	2	Pengelompokan politik; Lobby politik; Preferensi politik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
206	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Di jaringan teman-teman di Gunung Wayang juga ada yang advokasi petani soal konflik agraria, sampai kirim surat ke Presiden... Komnas HAM datang... Juga ada kasus Chevron dengan WALHI dimana teman-teman jugabanyak yang ada disitu... Kukira itu juga akan menjadi bagian dari pemetaan Pemda terhadap kelompok ini... Di Kabupaten Bandung sepertinya memang belum ada kelompok lain yang relatif solid dan terus menerus melakukan advokasi seperti ini... Kemungkinan masih akan di petakan bahwa ini kerjaan Yayasan Inisiatif... masih ada kaitan dengan Toto... Karena Toto juga pengurus di Perkumpulan Inisiatif... Di Pemda saat ini Toto posisinya ngga jelas... Sebelum maju Pilkada kemarin itu Toto jadi Kepala Bappeda...	FAB; FK; Inisiatif; Pemenang Pilkada; jaringan <i>civil society</i> .	FK dipetakan bagian dari jaringan Yayasan Inisiatif yang mendukung Pak Toto, sehingga dianggap berseberangan dengan pemenang Pilkada sekarang.	2	Advokasi.
207	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Nah jadi persoalan kemudian alat apa yang akan dikembangkan selanjutnya... Tidak dirancang dari awal... Telat juga menyiapkannya... Sebetulnya bisa sinergislah... Misalnya FK main disini, PSDK main disitu, FDA main disana... Problem di pengorganisasian, bagaimana mempositioning masing-masing peralatan ini...	FK; jaringan <i>civil society</i> di Kabupaten Bandung	Pembagian peran organisasi <i>civil society</i> .	2	Sinergitas <i>civil society</i> .
208	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Dan kadang masih muncul juga pemikiran bahwa FK ini masih bukan milik teman-teman... Karena masih dianggap sebagai gagasan FAB atau Bandung... Sehingga internalisasi bahwa ini milik bersama dan perlu dikembangkan yang belum semua punya kesadaran itu... Sempet diobrolin di FAB. Bahkan kalau usulan program (ke TIFA) selanjutnya ini bisa berjalan pengelolaan selanjutnya kan akan lebih banyak diperankan teman-teman kabupaten...	FAB; FK	Rasa kepemilikan terhadap FK.	2	<i>Sense of belonging</i> ; Internalisasi; <i>Role taking</i> .
209	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Mudah-mudahan penelitian ini juga bisa jadi media refleksi ... he..he..	Peneliti	Penelitian sebagai media refleksi.	2	Refleksi.
210	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	CSO Kab Bandung saat ini relatif dinamislah... Kalau dulu Kabupaten dinamis hanya di isu perburuhan... Kalau sekarang mungkin bisa lebih dinamis di sektor kontrol pemerintahan misalnya... Kalau dari posisi politik sebenarnya sudah mulai dihitung atau dilihat... Mulai diajak terlibat aliansi-aliansi yang lebih besar... Tapi di Kabupaten itu lebih banyak isu-isu lokal. Isu nasional malah kurang... Teman-teman juga sering terlibat dalam kegiatan dengan Pemda, terutama dulu masa Pak Toto di Bappeda...	<i>Civil society</i> ; Pemerintah daerah.	Dinamika <i>civil society</i> dan hubungan dengan pemerintah daerah.	2	<i>Civil society</i> ; <i>Political control</i> ; Aliansi; Isu politik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
211	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Karena nggak ada juga gerombolan lain yang relatif solid... terutama dengan kapasitas teman-teman dalam analisis anggaran itu kan lain... Kadang juga diminta bantuan oleh anggota-anggota DPRD untuk membantu analisis APBD misalnya...	FK; <i>civil society</i> ; DPRD.	Minimnya organisasi <i>civil society</i> lain yang solid dan punya kapasitas, membuat FK dan jaringannya jadi menonjol.	2	Kapasitas politik; Soliditas kelompok.
212	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Belum pernah ngecek kesana sih ya... Tapi kebiasaannya begini... Di masyarakat kita ini kan akses informasi juga terbatas. Jadi kalau di desa ada orang yang dianggap cukup luas pergaulan dan punya informasi maka dia akan jadi rujukan dan bisa punya pengaruh... Jangankan orang lain, kita aja kan selalu ada keinginan untuk menyebarkan informasi yang kita punya ya... Entah bahwa dia sekedar ingin menunjukkan bahwa dia punya informasi lebih dari yang lain... Apapunlah motivasinya, itu akan terjadi... Asumsinya begitu... Merekakan biasa <i>ngawangkong</i> ...	FK; <i>credible source</i> .	Jaringan dan informasi sebagai salah satu ukuran ketokohan seseorang di komunitas.	2	Akses informasi; <i>Credible sources</i> ; Pengaruh.
213	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Keikutsertaan perempuan memang lebih sedikit dibandingkan laki-laki...	FK	Keikutsertaan perempuan di FK yang memang lebih sedikit dibanding laki-laki.	2	Partisipasi politik perempuan.
214	Oky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	(Ada upaya para calon meng- <i>crosscheck</i> para tokoh?) Kayaknya nggak sih... Tapi kukira ini faktor penyelenggara juga... Rasa-rasanya FAB inikan belum ada cacat politiknya ya, yang itu bisa membuat mereka nggak yakin... setidaknya itu dululah yang penting gitu... Nah, karena dalam event kayak gini kalau kita pernah punya historis jelek kan mungkin akan susah ya... Ah itu Ketua FAB atau Sekjendnya pernah gini-gitu, misalnya... Nah kita yakin bahwa tim inti di FAB maupun Dewan Pembina FAB para professor-profesor itu nggak punya cacat politiklah... Ini aman... Nah, kemudian tinggal secara rasional untuk membuktikan juga, misalkan masukan Eko, ini teknis, " <i>Ky, cantumkan di form undangan ke calon itu, bahwa ini nggak dipungut biaya... nanti kalau nggak asumsi mereka bisa lain tuh ke kita...</i> ".	Kontestan Pemilu/Pilkada	Pengkondisian kandidat agar mau hadir dalam dialog dengan konstituen.	2	Kredibilitas; <i>Political track</i> ; <i>Political acceptance</i> .
215	Oky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	(Trust ke FAB sebagai modal awal?) Ya... setidaknya-tidaknya kalau bukan <i>trust</i> , mereka memandang FAB ini tidak ada cacat gitu...	FK; <i>Credible source</i> ; Kontestan.Pilkada	Trust kepada FAB.	2	<i>Trust</i> .

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
216	Oky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	(Situasi yang sekarang? Posisi terakhir?) Posisi terakhir itu yang gua bisa datang yaitu pas Musrenbang... mereka diundang secara formal oleh Pemda, tertulis... <i>Gua dateng</i> ... Kita sama pandangan bahwa Musrenbang ini tidak bisa diandalkan... Apalagi kalau lihat acaranya ya... Cuma satu hari dengan <i>seabreg-abreg</i> agenda... ya Ormas, ya Pemerintah, segala macem... Cuma targetnya ya memang harus muncul dan ngomonglah...	FK; Pemerintah daerah.	Keterlibatan FK dalam Musrenbang.	2	Pengakuan; Legitimasi; Eksistensi; Partisipasi minimalis.
217	Oky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	(Kapasitas mereka dalam melakukan itu?) Ada, secara <i>link</i> segala macam... karena mereka juga sebetulnya punya <i>link-link</i> juga... sebelum FK mereka sudah aktif dan menjadi pegiat di sana... Sudah punya <i>link</i> dengan anggota Dewan, Bappeda, dan lainnya... Nah, diperkuat lagi dengan FK gitu ya... Jadi kalau akses dan kapasitas mereka punya... Tapi kan bukan cuma sekedar kapasitas, inikan persoalan di tingkat intinya harus punya visi dan imajinasi gitu...	FK; DPRD; Pemerintah daerah.	Visi, imajinasi, dan kapasitas pegiat FK.	2	Networking; Akses politik; Kapasitas politik; Visi politik; Imajinasi politik.
218	Oky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	Nah untuk sampai disitu yang gua masih agak ragu... Kapasitas mereka jadi <i>lobbyer</i> ... kapan keras, kapan lunak... Nah disitu gua ragu... Tapi mungkin kalau ada penelitian dari Bappeda dan lain-lain itu iya bisa...	FK	Kapasitas pegiat FK.	2	<i>Lobbyist</i> politik.
219	Oky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	Meskipun pada dasarnya, jaringan FAB kan main semua, ha..ha... Nah itu misalnya, ketika si Aa Sudirman evaluator dari TIFA itu dia nanya, FAB itu sebetulnya gimana, kubilang bahwa FAB itu cair, diluar pengurus intinya ya cair, keluar masuk... Terus pas event Pilkada itu ada yang ke PDIP, PAN, dan lainnya... Lalu dia tanya, " <i>Lho, lalu gimana tuh kalau dibawa mendukung calon tertentu?</i> ". Aku bilang, " <i>Ya mereka harus mampu mempengaruhi pengurus kalau mau organisasional, gitu kan... nah cuma rasa-rasanya ngga ada tuh</i> ", aku bilang gitu.	FK; TIFA; Partai politik.	Personil di FAB ada yang terlibat dalam kegiatan politik terkait Pilkada 2010, tapi dalam konteks FK secara kelembagaan FAB netral.	2	Orientasi politik personal dan organisasional.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
220	Oky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	Waktu itu Wakil Bupati-nya yang orang PAN ini juga terus terang kan, “ <i>Saya nggak ngerti... Ini Bappeda thing tank-nya... Saya fasilitasi ketemu Bappeda... Kita ngobrol di kantor... Mereka itu yang ahli-ahlinya...</i> ”. Tapi prinsipnya si Wakil Bupati itu secara prinsip menyambut baik, dia akan fasilitasi, dan itu juga terbukti kan pertemuan dengan Bappeda... Artinya <i>follow up</i> nya juga riil... Nah Wakil Bupati juga ngasih nomor <i>handphone</i> , artinya yang hadir itu... “ <i>Ya kalau ada apa-apa, kontak gue... ini nomer handphone</i> ”. Waktu itu juga sudah ada yang bertanya atau komentar, meskipun waktunya terbatas ya...	FK; Pemerintah daerah.	Wakil Bupati mengundang FK; Membuka peluang kontak selanjutnya.	2	Diskusi/ dialog warga dan pemerintah daerah.
221	Oky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	Nah berikutnya seperti apa, sebenarnya kitakan ingin memposisikan diri sebenarnya, kalau aku sejak awal gua berpikir, “ <i>Ya ini FK adalah kalian...?</i> ”. Ini kita bikin bareng, <i>bridging</i> ... nah kalianlah yang menikmati, ngisi... Nah kita lebih senang, aku lebih senang, kalau kita jadi kawan diskusi... itu untuk ke depan gitu... Karena untuk lebih dari itu agak repot buat kita... Karena sudah masuk wilayah eksekusi gitu...	FK.	FK adalah milik aktivis Kabupaten Bandung sendiri.	2	Non kooptasi; Kesetaraan; Kolaborasi; <i>Advisory</i> .
222	Oky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	Nah jadi sejak sebelum pertemuan Telkom itu, aku udah coba mengkondisikan bahwa FAB itu bukan sesuatu yang wah gitu... Tujuannya agar mereka <i>confident</i> , dan ke depannya tidak ada ketergantungan terhadap FAB... Kalaupun ke depan masih berinteraksi dengan FAB, ya itu hal yang biasa-biasa saja sebagai teman ataupun sebagai <i>advisor</i> -lah... ngasih masukan segala macam...	FK.	Hubungan FAB dan FK.	2	Ketergantungan.
223	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	Gagasan ini kan sebenarnya sederhana ya... Saya kira konsep dasarnya kita tidak mau pakai istilah <i>rational voter</i> ya, tapi <i>responsible voter</i> ... Kalau pemilih rasional itu, kurang begitu jelas, karena orang kemudian suka mengkotraskan itu dengan <i>emotional voter</i> ... Jadi <i>emotional voter</i> itu istilahnya <i>loyal constituent</i> ... <i>voter</i> yang memilih karena kedekatan <i>cultural</i> pada suatu partai... Jadi seakan-akan yang rasional ini tidak punya emosional, dan yang emosional ini tidak rasional... Padahal sebetulnya semuanya rasional... Itu kenapa aku lebih suka pakai istilah <i>responsible voter</i> ...	FK.	Konsep dasar FK adalah tentang <i>responsible voter</i> .	2	<i>Rational voter</i> ; <i>Responsible Voter</i> ; <i>Emotional voter</i> ; <i>Loyal constituent</i> .

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
224	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	Nah dari macem-macam faktor itu sudah banyak dibahas. Banyak kelemahannya itu, kita sudah tahu... KPU sebagai penyelenggara banyak kelemahannya, kita juga sudah tahu. Partai politik banyak kelemahannya... Cara milih bakal calonnya kacau, asal milih aja dia... Pokoknya bayar gitu kan... jadi kandikat... Nah semua masalah itu sudah diketahui publik. Tapi semua itu bisa tak berarti apabila pemilihnya itu bener. Boleh partai itu memilih calon sembarangan, tapi calon itu tidak akan terpilih kalau pemilihnya bertanggungjawab. Boleh misalnya sistemnya itu amburadul, iya kan... tapi sepanjang Pemilu itu rahasia, pemilih tetap bisa memilih secara bertanggung jawab... Jadi sepanjang bilik suara itu bisa melindungi kerahasiaan, dia akan bisa memilih sesuai dengan keinginannya. Faktor-faktor itu tetap tidak artinya, dalam arti tetep kita bisa mendapatkan kandidat terpilih yang baik itu asal pemilihnya harus <i>responsible</i> .	FK.	Adanya <i>responsible voter</i> sebagai syarat bagi Pemuli yang baik.	2	<i>Responsible voter.</i>
225	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	Nah pemilih yang <i>responsible</i> itu yang bagaimana? Pertama, dia terlibat. Terlibat itu ada gradasi... bisa dia itu cuma nonton, mencerna, memutuskan, kemudian memilih. Bisa gradasinya itu, bisa dia terlibat semi aktif, misalnya dia sengaja mencari informasi, tidak cukup mendapatkan informasi dari TV atau koran. Tapi dia ikut aktif berdiskusi untuk menemukan siapa kandidat terbaik. Lalu gradasi terakhir, itu pemilih yang aktif. Dia ikut mengkampanyekan pilihannya. Setelah memilih, dia juga <i>campaign</i> pada orang-orang lain mengenai pilihannya...	FK	3 tipe dari <i>responsible voters</i> .	2	<i>Responsible voter.</i>
226	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	Sebetulnya agenda FAB adalah replikasi dari proses ini ke Pilkada yang lain. Gerakan ini adalah gerakan pemilih, jadi bukan gerakan tim sukses gitu. Bukan gerakan kontrol sosial juga, itu lain... bukan gerakan <i>social control</i> ... Ini harus diberi penekanan disitu... Ini hanya gerakan pemilih agar bisa memilih secara bertanggungjawab... Nah dalam konteks ini ketertarikan FAB adalah bagaimana memfasilitasi Forum Konstituen yang lain, replikasi tadi itu... Tapi itukan berhubungan dengan <i>resource</i> juga. Sebetulnya ini membutuhkan beberapa eksperimen yang berhasil seperti halnya Kabupaten Bandung itu, agar kita bisa mem- <i>blow up</i> ini menjadi sebuah isu daerah atau isu nasional, sehingga ini bisa mendapat <i>support</i> dari masyarakat luas. Ini yang aku masih mengusahakan...	FK; FAB.	Konsep awal FK adalag gerakan pemilih dalam Pemilu/Pilkada, dan bukan gerakan kontrol sosial. FAB lebih <i>concern</i> pada upaya replikasi model FK ini.	2	Gerakan pemilih; Gerakan kontrol sosial; Replikasi; Model kelembagaan partisipasi politik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
227	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	(Peran FAB sangat besar dalam FK. Apakah itu prasyarat untuk replikasi?) Saya kira peran FAB itu sebagai inisiator, iya kan... Penggagas mula... dan yang kedua itu sebagai fasilitator. Ini dua peran pokoknya... Peranan sebagai inisiator pada Forum Konstituen Kedua, Ketiga, dan seterusnya sudah ngga ada sebetulnya kan... Yang tinggal itu peran fasilitator... Tapi peran fasilitator ini juga sebetulnya tinggal minimum, karena proses itu sendiri sudah <i>embedded</i> di dalam tim yang kemarin... Jadi tim yang kemarin itu, kalau saya bilang replikasi, dalam pemikiran saya tim itu yang akan mereplikasi... Saya itu berpikir, FAB akan berperan sebagai dalam melakukan <i>reflection</i> gitu lho... Yang bangun benang merahnya itu gitu kan... Mengkaitkan setiap <i>action</i> ini dengan tujuan awal... Jadi semua aspek teknisnya sebetulnya itu sudah bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat ya...	FK.	Peran FAB sebelumnya sebagai inisiator dan fasilitator. Jika FK Kabupaten Bandung dapat bertahan bahkan melakukan replikasi, FAB memposisikan sebagai mitra diskusi dan refleksi.	2	Inisiator; Fasilitator.
228	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	(Peserta dipilih yang tidak ikut parpol?) Saya memang sengaja mencari yang independen, sebab kalau waktu itu Forum Konstituen pesertanya dari anggota partai yang sudah punya calon, maka prosesnya akan bias, gitu lho... jadi kriteria yang dibangun, lalu bagaimana memvaluasi kriteria itu ini aka dipengaruhi oleh preferensi justru dari pengurusnya sendiri... itu justru yang kita hindari... Jadi kalau itu yang terjadi maka akan ada <i>systematic bias</i> ... Itu terjadi... Saya kira saya percaya peserta yang kemarin itu tidak ada anggota Partai atau tim sukses ya... Independen dan obyektif gitu ya... Mungkin ada beberapa orang yang sudah punya preferensi pada calon tertentu, tapi dia tidak dominan, kecil pengaruhnya... Dan kita bikin kan kriteria evaluasi-nya itu begitu rupa... Jadi cara evaluasinya itu kan melalui voting sebetulnya... Jadi misalnya kriteria A nilainya berapa? Jadi kita ambil <i>average</i> ...	FK: <i>Credible source</i> .	<i>Credible source</i> adalah orang-orang independen.	2	Pemilih independen dan obyektif.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
229	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	(Kapasitas masyarakat untuk replikasi?) Saya itu menduga mereka akan gagal mengundang calon, sehingga saya yang harus terlibat langsung. Tapi nggak ada tuh yang secara langsung harus saya temui... artinya gagasannya sendiri cukup sexy di mata para kandidat... karena kita menghadirkan banyak elemen dari seluruh kabupaten, sehingga buat mereka ini penting... Tapi memang ada calon yang stress ya, kekhawatiran bahwa mereka akan menghadapi banyak elemen masyarakat itu, sehingga tidak hadir... Tapi itu berakibat fatal membuat dia tidak diperhitungkan... Ada yang nggak datang kandidat dari PDIP... Sebetulnya dia mengirim utusan berkali-kali, tim suksesnya itu datang ke saya itu... ya saya yakinkan bahwa tidak usah khawatir yang penting dia punya kesiapan. Ya cuma itu, ada ketidakpercayaan diri bahwa dia bisa berdialog dengan baik. Karena memang Ketua Partai yang itu kurang pintar berkomunikasi... Dia punya <i>handicap</i> itu, jadi mungkin tim suksesnya juga ragu untuk menghidarkannya di Forum Konstituen yang digalang oleh Forum Aktivistik Bandung ya... Waa... dia denger nama Forum Aktivistik Bandung aja udah serem dia itu...	FK; Kontestan Pilkada; Akademisi; Partai politik.	Keberhasilan menghadirkan kandidat dalam dialog. Meskipun ada kandidat yang "takut" hadir.	2	Kapasitas politik; Komunikasi politik; Kampanye politik.
230	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	(Gagasan dari Bandung lokasi di Kabupaten Bandung, apakah ada resistensi atau keraguan?) Ah nggak lancar aja... Bandung dan Kabupaten Bandung kan sama aja... Aktivistik-aktivistiknya kan kita kenal juga... Saya kira nggak ada hambatan itu...	FK.	Tidak ada hambatan politis maupun psikologis dalam hubungan aktivis Kota Bandung & Kabupaten Bandung.	2	Interaksi dan interelasi antar kelompok.
231	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	KPU <i>support</i> .. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten hadir memberi pengarahan...	FK; KPUD.	KPUD mendukung kegiatan FK.	2	Legitimasi politik.
232	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Dan <i>statement</i> (Cat: waktu dialog kandidat dan konstituen di Telkom) itu waktu itu muncul, ya mungkin karena situasi dimana mereka tidak bisa mengelak dan sebagainya... Tapi itu kita pegang, kita tes, kita undang resmi dengan kop FK, ternyata Wakil Bupati mau datang... Di Baleendah sini... Waktu itu kita nggak nyangka juga bahwa mereka mau datang... Karena baru dilantik mungkin masih euphoria gitu kan... Tapi kok mau datang... Ini suatu hal yang penting bagi kita, bahwa ya oke, mereka masih menghitung FK...	Bupati/Wakil Bupati.	<i>Test case</i> pasca pelantikan mengundang Bupati/Wakil Bupati terpilih.	2	Pengaruh.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
233	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Bahwa ada pandangan positif dari mereka terhadap FK... Ya kita diskusi, tapi dia nggak bisa jawab apa-apa kan... "Waduh, saya nggak ngerti soal yang ini. Nantilah kalian diundang, saya akan mengajak Tim..." Nah kita diundang balik, diskusi khusus antara Wakil Bupati yang didampingi oleh Tim Perumus dari Bappeda dengan FK. Diskusi disitu tentang isu-isu lingkungan, pendidikan, kesehatan..	Bupati/Wakil Bupati; Bappeda.	FK diundang Wakil Bupati dialog dengan Tim Perumus RPJMD dari Bappeda.	2	Diskusi warga dan pemerintah.
234	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Sebelum dengan Bupati sekarang, teman-teman disini juga sering berinteraksi dengan Pemda, terutama dengan Bappeda, yang sebagai badan perencanaan daerah kita anggap strategis, ya kita intensif disitu... Tapi memang dengan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya kita sering berhadapan, artinya kelompok kamilah yang sering mengkritisi, melakukan aksi terhadap kebijakan-kebijakan Bupati sebelumnya itu... Artinya komunikasi kita dengan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya memang tidak terbangun. Tapi dengan SKPD dan beberapa anggota DPRD itu yang sebelumnya sudah sering berinteraksi...	Bupati/Wakil Bupati; Bappeda; DPRD; SKPD.	Perubahan politik dalam interaksi dengan Bupati/Wakil Bupati. Dengan Bupati/Wakil Bupati periode sebelumnya cenderung konfrontatif. Sementara dengan Bupati/Wakil Bupati yang sekarang cenderung lebih dialogis.	2	Oposisi; Konfrontasi.
235	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Dengan sudah berinteraksi sebelumnya pada saat menjelang kampanye dalam FK, Bupati yang sekarang sering berkomunikasi dengan kita... Beberapa kali kita diundang ke rumah dinas... Kalau ada kegiatan kita juga diundang... walaupun sebetulnya itu karena ada kawan kita juga di lingkaran dalamnya mereka...	Bupati/Wakil Bupati.	Komunikasi dengan Bupati/Wakil Bupati juga terbantu karena ada jaringan FK yang dekat dengan mereka.	2	Pemerintahan terbuka.
236	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Karena petanya Bupati yang sekarangpun, itu masih menganggap bahwa yang menjadi <i>leader</i> -nya di FK ini adalah yang sebelumnya selalu berhadap-hadapan dengan Bupati sebelumnya, yang notabene juga merupakan mertua dari Bupati yang sekarang... Bupati yang sekarang ini sama Golkar, mantu Bupati sebelumnya, dan secara kebijakapun melanjutkan kebijakan mertuanya itu... Wajar kalau dia punya kehati-hatian kan, karena memang ada sejarah sebelumnya...	Bupati/Wakil Bupati.	Bupati sekarang cenderung hati-hati berinteraksi dengan FK, karena merupakan menantu Bupati sebelumnya.	2	Politik keluarga.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
237	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Nah di pertemuan terakhir itu ketika kita mendesakkan sejumlah gagasan-gagasan, Bupati minta kita untuk membuat semacam workshop biar diskusi-diskusi ini menjadi bahan yang semi formal bagi dia sebagai bahan untuk mengambil kebijakan ke depan. Tapi itu yang belum dapat kami laksanakan... Tapi kalau dari pesan politiknya, bahwa dia sudah mau mengakomodir kan, telah membuka diri, walaupun peta teman-teman ini bagi dia juga cukup diwaspadai...	Bupati/Wakil Bupati.	Bupati/Wakil Bupati membuka ruang untuk diskusi/dialog lanjutan.	2	Dialog formal; Pemerintahan terbuka.
238	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Masih bisa ngobrol sama dia... Mungkin karena dia relatif masih muda, aktivis juga di KNPI, biasa bergaul dengan anak muda, dulu aktivis juga di KNPI... Sangat jauh berbeda dengan mertuanya, kan militer... Kalau sama Bupati sekarang ngobrolnya ya cair saja...	Bupati/Wakil Bupati.	Usia dan latar belakang aktivitas Bupati sekarang kemungkinan berpengaruh terhadap pola interaksi dia dengan NGO.	2	Gaya kepemimpinan sipil -vs- militer.
239	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Kalau soal transparansi dan partisipasi ya kita melihat itu belum ada komitmen dari Pemda... Ada Perdanya... Tapi soal akses dokumen... relatif belum ada perubahan...	Pemerintah daerah.	Ada Perda tentang Transparansi dan Partisipasi tapi belum berjalan optimal.	2	Transparansi; Partisipasi.
240	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Ketiga berkaitan dengan konsistensi masyarakat untuk terlibat dan mengawal proses tadi... Dinamikanya ya ada disitu... Ada kawan yang masih bertahan terlibat aktif di FK, tapi ada juga kawan yang mungkin karena kesibukannya yang lain di organisasinya masing-masing menjadi kurang terlibat lagi...	Jaringan FK.	Keinginan menjaga keterlibatan dan keaktifan peserta FK.	2	Konsistensi dan stamina politik.
241	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Bedanya juga ya kita tidak tergerus dalam <i>money politics</i> ... Jadi komunikasi dan relasi dengan beberapa kandidat itu bukan dalam konteks itu, tapi dalam konteks berbagi atau <i>sharring</i> ... Yang kedua, FK punya gagasan... Kita punya konsep advokasi... Karena kelompok-kelompok lain itu, yang mungkin juga sudah jadi budaya politik di kita, ya sangat minimalis, sangat kecil upaya-upaya seperti itu... Relasi-relasi yang dibangun adalah transaksional gitu kan... Dan yang pasti, persoalan-persoalan lemahnya advokasi di masyarakat pasca Pilkada itu kan ya karena sebelumnya selalu transaksional itu... Kita ingin memperkuat posisi tawar disana itu tanpa proses transaksional tersebut...	NGO dan kelompok lain; Pemerintah daerah.	FK berbeda dengan kelompok lain yang kerap melakukan transaksi politik ketika melakukan kontrol kepada pemerintahan.	2	Budaya politik; Politik transaksional; Advokasi; Komunikasi politik; Dialog.
242	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Yang <i>nggak</i> datang waktu itu memang kandidat yang bodoh lah, ha..ha.. <i>Sieun</i> lah sepertinya... Pas saya lihat di TV, wah dia mah memang yang paling parah lah...	Kontestan Pilkada.	Ada kandidat yang tidak ikut dialog dengan FK.	2	Kapasitas politik (politisi)

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
243	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Ada hal yang berharga memang dari pengalaman itu... Kan kalau dalam komunikasi politik itu menunjukkan kalau ada relasi yang tidak timpanglah gitu ya, mereka mau dateng, hampir semua kandidat mau dateng... Saya pastikan tidak ada kelompok lain, atau ormas lain yang mampu menghadirkan semua kandidat, dan disitu kita semua diskusi... Itu saya pastikan tidak ada di Pilkada kemarin itu, kecuali KPUD ...	KPUD; Partai politik; Kontestan Pilkada.	Kelebihan dan keberhasilan FK.	2	Interelasi politik (warga dengan politisi).
244	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Satu dua ada, tapi memang kita belum pernah secara mendalam mencari tahu apa persepsi orang ke FK. Tapi memang ada yang lemah dari kita. Kita lemah di <i>campaign</i> ... Itu yang agak disayangkan... Waktu itu memang ada pembagian peran, yang mengkonsolidasikan media itu teman-teman FAB, jadi kita tidak terlibat. Sebetulnya, dari pertemuan-pertemuan yang tadi saya ceritakan itu kan menarik buat media ya... Jadi ya memang FK ini tidak cukup bagus dalam membangun opini ya... Karena saya melihat kegagalan di kampanye media massa, seperti di TV maupun cetak...	Media massa.	FK lemah di kampanye gagasan, proses dan hasil.	2	Opini publik.
245	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Jadi banyak keterbatasan dalam konsep visi misi pemenang Pilkada ini. Misalnya, program unggulannya kan pertanian terpadu, itu seperti apa sih pertanian terpadu, konkretnya apa, kegiatannya apa... Itu belum... Jadi masih ngurusin yang sifatnya jargon-jargon... " <i>Sabilulungan</i> " kan jargonnya dia... Masih ngomong soal partisipasi...	Bupati; Wakil Bupati.	Pemerintah daerah masih bermain di tataran jargon.	2	Politik jargon/symbol.
246	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Sudah setahun lebih sejak Pilkada belum ada kebijakan yang signifikanlah... Belum ada terobosan... Memang di visi-misi nya pun tidak ada yang menarik juga sih... he...he... Yang normatif saja. Jadi tidak salah juga sebetulnya ya Bupati itu, karena memang visi misi nya yang umum saja... Reformasi birokrasi, disitu kan salah satunya ingin meningkatkan disiplin aparatur. Tapi kita cek di APBD 2011 itu ya, programnya misalnya soal penyediaan seragam PNS, pelatihan... Jadi ngga ada gagasan dia yang progresif... Kita sih sudah kebayang ketika dia terpilih, ya beginilah... Tidak ada perubahan... Karena relatif dia kan meneruskan rezim sebelumnya... Tapi ya kita tetap mencari celah perbaikan yang dapat didorong oleh kita...	Bupati/Wakil Bupati.	Belum ada perubahan yang signifikan dalam satu tahun pemerintahan.	2	Perubahan; <i>Governance</i> .

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
247	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Saya kalau terlibat ya kalau diundang oleh FAB. Dari sisi konsep ya memang bagus gitu ya... Tapi lemah dalam, bagaimana sih gagasan ini bisa menjadi sebuah praktek atau menjadi gerakan di masyarakat sipil, yang itu yang kita tidak dapat... Termasuk pembelajaran dari FK itu begitu... Ketika program FK ini berjalan di Kabupaten Bandung, semua kegiatan-kegiatan itu relatif kami yang sebagai pelaksananya begitu... Termasuk dari mulai pemetaan, mungkin karena kami orang lokal jadi paham gitu ya, bagaimana berelasi dengan kelompok lain, termasuk dengan kandidat, apa yang harus dilakukan, bagaimana teknisnya konsolidasi itu bisa jalan, itu kami yang melakukan... Jadi kalau FAB ya " <i>Ini kami punya konsep begini, bagaimana caranya supaya ini bisa jalan...</i> ", jadi kami memang yang mengeksekusinya... Jago di teori lah katakan begitu,... Mas Radhar sama Oky ya...	FK; FAB; Aktivistis Kabupaten Bandung.	Hubungan FK dengan FAB. FAB sebagai konseptor, dan jaringan aktivis Kabupaten Bandung yang mengeksekusi.	2	Gerakan masyarakat sipil; Praksis (teori dan praktik politik).
248	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	(Peran FAB) Memfasilitasi dari sisi program memang ya, karena mereka yang punya program kan... Tapi bagaimana implementasi, improvisasi dan inovasinya justru kami disini... FAB memfasilitasi dalam arti memberikan ruang... Tapi kami yang menyusun TOR, agenda, alur diskusi, siapa yang diundang...	FAB.	Hubungan dengan FAB. FAB sebagai konseptor, dan jaringan aktivis Kabupaten Bandung yang mengeksekusi.	2	Konseptor/ inisiator; Fasilitator; Implementor.
249	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Nah itu yang kita kritik buku Oky itu ya... Bukan salah... Tapi tidak mencerminkan kenyataan sesungguhnya, karena menafikkan peran masyarakat sipil di Kabupaten Bandung...	FAB; Oky.	Kritik atas buku Oky yang mengabaikan peran masyarakat sipil di Kabupaten Bandung.	2	Pengakuan; Eksistensi.
250	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Kita sangat punya kapasitas untuk melaksanakan itu... Harusnya kalau kita diberi keleluasaan penuh, ini bisa lebih... Contohnya tadi, fungsi peranan media, saya sudah diskusi dengan Oky, bahwa ini penting, bagaimana kalau kami yang konsolidasi dengan media, karena cukup dekatlah kamu dengan media... Katanya, " <i>Biar saja saya yang konsolidasikan ini...</i> ", jadi ya udah... Dan ternyata itu tidak maksimal... Mangkanya tadi di awal saya singgung, bahwa sayang... sangat disayangkan forum sebegus ini tapi kampanye di publiknya sangat kurang... Walaupun ada publikasi ya kita kan bikin media waktu itu... Itu yang menulis mediapun kita juga... namanya "Elektoral"... Dari mulai <i>layout, content</i> -nya... kita semua yang kerjakan...	FAB; Media.	Kapasitas pegiat FK di Kabupaten Bandung dalam melakukan replikasi FK.	2	Kapasitas; Peran; Trust; Media kampanye.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
251	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Animo teman-teman di awal begitu tinggi ya... Bisa ketemu para kandidat aja mereka sudah senang... Tapi setelah pemilihan mulai terlihat tuh semangat yang menurun. Ketika diajak aktif untuk mengkritisi pemerintahan yang baru ya banyak yang kurang antusias... Jadi bukan hanya karena FK lemah dalam konsolidasi, tapi karena memang kesadaran politiknya baru sebatas itu... Jadi banyak yang di awal sangat aktif, tapi kemudian menurun...	Jaringan FK.	Partisipasi tinggi ketika Pilkada, dan menurun setelah itu.	2	Kesadaran politik.
252	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	CATATAN: Keinginan membangun Blok Politik baru; Baleendah sebagai penyeimbangan kekuatan pemerintah dan LSM-LSM yang dekat dengan Pemda di Soreang	Kelompok atau NGO lain di Kabupaten Bandung.	Baleendah sebagai blok politik baru di Kabupaten Bandung.	2	Kelompok politik.
253	Setiawan	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Kalau <i>denger-denger</i> informasi, sebenarnya dia juga butuh dengan adanya kita ya... entah itu memang betul begitu atau hanya <i>lips service</i> saja ya kita ngga tahu... Tapi dari beberapa kali pertemuan dengan Bupati, kalau dari bahasa tubuhnya sih dia cukup merespon ya... Karena kita dalam posisi yang memilih dia gitu... Kalau dalam bahasa Sunda mah, " <i>Tong sombong lah da dipilih ku rakyat...!</i> ". Kita memposisikan semacam itu, meskipun secara konkret mah memang masih jauh...	Bupati.	Bupati cukup merespon positif keberadaan FK.	2	Pengakuan; Responsifitas; Konstituensi.
254	Setiawan	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	(Keberhasilan) Pertama dari sisi pengakuan, minimal keberadaan kita diakui... Eksislah... minimal begitu... Yang kedua, tiap kali pertemuan kita selalu menjadi wilayah yang diperhitungkan, ketika kita muncul... Meskipun dari organ yang beda tapi mereka (Cat: Pemda) sudah memetakan kita sebagai satu komunitas atau kelompok... Bahwa kelompok kita nih beda dengan yang lain...	Pemerintah daerah.	Keberhasilan dalam bentuk pengakuan sebagai sebuah kelompok yang berbeda.	2	Eksistensi; Pengaruh politik; Kelompok politik.
255	Setiawan	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Kesadaran kawan-kawan juga terus meningkat ya ke arah yang lebih baik, meskipun masih banyak kekurangan... Ini satu proses... Harapannya sih ke depan konsolidasi kita semakin kuat, jadi semakin banyak teman-teman yang juga tidak hanya selesai ketika Pemilihan ini, tapi juga bagaimana setelah itu kita tetap bisa menjadikan satu jalan dapat menyuarkan langsung persoalan masyarakat kepada Kepala Daerah...	Jaringan FK; Pemerintah daerah.	Harapan meningkatnya kesadaran di jaringan dan konsolidasi di dalam FK sehingga dapat menjadi kekuatan dalam kontrol pemerintahan.	2	Kesadaran politik; Konsolidasi <i>civil society</i> ; <i>Voice</i> .

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
256	Setiawan	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	(Pengetahuan NGO lain tentang FK) Kalau tahu mungkin tahu, tapi saya ngga tahu ya pandangan mereka soal FK.... Karena kan kita banyak ya... Disini kan ada yang dari kelompok penggerak pariwisata, ada juga pendidikan, petani, dan lain-lain... Kalaupun tahu pasti tahu... Tapi belum tahu persisnya gimana pandangan mereka... Tapi memang FK belum pernah diundang oleh organisasi lain sih ya...	NGO dan kelompok lain.	Interaksi FK dengan NGO atau kelompok lain diluar jaringan FK minim.	2	Jaringan politik.
257	Setiawan	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Kadang di Pemda sendiri... Kan kalau ada pertemuan itu suka ada pembagian komisi pembahasan, pada bingung, nih FK mau <i>ditaro</i> dimana nih? He..he.. Pengalaman dulu waktu pembahasan RPJMD, waktu itu hanya FK yang dikasih peluang menaruh orang di setiap komisi diskusi. Jadi kan pada waktu pertemuan ada diskusi kelompok, nah kita minta agar tiap kelompok diskusi itu kita masuk. Karena ya kita kan bukan hanya ngomong lingkungan atau pendidikan... Akhirnya itu disetujui... Yang lainnya cuma 2 orang kita bisa ikut 10 orang ya...	Pemerintah daerah.	FK dipandang sebagai organisasi dnegan jaringan besar, sehingga dapat ikut banyak perwakilan di Musrenbang 2011.	2	Eksistensi; Pengaruh politik; <i>Bargaining position</i> .
258	Setiawan	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Kan kalau secara prinsip, bahwa semua orang yang punya hak pilih itu adalah konstituen. Ini juga sih yang saya pikirkan... Apakah ini akan jadi sebuah lembaga yang berstruktur atau hanya cair saja... Secara filosofi, saya pikir semua orang itu adalah konstituen kan, dan seharusnya semua orang yang telah memilih itu punya tanggung jawab bagaimana dia mengingatkan orang yang sudah dipilihnya, siapapun dia orangnya...	Konstituen.	Semua memilih adalah konstituen yang juga bertanggungjawab mengawasi pemerintahan.	2	Konstituensi; Kontrol politik.
259	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Jadi begitu Forum Konstituen ini kita deklarasikan, respon dari para pemutus kebijakan, para <i>inoHong</i> lah kalau orang Sunda bilang <i>mah</i> , mereka <i>ngeH</i> sebetulnya... <i>Da'</i> begitu muncul langsung dekat dengan pemilihan Bupati itu teh... Alhamdulillah, setelah mereka terpilih, kita melayangkan surat, Abah berkoordinasi dengan Wakil Bupati, akhirnya kita diterima dengan baik... Dan Forum Konstituen ini oleh Pemda Kabupaten Bandung diakuilah... Ini loh, kami ingin menyampaikan aspirasi yang belum terakomodir, baik yang melalui sistem pemerintah itu sendiri dalam Musrenbang, karena kami punya tanggung jawab moral sebagai warga Kabupaten Bandung untuk serta dalam membangun daerah kami... Akhirnya kami diterima, dan diakuilah oleh pemerintah...	FK; Tokoh masyarakat; Bupati; Wakil Bupati; Pemerintah daerah.	FK muncul pada momentum yang tepat sehingga saat ini cukup dikenal oleh para elit politik di daerah.	2	Momentum politik; Tanggung jawab moral; Warga; Akses politik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
260	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Akhirnya setiap ada pertemuan di Kabupaten Bandung ini, Forum Konstituen diperhitungkan... dilibatkan... bukan dalam arti kata diperhitungkan karena arogansinya atau karena banyaknya elemen-elemen komunitas, tapi karena daya nalar... Sedikit berkualitaslah, kalau dikatakan 100% <i>isin</i> gitu ya... masih banyak kalangan akademis yang lebih berkualitas... kami mah <i>ecek-ecek</i> tapi sedikit berkualitas... Tapi kalau menurut saya, FK ini tidak kalah dengan kalangan akademis, bahkan lebih santun, karena tidak pernah berbuat anarkhis... selama masuk logika dan rasional...	Pemerintah daerah; Akademisi.	FK diperhitungkan karena menggunakan logika dan rasional, dan lebih santun karena tidak anarkhis.	2	Nalar; Rasionalitas; Anarkhis.
261	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Di sinilah Abah punya kebanggaan, inilah generasi yang tidak hanya meratapi dirinya... meskipun kondisi ekonomi, sosial, budaya begini... Seperti Abah sendiri, disebut <i>aya' da' eweuh</i> , disebut <i>eweuh nya' da' beginih</i> ... Tapi kita tidak putus asa, kita tetap melangkah, dengan optimisme yang sangat tinggi... Kita diberi akal sehat, apalagi iman... jadi secercah harapan itu masih ingin kami genggam... regenerasilah yang akan meraih itu... karena ini kan proses...	Aktivist muda di Kabupaten Bandung.	Adanya para aktivis muda yang memperjuangkan perubahan di Kabupaten Bandung.	2	Proses politik.
262	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Yang penting kita sudah ada di lingkungan mereka, ini loh kami Forum Konstituen, dari semua elemen masyarakat yang menyuarakan aspirasi masyarakat secara utuh, dengan tanpa di embel-embel kepentingan individu-individu ataupun kelompok masing-masing... Jadi kami memang betul-betul ingin memajukan daerah... Terlepas orang ingin menilai seperti apa, "Oh di FDA, PSDK mah ada ini, ada itu..."... Nah itulah, karena inikan ada dinamika kita...	FDA; PSDK.	FK menyuarakan aspirasi masyarakat tanpa mengejar kepentingan individu atau kelompok.	2	Aspirasi; Kepentingan publik.
263	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Itu wujud dari perjuangan yang berangkat dari keprihatinan... Satu-satunya yang bisa memperjuangkan hak-hak rakyat disini... Dulu kan Abah sendiri, <i>single fighter</i> ... tapi dengan kenal dekat, akhirnya ada wadah, akhirnya bisa mendorong penyelesaian masalah yang ada... Jadi keprihatinan bukan menangisi kehidupan, karena kehidupan itu sudah di atur... Tapi ini bentuk-bentuk sosial lain, seperti kami harus layak hidup, walaupun kami tetap kebanjiran, tapi terminimalisasilah...	Civil society; Pemerintahan daerah.	Menyuarakan aspirasi sebagai kelompok lebih efektif dibandingkan sendiri.	2	Organisasi.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
264	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Dengan adanya FK itu riil jadi wadah penyampaian aspirasi warga... Sangat jauh perbedaannya dengan sebelumnya... Dulu Abah saja memperjuangkan warga korban banjir boleh dikatakan <i>single fighter</i> , hanya dengan komunitas saja... Tapi dengan adanya FK sangat jauh perbedaannya... kekuatan jadi lebih besar... Ibarat listrik mah dulunya cuma beberapa watt sekarang jadi sekian mega watt...	Civil society; Pemerintahan daerah.	Menyuarakan aspirasi sebagai kelompok lebih efektif dibandingkan sendiri.	2	Individu; Kelompok; Organisasi; <i>Power</i> ; Pengaruh; <i>Civil society</i> .
265	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Keprihatinan disini sebetulnya dari banyak aspek.... Dari masalah kebijakan pembangunan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, lingkungan, termasuk infrastruktur... Apalagi Abah sendiri dari komunitas korban banjir, yang selalu setiap tahun rutin terkena banjir... Nah disana ketika menyuarkan persoalan seringkali dianggap angin lalu... "Kenapa nggak pindah aja dari situ...", nah seperti itu biasanya respon mereka dulu... Padahal dalam hati kecil kami bukan kami tidak mau pindah, tapi bagaimanapun kami disini, keberadaan masyarakat di sepanjang DAS harus diakui, dan perlu dilindungi sesuai undang-undang... kami juga punya hak layak hidup... Kemampuan kami bisa membeli lahan dan rumah itu di DAS, kami tidak mau terendam, tapi resiko hidup di tepi sungai ya memang terendam, tapi kan tetap harus ada perbaikan, kami punya hak layak hidup tadi...	Pemerintahan daerah.	FK menyuarkan keprihatinan terkait kebijakan pemerintah dan masalah riil di masyarakat.	2	Korban kebijakan; Responsifitas pemerintah.
266	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Apalagi mengenai ekonomi, itu belum berpihaklah program apapun kepada kami secara utuh... Walaupun dalam hidup ini semua orang sudah diberi "alas", karena itu sudah diatur dari Allah SAW... Tapi kan merubah sesuatu itu perlu perjuangan... <i>deal-deal na'</i> , tergantung keinginan kita...	Pemerintahan daerah.	FK menyuarkan ketidakberpihakan kebijakan pembangunan ekonomi.	2	Kebijakan pro publik.
267	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Sebelum ada FK dan sesudah itu sangat signifikan sekali... terus terang itu Abah akui... Dengan diakuiinya keberadaan FK oleh pemerintahan, itu berarti nilai plus, dibandingkan sebelum ada FK... Bukan berarti kami, Abah sendiri, tidak diakui, tetap diakui... tapi kekuatannya... Sampai Pak Wakil Bupati mengundang FK, itukan pengakuan yang luar biasa... Berarti kami dilirik oleh mereka, dan dilibatkan dalam perumusan kebijakan... Termasuk di Bappeda kami diajak <i>sharring</i> ... Berarti kita diakui, dan ini kelebihannya... Apapun yang dilakukan FK dengan ditunjang oleh komunitas-komunitas di dalamnya kan semua elemen ada... buruhnya, taninya... <i>ceuk kasar mah tukang-tukang beca ge' aya' lah</i> ...	<i>Civil society</i> ; Pemerintah daerah.	FK diakui keberadaannya oleh pemerintah daerah, dan ini kondisi yang berbeda sekali dengan masa sebelumnya.	2	<i>Power</i> ; Pengaruh; Pengakuan;

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
268	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	(Forum seperti FK ini di Kabupaten Bandung?) Sepengetahuan Abah ada juga yang seperti FK... tapi menurut Abah mereka tidak menyuarkan aspirasi secara utuh... kadangkala adalah indikasi-indikasi lembaganya itu sendiri maupun individu-individunya memiliki kepentingan lain baik politik maupun ekonomi... Tapi kalau FK tidak... Bukan tidak ada, banyak forum-forum disini... Tapi bedanya, bukan menyombongkan diri, FK ini tidak terkontaminasi oleh keinginan individu maupun kelompok yang ada di FK untuk kepentingannya sendiri... Jadi kami lurus saja... Berangkat, asal ada cukup untuk bensin, ya berangkat... Kadangkala tanpa makan, asal bisa <i>udud</i> , oke kita jalan...	Forum lain.	Adanya kelompok atau forum lain yang menyuarkan aspirasi tapi disertai pamrih tertentu.	2	Forum warga; Kepentingan pribadi dan kelompok; Kepentingan publik.
269	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Kalau punya kepentingan lain seperti orang-orang lain itu, menyuarkan sesuatu tapi dengan mengertak pemerintahan agar dapat sesuatu untuk dirinya... Kami ketemu Bupati, Wakil Bupati disuguhan nuhun, teu disuguhan nya' masa teu era... Itu cukup... Kami dan rekan-rekan datang ke Dewan, " <i>Ah sugan dibere' duit.</i> ", tidak begitu... Itu perbedaannya... Tapi tidak sedikit organisasi-organisasi yang diluar seperti menyuarkan kepentingan masyarakat tapi <i>mindset</i> di belakang itu ada sesuatu yang diharapkan... Itu bedanya...	Forum lain.	Adanya kelompok atau forum lain yang menyuarkan aspirasi tapi disertai pamrih tertentu.	2	Forum warga; Kepentingan pribadi dan kelompok; Kepentingan publik.
270	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Keberhasilan FK adalah, satu, dengan telah diakuinya FK ini oleh para pemutus kebijakan... Beda dengan belum ada FK... Didengar, tapi tak pernah diadopsi gagasannya... Kalau dengan munculnya FK, aspirasi kami di dengar dan di adopsi... Bisa dimasukkan ke rancangan kebijakan... Itu kan keberhasilan... Meskipun tidak secara utuh, tapi minimal satu atau tiga butir dari gagasan kami di adopsi itu sudah sebuah keberhasilan... Dan tidak mungkin kami menguasai seluruh kebijakan tersebut... Tapi minimal kami sudah terlibat dalam perumusan kebijakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, dan gagasannya kami bisa diterima, itu sebuah kebanggaan...	Pemerintah daerah.	Peran jaringan FK mempengaruhi kebijakan daerah, kebanggaan atas keberhasilan tersebut.	2	Mempengaruhi kebijakan.
271	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Yah, perasaan bahwa kami diakui, diterima... Kalau diundang oleh mereka seolah kita ini merasa diakui sebagai warga, sebagai masyarakat, diterima dengan baik... Itu kebanggaan... Tapi tidak untuk menjadi sombong, tapi mendorong kami lebih kritis lagi...	Pemerintah daerah.	Pengakuan dari pemerintah mendorong lebih kritis lagi.	2	Warga; Pengakuan.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
272	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Karena itu kami mengharapkan di wilayah-wilayah lain adalah wadah seperti FK ini... Karena tidak terkontaminasi baik oleh kepentingan-kepentingan individu ataupun sebagian kelompok... Kami murni... Kalau di wilayah kabupaten/kota lain ada seperti FK yang tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik ataupun ekonomi untuk memperkaya diri, membangun citra... Tapi bisa di dengar dan diadopsi gagasan kami itu saja sudah luar biasa... Kalau ada di tiap wilayah sebetulnya itu sangat baik...	Civil society di wilayah lain.	Mengharapkan ada forum sejenis FK di daerah lain.	2	Replikasi.
273	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Kami tidak ingin muluk-muluk, meningkatkan belanja publik dari 4% dari APBD Kabupaten Bandung menjadi 7% saja itu sudah luar biasa... Tapi bisakah? Belum bisa saya bilang... <i>Mangkanya jangan asal ngomong... Memang, kalau sedang kampanye, kecap tidak ada yang nomor 2, semua pasti ngaku nomor 1... Tapi nomor 1 yang macam apa?... Akhirnya dari sekian kandidat terlihat beberapa kandidat yang menonjol... Oh kandidat yang ini hanya janji...</i>	Kontestan Pilkada.	Dalam dialog dengan kandidat, FK dapat menilai pemahaman kandidat akan persoalan di daerah, kualitas gagasan dan personalitas kandidat.	2	Kapasitas politik (kontestan Pilkada); Kampanye Pemilu.
274	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Ada calon yang bilang, <i>"Saya akan membenahi lingkungan wilayah sungai..."</i> . Abah waktu itu langsung berteriak karena konsen di sumberdaya wilayah sungai... Abah bilang, <i>"Terima kasih... Ada kandidat Bupati dan Wakil Bupati yang ingin mengelola sumberdaya air... Karena air sangat penting bagi kehidupan... Tapi sebelum mengelola itu, Abah ingin bertanya, ada berapa wilayah anak sungai di Kabupaten Bandung?"</i> . Dia tidak bisa menjawab... Katanya, <i>"Aduh, saya belum tahu itu..."</i> . <i>"Bagaimana anda bisa mengelola wilayah sungai secara baik dan konkret kalau jumlahnya saja belum tahu... Itukan dongeng..."</i> .	Kontestan Pilkada.	Dalam dialog dengan kandidat, FK dapat menilai pemahaman kandidat akan persoalan di daerah, kualitas gagasan dan personalitas kandidat.	2	Kapasitas politik (kontestan Pilkada); Kampanye Pemilu.
275	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Daripada kampanye di jalanan mengerahkan massa, dengan tidak jelas... <i>Ceuk urang Sunda mah, "Keur naon ngabring-ngabringan ngadenge'keun pidato calon kandidat... bari tidak ada MoU secara langsung..."</i> . Kalau kita waktu di Telkom-kon ada berita acaranya, ada majalahnya... Kalau di lapangan apa yang bisa diperoleh... Ya tadi itu, hanya seremoni... Itu penghamburan anggaran... Meskipun kami tidak rugi, tapi kerugian totalnya ada, karena itu pembodohan... Kami dibodohi dan itu pembodohan politik secara nyata... Padahal tidak seperti itu...	Kontestan Pilkada; KPUD; Media.	Perbedaan dialog model FK dengan kampanye umumnya.	2	Kapasitas politik (kontestan Pilkada); Kampanye Pemilu.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
276	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Kalau kampanye model yang umum sekarangkan di lapangan, itukan hura-hura namanya... Apa bedanya itu dengan acara DANGDUT RIA?... DAHSYAT... IN BOX... Dia hanya ikut jojing... Iktu hore-hore... Teriak "Hidup...Hidup!"... Tanpa berpikir, apa pengaruhnya kampanye ini terhadap kehidupan kami nanti?... Tapi kalau di FK kita berinteraksi...	Kontestan Pilkada; KPUD; Media.	Perbedaan dialog model FK dengan kampanye umumnya.	2	Kapasitas politik (kontestan Pilkada); Kampanye Pemilu.
277	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Seperti yang banyak di kampanye itu, "Coba jalan mana yang rusak? Akan saya sumbang..."... Bukan itu...! Yang penting setelah jadi, apa yang anda ucapkan, apa yang anda janjikan, tolong direalisasikan... Karena itu, kegiatan di Telkom itu buat kami lebih menguntungkan daripada kampanye di TV, di lapangan... Dan kalau di dorong kampanye seperti di Telkom itu, itu lebih elegan... dan lebih elit lah... Karena proaktif dengan suara masyarakat... Dibanding kampanye konvoi mobil, motor... Tapi mungkin bagi mereka itu yang terbaik... Padahal kalau mencari yang terbaik adalah melalui diskusi... Riil dengan publik... Jangan khawatir tidak di coblos... Kalau berkualitas, mengapa tidak... Karena di masyarakat itu sebetulnya tidak ada kepentingan yang utuh terhadap kelompok politik tertentu...	Kontestan Pilkada; KPUD; Media.	Perbedaan dialog model FK dengan kampanye umumnya.	2	Kapasitas politik (kontestan Pilkada); Kampanye Pemilu; Transaksi politik; Dialog publik.
278	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	(Pernahkah mendiskusikan dengan KPUD atau Pemda mengenai pola kampanye ini?) Belum, karena kami juga belum masuk ke ranah itu... Karena kami dan rekan-rekan juga belum memperhitungkan apa sih yang bisa dimodifikasi dari ranah-ranah KPU itu... Tapi kalau yang kami lakukan waktu itu sih menurut kami lebih baik...	Kontestan Pilkada; Pemerintah daerah; <i>Civil society</i> .	Harapan model FK bisa diadopsi oleh KPU.	2	Peningkatn kualitas kampanye politik/Pemilu.
279	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Tapi memang, kalau dilihat secara utuh mah belum ada perubahan yang signifikan, terus terang... Ada istilah kan, kalau kita terjebur di satu comberan ya jangan sampai terulang... Tapi kan kalau di masyarakat itu kerapkali terjadi... mencerburkan diri... Kecuali kalau kesadaran akan hak-hak politik ini sudah <i>mantep</i> ... Tapi kan pragmatis masyarakat sekarang... Kalau bisa dapet sesuatu ya sudah aja ambil... Itu masih banyak terjadi...	Masyarakat umum.	Masyarakat pada umumnya memandang Pemilu/Pilkada.	2	Perubahan politik; Kesadaran politik; Pragmatisme; Politik transaksional.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
280	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	<i>Mangkanya</i> disitu sebetulnya lebih bermartabat, terutama buat para kandidat... Jadi tidak berbicara <i>silih goreng</i> di belakang, tapi secara langsung... karena hampir semua kandidat datang... <i>Pasea', sok wae... da' moal di coblos engke'</i> ... Kalau dia terjadi perang argumen diantara mereka, kan kita yang menilai... Jangankan nanti, sekarang saja kandidat sudah egois... <i>Mangkanya Alhamdulillah</i> waktu di Telkom itu semua datang... Bahkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang menang waktu itu dua-duanya datang...	Kontestan Pilkada.	Alasan mengapa para kandidat bersedia hadir dalam acara FK.	2	Dialog; Argumentasi; Kapasitas politik (kontestan Pilkada).
281	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	(Peran FAB?) FAB itu, ada <i>share</i> , menginspirasi, agar kami lebih baik... Karena tanpa mereka kami katakanlah kurang berpengalaman... kalau kualitas kami bisa mengimbangilah... Tapi dengan adanya FAB kami jadi punya inspirasi, punya semangat...	FAB.	FAB memberi inspirasi bagi aktivis Kabupaten Bandung.	2	Interaksi; Kolaborasi (antar CSO).
282	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	<i>Mangkanya</i> indahlah kalau kita bergabung... Meskipun katakanlah kita berbeda tipikal, berbeda karakter tapi kalau sudah satu tujuan, apapun yang kita perbuat itu akan terlihat indah, cantik, dan nikmat dirasakan... Walaupun ada perbedaan pendapat, itulah dinamika, dan manusiawi... karena tanpa adanya perbedaan kita tidak akan pernah berubah juga, tidak pernah maju... Jangan perbedaan ini dijadikan ajang permasalahan, tapi harus dinamis...	FAB.	Kombinasi konsep dari FAB dan manajemen lapangan oleh aktivis Kabupaten membuat FK dapat berlangsung baik.	2	Interaksi; Kolaborasi (antar CSO).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
283	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	<p><i>Tetep</i> kita perlu mediator seperti FAB itu, karena untuk penguatan... Karena FDA, PSDK, atau komunitas Abah di B2C2, mustahil kita kenal dengan aktivis di luar itu... Kebetulan ada rekan yang kenal dengan FAB, <i>share</i> lah... atau dengan Yayasan Inisiatif juga... Itu dibutuhkan... Karena kalau tidak kita mengemasnya susah... mengakomodir, menyatukan berbagai elemen disini... Mangkanya perlu juga mediator atau perantara itu... Tapi yang satu visi satu misi, dan tidak ada kepentingan lain selain mengemas tadi, aspirasi riil dari masyarakat, tanpa di embel-embeli kepentingan politik yang lain... Kalaupun tidak, mengapa tidak kita yang memulai komunikasi, silaturahmi awalnya... kita bicarakan dengan cantik, persuasif... "<i>Anda punya tujuan, punya misi... ternyata tujuan kita sama, cuma jalan saja yang berbeda... wadah yang berbeda... jadi kenapa tidak dikemas bersama... tapi tidak mengatasnamakan bendera anda, bendera saya... tapi apa namanya... ya Forum Konstituen...</i>" Karena kalau bicara bendera masing-masing akan muncul ego...</p>	FAB; FDA; PSDK; B2C2; Yayasan Inisiatif.	Aktivis Kabupaten Bandung tetap memerlukan dukungan dan kerjasama dengan FAB dan lembaga lain sepanjang ada kesamaan tujuan.	2	<i>Networking.</i>
284	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	<p>Nah disini akan terjadi, kalau <i>mindset</i> Forum Konstituen tidak diperhitungkan dengan baik, masalah itu akan terjadi... Jadi FK ini kan dibangun dari berbagai elemen, menjadi satu wadah, asalnya satu tujuan, satu motivasi, satu keinginan... akhirnya tidak menjual bendera masing-masing... jangan sampai muncul, "<i>Ini kalau tidak ada Abah tidak akan jalan...</i>" , atau yang lain juga bilang begitu... Ini yang Alhamdulillah tidak terdengar sampai detik sekarang ini... Nah itu, memang bagaimana mendesainnya agar sampai bisa seperti FK ini... Tapi daerah orang lain mungkin berbeda... penyikapannya juga berbeda...</p>	Jaringan FK; <i>Civil society</i> di tempat lain.	FK dibangun dari keberagaman, dan tetap bertahan karena ada semangat kebersamaan dan saling menghormati.	2	<i>Networking; Visi dan misi; Konflik.</i>

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
285	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	(Hubungan diantara anggota?) Munculnya harmonisasi karena saling menghormati ide dan gagasan... tanpa mendahulukan bendera masing-masing... Misalnya, "Ah Abah mah orang Baraya Citarum...", tidak begitu... Kalau di FK, ya saya orang FK... Kata Bung Ali, "Saya orang FK...". Itu sudah tidak dimunculkan lagi lembaga asalnya... Alhamdulillah itu tidak pernah terjadi... Jadi awalnya kita ngobrol seperti ini, akhirnya nyambung juga... Itu prosesnya.... Jadi bisa dibayangkan oleh Ki Dulur, kalau masing-masing mementingkan benderanya sendiri, itu tidak akan terjadi... Jadi memang tergantung dari mindset-nya... Jadi kalau kita berkumpul dalam konteks FK, sudah tidak bicara PSDK lagi, FDA lagi... tapi berbicara Forum Konstituen... Kalau konteksnya lain yang tidak menyangkut FK, baru kita pakai lembaga masing-masing...	Jaringan FK.	FK dibangun dari keberagaman, dan tetap bertahan karena ada semangat kebersamaan dan saling menghormati.	2	Harmonisasi; Identitas kelompok; Interaksi.
286	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Jadi Alhamdulillah kawan-kawan generasi sekarang ini banyak ya... Abah yang paling tua, tapi kawan-kawan tidak menganggap Abah paling pintar, dan Abah tidak berbicara bahwa Abah paling berpengalaman... Abah sekolah juga tidak, rekan-rekan jelek-jelek akademisi... Bicara disini apa adanyalah... akhirnya nyambung... Mangkanya ego disini dikesampingkan... Karena satu orang saja muncul ego, semua akan muncul juga... Mangkanya kalau pertemuan atau ngobrol biasa, kita tidak saling menyinggung wadah masing-masing... Seperti kemarin Abah bicara dengan Bung Ali minta masukan soal Citarum, "Gimana ya mengenai perkembangan Citarum ini...?". Kata Bung Ali, "Ya udah Bah, kita bikin surat aja untuk minta pertemuan...". Jadi sudah tidak membawa-bawa nama lembaga sendiri, tapi sebagai konstituen saja...	Pegiat FK.	Relasi yang terbangun antar pegiat FK cukup egaliter.	2	Interaksi; Kesetaraan.
287	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	(Keterlibatan perempuan?) Selama ini menurut pandangan Abah keterlibatan perempuan di FK sudah cukup baik... tapi memang kita harapkan bisa lebih banyak lagi yang terlibat... yang punya pandangan berbeda tapi satu tujuan... Tapi dari yang kemarin-kemarin itu ikut kegiatan FK, menurut Abah sudah cukup baik...	Pegiat FK.	Keterlibatan perempuan di FK.	2	Partisipasi perempuan.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
288	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Kadang-kadang kita juga butuh suara yang polos... yang mungkin menurut orang lain tidak bernilai, mungkin tidak akademis... kadang-kadang ada mutiara pemikiran di sana... Kenapa? Karena kalau masyarakat itukan polos... Bicara tanpa rekayasa... kan muncul kalimatnya mungkin kasar... tapi sesungguhnya ada banyak kebenaran di sana... Itulah yang kami butuhkan... Bahasa rakyat lah...	Pegiat FK.	FK mengedepankan "bahasa rakyat" dibandingkan "bahasa akademis" dalam menyampaikan pendapat atau kritiknya.	2	"Bahasa rakyat".
289	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Padahal mungkin menurut orang-orang akademis pernyataannya tidak intelek... dari sisi pengalaman juga jauh... tapi kadang itu bagus untuk menjadi bahan kajian dan diskusi... Karena itu yang mungkin buat orang lain lemah justru kami butuh... yang bahasanya <i>bledag-bledug</i> justru kami butuh... Karena mereka bicara dari hati... Berbeda dengan orang lain yang berbicara seolah sudah punya ilmu, wawasan, apalagi pengalaman... itu pasti sedikit banyak ada rekayasa, karena ingin terpuji dan dipuji... Tapi kalau dari polos tadi itu murni... Itu yang namanya mutiara... Dari bahasan yang tak terduga tiba-tiba muncul pemikiran yang brilian...	Pegiat FK.	FK mengedepankan "bahasa rakyat" dibandingkan "bahasa akademis" dalam menyampaikan pendapat atau kritiknya.	2	"Bahasa rakyat".
290	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	(FK didukung Pemda atau KPUD?) Menurut Abah pemerintahan sebetulnya mungkin ketar ketir juga... karena tidak semua wadah ini memberikan masukan-masukan yang positif... Mangkanya satu hal yang mustahil jika mereka mengambil inisiatif, menjadi inisiator, untuk membentuk lembaga semacam ini... Tidak mungkin...	Pemerintahan daerah; KPUD.	Sulit mengharapkan pemerintahan mengambil inisiatif lebih dulu dalam kerjasama dengan FK, karena sikap mereka yang setengah hati terhadap FK.	2	Keterbukaan pemerintah (dukungan terhadap CSO).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
291	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Tapi dikala kami muncul mereka mungkin terpaksa merespon juga... Karena ketika masyarakat sipil makin tumbuhkan sebetulnya pemerintah semakin rentan juga.. semakin riskan sebetulnya mah... itu harus diakui... Tapi sesuai dengan undang-undang, masyarakat dimungkin untuk berserikat... Tapi di kala <i>civil society</i> ini membangun kekuatan yang besar dan secara politis buat mereka mungkin membahayakan, tapi disisi lain dia mengharapkan satu keuntungan dari dukungan suara... Walaupun kita tidak terkontaminasi dari apa yang mereka inginkan, tapi mereka mengharapkan dukungan kita, itu jelas... Wadah besar kadang jadi dimanfaatkan oleh mereka, untuk kepentingan elit politik saja... Jadi menurut Abah, di pemerintahan sendiri itu antara ya dan tidak... Ya-nya seolah dia mendukung di era demokrasi... Tapi tidak-nya karena ada rasa kekhawatiran... jangan-jangan... jangan-jangan...	Pemerintahan daerah; KPUD.	Inisiatif untuk berinteraksi dengan pemerintahan daerah perlu dari FK dan <i>civil society</i> sendiri dulu.	2	<i>Civil society</i> ; Responsifitas (pemerintah); Kooptasi dan manipulasi kekuasaan.
292	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Kalau selama ini tidak ada yang merasa terganggu oleh FK... termasuk para pemutus kebijakan juga... Bahkan mereka berterima kasih... Karena tadi, kami menyampaikan aspirasi itu dengan elegan... tidak serta merta mencak-mencak... tapi pakai akal sehat... Dimengertilah... Walaupun entah kemengertian mereka itu secara riil dan utuh atau tidak, <i>no problem</i> -lah, yang penting bisa dipahami saja sudah Alhamdulillah... Karena mereka bisa duduk disitu juga punya wadah masing-masing... Jadi ada nilai positif dan negatipnya... Positipnya kadang-kadang dia bisa <i>share</i> ... Negatipnya, kalau dia justru malah takut... seperti FK ini, kekuatan yang <i>geuneug-geuneug</i> -lah kalau kata orang Sunda... Kami hanya menyampaikan apa yang kami butuhkan dan kami anggap penting bagi masyarakat... Tapi Alhamdulillah, akhirnya dia memahami, mengerti dan mengakui, walaupun tidak tertulis... tapi mengakui... Setiap ada acara apapun, FK ini selalu diundang...	Pemerintahan daerah.	Keberadaan FK tidak merugikan pemerintah, bahkan diterima baik.	2	Interaksi dan interelasi warga dengan pemerintah.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
293	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	(Pemerintah sudah berjalan 1,5 tahun. Apakah ada realisasi janji Pilkada?) Kalau selama ini saya nilai, dan karena kebetulan Abah juga dekat dengan mereka, selalu <i>share</i> , itu ada perubahan-perubahan... Contoh, sekarang dari kebijakan-kebijakan yang walaupun secara prosentase belum secara utuh tapi mendekati keberpihakan kepada masyarakat... Walaupun kami memahami, anggaranlah... Kembali ke alasan klasik, soal anggaran... Tapi sedikit demi sedikit kami melihat sudah ada perubahan... Keberpihakan saja... Bahkan sekarang, Pak Dadang Naser itu akan mengurangi kebutuhan-kebutuhan belanja pegawai... Bahwa belanja yang tidak perlu itu tidak usah... Walaupun kemarin itu ada masalah mobil dinas... Tapi untuk 2013 akan ada pengurangan belanja pegawai itu nanti... Jadi itu sudah ada sedikitlah... walaupun itu adalah proses sebetulnya...	Bupati; Wakil Bupati.	Adanya kebijakan-kebijakan yang positif dari Bupati/Wakil Bupati saat ini.	2	Perubahan pemerintah; Keberpihakan.
294	Nadri	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	(Pak Nadri terlibat penuh dari awal di FK?) Ya... saya dengan Pak Ali... Ketidakpercayaan terhadap partai itu dalam tanda kutip... itu dalam konteks Kabupaten Bandung ya... Kalau perspektifnya kita persempit, itu jadi pembenaran... Contohnya begini, dengan banyaknya partai lalu mereka transaksional kalau istilahnya kang Kusnadi begitu... itu sangat terasa dan terbuka, dan diakui... banyak orang yang tidak terlibat dalam proses itu, kecewa dan tersisihkan. Dan beberapa figur dalam partai-partai itu memang tidak pantas menjadi seorang leader dalam konteks Pilkada Kabupaten Bandung... Dalam perjalanannya, begitu arogannya mereka dalam kejadian-kejadian seperti banjir, di mana mereka sekedar jual kecap untuk popularitas, itu mengakibatkan kekecewaan... dari situ intinya muncul... Lalu beberapa kawan-kawan kita... kalau di Kabupaten Bandung ya dari situ ke situ juga lah... mulai memberanikan diri dan muncul dari independennya... kebetulan orang-orang yang independen itu termasuk kategori di atas rata-rata dibandingkan calon partai, gitu... Munculah kekuatan-kekuatan yang dalam tataran norma kesantunan yang terjadi itu tadi... disitu mulai muncul friksinya...	Kontestan Pilkada; Partai politik.	Kelahiran Fk diawali ketidakpuasan terhadap partai politik dalam momentum Pilkada.	2	<i>Political distrust</i> (terhadap partai poltiik); Rekrutmen politik; Kapasitas politik; <i>Leadership</i> .

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
295	Nadri	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	Jawaban pak kyai itu, " <i>Tidak ada jampe tolak rejeki...</i> ", ha...ha..ha...	Kyai.	Kecenderungan kyai "mengakomodasi" semua calon yang tampil dalam Pilkada, untuk memperoleh keuntungan ekonomi.	2	Pragmatisme.
296	Nadri	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	Saya katakan, saya tidak suka sama kemenangan beliau itu... Oh saya mohon maaf... sampai detik ini saya tidak suka dan tidak menerima kemenangan dia... Karena licik dia, dan banyak duit lagi... jadi ngga usahlah, lo Bupati mau pakai 10 ajudan juga akan saya ludahin... Kalau saya tetep sampai sekarang juga... Biar mereka tahu, saya bukan bagian dari yang seperti itu... Konstitusi, aturan kita menyatakan bahwa dia menang, tapi tidak bagi saya...	Bupati; Wakil Bupati.	Tidak mengakui kemenangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.	2	Legitimasi politik.
297	Nadri	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	Kompetensi!... kita tahu persis dia ngga punya kompetensi apa-apa. Memble! Nasibnya aja baik jadi Bupati, ha..ha.. Lho sekarang terbukti kok... bahwa dia ngga punya kompetensi itu terbukti kok... Saya tidak bicara dalam arti pintu tertutup jendela tertutup... dalam forum merekapun saya sampaikan begitu, karena kita bicara fakta ya... bagaimana <i>leadership</i> dia, dalam situasi seperti ini tidak menjadi panutan... Kita tahu bangsa ini dalam kondisi <i>acak-kadut</i> ... sebentar lagi dalam kondisi antara tenggelam dan ngambang... bukan muncul... justru dia dalam situasi ini tidak menjadi panutan sebagai seorang <i>leader</i> yang dipilih oleh rakyat... Tidak! Hanya untuk menjaga sakralnya Golkar saja itu... Itu yang tidak bisa saya terima... Yang <i>gua nyesel</i> kenapa <i>gua</i> sekolah terus <i>ngarti</i> ... Jadi orang bodoh sekalian... <i>Nggak dosa</i> ... Kalau orang gila bugil di jalan ngga apa-apa kan... he..he...	Bupati; Wakil Bupati.	Kapasitas Bupati dan Wakil Bupati dipandang kurang memadai.	2	Kapasitas politik dan pemerintahan; <i>Leadership</i> .
298	Nadri	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	Ada <i>culture</i> yang masih terjaga ya... ya seperti tadi, birokrasi itu punya pengaruh di mata masyarakat itu...	Masyarakat umum; Birokrasi.	Birokrasi masih memiliki pengaruh yang besar di masyarakat.	2	Budaya politik; <i>Patron client</i> ; Patrimonial.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
299	Nadri	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	Walaupun beberapa lewat pintu belakang, beberapa rujukan sudah kekita... Minta dikritisi, minta masukan... Karena begitu mereka keluaran jadi sesuatu regulasi, mereka ingin resistensinya kecil-lah begitu... Kuno!... Kenapa ngga kita bahas duduk bareng dan kita sepakati bersama? Berbusa-busa kita berdebat untuk kemaslahatan masyarakat apa salahnya? Daripada <i>lo ngajak</i> nongkrong, ngopi, untuk diskusi... berapa itu untuk <i>ngongkosi</i> ...? Sering, saya saja sudah berapa kali diundang untuk itu... Tapi begitu mainannya begitu, ngga saya bilang... " <i>Lu butuh dateng aja ke rumah</i> ..."	Elit politik; Bupati/Wakil Bupati.	Lobby dan persuasi dari kekuatan di sekitar Bupati/Wakil Bupati untuk memperkecil resistensi.	2	Resistensi politik; Kooptasi; Dialog tertutup; Dialog publik; Konsensus.
300	Nadri	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	Sering kegiatan semacam itu... tapi buat saya itu kesannya masih informal, tidak terbuka... Di Bappeda itu saya sendiri bersama Kang Ali diundang... Tidaklah... bukan seperti itu... nanti kepentingan bersamanya tidak terjaga... Bersama disini rakyat... Begitu ini tidak seimbang, lebih pada dominasi mereka, wah kacau... semakin menggila mereka...	Elit politik; Bupati/Wakil Bupati.	Dalam pertemuan-pertemuan informal dominasi ada di tangan Bupati/Wakil Bupati. Menginginkan dialog yang terbuka saja.	2	Resistensi politik; Kooptasi; Dialog publik; Konsensus; Klaim politik; Justifikasi.
301	Nadri	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	(Konsolidasi FK?) Iya, kalau dilihat sebagai kebutuhan iya, tapi kalau melangkah kesana belum ya Bung Ali... Resource untuk pengkonsolidasian itu... ini Kabupaten Bandung Bung, bukan Jakarta... itu masih jadi sesuatu yang jadi handicap buat kita... kalau untuk komunitas kecil bisalah, tapi kalau lebih besar belum... Jadi ini difasilitasi oleh yang sudah establish-lah seperti PSDK, FDA, disitu... Tapi secara luas belum lagi...	FK; PSDK; FDA.	Keterbatasan logistik menghambat konsolidasi FK.	2	Kendala (konsolidasi).
302	Nadri	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	Dan kelihatannya, itu memang kebutuhan riil yang memang harus dilakukan karena... saya juga sedikit kaget, ketika ada Musrenbang itu ya, Pemda masih sangat menghitung, jadi ada undangan untuk Forum Konstituen... Pengakuannya ada... Tapi pemanfaatannya belum bisa kita lakukan seperti di awal dulu...	FK; Pemerintah daerah.	FK belum mampu memanfaatkan secara optimal dari adanya peluang pengakuan pemerintah daerah.	2	Pengakuan (keberadaan FK); Pengaruh.
303	Nadri	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	Ini yang kita bangun terus... budaya-budaya pragmatis pada saat <i>election</i> yang tadi kita diskusikan tadi itu akan kalau ini berjalan sekarang, itu akan teranulir... bahwa yang harus dikemukakan bukan kepentingan seperti itu, tapi kepentingan yang lebih jauh...	FK.	Pendidikan politik dapat mengikis budaya pragmatis di masyarakat dalam Pilkada.	2	Perilaku politik pragmatis.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
304	Nadri	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	Penataan birokrasi di kabupaten sekarang yang seenak udelnya saja... orang yang jelas-jelas tidak punya kompetensi, yang <i>record</i> -nya tidak laik sebagai kepala dinas, karena akses atau karena apa... entah karena imbalan dari masa <i>election</i> dulu... jadi kepala dinas...	FK; Pemerintah daerah.	Pengangkatan pejabat publik yang tidak berbasis kompetensi.	2	Staffing birokrasi; Kompetensi; Balas budi politik.
305	Nadri	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	Kalau massa relatif, karena yang menang saja tidak mewakili sepertiga yang punya hak pilih kan... Misalnya suara 10, dia itu cuma dapat 3... karena terlalu banyak pilihan, ada 8 kandidat itu kan...	Bupati; Wakil Bupati.	Suara untuk pemenang Pilkada minim dibanding masyarakat yang punya hak pilih.	2	Dukungan politik; Krisis legitimasi.
306	Nadri	L	FK	Wwcr, 2 April 2012	Ada konteks dari sisi ini Bung... ini Kabupaten Bandung... berhadapan langsung dengan resikoanya... Nah itu resiko lah... Kalau sudah itukan ujungnya, " <i>Jeung aing beul!</i> "... <i>Hayu</i> ... kalau saya <i>mah hayu ajah</i> ... Ada faktor itu... Kemarin itu juga, jangan dikira tidak... Itu di tataran paling bawah ya... diskusi semalaman, keluar-keluar sudah merasa jadi ahli politik itu ya... Yang begitu itu kan repot <i>ngadepinnya</i> ... Tapi kalau cara pandang kita itu, intinya itu karena saluran-saluran yang tersumbat itu...	Aktor atau kelompok lain yang berbeda cara pandang atau kepentingan.	Gesekan di tingkat bawah karena perbedaan pandangan politik.	2	Resiko politik; Saluran politik.\
307	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	Kalau dari dari sisi tujuannya bagaimana si kandidat dapat mengekspresikan gagasan-gagasan pembangunannya, dan masyarakat juga dapat menilai dan menentukan pilihan. Walaupun pada akhirnya kita tidak pernah mengarahkan pada salah satu kandidat ya... Karena itu hak mereka kan... Karena kita juga menyadari, dari beberapa <i>credible source</i> yang dikonsolidasikan, itu memang sudah memiliki jejaring politik... Tetapi terlepas daripada itu, bahwa gagasan kita dalam hal demokrasi politik ini kita promosikan, bahwa masyarakat bersama-sama berkonsolidasi dalam menentukan pilihannya...	Kontestan Pilkada; <i>Credible source</i> .	FK adalah wadah yang memberi kesempatan pada kandidat dan konstituen untuk berdialog.	2	Kampanye dialogis; Preferensi politik; Uji publik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
308	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	Harapannya melalui corong Forum Konstituen, yang waktu itu kita sama-sama netral dan tidak mengarah pada salah satu kandidat, harapannya yang terpilih sebagai Bupati juga dapat memandang netral juga ke Forum Konstituen... Nah sebetulnya tidak dipungkiri bahwa setiap kandidat, termasuk Bupati yang terpilih ini, bahwa dia merasa terfasilitasi dengan adanya Forum Konstituen... Tapi dia juga sulit untuk memberikan ruang pada gagasan awal forum konstituen ini... Ya pada akhirnya saya kembali ke FDA gitu kan... Pada awalnya ingin membawa Forum Konstituen, tapi ternyata Forum Konstituen ini hanya bisa berlaku dalam posisi pra dan pelaksanaan Pemilu. Pasca-nya ini kan sama aja, pemerintah kalau sudah jadi ya sama aja...	FK; Kontestan Pilkada.	FK bersikap netral terhadap kandidat, dengan harapan pemenang Pilkada juga terbuka terhadap FK. FK hanya cocok pada momentum Pilkada.	2	Arena politik (<i>election</i> dan <i>pasca election</i>).
309	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	FK itu besar sekali potensinya. Cuma kita merasa bahwa untuk mengkonsolidasikan itu semua tidak punya cukup banyak energi... Kita juga dengan organ sendiri aja sudah repot ya... Karena memang Forum Konstituen memang gagasan bersama dan pada akhirnya itu dilakukan bersama-sama juga gitu...	Jaringan FK.	FK potensial, tapi ada kesulitan untuk konsolidasi, terutama karena	2	<i>Collective action</i> .
310	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	Kalau dalam hal akselerasi kegiatan, dan itu memang dibutuhkan dan penting, kita memang selalu melakukannya, apakah ada atau tidak ada dukungan sumberdaya dari pihak lain ya, apalagi kalau memang ada dukungan... Kawan-kawan FAB itu kan wilayah proyeknya Kabupaten Bandung... ya kita sebagai orang Kabupaten Bandung bukan melihat karena ada proyek FAB kan, tapi karena ada kesamaan gagasan... Itu yang mempertemukan kita, karena ada kesamaan gagasan... Bahkan kita juga tidak ingin tahu lah bagaimana soal proyek itu, yang penting agenda dan tujuan bersama ini terlaksana... Disitu ngga ada masalah...	FK; FAB.	Kerjasama FAB dan aktivis Kabupaten Bandung karena ada kesamaan gagasan mengenai pentingnya FK dalam momentum Pilkada 2011.	2	Akses sumberdaya (logistik); <i>Common issue/concepts</i> (kolaborasi FK dan FAB).
311	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	Memang ada dua pertimbangan untuk ke depan. Kita ingin tetap menjaga konsolidasi kawan-kawan di Forum Konstituen, sementara kita juga punya tanggungjawab di lembaga masing-masing... Tapi kalau itu tadi, ada momentum yang harus dijalankan, ya kita akan jalankan bersama gitu... Termasuk, fasilitasi logistik akan jadi urusan bersama semua lembaga untuk memikirkan... Apalagi kalau ada dukungan dari luar, misalnya untuk mendukung upaya konsolidasi, ya itu bagus juga... Tapi intinya, kalau momentumnya mengisyaratkan sesuatu bahwa Forum Konstituen ini muncul kembali, ya kita munculkan...	FK; "Anggota FK".	Konsolidasi FK tetap menjadi agenda, termasuk mengenai dukungan logistik bersama.	2	Organisasi taktis-strategis; Agenda taktis-strategis; Momentum politik; Sumberdaya (logistik).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
312	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	Ya kalau lintas organisasi ya FDA, Forum Konstituen... saya nggak tahu lagi kalau yang lain... Itu yang kita garap gitu ya... Paling kalau ada isu... Waktu gempa misalnya Forum Solidaritas Korban Gempa... ya kita bergerak disitu...	FK; FDA.	Forum warga yang relatif "permanen" tidak banyak di Kabupaten Bandung.	2	Forum warga (jenis: formal-informal; isu pendek-isu panjang).
313	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	Kalau efeknya, diakui atau tidak, mungkin terpilihnya Bupati sekarang, Forum Konstituen itu sama-sama mempengaruhi ya... Karena kita tadi mengkonsolidasikan banyak pihak disitu, walaupun mereka sudah berjejaring dengan partai atau kandidat tertentu, setelah menyaksikan proses penyampaian kandidat dan bagaimana dia menjawab apa yang menajdi keinginan masyarakat, ada juga yang banyak tertarik... Dan ketika peserta Forum Konstituen ini tertarik, kan bukan dia juga ternyata, karena dia di wilayahnya juga berpengaruh juga...	FK; <i>Credible source</i> ; Bupati/Wakil Bupati.	Terpilihnya Bupati/Wakil Bupati sekarang sedikit banyak juga dipengaruhi oleh FK. FK netral, tapi <i>credible source</i> yang terlibat dialog dapat menilai, memilih dan mengkampanyekan sendiri pilihannya di komunitas atau lembaganya sendiri.	2	Efek Forum Warga; Efek proses deliberasi; Pengaruh; Resonansi (warga - <i>credible source</i> - politisi; dan sebaliknya).
314	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Kalau secara pribadi, buat saya FK ini memberi peningkatan kapasitas ya... karena saya kan pendidikan cuma SMP... Menarik disini, jangan dulu perubahan untuk Kabupaten Bandung, tapi perubahan untuk diri sendiri dulu ya... Dari dulunya saya buruh tani tukang cangkul, sekarang bisa diskusi dengan Bung misalnya... Berani bicara gitu aja udah sebuah peningkatan menurut saya... Bisa menjadi pemateri di Kurpola dengan mahasiswa... bisa seperti itu aja udah jadi kebanggaan buat saya... Ikut seperti ini, walaupun tidak menjamin di ekonomi, tapi kalau saya soal itu <i>mah nuturkeun kitu' yah</i> ... Ketika ke Dewan, karena sudah berpengalaman biasa berdiskusi, kita nggak takut atau malu mengungkapkan aspirasi, <i>kitulah</i> ... Ini memang sebuah pencerdasan, terutama pencerdasan politik... Secara status sosial juga Bung, ketika kita berorganisasi, secara tidak langsung lingkungan sosial kita juga melihat, bagaimana kita... ya dibanding dulu gitu ya... Sekarang mereka sering nanya juga ke saya... Apalagi yang bikin proposal ke Pemda, " <i>Cair nggak?</i> ". Kitakan lihat di APBD aja cair apa nggak...	FK; Komunitas; DPRD; Pemerintah daerah.	FK memberi manfaat peningkatan kapasitas pribadi, sebagai ruang pendidikan politik. Status sosial di komunitas juga meningkat karena dianggap punya informasi dan jaringan.	2	<i>Capacity building</i> (manfaat FK); Pendidikan politik; Status sosial.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
315	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Setelah Pilkada ini belum ada perubahan yang signifikan... dan <i>bargaining position</i> si FK ini ke Bupati belum kuat juga... ini yang saya lihat ya... Harapannya kan ada perubahanlah... dari segi anggaran saja untuk belanja langsungnya saat ini cuma sekitar 40%-an dari total APBD gitu kan...	Bupati/Wakil Bupati.	Belum ada perubahan yang signifikan dalam satu tahun pemerintahan. <i>Bargaining position</i> juga masih dipandang belum kuat.	2	<i>Bargaining position</i> ; Perubahan pemerintahan (<i>governance</i>).
316	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	FK ini bagus sebetulnya ya... waktu sebelum Pilkada kemarin itu kita bisa ketemu dan dialog dengan calon-calon Bupati... Prosesnya ya di dalam debatlah... pemaparan visi misi calon di hadapan semua peserta FK yang dilibatkan... <i>Cuman</i> disana kental ini juga ya... yang ini pro ini, yang ini pro itu... Jadi si masyarakat juga nggak objektif juga peserta forumnya... karena yang dilihat itu, yang datang itu sudah pendukung-pendukung si calon... Ah nggak peduli calon lain, yang penting saya mendengarkan dan memberi tepuk tangan calon yang dijagokan... itu yang saya lihat ya...	FK; Kontestan Pilkada; <i>Credibile source</i> .	FK forum yang bagus. Meskipun dalam dialog kandidat dengan konstituen, banyak konstituen yang tampak menunjukkan keberpihakannya pada calon-calon tertentu.	2	Dialog publik; Debat; Preferensi politik; Rasionalitas.
317	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Tapi cuma sedikit orang yang saya lihat ya di masyarakat yang melihat dari segi visi misi... Karena yang saya lihat kemarin itu masih kental juga politik transaksionalnya ya...	Masyarakat umum; Kontestan Pilkada; Partai politik.	Masyarakat cenderung terjebak politik transaksional dan tidak melihat visi, misi dan kapasitas kandidat.	2	Perilaku politik transaksional.
318	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Jadi pencerdasan-pencerdasan politik di Kabupaten Bandung belum ada itu... Apalagi partai-partai politik yang melakukan pencerdasan politik itu cuma NGO-NGO kecil gitu kan... Ya dengan swadaya semampunya melakukan pencerdasan-pencerdasan politik... Kalau partai politik ya gitu, yang diterapkan politik transaksionalnya, bukan pencerdasan masyarakat... Yang membawa visi misi untuk lima tahun ke depan gimana... jarang itu partai politik...	Masyarakat umum; Kontestan Pilkada; Partai politik.	Pendidikan politik ke masyarakat masih minim, hanya dilakukan NGO-NGO kecil. Partai politik tidak berfungsi dalam hal tersebut.	2	Disfungsi partai; Pendidikan politik; Swadaya; Perilaku politik transaksional.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
319	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Tapi memang kembali ke partai politik itu sendiri ya... Sekarang contoh aja, kualitas yang anggota Dewan, nggak ada itu... informasi ke masyarakat... juga kapasitas dia itu menurut saya nggak <i>capable</i> yang jadi Dewan dari partai itu... Dan saya pernah ngobrol, si Partai itu mengakui kader-kadernya itu memang terbatas kapasitasnya... Seperti fungsi untuk DPRD itu <i>instant</i> ... dia nggak terbiasa di partainya diadakan pembuatan legislasi, atau pengawasan, apalagi penganggaran... yang lebih rumit... Cuma FDA yang mengadakan kursus-kursus anggaran... seharusnya itu partai-partai politik yang melakukan di internal mereka... Itu yang lemahnya kalau yang saya lihat ya di partai politik...	Masyarakat umum; Kontestan Pilkada; Partai politik.	Pendidikan politik ke masyarakat masih minim, hanya dilakukan NGO-NGO kecil. Partai politik tidak berfungsi dalam hal tersebut.	2	Kapasitas politik (anggota legislatif); <i>Capacity building</i> (di internal partai).
320	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	FK ini perlu dipertahankan... Cuma perlu memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kemarin itu... Cuma untuk pendalaman-pendalaman ya memang perlu dikembangkan lagi... Inisiasi FK kemarin itukan orang-orang FAB ya, bukan dari Kabupaten Bandung...	FK.	FK perlu dipertahankan dan dikembangkan konsepnya.	2	Keberlanjutan (FK).
321	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Ya kalau informasi ke masyarakat luas kurang juga ya... dan tidak tahu juga apakah yang ikut FK apakah dia menyebarluaskan atau hanya buat dirinya sendiri... nah seperti itu...	FK; <i>Credible source</i> ; Masyarakat.	Tidak diketahui apakah <i>credible source</i> yang ikut dialog dengan kandidat juga menyebarkan informasi ke komunitasnya.	2	Sosialisasi (ke publik).
322	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Cuma yang disayangkannya itu, FK inikan mestinya melakukan monitoring ke pemerintahan, sekarang lemah juga... Mungkin dari orang FK nya sendiri karena punya lembaga lain, atau kepentingannya yang berbeda... Contoh kepentingan diri pribadi atau kepentingan golongannya... Di FK sendiri orang-orangnya itu belum terbangun komitmen untuk mengawal jalannya pembangunan di Kabupaten Bandung... mungkin itu salah satu kelemahannya...	FK; Pemerintah daerah.	Monitoring FK ke pemerintah daerah masih lemah, kemungkinan dipengaruhi faktor kesibukan pegiat FK di lembaga masing-masing maupun belum terbangunnya komitmen di dalam FK sendiri.	2	Kontrol pemerintahan; Komitmen (peserta FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
323	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	... kalau mungkin itu pendekatan ke partai politik... Sebenarnya kita kita... <i>kumaha nya'</i> ... <i>sok rancu lamun</i> bicara partai politik... Ya rancunya, kalau saya ya.. kalau partai politik itu ya sudah kotor, tidak sehat... walaupun kita ya rindu juga ke partai politik... dan sebetulnya tidak dapat lepas juga...	FK; Partai politik.	Sikap mendua terhadap partai politik, di satu sisi kecewa, di sisi lain menyadari bahwa partai politik penting dalam demokrasi.	2	Ambiguitas partai politik.
324	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Kalau menurut saya, kemarin itu banyak orang di FK yang nggak netral juga ya... Karena di dalamnya juga yang pro ke calon tertentu... Dan nggak masalah sebetulnya... Tapi ini kan sebetulnya menjadi peluang buat calon-calon itu... Dia secara tidak langsung difasilitasi sama FK... Tanpa keluar biaya... Malahan ada yang bawa ke forum FK itu kan, tim suksesnya bagi-bagi stiker... kampanye dia... Kita nggak larang...	FK; Kontestan Pilkada; Partai politik.	Kandidat dan partai politik sebetulnya diuntungkan dengan adanya kegiatan dialog kandidat dan konstituen.	2	preferensi politik; Netralitas politik; Kampanye Pemilu.
325	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Apalagi kalau sudah terpetakan ke depannya... Kita mah nggak berpartai politik, mau dipetakan kemana... Kecuali kemarin, karena ada independen itu... Paling orang-orang mah ke kita cuma ngira-ngira... seperti aksi penolakan pengadaan kendaraan dinas di DPRD kemarin itu... kita dibilang ditunggangi sama Demokrat... Ada yang seperti itu... Ya silahkan saja... Sementara kita nggak ada apresiasi dengan partai politik sebetulnya... Kita mah bener-bener dari kepentingan masyarakat, seperti aksi kemarin...	FK; Pemerintah daerah; DPRD; Partai politik.	Sebagai kelompok FK tidak berafiliasi ke partai manapun.	2	Afiliasi (dengan partai politik).
326	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Menurut saya konstituen itu... Saya ini orang Kabupaten Bandung. Disini ada pemerintahan, nah saya diposisikan sebagai konstituen, untuk mengaspirasikan... memonitoringlah kalau bisa... pemerintahan di Kabupaten Bandung. Kalau menurut saya begitu... Nggak tahu salah atau benarnya kan... Karena saya persepsinya seperti itu, maka saya harus terlibat... Jadi nggak ada batasan dia dari mana dari mana... Asalkan dia punya hak... punya kepedulian ke Kabupaten Bandung... Itu persepsi saya... kenapa kita perlu ikut Forum Konstituen ya...	FK; "Anggota" FK.	Konstituen adalah warga yang berhak berpartisipasi.	2	Konstituensi.
327	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Menurut saya sih kapasitas kawan-kawan cukup <i>capable</i> gitu kan... Karena yang dibawa kan dari unsur tokoh yang terbiasa dengan hubungan sosial kemasyarakatan... Lalu ada unsur mahasiswa juga, aktivis juga ada, aktivis lingkungan, pendidikan... Kitakan tinggal di FK itukan perannya ada yang untuk pendidikan, lingkungan, sosial...	FK; "Anggota" FK.	"Anggota" FK cukup punya kapasitas karena merupakan tokoh di komunitasnya, para aktivis dan mahasiswa.	2	Kapasitas politik (peserta FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
328	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Sebelumnya belum ada forum semacam ini, ada diskusi-diskusi beragam isu dari banyak kalangan masyarakat... Waktu Pemilu 2005 lalu belum ada seperti ini... Forum Konstituen, ada debat kandidat...	FK; <i>Civil society</i> .	Sebelumnya tidak ada forum semacam FK.	2	Forum warga (model FK).
329	Ihsan	L	FK	Wwcr, 19 April 2012	Sepengetahuan saya belum pernah ada kegiatan dialog warga dengan calon seperti di FK ini... Itu merupakan satu kebanggaan tersendiri Pak, bagi saya... Sehingga bisa tatap muka, menyampaikan uneg-uneg... Hanya barangkali ada keterbatasan-keterbatasan... Banyak kawan-kawan waktu itu yang hanya mengangkat masalah di daerahnya sendiri-sendiri... Tapi Pak Ihsan lebih menyoroti masalah tingkat kabupaten... Jadi itu merupakan kebanggaan tersendiri...	FK; Kontestan Pilkada.	Sebelumnya tidak ada forum dialog dengan kandidat semacam FK.	2	Forum warga (model FK).
330	Ihsan	L	FK	Wwcr, 19 April 2012	Menurut analisa Pak Ihsan, masyarakat itu banyak yang ingin memajukan kepentingan individu, ini kebanyakan... "Sok ari sogan lah kehidupan moal kieu wae...", nah itu rata-rata demikian... Jadi maunya tok cer...	Masyarakat umum.	Kecenderungan pragmatisme di masyarakat	2	Perilaku pragmatis (masyarakat).
331	Ihsan	L	FK	Wwcr, 19 April 2012	Sepengetahuan Pak Ihsan, mungkin juga saya kurang wawasan ya, tidak ada forum semacam FK ini di Kabupaten Bandung... Jadi belum ada yang seperti FK ini... walaupun ada itu sifatnya isu atau sektoral... dan itupun tidak jalan, he...he... Jadi kenapa Pak Ihsan merasa bangga selalu dilibatkan dalam Forum Konstituen ini... Nah mudah-mudahan jangan sampai Forum Konstituen ini jangan sampai hilang... Warisan pada generasi berikutnya, ha..ha..ha...	FK.	Tidak ada forum seperti FK di Kabupaten Bandung.	2	Forum Warga (FK); Keberlanjutan (FK).
332	Ihsan	L	FK	Wwcr, 19 April 2012	Jadi waktu acara di Unpas itu, ada mahasiswa yang bilang, "Kalau bisa bikin Forum Konstituen Jawa Barat untuk Pemilihan Gubernur ya...". Saya bilang, "Wah itu bagus kalau bisa dilaksanakan... Ya jiplak sajah pengalaman di Kabupaten Bandung... jiplak sajah...".	FK; Mahasiswa.	Gagasan mereplikasi FK dalam Pemilihan Gubernur.	2	Replikasi (model FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
333	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Karena mungkin dari segi demografis itu dulu kan termasuk kabupaten yang besar dari aspek jumlah penduduk dan jumlah pemilih, sesuatu yang menggiurkan untuk kepentingan politik jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti Megawati kan mencalonkan dari sini... Taufik Kiemas, Paskah Suzeta... banyaklah... Lalu dari sisi historiskan Kabupaten Bandung-kan kota perjuangan... Bandung Selatan ini sebagai basis perlawanan terhadap penjajahan... Kemudian juga tempat kumpul tokoh-tokoh Bandung. Kemudian Sukarno dulu juga kan konon sering kesini... Marhaen itu juga di Bandung Selatan, tapi sekarang masuk Kota Bandung sih...	FK; Tokoh-tokoh politik.	Kabupaten Bandung menjadi ajang perebutan suara dalam Pemilu oleh tokoh-tokoh politik nasional. Selain penduduknya banyak, juga punya basis historis yang kuat.	2	Geopolitik dan aspek historis (Kabupaten Bandung).
334	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Tapi kemudian kita melihat ada perkembangan politik mutakhir, di mana peran-peran elit tertentu sangat kuat di Bandung... terus yang terjadinya mobilisasi politik, bukan partisipasi politik. Ruang-ruang politik itu kemudian dimainkan oleh segelintir orang, yang punya kekuasaan, uang... jadi mobilisasi politik lebih kental dari partisipasi politik...	FK; Tokoh-tokoh politik.	Ruang dan peran politik daerah didominasi elite politik yang kuat sehingga partisipasi politik justru menjadi lemah.	2	Dominasi elit; Mobilisasi politik; Ruang politik; Partisipasi politik.
335	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Nah mangkanya kelahiran FK itu kan bagus. Kalau saya lihat itukan sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi politik, atau untuk memperkuat <i>civil society</i> , yang kita lihat dewasa ini masih lemah, dibandingkan pilar-pilar yang lainnya... pilar negaranya, <i>private sector</i> -nya... nah <i>civil society</i> disini saya lihat masih lemah... Ya ini yang kemudian tersentuh oleh Forum Konstituen...	FK.	FK hadir sebagai upaya memperkuat <i>civil society</i> yang memang masih lemah.	2	partisipasi politik; <i>Civil society</i> ; <i>Private sector</i> .
336	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Ya selama ini kan dinamika politik itukan lebih banyak diperankan oleh segelintir orang-orang... Mangkanya dari dulu baru hari ini terpecahkan bahwa Bupati Kabupaten Bandung itu adalah seorang sipil ya... Walaupun yang sekarang masih jadi pertanyaan, karena tetep yang menjadikannya adalah militer juga... ha..ha... Karena <i>incumbent</i> itu kan mertuanya yang militer juga... Jadi itulah keunikan Kabupaten Bandung....	Bupati.	Bupati Bandung sebelumnya hampir selalu dari kalangan militer. Bupati sekarang bukan militer namun menantu dari Bupati sebelumnya.	2	Aktor politik dominan; Sipil - Militer; <i>Incumbency</i> .

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
337	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	FK yang digagas oleh kawan-kawan, walaupun masih perlu perjalanan panjang karena masih banyak rintangan-rintangan, ya mungkin bagi orang-orang tertentu ini hal yang aneh, karena tiba-tiba ada sekelompok orang yang menurut ukuran mereka yang berkuasa, para penggagasnya itu bukan termasuk elit-elit partai politik, tapi kemudian membawa gagasan baru dengan visi politik yang keluar dari <i>mainstream</i> katakanlah begitu... Karena mereka membuat para konstituen menjadi lebih bertanggungjawab, berani mengkritisi perpolitikan, yang bagi mereka ini sebuah keunikan...berani...	FK.	FK sebagai sebuah upaya yang unik dan berani karena membawa visi politik baru yang keluar dari <i>mainstream</i> karena melakukan pendidikan politik dan berani mengkritisi kekuasaan.	2	Visi politik; Mainstream politik; Konstituen yang bertanggungjawab, kritis, berani.
338	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Tapi bagi saya ini adalah bagian dari upaya memandirikan atau menguatkan partisipasi politik, yang selama ini partisipasi politik di Kabupaten Bandung masih lemah... Saya lihat di semua daerah yang memiliki karakteristik pedesaan, partisipasi politik ini saya lihat masih harus diperjuangkan... Karena memang mobilisasi politik itu lebih kuat dibandingkan partisipasi politik...	FK.	FK hadir memperkuat upaya peningkatan partisipasi politik yang sebelumnya lebih dominan dengan mobilisasi politik.	2	Partisipasi politik; Masyarakat rural; Mobilisasi politik.
339	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Peran birokrasi, dari mulai Bupati sampai dengan Kepala Desa itu sangat berperan besar... dengan menggunakan instrumen kekuasaan... anggaran, dan lain sebagainya, untuk memanipulasi kehendak rakyat. Jadi yang terjadi sesungguhnya adalah manipulasi kehendak rakyat, padahal itu kehendak segelintir elit tertentu saja... Nah kenapa terjadi proses pembodohan seperti itu, ya karena memang rakyat tidak tahu, sangat miskin dengan informasi kan... Siapa calon, calon yang tepat untuk dipilih seperti apa... kan mereka masih abu-abu... sehingga ketika Kepala Desa, Camat, birokrasi berperan, dan digerakkan oleh kekuatan tertentu, akhirnya rakyat menentukan pilihannya berdasarkan arahan elit-elit tersebut, karena tidak ada yang menyadarkan... Disitu <i>money politics</i> segala macam... <i>politicking anggaran</i> kan terjadi... Tapi memang Kabupaten Bandung ini menarik Kang... jadi itulah kompleksitas politik Kabupaten Bandung... jadi tidak menarikpun penguasa, suatu saat politisasi anggaran terjadi... politisasi birokrat terjadi... dan itu kemudian efektif...	Birokrasi.	Birokrasi terpolitisasi oleh elit penguasa yang kemudian melakukan manipulasi politik melalui pengaruh dan politisasi anggaran.	2	<i>Patron client</i> ; Patrimonial; Politisasi birokrasi; Politisasi anggaran publik; Elit politik; <i>Money politics</i> ; Akses informasi; Manipulasi politik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
340	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Jadi, kembali ke Forum Konstituen, saya kira bagus... Meskipun misalnya orang mengecap Forum Konstituen itu adalah bagian dari alat kampanye calon tertentu... Tapi bagi saya ini sebuah kemajuan penting yang luar biasa... Walaupun itu memerlukan perjuangan panjang...	FK.	FK terkesan sebagai alat kampanye calon tertentu pada Pilkada lalu.	2	Terobosan politik.
341	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Saya kira peran yang bisa dimainkan jelas sekali, jadi bagaimana mereka harus bisa membuka cakrawala berpikir warga masyarakat ya... Karena rata-rata taraf pendidikan masyarakat Kabupaten Bandung ini kan masih... rata-rata lama sekolah itu baru 8,8 tahun... SD plus lah... Artinya itu masih problem... Kemudian juga misalnya perilaku politik masyarakat itu kan cenderung pragmatis. Ada uang... yang transaksional lah... ya inikan harus diluruskan...	FK.	Peran yang bisa diambil FK adalah melakukan pendidikan politik rakyat. Masalah utama karena tingkat pendidikan rendah, dan perilaku politik uang yang massif (transaksional).	2	Peran politik (FK); Pendidikan politik; Kapasitas politik (warga); Perilaku politik transaksional.
342	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Sebenarnya kalau dilihat dari segi kuantiti ya... Kabupaten Bandung itu kan dulunya basis AMS, sebagai organisasi yang paling tua kan... Ada AMS, Pemuda Pancasila... kemudian Ormas-ormas yang berafiliasi ke partai-partai politik ya... Tetapi mereka dulu hanya sebagai alat mobilisasi kekuasaan, dan tidak berperan dalam pemberdayaan <i>civil society</i> ... Karena rata-rata yang menjadi Ketua-ketua Ormas itu adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan... Yaitu kan, sampai merambah ke organisasi-organisasi yang lahir saat Reformasi, sebagai organisasi yang dalam tanda kutip "lurus"... Sebagai contoh SPN, Serikat Pekerja Nasional... Ini dikuasi oleh orang yang dekat dengan kekuasaan... Sehingga mereka itu miskin dengan semangat pemberdayaan... Orientasinya semua vertikal... Nah jadi akhirnya pendidikan politik rakyat jadi terbengkalai...	FK; Organisasi kemasyarakatan	Organisasi kemasyarakatan hanya menjadi alat kekuasaan dan tidak berperan dalam pemberdayaan <i>civil society</i> . Orientasi vertikal pada kekuasaan atau elit berkuasa membuat organisasi kemasyarakatan kurang memiliki semangat pemberdayaan masyarakat.	2	Mobilisasi politik; Pemberdayaan; <i>Civil society</i> ; Kooptasi; Orientasi politik vertikal (kekuasaan); Pendidikan politik.
343	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Karena saya orang Golkar... dulu... jadi saya tahu persis gimana semangat Golkar untuk mempreteli semangat-semangat <i>civil society</i> ... Karena semua lini harus berorientasi kepada Golkar... Inikan terus, <i>brainwashing</i> itu jalan... Untuk melanggengkan kekuasaan itu sarana efektif, tapi untuk jangka panjang itu akan merusak peran <i>civil society</i> ... Cuma si penguasa yang diuntungkan...	Golkar.	Golkar sebagai partai kuat di Kabupaten Bandung yang untuk melanggengkan pengaruh dan kekuasaannya justru melemahkan <i>civil society</i> dengan berbagai cara.	2	Partai berkuasa; <i>Civil society</i> (pelemahan).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
344	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Nah ini memerlukan peran kerja keras dari pegiat-pegiat sosial ini.... Masih banyak boleh dikatakan dalam tanda kutip "ruang kosong"... Jadi masyarakat itu dapat saya katakan, tidak punya daya analisis politik... Karena sekian puluh tahun, peran politik itu dimainkan oleh kepala desa-kepala desa... orang-orang tertentu... Jadi mereka itu hanya menunggu saja, arahan tokoh, atau lebih sialnya lagi, mereka itu menjadi pragmatis... Begitu mereka tidak percaya kepada kepala desa atau sejenisnya, lalu mereka lihat, ada uang, kita pilih... Nah ini yang kemudian menjadi berat buat peran-peran kita gitu...	Aktivis sosial politik; Tokoh masyarakat; Birokrasi.	Masyarakat mengalami pembodohan politik. Patronase dan pragmatisme politik menjadi dominan.	2	Aktivis sosial dan politik; "Ruang kosong"; Kapasitas politik; <i>Patron client</i> ; Perilaku politik pragmatis.
345	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Kembali, saya melihat kemudian yang dilakukan oleh Forum Konstituen itu sangat ideal... jadi bukan kemenangan yang kita kejar, tapi akhirnya ya semacam eksperimen politik, bahwa gerakan rakyat meskipun kecil, suatu saat dapat menjadi besar...	FK.	FK sangat ideal, menjadi semacam eksperimen dalam membangun gerakan politik rakyat.	2	Eksperimen politik; Gerakan rakyat.
346	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Kalau saya lihat memang, yang hadir di Forum Konstituen itu rata-rata yang selama ini tidak berkecimpung di dunia politik. Mangkanya banyak orang melihat... benar atau tidak... mohon maaf... ini forumnya Pak Toto... karena Pak Toto independen kan... Jadi ini mewakili kelas orang-orang yang selama ini tidak terlalu tertarik dengan partai politik... kesannya begitu... Tapi ini kan bagus... karena memang, masyarakat itu pada dasarnya sedang tidak terlalu percaya pada partai politik... Saya itu melihat, Forum Konstituen sudah mewakili kelas tertentu di masyarakat... Nah yang menjadi persoalan, penjualan gagasan ini memang memerlukan waktu yang panjang...	FK.	FK umumnya terdiri dari orang-orang yang tidak masuk atau tidak merasa terwakili oleh partai politik.	2	<i>Political distrust</i> (pada partai politik); Kelompok independen (non partai).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
347	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Kemarin itu memang ketemu momentum gitu...dalam Pilkada... Jadi kalau berbicara keterwakilan memang masih membutuhkan proses. Tapi paling tidak, kelas yang selama ini tidak mendapatkan katakana lah apresiasi yang seharusnya dari pemerintah, oleh penguasa... Kemaren kan orang menjadi sedikit terperangah... Ternyata bahwa, orang-orang yang tidak tergolong elit-elit partai toh mereka melakukan sesuatu yang lain. Dan itu sesuatu yang saya kira berbeda, lebih konstruktif, lebih mendidik... dibandingkan dengan pola-pola yang selama ini dilakukan oleh partai politik... yang untuk itu sebetulnya tugas partai politik... pendidikan politik-kan tugas partai politik... tapi kan partai politik tidak pernah melakukan itu... yang terjadinya pembodohan... manipulasi... sehingga rakyat tidak tahu apa yang sebenarnya...	FK; Elit politik; Partai politik.	FK hadir dalam momentum yang tepat yaitu Pilkada. FK menjalankan peran pendidikan politik yang selama ini tidak dilakukan oleh partai politik.	2	Momentum politik; Keterwakilan; Pendidikan politik; Disfungsi partai politik.
348	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Kalau partai politik itu sederhana sekali... Jadi yang saya lihat itu, partai-partai politik besar itu sangat pragmatis, bagaimana mendulang suara, dengan cara apapun. Tapi hak dan kewajiban masyarakat itu tidak pernah mereka berikan yang bener... Jadi sangat pragmatis sekali...	Partai politik.	Partai politik bertujuan pragmatis untuk memperoleh suara dalam Pemilu/Pilkada, dan dengan cara-cara yang pragmatis juga.	2	Pendekatan politik pragmatis (partai politik).
349	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Nah sehingga masyarakat juga akhirnya banyak mengambil jalan pintas. Karena orientasi politik para partai, hanya <i>to'</i> mengejar kekuasaan saja... Pemilu saja... Karena mereka berpikir bahwa rakyat ini hanya dapat dikuasai dengan pendekatan-pendekatan yang pragmatis... Mangkanya kemudian muncul Dana Aspirasi... nah berebutnya itu disana... akibatnya APBD jadi rusak kan... Karena mereka berpikir... saya kasih contoh... anggota Dewan masing-masing dapat dana aspirasi 1 milyar, nah dia membangun konstituennya dengan cara-cara seperti itu... " <i>Ini saya bantu... madrasah saya sumbang... jadi tolonglah suaranya untuk saya...</i> ". Nah seperti itu... Sangat transaksional...	Partai politik; DPRD.	Pendekatan pragmatis oleh partai untuk memperoleh suara membuat rakyat juga menjadi terbiasa pragmatis, dan menciptakan perilaku politik transaksional.	2	Politisasi anggaran publik; Perilaku politik transaksional.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
350	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Jadi bagaimana mereka mendorong sebuah partisipasi yang benar di masyarakat, bagaimana masyarakat menyadari hak dan kewajiban politiknya, <i>nggak</i> pernah tersentuh... Semua partai begitu... Nah inikan semakin rusak negara kita... Dan sekarang bisa kita lihat kan dalam setiap pemilihan, sekarang masyarakat rata-rata transaksional...	Partai politik; DPRD.	Pendekatan pragmatis oleh partai untuk memperoleh suara membuat rakyat juga menjadi terbiasa pragmatis, dan menciptakan perilaku politik transaksional.	2	Partisipasi politik; Hak dan kewajiban politik; Kesadaran politik; Perilaku politik transaksional.
351	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Nah, memang yang diperjuangkan Forum Konstituen itu <i>nggak</i> enteng ya... Karena kawan-kawan Forum Konstituen sedang mengusung sebuah gerakan politik yang bermartabat... sementara disinikan orang terus merusak... Seperti kita sedang berada di sebuah perahu, di mana perahu itu dibuat dari bahan yang dapat dimakan, ha...ha... Sebagian membangun, sebagian memakan perahu itu... sebagian besar... Jadi memang rumit, dan saya kira ini membutuhkan sebuah perjuangan panjang...	FK.	FK mengusung gerakan politik yang bermartabat.	2	Gerakan politik yang bermartabat; "Kanibalisme politik".
352	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Pertama itu Kang, kita melihat dari masalah pendidikan masyarakat yang masih rendah... Nah sehingga itu berpengaruh terhadap perilaku politik... Sehingga ini ada dua lini yang harus kita sentuh, yang pertama adalah lini pendidikan formal, non formal dan informal. Di pendidikan formal ini kita perlu memperjuangkan bagaimana sejak awal masyarakat dididik atau dijelali dengan pendidikan politik yang benar... Nah jadi bagaimana Forum Konstituen nanti bisa melakukan kemitraan dengan organisasi-organisasi yang bergerak di pendidikan, PGRI misalnya... Saya melihat PGRI relatif masih bisa dijadikan alat untuk bermitra gitu ya... Kelompok guru yang lain...	FK; Institusi pendidikan.	Pendidikan masyarakat masih rendah. Di pendidikan formal erlu diperbaiki muatan pendidikan politik yang baik.	2	Kendala partisipasi (tingkat pendidikan); Perilaku politik; Pendidikan politik; Kemitraan.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
353	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Yang non formalnya, karena saya lihat di pendidikan non formal seperti pesantren, ini juga yang kemudian turut merusak pendidikan politik masyarakat. Jadi yang namanya kyai itu, semua calon itu diterima, ha...ha... Itukan di pesantren, disaksikan santrinya... Dan itu, kyai kan selalu pidato... selalu menerima calon, dan ujung-ujungnya minta pesantren dibereskan... mesjid dibereskan... Inikan selalu terjadi... momentum Pilkada... apalagi Pileg... Pileg itukan banyak calon... Calon ini diterima, itu diterima... begitu saja terus... didagangkan di depan majelis taklimnya, santri-santrinya... FK perlu membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga pesantren, agar mereka juga tidak terus tercemari dengan cara tadi...	FK; Institusi pendidikan.	Pendidikan politik di institusi pendidikan non formal seperti pesantren perlu diperbaiki.	2	Kendala partisipasi (tingkat pendidikan); Perilaku politik; Pendidikan politik; Kemitraan; Politik transaksional.
354	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Kemudian juga jalur informal, keluarga... misalnya dengan forum tokoh segala macam...	FK; Institusi pendidikan.	Pendidikan politik di keluarga juga penting dilakukan.	2	Pendidikan politik.
355	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Tapi saya prihatin, kontribusi kyai itu justru sangat kontraproduktif dengan pembangunan demokrasi yang bersih... Bahkan kyai itu yang banyak merusak!... Inikan... kalau preman, kalau di forum-forum kan malu-malu... tapi kalau kyai kan terbuka... "Saya dukung, asal kahartos wae... ", iya ngga?... Ya dia kan berani minta ini itu secara terbuka... Kalau preman kan di forum ngga berani... paling di belakang... Mangkanya saya berani katakan, kontribusi terbesar kerusakan politik di Kabupaten Bandung salah satunya adalah kyai... he...he...he...	FK; Kyai.	Peran pesantren dalam hal ini kyai juga turut merusak karena memberikan pendidikan politik yang keliru kepada jamaahnya.	2	Perilaku politik transaksional (tokoh keagamaan).
356	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Saya mah punya beberapa kali pengalaman dengan para kelompok agamawan, dari mulai saya mencalonkan dari tahun 1999, legislatif... sampai kemarin itu... Saya yakin, generalisasi yang saya lakukan terhadap para kyai, itu saya bisa mengatakan, hampir benar... he...he... Generalisasi saya terhadap perilaku politik para kyai hampir 100 persen benar... Itu pengalaman sejak 1999, dan klimaksnya 2010 kemarin itu... Apapun alirannya...	FK; Agamawan.	Perilaku politik agamawan khususnya kyai secara umum mencontohkan perilaku politik transaksional.	2	Perilaku politik transaksional (tokoh keagamaan).
357	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Memang begini, perilaku fiqih itu berpengaruh sekali terhadap perilaku politik orang... perilaku fikih yang akomodatif, cenderung perilaku politiknyapun akomodatif... he...he... Jadi ada PERSIS, Muhammadiyah, Syarekat Islam, NU,... Jadi semakin akomodatif perilaku fikih, itu semakin mudah sekali untuk kesana kemari...	FK; Kelompok agama.	Perilaku fiqih mempengaruhi perilaku politik.	2	Fiqih politik (kelompok keagamaan).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
358	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Walaupun saya sebut saja, kalau orang PERSIS relatif lebih sukar untuk transaksional... lebih sukar... Tapi di Kabupaten Bandung akhirnya tercemar juga, mungkin karena ada pergaulan ya antar sesama mereka... Saya melihat pergeseran mereka di Persis ketika mereka digiring, kemudian difasilitasi untuk pembekalan, kemudian jadi terbelah-lah... itu kelihatan...	FK; Kelompok agama.	Perubahan perilaku politik di kalangan agamawan semakin meluas.	2	Fiqh politik (kelompok keagamaan).
359	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Dan yang paling parah itu di kalangan Nahdliyin, itu paling parah...he..he.. Jadi, mereka itu sudah deklarasi pada Putaran Kedua, menyatakan dukungan... kemudian kita lihat, tiga hari menjelang pemilihan, <i>incumbent</i> itu ngasih, ngasih, ngasih... kita cek, pada orang dekat kyai itu, sudah rubah... cepet sekali itu perubahannya... Karena NU struktural kan dukung kita... Tapi basis NU ini kan pesantren... Sampai ada teman saya Nahdliyin yang bilang, " <i>Sayah mah Pak, mending pake tim sukses residivis... Daripada kyai, pusing Pak... Kalau residivis kan kalau A ya A... dan murah... cukup dikasih rokok, paling uang saku Rp 50.000... langsung jalan.... Tapi kalau kyai, udah mahal, sambil ngga jelas lagi....</i> ", ha...ha...	FK; Kelompok agama.	Kalangan NU yang paling pragmatis perilaku politiknya.	2	Perilaku politik transaksional (tokoh keagamaan).
360	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Jadi memang menarik itu saya mendalami perilaku politik kyai... <i>mangkanya</i> kan NU aja Kabupaten Bandung, pada Reformasi itu hampir bisa dipastikan mereka berafiliasi terhadap PKB... Tapi sekarang ini sudah tidak jelas lagi... Jadi mereka sangat sederhana, dan transaksional... Nah ini kemudian ini menyebabkan... kan kyai itu punya forum pengajian itukan minimal seminggu sekali dengan masyarakat, kalau dengan santri jelas setiap hari... dan bayangkan perilaku politik yang ditampilkan para kyai itu pasti diresonansikan oleh para santri dan jamaahnya...	FK; Kelompok agama.	Kalangan NU yang paling pragmatis perilaku politiknya, padahal kyai masih merupakan panutan bagi jamaah dan masyarakatnya.	2	Perilaku politik transaksional (tokoh keagamaan).
361	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Jadi lebih berat bagi Forum Konstituen... Karena Forum Konstituen mengusung sebuah idealisme politik yang benar, sementara yang tadi itu transaksional... tarik menarik kan... Dan kita rasakan, sebagai seorang calon begitu berat untuk meyakinkan kyai... karena memang keyakinan kyai bukan disana... bisa dikatakan sudah tidak punya keyakinan politik, he...he..	FK; Kelompok agama.	Kalangan NU yang paling pragmatis perilaku politiknya.	2	Idealisme politik; Politik transaksional.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
362	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Kan saya juga pernah mendapat keluhan dari seorang anggota KBIH, urusan haji itu... <i>"Pak, gimana ya Pak, kyai kami itu... pertama datang Ferry Mursidan Baldan... membagikan kantong. Dan di depan kita pak kyai meminta pada Ferry Baldan membantu pembangunan pesantrennya yang belum selesai... Kemudian Ferry ngasih, sumbang...di depan anggota KBIH, para jemaah haji, sekaligus ada santri-santrinya... Minggu depannya datang Agus Muhiwang, dengan calon yang lain... ngasih bantuan lagi..."</i> . Nah, kyai itukan suri tauladan... itu kemudian mereka jadi bingung... <i>"Ini pak kyai bagaimana? Saya harus memilih siapa?"</i> . Jadi jawaban pak kyai itu, <i>"Ah kita mah kalau ada yang mau bantu mah kita terima saja... kalau soal pilihan itu masing-masing saja..."</i> . Nah, ada benarnya... tapi kemudian bagi pembangunan politik yang bermartabat, yang santun, yang bersih... ini kan acak kadut...	FK; Kelompok agama.	Kalangan NU yang paling pragmatis perilaku politiknya.	2	Perilaku politik transaksional (tokoh keagamaan); Pembangunan politik bermartabat.
363	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Jadi, itulah fikih yang akomodatif... Kalau preman lugas... kalau A dia dukung, ya sampai mati dia... konkret... Tapi kalau kyai mungkin menggunakan semangat atau filsafat, <i>"tidak ada sesuatu yang tetap, kecuali Allah"</i> ... Selain Allah itu makhluk, dan bisa berubah setiap saat... Mangkanya selalu berubah-ubah, he... he... he...	FK; Kelompok agama.	Kalangan NU yang paling pragmatis perilaku politiknya.	2	Perilaku politik transaksional (tokoh keagamaan).
364	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Jadi, aduh... pengalaman Pilkada yang bagi saya bikin mangkel... walaupun sebetulnya bagi politisi tidak ada yang mangkel... segala sesuatu itukan biasa, resiko politik... yaitu pada saat saya berhadapan dengan kyai... itu benar... jadi <i>roadshow</i> saya satu hari pernah dari Subuh berakhir jam 12 malam... datang... dan itu ada kyai yang hafidz pula... dia khutbah, dia begitu semangat... dan secara doktriner dia katakan kenapa di Putaran Dua kita harus pilih Nomor 2... begini begini... alasan syar'inya begini... alasan sosio politiknya begini... Kemudian dia kumpulkan kyai-kyai, dia yang kumpul, kita fasilitasi, dia kumpulkan... dan dia pidato habis-habisan, dalil keluar semua... Tapi itu cuma bertahan tiga hari... Kemudian dia sendiri yang interupsi untuk mengubah pilihan, ha...ha...ha... Itu di depan umum...	FK; Kelompok agama.	Kalangan NU yang paling pragmatis perilaku politiknya.	2	Perilaku politik transaksional (tokoh keagamaan).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
365	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Saya melihat pesantren sekarang mengalami degradasi dalam hal partisipasi politik... Jadi kalau bicara politik, bersentuhan dengan pesantren, ya semua bakal tertipu habis... Kyai itu efektif sih ke santri atau jamaahnya... karena dianggap punya barokah... Jadi kalau berbicara politik, saya lebih percaya Pak Ali, Pak Nadri... daripada pak kyai...	FK; Kelompok agama.	Terjadi degradasi peran politik pesantren.	2	Partisipasi politik (kalangan keagamaan); Trust politik.
366	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Ya ngga usah besarlah... di akhir kita udah abis "nafas"... <i>finishing touch</i> -nya lemah... (Sementara) Di akhir itu mereka menggelontorkan dana dari Bank Jabar yang saya sebut korupsi anggaran ya... Apalagi mereka punya APBD, sebesar Rp 2,1 triliun, walaupun itu termasuk gaji pegawai... tetapi kemarin itu termasuk gajipun dipolitisasi... untuk dapat tunjangan dikumpulkan dulu... Jadi untuk terima gaji saja mereka selalu penuh dengan kumpulan-kumpulan waktu itu...he..he.. Jadi gaji itu tidak dibiarkan seperti gajian biasa... setiap gajian kumpul dulu UPTD segala macem...	Birokrasi; Bank daerah.	Pasangan yang menang dalam Pilkada didukung oleh Bupati sebelumnya yang merupakan mertuanya. Terjadi politisasi birokrasi dan anggaran.	2	Politisasi birokrasi; Politisasi anggaran publik.
367	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Jadi belanja yang kita golongan sebagai belanja pegawai atau belanja rutin, semua dipolitisasi... apalagi yang bentuknya bantuan sosial, buat jalan, madrasah... semualah... Dan itu terakhir itu, pada hari Jum'at dan Sabtu... kan pemilihan hari Minggu... Bank Jabar Soreang dipaksa buka sampai jam 11 malam... Bank Jabar Buah Batu pada hari sabtu dibuka... yang biasanya ngga begitu... Kemudian digelontorkanlah bantuan kepada desa-desa... itu tanpa proposal... proposalnya bisa belakangan... Kan seharusnya proposal dulu masuk, verifikasi, baru uang keluar... ini tanpa proposal dulu... Jadi APDESI itu, Asosiasi Pemerintahan Desa... mengumpulkan kepala-kepala desa... itu yang Rp 70 juta, Rp 50 juta, segala macem... Bukan usulan, jadi top down aja itu... Bupati yang mengendalikanlah... Itu sekitar di atas Rp 15 milyar... (Sementara) Kita sudah tidak punya uang...	Birokrasi; Bank daerah.	Terjadi politisasi birokrasi dan anggaran. Pada intinya, Pilkada kemudian berujung pada pertarungan kekuatan politik uang dari semua kandidat yang maju dalam Pilkada.	2	Politisasi birokrasi; Politisasi anggaran publik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
368	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Jadi orang seperti Pak Nadri, atau orang-orang yang punya pandangan politik seperti itu banyak sekarang ini... Karena begini, begitu seseorang mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar, apakah itu dengan politisasi anggaran, politisasi birokrasi... artinya dia merupakan produk dari perpolitikan yang manipulatif... suara yang dia terima dari rakyat itu kan artinya suara yang telah dimanipulasi... baik mereka yang mencoblos, ataupun yang kita tenggarai bahwa ada blanko-blanko yang mereka coblos sendiri, karena kekuasaan ada di tangan mereka... Akhirnya legitimasi mereka itu menjadi rendah...	Birokrasi; Pemenang Pilkada.	Pilkada ditengarai penuh maipulasi dan kecurangan, akibatnya legitimasi pemerintah saat ini menjadi rendah.	2	Manipulasi politik; Legitimasi.
369	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Nah memang, sekarang ini dalam kondisi nyatanya, ada sebagian orang, masyarakat yang mendukung kita, yang memandang dia bukan Bupati... Jadi ya... ini kan menarik... tidak ada loyalitas kepada Bupati terpilih... Seharusnya, dalam perpolitikan yang sekarang, ketika dia menjadi Bupati, dia Bupati bersama... Tetapi karena cara-caranya yang tidak halal, itu kemudian, di masyarakat terbelah...	Birokrasi; Pemenang Pilkada.	Pilkada ditengarai penuh maipulasi dan kecurangan, akibatnya legitimasi pemerintah saat ini menjadi rendah. Masyarakat menjadi terbelah.	2	Legitimasi politik; Loyalitas; Pengelompokan (masyarakat terbelah).
370	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Tapi kemudian loyalitas politik, pengakuan politik kepada Bupati menjadi rendah... Karena masing-masing punya bos politik masing-masing... Seperti misalkan, para pengikut kita itu, sampai sekarang mereka merasa bahwa <i>"Itu bukan saya yang pilih..."</i> . Nah inikan bagi masa depan partisipasi pembangunan kan ini berbahaya... Jadi, program apapun yang dibawa oleh itukan pemerintah menjadi tidak jalan...	Masyarakat; Pemenang Pilkada.	Legitimasi pemerintah rendah mempengaruhi partisipasi masyarakat.	2	Loyalitas politik (rendah); Legitimasi (rendah); Partisipasi (lemah)
371	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Mari kita lihat... partisipasi pembangunan di Kabupaten Bandung rendah sekali. Kan kalau di desa itukan di dalam APBDes itukan ada yang disebut gotong royong, ada swadaya... silakan di cek, berapa kontribusi yang dirupiahkan dari gotong royong atau swadaya itu... Itu boleh dikatakan sekarang itu mendekati titik nol... Kalau ada itu hanya sekedar angka-angka rekayasa... Kenapa? Ya mereka sekarang apatis, jadi mereka hanya menunggu program dari atas saja... Bikin jalan, dana dari pemerintah Rp 100 juta, ya sudah Rp 100 juta... rendah...	Masyarakat; Pemenang Pilkada.	Legitimasi pemerintah rendah mempengaruhi partisipasi masyarakat.	2	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan (rendah); Gotong royong.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
372	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Karenakan partisipasi pembangunan melalui swadaya atau gotong royong, itukan harus dilahirkan oleh seorang pemimpin yang disukai, kan begitu... tidak bisa oleh seorang pemimpin formal, tapi oleh seorang pemimpin yang punya kharisma... dan kharisma itu masalah kejujuran... masalah kehalalan dalam bertindak... ngga bisa direkayasa...	Masyarakat; Pemimpin.	Partisipasi masyarakat dapat dipicu oleh adanya pemimpin yang diakui dapat diterima.	2	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan; Pemimpin; Kharismatik.
373	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	(Sebelumnya ada forum sejenis FK?) Ada... ya tokoh-tokohnya sekitar Pak Budi dan Kang Ali ini... Dulukan ketika saya masih menjadi bagian kuat dari Golkar... Saya dulukan menyadari bahwa di kalangan kita kawan-kawan anggota Dewan, itu sangat phobi dengan kata LSM... mereka ngga maulah, mereka alergi sekali... sehingga apapun yang diputuskan oleh Dewan jangan sampai bocor pada LSM... itu semangat dari kawan-kawan DPRD... kompak itu...	Golkar; DPRD; Aktivist; LSM; Forum masyarakat.	DPRD dulu alergi dengan LSM.	2	Resistensi politik (sikap politisi terhadap NGO).
374	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	...yang selama ini Kabupaten Bandung ini yang sejak dulu Bupatinya tentara itukan pengendaliannya tinggi... beda tentara dengan penduduk sipil... Jadi yang namanya pemimpin tentara itu, seluruh relung-relung kehidupan itu harus terkendalkan dengan baik... Tidak boleh satupun yang lepas... Itu yang saya dapatkan dari Pak Obar dulu kan... Terus begitu... Semakin banyak informasi yang keluar semakin berbahaya... Harus ketat... Itu yang kemudian, perilaku Golkar Kabupaten Bandung sebagai partai politik besar, ini cenderung sulit ditembus...	Golkar; Bupati; Militer.	Bupati sebelumnya dari Golkar dan militer, sehingga pengendalian masyarakat sangat ketat.	2	Pemimpin sipil - militer; Pengendalian politik.
375	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Dan itukan alat pengendaliannya sederhanakan kalau di dunia birokrasi, kalau tidak loyal itu jabatan hilang... itukan terus begitu... termasuk bagaimana itu dalam Pilkades... Karena Golkar itu menganggap Kepala Desa itu pilar... karena Partai Golkar adalah partainya tokoh, termasuk kepala desa... Jadi kalau tokoh habis, Golkar habis... dan memang kepala desa-kan dipakai sebagai alat pengendalian kekuasaan... termasuk dalam Pilkada... Mangkanya ketika sekarang akan datang pemilihan pergantian Kepala Desa, itu Golkar turun semua... dan uang digelontorkan... Para operatornya adalah yang kita kenal sebagai para penjudi kepala desa... itu ada rombongannya... itu yang kemudian dibiayai... itu sangat terkendali... Padahal, hampir semua orang bicara kalau Kabupaten Bandung itu jelek... Tapi begitu mesin birokrasi itu jalan, semua habis... angkat tangan...	Golkar; Bupati; Militer.	Bupati sebelumnya dari Golkar dan militer, sehingga pengendalian masyarakat sangat ketat. Birokrasi menjadi alat pengendali. Termasuk bagaimana mengendalikan pemilihan kepala-kepala desa.	2	Pengendalian politik; Money politics; Politisasi birokrasi; Kooptasi.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
376	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Paternalisme itu masih kuat... termasuk di birokrasi... karena begini, jadi Kabupaten Bandung selalu harus tentara itu menjadi budaya politik yang harus dipertahankan... jadi hubungan atas bawah itu adalah hubungan yang terkendalikan... Nah, jadi semua itu sangat serba terkontrol... akhirnya ini menjadi sebuah kekuatan yang sukar dipatahkan... Begitu Kepala Desa dipanggil oleh Pak Obar, yang tadinya abu-abupun bisa berubah warna... Karena itulah uniknya Kabupaten Bandung... Maka panteslah jika seperti Megawati ingin dari Kabupaten Bandung, juga tokoh-tokoh yang lain...	Bupati; Kepala desa; Militer.	Budaya politik paternalistik masih kuat di Kabupaten Bandung.	2	Paternalisme; Patrimonial; Budaya politik.
377	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Dan jangan salah, orang lain terus intensif untuk memperkuat kekuasaan... Mari kita lihat misalnya, lini-lini penting di sekitar kekuasaan, sekarang, inikan semakin mereka rebut... Contoh misalnya... kan kalau birokrat mah sudah jelas ya... Organisasi-organisasi massa, termasuk organisasi profesi... seperti KONI, jangan salah yang namanya KONI itu anggarannya lebih besar daripada Dinas... Ketuanya itukan Ketua Golkar... Sepakbola itu olahraga populer, nah Penda PSSI itu ketuanya adalah Ketua Fraksi Golkar... Itu juga dikuasai, Mas... Kalau dulukan ketuanya Pak Yadi jadi Ketua PSSI, itu mantan Wakil Bupati sebelumnya... Mereka habis semua... Kooptasinya kemana-mana...	Bupati; Golkar; KONI; PSSI.	Proses kooptasi lembaga-lembaga sosial dan politik di daerah masih terjadi.	2	Kooptasi (institusi dan jabatan publik).
378	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Sekarang misalkan gini, ormas-ormas besar... itukan tergolong Ormas besar... ini ukuran Golkar nih... itukan ketuanya mertua Bupati... Bu Obar yang jadi ketua... Nah Ketua SOKSI, adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah, BKD... Itukan bisa kita ukur... Ketua SOKSI adalah Kepala BKD... Dari sisi ketatanegaraan yang bener, perwujudan good governance, itukan sudah jelas-jelas salah... Wong namanya SOKSI itu adalah organisasi yang mendirikan Golkar, jadi mau tidak mau dia itu harus ikut kebijakan Golkar... SOKSI, KOSGORO, MKGR itukan KINO-KINO nya Golkar... Nah KOSGORO, ketuanya dirangkap oleh Bupati... Termasuk kemarin perebutan Kwartir Pramuka, antara Haji Hilman sebagai Ketua Golkar dengan Bupati... Akhirnya Bupati yang menang kan... Bupati itu Ketua Kwarcab Pramuka... Jadi memang sekarang mereka ini berpikir bagaimana menguasai berbagai lini organisasi...	Organisasi kemasyarakatan. Mertua Bupati; Pramuka.	Proses kooptasi lembaga-lembaga sosial dan politik di daerah masih terjadi.	2	Kooptasi (institusi dan jabatan publik).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
379	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Walaupun sebetulnya, peluang untuk... semakin melemahkan kekuasaan mereka itu, sebetulnya besar juga... Kalau dilihat misalkan, kenyataan kinerja akibat kurangnya kompetensi tadi itu... Orang juga bisa lihat sendiri... Jadi kalau kapal perang buatan Nurtanio itu, tanpa ditembakpun akan jatuh sendiri... he...he...he... Tetapi ini yang jadi persoalan... Ketika dulu banyak orang yang mengatakan bahwa Pak Obar itu tidak benar memimpin Kabupaten Bandung, gagal... itu bisa selesai dengan politik transaksional dalam kurun waktu sebentar saja, bayar, bayar, bayar... selesai persoalan... itu yang menang...	Bupati.	Politik transaksional tidak hanya pada saat Pilkada, tapi juga pada saat pemerintahan berjalan, untuk menutupi kelemahan atau kesalahan.	2	Kinerja pemerintah; Politik transaksional.
380	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Jadi mereka itu sebetulnya sangat miskin kompetensi... Karena itukan akibat wajar dari sebuah komunitas yang sangat terkontrol, terkendali, <i>top down</i> ... sehingga kreativitas tidak akan muncul... Nah justru kreativitas dan kecerdasan itu muncul di luar kelompok mereka... Tapi kita lihat, politik mereka kan hitam putih... dalam bahasa agama " <i>minna wa minkum</i> "... " <i>Mereka bukan orang kita</i> "... Sehingga akhirnya, orang-orang yang punya potensi dan lain sebagainya, itu tidak diajak secara optimal dalam pengambilan keputusan yang formal...	Birokrasi.	Budaya politik paternalistik dan dikotomi "kawan-lawan" membuat kreativitas lumpuh dan menjadi proses eksklusi terhadap orang-orang yang dianggap berseberangan.	2	Kompetensi (politik dan pemerintahan); Sentralisme politik; Pengelompokan (<i>in-group</i> dan <i>out-group</i>).
381	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Tetapi, akhirnya mereka juga kan butuh... sehingga mereka akhirnya mencoba cari-cari suasana lain untuk mendekati kita-kita ini... Seperti misalnya ke Pak Budi, ke Kang Ali... Termasuk contohnya semalam itu saya pulang sampai jam 1 malam... Bupati tampaknya melalui jalur Dadang Supriatna yang bos-nya Pemuda Pancasila itu bicara ngajak ketemuan Bupati sambil mancingan hari Rabu, dengan Bupati dan Wakil Bupati... Tapi saya jawab begini... Menurut saya, kalau ingin membangun politik ke depan yang bermartabat itu, maka <i>check and balances</i> itu mesti jalan... jadi biarlah mereka sebagai penguasa, tapi saya harus mencintrakan dan memposisikan diri saya dan kelompok saya sebagai opsi... Jadi kalau saya berangkul, apalagi dalam konteks yang sangat pragmatis dengan Bupati, citra dan posisi saya dalam kesejarahan menjadi tidak jelas...	Bupati; Wakil Bupati; Pemuda Pancasila.	Karena sebab membutuhkan kompetensi tertentu dan kooptasi politik, pendekatan terhadap kaum oposan kemudian juga dilakukan.	2	<i>Check and balances</i> ; Oposisi; Kooptasi.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
382	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Tetapi memang ada tanggung jawab, bagaimana kita menata kembali potensi-potensi sosial politik yang memang sekarang sedang rusak... Kalau kita memang tidak punya tanggung jawab inikan berbahaya bagi masa depan bangsa ini... Kabupaten Bandung, saya katakan barometerlah untuk Jawa Barat... Kalau Kabupaten Bandung tidak diarahkan, Pak Budi tidak tanggungjawab, Kang Ali tidak tanggungjawab... hanya mementingkan diri sendiri, hanya sebatas pribadi, selesai itu...	Aktivis sosial politik.	Tanggungjawab politik membangun kembali potensi sosial politik yang rusak, karena Kabupaten Bandung adalah barometer politik Jawa barat.	2	Tanggung jawab politik.
383	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	(Waktu Pilkada) Kalau saya didukung oleh PKS, PAN, PPP... Dadang Naser itu didukung Golkar dengan PAN... Pak Yadi diusung PDIP itu dapat suara keempat, padahal dalam Pemilu kan PDIP nomor 2... Jadi Golkar tuh kan kuat... Pak Yadi kan Wakil Bupati... Jadi Golkar itu mampu membuat PDIP sebagai pemenang Pemilu 1999 itu menjadi tidak berkutik... Dulu Pak yadi Ketua Dewan tidak berkutik... Ya itu canggihnya Golkar... Termasuk kita juga bagian dari Golkar dulu...	Partai politik.	Golkar sebagai kekuatan politik terkuat di Kabupaten Bandung.	2	Peta politik.
384	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Kang Tatan ini punya pesantren... Jadi saya kritisi terus ini... jangan sampai seperti kyai lain... punya pesantren, kemudian ikut mencemari perpolitikan... tapi harus mencerdaskan perpolitikan... Ada konsekuensi logis dari perpolitikan politik kyai sekarang... Jadi kalau dulu kan, ketika Pak Ali Imron itu mengambil sikap, itu dampaknya puluhan ribu... Tetapi kalau kyai sekarang paling seribu dua ribu... Sekarang itu masih kuat, ada tokoh lain, berimbang sekarang... ada tokoh nasional, ada kyai... Nah sekarang masyarakat sudah menilai kan, kok begini..? Di mimbar ini suruh dukung ini... besoknya jadi rubah, sudah mulaibergeser... Karena harga mahal kyai itukan pada istiqomah... Begitu dia tidak istiqomah dia ditinggal...	Kyai; Pesantren; Tokoh "nasionalis".	Akibat perilaku politik pragmatis/transaksional, banyak kyai justru kehilangan pengaruhnya. Pengaruh kyai dan tokoh "nasionalis" cukup berimbang saat ini.	2	Pengaruh (tokoh agama); Politik transaksional (tokoh keagamaan).
385	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	<i>Lamun ceuk Sunda mah, ulah murucan nu teu eucrek...</i> Jadi jangan memberi contoh buruk, karena pengawal moralitas bangsa itukan kyai... jadi kalau kyai sudah memberikan contoh buruk kepada masyarakat, itu pasti akan menggerus kharisma mereka... Ayeuna mah "Keuangan yang Maha Esa", lah... he...he...	Kyai; Pesantren.	Akibat perilaku politik pragmatis/transaksional, banyak kyai justru kehilangan pengaruhnya.	2	Pengaruh (tokoh agama); Politik transaksional (tokoh keagamaan).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
386	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Kalau dulu, ulama itu tidak mau datang ketemu penguasa... Dia tidak mau meminta-minta ke penguasa... sekarang... antri... Dulu itu kyai menjaga diri, Kang... jadi menjaga jarak... Nah sekarang tuh, sulit mencari kyai yang menjaga jarak dengan penguasa... tapi justru mereka melegitimasi kekuasaan... tanpa mempersoalkan kekuasaan, apakah kekuasaan itu diperoleh secara benar ataukah tidak... halal atau tidak...	Kyai; Pemerintah.	Dulu kyai menjaga jarak dengan kekuasaan. Sekarang kyai justru melegitimasi kekuasaan, bagaimanapun cara kekuasaan itu diperoleh.	2	Politik transaksional (tokoh keagamaan).
387	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Jadi, dari aspek fiqih saja itu sudah acak-acakan... terlalu akomodatif segala macam... Jadi Pilkada kemarin itu kelihatan, mana kyai yang netral... netral itu dalam arti memberi kesempatan yang sama... Kita juga tahulah, kalau pak kyai tidak bisa pro kepada kita, tapi dia bisa netral, mencerdaskan para pengikutnya... Tolonglah pengikutnya itu diberikan kecerdasan bahwa memilih pemimpin itu harus begini, harus begitu... Nah itukan materi-materi pemberdayaan harus begitu... Bukan kemudian diarahkan pada kepentingan pribadi kyai... menyelesaikan pesantren segala macam... Jadi itu luar biasa, baik di Pilkada maupun di Pileg... Itu semangat transaksional itu tinggi sekali...	Kyai; Pesantren.	Seharusnya kyai juga bisa memberi pendidikan politik yang baik ke jamaah dan masyarakatnya.	2	Fiqih politik (kelompok keagamaan); Politik transaksional.
388	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Terkait dengan gerakan sipil... kalau Dadang Naser... memang dia mencitrakan diri akomodatif... pengalaman saya bareng-bareng dengan Dadang Naser itu sejak 1992 di KNPI... Dia ketua kan dua periode... saya sekretarisnya... jadi saya tahu persis bagaimana kepemimpinannya, dan bagaimana dia memperlakukan orang... Jadi dia mencitrakan akomodatif dengan semua orang... mau ngobrol... Tapi sebetulnya dia sudah punya keputusan... Jadi memang sebatas ngajak orang, bareng-bareng... diskusi kebijakan segala macam, pasti dia mau... Tapi jangan harap bahwa gagasan kita akan diakomodir... Memang gayanya begitu... Nah memang dia selalu akan membuka diri terhadap semua kekuatan...	Bupati; KNPI.	Bupati pandai membangun citra akomodatif.	2	Politik pencitraan (pemerintah daerah).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
389	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Jadi gimana...? Selesai dengan kangen-kangenan... Persoalan serumit apapun, begitu kumpul... Kalau dulu itu ada Kliwonan, jadi setiap malam Jum'at sebulan sekali itu ada kumpul ulama – Alio... Kangen-kangenan, makan, ngobrol, pulang diongkosin... selesai persoalan... seakan-akan di bawah itu tidak ada persoalan, he..he.. Jadi semua bisa selesai dengan cara sederhana seperti ini... Nah itu yang kita anggap sebagai hilangnya semangat perjuangan, atau hilangnya semangat oposisi... Dan potensi oposisi itu telah lama dikuburkan... Dan kita membutuhkan orang-orang yang struggle... konsisten...	Bupati; Birokrasi; Ulama.	Persoalan di daerah diselesaikan lewat cara dan media terbatas, informal dan tertutup, yang sepenuhnya dikendalikan penguasa.	2	Manajemen konflik (informal, tertutup); Kooptasi.
390	Kusnadi	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 2 April 2012	Itukan namanya budaya feodal... Penguasa adalah raja, dan raja bisa melakukan apa saja termasuk mematikan dan menghidupkan rakyat... " <i>Ceuk aing pae! pae! isuk... Kata gua mati, lu mati besok...</i> ". Sehingga bertemu dengan pejabat itu seperti bertemu dengan Dewa, dan itu memiliki nilai yang besar... Paduli <i>teuing</i> pejabat itu pernah salah, pernah korupsi, atau <i>teu'</i> bener dalam memimpin... Tapi ketika dia bertemu, itu adalah sebuah berkah yang luar biasa... Yang itu bisa menghilangkan kesalahan apapun... Itu persoalan dalam budaya feodal... Ada contoh, di Pacet pernah diumumkan... Ada Ustad pulang dari Soreang... " <i>Alhamdulillah, bapak-bapak, barusan saya sudah ketemu dengan Bupati...</i> ". Jadi akhirnya mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak berani melakukan koreksi kepada pemerintah... Sebab mengkoreksi Dewa itu kuwalat...	Bupati; Ustad; Pejabat.	Budaya feodal masih kuat. Penguasa/pemerintah seolah dianggap sebagai Raja atau Dewa.	2	Budaya politik (feodalisme); Patrimonial.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
391	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Dan sejak itulah saya mulai melihat secara nyata bagaimana partisipasi masyarakat pada ruang politik yang akan memilih seorang figur pemimpin, yang notabene itu adalah merupakan lokomotif sebuah perubahan... saya baru merasakan penuh, seperti apa gejolaknya dan seperti apa masyarakat memandang sebuah perubahan politik... Nah kalau saya boleh berkesimpulan ya, di perjalanan yang seperti begitu... Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan sebuah grafik, kemudian kita coba pecah grafik itu, dan coba kita buat ruang publik dengan bahasa persentasenya, berapa persen sesungguhnya masyarakat yang mengerti arti sebuah proses perubahan kepemimpinan? Ini yang saya alami langsung. Itu mungkin hanya 20 persen. Dari total masyarakat yang mengerti, dan 20 persen itulah yang menjadi terdepan di tim sukses para calon. Sisanya tuh orang awam...	Masyarakat umum; Tim sukses; Aktivis.	Hanya sebagian kecil masyarakat yang paham mengenai makna Pilkada.	2	Partisipasi politik; Perubahan politik; Kapasitas politik; Ruang publik; Dinamika politik.
392	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Kalau dikatakan partisipasi politik ini Indonesia menjadi model seperti ini, di Forum-Forum Konstituen yang bisa dijadikan sebagai alat berkomunikasi antara rakyat dengan yang mewakilinya, itu hanya diwakili oleh elit politik yang 20 persen saya katakan tadi... Nah ini mungkin perlu ditindaklanjuti oleh sebuah penelitian yang lebih ideal... tapi ini yang saya rasakan... Kenapa demikian? Karena sebagian besar itu mayoritas ya pragmatis saja.. Jadi mereka tidak mengerti apa sih artinya seorang pemimpin daerah itu..	FK; Masyarakat.	Mayoritas masyarakat menyikapi Pilkada secara pragmatis saja.	2	Partisipasi politik; Komunikasi politik; elit politik; Kepemimpinan.
393	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Kemudian kalau kampanyenya dianggap mewakili perencanaan yang akan dia buat disaat mereka akan memimpin, itu juga bukan didasari oleh sebuah pengetahuan yang dilatarbelakangi oleh banyak aspek. Pertama, aspek regulasi, jadi baik calon, tim sukses, apalagi rakyat gitu ya... Jadi mereka berkampanye asal omong aja. Asal omong agar rakyat ini bisa di <i>gusur</i> jadi pemilihnya dan tidak berbasis pengetahuan yang kuat.	Kontestan Pilkada; Masyarakat.	Banyak kandidat Pilkada yang kampanye tidak didasari pemahaman akan persoalan dan kebijakan yang terkait.	2	Kampanye Pemilu/ Pilkada; Kapasitas politik (kontestan Pilkada).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
394	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Contoh, ketika mereka (Cat: para calon lain) menjanjikan sebuah regulasi perbaikan infrastruktur. Mereka tidak berdasar pada berapa sih kemampuan anggaran daerah yang rutin dia dapatkan gitu... dengan kewajiban dia menyelesaikan jalan... Contoh lain, ini terbukti ini... Ini analisis kita, karena sebelum terjun bertaurng dalam Pilkada kemarin, saya dan kawan-kawan ini kerjaan bertahun-tahun itu adalah otak atik anggaran. Bahkan mendampingi, membina, melatih penyusunan anggaran. Bisa dibilang Pak Toto itu termasuk yang menyusun modulnya. Jadi kita tahu sekali kemampuan anggaran itu. Saya juga kaget, calon-calon lainnya begitu beraninya membual janji kosong itu, dengan tidak berdasar. Karena anggaran Kabupaten Bandung ini tidak dapat dipungkiri habis untuk belanja pegawai... Jalan kita ada 1.800 km, kemampuannya untuk memelihara jalan hanya 300 km per tahun. Kekuatan jalan 3 tahun harus diperbaiki. Kita ketemu lagi dengan jalan diperbaiki awal tadi tuh kapan... Sementara dalam kampanye banyak calon lain yang berkoar... Ini kan tidak berdasar...	Kontestan Pilkada; Masyarakat.	Banyak kandidat Pilkada yang kampanye tidak didasari pemahaman akan persoalan dan kebijakan yang terkait.	2	Kapasitas politik (kontestan Pilkada).
395	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Yang menipunya juga tidak tahu, pokoknya yang penting omong, karena rakyat juga tidak tahu dasarnya. Jadi duaduanya boleh dibilang tidak tahu... Artinya menurut saya, pengetahuan mereka tentang kebijakan politik ini yang muaranya pada siapapun yang bermain itu adalah mensejahterakan rakyat, itu sebetulnya masih sangat jauh panggang dari apinya... Itu dari sisi kampanye para calon dan pemahaman masyarakatnya sendiri...	Kontestan Pilkada; Masyarakat.	Kandidat dan masyarakat sama-sama hanya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai masalah dan kebijakan.	2	Pemahaman politik; Kebijakan politik.
396	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Kemudian, sejauhmana respon masyarakat terhadap semua yang diomongkan calon... dan tuntutan masyarakat ya seperti.... Itu dimana-mana, ketika saya omong ke sana omong ke sini, semua yang disampaikan itu usulan, seakan-akan kita ini adalah tim perencanaan anggaran, dan kita ini punya segudang duit untuk diimplementasikan di lapangan. Bahkan dia mintanya bukan setelah jadi, sebelum jadi dia sudah minta... Saya datang kesana, " <i>Pak InsyaAllah lah, suara kami ke bapak. Tapi saya minta satu saja sekarang, punten itu jembatan kami diperbaiki...</i> ". Nah itu... itu yang hampir selalu muncul... jadi udah ngga nyambung...	Kontestan Pilkada; Masyarakat.	Masyarakat memandang kandidat Bupati/Wakil Bupati sebagai pemberi uang atau bantuan. Masyarakat membuka ruang politik transaksional.	2	Perilaku politik transaksional (masyarakat).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
397	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Kehadiran kita ini ingin mengkomunikasikan politik yang diharapkan itu gayung bersambut itu... Ini sulit kita mengkomunikasikan, jadi ketika kita sampaikan maksud kita, jawaban mereka ini jembatan sudah harus diperbaiki sekarang... Ada yang usul jalan. Sampai minta dibangunkan gapura... Datang ke pesantren, minta dibangunkan pondok pesantrennya. Itu di hampir setiap lokasi yang kita kunjungi, mereka minta kontan saat itu. Ini ngga nyambung dengan visi misi kita ya. Jadi kalau kita jelaskan bahwa dari sisi anggaran begini begini, bagi mereka itu tidak penting...	Kontestan Pilkada; Masyarakat; Pesantren.	Pesantren juga membuka ruang politik transaksional. Komunikasi dan dialog mengenai politik yang sehat sulit dilakukan.	2	Perilaku politik transaksional (masyarakat); Komunikasi politik.
398	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Lebih sakit lagi, mereka ini hanya mereka mengukur kehadiran kita ini hanya dari berapa kita <i>nyuguhi</i> orang. Berapa rupiah kita <i>ngongkosin</i> orang yang hadir... Itu lebih tragis lagi. Sehingga saya menyimpulkan, sosial politik kita ini adalah sosial politik yang tidak memiliki sebuah warna apapun. Jadi kalau misalnya total pilihan mereka itu satu mungkin, " <i>pokokna mah saya mau minta duit!</i> ", jelaskan, duit... Umpamanya transaksionis disitu... Ini transaksinya ngga nyambung. Karena ada transaksi yang sifatnya komponen pribadinya, ada transaksi yang sifatnya kepentingan masyarakatnya, yang sebenarnya kalau kita pisah-pisahkan mana yang untuk pribadinya dan mana untuk publik, itu mestinya ada perbedaan... Itu saya lihat baik dari kalangan yang awam sekali maupun terdidik.	Masyarakat umum.	Perilaku politik transaksional terjadi masyarakat awam maupun terdidik, baik untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok/komunitas.	2	Perilaku politik transaksional (masyarakat); Kepentingan pribadi dan publik.
399	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Nah ini, saya memberikan sebuah gambaran bahwa dua hal yang mungkin kita entah kapan mulai ketemu muaranya gitu. Karena, kemarin kita memasarkan diri dengan hal yang paling baru di ruang politik, independen kita. Masyarakat banyak yang menganggap kita itu partai independen gitu... jadi sudah makin jauh lagi... Karena yang selama ini mereka tahu, " <i>Bapak ini dari partai mana?</i> ", gitu... Jadi kita untuk menjelaskan itu saja sudah habis waktu. Kendaraannya sudah jadi masalah, apalagi isinya, ha .ha .ha... Sehingga seandainya kita menyentuh nurani terdalam, dan mereka itu utuh ada sebuah kerinduan akan perubahan, saya katakan bahwa di kalangan menengah itupun pada posisi <i>fifty-fifty</i> saja itu sudah luar biasa...	Kontestan Pilkada; Masyarakat umum.	Masyarakat kurang memahami perkembangan politik. Contoh dari sulitnya menjelaskan mengenai keberadaan calon independen.	2	Pengetahuan politik (masyarakat).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
400	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Jadi posisi siapa yang ideal... Yang ideal itu para pengusung saja, kita-kita saja... Para aktivis, yang selama ini sudah bersentuhan dengan kami, sering berdiskusi dengan kita, itulah yang seratus persen... Nah, sehingga, siapa pemenangnya? Ya kalau pemenang suara KPU sudah ada datanya, normatif itu... Tapi kalau pemenang untuk perubahan yang menyentuh pada ruang substansi, maaf-maaf saja...	Aktivis; KPU; Pemenang Pilkada.	Bagian dari masyarakat yang memiliki pemahaman politik yang ideal hanya para aktivis saja.	2	Aktivis; Perubahan politik.
401	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Ini nanti teman-teman bisa menelaah lebih jauh pada mereka yang saat ini disebut tengah berkuasa memenangkan Pilkada kemarin... Itu ada ungkapan di luar-luar, di <i>emperannya</i> , konon katanya, " <i>disitu gunung disini gunung, di tengah-tengah...</i> " ... apa itu lupa lagi... Tapi maknanya gini katanya, " <i>Bupati bingung Wakil Bupati bingung, yang penting rakyat mah biar saja hidup apa adanya...</i> ". Kurang lebih begitu... Itu di lingkaran aparat Pemda di bawahnya... Ini mengenai pemerintahan yang hampir dua tahun ini berjalan... Itu konon bahkan diungkapkan oleh Wakil Bupati sendiri... Saya bertanya, lantas yang pernah mereka omongkan dulu itu jadi apa? Padahal kita diundang secara formal, menyampaikan pidato politik di rapat paripurna Dewan, sebagai dasar yang akan jadi pegangan kami menang memimpin pada waktu itu. Itu resmi, penetapan calon... Itu menjadi dokumen politik, akan menjadi pegangan pada saat perencanaan pembangunan oleh pemenang.	Bupati/Wakil Bupati; DPRD; Birokrasi.	Bupati dan Wakil Bupati kesulitan membuktikan janji-janji kampanyenya.	2	Kapasitas politik dan pemerintahan (pimpinan daerah); Konsistensi (janji kampanye).
402	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Jadi kita hanya bangga dengan aksesorisnya. Jadi baru sampai disitu... Kemudian kalau kita ukur, seberapa besar janji politik yang nyambung dengan kepentingan rakyatnya ini? Ini perlu telaah yang lebih jauh lagi, jangan saja pada mereka yang mungkin kemarin tidak mendukung, ini kepada pendukung, kepada tim sukses yang menang saja... Katakanlah kepada tim sukses sebagai balas budi, berapa banyak yang terpenuhi, dibanding dengan tanggung jawabnya terhadap seluruh rakyat Kabupaten Bandung... Jangankan sampai kita membuat terobosan baru, mengembangkan kreativitas dan mengolah apa yang ada saja kita ngga akan mampu...	Bupati/Wakil Bupati; Tim sukses; Masyarakat umum.	Bupati dan Wakil Bupati kesulitan membuktikan janji-janji kampanyenya.	2	Konsistensi (janji kampanye); Terobosan/ inisiatif kebijakan.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
403	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Jadi kalau kembali ke belakang, mengapa demikian? Itu karena memang tidak ada sambungan yang pasti. Jadi bolehlah infrastrukturnya lengkap... Jadi kalau boleh kita gambarkan ilustrasinya dengan generator listrik. Generatornya ada, bohlamnya ada, kabelnya ada, tapi ini kenapa <i>ngga nyalah</i> ? Saya yakin <i>ngga nyalah</i> -nya ini karena tidak nyambung antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya.	Masyarakat umum.	Infrastruktur demokrasi lengkap tetapi orientasi dan komunikasi politik tidak atau sulit terhubung.	2	Infrastruktur politik; Koneksitas politik.
404	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Dari situasi sosial politik begini memang perlu terobosan yang luar biasa... Contoh terminologi subsidi tadi... <i>Mangkanya</i> , saat ini, dengan uang Rp 5.000 saja sudah dianggap sebagai kebagian dari seorang calon pemimpin... <i>"Saya dapet Rp 5.000 dari calon itu... Kalau dari calon lain bisa dapet Rp 10.000, oh berarti baikan yang itu..."</i> . Kebaikan diukur dari berapa si calon itu ngasih duit... Mau bagaimana?... Padahal sumber duitnya harus dipelajari... Apa dia ngasih duit apa mau ngerampok duit gitu... Kalau kita lihat tukang pancing, saya belum pernah lihat orang mancing, umpannya seharga ikan... Orang mancing, umpannya enak dan harum, tapi isinya kail, yang akan membunuh dia... Ini yang sampai hari ini rakyat tidak mau sadar...	Kontestan Pilkada; Masyarakat; Pemegang Pilkada.	Perilaku politik transaksional justru mendorong berkembangnya perilaku korupsi setelah si calon berkuasa.	2	Pemahaman politik (masyarakat).
405	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Mereka itu dijebak, dengan omongannya, dengan gayanya... Tiba-tiba kemana-mana pake kopiah... Kan gitu... Kalau politik kita yang basisnya tipu-menipu, hasilnya mau seperti apa... Sosial politik kita konteksnya sudah tipu menipu... Yang dikhawatirkan oleh saya, ini kemudian menjadi sebuah pembiasaan... kalau pembiasaan nanti itu menjadi biasa...	Kontestan Pilkada.	Politik yang tampil di permukaan adalah pencitraan saja.	2	Politik pencitraan (kontestan Pilkada); Budaya politik (tipu menipu).
406	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Nanti terbukti bahwa dalam setiap Pemilu, Pilkada itu pemenangnya adalah yang tidak milih... Lantas legitimasinya gimana itu?... Dari sisi agama misalnya, kalau ada 40% persen yang <i>ngga milih</i> , tapi tetap disuruh bayar pajak, kehalalannya itu dimana?... Inikan akan berpengaruh pada aspek psikologi, aspek sosiologi, kalau kita tidak mengenal status kita...	Kontestan Pilkada; Pemegang Pilkada.	Jika pemenang Pilkada adalah "golongan putih" maka akan berpengaruh secara psikologis dan sosiologis terhadap siapapun pemenang Pilkada tersebut.	2	Golput; Legitimasi.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
407	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Pada akhirnya para pemenang itu hanya akan mempercayai partainya saja... Jawa Barat memperhitungkan tokoh-tokoh senior dari partai besar, tapi yang menang kemudian adalah Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf yang notabene koalisi partai baru yang dianggap tokoh muda ideal... Keduanya berasal dari partai berlabel Islam, tapi berapa lama sih mereka mempertahankan silaturahmi politiknya?... Satu tahun dua tahun pecah kongsinya... Ini tidak dipungkiri, pasti lari pada pondasi awalnya. "Perkawinan politik" yang tidak jelas akadnya...	Kontestan Pilkada; Gubernur dan Wakil Gubernur.	Lemahnya legitimasi membuat pemenang Pilkada hanya bersandar pada partainya sendiri saja.	2	Political trust; "Perkawinan politik".
408	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Okelah kita bertemu di Forum Konstituen, berdiskusi disitu, menyarankan aspirasi segala macam, melalui ruang-ruang seperti itu, tapi karena basisnya sudah basis pragmatis, lalu mau bagaimana... Usulan-usulan masyarakat itu sebetulnya usulan yang sederhana, dan sudah menjadi bagian dari tanggung jawab terkait konteks peran pemerintah dan penganggaran... Suku Dinas apa yang tidak ada di daerah? Departemen mana kita yang belum ada? Kemudian ke bawah-bawahnya itu ada Dirjenya, Direktoratya, yang semua bicara untuk kepentingan rakyat... Tapi pertanyaannya, sampai ngga ke rakyat...?...	FK; Pemerintah.	Pemerintah dan masyarakat yang pragmatis membuat dialog semacam FK menjadi kurang efektif juga.	2	Politik pragmatis; Aspirasi (masyarakat); Kepentingan publik.
409	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Ini mungkin perlu formulasi-formulasi yang lebih ideal. Karena akhirnya sekarang yang marak adalah orang-orang seperti kita ini, yang secara politik sudah frustrasi, dan memilih untuk tidak ke ruang situ...	Aktivis; Masyarakat.	Masyarakat dan aktivis yang kecewa menjadi frustrasi.	2	Frustrasi politik.
410	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Ini karena sosial politiknya <i>nggak</i> pernah <i>nyampe</i> ke masyarakat. Jadi politiknya <i>nyampe</i> tapi sosialnya <i>ngga nyampe</i> . Jadi sosial kulturnya <i>ngga</i> diajari dengan ruang politiknya gitu... Padahal dalam ajaran agama, di awal mereka mengajarkan agamanya, itu basisnya politik... Untuk berkomunikasi tentang apa yang ingin kamu sampaikan, itu caranya banyak... Berhikmah dengan tauladan... Kemudian dengan ber- <i>mujadallah</i> , dengan berdiskusi... dengan mengajak, berarti kan dengan kampanye... Islam itu mengajarkan begitu...	Masyarakat; Pemerintah; Agamawan.	Sosial kultur masyarakat tidak dibekali dengan pendidikan politik yang baik, yang salah satunya dapat dirujuk dari ajaran agama.	2	
411	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Jadi, politiknya kan tidak sekedar berbicara santun ngomong, tapi bagaimana kebijakan ini dapat masuk ke ruang substansi, sampai kita berkomunikasi dengan para konstituen kita itu bisa nyambung...	Politisi; Masyarakat.	Politik yang diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan secara substantif dan membangun dialog dengan masyarakat.	2	Komunikasi politik; Politik substantif.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
412	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Sehingga ketika kita menawarkan sesuatu yang pasti itu justru menjadi sesuatu yang aneh... Jadi kalau saya membawa sesuatu yang pasti dan akan bermanfaat bagi mereka, ternyata itu malah merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Jadi mereka itu menjadi kaget kalau dibawa baik... Sebab sudah selalu dibawa buruk. Jadilah mereka mencari sesuatu yang instan dan pragmatis tadi...	Aktivis; Kontestan Pilkada; Masyarakat.	Masyarakat terbiasa dengan perilaku politik instan dan pragmatis, sehingga sulit untuk diajak mengembangkan praktik politik yang sehat.	2	Politik instan dan pragmatis.
413	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Karena kita ke masyarakat itu waktunya habis hanya untuk menjelaskan tentang siapa kita, apa kendaraan kita... Cuma itu saja... Tidak bisa mengajak mereka menjadi sebuah kekuatan... Karena ketika kita datang, mereka bilang, " <i>Pak bilih kahartos lah, mun sadayana calon oge panginten hoyong berkuasa...</i> ". Coba... Kita ini sudah diposisikan sama dengan calon lainnya, mau bagaimana lagi bicara yang lain. " <i>Jadi, sekarangmah saya ngga susah-susah... rakyat saya mah... yang penting mah yang bisa karasa sajah sekarang... Ya itu punten saja Pak, bangunan mesjid belum selesai...</i> ". Nah lo, kenapa kita harus membangun mesjid punya dia... Kan kita jelasin segala macam. Ujungnya kita berbasa-busa ngomong gitu, mereka bilang, " <i>Masyarakat mah pak tidak butuh penjelasan begitu, yang butuh mah bukti!</i> ".	Aktivis; Kontestan Pilkada; Masyarakat.	Masyarakat terbiasa dengan perilaku politik instan dan pragmatis, sehingga sulit untuk diajak mengembangkan praktik politik yang sehat.	2	Pemahaman politik (masyarakat); Perilaku politik transaksional.
414	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Jadi kalau ke depannya mau gimana, pertama saya katakan di awal, bahwa ini masih jauh dari muaranya... Jadi kalau kita ingin air sungai yang sudah terkena limbah ini bisa jernih sampai di ujungnya, ini memerlukan sebuah upaya keras dengan pemikiran, sumberdaya dan energi yang mungkin super disitu. Ketelatenan dan sebagainya... Jadi kalau kita ukur dengan generasi, entah perlu berapa generasi lagi...	Aktivis; Masyarakat.	Pendidikan politik rakyat perlu waktu lama dan upaya yang keras.	2	Perubahan sosial.
415	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Tantangan kita ke depan ketika kita ingin memulai sebuah aktivitas... Ini menjadi pemikiran untuk membangun sebuah kekuatan yang lebih solid, lebih menyatu, lebih menyambung... Tentunya kita-kita ini sebagai aktivis ya mulai harus sadar untuk tidak tergerus kembali pada ruang-ruang yang sudah jelas kabur... Dari pengalaman saya kemarin bertemu mulai dari dari rakyat yang tidak bersekolah sampai mereka yang berpendidikan tinggi, ternyata kok sama ya pandangan politiknya? Jadi masalahnya ini sudah sistemik pemahaman politiknya gitu lho...	Aktivis; Masyarakat.	Pendidikan politik rakyat perlu waktu lama dan upaya yang keras.	2	Civil society; Aktivis sosial dan politik; Pemahaman politik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
416	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Hal ini menunjukkan perlunya ada perubahan dalam dunia pendidikan terkait dengan makna dan arti sosial politik... Karena antara teori-teori yang kita pelajari dulu dengan situasi kekinian itu sudah perlu koreksi.... Contoh <i>rame</i> demo BBM kemarin... Kota-kota lain rame dengan demo dan bentrokan massa, di Bandung walaupun ada demo tapi adem-adem aja... Media juga tidak banyak meliput itu... Saya pikir, orang-orang yang diem aja itu sebetulnya sudah sampai pada sikap seperti kami, yang sudah apriori, sudah tidak peduli... Karena dari awal juga sudah non partisan, ketika ikut terlibat juga lebih tau lagi kondisinya...	Aktivis; Masyarakat; Media massa.	Adanya kesenjangan antara teori politik di kampus dengan praktik politik di lapangan. Masyarakat kemungkinan juga banyak yang sudah apatis dengan politik.	2	Pemahaman politik; Apriori; Apatisisme politik.
417	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Politik itu kan sekarang ini hanya permainan kata-kata, hanya simbol-simbol saja... Mau diapakan juga terserah mereka begitu... Lihat saja perdebatan antar partai koalisi soal BBM kemarin itu... Nah itu sama ketika kita di konstituen juga begitu... karena keinginan rakyat diabaikan...	Politisi; Partai politik.	Politik saat ini hanya permainan kata dan simbol.	2	Politik simbol.
418	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Sampai donator kita, yang membantu pembiayaan kampanye kita itu awalnya bilang, " <i>Desa saya 80% Kang!</i> "... Tapi pada faktanya, hanya 10%... Di tempat dia itu... Dia dan keluarganya saja yang dukung kita... tapi masyarakatnya ngga... Karena apa? Pada Hari-H itu mereka dikantongi uang Rp 10.000 oleh tim sukses calon lain... Dia, kawan saya itu, sampai sakit, kecewa berat, dan putus silaturahmi dengan tetangga-tetangganya saking kecewanya... Karena tadinya dia percaya penuh ke tetangganya... Setiap dia datang ke mereka dia kasih... " <i>Biarlah Kang ini tanggung jawab saya, ini daerah saya... Dan mereka juga sudah datang ke saya bilang siap...</i> " Ini, sampai seperti begitu...	Konstituen; Donatur.	Masyarakat terjebak perilaku politik yang instan dan pragmatis.	2	Perilaku politik pragmatis.
419	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Padahal, ibarat punya anak, yang berkewajiban mendidik situ siapa? Ya kita kan... Nah, dalam konteks pemerintah itu wajib sekali... Kalau kita punya kebijakan tentang transparansi anggaran, yang wajib melatih masyarakat untuk paham itu kan pemerintah, bukan justru disembunyikan... Kita mau mendapatkan akses perencanaan anggaran saja susah... Bagaimana mau transparansi?... Hak rakyat untuk memperoleh informasi seperti itu begitu susah... Baru informasi umum saja susah, apalagi yang detail... Istilah-istilah saja tidak ngerti... jangankan rakyat, ini elit daerah aja macam kepala desa, tanya istilah-istilah penganggaran... Apa itu KUA, SILPA, ngga ngerti dia...	Pemerintah daerah.	Pemerintah berkewajiban memberikan atau mendukung pendidikan politik kepada warga dan aparatnya.	2	Kewajiban negara; <i>Capacity building</i> (bagi aparat pemernitah dan warga); Transparansi; Partisipasi.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
420	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Terkait dengan FK yang digagas dengan FAB dulu itu, menurut saya tidak ada perubahan di masyarakat, karena pola pikirnya sudah terbentuk... Waktu itu kan yang hadir adalah para mahasiswa, aktivis, tokoh masyarakat... Itu tidak melahirkan sebuah pemikiran baru disitu... Yang menyarankan ruang-ruang substansi yang ideal... Tidak ada di forum itu... Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan mereka, itu lebih pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya normatif, hanya bobot atau dimensinya saja yang berbeda...	FK; FAB.	Mengkritisi lemahnya substansi dari permasalahan yang diajukan oleh warga yang terlibat dalam dialog kandidat dan konstituen.	2	Pemahaman politik; Kapasitas politik (FK).
421	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Jadi yang mereka pertanyakan pada kami di FK yang diselenggarakan oleh FAB itu tidak jauh beda dengan debat yang diselenggarakan oleh KPU... Pertanyaan-pertanyaannya masih yang normatif... Pertanyaannya, bagaimana cara anda menyelesaikan banjir?... Kemudian, bagaimana anda menyelesaikan pendidikan gratis bagi warganya... Kesehatan gratis?... yang kesehatan gratis dulunya Inisiatif malah yang menggagas... Perda-nya kan dari Yayasan Inisiatif... jadi belum mengarah pada sebuah gagasan atau diskusi menarik yang muaranya itu di pembelajaran politik... Ngga ada... Cenderung hanya mengangkat soal banjir, infrastruktur... Itu sama saja dengan pertanyaan yang tadi masyarakat kecil yang bilang "Pak itu tolong bantu jembatan..."... Apa bedanya coba? Hanya lebih besar saja dimensinya... Itu satu.	FK; FAB; KPU.	Mengkritisi lemahnya substansi dari permasalahan yang diajukan oleh warga yang terlibat dalam dialog kandidat dan konstituen. Dialog FK tidak jauh beda dengan dialog/kampanye yang dibuat KPUD.	2	Pemahaman politik; Kapasitas politik (FK); Kapasitas komunikasi (FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
422	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Ada beberapa calon kan yang hadir di forum tersebut... Saya waktu itu di awal sesungguhnya memancing, kebijakan-kebijakan yang berorientasi publik begitu... Saya sampaikan pada mereka, bahwa kalau Nomor 3 ini menang, maka kami mulai akan memilah mana yang menjadi hak publik dan yang menjadi hak personal, yang selama ini tidak ada pembeda... karena di kebijakan Bappeda Kabupaten Bandung mencabut bantuan-bantuan pada masyarakat miskin, seperti bantuan kambing dan sejenisnya itu, menjadi skema kredit itu karena kita memandang bantuan seperti itu privat sifatnya... Bukan publik... Contoh begini, hak publik menerima bebek itu kan seluruh Kabupaten Bandung.. Tapi yang <i>dapet</i> kan cuma sebagian kecil saja... Ngga bisa begitu... Hak publik itu infrastruktur... tapi publik diberi kesempatan untuk mengajukan kredit usaha modal kerja, dan itu difasilitasi, didampingi... Saya pancing begitu nggak ngeh... Tadinya saya berharap ada yang komentar seperti " <i>Ngga bisa, anda sudah mengambil hak orang miskin...</i> "... Tapi tidak ada yang mengomentari tajam seperti itu...	FK; Kontestan Pilkada.	Kandidat yang hadir juga tidak tanggap dan tidak tajam mengkritisi pernyataan kandidat lainnya.	2	Kapasitas politik (kontestan Pilkada); Pemahaman masalah (kontestan Pilkada).
423	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Yang kedua temen-temen yang lain juga dari kandidat-kandidat lain, ruang itu tidak dijadikan ruang pembelajaran politik, tapi lebih sebagai ruang kampanye... Sempat agak menarik ketika debat kandidat pertama di Bandung TV yang diselenggarakan oleh KPU... Ketika ada pertanyaan masalah banjir... Saya menjawab pada waktu itu, dan itulah saat satu-satunya ketika saya menjawab saya ditepuki tangan oleh semua peserta... padahal yang lain kan pesaing-pesaing politik pada waktu itu, tapi waya ditepuki tangan waktu itu... Ketika saya bilang bahwa bicara soal banjir ini bicara <i>policy</i> , soal kebijakan yang tidak bisa sektoral, karena harus menyentuh tiga hal, ekologi, ekonominya, dan sosialnya... Salah satu ini bolong, ini ngga bisa... Karena masyarakat desa hutan hidup di hutan. Kalau ngga boleh masuk hutan maka menghentikan penghidupannya... Tapi kalau dia dibiarkan merusak hutan, ekologi, ya kita kita banjir... Mangkanya orang tua dulu itu membagi struktur hutan itu dibagi sedemikian rupa... ada hutan babadan... Macem-macem... Yang model-model gitu harus jadi kebijakan pemerintah tentang hutan... Tapi kalau sekarang menjawab masalah banjir dengan penanam pohon saja, wah nggak bisa saya bilang... Saya mengoreksi jawaban pada kandidat lain sebetulnya... Tapi tidak dikembangkan...	KPUD; Kontestan Pilkada; Bandung TV.	Kandidat yang hadir juga tidak tanggap dan tidak tajam mengkritisi pernyataan kandidat lainnya.	2	Kapasitas politik dan pemerintahan (kontestan Pilkada); Pemahaman masalah (kontestan Pilkada).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
424	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Di FK yang kemaren itu, karena pondasi pemahaman politik ini belum paham pada pembelajaran politiknya, maka cenderung kita waktu di FK ini diskusi politik ini hanya sebagai forum kampanye saja... jadi ruang politiknya ini tidak tajam, dan menggiring sebuah pengetahuan dan pembelajaran, siapa diantara para kandidat waktu itu yang dikatakan layak pada aspek politik... itu tidak ada... Karena pertanyaannya pertanyaan normatif... Padahal yang diundang kan waktu itu ideal, ada tokoh-tokoh masyarakat, LSM, perguruan tinggi... Jadi dari sisi konstituen itu kita lebih kaya...	FK; <i>Credibile source</i> ; Kontestan Pilkada.	Dari sisi konstituen, acara FK lebih baik dari debat KPUD, namun substansi pertanyaan dan dialog ternyata juga tidak tajam.	2	Dialog politik; Kampanye Pemilu/ Pilkada; Kapasitas politik (FK); Pemahaman masalah (FK).
425	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Memang FK ini lebih terbuka dibandingkan yang dilakukan KPU... Sebab yang dengan KPU di TV itu selain waktunya yang dibatasi sekali, memang para penanya sendiri pada waktu itu penguasaan politiknya rendah... Cenderung yang bicara itu adalah para praktisi... Contoh yang bicara masalah lingkungan hidup itu kan Pak Sobirin, DPKLTS... Kemudian untuk kesehatan Dr. Hani, Direktur RS Al Ikhlas... Jadi praktisi... jadi bukan politisi gitu ya, yang mungkin bisa menasar ruang kebijakannya gitu ya... Jadi ketika saya menjawab begitu, Pak Sobirin tidak menjawab lagi...	FK; KPUD; Kontestan Pilkada; Bandung TV.	Acara di FK lebih terbuka dibandingkan debat di KPUD. Debat di KPUD juga tidak tajam pertanyaannya karena pesertanya praktisi yang kurang paham kebijakan.	2	Model dialog publik (FK dan KPU); Inklusivitas (FK).
426	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Sebagai contoh, ada perbedaan antara debat kandidat di KPU dengan di FK. Di FK itu kan lebih terbuka tuh... Tapi sayangnya meskipun di ruang terbuka seperti itu, kemampuan konstituen untuk mengapresiasi politisi ini tidak begitu dalam... Apalagi kalau di ruang-ruang lain yang sudah <i>ter-setting</i> ... Ada kemauan tapi kemampuan belum...	FK; KPUD; Kontestan Pilkada.	Kemampuan konstituen dan kandidat dalam mengapresiasi politik masih rendah.	2	Kapasitas komunikasi/ dialog (FK).
427	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Jadi di semua lini sepertinya belum siap diskusi politik dan kebijakan secara mendalam... Karena selama ini yang dikembangkan hanya isu... Diskusinya di ruang isu saja... Mengkoneksikan antara isu dengan data dan kebijakan itu yang tidak ada...	FK; <i>Credibile source</i> ; Kontestan Pilkada; KPUD; Tokoh; Akademisi.	Semua pihak belum siap untuk diskusi dan dialog yang tajam karena masih berbicara di tataran isu.	2	Kapasitas komunikasi/ dialog (FK dan kontestan Pilkada).
428	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Jadi memang kalau kita bicara soal ruang-ruang terbuka, ruang yang lebih ideal, forum-forum yang dibangun masyarakat itu penting...	FK.	FK penting untuk membangun ruang publik.	2	Ruang publik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
429	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Nah, dalam konteks politik, pendidikan dasar politik inilah yang perlu diberikan kepada masyarakat terlebih dahulu... Di semua level, bukan hanya di elit-elitnya saja... Kalau dasarnya baik, baru maju ke pendidikan yang menengah, lanjut... kalau sejak kecil anak sudah biasa belajar memecahkan masalah dengan teman-temannya, ketika remaja aktif berorganisasi, dia akan lebih mampu berperan... Dan ini kalau dibiasakan juga kepada rakyat, tentu akan lebih baik...	Institusi pendidikan.	Pendidikan politik dari tingkat dasar, menjadi bagian dari pengalaman organisasi dan memecahkan masalah.	2	Pendidikan politik (pada masyarakat, sejak dini).
430	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Bahkan menurut saya, tidak harus dimainkan ketika ada Pilkada saja sebenarnya. Sangat penting FK ini yang lebih idealnya untuk mencoba menguji dan memberikan pengajaran dan pengetahuan pada mereka-mereka yang sedang berkuasa sebenarnya...	FK; Pemerintahan daerah.	FK berperan menguji dan memberikan pendidikan politik pada pemerintahan daerah.	2	Peran politik (FK, pasca Pilkada).
431	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	(Bagaimana kalau itu ke parpol?) Itu lebih pas menurut saya. Karena kalau kita frustrasi itu juga salah... Untuk merubah ke arah baru, ke arah ideal, tampaknya kita harus evaluasi besar-besaran... Kalau di ruang demokrasi yang model begini, memang FK ideal kalau dibangun di partai politik. Sehingga anggota Dewan, paling tidak yang sudah terpilih itu mereka terdorong untuk belajar. Paling tidak itu untuk mengkoreksi. Karena kalau kita lihat perilakunya itu dulu zaman-zaman sebelum Pemilu 2010 kemarin, sekarangpun sebenarnya masih begitu, bahwa dari 45 anggota dewan ini yang bersuara itu masih itu-itu juga... Itu yang paham substansi. Yang lainkan, <i>hayuh sajah</i> ... manggut-manggut... Tapi kan tanda tangan dan fasilitas sama antara yang ngomong dan yang tidak ngomong... Ini sayang kan, kita mahal-mahal milih anggota Dewan disana cuma hadir doang...	FK; Partai politik.	Idealnya forum semacam FK ada di partai politik, sehingga calon anggota DPRD atau calon Kepala Daerah yang diajukan partai politik sudah teruji lebih dahulu, dan dapat berperan optimal ketika terpilih.	2	FK di partai politik; Kapasitas politik (DPRD).
432	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	Mangkanya FK penting, dan dipertahankan kalau menurut saya... Artinya, kalau memang ada kawan-kawan yang konsen disana untuk pendidikan politik itu tepat menurut saya...	FK; Konstituen.	FK perlu dipertahankan sebagai ruang pendidikan politik warga dan pihak lainnya.	2	Keberlanjutan (FK); Pendidikan politik.
433	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	FK sebagai metodologi untuk memberi pendidikan politik pada rakyat. Hanya tinggal bagaimana formulasinya, metodologinya... Sehingga kita akan tahu ukurannya... Karena perkembangan orang-orang itu berbeda-beda... Maka formulasi rumit-rumit itu kan tidak cocok bagi mereka yang belum menerima pendidikan itu....	FK; Konstituen.	FK sebagai metode pendidikan politik warga. Perlu ditingkatkan ukuran capaiannya.	2	Model pendidikan politik (FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
434	Toto	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 25 April 2012	Awalnya kalau per teoris, itu harapannya justru di alam demokrasi ini partai politik harusnya menyalurkan dan mengartikulasikan kepentingan-kepentingan masyarakat. Tapi kan prakteknya atau faktanya jauh dari itu. Akhirnya ada saluran-saluran alternatif lain untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat.	Partai politik.	Dalam sistem demokrasi, partai politik semestinya dapat berperan mengartikulasikan kepentingan masyarakat.	2	Disfungsi partai politik; Saluran politik alternatif; Artikulasi kepentingan rakyat.
435	Toto	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 25 April 2012	Oh terus dalam kampanye saya nggak pernah panggung besar gitu ya... Tapi <i>door to door</i> gitu ya... kumpul di RW, masuk gang, ke kampung... Alhamdulillah sambutan mereka antusias... Tapi lucu dalam dialognya, mereka bener-bener materialistik, duit gitu ya... Jadi nuntut duit atau sesuatu ke kita... Saya jelaskan ke mereka, " <i>Pak, niat saya ikhlas... niat ngabela bapak-bapak. Harusnya saya itu dibayar, karena niat saya itu... Dan kalau bapak minta kesaya sekarang, saya bisa penuhi... pinjem duit kek, atau duit saya hasil jual-jual... cari sponsor... Tapi kalau saya berikan, nanti saya tidak akan mikirin bapak-bapak lagi, kan sudah saya bayar... Saya hanya akan mikirin bayar hutang, atau menggantikan duit saya dengan batuhnya... dari duit korupsi nanti... Boro-boro mikirin anda-anda... Saya akan mikirin diri saya untuk mengembalikan uang saya... Apa mau pemimpin seperti itu?... Apa mau bapak-bapak menggadaikan Rp 50 juta, Rp 100 juta, atau beras, untuk 5 tahun...? Menggadaikan nasib bapak-bapak selama 5 tahun?</i> ". Ngarti sih mereka... tapi jawaban mereka, " <i>Ayeuna wae bapak nu perlu sayah, nggeus teu boga kaingetan... Komo kalo bapak nggeus jadi nanti, beuki lupa wae ka sayah...</i> ".	Masyarakat.	Masyarakat mengembangkan perilaku politik transaksional karena sudah minim kepercayaan terhadap politisi/pemimpin.	2	Pemahaman politik (masyarakat); Perilaku politik transaksional.
436	Toto	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 25 April 2012	Jadi memang <i>money politics</i> itu bukan cuma dari politisinya, tapi rakyat sendiri seperti itu... Itu pengalaman saya... Merata itu... Tapi ada yang tersentuh ya... Yang tersentuh itu yang militan... Jadi angka 4, 9% suara yang dukung saya <i>teh</i> , saya yakin itu angka orang-orang idealis... <i>Da'</i> pasti mereka kan digoda uang sama calon yang lain, tapi bertahan... Saya yakin mereka orang yang tegar... Suara murni lah... Jadi ya <i>money politics</i> itu bukan sistem... orang pada <i>nyalahin</i> sistem dan politisinya yah... Tapi saya mah <i>nyalahin</i> rakyatnya juga... Tapi memang itukan ada sebab juga yah, kenapa rakyat jadi begini... Itu suatu persoalan sendiri...	Masyarakat; Kontestan Pilkada.	Kasus <i>money politics</i> tidak selalu bersumber dari politisi dan sistem, tapi dari mentalitas masyarakatnya juga.	2	<i>Money politics; Vote buying.</i>

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
437	Toto	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 25 April 2012	Tapi hubungan secara keseluruhan, dari dulu juga kan ada upaya-upaya kooptasi. Dananya juga disimpan di Kesbang kan... Pokoknamah yang dekat dengan Kesbang bisa meunang duit kitu... Tidak selalu berbentuk Bansos, tapi diselimuti dengan yang lainnya juga...	Pemerintah; NGO.	Sejak dulu sudah ada upaya kooptasi NGO oleh pemerintah.	2	Interaksi NGO/CSO dan pemerintah daerah; Kooptasi (lewat dana).
438	Toto	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 25 April 2012	Kayaknya sih mesra ya PSDK, FDA dengan Pemda... Tapi tanya merekalah... Dan apakah hubungan itu tulus, dan saling menghormati posisi masing-masing atau tidak, ya harus dipertanyakan, ini upaya merangkul, kooptasi tadi... Kalau saya sih selalu menasehati temen-temen, PSDK bolehlah bermitra dengan Pemda, tapi FDA kalau bisa janganlah... <i>Saha' nu rek</i> mengkritisi kalau FDA sudah dikooptasi...	Pemerintahan daerah; PSDK; FDA.	PSDK bisa saja bekerjasama dengan pemerintah daerah, tapi FDA sebaiknya menjaga jarak.	2	Interaksi NGO/CSO dan pemerintah daerah; Kooptasi (lewat dana).
439	Toto	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 25 April 2012	(Kondisi budaya politik masyarakat?) Iya, termasuk pesantren... Saya sangat membedakan sekali antara pesantren basis Nahdliyin, Muhammadiyah, PERSIS, itu karakternya berbeda-beda... Nahdliyin itu membela siapa yang bayar itu bener-bener! Duit! Variabelnya duit, dan dia bisa berkhianat karena duit!... Kita awalnya didukung satu pesantren besar... Dia minta bata untuk membangun mesjid... Saya kasih bata, karena kebetulan ada pengusaha temen saya yang mau bantu saya kasih bata asal untuk mesjid, sekolah dan pesantren... Tadinya pesantren itu minta duit, tapi saya bilang saya nggak punya duit... Si Pak Jaka kan ngurus sapi tuh, dapet bantuan dari luar, di titipin untuk bagi hasil di pesantren itu 10 ekor... Awalnya mendukung, tapi begitu di "bom" beberapa ratus juta belok pesantren itu... Dan bukan hanya dapet dari salah satu calon, tapi dari calon yang lain juga... Yang paling besar itu yang paling di dukung suaranya...	Organisasi keagamaan.	NU yang paling mencolok melakukan praktik politik transaksional berupa uang atau barang.	2	Perilaku politik transaksional (agamawan/ kelompok agama).
440	Toto	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 25 April 2012	PERSIS beda lagi... Rebutan pengaruh kalau dia... Deal dengan saya PERSIS itu minta agar Mesjid Agung Soreang jangan di dominasi NU pas sholat Jum'at-nya... Soal khilafiah kalau mereka itu... Dia minta bergilir... Hanya itu tuntutan, sederhana itu tuntutan... Dan kalau ada dana Bansos, mereka jangan dianaktirikan... Kan NU umatnya paling besar, jadi biasanya dapet paling banyak... Dia menuntut agar Bansos untuk ormas keagamaan disamakan... Muhammadiyah tuntutan lebih ke persoalan sosial... Agar lebih memperhatikan soal pendidikan, kesehatan, seperti itu...	Organisasi keagamaan.	Persis dan Muhammadiyah bentuk transaksionalnya lebih pada keinginan akan kebijakan tertentu.	2	Perilaku politik transaksional (agamawan/ kelompok agama).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
441	Toto	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 25 April 2012	Yang riil langsung minta duit mah ya Nahdliyin... Yang lain mah nggak, tapi lebih ke kebijakan nanti kalau terpilih... Nahdliyin mah transaksional banget... Nah bedanya lagi, umumnya umat Nahdliyin kan awam, jadi diselipin di pengajian, ceramah agama... Eksplisit... Jadi awalnya saya disampaikan di depan jamaahnya... "Pidoa'an Pak Toto... urang-urang tos dibantos... ngabangun mesjid iyeu the batana ti Pak Toto...". Nanti calon lain juga begitu...	Organisasi keagamaan.	Organisasi keagamaan memiliki karakteristik berbeda dalam transaksi politik dalam konteks Pilkada.	2	Perilaku politik transaksional (agamawan/ kelompok agama).
442	Toto	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 25 April 2012	Jadi di ormas keagamaan saya bisa membedakan... Jadi pamrih lah, terutama Nahdliyin... Kalau pada Muhammadiyah dan Persis saya lebih respek, karena mereka lebih ke soal kebijakan daerah... Jadi tidak ada untuk dirinya, tapi lebih ke pengembangan umat golongannya... he...he... Tetap salah sebetulnya, karena umat golongannya... Tapi itu tetap lebih baik kan...	Organisasi keagamaan.	Organisasi keagamaan memiliki karakteristik berbeda dalam transaksi politik dalam konteks Pilkada.	2	Perilaku politik transaksional (agamawan/ kelompok agama).
443	Toto	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 25 April 2012	Kalau organisasi pemuda itu jelas sangat transaksional... GIBAS misalnya, itu jelas-jelas minta ke saya Rp 500 juta, uang muka 20% heula kalau mau didukung... Saya waktu itu dikejar-kejar beberapa organisasi... Setengah ngancam... Saya nggak mau...	Organisasi kepemudaan.	Organisasi kepemudaan umumnya melakukan politik transaksional berupa permintaan uang dengan setengah memaksa.	2	Perilaku politik transaksional (organisasi kemasyarakatan/ pemuda).
444	Toto	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 25 April 2012	Bahkan di Kopo Permai yang orang-orang kaya, orang terdidik... Cina kaya, pribumi terdidik... Disitu, kritis memang... Dari sekian calon, mereka melirik saya... Terus saya diundang... Wah kayak sidang ujian tesis... Gabungan warga beberapa RW... Tapi ujung-ujungnya mereka <i>keukeuh wae mintaan</i> duit... Nggak gede sih, minta buat biaya penyelenggaraan... Katanya mereka mau jadi relawan tim sukses tapi minta dana buat operasional... Tapi nggak menang saya disitu, tapi waktunya memang udah <i>mepet</i> , seminggu menjelang pemilihan baru ngundang saya... Ada suara untuk saya disitu, nggak besar, tapi minimal nggak nol-lah... Kelihatan ada bekas usaha mereka itu tadi...	Masyarakat menengah perkotaan	Pada masyarakat yang kritis pun tetap memerlukan biaya politik untuk membangun jaringan pendukung.	2	Perilaku politik transaksional (kelas menengah).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
445	Toto	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 25 April 2012	Intinya mah itu, masyarakat kita sebagian besar masih matre lah... urusannya duit... Jadi itu karena sebelumnya mereka kan merasa banyak dikhianati juga... Janji-janji kan banyak yang tidak terealisasi... Jadi apa yang bisa kepegang saja... Ya uang... Istilah mereka, lagi butuh aja nggak ngasih, nggak inget... apalagi nanti kalau sudah terpilih... pasti bohong... Logikanya sudah terbalik-balik seperti itu... Nah, di hari-hari terakhir menjelang pemilihan, tim sukses kita di lapangan itu termasuk calon-calon saksi menelpon, "Pak Toto, calon-calon lain mah ngasih beras 5 kg, 10 kg, plus uang Rp 20.000 an ke masyarakat ... cik atuh barang Indomie-Indomie sabungkus atuh, sebagai tanda kita inget mereka...". Tuntutannya tuh cuma Indomie barang sabungkus... Tapi saya tegas, selain juga nggak punya duit... Seorang satu Indomie, tapi kalau banyak kan tetap saja... Saya bilang, "Kalau memang nggak ikhlas milih, ya nggak usah milih... Saya tuh ikhlas mencalonkan diri mau melayani rakyat itu... Jadi saya juga butuh keikhlasan...", itu aja jawaban saya...	Masyarakat; Tim Sukses; Kontestan Pilkada lainnya.	Masyarakat memiliki kepercayaan yang rendah terhadap politisi dan proses politik, sehingga lebih berorientasi pragmatis, apa yang bisa mereka peroleh saat itu ssecara langsung.	2	Perilaku politik transaksional (logika politik yang keliru).
446	Toto	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 25 April 2012	Saya kan sangat berpengalaman berurusan dengan DPRD... Di diskusi mah kalah mereka argumentasi dengan kita... Tapi nggak mau ngetok palu kalau nggak eces, kalau "nggak jelas"... itu nggak mau di <i>setujui</i> di rapat... Dalam perdebatan kan kalah mereka, seharusnya distujui itu konsep kita, tapi mereka selalu bilang "belum jelas"... Jadi digantung aja itu aja itu kebijakan... Yang kena sanksi kan eksekutif bukan DPRD kalau terlambat... Rakyat kan tidak memahami itu... Maksudnya belum eces, "belum jelas" itu ya soal duit buat mereka... Kalau APBD hitungannya bisa per Dinas... Jadi bisa kombinasi, duit <i>cash</i> -nya dari Dinas, duit gedanya dari Bupati, dan proyek itu punya siapa... Jadi rakus betul mereka...	Pemerintah daerah; DPRD.	Dalam perumusan sebuah kebijakan di daerah antara pemerintah dan DPRD, pertimbangan utamanya kemudian lebih pada "siapa dapat apa". Substansi kebijakan dan kepentingan rakyat menjadi persoalan yang terpinggirkan.	2	Perilaku politik transaksional (peemrintah daerah dan DPRD); Dialog dan argumentasi (tidak jalan).
447	Toto	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 25 April 2012	Jadi kalau kalah argumentasi dalam debat, bisa aja Dewan terus menggantung persoalan... Masyarakat yang nonton di balkon kan tidak tahu persoalan sesungguhnya karena memang tidak terbuka...	Pemerintah daerah; DPRD; Masyarakat.	Proses politik dalam perumusan kebijakan masih bersifat tertutup.	2	Dialog dan argumentasi (tidak jalan).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
448	Osin (KPUD)	L	Pemerintah	Wwcr, 31 Mar 2012	Forum Konstituen itu salah satu ikhtiar... Ya saya lihat sebagai salah satu proses pencerdasan politik kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa mengarah pada pemilih politik yang rasional... kalau saya sangat mendorong untuk dapat dilakukan itu...	FK; KPUD; Masyarakat.	FK sebagai salah satu upaya pendidikan politik yang harus di dukung.	2	Pendidikan politik (FK),
449	Osin (KPUD)	L	Pemerintah (KPUD)	Wwcr, 31 Mar 2012	Maka ke depan ini perlu ikhtiar untuk proses pencerdasan politik, tapi bukan hanya konstituen semata, tapi bagaimana ke depan kita mendorong infrastruktur politik. Terus kemudian juga perlu ada pembenahan instrumen-instrumen demokrasi. Yang paling mungkin sangat baik adalah refungsionalisasi, reaktualisasi dan revitalisasi partai. Partai kita, kalau boleh saya katakan, dia tidak melaksanakan undang-undang partai politik. Bagaimana edukasi politik, rekrutmen politik yang sehat... Rekrutmen politik saat inikan yang lebih didasari oleh kemampuan finansial. "You boleh mencalon dari partai saya, asal segini...segin...". Nah ini sangat-sangat transaksional. Orang akan berpikir, saya berkuasa, bukan lagi berkuasa untuk melaksanakan mimpi-mimpi dapat berbuat terbaik bagi masyarakat, tapi bagaimana dapat berkuasa selama lima tahun, modal saya pulang untuk pencalonan di periode kedua. Jadi kalau kita lihat para pejabat politik ini ya, dua tahun pertama itu dia ngumpulin, ada uang untuk bayar hutang pada pilkada sebelumnya. Ya mungkin dia bisa setahun mengabdikan ya. Dua tahun terakhir dia ngumpulin untuk maju lagi. Kapan untuk masyarakatnya?	Masyarakat; Partai politik; DPRD.	Perlu pendidikan politik dan penataan infrastruktur politik, khususnya partai politik. Sehingga rekrutmen politik tidak didasarkan pada kekuatan finansial seperti saat ini.	2	Pendidikan politik; Infrastruktur politik; Disfungsi partai politik; Perilaku politik transaksional (partai dan politisi).
450	Osin (KPUD)	L	Pemerintah (KPUD)	Wwcr, 31 Mar 2012	Nah jadi saya berpikir ya tadi, bagaimana ini ya, komunikasi politik itu, adanya interaksi, kemudian ada komunikasi politik antara elit politik dengan konstituen, dimana yang dibenahi kedua-duanya. Persepsi elit dibenahi, persepsi rakyat juga dibenahi. Ya kalau saya katakana, ya elit harus harus dididik lagi...	Elit politik; Konstituen; Masyarakat.	Komunikasi politik elit dan konstituen perlu diperbaiki.	2	Komunikasi politik (politisi dan konstituen); Pendidikan politik (rakyat dan elit).
451	Osin (KPUD)	L	Pemerintah (KPUD)	Wwcr, 31 Mar 2012	Harus ada pembenahan. Bagaimana proses perbaikan politik ini juga diberikan sesuatu nilai oleh pendidikan... Tapi pendidikan juga harus pendidikan yang sehat. Ini mutualisme ya... Pendidikan yang juga tidak sehat... Makanya masyarakat kita saat ini jadinya juga masyarakat politik yang transaksional. Pokoknya saya milih si anu ajalah, pokoknya asal yang jelas aja hari ini... Soal ke depan mah belum tentu dia juga inget kan...	Elit politik; Konstituen; Masyarakat.	Perlunya pendidikan politik rakyat.	2	Pemahaman politik (rakyat); Pendidikan politik (rakyat); perilaku politik pragmatis.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
452	Osin (KPUD)	L	Pemerintah (KPUD)	Wwcr, 31 Mar 2012	Tapi kalau kita ikhtiar, konstituen itu dalam konteks “kaum”. Kaum itu profesi. Jadi kalau dalam agama kan “...suatu kaum akan berubah kalau ada upaya dari dirinya sendiri...”. Nah bagaimana forum konstituen itu berbasis profesi. Misalnya kita adakan dialogis dengan profesi guru, profesi pekerja seni, profesi petani, profesi pedagang... Sehingga mereka akan terlibat dalam suasana kebhathinan pada hal yang berhubungan dengan mereka, gitu... Ya bagaimana misalnya kita berdialog dengan pedagang. Bagaimana suasana kebhathinan mereka yang terancam oleh banyaknya minhsanket-minhsanket yang begitu menjamur sampai pelosok desa. Mangkanya mereka harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi itu yang perlu kita didik melalui forum-forum konstituen itu.	FK; Konstituen; Kaum profesional.	FK perlu menjangkau konstituen berbasis profesi, yang memiliki kepentingan langsung dengan persoalan yang ada, sehingga dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.	2	FK berbasis kaum profesional; Dialog; Pendidikan politik.
453	Osin (KPUD)	L	Pemerintah (KPUD)	Wwcr, 31 Mar 2012	Sehingga saya berharap ke depan itu bagaimana forum konstituen itu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga yang namanya legislator itu untuk membangun membuat produk legislasi terlebih dulu melibatkan profesi-profesi itu. Karena mereka yang merasakan. Sehingga kalau saya lihat, legislator itu hanya menampung aspirasi, kemudian dia juga penyalarsan undang-undangnya, karena dia sudah berbentuk undang-undang... Kalau sekarang mah, legislator kita mau menyasikan dengan kepentingannya sendiri saja...	FK; Pemerintah; DPRD.	FK perlu terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga produk kebijakan memang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.	2	Partisipasi politik (dalam penyusunan kebijakan); produk legislasi.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
454	Osin (KPUD)	L	Pemerintah (KPUD)	Wwcr, 31 Mar 2012	Kampanye politik sekarang ini lebih banyak main di simbol. Kampanye simbol, dan bukan kampanye substantif ya... Sebenarnya UU nya kan sudah mendorong ya terbangunnya akuntabilitas individu. Karena dia dipilih secara individu kalau untuk legislatif ya... Termasuk calon kepala daerah ka nada akuntabilitas sebagai calon pemimpin ya, itu ada... Sebenarnya para kandidat itu harus mengembangkan kampanye-kampanye yang dialogis... Itu tadi saya mendorong ada dialogis dengan konstituen yang berbasiskan profesi atau kaum tadi... Itu bisa fokus ya temanya. Jadi begini, bagaimana sih persepsi calon tentang isu soal <i>outsourcing</i> di dunia kerja... Bagaimana sih pandangan dia soal itu... Atau bagaimana persepsi atau visi calon mengenai soal isu bea masuk pajak import barang-barang pertanian misalnya... Itu kan merugikan petani lokal ya... Nah itu bagaimana sikap si calon menyikapi soal itu... Sehingga ke depan itu pembicaraan lebih masuk ke substansi ke kepentingan riil komunitas profesi-profesi tersebut... Soal lain, misalnya persepsi calon mengenai banjir... Dia dialognya dengan orang yang merasakan banjir itu, bagaimana solusinya, carilah suasana kebatinan yang ada di mereka...	Kontestan Pilkada; Partai politik; Konstituen; KPUD.	Kampanye politik saat ini lebih banyak bermain di tataran simbol. FK dapat berperan mengembangkan kampanye politik yang substantif dan dialogis, sehingga kandidat dapat diuji pemahaman dan kapasitasnya.	2	Kampanye politik (simbol dan mobilisasi); Kampanye dialogis (gagasan).
455	Osin (KPUD)	L	Pemerintah (KPUD)	Wwcr, 31 Mar 2012	(Masa kampanye yang sempit?)Menurut saya masa kampanye itu tidak dibatasi oleh itu, tidak... bagi saya kampanye itu bebas saja... Sampai detik terakhirpun ya boleh saja... Kalau dibatasi sampai dengan H-3 ya sempit waktunya... Kalau menurut saya kampanye itu merupakan bagian dari proses pendidikan politik... Jadi kalau saya berpikir, kampanye tidak mesti harus dibatasi waktunya, silakan saja... Hanya koridornya yang dibatasi pada aspek edukasi politik... Bukan kampanye yang aspek simbol. Kalau simbol ya harus dibatasi... Pemasangan baliho, dan sejenisnya... Tapi kalau yang sifatnya kampanye dialogis, kampanye pencerdasan politik, itu harus didorong seluas-luasnya, dan tidak harus dibatasi oleh kecurigaan <i>money politics</i> misalnya... Toh orang <i>money politics</i> juga ada batasnya kan... Capek juga kan dia, he..he.. Ya kalau saya, didorong aja untuk sebanyak mungkin calonnya dialog dengan masyarakat yang berkepentingan... Daripada kampanye simbol-simbol orang tidak mengerti...	Kontestan pilkada; Konstituen.	Kampanye yang hanya mengedepankan simbol-simbol perlu dibatasi,dan kampanye dialogis dengan masyarakat perlu ditambah.	2	Kampanye dialogis (gagasan); Kampanye politik (simbol); <i>Money politics</i> .

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
456	Osin (KPUD)	L	Pemerintah (KPUD)	Wwcr, 31 Mar 2012	(Kegiatan dengan FK?) Saya sempat hadir, kasih sambutan... Ya bangun-bagus ajah... Hanya itu mungkin hanya sekali karena keterbatasan dana, dan dalam konteks seremonial saja... Jadi kalau ke depan kita berharap FK tidak hanya sebatas seremonial... Ke lapangan langsung dengan calon... Soal pertanian, kita langsung bertemu dengan kelompok-kelompok tani dialog soal isu pertanian. Misalnya soal subsidi pertanian, soal bagaimana revitalisasi pertanian... Bagaimanalah itu, dialog...	FK; Kontestan Pilkada.	Dialog FK perlu dilakukan lebih banyak dan langsung ke masyarakat.	2	Dialog publik (FK).
457	Osin (KPUD)	L	Pemerintah (KPUD)	Wwcr, 31 Mar 2012	(Tapi mau ngga calon begitu? Kalau KPU kan punya daya pemaksa?) Saya ingin itu, didorong itu agar para calon itu mau... Itu kan bagian dari komitmen kita untuk pendidikan politik yang baik... Kalau tidak begitu ya gimana... Sehingga calon itu familier dengan siapapun gitu... Dan menguasai persoalan... Sekarang inikan banyak calon yang tidak menguasai persoalan... Ada yang lucu waktu itu. Ada seorang anggota DPR yang ditanya "Bu, bagaimana itu soal trafficking?", dia balik tanya "Apa sih trafficking itu?". Ngga tau dia istilah itu... Padahal dia perempuan dan bidang kerjanya... Jadi kita itu baru soal popularitas, belum kualitas... Jadi nanti itu harus, rekrutmen politik itu harus berbasis kualitas dan popularitas... Nah sekarang itu baru popularitas... Artis jadi kepala daerah... Ngga taulah dia soal birokrasi... Sehingga proses internal partai untuk melahirkan calon-calon pemimpin itu gagal...	Kontestan Pemilu/Pilkada; DPRD; Partai politik.	Banyak calon legislatif dan kepala daerah yang tidak menguasai persoalan di daerahnya. Pola dan proses rekrutmen politik khususnya di partai politik perlu diperbaiki.	2	Pendidikan politik; Kapasitas dan pemahaman masalah (politisi/ kontestan Pilkada); Politik popularitas; Disfungsi partai politik (kaderisasi dan rekrutmen politik).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
458	Osin (KPUD)	L	Pemerintah (KPUD)	Wwcr, 31 Mar 2012	(Masih diperlukankah FK ke depan?)Ya apapun istilahnya, tapi yang memang berkaitan dengan proses pendidikan politik, itu harus dilakukan... apakah namanya Forum Konstituen, ataukah Sawala... apalah... Tapi intinya ada suatu proses dialogis antara pelaku politik dengan masyarakat, dan itu seharusnya dapat dilakukan oleh partai politik secara institusional ... Dialog... Harusnyakan partai politik punya pertanggungjawaban... Sekarang ada ngga partai politik yang punya pertanggungjawaban? Nggak ada itu... Partai itu hanya rame menjelang Pemilu! Setelah Pemilu itu dia tiarap... Ngumpulin duit... Memang cape tapi... Kalau memang komitmen mau perbaikan demokrasi ya mesti begitu... Sekarang ini semua fungsinya kacau... Contoh, pembuatan UU kacau... karena pembuatan UU bukan berdasarkan urgensi, tapi proyek... UU itu kudu sekian, satu UU itu sekian... susah...	FK; Partai politik.	FK melakukan proses pendidikan politik, di mana ada dialog antara kandidat dengan konstituen. Hal tersebut seharusnya menjadi tugas partai politik, tapi tidak dilaksanakan, dan tidak pernah ada pertanggungjawaban partai politik.	2	Pendidikan politik; Dialog (politisi dan warga/ konstituen); Disfungsi partai politik.
459	Ferry (KPU Jabar & Pusat)	L	Pemerintah (KPUD)	Notulensi acara diskusi FK, 27 Juli 2010, Hotel Grand Pacific, Bandung.	Menurut saya, terdapat sebuah sinergitas antara penyelenggara dan masyarakat dalam melakukan <i>political education</i> , yang intinya saya lihat untuk mensilaturahmikan calon dan para konstituennya. Ini adalah catatan penting yang harus kita gaongi bersama. Karena terus terang, dari berbagai Pilkada di Jawa Barat, Kabupaten Bandung termasuk dalam kategori yang berpotensi penting dalam turbulensi politik, kemudian dari segi geopolitis, dan sosio kultural sangat penting untuk dipetakan. Kemudian kita harus membangun bersama proses sinergitas antara daerah-daerah tersebut. Saya ingin menjadi bagian dan turut serta dalam berbagai hal yang dapat menutupi ruang-ruang kosong dalam proses Pilkada ini sehingga ikut memajukan dan melancarkan proses Pilkada ini.	Kontestan Pilkada; Masyarakat.	Perlunya pendidikan politik rakyat. Dan Kabupaten Bandung sebagai barometer politik.	2	Pendidikan politik; Dialog (politisi dan warga/ konstituen); Barometer politik (Kabupaten Bandung).
460	Ferry (KPU Jabar & Pusat)	L	Pemerintah (KPUD)	Wwcr, 14 Apr 2012	Ya inikan suatu upaya dari satu elemen masyarakat untuk menjembatani pasangan calon yang ada atau mau mencalonkan dengan masyarakat... itu dipahami seperti itu... sehingga masyarakat atau publik secara luas itu betul-betul mengetahui apasih yang diinginkan, apa yang mau direncanakan, diprogramkan, termasuk visi dan misi mereka....	Kontestan Pilkada; Masyarakat.	Perlunya pendidikan politik rakyat.	2	Sosialisasi politik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
461	Ferry (KPU Jabar & Pusat)	L	Pemerintah (KPUD)	Wwcr, 14 Apr 2012	Saya kira ini satu langkah awal yang sangat baik dilakukan oleh teman-teman... Tampaknya itu satu hal yang perlu kita apresiasi... Karena apa yang ada di KPU selama inikan lebih pada aspek formalitas... kita KPU ada proses pencalonan, iya... kita ada proses sosialisasi, iya... namun ketika ada elemen masyarakat yang mencoba menggunakan berbagai metodologinya untuk melakukan pendidikan politik itu sangat baik...	FK; KPUD; Kontestan Pilkada; Masyarakat.	FK merupakan inisiatif upaya pendidikan politik masyarakat yang dioperasikan dengan baik oleh KPUD.	2	Pendidikan politik; Sosialisasi politik (aspek formalitas di KPU).
462	Ferry (KPU Jabar & Pusat)	L	Pemerintah (KPUD)	Wwcr, 14 Apr 2012	KPU kan lebih pada aspek normatif, sesuai dengan undang-undang... tapi di masyarakat itu berbagai hal bisa digali... dari soal integritas, kompetensi, rekam jejak, dan lainnya... dan ini yang tampaknya dilakukan oleh teman-teman...	FK; KPUD; Kontestan Pilkada; Masyarakat.	KPUD lebih memenuhi aspek normatif dari proses politik yang diatur dalam UU.	2	Pendidikan politik; Sosialisasi politik (aspek normatif di KPU); Uji publik (politisi oleh FK).
463	Ferry (KPU Jabar & Pusat)	L	Pemerintah (KPUD)	Wwcr, 14 Apr 2012	Cuma tentunya, dari sisi massifikasinya itu masih perlu manajemen lagi... karena Kabupaten Bandung dengan jumlah pemilih 2 juta lebih itu kan perlu di <i>manage</i> Misalnya tidak hanya dilakukan di satu titik, tapi bisa dilakukan di beberapa titik di kawasan Kabupaten Bandung, sehingga lebih dapat menyentuh masyarakat... dan tidak dilakukan di dalam ruang yang cenderung terlalu kaku... tapi lebih nyaman di lapangan gitu...	FK; Konstituen.	FK perlu memperluas dan mengintensifkan upaya pendidikan politik masyarakat.	2	Partisipasi (perluasan partisipasi warga dalam dialog publik);
464	Ferry (KPU Jabar & Pusat)	L	Pemerintah (KPUD)	Wwcr, 14 Apr 2012	Nah saya melihatnya seperti itu... jadi ini satu terobosanlah... Bagi kita. Hal ini seperti ini juga harus digayung sambut oleh semua pihak... dan karena ini independen ya, dan KPU juga dalam tataran independen, jadi KPU tetap perlu merangkullah...	FK; KPUD.	KPUD melihat FK independen, dan itu sejalan dengan prinsip kerja KPU, sehingga perlu didukung.	2	Terobosan politik; Independensi (FK).
465	Ferry (KPU Jabar & Pusat)	L	Pemerintah (KPUD)	Wwcr, 14 Apr 2012	Kegiatan dialog calon dan masyarakat nggak apa-apa dilakukan sebelum masa kampanye... karena kalau sudah masuk masa kampanye yang hanya 14 hari itu kan para kandidat sudah punya jadwal kampanye masing-masing... Atau, justru bisa jadi dimulai sebelum perekrutan calon di partai politik... jadi rekrutmen oleh parpol itu sudah punya aspirasi dari masyarakat... jadi parpol juga punya gambaran apa keinginan masyarakat... Menurut saya, jangan terjebak pada 1 partai atau satu calon saja... jadi dibuka selebar-lebarnya. Dan diberikan tawaran pada seluruh partai untuk terlibat...	FK; Kontestan Pilkada; Partai politik.	FK bisa mencoba mempengaruhi proses perekrutan calon di partai politik, sehingga proses tersebut sudah mempertimbangkan aspirasi warga. Namun tetap independen dan bersifat terbuka bagi semua partai.	2	Kampanye Pemilu/ Pilkada; Rekrutmen politik (FK dengan partai politik).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
466	Ferry (KPU Jabar & Pusat)	L	Pemerintah (KPUD)	Wwcr, 14 Apr 2012	Setahu saya, model seperti Forum Konstituen itu baik di Jawa Barat maupun Indonesia itu belum ada... tampaknya ini perlu dibudayakan ya... jadi selain parpol yang memang punya fungsi soal rekrutmen, tapi ada elemen masyarakat lain yang juga melakukan pola-pola rekrutmen, tapi lebih luas... Karena kalau parpol-kalau ada <i>fatsoen</i> partai... dan juga hal-hal lainnya... Tapi model yang dilakukan teman-teman ini-kalau lebih luas, lebih menyentuh masyarakat... jadi memang belum ada... belum ada yang seperti dilakukan Forum Konstituen...	FK; Partai politik.	Model FK belum ada di Indonesia.	2	Model FK (baru); Model rekrutmen politik.
467	Ferry (KPU Jabar & Pusat)	L	Pemerintah (KPUD)	Wwcr, 14 Apr 2012	Kalau seperti yang di Jakarta itu sifatnya tidak langsung dari publik, karena lebih dikelola oleh kelompok elit masyarakat... karena kalau teman-teman itu kan seperti survey-lah, publik ingin seperti apa sih... tapi ini dijangar lewat sebuah forum...	Forum sejenis.	Forum dialog dengan kandidat di Jakarta dikelola oleh elit bukan oleh konstituen dari masyarakat.	2	Model FK (inisiatif warga; mempertemukan aspirasi).
468	Andi	L	Pemerintah (Pemda)	Wwcr, 31 Mar 2012	(Hubungan Pemda & CSO ?) Kalau menjelang Pilkada sih <i>rame</i> ya... Kita agak selektif juga... apakah CSO nya ini dekat calon atau lawan politik atau tidak... Tapi setelah Pilkada mah normal lagi... Cuma ya tergantung figur pimpinan yang menang itu, apakah dia menaruh dendam atau nggak... Kalau yang sekarang sih Alhamdulillah ya... Bupati yang sekarang itu, Pak Dadang Naser, dari komitmennya mah, yang lawan politik itu ya sudahlah... Ya sekarang sama-sama membangun Kabupaten...	Pemerintah daerah; Bupati; <i>Civil society organizations</i> .	Dalam momentum Pilkada, aparat pemerintah daerah selektif dalam berhubungan dengan CSO, karena terkait dengan kepentingan elit di birokrasi pemerintahan.	2	Interaksi NGO/CSO dan pemerintah daerah (pra dan pasca Pilkada).
469	Andi	L	Pemerintah (Pemda)	Wwcr, 31 Mar 2012	(Hubungan FK dan Pemda ?) Banyak kok NGO atau CSO ini yang memberikan support terhadap pembangunan... Yang kita garis bawahinya sesungguhnya CSO-CSO yang sifatnya konstruktif lah... yang memberikan saran, memberikan ide, memberikan sumbangan kegiatan... Sementara yang sifatnya destruktif, ya sulit untuk kita masukin. Ya percuma kan kita membantu mereka kalau tidak ada kontribusinya... Yang bisanya mengkritik saja tapi tidak memberikan solusi atau input positif untuk pembangunan...	Pemerintah daerah; NGO; CSO.	Pemerintah daerah memetakan dua jenis NGO/CSO, yaitu yang konstruktif dan destruktif.	2	Tipologi NGO/CSO veri pemeirntah daerah (konstruktif dan destruktif).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
470	Andi	L	Pemerintah (Pemda)	Wwcr, 31 Mar 2012	(FK dalam posisi mana dalam pemetaan itu ?) Prinsipnya, kami sih kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang perlu melibatkan NGO ya kita lihat fokus NGO itu. Misalnya saja ada NGO yang fokus di lingkungan... yang konstruktif ya... Mengkritisi tapi punya gagasan solusi begini... ya kita bantu, misalkan dilibatkan dalam pemberian program-program bantuan yang sifatnya sesuai dengan kerjanya... Kalau yang di lingkungan, ya kita libatkan dalam program Citarum misalnya... Kalau terkait dengan masalah pertanian, sekarang Dewan Tani kan yang sering kita libatkan di forum-forum musyawarah atau kegiatan pertanian... Jadi NGO yang konstruktif dan positif ya kita bantu lah... Sambil kita coba memberikan kontribusi atau hanya bicaranya aja... ha..ha... Kita uji.. ntar ketahuan kan... Oh ternyata kalau dibantupun ternyata hanya ngabisin duit tapi nggak ada outputnya...	Pemerintah daerah; NGO; CSO.	NGO/CSO yang dilibatkan oleh pemerintah daerah dalam program pemerintah adalah yang sesuai dengan bidang atau fokuskegiatannya, konstruktif dan dapat menjalankan program dengan baik.	2	Interaksi NGO/CSO dan pemerintah daerah; Tipologi NGO/CSO veri pemeirntah daerah (konstruktif dan destruktif).
471	Andi	L	Pemerintah (Pemda)	Wwcr, 31 Mar 2012	(Pelibatan CSO dalam perencanaan?) Dalam forum-forum Musrenbang kita undang... akan kelihatanlah di diskusi itu, apakah NGO-NGO itu hanya bicara saja atau tidak... Kemarin Dewan Tani dipercayakan sebagai perwakilan dari bidang pembangunan ekonomi... Sehingga nanti bagaimana NGO melaksanakan amanahnya itu bisa atau tidak...	Pemerintah daerah; NGO; CSO.	NGO/CSO dilibatkan dalam Musrenbang. Dlaam forum tersebut pemerintah daerah juga mengukur kapasitas dan keseriusan NGO/CSO tersebut.	2	Partisipasi dalam perencanaan (NGO/CSO).
472	Andi	L	Pemerintah (Pemda)	Wwcr, 31 Mar 2012	(Dialog, diskusi atau pengambilan keputusan?) Dialog dulu... Sebagai contohnya, Dewan Tani ingin diberikan peran dalam mengelola kawasan wisata di Pangalengan. Selama ini mereka kesana kemari, ke SKPD-SKPD sulit... Terus ke Bappeda, kita fasilitasi ya kan... idenya seperti apa... Kalau memang positif, kita undang beberapa Dinas, kita dengarkan, bahas, bahkan sampai survey lapangan...	NGO; CSO; Bappeda; SKPD.	Bappeda mungkin lebih terbuka untuk berdiskusi dan berdialog dengan NGO/CSO dibandingkan SKPD-SKPD.	2	Partisipasi dalam program pemerintah (NGO/CSO).
473	Andi	L	Pemerintah (Pemda)	Wwcr, 31 Mar 2012	Intinya, kalau kita di Bappeda ya, mau siapapun LSM nya, mau konstruktif atau destruktif kita undang dulu, gagasannya apa... Karena Bappeda yang mengurus perencanaan, kita menerima dulu lah, ide gagasannya seperti apa... Kalau di SKPD, denger dari LSM itu mah banyak yang "Wah males ah...pasti ada maunya" gitu kan...	NGO; CSO; Bappeda; SKPD.	Bappeda mungkin lebih terbuka untuk berdiskusi dan berdialog dengan NGO/CSO dibandingkan SKPD-SKPD.	2	Interaksi NGO/CSO dan pemerintah daerah (Bappaeda dan SKPD).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
474					Kadang-kadang ada beberapa LSM, NGO, yang tidak minta uang kok... Bahkan malah bisa mencarikan uang dari luar ya... Seperti Yayasan Inisiatif itu tidak minta uang, malah mencarikan uang, dari Ford Foundation, hanya mencari lokasi di Kabupaten Bandung, gitu ya... Kemudian juga Dewan Tani menjanjikan bantuan uang dari Jepang, tapi itu belum terwujud ya... Kemudian beberapa LSM lingkungan seperti Forum Citarum gitu ya, mereka justru membawa uang dari Pusat atau Provinsi... Nah hal-hal seperti itu...	NGO; CSO; Bappeda; SKPD.	Ada NGO/CSO yang tidak minta uang atau proyek, tapi justru bisa membawa proyek ke daerah dan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah.	2	Interaksi NGO/CSO dan pemerintah daerah (minta proyek dari pemerintah, dan membawa proyek ke pemerintah).
475	Andi	L	Pemerintah (Pemda)	Wwcr, 31 Mar 2012	Saya salutlah sama NGO, CSO yang memang mengkritik, memberi solusi, tapi bukannya hanya meminta uang... Mereka bahkan mencarikan uang, membawa uang ke daerah dari luar... Seperti itu yang diinginkan.... Bukan yang hanya mengritisi, tapi ujungnya minta proyek. Dikasih proyek ternyata tidak bener juga...	NGO; CSO; Bappeda; SKPD.	Ada NGO/CSO yang tidak minta uang atau proyek, tapi justru bisa membawa proyek ke daerah dan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah.	2	Interaksi NGO/CSO dan pemerintah daerah (minta proyek dari pemerintah, dan membawa proyek ke pemerintah).
476	Andi	L	Pemerintah (Pemda)	Wwcr, 31 Mar 2012	(Interaksi Pemda dengan CSO, terkait kultur?) Kalau untuk masyarakat Kabupaten Bandung dapat dikatakan relatif lebih baiklah kalau dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat... Kalau Garut sudah jelas keras ya... Cimahi juga cukup keras... Kalau disini lebih partisipatif, lebih akseptable... terutama NGO-CSO yang menguntungkan mereka... Jadi masyarakat akan lebih menerima NGO-CSO yang menguntungkan mereka... Yang sifatnya tidak provokatif, tidak adu domba, memberikan solusi... Kalau tidak begitu akan sulit masuk juga... jadi sudah lebih cerdas lah... Yang akan diterima terutama NGO-CSO yang akan menguntungkan ekonomi mereka...	Masyarakat; NGO; CSO.	Dibandingkan dengan beberapa daerah tetangga, karakter masyarakat, NGO dan CSO di Kabupaten Bandung relatif lebih baik (partisipatif, tidak provokatif, memberikan solusi).	2	Kultur masyarakat; Interaksi NGO/CSO dan masyarakat (NGO non konfrontatif, dan memberi keuntungan ekonomi).
477	Andi	L	Pemerintah (Pemda)	Wwcr, 31 Mar 2012	(Pendapat mengenai kegiatan itu?) Eee... memang beresiko sih ya... NGO atau CSO yang bertemu dengan calon mesti sudah memperhitungkan risikonya... apakah calonnya menang atau kalah... Dan tergantung dari karakter si pemenangnya kan... Apakah dia mau merangkul kembali NGO dan CSO nya, atau malah jadi antipati gitu... Itu memang harus dipikirkan. Kalau saran saya sih nih ya, NGO atau CSO itu mesti netral... Udah aja kalau dia mau professional ya professional aja gitu... Sangat beresikolah kalau menurut saya mah...	Pemerintah daerah; Kontestan Pilkada; NGO; CSO; FK.	Ada resiko ketika NGO/CSO membangun kontak dengan kandidat saat Pilkada. Peluang hubungan dengan pemenang Pilkada juga tergantung pada karakter Bupati terpilih.	2	Interaksi NGO/CSO dan politisi; Peran NGO/COS dalam politik; Profesionalisme NGO.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
478	Andi	L	Pemerintah (Pemda)	Wwcr, 31 Mar 2012	(Ada kecenderungan begitu NGO-CSO saat Pilkada kemarin?)Eee... Ada kerugiannya mungkin... kalau NGO-CSO yang kandidatnya kalah itu... ee... harus bisa merehabilitasi nama, he...he... Bangun hubungan lagi... Keuntungannya kalau calonnya menang ya dia akan lebih mudah gaul, terlibat program, dan lainnya... Walaupun misalkan dari pimpinan Bupati menyatakan "Oke sekarang lupakan politik..." tapi kita ngga tahu ke bawahnya kan, kepala-kepala SKPD itu... Bupati ngomongnya gitu, tapi kepala SKPD mungkin ragu untuk merangkul kembali NGO-CSO itu... dia mesti pamiit dulu, boleh ngga melibatkan lagi NGO-CSO itu... ha...ha...	Pemerintah daerah; Kontestan Pilkada; NGO; CSO; FK.	Ada resiko ketika NGO/CSO membangun kontak dengan kandidat saat Pilkada. Peluang hubungan dengan pemenang Pilkada juga tergantung pada karakter Bupati terpilih.	2	Interaksi NGO/CSO dengan pemerintah daerah (pasca Pilkada).
479	Setiawan	L	FK	Wwcr, 17 April 2012	Pengennya sih harapannya bisa lepas dari FAB, harusnya... Cuma kesannya FAB yang bikin di awal, jadi kesannya FK lahir dari FAB ya... Masalah kepemilikan, gimana ya...	FK; FAB.	Ada kesan FK dibikin oleh FAB.	2	<i>Sense of belonging</i> (FK); Interelasi (FK dan FAB)
480	Yana	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	Bagus kalau FK dipertahankan... Apalagi yang menjalankan kan banyak mahasiswa... Tapi kalau pemikiran ibu-ibu mah jauh lah dibanding rekan-rekan yang masih muda... Jadi susah yakan ya Mas ya, apalagi sekarang kebutuhan naik semua... Biaya sekolah anak itu, aduh.. ya Allah... Kayaknya kalau ibu-ibu itu mau pecah kepalanya... Kalau untuk saya, pengalaman Forum Konstituen kemarin ada manfaatnya ya, tapi kalau untuk masyarakat lain kan sulit ya... Seperti kemarin itu kan para calon banyak gagasan, janji... Tapi kita tahu seperti masalah banjir saja belum beres-beres ya... Jadi kalau Forum Konstituen itu bisa ikut mengawasi ya baik sekali... Karena siapa lagi sih yang akan memecut dia kalau dia salah... Kalau ibu-ibu mah mana dianggap... Kita ibu-ibu kan senang ya seperti kemarin mahasiswa demo ya, memberikan aspirasi yang baik... Apalagi ibu rumah tangga ya punya anak mahasiswa ya... Tapi jangan yang kekerasan aja...	FK; Bupati/Wakil Bupati.	FK perlu dipertahankan terutama untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah.	2	Kontrol pemerintahan.
481	Yana	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	Sebetulnya saya juga kurang senang ya, kemarin itu banyak omong keras... Kalau perempuan yang menyampaikannya bisa lain... kalau laki-laki kan menyampaikannya biasanya keras... kalau pemikiran perempuan kan lain, kita bisa sampaikan dengan halus tapi bisa membuat dia berpikir gitu... Kadang kan ada yang menyampaikannya itu kedengarannya kan kurang enak ya.. kurang sopan, atau bagaimana...	FK; Kontestan Pilkada; Peserta laki-laki dan perempuan.	Pentingnya pengemasan gagasan, dan perempuan dipandang lebih baik dalam hal ini.	2	Kapasitas komunikasi (gaya komunikasi laki-laki dan perempuan).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
482	Yana	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	Kalau kampanye yang biasa itu rombongan iring-iringan, terus dengarkan dia bicara, lalu sorak sorai gitu... Terus apa sih yang diperoleh? Sering juga saling mengejek... Buat masyarakat itu manfaatnya apa? Saya tidak pernah sih seperti itu, konvoi, iring-iringan... Tapi kalau bisa diskusi dengan kepala dingin lebih baik... Tapi yang jadi pertanyaan saya, apakah ada pengawasan terhadap mereka, apakah calon-calon ini bener setelah terpilih?	FK; Kontestan Pilkada; Pelaku kampanye lain.	Kampanye dialogis model FK lebih baik dibandingkan jenis kampanye lainnya.	2	Kampanye dialogis; Kampanye mobilisasi.
483	Yana	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	Tapi juga ada pertanyaan saya ya, kalau lagi di forum rame-rame, wajah-wajah pemimpin itu ramah-ramah, baik... Tapi kenapa kalau di depan mahasiswa kenapa jadi penakut? Terus kalau di jalan kita harus menghormat, anak-anak sekolah berjejer di pinggir jalan, untuk apa sih itu? Kok jadi seperti zaman jahiliah saja... Kalau Bupati makan besi, saya makan nasi sih saya takut. Kalau sama-sama makan nasi mah biasa ajah... Dia harus tahu, dia tidak akan duduk jadi pimpinan kalau tidak ada rakyat yang memilih dia... Coba kalau rakyat semua boikot ngga milih aja, kan ngga bisa tuh dia... Waktu di Forum Konstituen dia baik, mau makan sama-sama, nah sekarang mana mau lagi? Walaupun ketika akan pemilihan Bupati dia memberi bantuan dan baik, tapi ketika terpilih toh akhirnya di akhir cerita toh tetap aja dia punya warna sendiri ya... Akhirnya kita jadi berpikir, kok ini tidak transparan, tidak gentle...	FK; Kontestan Pilkada.	Politik pencitraan politisi pada saat kampanye.	2	Politik pencitraan (kontestan Pilkada).
484	Titi	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	Tapi sekarang sih sama aja sih... kalau intinya ke Partai ya sama aja gitu... Kadang-kadang orang tuh pada mikir, " <i>Ah daripada begini mendingan mah saya ngga milih aja...</i> ", ya itu karena mereka sudah tidak percaya lagi ke partai politik... ada juga yang seperti itu...	FK; Bupati/Wakil Bupati; Partai politik; Golput.	Ketidakpercayaan terhadap politisi dan partai politik meluas.	2	<i>Distrust</i> pada partai politik; Golput.
485	Titi	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	Calon-calon itu kan sudah ditentukan oleh Partai, katakanlah ada sekian calon, kan mereka sudah punya warnanya masing-masing...	FK; Bupati/Wakil Bupati; Partai politik.	Calon kepala daerah ditentukan oleh partai, yang sudah sarat kepentingan masing-masing.	2	Kepentingan politik (kontestan Pilkada).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
486	Titi	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	Meskipun ada calon dari independen tetap aja yang banyak kan dari partai politik kan... Kalau menurut saya mah tidak selalu harus dari partai... Banyak yang punya kompetensikan... Misalkan dari independen bisa terpilih jadi kepala daerah, mereka bisa lebih <i>care</i> dengan masyarakat bawah... Kalau dari partai politik mereka kan... ya... bisa dilihat sendirilah ya... Sebentar lagi kan Pilgub... Saya juga ada teman-teman lain yang punya calon untuk wakil tuh...	FK; Bupati/Wakil Bupati; Partai politik.	Lebih condong memilih calon dari non partai (independen).	2	Kapasitas politik (kontestan Pilkada).
487	Titi	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	Saya lebih condong calon yang muncul dari temen-temen non partai, mungkin dari pegiat... Mungkin dari jajaran bawah, RT, RW, karena mereka akan lebih banyak hidup di lingkungan bawah ya, lebih tahu kondisi masyarakat... sementara kalau dari partai kan, orang partai misalnya gini, dia duduk di partai, dia sebagai calon DPRD, Bupati, mereka kadang-kadang tidak mengetahui ranah disitu, kadang untuk di masyarakat dia juga jarang terjun gitu... Tiba-tiba dia muncul sebagai anggota Dewan gitu, padahal di masyarakat nggak dikenal... banyak yang begitu...	FK; Bupati/Wakil Bupati; Partai politik.	Lebih condong memilih calon dari non partai (independen), tapi yang memang mengakar di bawah.	2	Rekrutmen politik dari masyarakat (calon independen).
488	Titi	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	Kadang-kadang sih masyarakat kalau dibawa ke model kampanye konvoi atau dangdutan masyarakat tuh gampang tertarik... Partai besar seperti Golkar seperti itu... Kebanyakan kampanye itu di pengajian juga, sambil ceramah-ceramah, kebanyakan ada kampanye terselubung gitu... Pola-polanya seperti itu...	Masyarakat; Kontestan Pilkada; Partai politik.	Masyarakat umumnya lebih suka kampanye model konvoi atau dangdutan. Partai atau kandidat sering melakukan kampanye terselubung, misalnya lewat pengajian.	2	Kampanye Pemilu (mobilisasi; kampanye terselubung).
489	Titi	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	Sampai sekarang transparansi belum jelas, padahal sudah ada aturannya, tapi <i>tetep</i> aja mereka tidak mau transparan itu... Jadi mungkin ada ketakutan, atau ada apa, mereka <i>nggak</i> mau diekspos... Mungkin kalau mereka mau jujur ya, mau transparan ke masyarakat, itukan lebih baik...	Pemerintah daerah; Masyarakat.	Transparansi kebijakan dan anggaran di pemerintah daerah masih dipertanyakan.	2	Transparansi (pemerintahan daerah).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
490	Titi	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	Temen-temen yang ikut di FK sih sebenarnya udah paham semua... Banyak yang intinya sudah tidak percaya lagi ke partai kan... Mereka menyampaikan juga sih, buat apalah dibuat seperti ini seperti ini, ujung-ujungnya tetep aja mereka ngga akan bertanggungjawab... Istilahnya mah tanggung jawab moral ke masyarakat...	FK; Kontestan Pilkada; Partai politik.	Peserta FK banyak yang sudah tidak percaya pada partai politik, bahkan cenderung skeptis bahwa upaya model FK ini akan mampu membawa perubahan.	2	Distrust pada partai politik.
491	Titi	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	Kalau menurut saya sih yang kemarin itu baru sebagian kecil dari masyarakat Kabupaten Bandung, sebaiknya sih memang diperluas, agar lebih banyak masyarakat yang tahu... Tapi memang seharusnya kandidat yang ketemu dengan masyarakat di bawah... Kalau saya dan teman-teman yang aktifkan cukup pahlamlah, tapi kalau masyarakat yang lainnya kan, gimana ya... Mereka harus terjun langsung ke masyarakat...	FK; Kontestan Pilkada; Masyarakat.	Dialog FK diharapkan dapat diperluas. Kandidat yang diharapkan mengambil inisiatif dialog dengan masyarakat.	2	Interaksi warga dan politisi; Dialog politik (perluasan partisipasi).
492	Titi	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	Banyak calon-calon Bupati yang tidak dikenal di masyarakat, itu kenapa suara mereka di Pilkada jadi sedikit... Masyarakat tuh sebetulnya banyak bertanya, itu calon siapa yah, bagaimana itu...? Kadang-kadang juga banyak yang bertanya kepada saya... Saya ceritakan calon ini tu begini, yang itu begitu... "Ini tu siapa teh?", jadi saya harus banyak cerita soal itu... Banyak juga yang tanya begitu...	FK; Kontestan Pilkada; Masyarakat.	Banyak kandidat Pilkada yang tidak dikenal masyarakat.	2	Popularitas (kontestan Pilkada).
493	Titi	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	<i>Kemaren tuh</i> kan banyak juga dari masyarakat yang saya undang, dari pihak desa juga ada... Tapi dia bilang dia kan PNS, jadi takut juga, takut disorot... Banyak juga dari tokoh-tokoh masyarakat yang mereka tidak mau terlibat disitu... Kalau yang lain itu... Ada juga kuesioner waktu itu kan, ada banyak pertanyaan-pertanyaan, nah disitu mungkin takut terjebak disana... Kan disitu ada pertanyaan soal penilaian pada Bupati sebelumnya... " <i>Calon bagaimana yang diinginkan</i> "... Banyak mereka yang tidak mau ngisi... " <i>Ini teh saya ngga mau ngisi...</i> ", jadi jangankan hadir waktu itu ya, ngisi kuesioner aja dia ngga mau... Ngga mau terlibat, takut barangkali... malah mereka nyorot ke saya waktu saya ke desa itu ya, tapi ngga alalah, sudah biasa itu mah... he...he... Ya diakan udah tahu kalau saya orang LSM... Jadi udah biasalah...	FK; Kontestan Pilkada; Birokrat; Tokoh masyarakat; LSM.	Pada waktu FK lalu banyak aparat pemerintahan desa dan tokoh masyarakat yang tidak mau mengisi kuesioner dan tidak mau ikut hadir dalam dilog dengan kandidat.	2	Pemahaman politik; Partisipasi (keengganan tokoh untuk terlibat).
494	Titi	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	Kalau menurut saya buat ke depan FK ini masih perlu... jadi masyarakat bisa paham calon pemimpin...	FK; Kontestan Pilkada.	FK perlu dipertahankan	2	Keberlanjutan (FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
495	Titi	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	Banyaknya mah laki-laki... Hampir dimana-mana begitu... Tapi perempuan aktif juga bertanya...	FK; Peserta laki-laki dan perempuan.	Peserta FK lebih banyak laki-laki, tapi perempuan juga aktif diskusi/dialog.	2	Partisipasi politik perempuan.
496	Titi	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	Untuk ke depan mah ya mungkin perlu lebih banyak yang bisa diundang dari masyarakatnya sendiri, tidak hanya para tokoh dan para pegiat-pegiat, tapi juga dari masyarakat ya mungkin mereka tidak tahu... Kalau kemarin kan cuma keterwakilan, ya... Cuma sebagian kecil... Kalau memungkinkan bisa di banyak tempat, kalau para calonnya mau ya mungkin aja... itukan tergantungan calonnya sendiri, mau ngga untuk terjun ke lapangan... Kalau calon yang memang sudah dekat dengan masyarakat mau, karena mereka sudah punya visi-misi sendiri kan...	FK; Masyarakat.	FK ke depan perlu melibatkan lebih banyak masyarakat.	2	Interaksi warga dan politisi; Dialog politik (perluasan partisipasi).
497	Lastri	P	NGO (Inisiatif)	Wwcr, 1 April 2012	Cuma saya waktu itu baca bulletin, soal Pilkada, bahwa waktu itu ada diskusi dengan calon-calon... Kalau dilihat dari tujuannya sih bagus ya, terbuka gitu... Dibuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut menilai gitu, siapa yang terbaik dari pilihan yang ada... Saya lihat ada pendidikan politik gitu disitu... Ada ruang besar untuk pendidikan politik rakyat...	FK; Kontestan Pilkada.	FK menjadi ruang pendidikan politik rakyat.	2	Media; Partisipasi; Pendidikan politik.
498	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Saya ikut kegiatan FK pas di STT Telkom... itu yang awalnya... Dulukan sembari FK kan sambil emosi juga kan ya semangatnya, ya emosi ke pemerintah aja... dari awal lihat calon-calon Bupatinya pas di Telkom, wibawanya kurang... penguasaan masalahnya juga kurang...	FK; Kontestan Pilkada.	FK meningkatkan pengetahuan mengenai kandidat Pilkada.	2	Kompetensi dan penguasaan masalah (kontestan Pilkada).
499	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Pas di Telkom, lebih ke promosi apa yang calon programnya... Sepertinya bias juga ya... karena janjinya juga macam-macam... ada yang lebih mengandalkan popularitas... Ya nggak begitu mengesankanlah... walaupun akhirnya kita juga jadi tahu bagaimana para calon itu... keseriusan mereka sampai dimana... <i>mapping problem</i> mereka gimana...	FK; Kontestan Pilkada.	FK meningkatkan pengetahuan mengenai kandidat Pilkada.	2	Kapasitas komunikasi dan dialog (bukan kampanye).
500	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Ternyata juga kan, sampai hari ini setelah Pilkada nggak sesuai dengan yang kita harapkan... Ya harapan banyaklah... intinya kondisi Kabupaten Bandung lebih baik. Tapi ternyata sesudah Pilkada kan tetap aja, ganti Bupati, nggak berubah... Malah kata kawan-kawan, APBD sekarang itukan lebih banyak untuk biaya rutin... masyarakat tetap susah aja...	FK; Bupati; Masyarakat.	Pergantian Kepala Daerah tidak membawa perubahan bagi masyarakat.	2	Perubahan kualitas pemerintah (belum).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
501	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Kalau saya sih dulu lebih semangat isu perempuan... kondisi Kabupaten kan tidak pro gender ya... Seperti di rancangan RPJMD jugakan masalah kesetaraan gender nggak jadi isu yang penting ya, tapi hanya diselipkan saja. Sementara sekarang perempuan tuh, lebih berperan penting ya... saya pikir, kalau perempuan sudah diperhatikan, otomatis dong kondisi Kabupaten Bandung meningkat... Kalau misalnya sekarang perempuannya sudah pintar, sudah sadar akan kesehatan, itukan akan menunjang... Tetapi sekarang hanya sebagai selipan. Di RPJMD juga tidak diulas memadai... Beberapa kali FK juga mengadakan dialog ya dengan Pemda, tapi sepertinya juga kurang respek ya dengan isu itu... Waktu itu saya lebih <i>concern</i> di isu itu...	FK; Perempuan.	Isu perempuan kurang mendapatkan perhatian, baik sebelum maupun sesudah Pilkada.	2	Isu perempuan.
502	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Nah yang terpilih itu, pas di FK sebenarnya cuma punya popularitas saja... Cuma ya mungkin kita kembali ke masyarakat ya... Karena acara itu juga nggak semua masyarakat tahu ya, cuma kalangan LSM saja yang tahu... sementara di masyarakatkan memilih karena alasan sesuatu... Intinya disini masyarakat juga belum cerdas memilih... Itu juga PR bareng-bareng ke depan... Jangan juga acara FK di dalam saja ya, nantinya bisa di luar juga... Nih tampilkan gini, gini... Intinya bagaimana masyarakat cerdas ya.. kalau selama ini masyarakat nggak cerdas, kembali lagi kita ditipu... Kabupaten Bandung kan kondisi masih begini aja... belum jelas...	FK; Masyarakat.	Masyarakat banyak yang belum cerdas dalam memilih, sehingga akhirnya kembali ditipu oleh politisi.	2	Pemahaman politik (masyarakat)
503	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	(Situasi waktu dialog dengan calon?)Saya lebih melihat bagaimana si calon Bupati dan Wakil Bupati menjawab... Karena juga gini, waktu itu juga banyak pertanyaan bagus... dialognya juga bagus tuh... Cuma kalau respon dari yang si calon Bupati dan wakilnya itu nggak jelas, ya jadinya nggak jelas juga tuh... Tadi saya bilang, keseriusan para calon itupun jadi kelihatan kan... Tapi kalau diskusi di masyarakatnya sendiri bagus menurut saya... pertanyaan-pertanyaannya juga bukan yang itu-itu aja, isu-isunya juga baguslah... Karena sekarang ini yang sering muncul soal honorerlah, itu yang sering diangkat orang, pengen sejahtera sebagai PNS gitu, he..he..he...	FK; Kontestan Pilkada.	Isu yang diangkat konstituen kepada kandidat cukup baik, dan proses dialognya secara umum juga cukup bagus.	2	Kapasitas komunikasi (kontestan Pilkada).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
504	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	(Manfaat?) Dengan FK kita jadi tahu soal calon tadi ya... Buat saya sendiri, sebetulnya saya jadi instropeksi setelah acara di Telkom itu... itu juga yang membuat saya jadi lebih fokus di isu gender... Ketika kita belum cerdas, kita tidak akan punya pemimpin yang cerdas, gitu... Tapi kalau kitanya cerdas, pasti kita punya pemimpin yang cerdas... Jadi kembali, segimana gede acaranya, tapi masyarakatnya belum sadar, belum cerdas, ya udah... Saya sih kemarin terperangah aja, ternyata kandidat yang akan dipilih seperti ini... sementara masih banyak orang di Kabupaten Bandung ini yang lebih cerdas... tapi kembali lagi ke masalah modal ya, bisa atau nggak... seperti itu sih...	FK; Kontestan Pilkada.	Masyarakat yang cerdas akan memilih pemimpin yang cerdas pula.	2	Kapasitas politik (kontestan Pilkada).
505	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Dari situ sebetulnya menuntut FK untuk lebih bergerak... Yuk, kita sudah tahu kondisinya kayak gini, terus gimana caranya, kita juga <i>ngedampingin</i> jangan sampai kayak sebelum-sebelumnya banget gitu ya... Minimal mengurangi korupsinya, lebih responsif ke masyarakat...	FK; Bupati.	FK dapat berperan mengawasi dan mengkoreksi pemerintahan.	2	Kontrol terhadap pemerintah.
506	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	(Peran apa yang diharapkan bisa dimainkan FK?) Banyak Mas sebenarnya harapan... Ya intinya kalau untuk merubah sistem memang sulit ya, tapi mungkin kita bisa memperbaiki keadaan yang sekarang... Setidaknya pemerintah bisa melihat, ada FK nih, ada masyarakat di Kabupaten yang juga mengkoreksi... Selain peran DPRD, ada masyarakat disini yang juga mengkoreksi... Seenggaknya pemerintahan di Kabupaten Bandung bisa lebih baiklah... Karena saya <i>concern</i> dengan isu gender, ya mudah-mudahan ke perempuannya nggak juga asal ada program gitu... misalnya program Posyandu jangan asal sekedar itu, asal menggugurkan kewajiban saja gitu...	FK; Bupati; DPRD.	FK dapat berperan mengawasi dan mengkoreksi pemerintahan.	2	Perubahan sistem; Kontrol terhadap pemerintahan.
507	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	FK itu mungkin diterima pemerintah karena tidak seperti FDA ya... kalau FDA kan keras... kalau FK kan masih bisa lobby...	FK; FDA.	FK lebih kolaboratif.	2	Kolaboratif; Konfrontatif.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
508	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Ya menurut saya FK sangat penting, jadi kalaulah misalkan nggak ada juga... kitakan gimana ya Mas... misalkan untuk mengetahui sepak terjang pemerintah sampai dimana... misalkan nggak ada wadah ya kita bingung juga dong sendiri... kasak kusuk masuk ke Pemda... Cuma saya sih mengharapkannya akhirnya FK bisa berperan masuk ke pemerintah gitu... Ya seenggaknya pemerintah juga masih segan lah Mas... Seenggaknya disini masyarakat masih adalah, nggak cuma sekedar menjadi korban kebijakan saja...	FK; Pemerintahan daerah.	FK penting sebagai wadah interaksi warga dengan pemerintahan.	2	Keberlanjutan (FK); Partisipasi (peningkatan peran FK).
509	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	(Respon pemerintah pasca Pilkada?) Menurut saya sih mereka cukup menghitung FK ya... Ketika kita ingin diskusi mengundang mereka, Alhamdulillah itu bisa terjadi... mereka tampaknya cukup terbuka... Sampai pas kemarin Musrenbang 2011 kita diundang juga, sementara dari lembaga lain cuma diundang 2 orang per lembaga, kitakan terserah, masuk berapa aja juga boleh...	FK; Pemerintahan daerah.	Keberadaan FK cukup diperhitungkan	2	<i>Bargaining position</i> (FK).
510	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Peran perempuan itu kalau di FK secara kuantitas itu masih sedikit... Biasalah kalau di organisasi itu jumlah perempuan lebih sedikit... Kalau secara kualitas... karena kalau dalam diskusi apapun, perempuan juga ikut terlibat... Jadi walaupun jumlahnya lebih sedikit, jadi malah kelihatan ya, he...he... Waktu dialog dengan calon di Telkom waktu itu ya masalah perempuan ini juga kita munculkan... Tapi waktunya memang sedikit ya waktu itu... padahal masalah perempuan itu banyak ya yang mesti dibahas... he...he...he...	FK; Peserta Perempuan.	Peserta perempuan di FK masih sedikit, namun dalam diskusi dan dialog sama terlibat aktif.	2	Partisipasi politik perempuan (FK).
511	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	(Untuk ke depan lagi gimana?) Saya kira masih banyak kawan yang terpikir soal FK ini... contohnya saya yang kemarin melahirkan dan punya anak seperti saya ini juga masih memikirkan RPJMD itu gimana, he..he... Saya juga masih suka tanya kawan-kawan, penasaran... Jangan nunggu moment-lah... kalau nunggu moment ya lama ya... Kita bisa ngumpul lagilah, saya yakin dengan silaturahmi kecil-kecilan saya kira kita juga bisa gerak lagi... Bisalah dengan semangat kawan-kawan yang saya lihat waktu itu... bahkan ada Kades ya, yang meskipun bisa disebut aparat pemerintah itu tapi dia yang semangat sekali untuk terlibat ya...	FK.	Konsolidasi FK perlu dilakukan dan tidak menunggu momentum.	2	Momentum politik; Silaturahmi; Komunikasi (FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
512	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	(Hambatan?)Hambatan... dari segi jarak kali ya... Karena kawan-kawan itu tinggalnya banyak yang jauh ya... Karena kita juga nanya juga ya... kalau saya sih, " <i>Kapan sih ada kegiatan FK lagi?</i> ". Saya sih nunggu... mungkin kawan-kawan yang lain juga nunggu seperti saya ya... Karena saya sendiri sih nggak mau ya disebut FK vakum. Karena kalau vakum ya berarti ya udah FK itu nggak ada lagi... Saya juga yakin kok, FK itu nggak asal-asalan dibikinya... Dan kita bikinya juga dari hati nurani, he...he...he... Semoga satu langkah mundur, dan seribu langkah maju ya...	FK.	Kendala jarak antar pegiat FK yang berjauhan.	2	Hambatan (FK)
513	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Tapi memang, kalau mau cari alasan sih ya, ketiadaan sekretariat mungkin juga berpengaruh ya... Nggak ada tempat kumpul... selama ini kumpul paling di FDA, atau waktu itu pernah keliling ke tempat atau rumah kawan-kawan lain... Tapi yang jangan bikin alasan... Kawan-kawan lain juga pasti nanyain, seperti saya juga...	FK.	Ketiadaan sekretarian FK mungkin juga berpengaruh pada melemahnya konsolidasi.	2	Kendala (FK).
514	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Nah menyangkut logistik, waktu itu memang diharapkan proposal ke TIFA itu bisa disetujui ya... Jadi ya jadi mau nggak mau, sementara semangat kita begini, nggak ada logistik, sementara kita tinggal jauh-jauh, dan nggak ada sekretariat, ya bingung, terus gimana... Kita kan nggak punya tempat, paling disini, atau PSDK... tapi kan rasanya gimana ya... he..he.. Nggak punya sekretariat, padahal kita organisasi yang seharusnya gede ya... Sama pemerintah juga masih dianggap... Tapi ngga punya sekretariat... <i>Pi karunya nya... Pi khawatirireun... Lamun punya sekre mah mereunan...</i> bisa kumpul barang sebulan sekali...	FK; Donor; PSDK.	Keterbatasan logistik, lokasi "anggota" yang cukup berjauhan dan ketiadaan sekretariat sebagai salah satu hambatan.	2	Kendala (FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
515	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	(Perbedaan FK dengan yang lain?)Kelebihan FK itu, karena kita yang terlibat adalah masyarakat yang merasakan masalah yang ada di Kabupaten... kalau dari sisi isu, kita juga beragam ya, karena dari berbagai lembaga dan wilayah... Sebelumnya paling saya ikut kegiatan mahasiswa ya, dan itu beda sekali ya, bahasanya, gayanya... Terus juga kalau di FDA kan hanya fokus di masalah anggaran... Nah di FK ini kok lebih kesentuh emosi ya... mungkin karena isunya lebih luas ya, dan mereka memang merasakan langsung masalah itu... Ini lho yang saya rasakan, karena saya menjadi korban kebijakan pemerintah... Nggak harus pakai bahasa Dewa seperti di mahasiswa ya... isu dan masalahnya beragam juga... Bahasanya juga macam-macam ya... ada yang pake Bahasa Sunda... itu justru lebih rame juga Mas... Sampe yang dari wilayah banjir di Cienteung itu bilang, "Banjir di tempat sayah ngan sameter... sameter tin a hulu..." Baguslah menurut saya forum seperti itu... Menurut saya belum pernah ada forum seperti itu di sini... Mangkanya kalau sekarang FK ini vakum, ya menurut saya sayang juga...	FK.	Peserta FK dari beragam latar belakang.	2	Plural; Inklusivitas (FK).
516	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	(Eksprei peserta berhadapan dengan calon?) Saya nggak terkesan ya... Ada calon yang sekarang jadi Bupati, sebelumnya terkesan, tapi pas di Telkom itu <i>tetep</i> aja ternyata kualitasnya tidak meyakinkan, hanya popularitasnya saja... Nah pas dia datang itu peserta sepertinya lebih <i>rame</i> , tepuk tanganlah... Sikap banyak peserta sepertinya beda... Kalaupun beberapa kandidat lain secara kualitas terlihat lebih memiliki pemikiran dan cara penyampaian lebih baik, tapi banyak peserta yang sepertinya memberi dukungan ke si calon yang jadi Bupati sekarang itu... Saya nanya dia juga jawabannya nggak nyambung... Waktu itu saya nanya soal galian C... jawabannya nggak jelas... Saya juga nanya motivasi ya, kan dia sudah jadi DPRD Provinsi, kenapa mau jadi Bupati... nah saya malah di pelototin tuh... Menurut saya mereka itu kandidat yang paling kacau waktu itu... Banyak peserta yang sepertinya memberi perhatian lebih ke pasangan ini, mungkin mereka memang tim sukses ya...	FK; Kontestan Pilkada; Bupati.	Pasangan Bupati/wakil Bupati terpilih pada saat dialog FK seperti mendapatkan perhatian lebih dari sebagian peserta, meskipun secara kualitas kurang meyakinkan.	2	Kapasitas politik dan pemahaman masalah (kontestan Pilkada).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
517	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Kalau FK <i>mah</i> netral ya... Memang dari Tim 9 memang ada yang dari sini... Pasti <i>nekenna</i> idealis ya... Cuma ya <i>nggak</i> tahu teman-teman <i>gimana</i> ... Tapi ya <i>nggak</i> bisa juga dong, kan harus mengakomodir teman-teman yang lainnya... Dan memang harapan kita juga FK bisa menjaga sikap yang menjaga idealis...	FK.	FK netral dan diharapkan bisa menjaga idealisme.	2	Netralitas (FK).
518	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Selama ini kita selalu menyoroti pemerintahan, padahal tujuan kita mencerdaskan masyarakat, ya memang disitu kurangnya... Seperti FDA saja... Dikenal dan ditakuti di Pemda gitu ya... Cuma kan cobalah tanya tetangga sebelah saja, tahu <i>nggak</i> FDA? Apalagi di wilayah-wilayah lain ya, tahu <i>nggak</i> FDA? Politik anggaran?... Pernah juga ada kawan waktu kuliah dulu nanya, FDA itu kegiatan ke masyarakatnya apa? Ya bingung juga ya...	FK; FDA.	FK terlalu berorientasi vertikal ke atas (hubungan dengan pemerintah), sementara misi pendidikan politik ke masyarakat kurang (FK kurang dikenal masyarakat).	2	Pendidikan politik (FK ke masyarakat).
519	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Saya melihat potensi besar di kaum perempuan... Kalau ibu-ibu kan lebih mampu sebetulnya untuk hal kampanye... Kalau misalnya ada pendidikan politik, membahas peraturan yang lebih berpihak ke masyarakat... Itu kan bisa juga dilakukan bersama kaum perempuan... Mungkin bisa lewat diskusi atau kegiatan-kegiatan kecil saja...	Perempuan.	Pendidikan politik ke kaum perempuan sangat penting.	2	Partisipasi politik perempuan.
520	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Ya FK memang idealnya bisa bergerak ke banyak arah... Ada yang berhubungan dengan pemerintahan, tapi juga ada bagian-bagiannya yang melakukan pendidikan dan penyadaran ke masyarakat juga...	FK.	FK idealnya bergerak ke pemerintah dan <i>civil society</i> .	2	Peran FK (pasca Pilkada).
521	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Menurut saya, yang bisa dilakukan saat ini adalah tinggal angkat telpon, ajak teman-teman untuk diskusi kecil aja dulu, bagaimana FK ke depan... Saya kira semangat kawan-kawan masih ada... meskipun geregetnya mungkin beda ya dengan di awal dulu, karena waktu itu momentum, dan terasa ada amanat dari masyarakat untuk disebarluaskan ke masyarakat lainnya... Walaupun, kita juga belum tahu nih caranya seperti apa, kita perlu diskusi...	FK.	Konsolidasi perlu dan mungkin dilakukan.	2	Komunikasi dan konsolidasi (FK).
522	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Kita juga sempat kumpul bahas FK ke depan mau gimana nih?... Ya memang harus diakui ya, dari sekian banyak orang, pasti banyak yang menaruh harapan besar terhadap FK ini, dan kita juga berharap FK ini masih bisa seperti dulu...	FK.	Harapan akan keberlangsungan FK masih cukup tinggi.	2	Keberlanjutan (FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
523	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Mungkin karena konsolidasi FK kurang jadi Musrenbang kemarin juga yang bisa ikut sedikit, padahal waktu Musrenbang 2011 kemarin mah FK bisa banyak ikut di rapat-rapat Komisi...	FK; Pemerintah daerah.	Konsolidasi berkurang sehingga peran FK keluar juga berkurang.	2	Konsolidasi; Partisipasi (FK).
524	Sari	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Ya memang tergantung orang-orangnya sih. Ya memang tidak terkonsolidasikan setelah RPJMD kemarin itu ya... <i>Inti na mah</i> tidak ada yang fasilitasi, kalau ada yang fasilitasi bisa terkonsolidasi... <i>Lah lamun terkonsolidasi mah, pasti daek...</i>	FK; FAB.	Pasca keterlibatan di RPJMD, konsolidasi FK melemah karena tidak ada yang memfasilitasi.	2	Konsolidasi; Partisipasi (FK).
525	Sari	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Sebetulnya sih kan banyak masalah yang bisa di dialogkan, nggak cukup sekali dialog... Tapi kan minimal dengan adanya FK ini terbangun partisipasi warganya ya, yang aspirasinya bisa disampaikan langsung ke calon, tidak hanya melalui DPRD...	FK; Kontestan Pilkada.	Dialog dengan kandidat Pilkada tidak cukup sekali.	2	Dialog politik (FK).
526	Sari	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	<i>Pabeulit... Nya' bener sih... Lain teu fokus na sih... kan sebenarnya aya sababaraha orang pemain... Yaa... wajarlah... Ari otak-otak pemain muncul omong-omongan, jadi orang yang hayang fokus ka masalah di komunitas manehnya jadi hese... kasalip lah istilah na... Nya' kan eta' teh berasal dari bermacam-macam komunitas, rea oge anu komunitas-komunitas yang disinilah mereka merasa bisa menyampaikan masalah atau pemikiran... terus kelompok-kelompok lain beda deui... Aya nu geuning di sengseurikeun pas diskusi di Dayeuh Kolot... Iya ujung-ujungnya manehna ka na proyek... Aya nu kitu... Nu jelas pan barenda latar belakang...</i>	FK.	Di FK ada yang lebih tertarik mengangkat masalah komunitas/daerah tapi ada juga yang tampaknya punya orientasi lain. Ada juga yang ingin FK akses proyek pemerintah.	2	Pluralitas (FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
527	Sari	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Tapi sempet muncul sih pernyataan di BBS, “ <i>Siapapun calonnya, FK ini akan membuat MoU si calon yang akan muncul</i> ”. Kalau nggak salah sih ya... Karena memang <i>ngadorong</i> nya begitu sih... Terlepas kita semua berbaju apa, kita bikin MoU dengan calon yang akan datang. Jadi bukan ini pendukung calon A, ini calon B... tapi kita sama-sama diwadahi oleh FK... Tapi ya sayangnya memang tidak terkawal... Padahal temen-temen disini mau juga mau ya mengkonsolidasikan soal FK... Tapi apa masalahnya, apakah menunggu moment, atau masalah logistik ya nggak tahu lah... Karena FAB juga tidak mungkin sepenuhnya bertanggungjawab dengan urusan FK di kabupaten, kan itu mah urusan di kabupaten... Itulah masalahnya, orang <i>na teh saha amu</i> bertanggungjawab di kabupaten...	FK; Kontestan Pilkada.	Ada komitmen di FK untuk mengawasi pemerintahan pasca Pilkada, meskipun saat ini belum bisa dilakukan secara optimal dalam konteks FK.	2	Konsensus (mengawal pemerintahan).
528	Sari	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Sayangnya waktu itu peserta di <i>bere</i> ongkos sih.... Waktu di BBS dan Telkom... <i>Eta pan merusak oge...</i> Tapi <i>da kumaha, nyaho eta mah pan proyek...</i> Apalagi <i>ningali aya calon-calon nu datang, eta mah</i> pasti di pikirannya acara <i>iyeu aya sumbangan ti manehana, eta mah</i> pasti lah... <i>Moal jauh...</i>	FK; FAB; TIFA.	FK diselenggarakan dalam bentuk proyek FAB dan TIFA.	2	Swadaya (FK); Proyek (FK awal sebagai proyek).
529	Sari	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Tapi bahwa FK itu netral, bicara bahwa ujungnya kita membuat FK untuk mengkonsolidasikan komunitas terkait dengan Pilkada dan pemerintahan baru setelahnya...	FK; Komunitas; Pemerintah daerah,	FK dibentuk untuk mengkonsolidasi komunitas terkait Pilkada dan pengawasan pemerintahan.	2	Netralitas (FK).
530	Setiawan	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Kalau capaian dari setiap proses itu kita memang belum mengukur mengenai hal itu. Kalau sejauhmana apa yang kita tawarkan bisa diadopsi pemerintah daerah itu juga kita belum telaah. Karena bisa jadi ada kesamaan sudut pandang, bahasa atau lainnya. Dari sisi gagasan, mereka bilang iya akan di tindak lanjuti. Tapi implementasinya kita juga belum cek lebih detail lagi...	FK; Pemerintah daerah.	FK belum mengukur sejauhmana gagasan dan aspirasi FK terakomodasi dalam kebijakan pemerintah daerah.	2	Dampak dialog dan kontrol (FK).
531	Didi	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Karena ketika saya juga ngobrol dengan orang BPBD juga, mereka sebagai orang pemerintah, mulai dari Kabid, Kabag, gitu ya, mereka respon dan respek sekali terhadap FK. Karena beberapa kali kita bertemu ya...	FK; Pemerintah daerah.	FK cukup mendapat apresiasi yang baik dari pemerintah daerah.	2	Pengakuan (FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
532	Didi	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	FK ini memang harus tetap konsisten, harus tetap eksis sehingga suaranya itu tetap dihargai dan didengar oleh Pemkab, dan terutama itu memiliki posisi tawar yang tinggi, itu yang diharapkan saya... Sehingga nggak dipandang sebelah mata ke FK <i>teh kitu...</i> Nah mudah-mudahan apapun hasil karya kita bersama ini, masyarakat juga bisa merasakan, minimal, <i>"Oh sudah katempo yeuh... aya perkembangan kieu..."</i> .	FK; Pemerintah daerah; Masyarakat.	FK diharapkan tetap eksis, konsisten, memiliki daya tawar ke pemerintah dan bermanfaat bagi masyarakat.	2	Eksistensi, Pengaruh; <i>Bargaining position</i> (FK).
533	Iman	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Keterlibatan kami dan kawan-kawan waktu itu sebagai mahasiswa terlibat di beberapa kegiatan FK. Kami waktu itu tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Kabupaten Bandung. Waktu itu dalam moment Pilkada, di mana mahasiswa mencoba terlibat mengawal Pilkada tersebut, dengan bersama FK melakukan dialog politik dengan calon Bupati dan Wakil Bupati waktu itu, dan memantau pemerintahan daerah saat ini.... Kami waktu itu dari Persatuan Mahasiswa Kabupaten Bandung, disingkat PEMKAB, berasal dari STIE Arqom, Yamissa, dan Universitas Bale Bandung...	FK; Mahasiswa.	Keterlibatan mahasiswa dalam FK.	2	Partisipasi mahasiswa (FK).
534	Ihsan	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Untuk ke depan, saya memandang jangan sampai forum ini hilang, sampai dimanapun... Sebagai orang tua, saya juga berharap kaderisasi juga harus dilanjutkan...	FK.	Harapan akan keberlangsungan FK masih cukup tinggi.	2	Keberlanjutan (FK).
535	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Setelah itu intensitas dalam membangun konsolidasi-konsolidasi ini yang memang melemah ya. Saya melihat, melemahnya bukan karena memang spirit akan Forum Konstituen yang melemah, karena dari pendapat-pendapat sebelumnya tadi saja memperlihatkan bahwa pandangan pemikiran bahwa Forum Konstituen ini sangat penting dan bermanfaat, meskipun belum maksimal, itu selalu muncul, bahwa Forum Konstituen perlu dipertahankan...	FK.	Harapan agar FK tetap eksis cukup tinggi.	2	Konsolidasi (FK); Keberlanjutan (FK).
536	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Persoalannya memang lebih pada persoalan energi atau tenaga untuk terus menjaga konsolidasi itu. Bukan kita tidak punya mungkin, tapi karena energi-energi yang ada harus kita alokasikan untuk kegiatan yang lain. Sehingga kadang seperti untuk soal Forum Konstituen, semangat untuk berkonsolidasi kemudian bergantung pada event yang ada. Misalnya, ya saat inilah, ketika kebetulan ada teman yang sangat mengapresiasi kehadiran Forum Konstituen di Kabupaten Bandung, ini juga kita berupaya keras melakukan konsolidasi.	FK.	Kendala FK adalah masih terbatasnya energi dan fokus untuk menjaga konsolidasi FK, sehingga tergantung pada momentum atau event.	2	Konsolidasi (FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
537	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Tapi bukan berarti bahwa agenda Forum Konstituen pada saat Pilkada lalu itu tidak ada yang menindaklanjuti, dan ini mungkin juga salah satu yang membuat kenapa Forum Konstituen tidak terlalu banyak muncul ya. Karena komitmen terhadap agenda-agenda pasca Pilkada tetap terus dilakukan, terutama temen-temen yang sehari-hari bergelut di soal itu, seperti dalam hal anggaran daerah temen-temen FDA juga intensif disitu. Terus juga pengawalan soal Citarum juga ada yang mengawal. Lalu juga Pak Ihsan meskipun tidak intensif berkomunikasi tetapi tetap membawa Forum Konstituen setiap ada kesempatan. Jadi upaya untuk menjaga Forum Konstituen ini tetap terus dilakukan.	FK.	Agenda FK tetap ditindaklanjuti oleh individu dan lembaga yang menjadi jaringan FK.	2	Agenda taktis-strategis (FK).
538	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Karena salah satu hal yang penting bagi kita untuk menjadi catatan juga, bahwa ternyata kalau bagi temen-temen Kabupaten Bandung itu mungkin maknanya tidak terlalu signifikan terkait advokasi, tetapi ternyata di lingkup Jawa Barat atau lingkup nasional, Forum Konstituen ini dianggap sebagai sebuah model partisipasi masyarakat dalam partisipasi politik yang langka. Kalau cerita dari Candra, kebetulan dia sedang menyelesaikan tesis S2-nya, kenapa dia tertarik dengan Forum Konstituen, karena ini bagi wilayah kajian sosiologi yang ditekuninya, ini sesuatu yang belum ada di tempat lain, sehingga sangat menarik kalau ini dikembangkan... Jadi kalau dilihat dari kacamata luar, praktek ini bisa jadi praktek yang luar biasa.	FK.	Mungkin FK dipandang kurang signifikan, namun FK sebagai model kelembagaan partisipasi warga yang jarang.	2	Model partisipasi politik (FK).
539	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Kemudian juga dari hasil wawancara dengan berbagai pihak, seperti dari KPU Kabupaten, Provinsi juga Pusat, dan pihak-pihak lain... Kalau menurut Ferry Kurnia dari KPU Provinsi yang sekarang di KPU Pusat, menurut dia belum ada yang semacam Forum Konstituen ini, dan kebetulan pada saat FK kemarin dia juga terlibat sebagai Ketua KPU Provinsi, dia juga hadir. Artinya sangat mungkin juga ke depan, praktek ini juga akan menjadi rujukan di kepala KPU Pusat, sehingga tidak tertutup kemungkinan juga ini bisa menjadi model untuk didorong dilakukan juga di daerah lainnya.	FK.	Mungkin FK dipandang kurang signifikan, namun FK sebagai model kelembagaan partisipasi warga yang jarang.	2	Model partisipasi politik (FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
540	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Buat kita juga luar biasa ya, karena pengalaman bersama, ada silaturahmi yang terbangun, kemudian ada ruang politik yang disitu kita bisa berpartisipasi. Ya semoga proses ini membuat kita semakin merasa penting untuk mengembangkan Forum Konstituen, dan bisa mengambil sikap dan keputusan, bagaimana ke depannya kita bisa lebih intensif dalam soal konsolidasinya, atau pengembangannya kemudian.	FK.	FK memberi pengalaman membangun jaringan dan terlibat dalam ruang politik yang baru.	2	Capacity building (FK); Arena politik; Keberlanjutan (FK).
541	Ihsan	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Jadi pada dasarnya dengan pembentukan FK, tanggapan masyarakat khususnya Kecamatan Cileunyi, karena nama FK selalu Pak Ihsan bawa, dimanapun saya berada, karena ini memiliki tanggung jawab moral untuk membesarkan FK ini. Ada juga beberapa orang yang bertanya, apa tugas-tugas FK itu? Saya jelaskan, bahwa FK itu menampung aspirasi masyarakat itu sendiri, karena FK merupakan suatu forum masyarakat sipil, sehingga mempunyai kewajiban menampung aspirasi dari semua masyarakat itu sendiri. Jadi dimanapun saya berbicara, FK itu selalu saya bawa. Sejauh saya ketahui, pandangan masyarakat juga positif, bahkan ada diantaranya yang bertanya bagaimana caranya kalau mau masuk jadi anggota FK ini. Bahkan pada Pak Camat sudah mengetahui bahwa FK selalu dilibatkan dalam rangka menentukan kebijakan daerah kabupaten, melalui RPJMD itu...	FK.	Tanggung jawab moral untuk membesarkan FK.	2	Forum warga; Civil society; Aspirasi.
542	Ihsan	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Jadi kalau menurut saya, FK ini sangat penting dipertahankan dan ditingkatkan. Kalau mungkin menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Saya juga mengharapkan FK bisa dilegalkan. Kalaupun tidak, setidaknya bisa diperjelas soal pembagian peran di dalam FK ini agar kegiatannya bisa lebih maju, terutama dalam mengawasi kebijakan Pemda di daerah.	FK.	Pandangan masyarakat dan pemerintahan lokal terhadap FK cukup positif.	2	Keberlanjutan (FK); Replikasi; Pembagian peran.
543	Wahyu	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Dalam persepsi saya, kawan-kawan yang merepresentasikan pandangan-pandangan dari berbagai wilayah, mengenai mengapa FK dibentuk, dan mengenai pentingnya FK. Munculnya FK dan pentingnya FK di kabupaten, karena kawan-kawan telah menyampaikan testimoni mengenai masalah-masalah di Kabupaten Bandung, mengenai masalah pendidikan, kesejahteraan... termasuk bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.	FK.	Peserta FK merepresentasikan masyarakat dari segi wilayah dan masalah/isu.	2	Aspirasi atas masalah (alasan FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
544	Wahyu	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Yang kedua juga beranjak dari investigasi kasus, mengenai persoalan yang ada di Kabupaten Bandung, yang selama ini kami mempunyai pandangan bahwa respon pemerintah terhadap kasus-kasus itu sangat terbatas. Contohnya, mengenai Cienteung, daerah rawan banjir. Atau masalah Citarum. Bagaimana pemerintah menyikapi persoalan-persoalan itu, karena selama ini persoalan itu sangat berdampak bagi masyarakat baik secara ekonomi dan sosial. Sehingga kemudian kita merumuskan dengan teman-teman dari berbagai wilayah di kabupaten, dan sepakat untuk adanya pembentukan Forum Konstituen.	FK; Pemerintah daerah.	Pemerintah daerah dinilai kurang memberi respon yang memadai terhadap persoalan yang ada di daerah.	2	Responsifitas (pemerintah daerah).
545	Wahyu	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Dan saya ingin sekali menegaskan kembali, bukan hanya pada kesempatan sekarang, tapi mumpung banyak kawan yang terlibat sejak awal FK juga hadir, bahwa FK ini jangan sampai mati di perjalanan. Saya ingin FK ini berkelanjutan, dengan melihat dari sisi dampak yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan.	FK; Masyarakat.	Harapan agar FK tetap eksis cukup tinggi.	2	Keberlanjutan (FK).
546	Setiawan	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Sebagai tambahan dari apa yang disampaikan kawan-kawan tadi, mengapa FK masih bisa bertahan sampai saat ini adalah spirit bahwa demokrasi elektoral itu selesai setelah pemilihan, dan itu saja tidaklah cukup. Masyarakat selama ini tidak punya cukup ruang untuk menagih apa yang dijanjikan para calon saat kampanye Pilkada. Biasanya janji kampanye itu manis-manis, tapi setelah terpilih itu biasanya dia lupa. Yang disisi lain, ada fenomena politik transaksional.	FK; Masyarakat; Pemerintah daerah; Kontestan Pilkada.	Demokrasi elektoral saja tidak cukup. Janji kampanye para kandidat harus "ditagih".	2	Demokrasi elektoral (kritik); Kontrol terhadap pemerintah.
547	Iman	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Saya menambahkan, kegelisahan kita menjelang Pilkada waktu itu kan, karena partai politik yang seharusnya memberikan pencerdasan politik kepada masyarakat itu tidak berperan efektif. Mereka hanya memanfaatkan suara masyarakat untuk kepentingan mereka saja. Jadi tujuan terbangunnya FK ini, adalah bagaimana masyarakat bisa cerdas, dan bisa berpartisipasi dalam politik. Bahwa politik itu tidak hanya memberi suara, tapi bagaimana mengawal calon-calon pada waktu itu.	FK; Kontestang Pilkada.	Tujuan FK adalah membangun masyarakat yang mampu berpartisipasi politik secara cerdas.	2	Disfungsi partai politik; Pendidikan politik; Partisipasi; Kontrol terhadap pemerintah.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
548	Didi	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Saya juga mau menambahkan. Karena secara historis kelahiran ini dalam suasana politik. Tapi yang saya rasakan bahwa FK ini adalah sebuah forum terobosan, yang memberi suasana baru saat itu karena masyarakat dan pemilih tidak diperlakukan dengan baik oleh pengguna-pengguna politik dan pemerintah. Sudah terjadi pembiaran. Itu mungkin sebuah terobosan bagaimana FK ini lahir.	FK.	FK adalah sebuah wadah yang melakukan terobosan politik, dan memberi suasana baru perpolitikan di daerah.	2	Terobosan politik (FK).
549	Didi	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Sehingga saya juga merasa aneh ya, kok saya lebih dikenal di FK-nya daripada di komunitas saya sendiri, he...he... Baik di legislatif ataupun di pemerintahan... Ini sebuah proses yang alami, ketika saya menyuarakan sesuatu... Contohnya, pada saat saya ketemu Komisi B di DPRD kemarin itu untuk menyuarakan soal Perda CSR di Kabupaten Bandung, sebelumnya saya diskusi dulu dengan Pak Ali dan kata Pak Ali langsung sajalah nggak sempat lagi diskusi dulu di FK, ya saya langsung ngajleng... Dan Alhamdulillah ketika saya datang ke Dewan, kata mereka "Wah sudah, ini sudah ada FK nih..." he...he... Jadi identifikasinya begitu. Alhamdulillah saat ini sedang dibahas soal Perda CSR itu, meskipun masih ada beberapa Fraksi yang keberatan, yang mungkin punya kepentingan lain ya...	FK; Pemerintah daerah; DPRD; NGO; Komunitas.	Pegiat FK kerap lebih dikenal sebagai "orang FK" dibanding dari lembaga asalnya.	2	Identifikasi dan personifikasi (FK).
550	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Ini berkaitan dengan situasi politik Pilkada, dimana memang keinginan orang-orang sangat tinggi untuk berpartisipasi dalam FK. Setelah itu dari sisi partisipasi memang berkurang... ya sampai hari ini lah.	FK.	Antusiasme tinggi untuk terlibat dalam FK ketika momentum Pilkada, dan menyusut setelahnya.	2	Momemntum politik; Partisipasi (FK).
551	Wahyu	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Menurut saya, karena saya tidak masuk dalam Tim 9... saya mencoba melihat dulu ke belakang... Kalau bicara potensi, FK itu sangat potensial sekali. Kalau melihat beberapa testimoni kawan-kawan terkait upaya yang telah dilakukan selama ini, meskipun belum mencapai semua targetan setidaknya tercapai dalam pelaksanaan atau dalam teknisnya. Sehingga proses pencerdasan baik bagi individu yang terlibat maupun masyarakat itu dapat dirasakan.	FK	FK potensial sebagai wadah bersama.	2	Proses pendidikan politik (proses FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
552	Wahyu	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Terus juga tadi muncul bahwa gagasan awal FK ini bukan dari Kabupaten Bandung sendiri, itu juga merupakan sebuah tantangan untuk mengupayakan bisa lebih baik, lebih bagus dari sebelumnya. Termasuk juga melihat sisi kelemahan-kelemahan yang tidak tercapai dari pengalaman sebelumnya. Ini juga menjadi motivasi saya tadi mengapa FK ini harus tetap ada. Kedua, berbicara potensi, banyak kawan-kawan jaringan yang baik secara kelembagaan maupun individunya itu memiliki sumberdaya yang cukup. Terus juga kalau dari sisi finansial juga, kalau kita mau identifikasi itu juga ada.	FK; Jaringan <i>civil society</i> .	Kapasitas peserta FK cukup memadai.	2	Replikasi; Jaringan; Kapasitas (lembaga dan individu).
553	Wahyu	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Yang jadi persoalan belum ada <i>chemistry</i> atau kedekatan secara individu-individu untuk melakukan kerja-kerja bareng. Sehingga apa yang sudah menjadi kesepakatan untuk melakukan pengawalan terhadap kesepakatan itu juga ada hambatan, baik belum ada kepercayaan secara internal, ataupun logistik yang belum memadai untuk melakukan pengawalan itu. Menurut saya, pertanyaan itu akan <i>include</i> , kalau Tim 9 itu bisa memulai kembali, merapatkan dan merumuskan kembali apa-apa yang menjadi targetan, harapan dan mengidentifikasi persoalan yang sudah terpetakan. Sehingga apa nih rasionalitas dari sebuah solusi bagi kerja-kerja bersama itu.	FK	Secara keseluruhan hubungan emosional dan rasional diantara peserta FK belum terbangun, yang kemudian cukup menghambat upaya institusionalisasi FK.	2	Sumberdaya (logistik); Konsolidasi.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
554	Wahyu	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Selain itu, dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung saya kira terwakili ya semuanya, sehingga menurut saya ini potensi, jadi masalahnya bukan dari sisi finansial, tapi jika komunikasi dan kepercayaan itu dapat terbangun maka kerja-kerja bersama itu tetap bisa dilakukan... Saya menyoroti kesepakatan waktu itu bahwa FK akan merumuskan konsep-konsep tatanan yang ingin dibangun di Kabupaten Bandung, dan itu akan disodorkan kepada calon-calon sehingga itu akan menjadi semacam kontrak dengan mereka, bahwa ini lho konsep masyarakat mengenai pembangunan di kabupaten. Hanya saja tampaknya proses pengawalan kita khususnya Tim 9 tidak greget. Saya memandang Tim 9 telah melakukan upaya-upaya lebih, termasuk pertemuan-pertemuan di beberapa wilayah, tapi kehadiran kita ke pemerintah itu yang kurang greget gitu, sehingga kita juga belum mempunyai ukuran sejauhmana mereka mengimplementasikan dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibangun di dalam FK ini. Mudah-mudahan kelemahan-kelemahan ini bisa kita ubah menjadi kekuatan untuk menjadikan FK lebih baik lagi ke depan...	FK.	Membangun komunikasi dan kepercayaan khususnya mengaktifkan Tim 9 sehingga FK dapat terus bergerak.	2	Keterwakilan (FK); Konsensus (agenda FK).
555	Wahyu	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Kita itu bicara substansi, bukan hanya seremonial... Sehingga ada beberapa partai juga yang melihat, <i>"Siapa nih di belakang FK ini, apakah ada orang yang penting dari partai yang ada di FK?"</i> . Nah kita buktikan bahwa FK lahir dari harapan dan inisiatif masyarakat sendiri yang juga punya kepentingan. Dimana kepentingan kita adalah bagaimana pola-pola pemerintahan di daerah ini bisa berubah menjadi lebih baik. Sehingga menurut saya, partai politik mungkin akan melihat kita sebagai kawan atau lawan mereka... Karena untuk komunikasi dengan pemerintah, iya... selama ini kita juga sudah melakukan itu. Tapi ketika ada hal yang dianggap menyimpang, temen-temen melakukan kritikan terhadap mereka.	FK; Partai politik; Pemerintah daerah.	FK lahir dari harapan dan inisiatif masyarakat sendiri, yang tidak dipengaruhi oleh partai atau kelompok politik lain, untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan di daerah.	2	Kepentingan masyarakat; Inisiatif masyarakat; Interaksi FK dengan pemerintah.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
556	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Menambahkan... Jadi FK ini akan juga sulit terselenggara tanpa ada dinamika gerakan masyarakat sipil yang sudah berlangsung. Itu juga mengapa FK ini bisa bergulir di Kabupaten Bandung... karena itu tadi... ada persoalan substansi, kegelisahan karena tidak adanya saluran, dan faktor ketiga adalah adanya aktor-aktor di Kabupaten Bandung yang beberapa waktu sebelumnya sudah bekerja di advokasi kebijakan. Karena kalau tanpa itu, akan sulit, karena FK hanya akan terselenggara sebagai sebuah event atau proyek saja... Dia tidak akan bergulir terus ketika event itu selesai...	FK; <i>Civil society</i> .	FK dapat terus bergulir karena sebelumnya sudah ada gerakan <i>civil society</i> di Kabupaten Bandung.	2	<i>Civil society</i> ; Saluran politik; Gerakan advokasi (di Kabupaten Bandung)
557	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Kemudian kalau mengenai keinginan akan Bupati pro rakyat, sebetulnya itu bukan menjadi agenda Forum Konstituen. Di dalam FK juga banyak pendukung calon-calon Bupati lain. Di dalam FK kemarin, soal itu tidak menjadi agenda dominan teman-teman.	FK; Kontestan Pilkada.	Keinginan untuk mengajukan calon Bupati pro rakyat bukan agenda kolektif FK.	2	Netralitas (FK).
558	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Kemudian yang lain juga, selain soal sosial dan pencerdasan politik rakyat... Ini juga ke dalam para pegiat FK, ini juga saya memandang sebagai ruang kaderisasi daerah... Karena melalui proses ini juga ruang munculnya kepemimpinan-kepemimpinan yang potensial di daerah di masa depan. Dimana dia bisa mengisi baik itu ruang formal maupun ruang informal... Jadi selain dia akan menguji dalam hal pengetahuan, kapasitas politik, dan lainnya, proses ini juga akan membantu membangun orientasi dari kader daerah ini gitu... "Apa sih yang akan saya lakukan ketika saya dalam posisi kekuasaan, baik di ruang formal maupun informal?". Ini yang akan membantu menguatkan komitmen bagi temen-temen di masa depan. Apakah ini terealisasi atau tidak, biar waktu nanti yang akan menguji ya...	FK; Aktivis lokal.	FK juga menjadi ruang kaderisasi aktivis di daerah untuk mengisi ruang-ruang politik di masa selanjutnya.	2	Kaderisasi (aktivis lokal); Proyeksi politik; Kepemimpinan (posisi dan pengaruh di ruang formal ataupun informal).
559	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Itu juga bukan misteri sebenarnya ya... Mungkin di tingkat eksekusi pemeranan FK, itu ada persinggungan fungsi dengan lembaga yang sudah ada. Ketika ada <i>labelling</i> apakah suatu upaya diperankan oleh FK, FDA, PSDK atau yang lainnya, itulah mengapa peran FK menjadi tidak optimal, karena fungsinya memang sudah dilakukan oleh yang lain. Memang misteri yang harus dipecahkan mencari ruang yang paling strategis, paling pas buat FK...	FK; PSDK; FDA.	Fungsi FK beririsan dengan lembaga-lembaga lain yang sudah ada sebelumnya, sehingga FK menjadi tidak selalu dimunculkan. Perlu dipikirkan posisi yang paling tepat untuk FK.	2	Sinergitas <i>civil society</i> .

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
560	Ali	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Momentum juga jadi persoalan tersendiri. Ini satu indikator bahwa kesadaran politik warga itu ya selesai di bilik suara... sehingga kenapa FK melempem, karena masalah kesadaran itu.	FK.	Kesadaran berpolitik secara umum memang belum tumbuh. Partisipasi politik hanya ramai di momentuk Pilkada.	2	Kesadaran politik (masyarakat).
561	Ali	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Ada krisis identitas sebetulnya Bung... bagaimana mengidentifikasi diri masing-masing pasca Pilkada kemarin itu... Agak sulit gitu... Terutama yang memang sudah teridentifikasi sebagai FK, seperti saya, Didi... Saya nggak mengaku dari FK pun tetep aja pihak lain memandang begitu... Itu kenapa kita sulit menemukan kawan yang bisa menggantikan representasi FK itu...	FK.	"Krisis identitas" pasca Pilkada, dan melekatnya citra FK pada figur-figur tertentu.	2	Identifikasi dan personifikasi (FK).
562	Ali	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Dari sisi pandangan publik, yang disini bisa berarti pemerintahan ataupun pihak lain, stempel sebagai FK itu dibawa terus... Ada kawan yang mungkin bisa, tapi ada masalah kelemahan dalam jaringan, atau kapasitas, mobilitas... Sehingga kita sering kehilangan momentum juga sebenarnya... Momentum itu bukan tidak ada... kalau kita antisipasinya cepat, bisa kita perkuat di FK nya... namun kita membiarkan momentum itu hilang. Dibantu dengan momentum atau ruang-ruang dari pemerintah... untungnya masih diundang Forum Konstituen itu... Sehingga kita tetap bisa menunjukkan eksistensi Forum Konstituen...	FK.	Keterbatasan figur yang bisa merepresentasikan FK, tapi dengan kapasitas, mobilitas dan jaringan yang memadai. FK sering kehilangan momentum karena masalah lemahnya konsolidasi dan kepemimpinan ini.	2	Identifikasi dan personifikasi (FK); Momentum.
563	Ali	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Itu memang jadi perhatian kita ya... Kita mensiasati itu, kapan dan dimana kita berbagai peran... Kapan jadi WALHI, kapan jadi PSDK, kapan jadi FDA, kapan jadi FK... he...he... Kalau kebutuhan sesaat mungkin bisa ya, tapi kalau berbarengan sulit juga, dan pasti kebaca sama pihak lain ya, he...he... Jadi kalau ada pertemuan, kita ngabsen itu cari yang belum ada, ha...ha...ha... "Maneh WALHI, urang FDA...".	FK; FDA; WALHI.	Banyak pegiat FK yang juga terlibat di beragam organisasi lainnya. Identitas kelembagaan ganda kerap menyulitkan juga ketika berhubungan dengan pihak lain.	2	Multi identitas (terlibat dalam banyak lembaga)
564	Ihsan	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Saya juga ikut Musrenbang kecamatan, dimana saya juga sampaikan usulan-usulan... saya juga menyampaikan soal FK ini... Ada yang bertanya, "Siapa di belakangnya?", saya jawab, "Masyarakat...". Bahwa anggotanya adalah masyarakat yang bergabung menjadi satu kesatuan masyarakat sipil...	FK; Aparat kecamatan; Masyarakat.	Masyarakat terbiasa melihat sebuah kelompok atau lembaga hanya sebagai perpanjangan tangan dari kekuatan politik tertentu.	2	Konstituensi.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
565	Tedi	L	FK	Dialog FK & Wabup, 23 Apr 2012	<i>Sareng sakedik</i> Abah menyikapi bahasa Sabilulungan, Pak Wakil... Bahasa Sabilulungan itu adalah bahasa sakral bagi orang Sunda...			2	
566	Tedi	L	FK	Dialog FK & Wabup, 23 Apr 2012	Tetapi alangkah sedih dan menyakitkan <i>upami teu terang rukun imannya Sabilulungan...</i> (...forum tertawa...)... <i>Anu opat point nu kedah di rangkum sangkan Sabilulungan</i> itu ada keberhasilannya... Di Kabupaten Bandung <i>opat point tos tertera... Sareundeuk, Sabobot, Saigel, dan Sapihanean...</i> Tapi tidak ada bahasa <i>Sabanda</i> dan <i>Sariksa</i> ... Padahal kunci sukses dari Sabilulungan teh <i>Sabanda – Sariksa</i> ... <i>Jadi nu namina Sabanda teh anu miboga Kabupaten Bandung teh lain saukur pemerintahan... Ku lantaran teu Sabanda, boro-boro narimakeun... Mobil dinas wae nu rakyat diruksak ku rakyat... karena merasa teu Sabanda... Janten urutanna teh, Sabanda, Sariksa, Sareundeuk, Sa'igel, Sabobot, Sapihanean... Leres Abah satuju tadi, teu cacah, teu menak, teu pajabat, teu penjahat lah katakana kitu... sejajar sederajat... kudu mirasa boga ka daerah urang sorangan...</i>	FK; Wakil Bupati.	Mengkritisi pemahaman elit daerah mengenai konsep <i>Sabilulungan</i> , sebagai filsafat masyarakat Sunda.	2	Nilai-nilai politik orang Sunda.
567	Deden Rumaji	L	Pemerintah (Wakil Bupati)	Dialog FK & Wabup, 23 Apr 2012	Saya dengan tim sekarang sedang menyusun, dari keempat masalah tadi bikinlah skala prioritas, sehingga diketahui mana yang harus selesai tahun pertama, selesai di tahun kedua, dan seterusnya... Dengan konsep <i>Sabilulungan</i> inilah berharap ada solusi... Karena tanpa itu, masalah Cienteung misalnya tidak akan selesai, <i>moal anggeuslah</i> Pak Ketua... Sehingga disini dengan konsep <i>Sabilulungan</i> ini kita berharap peran serta semua masyarakat terlibat di dalamnya... Kalau misalkan ini diselesaikan oleh sepihak pemerintah saja, tidak akan beres... Di sinilah peran LSM, peran pemerintah kabupaten, peran pemerintah provinsi dan pusat, para <i>agniya</i> , dan sampai ke masyarakat di strata ekonomi paling lemah juga, ini harus semuanya ber- <i>Sabilulungan</i> ... Karena kalau semuanya <i>kum</i> semua, saya jamin semuanya tidak akan selesai...	FK; Bupati.	Konsep <i>Sabilulungan</i> , karena masalah di daerah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah saja. Perlu peran serta masyarakat, NGO, dll.	2	Nilai-nilai politik orang Sunda; Kapasitas pemerintah; Partisipasi (warga).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
568	Deden Rumaji	L	Pemerintah (Wakil Bupati)	Dialog FK & Wabup, 23 Apr 2012	Nah ini mudah-mudahan... Ini mah LKPJ Didi iyeu mah... Ini saya justru mohon bantuan dari temen-temen Forum Konstituen untuk bareng-bareng... Dan saya tidak sungkan dan tidak malu untuk dikritisi, karena itu perlu!... Kadang saya ngobrol diluar... Ceuk Abah teh "Pak Wakil, Kang Didi iyeu masalah iyeu' kieu' kieu'...". Oh bener... Sehingga saya kan akan kontek terus... Sehingga saya selaku Wakil Bupati kan, saya ini mengurus pengawasan dan pengendalian...	FK.	Wakil Bupati minta FK dapat bekerjasama, sekaligus dapat mengkritisi kinerja pemerintah daerah. Informasi itu akan menjadi bahan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian pembangunan yang menjadi tugas Wakil Bupati.	2	Kritik; Aspiratif.
569	Deden Rumaji	L	Pemerintah (Wakil Bupati)	Dialog FK & Wabup, 23 Apr 2012	Jadi memang nggeus teu' jamanna deui Bupati dan Wakil Bupati teh di elu-elukan... "Bupati dan Wakil papayung agung...". nggeus teu' jaman... Bupati dan Wakil adalah pelayan pemerintah, Pak Candra, awas... Kita ini pelayan, pelayan yang melayani masyarakat Kabupaten Bandung, dari mulai pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan dari mulai urusan wajib, urusan pilihan, semua harus kita layani kan... Itu tugas pemerintah sekarang... Semua harus dilayani kan... Awas... Bupati dan Wakil Bupati adalah pelayan masyarakat... Jadi kita harus melayani masyarakat seperti apa... Bener nggak?!... Tuh beda' Didi kan... Kita ini pelayan... Babu' urang teh... Kita ini digaji oleh pembayar pajak... Dibayar oleh warga kan... Digaji oleh masyarakat... Jadi kita kerja untuk masyarakat... Bukan jamannya lagi ari Bupati teh Keadipatian... Sudah bukan jamannya lagi... Jaman menak eta' mah...	Bupati; Masyarakat.	Bupati dan Wakil Bupati sebagai pelayan rakyat, bukan model zaman kerajaan dahulu.	2	Budaya feodal; Kewajiban negara dan pemerintah; Pelayan masyarakat (pemerintah daerah).
570	Deden Rumaji	L	Pemerintah (Wakil Bupati)	Dialog FK & Wabup, 23 Apr 2012	Jadi itulah temen-temen... Ini mah kita ngobrol sepintas <i>ajah</i> ... Itu beban-beban yang <i>abdi</i> hadapi... Mudah-mudahan... <i>Nya' abdi</i> mohon bantuan <i>oge ti temen-temen</i> Forum Konstituen... Ketika menemukan dimana saya salah, katakan salah!... Dan saya tidak malu untuk dikritik... Kenapa?, karena kita niatnya bener... Kalau kita lain, wah jadi <i>pingpinan aya' nu ngritik ngambek</i> ... Wah!... <i>Tong</i> jadi politisi... <i>Tong</i> jadi pimpinan... Karena kita memang dalam posisi yang untuk dikritisi... Yah?!...	FK; Politisi; Pimpinan.	Wakil Bupati minta FK menyampaikan kritik bila ada masalah di pemerintah.	2	Kritik; Aspiratif.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
571	Deden Rumaji	L	Pemerintah (Wakil Bupati)	Dialog FK & Wabup, 23 Apr 2012	Tapi saya mohon dari temen-temen LSM, termasuk Forum Konstitutuen juga, dibantu abdi... <i>Leres teu?</i> ... Masukan-masukan tiap ada kasus <i>timana</i> ... " <i>Pak Wakil, ada saran ini masalah pelayanan yang kurang baik...</i> ", nah, silakan di SMS ke saya setiap saat... <i>Jiga Abah kan SMS terus ka abdi</i> memberikan saran-saran dan pendapat... Nah ini kan ada tanggung jawab bersamakan... Yah?!...	FK.	Wakil Bupati siap dihubungi dan diinformasikan jika ada masalah, bahkan melalui SMS.	2	Interaksi dan komunikasi warga dan pemerintah daerah.
572	Deden Rumaji	L	Pemerintah (Wakil Bupati)	Dialog FK & Wabup, 23 Apr 2012	Jadi gini... Ini kalau memang kita <i>komit</i> nih... Kadang <i>nu nyaho urang goreng pan ti batur...</i> kadang <i>urang ngaca mah asa'na kasep weh...</i> <i>Bener teu?!...</i> " <i>Wah Wakil Bupati kasep...</i> ", <i>teu nyaho urang boga jarawatan, heuheuh?...</i> <i>Teu nyaho urang boga borok anyar...</i> Jadi maksud <i>abdi</i> gini... Tolonglah temen-temen ini kita bikin forum yang bagus... Saya kan punya tugas pengawasan dan pengendalian... Tolong nanti temen-temen evaluasi setahun ini, mana yang kurang... Yah?! Mana yang kurang, mana yang bagus... <i>Mangga</i> disampaikan... Terus rekomendasinya apa, dalam hal apa... Baik urusan wajib maupun urusan pilihan... Kita diskusikan khusus...	FK.	Wakil Bupati minta FK menyiapkan hasil analisis/evaluasi pemerintah daerah selama setahun, dan akan disiapkan forum khusus bersama pemerintah daerah untuk membahas itu.	2	Dialog (formal, FK dan pemerintah daerah).
573	Deden Rumaji	L	Pemerintah (Wakil Bupati)	Dialog FK & Wabup, 23 Apr 2012	Nanti <i>ku abdi</i> difasilitasi... Tolong bikin forum yang bagus... Yah gitu... Nanti saya undang semua SKPD, karena tugas saya pengawasan dan pengendalian... Nanti saya ekspose di depan saudara-saudara... Nah saudara juga nanti siap ekspose di depan saya... Nah ini, rekomendasi dari Forum Konstituen untuk Pemerintah Kabupaten Bandung... Itu kan <i>siip...</i> <i>Ceuk abdi mah...</i> <i>Tapi tolong tertulis itu...</i> <i>Ulah ngaromong wae...</i> ha...ha...	FK.	Wakil Bupati minta FK menyiapkan hasil analisis/evaluasi pemerintah daerah selama setahun, dan akan disiapkan forum khusus bersama pemerintah daerah untuk membahas itu.	2	Dialog (formal, FK dan pemerintah daerah).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
574	Deden Rumaji	L	Pemerintah (Wakil Bupati)	Dialog FK & Wabup, 23 Apr 2012	Tadi bagus itu sudah disampaikan, bahwa kita khawatir target-target dalam RKPD dan RPJMD tidak akan tercapai... Itu kan buat saya mah senjata... Lihat tuh, LSM sudah bicara begitu, berarti saya harus melecut para pelaksana... Nah itu maksud abdi teh... Saya kan orang paling keras ka Pak Bupati... "Pak Bupati, saya tidak berwenang menunjuk pejabat karena itu wewenang Pak Bupati... tapi saya berhak mengevaluasi pejabat itu layak atau tidak..." Bener nggak? Itu tugas Wakil kan?... Nah itu, adanya forum itu yang saya harapkan... Jadi saya minta, Abah, Ketua dan Pengurus Forum Konstituen coba bikin kajiannya secara tertulis ya... Sok dirapatkeun... Himpun masukan-masukan... Karena itu tea'... Abdi tidak mau suatu saat muncul pertanyaan, "Apa indikator keberhasilan Bupati dan Wakil?". Jujur wae' abdi mah..., meureun ceuk Forum Konstituen, "Pak Didi alus, cocok jadi Bupati...", nya' Alhamdulillah... "Pak Didi goreng, karena tidak mampu jadi Wakil Bupati...", oh ya sudah...	FK.	Wakil Bupati minta FK menyiapkan hasil analisis/evaluasi pemerintah daerah selama setahun, dan akan disiapkan forum khusus bersama pemerintah daerah untuk membahas itu.	2	Evaluasi dan rekomendasi (dari FK).
575	Deden Rumaji	L	Pemerintah (Wakil Bupati)	Dialog FK & Wabup, 23 Apr 2012	Saya kasih contoh satu ya... dari visi ya... Disitu disebutkan "...melalui tata kelola pemerintahan yang baik"... Apakah betul seleksi dan evaluasi pejabat melalui proses yang tepat atau belum?... Nah itu satu... Dan, "...pementapan pembangunan pedesaan...", pertanyaannya dalam hal apa keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan pedesaan itu?... Kan kudu' aya' ukuranna na terhadap visi itu!... Silakan... itu di evaluasi oleh temen-temen FK... Itu senjata buat saya kan?... Tolong bikin matriknya... Apa saja kebijakan untuk desa itu?... Kalau kondisi desa sama saja dengan tahun kemarin, tidak ada kemajuan menurut saya... Betul nggak?!... Sumberdayanya dari mana?, karena kita butuh sumberdaya...	Pemerintah daerah; Pejabat daerah; FK.	FK dapat menyusun ukuran-ukuran pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.	2	Evaluasi dan rekomendasi (dari FK).
576	Deden Rumaji	L	Pemerintah (Wakil Bupati)	Dialog FK & Wabup, 23 Apr 2012	<i>Iyeu' jujur Bah, eta Sabilulungan teh</i> kalimat sakti ti Pak Bupati langsung... Jadi Pak Bupati <i>ngeus luar biasa... Ngan urang teh kumaha kudu menterjemahkanana?</i> ... (... forum tertawa...)... Dan <i>kumaha Sabilulungan</i> di masyarakat <i>teh... Da' masih hare'-hare'...</i> <i>Eta' teh baru jargon</i> , aplikasinya belum... Contoh di kecamatan dan desa... Saya sudah sampaikan evaluasi di hadapan mereka langsung, bahwa <i>maap</i> , aplikasi <i>Sabilulungan</i> baru 10%...	Bupati; Masyarakat.	Filsafat Sunda Sabilulungan yang menjadi payung program pemerintah daerah pelaksanaannya masih sangat minim.	2	Implementasi visi dan misi (pemerintah daerah); Partisipasi masyarakat (rendah).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
577	Deden Rumaji	L	Pemerintah (Wakil Bupati)	Dialog FK & Wabup, 23 Apr 2012	Tapi ini belum selesai... Awas!... (...forum tertawa...). Jadi <i>abdi</i> mohon FK bikin kajian khusus soal ini... buat tertulis dengan acara formal... Nanti <i>urang nyien</i> acara khusus... tapi undang juga temen-temen yang lain, <i>nya'!</i> ... <i>Urang</i> bikin semacam simposium, termasuk <i>ngaos Sabilulungan</i> lah... Jadi nanti larinya ke pengawasan dan pengendalian yang termasuk Tupoksi <i>abdi</i> ...	FK.	Wakil Bupati minta FK menyiapkan hasil analisis/evaluasi pemerintah daerah selama setahun, dan akan disiapkan forum khusus bersama pemerintah daerah untuk membahas itu.	2	Evaluasi kinerja pemerintah daerah; Dialog.
578	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	(Hubungan FK & FAB) Sekarang ini tidak intensif... Kan gua juga susah bilang apakah gua ini representasi FAB atau bukan... Kalau dulu waktu persiapan memang intensif... Soal merumuskan <i>content</i> , <i>assessment</i> , dan fasilitasi itu teman-teman di kabupaten juga terlibat, jadi bukan cuma FAB... Tapi dalam hal desain teknis kegiatan sepenuhnya itu FAB... Administrasi, logistik... Cukup jadi isu dan perbincangan juga di teman-teman Kabupaten, tapi secara umum bisa memahamilah mereka...	FAB; FK	Hubungan FAB dan FK.	2	Kolaborasi.
579	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Indikasinya, ada keinginan di teman-teman kabupaten untuk melanjutkan FK, tapi belum mungkin juga tanpa dukungan FAB... Tapi teman-teman sudah punya pengalaman kok. Contohnya dulu kursus anggaran dikelola Yayasan Inisiatif, tapi sekarang sudah bisa dilakukan oleh FDA sendiri... Kuncinya memang di teman-teman kabupaten. Menurut Ali, kalau FAB ngga ngajuin ya bisa kita ajukan pakai PSDK...	FAB; FK	Kemungkinan FK dikelola sendiri oleh pegiat kabupaten.	2	<i>Sustainability</i> .
580	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Jadi mengenai siapa anggota FK, mulai dari <i>assessment</i> itu kan dengan metode bola salju saja... Bagaimana rekrutmen di awal seperti bola salju... Misalkan di awal kan hanya para assessor ya, yang harus melakukan <i>assessment</i> masalah dan mengidentifikasi tokoh potensial di pelosok-pelosok. Kemudian mereka yang mengajak tokoh dan daftar permasalahannya itu ke dalam FGD. Kemudian FGD ini menginventarisir masalah tadi sehingga menjadi bisa lebih sistematis. Ini kan proses yang kemudian menjadikan bertambah terus pegiat FK ini. Sampai kemudian mencapai puncaknya di event di IT Telkom...	FK; Tim assessor; Tokoh potensial di komunitas.	Peserta FK adalah orang-orang yang dipandang sebagai tokoh potensial di komunitasnya.	3	Diskusi; Dialog; Keanggotaan (FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
581	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Jaringan inilah yang ketika FK berjalan tulang pokoknya adalah dari kedua jaringan ini. Derry dan Ali mereka itu alumni PSDK dan pelatihan anggaran itu... FDA itu forum yang lebih luas. PSDK dan Inisiatif itu anggota FDA. Namun tetap saja meskipun forumnya dibuka selebar mungkin tapi yang dominan tetap teman-teman PSDK... Sementara untuk isu Citarum kita bentuk juga Perhimpunan Kelompok Kerja (PKK) DAS Citarum, yang diinisiasi BPOS Citarum...	Civil society (jaringan FK)	NGO dan jaringan lokal yang menjadi motor penggerak FK.	3	Political network.
582	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Pada persiapan lebih dari setengah yang terlibat memang dari jaringan FDA, tapi pada saat pelaksanaan (kegiatan temu kandidat di TELKOM) itu kan pesertanya dari mana-mana... Di awal ada assessment sekaligus rekrutmen peserta FK, nah tenaga assessment itu sebagian besar dari PSDK dan FDA... Di FDA kan ada kursus analisis anggaran... nah dari peserta-peserta itulah sebagian yang juga terlibat dalam FK...	FK	NGO dan jaringan lokal yang menjadi motor penggerak FK	3	Aktivis sosial dan politik.
583	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Inisiasi FK sebagai forum sebetulnya justru baru setelah event pertemuan dengan calon itu... Itu kan juga masih jadi perdebatan apakah perlu AD/ART, apakah bersifat permanen ataukah hanya untuk <i>event-event</i> saja... Itu belum tuntas juga tuh... Kecenderungan yang agak kuat memang gagasan untuk membuat forum yang terlembagakan... Kalau gua sih sebenarnya sih lebih condong melihat sebagai forum saja... FK Pertama, Kedua, Ketiga... Jadi kalau ada <i>event</i> lagi baru gerak...	FK	Pergeseran gagasan dari FK sebagai event ke FK sebagai forum.	3	Institusionalisasi.
584	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Kalau FAB sih menyerahkan saja sepertinya pada keputusan teman-teman di Kabupaten... Masalahnya, di teman-teman sendiri sudah banyak peralatan yang ada, banyak teman-teman yang juga kemudian bikin komunitas baru, bikin bendera... Dan kalau FK di tingkat kabupaten dilembagakan itu menambah pekerjaan teman-teman untuk mengurus lembaga baru... dan ada kemungkinan justru akan mengerucut pada individu-individu tertentu saja... Tapi kalau dia <i>event</i> justru dapat menarik peserta-peserta baru...	FK	Dilema antara memformalkan FK atau tetap membiarkannya sebagai forum yang "cair".	3	Institusionalisasi (bentuk kelembagaan ketat atau longgar).
585	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Soal kepesertaan FK prinsipnya dipandang terbuka...	FK	FK sebagai kelompok inklusif.	3	Inklusifitas.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
586	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	(Komunikasi diantara peserta FK) Ya biasa aja... Kalau diantara teman-teman sendiri tentu saling kontak... Kadang relasi dengan teman-teman yang pernah terlibat FK sudah bukan dalam identitas FK kan, tapi sudah sebagai sesama warga Kabupaten Bandung saja itu...	FK	Komunikasi di internal FK.	3	Interaksi; Interelasi.
587	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Teman-teman FK ini juga pernah membuat pertemuan-pertemuan keliling di organisasi atau komunitas-komunitas yang terlibat dalam FK, di Manglayang, Arjasari, dan lainnya...	FK	Komunikasi di internal FK.	3	Diskusi komunitas.
588	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Jaringan teman-teman di level Kabupaten dan sekitarnya juga sudah cukup banyak ya... ke SHI, WALHI, ...	FK	Jaringan FK.	3	<i>Networking.</i>
589	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Cuma pengawalannya itu yang mestinya bisa fokus. Jadi meskipun si orang-orangnya ini akan lebih banyak menggarap isunya masing-masing, tapi dalam event-event tertentu dia dapat menyambungkannya dalam FK...	FK; Jaringan FK	Fk sebagai wadah bersama dari isu-isu yang digarap oleh masing-masing jaringan FK.	3	Jaringan dan simpul politik.
590	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	Itu kenapa aku lebih kebayang bahwa FK itu lebih sebagai event... Tapi jaringan ini akan tetap terbangun kan... Kalau Kabupaten kan wilayahnya relatif kecil kan... Interaksi para aktivisnya dapat terjadi setiap hari pada beragam event... Tinggal bagaimana masyarakat ini punya suatu label event yang punya nilai politik di mata pemerintah... Karena kalau dilegalkan khawatir nanti malah mereduksi, jadi sibuk ngurus kelembagaan... nanti di tengah jalan malah ada penelikungan dll. Kalau event wibawanya tetap dapat dibangun. Syaratnya itu tadi, <i>civil society</i> nya memang tumbuh di kabupaten itu... Kalau ngga kan siapa nanti yang mau ikutan forum itu...	FK; Jaringan FK	FK sebagai organisasi jaringan, dan bukan organisasi formal.	3	<i>Civil society; Political events; Political interaction.</i>
591	Tarum	L	FAB	Wwcr, 28 Maret 2012	(Status kepesertaan di FK) Individu... Tapi ini juga belum jadi suatu hal yang diperbincangkan mendalam... Tapi memang sebelumnya lebih berorientasi individu...	FK	Keanggotaan FK bersifat individu.	3	<i>Membershipness.</i>
592	Oky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	(Ada upaya menggali pengalaman sejenis dari tempat lain?) Tidak ada... tidak ada model, tidak ada <i>benchmark</i> ... dan memang tidak mencari juga...	FK.	FK tidak merujuk pada model yang sudah ada sebelumnya.	3	

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
593	Oky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	Ya menurut aku sebenarnya mereka juga harus upaya mencari logistik sendiri... Bahwasanya masuk dalam <i>grey area</i> bagi aku tidak masalah... Misalnya, pemerintah punya budget buat misalnya bikin program penelitian atau apa... Tidak masalah kalau teman-teman FK melakukan penelitian misalnya, atau <i>mapping</i> daerah kemiskinan, atau <i>whatever</i> -lah... yang sebagian bisa buat si peneliti, sebagian bisa buat kas FK... Nah maksud aku mereka sudah harus beralih pada hal-hal <i>fund rising</i> ya yang memungkinkan di mereka... Bahwasanya kemudian orang lain bahwa mereka sudah jadi orangnya pemerintah misalnya, itukan tinggal waktu saja yang membuktikannya...	FK; Pemerintah daerah.	Perlunya FK mencari logistik sendiri, termasuk di <i>grey area</i> ketika mengerjakan proyek dari pemerintah daerah.	3	Akses anggaran publik.
594	Oky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	Tapi tadi itu maksudku begini, secara ideal yang aku bayangkan, sebenarnya inikan nggak bisa nggak, ini pasti <i>grey area</i> sebenarnya... Bayangannya begini... karena kita bukan demonstran... yang kalau Bupati salah, demonstrasi... Atau bukan pegawai pemerintah yang apa kata Bupati ikut saja... Nah lalu apa? Itulah istilahnya harus elegan... Untuk menjadi elegan itu sulit untuk dikuantifikasi... Hanya mereka sendiri yang bisa membuktikannya seiring waktu...	FK; Pemerintah daerah.	Perlunya FK mencari logistik sendiri, termasuk di <i>grey area</i> ketika mengerjakan proyek dari pemerintah daerah.	3	Peran politik elegan.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
595	Okky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	(Dalam situasi keanggotaan dan lembaga yang belum jelas, apakah mungkin untuk “mandiri”?)Iya memang realitasnya begitu... Ketika TIFA bilang ngga bisa support itu aku SMS ke Candra, Tarum dan Ali juga... Tapi mereka ngga respon ya... Tentunya kita berharap TIFA bisa support, tapi kan TIFA bukan kita yang punya... Di tengah situasi gitu nah mereka ini kan sudah cinta dengan Kabupaten Bandung, terus punya modal sosial, dan ditambah dengan adanya FK, ya secara naluriah mencari solusi kan, karena mereka bukan masyarakat kebanyakan... Karena mereka sudah bergerak juga sebelum ada FK kan, seperti ada PSDK, FDA... Nah maksudnya asumsinya jadi bertahap, jadi kecil-kecil dulu, ya nggak apa-apa gitu... Ini yang sebenarnya kan... mereka akan tetap berkegiatan dengan atau tanpa FK... Ketika TIFA sudah tidak support ya perlu dipikirkan solusinya ya... Ya beberapa bulan aku nggak tahu perkembangan terakhir... Aku kira di Kabupaten Bandung, terutama teman-teman di Kabupaten Bandung ya, terutama yang di lingkaran Tarum ya, aku rasa sudah cukup dikenal lah... Karena sebelumnya mereka sudah punya akses dengan anggota Dewan, dengan Bappeda, dan wartawan juga nyari mereka, ketika ada banjir atau lainnya... Terus ketika ada FK kita juga sudah sering diskusi, “Wah ini sudah ada pelumas nih buat teman-teman mau ngapain juga...”. Kalau mimpi mereka soal FK tampaknya secara waktu dibayangkan bersifat jangka panjang... Nah kemudian, secara arah, dia mengontrol kinerja Bupati...	FK; TIFA; FDA; PSDK.	Ketidaksiapan TIFA mendukung pendanaan; Kemungkinan FK akan tetap digerakkan dengan sumberdaya yang ada.	3	<i>Social capital;</i>
596	Okky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	(Apa yang membedakan FK dengan forum warga lain?) Karena tidak ada di Kabupaten Bandung, yang ruang lingkupnya kabupaten, bukan desa atau kecamatan, yang terdiri dari komposisi orang yang prural dan berbicara tentang Kabupaten Bandung ke depan, itu tidak ada... FK tidak sektoral... Jadi ruang lingkupnya memang kabupaten, isunya juga level kabupaten, dan komposisinya juga prural, itu nggak ada... Itu yang membedakan dengan forum lainnya, bahkan membuat mereka antusias, “ <i>Ini bagus nih, bagus untuk dipertahankan ke depan, hayu...</i> ”. Itu yang menjelaskan buat kita kenapa mereka antusias sekali...	FK.	Kelebihan FK: prural; level kabupaten; kapasitas orang memadai.	3	Forum multi sektor; <i>District level forum; Plural membership organization.</i>
597	Okky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	Tim 9 dipilih pada saat FK II, setelah FK I yang di Telkom... Tim 9 dikasih mandat untuk menyiapkan kelembagaan FK ke depan... Pemilihannya lebih atas pertimbangan figur saja... Pak Ali itu koordinator FK, kalau ngga salah begitu, sebelumnya dia koordinator Tim 9-nya...	FK.	Tim 9 sebagai tim perumus kelembagaan.	3	Pengambilan keputusan dalam organisasi; Kepemimpinan dalam organisasi.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
598	Oky	L	FAB	Wwcr, 24 Des 2011	Tapi intinyakan, setelah sekian putaran, bisa mengundang Bupati atau Wakil Bupati, responnya begitu... bagiku ya sudah... Dalam arti begini, untuk berikutnya kita sudah ngomong hal berikutnya... soal elegan, kapasitas, stamina, strategi gitu ya... Tapi dalam proses kelembagaan dan lainnya, sebenarnya ini sudah jadi "barang" sebenarnya... Nah berikutnya bagaimana-bagaimana lagi teknisnya, ya sudah agak repot... Karena ini sudah jadi "barang"... itu sudah jadi "sesuatu" sebenarnya... Misalnya mau dilihat dari posisi tawar, modal sosial, pengaruh, itu udah sebenarnya...	FK; Pemerintah daerah.	FK sudah jadi "sesuatu" karena sudah ada pengakuan, punya modal sosial, posisi tawar dan pengaruh.	3	Pengakuan; Pengaruh; Stamina politik; Institusionalisasi ke dalam dan ke luar.
599	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	(Siapa yang terlibat?) Kita pilih mereka yang sudah memiliki kesadaran politik yang baik. Ya dari aktivis-aktivis LSM, aktivis komunitas, ormas... Jadi mereka yang sudah terbukti melakukan atau memiliki kesadaran politik itu. Nah ini jumlahnya memang tidak banyak, tidak mungkin banyak ya... Tapi kita harapkan mereka akan menjadi promotor untuk gagasan ini... Mereka akan menjadi simpul untuk membuka komunikasi dengan masyarakat. Jadi Forum Konstituen itu memang akhirnya bukan seluruh pemilih, tapi simpul-simpul dalam komunitas atau tokoh masyarakat... bisa Ketua RT, RW, bisa pengurus mesjid, semacam itu... Artinya simpul-simpul ini menguasai titik-titik interaksi dengan masyarakat pemilih.	FK; LSM; Ketua RT/RW.	Peserta FK adalah simpul-simpul komunitas, bisa tokoh masyarakat, aktivis lokal yang berfungsi sebagai <i>credible source</i> .	3	Kesadaran politik (<i>Political consciousness</i>); LSM; Organisasi masyarakat; Aktivis komunitas; Tokoh masyarakat.
600	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	(Lesson learned?) Yang kurang ini saya kira dokumentasi dan refleksi. Saya kira... proses-prosesnya itukan mustinya bisa didokumentasikan dengan cermat. Lalu dari proses itu dapat dilakukan pengkajian dengan cermat atas efek-efek dari setiap tahapan... lalu pada akhirnya kita bisa membuat sebuah <i>causal effect diagram</i> gitu kan... apakah masukannya seperti ini hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Proses itu yang tidak terdokumentasi dan ter- <i>manage</i> dengan baik, karena masalah anggaran saja ya... Seharusnya itu dilakukan... Kalau itu dilakukan baru bisa dibangun sebuah teori, gitu lho... tentang <i>voter behavior</i> , tentang <i>responsible voter</i> ... Jadi bagaimana kita bisa mendorong pemilih untuk bisa memilih secara bertanggungjawab, kemudian itu bisa membantu mengurangi angka Golput yang cukup tinggi gitu ya... Disinikan sekitar 40% Golput...	FK; FAB.	Proses FK terdokumentasi dengan baik, tetapi proses refleksinya kurang dilaksanakan.	3	Refleksi; Dokumentasi proses; <i>Voter behavior</i> ; Golongn Putih (Golput).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
601	Radhar	L	FAB	Wwcr, 4 Apr 2012	Saya kira ketiga hal itu yang cukup berhasil, dan cukup terdokumentasikan ya, oleh Oky itu... Proses-prosesnya saya kira bisa direplikasi, dan prosesnya saya kira berlangsung cukup sempurna ya, dari awal sampai akhir ya... Tapi inikan harus ada benang merah kan yang menghubungkan itu semua, nah ini yang saya kira kurang ya... proses refleksi tadi... Ini ada action berlangsung, ada <i>reflection</i> juga, untuk mengukur <i>action</i> tadi ke tujuan dasarnya...	FK.	Proses FK terdokumentasi dengan baik, tetapi proses refleksinya kurang dilaksanakan.	3	Aksi - Refleksi - Aksi.
602	Ali	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Jadi kita memang lebih kuat di pemerintah daerah ya... lebih kuat dalam ingatan kandidat sebenarnya... Kalau dengan teman-teman yang lain, sebagian kan terlibat di FK. Nah disitu yang kita belum mempertegas mau seperti apa sih FK ini... Belum ada diskusi lagi... Jadi ya cair saja...	FDA; PADK; <i>Civil society</i> ; Pemerintah daerah.	Inti FK adalah jaringan FDA dan PSDK. Format FK belum tuntas dibahas.	3	Format kelembagaan.
603	Setiawan	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	Itu pernah jadi perdebatan ya pak... perdebatan di kita itu, ada kekhawatiran kalau kita dapat akses dari Pemda ini adalah masalah independensi. Itu yang menjadi... Seperti yang disampaikan tadi, meskipun kita sebagai mitra Pemda, tapi kita kan juga dalam posisi yang (bersikap) kritis ya. Karena faktanya, ketika kita di awal sudah berdarah-darah mengkritisi mereka gitu ya, itu banyak juga kawan-kawan yang menjadi lemah. Nah itu yang perdebatan di FK nya sendiri... Memang waktu itu kita ada diskusi bagaimana kita melembagakan FK ini, salah satunya untuk memudahkan akses itu. Tapi juga ada beberapa pertimbangan plus minusnya, itu yang belum selesai sampai saat ini, terkait rencana strategis kita ke depan, apakah kita akan seperti ini... Ya kalau kita sih harapannya bisa mengembangkan swadaya itu, <i>cuman kendalanya</i> lembaga-lembaga yang ada di FK sendiri ya belum sangguplah melakukan itu... Kalau harapannya sih tetap ada support dari luar tapi tidak mengganggu independensi kita gitu... <i>Support</i> dari luar pemerintahanlah... Kita jugakan pernah mengajukan usulan program pengembangan FK ke depan. Tapi entah kenapa itu juga belum terealisasi...	Pemerintah daerah; Lembaga donor.	Ada kekhawatiran jika FK mendapatkan dukungan dana dari pemerintah. Lebih condong mencari dukungan pendanaan dari pihak diluar pemerintah, seperti donor.	3	Akses sumberdaya (dari pemerintah); Independensi; Sikap kritis; Swadaya.
604	Setiawan	L	FK	Wwcr, 28 Maret 2012	FK ini sebagai sebuah forum, iya... sebagai wadah, iya... Tapi saya pikir FK sebagai sebuah lembaga terbuka, jadi semua orang bisa masuk dan keluar, dia bukan menjadi bukan menjadi sebuah lembaga yang eksklusif. Bentuk itu penting, tapi tidak membatasi peran lah...	Konstituen.	FK bersifat inklusif. Bentuk kelembagaan juga dipilih yang tidak membatasi gerakannya.	3	Asosiasi; Inklusifitas; Bentuk lembaga; Peran politik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
605	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	(Kegiatan yang pernah diikuti di FK?) Banyak sih kalau ikut kegiatan FK mah... FK itu kan mula-mulanya berangkat dari kondisi keprihatinan kita, maka rekan-rekan di FDA dan PSDK itu seolah-olah kita punya harapan, punya keinginan, yang harus dituangkan dalam bentuk kebersamaan. Tapi bukan berarti kita tidak punya wadah masing-masing... Kita masing-masing punya komunitas sendiri... Tapi alangkah indah apabila kita bisa mempersatukan persepsi, visi dan misi, tujuan untuk memfasilitasi dan menyikapi yang selalu dan senantiasa dikeluarkan oleh pemutus-pemutus kebijakan pada saat ini... Yang selalu dan senantiasa tidak pernah secara utuh dan konkret berpihak pada masyarakat kecil... Maka termotivasilah wadah Forum Konstituen, yang notabene-nya independen lah... tidak berpihak kemanapun, tapi kita utuh mengaspirasikan jeritan atau keinginan masyarakat yang tidak pernah dan tidak tersampaikan oleh masyarakat kecil itu sendiri...	FDA; PSDK; Komunitas-komunitas.	FK berangkat dari keprihatinan dari banyak kawan di berbagai komunitas atau organisasi, yang bertujuan menyuarkan aspirasi masyarakat.	3	<i>Backward looking</i> (perspektif masa lalu); <i>Forward looking</i> (perspektif ke depan); Independensi; Ruang politik; Asosiasi; Aspirasi politik.
606	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Jadi intinya, ini wadah dari semua komunitas, dari banyak bendera di masyarakat yang muncul baik dari LSM, kelompok perempuan, katakanlah sampai RT/RW perwakilannya ada waktu itu... tokoh-tokoh masyarakat... yang sama-sama berjuang menyikapi para pemutus kebijakan yang selalu kontradiktif dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri... Walaupun kita memahami bahwa segala bentuk keinginan itu di Republik ini jalurnya sudah ada, di politik... Tapi kenapa tidak kita mendorong para pemutus kebijakan itu dengan cara-cara kita yang tanpa elit-elit politik... Tapi inilah kami...	FK; LSM; RT/RW.	FK sebagai wadah masyarakat dari berbagai unsur yang mencoba menyampaikan aspirasi warga dan mengawasi pemerintahan.	3	Asosiasi; Pluralis; Partisipasi politik.
607	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Itulah, di FK ini komplis lho... ada anggarannya, kebencanaannya, lingkungan hidupnya... mangkanya disitu keunggulannya... Masing-masing punya kompetensinya sendiri... Soal irigasi misalnya, itu ada kawan yang bergerak di kegiatan tersebut, dia berbicara soal itu... Nah mangkanya Forum Konstituen ini terbentuk dari semua elemen... Berbicara soal tukang becak, ada lho di FK... berapa penghasilannya sehari? Masalahnya apa?... Ketika dia bicara ekonomi rakyat, ada yang menanggapi, "Pak saya sendiri tukang bala-bala lho... Kok gini gini... Bapak bisa aja bicara begitu..." Jadi itulah keunggulan FK...	Jaringan FK.	Salah satu kekuatan FK adalah dari keragaman latar belakang dan penguasaan isu terkait dengan masalah di daerah.	3	Inklusifitas.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
608	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Jadi disini diperlukan figur yang bisa menjadi moderator... yang bisa merangkum, dan mengajak mengkaji bersama... Memang tidak asal diterima, karena segala sesuatu kalau gampang diterima nanti bisa menyesal kemudian... Padahal ada perbedaan, gesekan pasti ada... Tetapi ketika sudah diputuskan bersama, tidak ada satupun yang merasa tidak puas ketika itu kita bawa beraudiensi dengan pihak lain... Satu suara... Karena sudah dikemas, dimana debat hebatnya sebelum itu sudah dilakukan... Tapi pimpinan di FK bisa menyikapi dengan kebijakannya dan ilmunya ini...	Pegiat FK.	Figur dan pola kepemimpinan dan pengambilan keputusan di FK.	3	Kepemimpinan (internal FK); Konsensus.
609	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Mangkanya figur pimpinan-pimpinan di FK ini memang perlu orang yang tidak berpihak... walaupun mungkin dia tahu pendapat seseorang itu salah... Kadangkan suka ada orang yang langsung bilang, " <i>Kamu salah itu...</i> "... Ini tidak begitu... Tapi sebisa mungkin dikaji bersama dulu... Itu dengan bahasa kepemimpinannya... Itu bahasa perlu dong... kadang bahasa kan ada yang sok diktator... itu tidak bisa begitu...	Pegiat FK.	Figur dan pola kepemimpinan dan pengambilan keputusan di FK.	3	Kepemimpinan (internal FK); Konsensus.
610	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	(Soal kelembagaan?) Memang terakhir masih didiskusikan soal kelembagaan, apalah mau diformalkan atau tidak... Karena betul sampai sekarang kami belum punya aspek legal formal... Disatu sisi dikatakan perlupun kami tidak terlalu perlu... tapi dikatakan tidak perlupun kami juga perlu legal aspek... Karena bagaimanapun kita harus memperhatikan aspek hukum itu... Meskipun di undang-undang juga diatur, punya badan hukum atau tidak, tapi untuk berserikat kita diakui... Tapi supaya lebih punya aspek <i>safety</i> juga ya memang rasanya perlu soal legalitas itu... Kami akan legal aspekkan, karena sudah menjadi satu kekuatan yang luar biasa...	Pegiat FK.	Status hukum kelembagaan FK belum disepakati di internal FK sendiri. Tapi informan lebih condong agar FK diformalkan	3	Bentuk dan status hukum lembaga.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
611	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Dan siapa tahu kami bukan sekedar bisa mengkritisi, menyampaikan pemikiran... tapi mungkin bisa dikembangkan ke aspek pengembangan ekonominya... Itukan perlu legal aspek... Walaupun itu bukan FK namanya, tapi dibawah naungan FK... Karena kami tidak mungkin selamanya seperti ini, kami harus berkembang... Bayangan FK ke depan ini adalah satu wadah minimal berbentuk koperasi... Karena kamipun butuh kehidupan, tidak hanya sekedar menyuarakan aspirasi... tapi disisi lain kami juga ingin bisa mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat juga... Kalau ada wadah lain di soal perekonomian itu akan lebih baik... jadi ada wadah untuk menyuarakan, tapi ada wadah untuk pengembangan kehidupan...	Pegiat FK.	Harapan agar FK juga masuk ke arena ekonomi untuk mengatasi ketergantungan logistik, dan pengembangan kegiatan percontohan lainnya.	3	Pengembangan organisasi (arena ekonomi); <i>Support systems</i> (logistik);
612	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Tapi ini memang perlu pembahasan yang matang di kami dulu... karena membuat lembaga semacam itu perlu sumberdaya.. apakah ada donasi... apakah swadaya... itu semua perlu proses... Itu harapan kami untuk pengembangan kelembagaan... Misalnya, dikala kami mengkritisi soal perekonomian, ini kami punya lho contohnya... Ketika bicara pertanian, ini kami juga punya contohnya... Kita kan punya bajrak komunitas bermacam-macam, diharapkan kita punya contoh-contoh riil, itu mungkin akan lebih dihargai... Diamping mengkritisi, menyampaikan aspirasi, tapi juga memberi contoh gitu...	Pegiat FK.	Harapan agar FK juga masuk ke arena ekonomi untuk mengatasi ketergantungan logistik, dan pengembangan kegiatan percontohan lainnya.	3	Pengembangan organisasi (arena ekonomi); <i>Support systems</i> (logistik);
613	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Jadi isunya tidak sebatas politik saja, tapi jadi lebih jauh lagi... ketika bicara ekonomi ada contoh, bicara lingkungan hidup juga punya contoh... Ini harus, karena tanpa adanya itu kami akan selamanya seperti ini... Sementara usia, waktu... kami punya kaderisasi, tapi kan itu tadi, kehidupan ini butuh sesuatu... selama inikan kita berswadaya, kalau punya jalur-jalur perekonomian kan kegiatan kita bisa lebih lancar... Itu maksudnya...	Pegiat FK.	Harapan agar FK juga masuk ke arena ekonomi untuk mengatasi ketergantungan logistik, dan pengembangan kegiatan percontohan lainnya.	3	Pengembangan organisasi (arena ekonomi); <i>Support systems</i> (logistik);

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
614	Tedi	L	FK	Wwcr, 28 Mar 2012	Bahkan tidak menutup kemungkinan kami juga ingin punya media sendiri... Kita mempromosikan gagasan, daripada bayar <i>mending</i> bikin sendiri... Karena di organisasi apapun, media itu dibutuhkan... Bukan untuk apa-apa, tapi ini lho kami ada kegiatan ini itu... Apakah itu media cetak atau radio... Sebagai keinginan itu wajar, terealisasi atau tidak itu tergantung nanti... ada nggak rekan-rekan lain... Siapa tahu ada rekan dari media yang mau bergabung...	Pegiat FK.	Harapan agar FK dapat mengembangkan media sendiri.	3	Pengembangan organisasi (media).
615	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	Kalau kita lebih melihat bagaimana si Forum Konstituen ini dapat menjadi energinya masyarakat sipil dalam proses-proses pengambilan keputusan, walaupun dalam paripurna pengambilan keputusan itu menjadi wilayahnya Fraksi. Tapi paling tidak input dari Forum Konstituen yang lintas <i>stakeholders</i> dan lintas wilayah ini dapat jadi kerangka acuan. Karena yang terlibat dalam Forum Konstituen ini kan dari berbagai wilayah dan isu, sehingga dia sangat memahami situasi... Nah kalau pemerintah punya agenda pembangunan, sementara berlainan dengan pandangan forum Konstituen ini, ya otomatis akan sulit diakselerasi... Bukan sulit diakselerasi dalam arti Forum Konstituen akan mengganggu itu, bahwa apa yang disampaikan oleh Forum Konstituen itu merupakan representasi dari apa yang diinginkan masyarakat. Nah bagaimana itu menjadi input awal gitu...	Pemerintah daerah.	FK menyadari bahwa pengambilan keputusan masih menjadi domainnya pemerintah dan DPRD. Peran FK adalah menyampaikan input sebagai representasi aspirasi warga.	3	<i>Civil society</i> ; Proses pengambilan keputusan; <i>Stakeholders</i> ; Aspirasi warga.
616	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	Di tingkatan kita memang tidak sampai melembagakan... Karena kita meyakini bahwa <i>credible source</i> ini memiliki keyakinan perubahan yang berbeda beda gitu ya, dan lintas sektor... jadi kita konsolidasinya ya lebih bagaimana pendidikan politik ini sampai ke masyarakat...	<i>Credible source</i> ; Kontestan Pilkada.	FK cenderung tidak dilembagakan, tetapi lebih sebagai wadah pendidikan politik. Wilayah ideal bagi FK adalah di sekitar waktu Pemilu/Pilkada.	3	Institusionalisasi; <i>Credible source</i> ; Pendidikan politik.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
617	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	Saya masuk Tim 9. Karena memang dari konsolidasi awal saya juga masuk terlibat disitu. Bagaimana proses gagasan awal ini dibangun. Sebetulnya, bagaimana ya... Karena saya sibuk dengan organisasi saya sendiri, jadi kurang memperhatikan jadinya... Tapi kalau dimungkinkan untuk konsolidasi, menurut saya sangat mungkin... Tapi isunya tadi, kan lintas sektor nih... Jadi harus memilih isu yang lebih luas... Lebih bisa diterima yang lain... Karena kalau misalnya isunya hanya pendidikan, nah yang lain gimana nih...	Tim 9 FK; <i>Civil society</i> .	FK perlu mencari isu bersama yang dapat melibatkan "anggotanya" yang beragam.	3	<i>Common issue</i> ; Organisasi taktis-strategis.
618	Derry	L	FK	Wwcr, 1 April 2012	Tapi Forum Konstituen itu memang masih dibutuhkan... Karena belum tentu juga kan kalau mengadakan forum seperti itu FDA yang ngadain... Nah itu sebetulnya taktis saja ya... bagaimana mengkonsolidasikan banyak pihak dengan nama kelembagaan yang baru walaupun tidak dilembagakan secara formal... Karena agenda-agenda advokasinya yang ada dalam Forum Konstituen ini merupakan agenda masing-masing gitu lho... Jadi kita juga mengkompilasikan agenda kita disitu... Jadi Forum Konstituen lebih sebagai wadah, sebuah wahana, untuk lebih mengakomodir semua pihak...	FK; <i>Civil society</i> .	FK tetap dibutuhkan, sebagai wadah taktis mengkonsolidasikan berbagai organisasi dengan beragam isu dan latar belakang.	3	Organisasi taktis-strategis; Agenda taktis-strategis.
619	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Justru itu juga Bung, di struktural FK ini juga nggak jalan... Bisa dibalang juga nggak jelas juga... Tapi sayang gitu kan kalau dibiarkan... Jadi nggak ada yang fokus juga sih mengelolanya... Karena terlalu banyak gitulah... orang-orangnya itu-itu juga... FDA orang-orangnya itu-itu juga... FDA orang-orangnya PSDK... FK juga orang FDA banyaknya... Justru teman-teman ini kan <i>pengemnya</i> ada orang-orang dari luar FDA yang serius di FK ini... Tapi ada juga sih Pak Iman dan Bu Eliz yang pegawai desa, dia militan dengan FK-nya...	FK; PSDK; FDA; Pegiat FK lainnya.	Struktur keorganisasian FK tidak efektif. Perlu orang yang fokus mengurus FK.	3	Manajemen (kepengurusan FK).
620	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Cuma kalau pemerintah yang mengadakan, itukan bakal lebih luas... Harusnya semacam FK ini pemerintah yang mengadopsi, atau KPU lah... Modelnya diadopsi... Namanya mau FK atau apalah... Karena secara tidak langsung ini pencerdasan politik terhadap masyarakat... dari gencar-gencarnya partai politik yang <i>nyaver</i> gitu kan, transaksional...	FK; Pemerintah daerah; KPUD; Partai politik.	Akan sangat baik jika pemerintah daerah atau KPUD mengadopsi dan menerapkan model FK, sebagai sarana pendidikan politik dan mengikis perilaku politik transaksional.	3	Model FK (diadopsi pemerintah daerah/KPUD).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
621	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Tapi kalau model seperti FK ini diadopsi oleh pemerintah, dalam hal ini KPU lah, mungkin akan bermanfaat, dan akan lebih baik karena ada dukungan <i>resource</i> ... ada anggaranyalah kalau di pemerintah...	FK; Pemerintah daerah; KPUD.	Pemerintah dan/atau KPUD bisa mengadopsi model FK karena punya sumberdaya.	3	Model FK (diadopsi pemerintah daerah/KPUD).
622	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Ya di FK sendiri memang belum jelas soal prinsip-prinsip kerjasama itu... Kalau menurut saya sih, kalau untuk kemajuan, untuk pencerdasan warga Kabupaten Bandung, ya kenapa nggak, gitu kan... Karena kalaupun itu dari KPU, anggarannya itukan uangnya rakyat...	FK; Pemerintah daerah; KPUD.	FK perlu memperjelas prinsip kerjasama dengan pihak lain. Lebih baik dapat dukungan dari KPU karena dianggap uang rakyat.	3	Kerjasama (FK dengan pemerintah daerah/KPUD).
623	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Daripada sekarang sama TIFA, gitu kan... mending sama anggaran kabupaten aja... Daripada dari TIFA, ke NGO, terus kita jadi pihak ketiganya... Nah yang jadi lemahnya itu kita itu jadi pihak ketiga... Tapi kalau TIFA langsung ke orang kabupatennya, mungkin bisa lebih optimal untuk mengembangkan program FK itu...	FK; TIFA; FAB.	Kalau ada dukungan donor sebaiknya langsung ke FK tidak melalui NGO lain.	3	Kerjasama (FK dengan donor).
624	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Kalau di pemerintah, FK itu masih diperhitungkan, bahwa itu forum dari berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten Bandung... Tapi kalau di masyarakat sendiri, itu sekarang sudah mulai lemah... Ya koordinatnya siapa? Yang harus mengkonsolidasikan siapa? Itu belum jelas... Cuma yang terjadi sekarang, itu lembaga taktis aja untuk lima tahunan atau gimana gitu... Padahal mandat sebelumnya yaitu, mengawal jalannya roda pemerintahan dari hasil debat kandidat atau janji-janji calon Bupati waktu sebelum Pilkada...	FK; Pemerintah daerah.	FK diperhitungkan oleh pemerintah daerah, tapi kepemimpinan dan kelembagaan FK belum jelas. FK terkesan menjadi hanya menjadi taktis untuk Pilkada saja.	3	Manajemen (kepengurusan FK); Organisasi taktis - strategis.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
625	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Kalau mau diformalkan ya harus rekonsolidasi lagi... inikan dari banyak elemen... Perlu rekonsolidasi lagi, perlu persamaan persepsi perlu disamakan dulu... Karena setelah hampir dua tahun pemerintahan yang terpilih itu, ya cuma kalau ada undangan dari kabupaten... Musrenbang maupun kegiatan lain itu selalu ada ke FK... Cuma organ dan orang-orangnya FK itu yang mana gitu kan?. Seperti saya, ketika tidak ada di kepengurusan, ketika datang ke kabupaten, menyebutkan FK ya sah-sah saja... Karena memang tidak terstruktur... Jadi akhirnya nggak jelas juga arahnya kemana... Sekarang pemanfaatannya memang ya hanya ke taktis itu saja... Ingin terlibat di Musrenbang Kabupaten, kebetulan nggak punya lembaga, ah saya atas nama FK sajalah... itu bisa juga gitu...	FK; Pemerintah daerah; Jaringan FK.	Perlu konsolidasi untuk memperjelas arah, bentuk organisasi dan kepengurusan FK. Saat ini FK dapat digunakan secara taktis ketika berhubungan dengan pihak lain.	3	Konsolidasi (gagasan dan institusi); Agenda taktis - strategis.
626	Nanang	L	FK	Wwcr, 29 Maret 2012	Kalau untuk ke depan ya wadahnya tetap FK aja, tinggal melanjutkan... Kita benahi FK, terus konsisten FK ini dengan agendanya... Ya itukan netral, forum konstituen, bukan atas nama PSDK, FDA, atau lembaga lain gitu kan... Kan banyak lembaga yang masuk di FK ini... Atau bahkan partai politik ikut FK juga nggak masalah, gitu kan... Itu kalau menurut saya, bukan soal netral atau nggak nya, tapi orang FK-nya saja... Seperti saya tidak berpartai politik, lalu kawan lain ikuta partai tertentu, ya nggak masalah ya... Dia konstituen, saya juga konstituen di Kabupaten Bandung...	FK; "Anggota" FK; Partai politik.	Sebagai individu tidak masalah jika ada "anggota" FK yang berpartai.	3	Keberlanjutan (FK); Netralitas (FK).
627	Ihsan	L	FK	Wwcr, 19 April 2012	Saya berpikir bahwa Forum Konstituen sudah mendapat respon dari Pemda... Tapi kita perlu legalitas yang lebih kuat lagi Pak... Mudah-mudahan, itu bisa dibahas kembali di FK... Setidaknya untuk memperpanjang silaturahmi kita Pak, jangan putus-putus...	FK; Pemerintah daerah.	FK mendapat respon dari pemerintah daerah tapi aspek legalitas perlu diperluas.	3	Legalitas (FK); Silaturahmi.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
628	Jaka	L	Kontestan Pilkada 2010	Wwcr, 1 Apr 2012	(Kepesertaan FK?) Yang paling penting kita juga jangan terjebak ya... Penyelenggara juga jangan terjebak, nanti memilih siapa peserta itu. Tapi perlu keanekaragaman peserta yang ikut, termasuk masyarakat pinggiran... Sehingga itu masih bisa menjadi pembuka wawasan bagi semua pelaku atau stakeholder... Ketika kita mendengar bagaimana lugunya masyarakat pinggiran ini menyampaikan pemikiran, ini akan menjadi masukan bagi seluruh peserta yang hadir disitu... Disitu kan ada aktivis LSM, perguruan tinggi... sehingga bisa tahu, "Oo... ternyata masyarakat yang awam sekali itu ternyata begini pemikirannya...". Nah, dia kan kan terdorong untuk memberikan respon lebih nantinya... Ketika ini dilontarkan dan dijawab ini akan menjadi lebih <i>rame</i> gitu...	FK; Konstituen; NGO; Akademisi.	Peserta FK memang perlu beragam termasuk dari masyarakat marginal.	3	Inklusivitas; Netralitas; Partisipasi masyarakat miskin; "Bahasa rakyat".
629	Titi	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	Ya sebaiknya mah bisa berbadan hukum, punya SOP sendiri, bagaimana FK menjalankan fungsinya, baik terhadap masyarakat ataupun terhadap pemerintah... Kalau forumkan dari berbagai lembaga, mungkin wakil-wakilnya juga...	FK.	FK sebaiknya diformalkan (berbadan hukum dan punya struktur serta program yang lebih jelas).	3	Institusionalisasi; Bentuk dan status hukum (FK).
630	Titi	P	FK	Wwcr, 30 Maret 2012	Komunikasi dalam konteks FK kurang ya, lebih ke FDA nya... kalau saya mah sebatas diundang saja, pas persiapan FK, terus waktu di Telkom... Kalau diundang lagi ya InsyaAllah, kalau saya punya waktu...	FK.	Komunikasi dalam konteks FK terbatas.	3	Komunikasi (FK).
631	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	(Kalau FK mau diaktifkan lagi kira-kira apa yang perlu dilakukan?) Saya berpikirnya begini, kalau di formalkan kita khawatir nggak cair ya... Kalau seperti ini ya cuma begini, kalau cair ya terlalu cair... Kalau saya sih dulu lebih baik di formalkan, khawatir menjadi terlalu cair... dan terbukti seperti sekarang ini... Ya tapi saya juga menerimalah kalau temen-temen tidak mau formal ingin cair saja, karena sudah sibuk dengan lembaga masing-masing, seperti FDA ini... Cuma ya komunikasi sebetulnya masih bisa dibangun, minimal via SMS lah, yakinlah bisa kumpul... Soalnya kemarin itu saya lihat kan temen-temen semangat tuh... Gimana mereka yang jauh-jauh aja mau datang ya... Misalkan kita pas mau RPJMD itu kan ketemuan, kan sering juga... Jadi saya juga yakin kalau dikumpulin lagi juga mau...	FK.	Mungkin memang tepat jika FK tidak perlu diformalkan, namun komunikasi dan konsolidasi tetap perlu dilakukan.	3	Bentuk dan status hukum lembaga (FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
632	Wati	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	(Sumberdaya, kapasitas, dan logistik untuk memainkan peran-peran FK tadi?) Kalau saya lihat ya, saya nggak lihat kelembagaan, saya lihat orang-orangnya, nah teman-teman FK kelihatannya mereka punya peran aktif juga tuh di masyarakat, dan bisa mempengaruhi masyarakat... Contoh Kades di Pabunian tuh bagus, bahkan tanpa apa-apa juga bisa dipilih masyarakat... Menurut saya sih kapasitasnya lumayan.	FK; Kepala Desa.	Peserta FK adalah orang-orang yang cukup berpengaruh di komunitasnya.	3	Kapasitas (peserta FK).
633	Sari	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	(Kalau misalkan FK kerjasama dengan pemerintahan daerah, misalkan penelitian?) <i>Lamun FK secara keseluruhan mah nggak tau yah... kudu boga lembaga taktis ... misalkan pakai PSDK...</i>	FK; PSDK.	FK mungkin perlu meminjam bendera lembaga lain ketika bekerjasama dengan pemerintahan.	3	Lembaga strategis - taktis (FK).
634	Sari	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Tapi <i>da, tingali dina mayoritas mah dominasi nu kuat na ti FDA, he...he...he...</i> Cuma kan, berbasis massa na kudu jelas... basis isu na ka arah mana? Cuma kan FK terdiri dari banyak kelompok... Meskipun mayoritas FK memang dari FDA yang paling banyak...	FK; FDA.	Mayoritas pegiat FK berasal dari FDA.	3	Pluralitas (FK).
635	Sari	P	FK	Wwcr, 17 April 2012	Tapi kalau FK bisa di dorong jadi organisasi yang mengakses pemerintah di bidang penelitian <i>mah leuwih alus...</i>	FK.	FK mungkin bekerjasama dengan pemerintah daerah misalnya dalam kegiatan penelitian.	3	Akses program pemerintah (FK).
636	Setiawan	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Menyambung dengan yang disampaikan Pak Ihsan tadi, bahwa bukan saja soal perlunya penjaga gawang, tapi juga adanya pembagian peran di dalam FK sendiri, terkait bidang atau isu yang menjadi fokus perhatian... Meskipun FK ini cair, tetapi perlu jalur komunikasi yang jelas gitu... Sistemikanya seperti apa?	FK.	Perlu diperjelas pembagian peran dan tugas, pola komunikasi dan sistematika organisasi di FK.	3	Pembagian peran (FK); Komunikasi (FK).
637	Setiawan	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	<i>Punten</i> , sebelum ditutup, untuk tindak lanjut ke depan, ada beberapa hal yang muncul dari diskusi dari awal sampai akhir itu... Pertama, tadi kesulitan dalam mengidentifikasi diri. Kedua, persoalan konsolidasi, dan pola komunikasi di internal FK yang akan dibangun seperti apa. Ketiga, juga bentuk kelembagaan, masih perlu dibicarakan. Jadi yang paling vital adalah masalah konsolidasi dan komunikasi di internal. Posisi Tim 9 juga seperti apa?.. Ada juga gagasan-gagasan tadi yang dapat menjadi pilihan agenda ke depan. Selanjutnya ini akan dibahas bagaimana?	FK.	Masalah di FK yang belum disepakati: (a) Identifikasi diri; (b) Konsolidasi dan komunikasi; © Bentuk kelembagaan.	3	Refleksi (FK); Bentuk kelembagaan (FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
638	Setiawan	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Meskipun FK ini cair namun tetap harus terorganisir, perlu ada pola... sistemnya mau seperti apa? Memang penting kita diskusikan secara khusus... Terlepas apakah kita akan menjadi organisasi atau cair seperti ini, itu akan kita bahas kemudian...	FK.	Meskipun keanggotaan FK cair, namun tetap dipandang perlu terorganisir.	3	Bentuk kelembagaan (FK).
639	Ihsan	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Selanjutnya berkaitan tata organisasi, saya mengharapkan ada bidang-bidang yang secara khusus mencermati isu tertentu, seperti pendidikan, pertanian, buruh, hutan, dan lainnya... Tapi bukan berarti terpisah-pisah, karena Forum ini adalah sebuah organisasi kebersamaan. Barangkali kita dapat menampung aspirasi masyarakat dari beragam bidang tadi...	FK.	FK perlu ada pembagian peran dalam mencermati sejumlah isu.	3	Pembagian peran/ isu (FK).
640	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Terkait FK ini, setelah sekian lama memang ada persoalan konsolidasi... dan persoalannya mungkin yang pada pertemuan di Majalaya sudah dibentuk Tim 9 yang bertugas untuk merumuskan berbagai rekomendasi, seperti pilihan-pilihan apakah akan dilembagakan atau hanya jadi event, forum atau lainnya. Yang juga sudah ditindaklanjuti dengan beberapa putaran diskusi di tingkat lokal...	FK.	Masalah konsolidasi FK, dan belum disepakatinya soal bentuk lembaga.	3	Konsolidasi (FK); Bentuk kelembagaan (FK).
641	Didi	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Terus bahwa FK ini juga secara organisasi bersifat cair. Walaupun secara komunitas di FK ada banyak warna, ada yang <i>consent</i> di pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, lingkungan... Tapi ketika masuk di FK ini jadi satu warna, dalam artian bagaimana melakukan sebuah penyadaran politik di masyarakat. Itu pertama. Kedua, bagaimana melakukan penyadaran pada kantong-kantong suara yang menjadi ladang suara partai, bagaimana calon pimpinan yang memiliki kompetensi. Berangkat dari situ, secara pribadi-pribadi, kawan-kawan FK ini melakukan penyadaran-penyadaran ke lingkungannya. Mangkanya saya berasumsi bahwa FK ini 80% lebih ke politik. Walaupun kalau melihat <i>basic</i> masing-masing itu berasal dari berbagai bidang tadi, yang ketika tergabung dalam FK ini menjadi satu persepsi.	FK; NGO; Komunitas.	Peserta FK berasal dari beragam lembaga dengan bidang/isu beragam. Di FK semuanya masuk ke arena politik saat menjelang Pilkada dan pasca Pilkada.	3	Bentuk organisasi; Plural; Pendidikan politik; Saluran politik/aspirasi.
642	Didi	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	FK ini salah satu forum yang unik, Pak Candra. Bisa dilihat, tapi sulit untuk diraba. Diskusi dimanapun kita selalu cair. Tidak ada klasifikasi cluster apakah senior atau junior, mumpuni atau tidak mumpuni... semua bisa bicara dan diskusi bareng...	FK; Pemerintah daerah; DPRD; NGO; Komunitas.	FK lembaga yang secara struktur "cair", dan komunikasinya juga "cair".	3	Interaksi (antar peserta FK); Budaya organisasi; Egaliter.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
643	Didi	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Jadi Alhamdulillah, suara saya yang mengatasnamakan FK ini juga di dengar sama Dewan ya... Nah itu uniknya FK itu, bisa dilihat tapi nggak bisa diraba... Kita bisa bicara kapan saja dimana saja tanpa ada badami heula... Seperti Pak Ihsan ketika diundang pihak lain juga bicara FK... Nah ini cairnya, tidak ada larangan... Jadi FK itu cair, kapan saja dimana saja kita bisa bawa bendera FK...	FK; Pemerintah daerah; DPRD; NGO.	Nama/identitas FK juga kerap digunakan	3	Bentuk organisasi (FK); Mekanisme organisasi (FK).
644	Didi	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Nah ke depannya juga kita perlu bahas akan seperti FK kita ini, karena kita perlu langkah-langkah yang lebih mujarab, karena di 2013 kita juga akan menghadapi Pilgub... Gubernur yang bagaimana yang memiliki kompetensi? <i>Ulah Gubernur anu sekedar sohor</i> ... Tapi bagaimana calon Gubernur yang betul-betul milik masyarakat... Mungkin disitu inti persoalannya... Kemarin juga waktu Pilkada kita mendorong salah satu calon, meskipun <i>eta teh lain milik nya</i> ... <i>Akhirma mah kumaha Gusti Allah</i> ... Jadi Pak Candra, waktu Pilkada kemarin itu agak kecewa juga... harapannya Bupati terpilih <i>teh kudu batur urang</i> ... <i>Tapi nya' ncan milik eta</i> ...	FK; Kontestan Pilkada.	FK berperan dalam Pemilihan Umum Gubernur Jawa Barat 2013.	3	Peran politik FK (perluasan arena politik FK).
645	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Kalau pertanyaan keanggotaan mungkin dari situasi organisasi yang masih cair, bahkan perdebatan soal bentuk kelembagaan apakah ini menjadi lembaga atau sekedar event, itu belum 100% selesai dibahas dan diputuskan... karena saking cairnya itu... Maksudnya relasi yang dibangun di awal terkait siapa yang bergabung dalam FK, ini kita identifikasi sebagai orang-orang yang punya kecenderungan lain di Kabupaten Bandung, yaitu orang-orang yang sepakat dengan gagasan orang-orang yang terlebih dulu sudah bergabung di FK. Tentunya ini juga membuat relasinya menjadi unik dan cair tadi...	FK.	Keanggotaan FK bersifat cair.	3	Bentuk organisasi (FK); Keanggotaan (FK); Defiant (dalam politik).
646	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Jadi keanggotaan FK ini individu, tidak mengatasnamakan organisasi. Secara kesepakatan tidak tertulis, siapapun bisa terlibat dalam Forum Konstituen. Karena kita yakin orang-orang yang mau terlibat dalam Forum Konstituen memang mereka yang punya kecenderungan lain di Kabupaten Bandung... Bahwa masing-masing juga punya kepentingan ya sudah tahu sama tahu. Cuma itu kemudian tidak dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan Forum Konstituen.	FK; NGO; Komunitas.	Kepesertaan di FK bersifat individual, dan pada prinsipnya bersifat terbuka.	3	Keanggotaan (FK); Kepentingan; Plural.

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
647	Wahyu	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Sehingga FK ini menjadi cair, tidak ada tumpang tindih secara kelembagaan, individu, maupun partai. Di FK ini orang partai juga ada, orang-orang di NGO juga ada... Tapi bagaimana kita bisa merumuskan kerja-kerja kolektif sebagai cita-cita bersama dari berbagai wilayah. Sehingga ini lho skenario kita untuk melakukan perubahan itu tadi...	FK; NGO; Partai politik.	Peserta FK berasal dari beragam latar belakang, yang kemudian menyepakati peran dan agenda bersama.	3	Bentuk/sifat lembaga; Aksi kolektif; Skenario perubahan.
648	Wahyu	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Kendalanya itu tadi, komunikasi yang berkurang... Apa yang sudah dilakukan? Apa hasilnya?... Karena saya belakangan juga kurang intensif dengan FK, itu juga menjadi pertanyaan saya, yang mungkin juga menjadi pertanyaan banyak kawan FK lainnya... Karena, entah benar atau salah, nanti bisa diklarifikasi kawan lain, bahwa ada harapan di awal bahwa dengan adanya FK itu akan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah dihasilkan gitu...	FK; Masyarakat.	Komunikasi yang berkurang di internal FK.	3	Komunikasi (internal FK); Sosialisasi (ke masyarakat).
649	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	... dan menetapkan siapa yang menjadi penjaga gawang untuk FK ini. Karena misalnya dulu waktu Ali dipilih menjadi penanggung jawab saat itu, dia menjabat 3 posisi yang strategis, sebagai Koordinator FDA, Ketua PSDK, dan juga Koordinator FK. Kebayang bagaimana dia memerankan diri di ketiga posisi. Ibarat 1 striker untuk 3 tim sepak bola, he...he... Prinsipnya ke depan, kalau ingin mengurai misteri itu ya, adalah juga menjawab persoalan itu, yang perlu didiskusikan di internal FK... Karena itu kita juga mungkin harus mendiskusikan soal komposisi di Tim 9. Karena kuncinya disitu. Kalau mandatnya memang di Tim 9, ya perlu dibicarakan juga di Tim tersebut.	FK; PSDK; FDA.	Faktor kepemimpinan di FK juga perlu dipikirkan, karena di awal FK memang ada kesulitan mencari figur kepemimpinan tersebut.	3	Kepemimpinan (internal FK); Konsolidasi; Perencanaan (internal FK).
650	Tarum	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Untuk mengatasi kebuntuan itu, mungkin satu langkah strategis yang bisa diambil Tim 9 waktu Musrenbang 2012 kemarin, dengan memandatkan Setiawan untuk mengkoordinasikan Tim 9 ini, dan juga mewakili Forum Konstituen ketika berhubungan dengan pihak lain.	FK; Tim 9; Setiawan.	Upaya sementara mengatasi masalah kepemimpinan di FK.	3	Kepemimpinan (internal FK).

No	Nama	P/L	Posisi	Sumber	Pernyataan	Aktor	Isu	P	Konsep
651	Didi	L	FK	FGD FK, 19 Apr 2012	Kalau khusus membahas itu tampaknya seluruh Tim 9 harus dapat berkumpul dulu ya... Karena pada Tim 9 ini kita pernah memandatkan untuk membahas sejumlah hal tadi. Dan Tim 9 tidak usah bubar setelah itu... Karena saya trauma, kalau FK itu diformalkan, nanti malah "Tukdog", dibentuk lalu ngajedok... Dan terjadilah saling gesek, gasak, gisik, gosok... Nah itu, saya tidak ingin seperti itu... Kalau kita mau bersifat cair, sudah saja kita buat kesepakatan, baik tertulis ataupun tidak tertulis... Jadi bentuknya bukan AD/ART, tapi kesepakatan bersama. Jadi kita tidak merasa risih dan sungkan, ketika kita berkumpul sesama kawan... Begitu menurut saya... Saya setuju yang dikatakan Wahyu, bahwa kita berasal dari beragam lembaga dan kapasitas, yang ketika di FK itu kita satu tujuan... Itu, disitu cantiknya FK, Pak Candra...	FK; Tim 9.	Tim 9 perlu difungsikan, dan FK tidak perlu membangun mekanisme yang kaku, cukup kesepakatan bersama.	3	Organisasi "cair"; Kesepakatan.